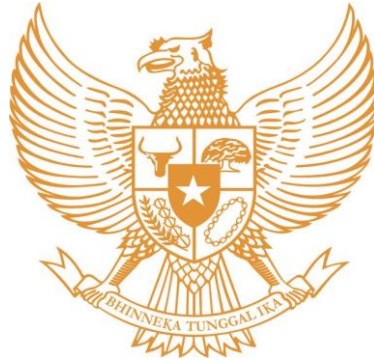




SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025, perencanaan pembangunan tahunan Kota Bogor harus mengacu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat, dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor;
- b. bahwa penyusunan perencanaan pembangunan Kota Bogor Tahun 2026 bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
- c. bahwa untuk menjamin keselarasan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2026;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).



8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);



18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.



7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
13. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapperida adalah Kepala Bapperida Kota Bogor.

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan RKPD merupakan:
 - a. dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
 - b. penjabaran dari RPJMD Kota Bogor berpedoman kepada RKP Tahun 2026 yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, indikator pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Maksud penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2026.
- (3) Tujuan Penetapan RKPD adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.



BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 3

Kepala Bapperida melakukan penelaahan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2026

Pasal 4

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan sasaran Pembangunan tahun 2026

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB V PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.



BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut:

- Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana pembangunan;
- Kepala Bapperida menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
- Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
- Kepala Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah; dan
- hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

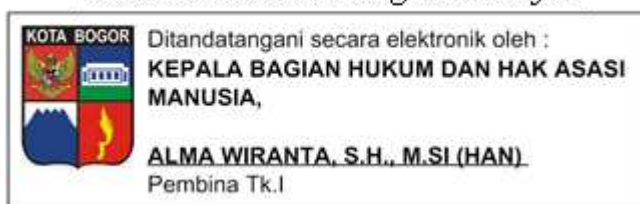
Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Juli 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Salinan sesuai dengan aslinya



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD.

DENNY MULYADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 20



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2026.



Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 6

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 10

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 11

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD 12

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI..... 16

2.1. KONDISI UMUM DAERAH 16

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi..... 16

2.1.1.1. Karakteristik Wilayah 16

2.1.1.2. Potensi Wilayah dan Daerah Rawan Bencana 27

2.1.1.3. Aspek Demografi..... 36

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 38

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... 38

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial..... 46

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 54

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar..... 54

2.1.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan 54

2.1.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan 58

2.1.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... 61

2.1.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman 63

2.1.3.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
63

2.1.3.1.6. Sosial 64

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar 65

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja 65

2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 66

2.1.3.2.3. Pangan 66

2.1.3.2.4. Pertanahan..... 67

2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup 68

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 70

2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan..... 71

2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 71

2.1.3.2.9. Perhubungan 72

2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informasi..... 73

2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 74

2.1.3.2.12. Penanaman Modal 75

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga 75

2.1.3.2.14. Kebudayaan 76

2.1.3.2.15. Perpustakaan 76

2.1.3.2.16. Kearsipan..... 77

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 78

2.1.3.3.1. Pariwisata 78

2.1.3.3.2. Pertanian 78

2.1.3.3.3. Perdagangan..... 79

2.1.3.3.4. Perindustrian 79

2.1.3.4. Urusan Penunjang..... 80

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan..... 80

2.1.3.4.2. Keuangan 81

2.1.3.4.3. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan 82

2.1.3.4.4. Pengawasan 82

2.1.3.4.5. Penelitian dan Pengembangan 83

2.1.3.4.6. Sekretariat Daerah 83

2.1.3.4.7. Sekretariat DPRD 84

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 85

2.1.4.1. Indeks Inovasi Daerah 85

2.1.4.2. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto serta Ekspor Barang dan Jasa dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran 85

2.1.4.3. Indeks Infrastruktur 86

2.1.4.4. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 87

2.1.4.5. Indeks Pelayanan Publik 88

2.1.4.6. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban 88

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD 89

2.2.1. Capaian Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 89

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2024 92

2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 100

2.2.4. Capaian Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 107

2.2.5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 122

2.2.5.1. Pendidikan 123

2.2.5.2. Kesehatan 124

2.2.5.3. Pekerjaan Umum 125

2.2.5.4. Perumahan Rakyat 125

2.2.5.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ... 125

2.2.5.6. Sosial 126

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 127

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 127

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar 133

2.3.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 135

2.3.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pilihan 138

2.3.5. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Fungsi Penunjang 138

2.3.6. Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 untuk Dasar Identifikasi Isu Strategis 139

BAB 3 KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026 141

3.1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 141

3.1.1. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Global 141

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional 144

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Jawa Barat 147

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Bogor 156

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 161

3.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 163

3.2.1.1. Pendapatan Daerah 163

3.2.1.2. Belanja Daerah 172

3.2.1.3. Neraca Daerah 184

3.2.1.4. Analisis Pembiayaan	190
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026.....	192
3.2.2.1. Rencana Pendapatan Daerah	193
3.2.2.2. Rencana Belanja Daerah Tahun 2026	196
3.2.2.3. Rencana Pembiayaan Daerah.....	200
3.2.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2026	204
3.2.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah 2026.....	205
3.2.3.2. Arah Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Dari Pendapatan Transfer 2026	206
3.2.3.3. Arah Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Dari Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2026.....	207
3.2.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026	208
3.2.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2026	218
3.2.6. Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026.....	219
3.2.7. APBN (Dana Transfer Dan Belanja Dipa K/L Di Daerah).....	220
3.2.8. APBD Provinsi (Dana Transfer Dan Belanja Di Daerah Kabupaten/Kota) 220	
3.2.9. Dana Umat.....	221
3.2.10. Peran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Dalam Pembangunan Daerah	221
3.2.11. Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Atau Public Private Partnership (PPP).....	224
3.2.12. Hibah	224
3.2.13. Pendanaan Obligasi Daerah Dan Sukuk.....	225
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	226
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	226
4.1.1. Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya	227
4.1.2. Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat ..	237
4.1.3. Tujuan dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor	242
4.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor	247
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2026	269
4.2.1. Isu strategis dan Tema Pembangunan Kota Bogor Tahun 2026	269
4.2.2. Keterkaitan Isu Strategis dengan Permasalahan Pembangunan	275
4.2.3. Keterkaitan Isu Strategis dengan Arah Kebijakan RKPD dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.....	277
4.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2026.	299
4.2.5. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026.....	307
4.2.6. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional Pada RKP Tahun 2026	308
4.3. PROGRAM PRIORITAS DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2026	321
4.3.1. Penjabaran Prioritas Pembangunan ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah	327
4.3.2. Dukungan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional dalam Tahun 2026 389	
4.3.3. Dukungan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan arah kebijakan pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional Tahun 2026.....	415
4.3.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	420

4.3.5. Arah Kebijakan Pendekatan Spasial 430

4.3.5.1. Kebijakan Rencana Struktur Ruang 434

4.3.5.2. Kebijakan Rencana Pola Ruang 435

4.3.5.2.1. Kawasan Peruntukan lindung meliputi: 435

4.3.5.2.2. Kawasan peruntukan budi daya ditetapkan sebagai berikut:..... 436

4.3.5.2.3. Arah Pemanfaatan Ruang 442

4.4. Inovasi Daerah..... 493

4.5. Kerjasama Daerah 493

4.6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)..... 493

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH..... 495

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH..... 495

5.2. REKAPITULASI RKPD DAN RENJA TAHUN 2026 PER SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH, PER URUSAN PEMERINTAHAN DAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 831

5.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN PENGANGGARAN DARI SUMBER ANGGARAN APBD PROVINSI JAWA BARAT 848

5.4. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA BOGOR 918

BAB 6 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 1043

6.1. PROYEKSI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KOTA BOGOR TAHUN 2026 1044

6.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1044

6.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1046

BAB 7 PENUTUP..... 1060

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor 16

Tabel 2.2 Luas Kota Bogor Menurut Ketinggian 19

Tabel 2.3 Jenis Tanah di Kota Bogor 20

Tabel 2.4 Jenis Batuan di Kota Bogor 21

Tabel 2.5 Rata-rata suhu di Kota Bogor Tahun 2020–2024 23

Tabel 2.6 Jumlah Hari hujan dan curah hujan di Kota Bogor Tahun 2020–2024..... 23

Tabel 2.7 Luas Sebaran Jenis Penggunaan Lahan di Kota Bogor Tahun 2023..... 25

Tabel 2.8 Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor 27

Tabel 2.9 Kerentanan Banjir per Kecamatan di Kota Bogor 31

Tabel 2.10 Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor 32

Tabel 2.11 Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor 33

Tabel 2.12 Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor 34

Tabel 2.13 Struktur Kependudukan di Kota Bogor Tahun 2024 36

Tabel 2.14 Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Produktivitas dan Angka Ketergantungan Kota Bogor Tahun 2020-2024 37

Tabel 2.15 Jumlah Pemeluk Agama di Kota Bogor Tahun 2024..... 38

Tabel 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor dan Wilayah Sekitar..... 45

Tabel 2.17 Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2024 54

Tabel 2.18 Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun 2020 - 2024 54

Tabel 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Bogor 55

Tabel 2.20 Perkembangan Sarana Prasarana dan Sumber daya Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2020 - 2024..... 58

Tabel 2.21 Distribusi Penduduk Kelompok Rentan di Kota Bogor Tahun 2024 58

Tabel 2.22 Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Bogor Tahun 2024 59

Tabel 2.23 Data Jumlah Posyandu, Posyandu Aktif dan Posbindu per Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2024..... 60

Tabel 2.24 Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024 61

Tabel 2.25 Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum di Kota Bogor 62

Tabel 2.26 Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Penataan Ruang di Kota Bogor 62

Tabel 2.27 Indikator Rumah Layak Huni di Kota Bogor Tahun 2020 – 2024 63

Tabel 2.28 Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bogor 64

Tabel 2.29 Indikator Sosial di Kota Bogor Tahun 2020-2024..... 65

Tabel 2.30 Indikator Ketenagakerjaan di Kota Bogor 65

Tabel 2.31 Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor 66

Tabel 2.32 Indikator Pangan Kota Bogor Tahun 2020 – 2024 67

Tabel 2.33 Indikator Urusan Pertanahan di Kota Bogor Tahun 2020-2024 68

Tabel 2.34 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor Tahun 2020 – 2024 70

Tabel 2.35 Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor Tahun 2020-2024..... 70

Tabel 2.36 Perkembangan partisipasi masyarakat di Kota Bogor Tahun 2020-2024 71

Tabel 2.37 Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2020-2024..... 72

Tabel 2.38 Indikator Urusan Perhubungan Kota Bogor Tahun 2020-2024 73

Tabel 2.39 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bogor Tahun 2020-2024..... 74

Tabel 2.40 Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Bogor Tahun 2020-2024 74

Tabel 2.41 Perkembangan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)..... 75

Tabel 2.42 Indikator Kepemudaan dan Olahraga di Kota Bogor Tahun 2020-2024 75

Tabel 2.43 Indikator Urusan Kebudayaan di Kota Bogor Tahun 2020-2024..... 76

Tabel 2.44 Perkembangan Jumlah Pengunjung dan Koleksi Buku di Perpustakaan di Kota Bogor 77

Tabel 2.45 Indikator Kearsipan Kota Bogor Tahun 2020-2024 77

Tabel 2.46 Indikator Pariwisata Kota Bogor Tahun 2020-2024..... 78

Tabel 2.47 Indikator Urusan Pertanian di Kota Bogor Tahun 2020-2024 79

Tabel 2.48 Kontribusi dan Laju Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Kota Bogor 79

Tabel 2.49 Indikator Urusan Perindustrian di Kota Bogor 80

Tabel 2.50 Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor Tahun 2020-2024 80

Tabel 2.51 Indikator Urusan Keuangan Kota Bogor Tahun 2020-2024..... 81

Tabel 2.52 Indikator Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bogor Tahun 2020-2024 82

Tabel 2.53 Indikator Urusan Pengawasan Kota Bogor Tahun 2020-2024 82

Tabel 2.54 Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Bogor Tahun 2020-2024 83

Tabel 2.55 Indikator Sekretariat Daerah di Kota Bogor 84

Tabel 2.56 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2020-2024	84
Tabel 2.57 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bogor Tahun 2020-2024.....	86
Tabel 2.58 Indeks Infrastruktur Kota Bogor Tahun 2020-2024	87
Tabel 2.59 Jumlah Kriminalitas di Kota Bogor Tahun 2020-2024	89
Tabel 2.60 Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2024	89
Tabel 2.61 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024	90
Tabel 2.62 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bogor Tahun 2024 yang Tidak Tercapai	92
Tabel 2.63 Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024	93
Tabel 2.64 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025.....	100
Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024.....	107
Tabel 2.66 Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Per Jenis Pelayanan Dasar	123
Tabel 2.67 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Per Jenis Pelayanan Dasar	124
Tabel 2.68 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Per Jenis Pelayanan Dasar	125
Tabel 2.69 Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Per Jenis Pelayanan Dasar	125
Tabel 2.70 Capaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Per Sub Urusan	126
Tabel 2.71 Rincian Capaian SPM Trantibumlinmas Per Jenis Pelayanan Dasar	126
Tabel 2.72 Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial Per Jenis Pelayanan Dasar	126
Tabel 2.73 Analisis Permasalahan sebagai Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	128
Tabel 2.74 Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024	139
Tabel 3.1 Target Ekonomi Makro Jawa Barat Tahun 2025-2026	147
Tabel 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Komponen PDRB Tahun 2025-2026 (Persen)	151
Tabel 3.3 Target Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026	151
Tabel 3.4 Indikator Ekonomi Makro Kota Bogor	156
Tabel 3.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar) Kota Bogor Tahun 2020 – 2024.....	157
Tabel 3.6 Proyeksi Pertumbuhan Komponen PDRB Produksi Tahun 2025-2026 (Persen)	159
Tabel 3.7 Target Indikator Makro Pembangunan.....	160
Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	165
Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Transfer Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	169
Tabel 3.10 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	171
Tabel 3.11 Analisa Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Bogor	172
Tabel 3.12 Total Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	173
Tabel 3.13 Realisasi Belanja Operasi Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	175
Tabel 3.14 Realisasi Komponen Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2019-2024	177
Tabel 3.15 Realisasi Belanja Transfer Kota Bogor Tahun 2019-2024	179
Tabel 3.16 Alokasi Anggaran Per Urusan Kota Bogor Tahun 2019-2024	181
Tabel 3.17 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor Tahun 2019-2024	182
Tabel 3.18 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	183
Tabel 3.19 Kondisi Neraca Daerah Tahun 2019-2024.....	185
Tabel 3.20 Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	190
Tabel 3.21 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024.....	191
Tabel 3.22 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024	192
Tabel 3.23 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2026	193
Tabel 3.24 Rencana Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2026.....	194
Tabel 3.25 Rencana Pendapatan DBH Pajak Daerah Kota Bogor Tahun 2026.....	195
Tabel 3.26 Rencana Pendapatan Opsen Kota Bogor Tahun Anggaran 2026	195
Tabel 3.27 Rencana Pendapatan Transfer Kota Bogor Tahun 2026.....	195
Tabel 3.28 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2024 dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2026.....	196
Tabel 3.29 Persentase Rencana Anggaran Mandatory Spending Tahun 2026.....	197
Tabel 3.30 Rencana Anggaran Belanja Opsen PKB/BBNKB Tahun 2026	197
Tabel 3.31 Rencana Belanja Operasi Kota Bogor Tahun 2026	198
Tabel 3.32 Rencana Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2026.....	199
Tabel 3.33 Rencana Belanja Tidak Terduga Kota Bogor Tahun 2026.....	200
Tabel 3.34 Rencana Belanja Transfer Kota Bogor Tahun 2026	200
Tabel 3.35 Realisasi Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2021-2024 dan Rencana Pembiayaan Tahun 2026	200
Tabel 3.36 Rencana Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2026.....	201
Tabel 3.37 Struktur Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2026	202
Tabel 4.1 Telaah Lokasi Prioritas RPJMN 2025-2029 di Kota Bogor	229
Tabel 4.2 Telaah Dukungan RKPD Kota Bogor Terhadap Lokasi Prioritas RKP Tahun 2026	232
Tabel 4.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bogor.....	248
Tabel 4.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan RKPD Kota Bogor Tahun 2026.....	252
Tabel 4.5 Isu strategis dan Arah Kebijakan	273
Tabel 4.6 Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2026	276
Tabel 4.7 Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Perangkat Daerah	278

Tabel 4.8 Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2026 299

Tabel 4.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029 302

Tabel 4.10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 307

Tabel 4.11 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Indikator Sasaran Provinsi Jawa Barat dan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026 310

Tabel 4.12 Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah dalam Program dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 322

Tabel 4.13 Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 1 328

Tabel 4.14 Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada prioritas Pembangunan 2 346

Tabel 4.15 Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 3 361

Tabel 4.16 Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Kota Bogor Terhadap Program Prioritas Nasional 390

Tabel 4.17 Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Kota Bogor Terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 406

Tabel 4.18 Tingkat Dukungan Program Kegiatan terhadap Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2026 409

Tabel 4.19 Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Terhadap Pelaksanaan Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 415

Tabel 4.20 Rencana Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Bogor Tahun 2026 421

Tabel 4.21 Indikasi Program Pengembangan Wilayah Pelayanan 443

Tabel 5.1 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA (RENJA PD) BOGOR TAHUN 2026 496

Tabel 5.2 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026 831

Tabel 5.3 Proporsi Pagu RKPD Per Urusan Pemerintahan 832

Tabel 5.4 Bidang Urusan dan Program Tahun 2026 834

Tabel 5.5 Porpori Anggaran Bidang Urusan Tahun 2026 839

Tabel 5.6 Pagu RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional 840

Tabel 5.7 Pagu RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi 843

Tabel 5.8 Pagu RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Bogor 846

Tabel 5.9 Proporsi Prioritas Pembangunan Tahun 2026 848

Tabel 5.10 Rencana Usulan Pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 849

Tabel 5.11 Pagu RKPD Kegiatan Janji Politik Walikota 851

Tabel 5.12 Rencana Pendanaan Pelaksanaan SPM Tahun 2026 874

Tabel 5.13 Rencana Pendanaan Tematik Stunting Tahun 2026 881

Tabel 5.14 Rencana Pendanaan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 886

Tabel 5.15 Rencana Pendanaan Pencapaian IPM 2026 890

Tabel 5.16 RENCANA PENDANAAN PENCAPAIAN INDEKS GINI RASIO 898

Tabel 5.17 RENCANA PENGANGGARAN PENCAPAIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 902

Tabel 5.18 RENCANA ANGGARAN PENCAPAIAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI 905

Tabel 5.19 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2026 912

Tabel 5.20 REKAP PERMASALAHAN USULAN POKIR TAHUN 2026 KOTA BOGOR 918

Tabel 5.21 Hasil Identifikasi Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bogor 927

Tabel 5.22 Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD 2026 yang terverifikasi 1008

Tabel 5.23 KESELARASAN ASTACITA DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 1017

Tabel 6.1 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor 2020-2026 1044

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bogor 1044

Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bogor 1046

Daftar Grafik

Grafik 2.1 Distribusi Penggunaan Lahan (%).....25

Grafik 2.2 Indeks Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2020–2024 30

Grafik 2.3 Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2024 37

Grafik 2.4 Perbandingan LPE Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor.....39

Grafik 2.5 Angka Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2020-2024.....40

Grafik 2.6 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.....40

Grafik 2.7 Garis Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2020-2024 41

Grafik 2.8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Jawa Barat 41

Grafik 2.9 Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun 2020-2024.....42

Grafik 2.10 Perkembangan Rasio Gini di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 43

Grafik 2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional 2020-2024.44

Grafik 2.12 PDRB Per Kapita ADHB Kota Bogor dan Prov. Jawa Barat Tahun 2020-2024 45

Grafik 2.13 PDRB Per Kapita ADHK Kota Bogor dan Prov. Jawa Barat Tahun 2020-2024 46

Grafik 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor, Jawa Barat, dan Nasional tahun 2020-2024.....47

Grafik 2.15 Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Bogor 2020-2024.....47

Grafik 2.16 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bogor Tahun 2020-2024 48

Grafik 2.17 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bogor 2020-2024 48

Grafik 2.18 Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kota Bogor Tahun 2020-2024 49

Grafik 2.19 Indeks Keluarga Sehat Tahun 2020-2023 50

Grafik 2.20 Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) di Kota Bogor Tahun 2020-2024....51

Grafik 2.21 Jumlah Kematian Bayi di Kota Bogor Tahun 2020-2024 51

Grafik 2.22 Jumlah Kematian Ibu di Kota Bogor Tahun 2020-2024.....52

Grafik 2.23 Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bogor Tahun 2020-2024.....53

Grafik 2.24 Indeks Pembangunan Gender di Kota Bogor Tahun 2020-2024.....53

Grafik 2.25 Indeks Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2020-2024 54

Grafik 2.26 Angka Literasi dan Numerasi SD Kota Bogor 56

Grafik 2.27 Angka Literasi dan Numerasi SMP Kota Bogor 57

Grafik 2.28 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit di Kota Bogor Tahun 2020-2024 60

Grafik 2.29 Perkembangan IKLH, IKA, IKU dan IKTL di Kota Bogor.....69

Grafik 2.30 Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024 85

Grafik 2.31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Bogor Tahun 2020-2024 87

Grafik 2.32 Indeks Pelayanan Publik Kota Bogor Tahun 2020-2024.....88

Grafik 2.33 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 91

Grafik 2.34 Rekap Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024122

Grafik 2.35 Capaian SPM Kota Bogor Per Bidang Urusan dan Sub Bidang Urusan.....127

Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 163

Grafik 3.2 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 164

Grafik 3.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Per Komponen 165

Grafik 3.4 Pendapatan Transfer Pemerintah pusat Tahun 2019-2024.....170

Grafik 3.5 Komposisi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2019-2024 170

Grafik 3.6 Kemandirian Fiskal Kota Bogor Tahun 2019-2024.....171

Grafik 3.7 Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.....173

Grafik 3.8 Persentase Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja Operasi Tahun 2019-2024...175

Grafik 3.9 Persentase Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2019-2024 ..176

Grafik 3.10 Persentase Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 178

Grafik 3.11 Persentase Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2019-2024 178

Grafik 3.12 Total Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Bogor Tahun 2019-2024.....179

Grafik 3.13 Realisasi Belanja Transfer Terhadap Anggaran Belanja Transfer Kota Bogor Tahun 2019-2024 179

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Tahun 2026 2

Gambar 1.2 Tahapan Proses Penyusunan RKPD Tahun 2026 4

Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.....11

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Bogor.....18

Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lereng Kota Bogor.....19

Gambar 2.3 Peta Ketinggian Lahan Kota Bogor.....20

Gambar 2.4 Peta Geologi Regional Kota Bogor 21

Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2023 26

Gambar 2.6 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bogor 29

Gambar 2.7 Peta Kerentanan Banjir Kota Bogor 31

Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor 32

Gambar 2.9 Peta Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor 33

Gambar 2.10 Peta Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor 34

Gambar 2.11 Infografis Kebencanaan Kota Bogor Tahun 2024.....34

Gambar 2.12 Peta Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kota Bogor 36

Gambar 3.1 Trayektori Pertumbuhan Ekonomi Nasional.....146

Gambar 3.2 Kolaborasi Pendanaan Pembangunan 162

Gambar 4.1 8 Misi (Asta Cita) Prioritas Nasional.....228

Gambar 4.2 Target Indikator Makro Pembangunan Nasional 2025-2029 228

Gambar 4.3 Prioritas Pembangunan RKP 2026.....230

Gambar 4.4 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026.....231

Gambar 4.5 Target Makro Provinsi Jabar 2025-2029 237

Gambar 4.6 Visi, Misi dan 9 Langkah Ngawangun Jawa Barat 240

Gambar 4.7 Target Makro Pembangunan Provinsi Jabar 2026 241

Gambar 4.8 Peta Rencana Struktur Ruang.....440

Gambar 4.9 Peta Rencana Pola Ruang 441

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) Tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi, karena pada tahun 20 Februari Tahun 2025 dilantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Periode Tahun 2025-2029. Sebagaimana UU No. 25 tahun 2004 dan UU No. 23 tahun 2014 bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berikutnya disusun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah terpilih. Oleh karena itu pada tahun 2025 ini disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029, sebagai pedoman Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2029.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 ini disusun bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2026. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029, menyatakan bahwa Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Dengan demikian acuan RKPD 2026 adalah Rancangan RPJMD Kota Bogor dan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Rancangan RPJMD Kota Bogor 2025-2029 memuat Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, yaitu Visi : Bogor Beres Bogor Maju, dengan Misi : Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera dan Bogor Lancar. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 mengusung tema Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Menopang Daya Saing Daerah, dengan isu strategis : 1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Identitas Kota Bogor dari Aspek Sains dan Sejarah, Transformasi Ekonomi dan Masyarakat, Sistem Permukiman yang Nyaman dengan Penataan Ruang yang Berkelanjutan, Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi, Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global, Tata Kelola

Pemerintahan yang Kolaboratif, hal ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029 yang disahkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 147 menyebutkan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2026 berpedoman pada:

1. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045 pada periode berkenaan yaitu periode kelima, yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
2. RKP Tahun 2026 dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
3. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, DPRD Kota Bogor memberikan masukan dan saran berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan

Gambar 1.1
Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Tahun 2026



Sumber: Bappeda Kota Bogor, 2024

Proses Penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2026 dilaksanakan dengan pendekatan:

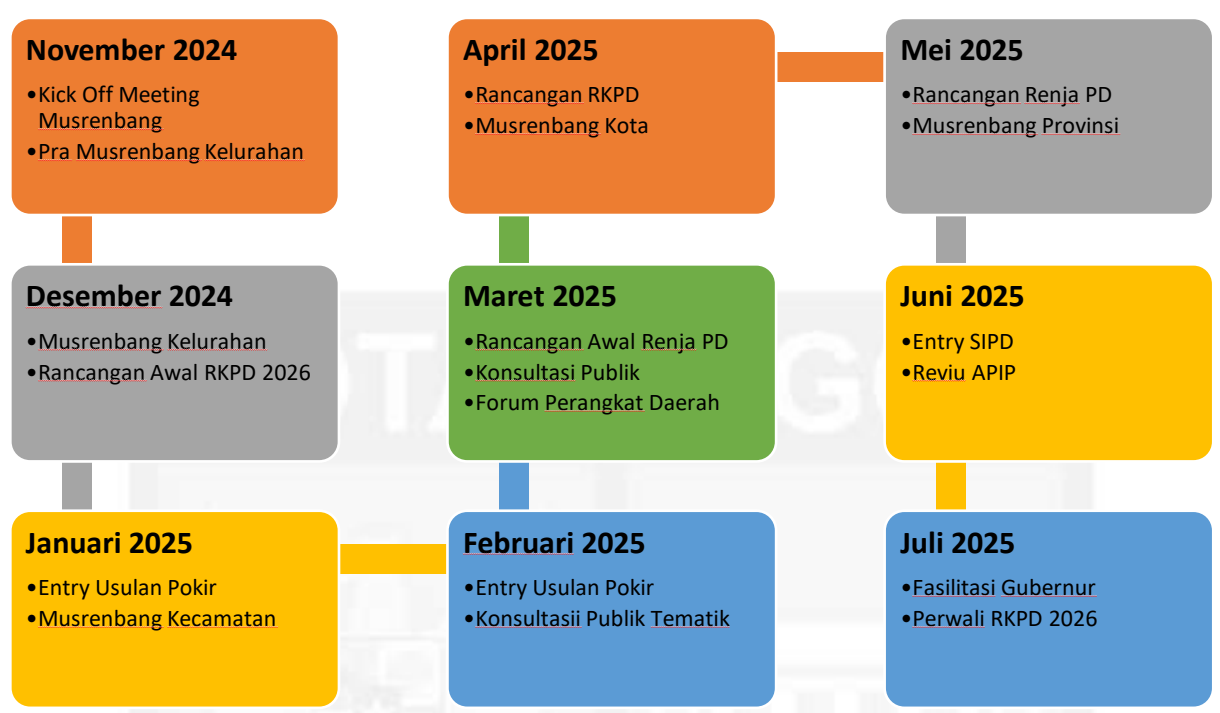
1. Top-down, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan dengan memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada Arah Kebijakan dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026, serta Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dan tergambar dalam proses pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota Bogor yang dilaksanakan pada Bulan April 2025 dengan menghadirkan Narasumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bappeda Jabar)

serta hadir dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional;

2. Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang mengakomodir usulan/kebutuhan masyarakat yang telah disepakati bersama melalui pelaksanaan Musrenbang di 68 (enam puluh delapan) Kelurahan yang dilaksanakan mulai dari bulan November sampai dengan bulan Desember Tahun 2024, dimana usulan/kebutuhan masyarakat tersebut kemudian dipilah menurut prioritas dan urgensi di Tingkat Kecamatan, disepakati melalui Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada Bulan Januari Tahun 2025 di 6 (enam) Kecamatan. Untuk usulan/kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas utama setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas teknis dan aparat wilayah dibahas dan disepakati melalui sidang kelompok dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah, LPM, Kecamatan serta unsur DPRD melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang Tingkat Kota pada Bulan April 2025 dan difinalkan saat Musrenbang Tingkat Kota.
3. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui penelaahan terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang sudah dipaduserasikan dengan usulan kegiatan yang bersifat bottom-up, top-down, partisipatif dan politis melalui Forum Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang kemudian disebut sebagai Forum Perangkat Daerah Musrenbang RKPD Tahun 2026, dilaksanakan pada Bulan Maret 2025.
4. Politis, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dibahas bersama dengan DPRD, ditunjukkan dengan diakomodirnya pemenuhan janji politis Kepala Daerah serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang teridentifikasi berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran Pembangunan. Proses ini dilaksanakan secara simultan pada Bulan Januari - Februari Tahun 2025;
5. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, hal ini ditunjukkan dengan diakomodirnya saran, masukan dan pendapat dari pemangku kepentingan seperti Akademisi, Badan atau Pelaku Usaha, Masyarakat atau Komunitas dan Media bersatu padu berkolaborasi serta berkomitmen untuk membangun Kota Bogor ke arah yang lebih baik dilaksanakan melalui Konsultasi Publik Tematik dan Konsultasi Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 pada Bulan Februari-Maret 2026.

Berikut disampaikan *timeline* pelaksanaan proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2026.

Gambar 1.2
Tahapan Proses Penyusunan RKPD Tahun 2026



Sumber: Bapperida Kota Bogor, 2025

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan berpedoman pada:
 - a. Hasil evaluasi RPJMD 2019-2024, RKPD Triwulan IV Tahun 2024 dan RKPD Triwulan I Tahun 2025.
 - b. Penelaahan terhadap target-target yang dituangkan dalam RKP Tahun 2026, Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Rancangan RPJMD serta Rancangan Renstra PD Kota Bogor Tahun 2025-2029;
 - c. Penelaahan terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 melalui Forum Koordinasi dengan Perangkat Daerah;
 - d. Penelaahan terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan memperhatikan saran dan masukan dari Akademisi dan Praktisi Pembangunan sebagaimana disampaikan pada saat Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.
2. Penyusunan Rancangan RKPD merupakan hasil dari tahapan proses perencanaan yang bersifat Bottom-up, Top-down, Teknokratik, Politis dan Partisipatif dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Musrenbang Tingkat Kelurahan (dilaksanakan mulai tanggal 03 November sampai dengan 23 Desember 2024);

- b. Musrenbang Tingkat Kecamatan (dilaksanakan pada bulan Januari 2025);
 - c. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan 31 Februari 2025;
 - d. Konsultasi Publik dengan pemangku kepentingan (dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025);
 - e. Forum Perangkat Daerah (dilaksanakan pada tanggal 19-27- Maret 2025);
 - f. Pra Musrenbang, berupa sidang kelompok berdasarkan kelompok urusan Sosial Budaya, Pemerintahan, Fisik, serta Ekonomi (dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025). Dalam sidang kelompok sebagaimana dimaksud, Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang disusun oleh Perangkat Daerah melalui pendekatan teknokratik sudah dipaduserasikan dengan usulan kegiatan yang bersifat bottom up yaitu usulan kegiatan masyarakat dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan, usulan kegiatan yang bersifat top down kebijakan pemerintah pusat/provinsi, dan usulan kegiatan yang bersifat politis baik itu aspirasi pokok pokok pikiran DPRD maupun janji-janji politis Kepala Daerah serta partisipatif berupa saran dan masukan dari pemangku kepentingan seperti Akademisi, Badan atau Pelaku Usaha, Masyarakat atau Komunitas dan Media;
 - g. Hasil Sidang Kelompok dalam Pra Musrenbang menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan.
 - h. Musrenbang Tingkat Kota (dilaksanakan pada tanggal 17 April 2025).
3. Rancangan Akhir RKPD Kota Bogor Tahun 2026⁵ disempurnakan berdasarkan pada Rancangan RKPD Kota Bogor Tahun 2026⁵ yang telah disampaikan pada saat Musrenbang Tingkat Kota, hasil Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Nasional serta verifikasi dan validasi akhir untuk Program dan Kegiatan Prioritas;
 4. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 selanjutnya dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah sejak tanggal 25 Juni 2025 serta difasilitasi oleh Gubernur melalui Bappeda Jabar pada Juli 2025 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Walikota Bogor tentang RKPD Kota Bogor Tahun 2026;
 5. Untuk meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal, dalam proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2026 didukung oleh sistem dan skema proses yang handal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel, diantaranya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Tahun 2026.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
6. Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 34. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana kerja Pemerintah Tahun 2026;
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

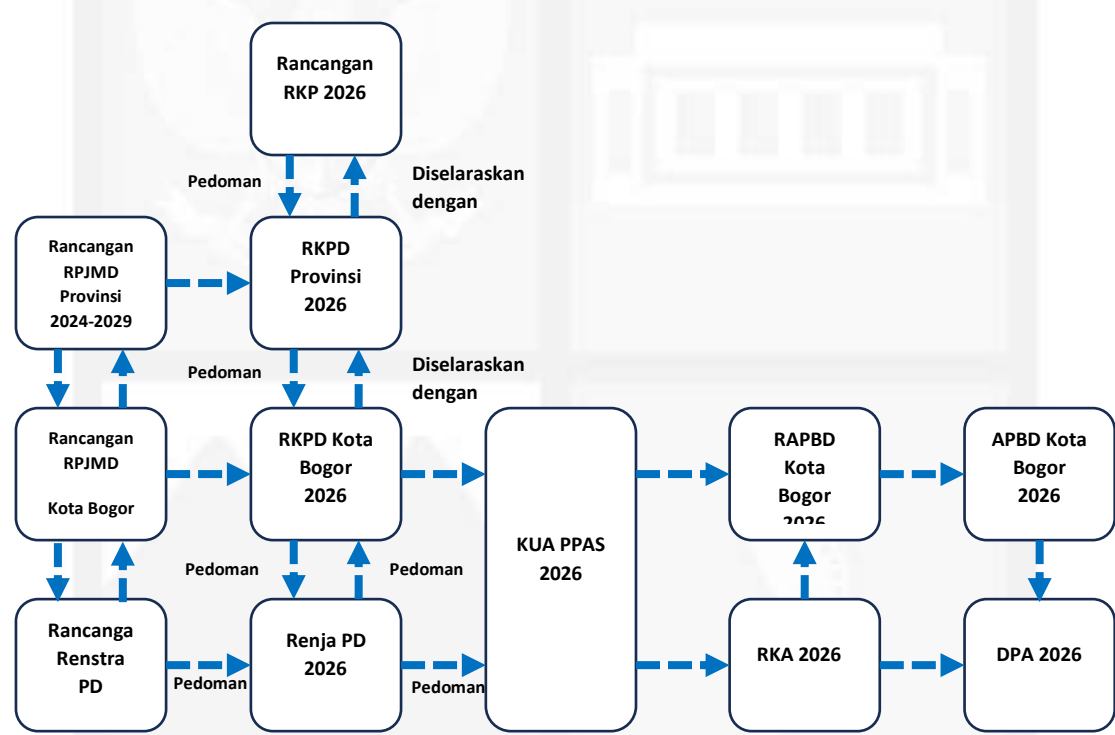
36. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
38. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);
45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);
46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2024);
47. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 11);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang sinergis dengan Rancangan RKP Tahun

2025 dan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, serta guna menjaga sinergitas, harmonisasi dan memastikan keselarasan, keterkaitan serta konsistensi tersebut dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan. RKPD Kota Bogor Tahun 2025 menjadi acuan dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2025, yang terdiri atas Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2025, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, yang selanjutnya akan dituangkan secara detail di dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2025, seperti digambarkan berikut ini:

Gambar 1.3
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber: Bapperida Kota Bogor, 2025

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah sebagai acuan/pedoman Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah:

- 1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Bogor Tahun 2026 sebagaimana telah dituangkan dalam target Tahunan Pencapaian Kinerja Utama

Pembangunan Kota Bogor sebagaimana telah dituangkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 dan dalam Rancangan RPJMD Kota Bogor 2025-2029;

2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi Masyarakat dan Dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas serta pemangku kepentingan lainnya;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026;
7. Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;
8. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026; dan
9. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2026 yang berisi pengertian ringkas RKPD, proses penyusunan RKPD, Kedudukan RKPD Tahun Rencana dalam periode Dokumen RPJMD, Keterkaitan antara Dokumen RKPD dan Dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2026 yang berisi pengertian ringkas RKPD, proses penyusunan RKPD, Kedudukan RKPD Tahun Rencana dalam periode Dokumen RPJMD, Keterkaitan antara Dokumen RKPD dan Dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2026 baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2026 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang relevan seperti RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RKP, dan RKPD Propinsi Jawa Barat.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2026.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2025

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2026 berkaitan dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran kondisi umum daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan sebagai berikut:

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Menjelaskan kondisi umum geografis Kota Bogor, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang terkait fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang terkait fokus urusan pelayanan wajib dan urusan pelayanan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang terkait fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas infrastruktur, fokus iklim investasi dan fokus sumber daya manusia.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menelaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Telaahan Hasil Evaluasi mencakup :

- 2.2.1 Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- 2.2.2 Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tahun ke-n;
- 2.2.3 Realisasi Program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
- 2.2.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan yang direncanakan;
- 2.2.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian RPJMD dan Kinerja Pembangunan Daerah;
- 2.2.6 Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab itu.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Merumuskan secara umum permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan atau tugas fungsi perangkat daerah. Identifikasi Permasalahan pembangunan daerah tersebut dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu:

- 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- 2.3.2 Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rancangan Awal RKP Tahun 2026, Arah Kebijakan Ekonomi yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, dan Arah Kebijakan di bidang Ekonomi dalam Rancangan Awal RKPD Kota Bogor Tahun 2026. Arah Kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan kebijakan yang akan dirumuskan oleh Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Pembiayaan Daerah, dan Belanja Daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Tujuan/Sasaran Pembangunan yang telah tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor 2025-2029.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Menjelaskan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 yang dikaitkan dengan Target Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kota Bogor 2025-2029.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas yang disusun berdasarkan Target Kinerja Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun Rencana.

BAB VII. PENUTUP

Menjelaskan pedoman pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Aspek geografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah Kota Bogor yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kota/kecamatan/desa.

Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu. Aspek demografi di Kota Bogor dapat digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

2.1.1.1. Karakteristik Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106°43'30"BT – 106°51'00"BT dan 6°30'30"LS – 6°41'00"LS. Kota Bogor berada pada posisi yang strategis dari segi pengembangan wilayah karena berada di tengah wilayah kabupaten Bogor merupakan bagian dari kawasan aglomerasi Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Cianjur (Jabodetabekjur)

Luas wilayah Kota Bogor sebesar 111,39 km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan (Tabel 2.1). Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Tanah Sareal. Kecamatan Bogor Selatan merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar, yaitu 30,50 km² (27,38%), sementara itu Kecamatan Bogor Tengah merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil, yaitu 8,37 km² (7,51%).

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase	Kelurahan	Jumlah RT/RW	
					RT	RW
1	Bogor Selatan	30,5021	27,38%	16	764	190
2	Bogor Timur	10,464	9,39%	6	357	67
3	Bogor Utara	18,1374	16,28%	8	558	109

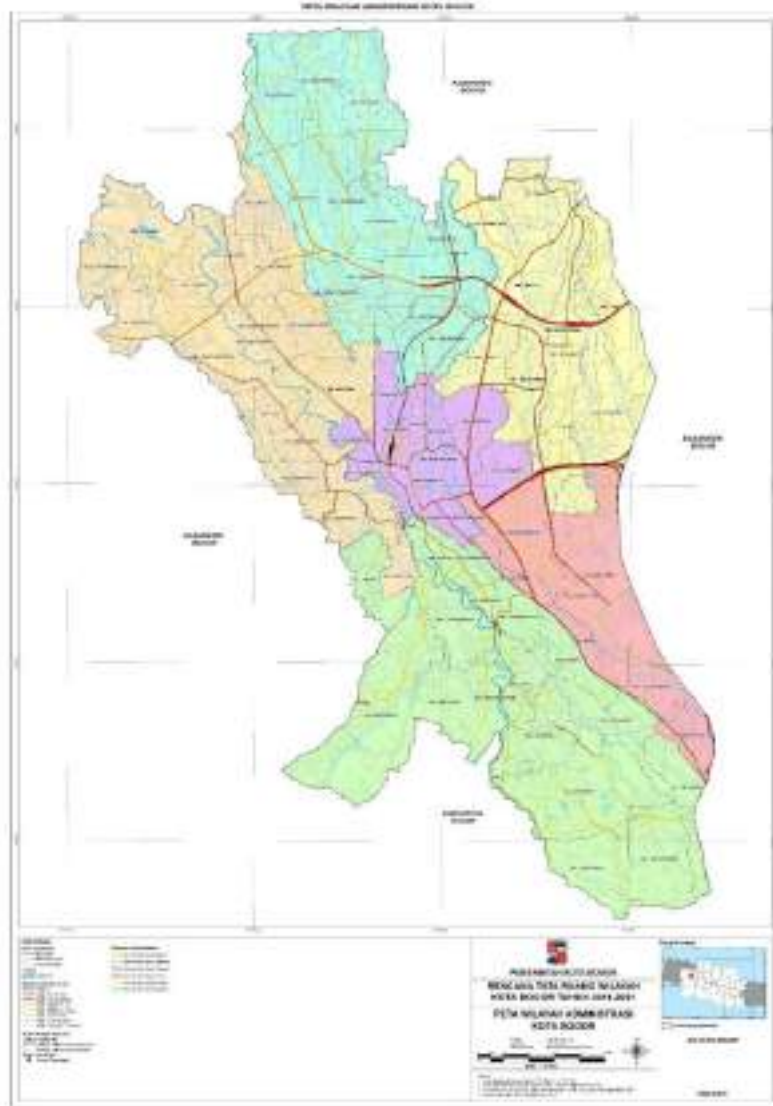
4	Bogor Tengah	8,3667	7,51%	11	433	99
5	Bogor Barat	23,3155	20,93%	16	853	197
6	Tanah Sareal	20,6001	18,49%	11	687	139
Total		111,3858	100%	68	3642	801

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka (2025)

Wilayah administrasi Kota Bogor secara spasial dapat dilihat pada Gambar 2.1. Secara karakteristik wilayah, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Tanah Sareal memiliki karakteristik wilayah *urban* yang dicirikan diantaranya dengan infrastruktur lebih lengkap, pusat bisnis dan ekonomi, pusat layanan pendidikan dan kesehatan, serta aksesibilitas yang lebih mudah. Sementara itu, Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Selatan memiliki karakteristik wilayah cenderung lebih dominan *rural* yang dicirikan diantaranya oleh fasilitas perekonomian, kesehatan dan pendidikan yang lebih terbatas serta struktur jaringan jalan yang lebih kecil. Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor.
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kota Bogor



Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031

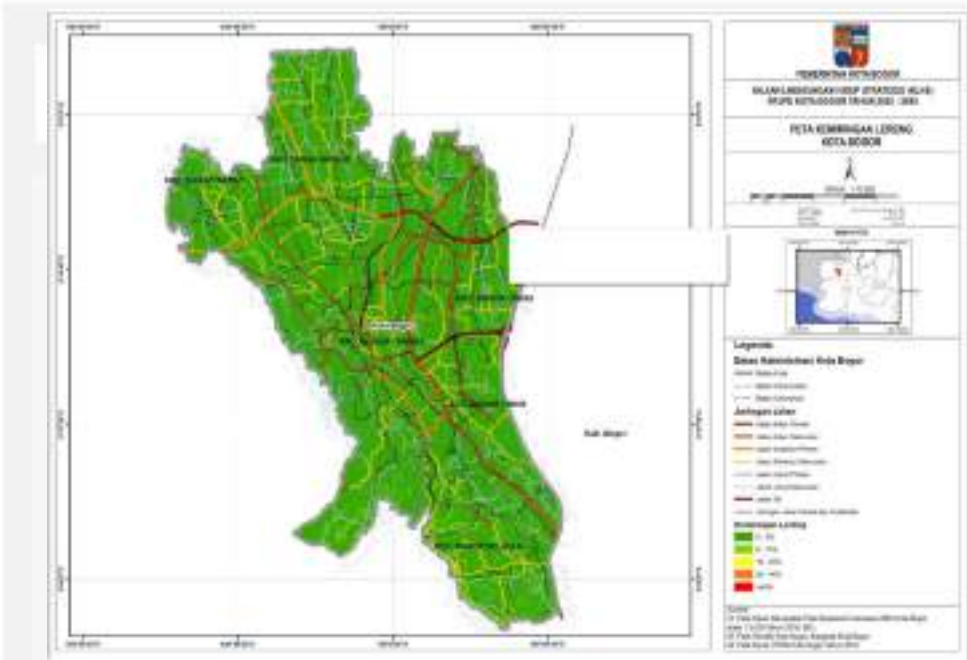
B. Topografi

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 m dan ketinggian maksimum 330 m di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan berkisar 0–8 persen, untuk luasan lahan datar seluas 10.415,03 hektar dan tersebar di enam kecamatan. Seluas 651,57 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 9–15 persen, seluas 63,88 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 16–25 persen, seluas 7,10 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 26–40 persen dan lahan sangat curam seluas 0,84 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen.

Lahan dengan kemiringan lebih dari 40% tersebar di Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal. Sedangkan untuk Kecamatan Bogor Utara tidak memiliki lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen. Kecamatan Bogor Barat merupakan

daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat rawan terhadap bencana longsor, karena mempunyai lahan terluas dengan kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat curam yaitu seluas 0,31 Ha. Kemudian Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Tengah juga memiliki luasan lahan sangat curam seluas 0,25 Ha sehingga dua kecamatan tersebut juga tergolong kawasan yang rawan terhadap bahaya longsor. Sementara itu, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal masing-masing memiliki lahan sangat curam 0,02 Ha dan 0,01 Ha.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kota Bogor



Sumber: Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031

C. Ketinggian Lahan

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan ketinggian bervariasi antara 150 – 550 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan dominasi luas pada ketinggian 200 mdpl yaitu seluas 3.765,02 Ha (33,80%). Sedangkan ketinggian 550meter merupakan luasan terendah yaitu hanya 5,42 Ha (0,05%). Untuk lebih jelas terkait ketinggian wilayah di Kota Bogor sebagaimana disampaikan pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Luas Kota Bogor Menurut Ketinggian

No	Ketinggian (MDPL)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	150 mdpl	176,72	1,59
2	200 mdpl	3.765,02	33,80
3	250 mdpl	2.721,23	24,43
4	300 mdpl	1.405,64	12,62
5	350 mdpl	1.215,40	10,91
6	400 mdpl	761,85	6,84
7	450 mdpl	890,17	7,99
8	500 mdpl	197,11	1,77
9	550 mdpl	5,42	0,05

No	Ketinggian (MDPL)	Luas (Ha)	Persentase (%)
Jumlah		11.138,56	100,00

Sumber: RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031

Gambar 2.3
Peta Ketinggian Lahan Kota Bogor



Sumber : Pemutakhiran Informasi Geospasial (Bappeda), 2023

D. Jenis Tanah

Jenis Tanah di Kota Bogor terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu jenis tanah andosol vitrik, latosol umbrik, dan regosol eutrik. Sebagian besar Kota Bogor didominasi oleh jenis tanah latosol umbrik dengan luas 10.661,77 Ha atau 95,72%. Tanah latosol umbrik menunjukkan bahwa Kota Bogor memiliki jenis tanah mineral, yang cukup cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Sementara jenis tanah dengan luasan terendah yaitu regosol eutrik dengan luas 228,48 Ha atau 2,05%.

Tabel 2.3
Jenis Tanah di Kota Bogor

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Andosol Vitrik	248,31	2,23
2	Latosol Umbrik	10.661,77	95,72
3	Regosol Eutrik	228,48	2,05
Jumlah		11.138,56	100,00

Sumber: RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031

E. Geologi

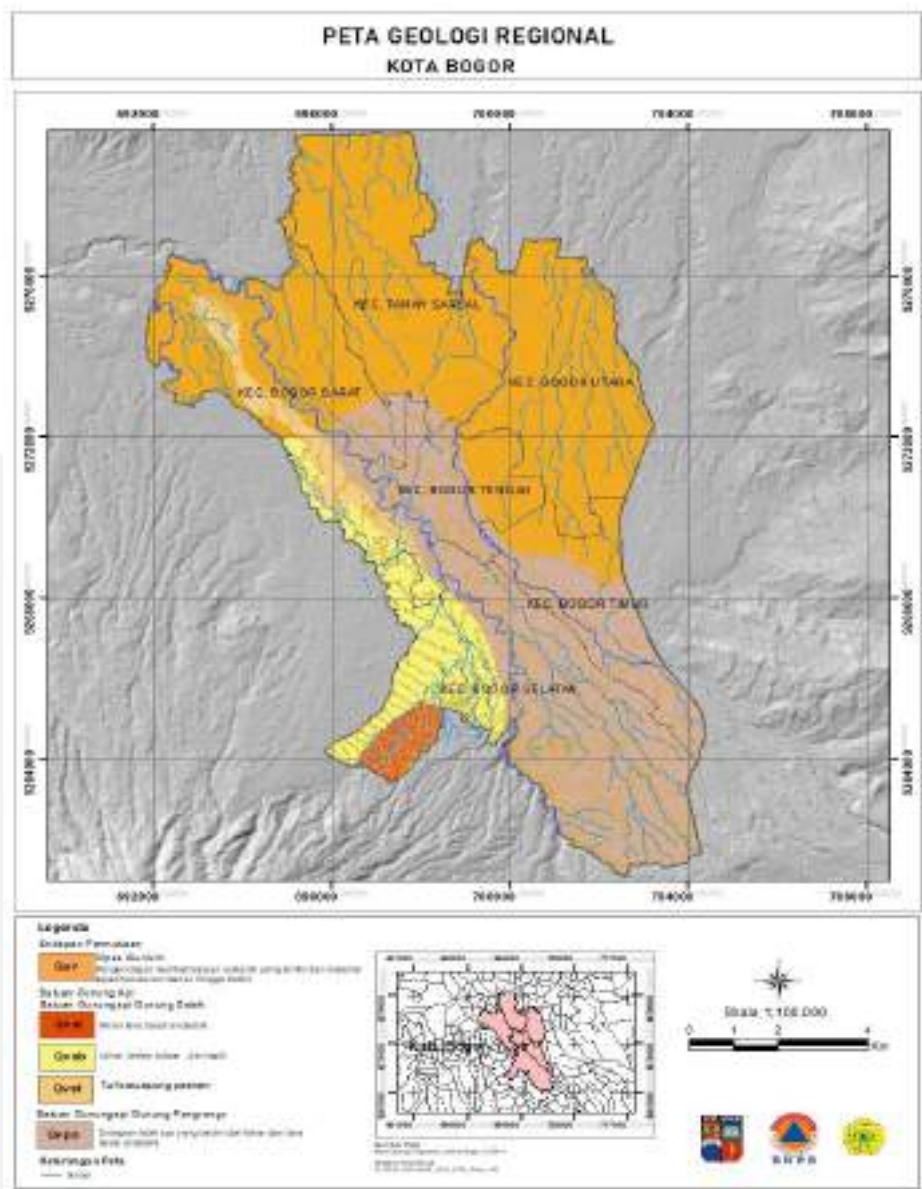
Kondisi geologi di Kota Bogor umumnya tersusun oleh batuan vulkanik dari Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Batuan vulkanik dari gunung tersebut tersebar di bagian selatan Kota Bogor, sedangkan bagian utara tersusun oleh material hasil pelapukan batuan vulkanik. Kemudian untuk batuan di sekitar aliran sungai utama berupa endapan aluvium yang terdiri dari kerikil dan pasir. Bagian barat Kota Bogor didominasi oleh Endapan Lebih Tua yang terdiri dari lahar dan lava dengan kandungan andesit basaltic (Qvpo). Batuan ini berasal dari Gunung Pangrango. Bagian timur disusun oleh batuan yang berasal dari Gunung Salak, terdiri dari lahar, breksi tufan, dan lapilli (Qvsb), aliran lava basal (qvsl), dan tuf batuapung pasiran (Qvst). Bagian utara didominasi oleh kipas alluvium yang merupakan pengendapan kembali dari batuan vulkanik, terdiri dari material endapan dengan ukuran lanau hingga kerikil (Qav).

Tabel 2.4 Jenis Batuan di Kota Bogor

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Batuan Gunung Api Pangrango	3.348,71	30,06
2	Batuan Gunung Api Salak	1.836,69	16,49
3	Breksi dan Lava Gunung Kencana dan Limo	50,21	0,45
4	Formasi Bojongmanik	42,11	0,38
5	Formasi Jatiluhur	39,30	0,35
6	Kipas Aluvium	5.821,54	52,26
Jumlah		11.138,56	100,00

Sumber: RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031

Gambar 2.4
Peta Geologi Regional Kota Bogor



Sumber : Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031

F. Klimatologi

Kondisi suhu merupakan salah satu isu yang penting terkait dengan perubahan iklim jangka panjang. Walaupun Kota Bogor bukan merupakan wilayah yang berada di kawasan pesisir tetapi peningkatan suhu ekstrem bisa berpengaruh terhadap aktivitas penduduk di Kota Bogor di masa mendatang. Kota Bogor, yang dikenal dengan julukan "Kota Hujan", memiliki karakteristik iklim tropis basah dengan curah hujan tinggi, suhu sedang, dan kelembaban udara yang relatif tinggi sepanjang tahun. Berdasarkan data rata-rata suhu dan kelembaban udara bulanan di Kota Bogor selama lima tahun terakhir pada periode tahun 2020–2024, terlihat adanya tren kenaikan suhu rata-rata tahunan dari 26,0°C pada tahun 2021 menjadi 26,7°C pada tahun 2024, dimana suhu terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 26,0°C dan suhu tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 26,7°C. Sementara itu, kelembaban udara menunjukkan tren menurun dari 84,8% pada tahun 2022 menjadi 82,8% pada tahun 2024, dimana kelembaban terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 81,1% dan kelembaban terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 84,8%.

Tabel 2.5
Rata-rata suhu di Kota Bogor Tahun 2020–2024

Bulan	Suhu (°C)					Kelembaban (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	26,1	25,2	26,1	25,9	26,2	88,9	88,0	84,8	84,8	87,0
Februari	25,7	24,6	26,0	25,5	26,4	89,4	86,0	84,5	85,8	87,0
Maret	26,3	25,9	26,4	25,9	26,3	86,3	85,0	84,0	86,3	87,0
April	26,7	26,7	26,4	26,9	27,3	85,4	84,0	85,1	82,9	85,0
Mei	27,1	26,8	26,6	27,3	27,3	84,1	84,0	84,8	82,6	84,0
Juni	27,0	25,8	25,8	26,8	26,9	82,3	86,0	85,6	83,4	83,0
Juli	26,5	26,0	26,6	26,7	26,2	81,2	80,0	81,7	79,0	79,0
Agustus	26,9	26,0	26,4	26,9	26,8	77,7	82,0	83,0	75,5	77,0
September	26,6	26,3	26,1	27,0	26,8	80,1	81,0	83,9	72,0	78,0
Oktober	26,1	26,4	25,9	27,7	27,2	84,8	83,0	86,5	74,9	78,0
November	26,5	26,4	25,9	26,8	26,7	83,7	84,0	86,5	85,1	84,0
Desember	25,8	26,1	25,6	27,2	26,1	84,0	85,0	86,7	81,4	85,0
Rata-Rata	26,4	26,0	26,2	26,7	26,7	84,0	84,0	84,8	81,1	82,8

Sumber : BPS Kota Bogor

Iklim berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia. Kondisi curah hujan dan jumlah hari hujan merupakan indikator penting dalam pengelolaan lingkungan dan perencanaan pembangunan wilayah, khususnya untuk Kota Bogor yang secara geografis berada di wilayah beriklim tropis basah dengan karakteristik curah hujan tinggi. Selama lima tahun terakhir pada periode tahun 2020-2024, rata-rata jumlah hari hujan di Kota Bogor meningkat dari 13 hari per bulan pada tahun 2020 menjadi puncaknya 28 hari per bulan pada tahun 2022, sebelum menurun menjadi 21 hari per bulan pada tahun 2024, dimana rata-rata jumlah hari hujan tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 28 hari, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 13 hari. Sementara itu, rata-rata jumlah curah hujan tahunan pada periode tahun 2020-2024 terjadi peningkatan dari 202 mm pada tahun 2020 dan 351 mm pada tahun 2021 menjadi 405 mm pada tahun 2024. Meski terdapat fluktuasi pada nilai bulanan, bulan-bulan seperti Mei dan November 2024 mencatat curah hujan sangat tinggi yaitu 551 mm dan 730 mm. Beberapa bulan lain yang mencatat lonjakan ekstrem seperti Maret 2024 sebesar 723 mm dan April 2024 sebesar 620 mm.

Tabel 2.6
Jumlah Hari hujan dan curah hujan di Kota Bogor
Tahun 2020–2024

Bulan	Jumlah hari hujan (hari)					Jumlah Curah hujan (mm)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	14	18	30	21	25	208	304	106	211	394
Februari	18	20	23	24	25	337	487	145	258	228
Maret	19	20	28	26	27	293	233	112	325	723
April	19	17	29	17	23	271	505	316	312	620
Mei	15	16	25	14	21	292	510	226	294	551
Juni	5	17	27	20	20	30	311	463	310	224
Juli	7	8	29	9	13	64	116	358	134	140
Agustus	4	16	31	12	14	42	400	384	144	123
September	7	19	29	9	15	88	317	344	62	402
Oktober	17	22	28	13	14	327	567	499	102	494
November	16	17	28	25	25	207	184	321	1.068	730
Desember	16	20	28	20	27	262	279	225	563	231

Bulan	Jumlah hari hujan (hari)					Jumlah Curah hujan (mm)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata	13	18	28	18	21	202	351	292	226	405

Sumber : BPS Kota Bogor

E. Hidrologi

Di wilayah Kota Bogor terdapat enam lokasi mata air, empat lokasi air tanah dalam dan dua lokasi air tanah dangkal yang biasa digunakan untuk air minum non perpipaan. Kapasitas sumber mata air dan air tanah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini lantaran lahan potensial kritis di Kecamatan Bogor Selatan dan di Kecamatan Bogor Barat menunjukkan semakin berkurangnya resapan air, karena semakin bertambahnya daerah pemukiman di wilayah Kota Bogor.

Beberapa danau, situ, dan kolam di Kota Bogor ada yang berfungsi untuk irigasi, retensi, dan rekreasi. Situ Gede, Situ Panjang, Situ Anggalena dan Situ Leutik difungsikan sebagai irigasi dan retensi. Danau Bogor Raya, Kolam Retensi Cimanggu dan Kolam Retensi Taman Sari Persada selain difungsikan sebagai retensi juga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Danau atau situ terluas di Kota Bogor adalah Situ Panjang (4,5 ha) dan Situ Gede (4 ha).

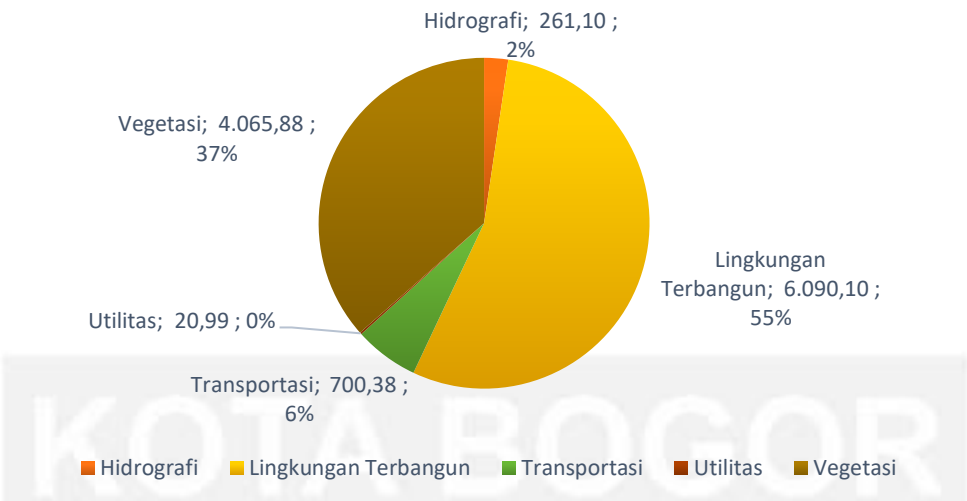
Wilayah Kota Bogor dilalui oleh dua buah sungai, yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung. Sungai Cisadane mempunyai panjang aliran sungai utama hampir 126 km dan Sungai Ciliwung mempunyai panjang aliran sungai utama sepanjang 120 km. Kondisi ini dimanfaatkan sebagai sumber air yang diproduksi PDAM Tirta Pakuan Bogor. Dengan kondisi debit air permukaan diperoleh dari aliran Sungai Ciliwung sebesar 76.000 liter/detik dan Sungai Cisadane sebesar 24.000 liter/detik (*Review Masterplan Drainase TA 2018*).

Untuk kualitas air, pada umumnya kualitas air sungai di wilayah Kota Bogor kurang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal itu disebabkan beberapa unsur seperti sulfat, fosfat, nitrat dan jumlah total coliform dalam air sungai melebihi kriteria baku. Kondisi yang mirip juga terdapat pada air situ yang umumnya berkualitas di bawah persyaratan baku mutu. Sedangkan air sumur penduduk, nilai pH-nya cenderung fluktuatif, dan di beberapa lokasi kandungan detergen dan bakteri e-colli di atas kriteria yang disyaratkan.

F. Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan terbesar di Kota Bogor tahun 2023 berupa kategori lingkungan terbangun yang mencapai lebih dari setengah luas Kota Bogor, yaitu sekitar 55 persen. Sedangkan yang paling kecil berupa penggunaan untuk utilitas yaitu sekitar 0,19 persen. Untuk kategori vegetasi memiliki porsi sekitar 37% yang menjadi penyeimbang luasnya lingkungan terbangun. penggunaan lahan tahun 2023 dengan distribusi setiap kategori sebagaimana disampaikan pada grafik 2.1 di bawah ini:

Grafik 2.1
Distribusi Penggunaan Lahan (%)



Sumber: Pemuktahiran Informasi Geospasial (Bappeda), 2023

Penggunaan lahan Kota Bogor pada tahun 2023 kategori lingkungan terbangun khususnya unsur permukiman dan perumahan memiliki luasan paling besar yaitu masing-masing 3368.73 Ha (30,24%) dan 1218.09 Ha (10,94 %). Sedangkan unsur penggunaan lahan paling kecil luasnya berupa bendungan yaitu sekitar 0,22 Ha (0,002%). Luas masing-masing penggunaan lahan tahun 2023 disampaikan pada tabel 2.7 di bawah ini:

Tabel 2.7
Luas Sebaran Jenis Penggunaan Lahan di Kota Bogor Tahun 2023

SUB KATEGORI	UNSUR	LUAS (HA)	%
Tubuh Air Daratan	Bendungan	0,22	0,00
	Danau	7,31	0,07
	Kolam	60,78	0,55
	Sungai	190,58	1,71
	Waduk	2,21	0,02
Fasilitas Kesehatan	Puskesmas	1,59	0,01
	Rumah Sakit	32,43	0,29
Kawasan Industri	Industri	161,20	1,45
Kawasan Perdagangan	Niaga	578,72	5,20
Pariwisata Dan Budaya	Arena Olahraga	60,96	0,55
	Daya Tarik Pariwisata	24,56	0,22
Pemukaman	Makam	195,08	1,75
Pemerintahan	Keamanan	100,92	0,91
	Pemerintahan	122,50	1,10
Pendidikan	Pendidikan	193,39	1,74
Peribadatan	Sarana Ibadah	31,92	0,29
Permukiman	Permukiman	3.368,73	30,24
	Perumahan	1.218,09	10,94
Transportasi Darat	Jalan	669,64	6,01
	Terminal Bus	5,87	0,05
Transportasi Perkeretaapian	Daerah KA	19,01	0,17
	Stasiun KA	5,86	0,05
Instalasi Dan Jaringan Air Bersih	Kantor Air Minum	8,99	0,08

SUB KATEGORI	UNSUR	LUAS (HA)	%
Instalasi Dan Jaringan Listrik	Kantor PLN	9,89	0,09
Instalasi Dan Jaringan Pembuangan Limbah	Air Limbah	0,99	0,01
	Persampahan	0,34	0,00
Instalasi Dan Jaringan Pos, Penyiaran Atau Komunikasi	Kantor Telepon	0,78	0,01
Vegetasi Alami	Semak Belukar	415,91	3,73
Vegetasi Dibudidayakan	Ladang	1.108,86	9,96
	Sawah	191,22	1,72
	Tanaman Bangunan	369,31	3,32
	Tanaman Campur	1.980,58	17,78
Jumlah		11.138,45	100

Sumber: Pemuktahiran Informasi Geospasial (Bappeda), 2023

Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit, penggunaan lahan di Kota Bogor pada tahun 2023 adalah sebagaimana tergambar dalam peta penggunaan lahan dibawah ini:

Gambar 2.5
Peta Penggunaan Lahan Tahun 2023



Sumber: Pemuktahiran Informasi Geospasial (Bappeda), 2023

2.1.1.2. Potensi Wilayah dan Daerah Rawan Bencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam lima Wilayah Pengembangan (WP) yaitu:

- a. WP Samida meliputi seluruh Kecamatan Bogor Tengah (Kelurahan Babakan, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Cibogor, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Gudang, Kelurahan Kebon Kalapa, Kelurahan Pabaton, Kelurahan Paledang, Kelurahan Panaragan, Kelurahan Sempur, dan Kelurahan Tegalega), sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Menteng), sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Empang, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Batutulis, dan Kelurahan Lawanggintung), dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Baranangsiang dan Kelurahan Sukasari);
- b. WP Pasima meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Balungbangjaya, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Gunungbatu, Kelurahan Loji, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Pasirkuda, Kelurahan Pasir Mulya, Kelurahan Sindangbarang, dan Kelurahan Situgede);
- c. WP Utara meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Cilendek Barat, Kelurahan Cilendek Timur, Kelurahan Curug, Kelurahan Curug Mekar, dan Kelurahan Semplak) dan seluruh Kecamatan Tanah Sareal (Kelurahan Cibadak, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Kebon Pedes, Kelurahan Kedung Badak, Kelurahan Kedungjaya, Kelurahan Kedungwaringin, Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi, Kelurahan Sukadamai, Kelurahan Sukaresmi, dan Kelurahan Tanah Sareal);
- d. WP Purwa meliputi seluruh Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Ciparigi, Kelurahan Kedunghalang, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegal Gundil); dan
- e. WP Daksina meliputi sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Cikaret, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Genteng, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Muarasari, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pakuan, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Rancamaya, dan Kelurahan Ranggamekar) dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Katulampa, Kelurahan Sindanggrasa, Kelurahan Sindangsari, dan Kelurahan Tajur).

Penetapan WP dimaksudkan untuk mendistribusikan pelayanan kegiatan kepada masyarakat serta mengurangi pergerakan penduduk ke pusat kota. memperhatikan pertimbangan di atas maka pembagian wilayah pelayanan (WP) Kota Bogor direncanakan sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor

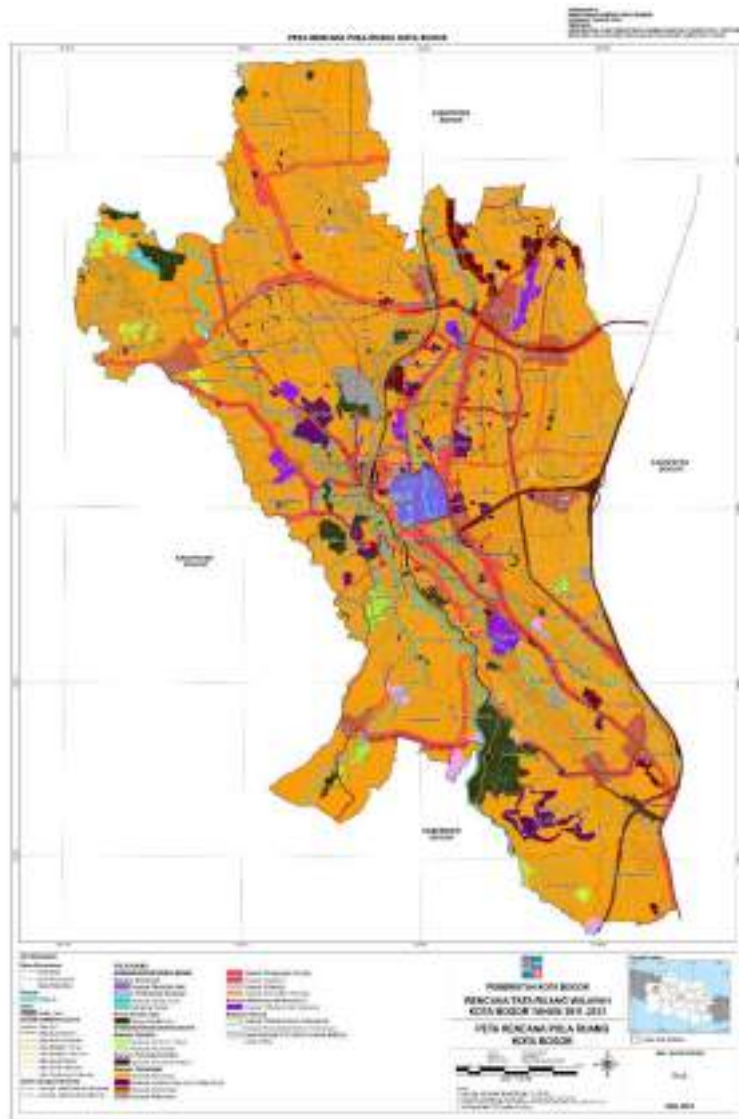
No	Wilayah Pelayanan (WP)	Lokasi Pusat	Fungsi Pusat	Skala Pelayanan	Rencana Jumlah Penduduk (jiwa)	Ket.
1	WP Samida (WP A)	Kawasan Pemerintahan & Perkantoran & Komersial di sekitar Kebun Raya (Pusat Kota Lama)	Pusat Kota Sub-Pusat Kota (Pusat WP-A)	Seluruh Kota, WP	273.811	-
2	WP Pasima (WP B)	Daerah Bubulak - Sindang barang	Sub Pusat Kota (Pusat WP-B)	WP	186.424	Melayani penduduk perbatasan
3	WP Utara (WP C)	Daerah Yasmin – Pasar TU Kemang	Sub Pusat Kota (Pusat WP-C)	WP	456.499	-
4	WP Purwa (WP D)	Daerah warung Jambu-Jl. Adnawijaya	Sub Pusat Kota (Pusat WP-D)	WP	295.188	-
5	WP Daksina (WP E)	Daerah Tajur &sekitar rencana akses toll Ciawi-Sukabumi-Inner Ring Road	Sub Pusat Kota (Pusat WP-E)	WP	324.509	Melayani penduduk perbatasan

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031

Arahan pengembangan setiap wilayah pelayanan adalah sebagai berikut:

1. PPK sebagai sebagai pusat kota lama (kawasan pusaka) diarahkan untuk mempertahankan dan meremajakan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada, pusat perkantoran, dan RTH skala kota;
2. Sub PPK Pasima sebagai pusat WP Pasima diarahkan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan kegiatan utama jasa akomodasi, perdagangan dan pengembangan TOD Bubulak;
3. Sub PPK Utara sebagai pusat WP Utara diarahkan sebagai kawasan perkotaan baru dengan kegiatan utama perdagangan jasa dan pasar induk;
4. Sub PPK Purwa sebagai pusat WP Purwa diarahkan sebagai gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran dengan kegiatan utama perdagangan, jasa akomodasi, perkantoran dan wisata kuliner;
5. Sub PPK Daksina sebagai pusat WP Daksina diarahkan sebagai wilayah perkembangan ekonomi terbatas, dengan kegiatan utama sentra otomotif, wisata belanja, *Meeting – Incentive – Convention - and Exhibition* (MICE), jasa akomodasi dan ekowisata; dan
6. PL pada masing-masing SWP akan dilengkapi dengan sarana prasarana skala lingkungan.

Gambar 2.6
Peta Rencana Pola Ruang Kota Bogor



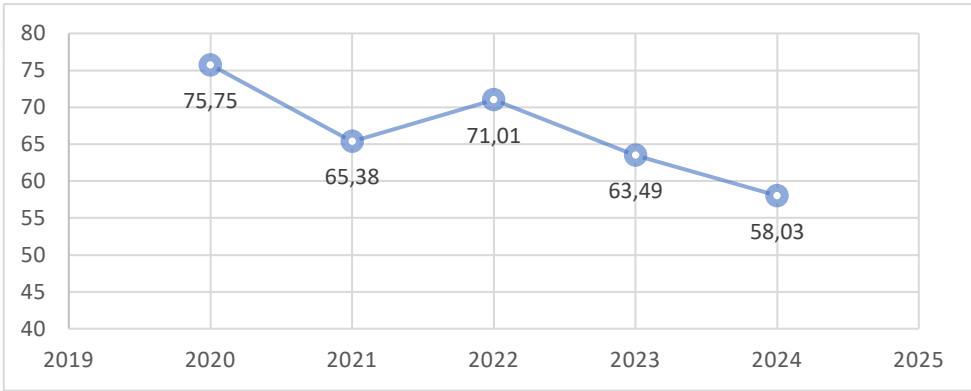
Sumber : Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031

Secara umum Kota Bogor tidak lepas dari berbagai potensi bencana yang ada baik bencana yang berkaitan dengan aktivitas manusia (antropogenik) seperti banjir dan kebakaran tetapi juga dengan berbagai bencana alam lainnya seperti tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Oleh karena itu dalam merencanakan pembangunan 5 tahun ke depan diperlukan adanya pembangunan yang berwawasan kebencanaan sehingga infrastruktur dan masyarakat menjadi resilien terhadap potensi bencana.

Berdasarkan hasil kajian IRBI, Kota Bogor secara umum selama periode 2020–2024 berada pada kelas risiko sedang. Pada level Provinsi Jawa Barat, kelas risiko yang ada di provinsi hanya ada risiko tinggi dan sedang. Nilai IRBI di Kota Bogor cenderung semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, indeks risiko bencana berada pada angka 75,75. Pada tahun 2021, indeks menurun cukup signifikan menjadi 65,38. Namun, pada tahun 2022, indeks kembali meningkat ke 71,01, yang mungkin menunjukkan adanya kejadian bencana yang lebih sering atau dampak dari perubahan

iklim yang memperburuk kondisi lingkungan. Meskipun demikian, tren kembali menurun pada 2023 dengan indeks 63,49, dan berlanjut hingga 2024 dengan angka 58,03. Hal ini menandakan adanya upaya efektif mitigasi dan adaptasi dalam mengurangi risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk memastikan Kota Bogor aman siap terhadap bencana yang ada.

Grafik 2.2
Indeks Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2020–2024



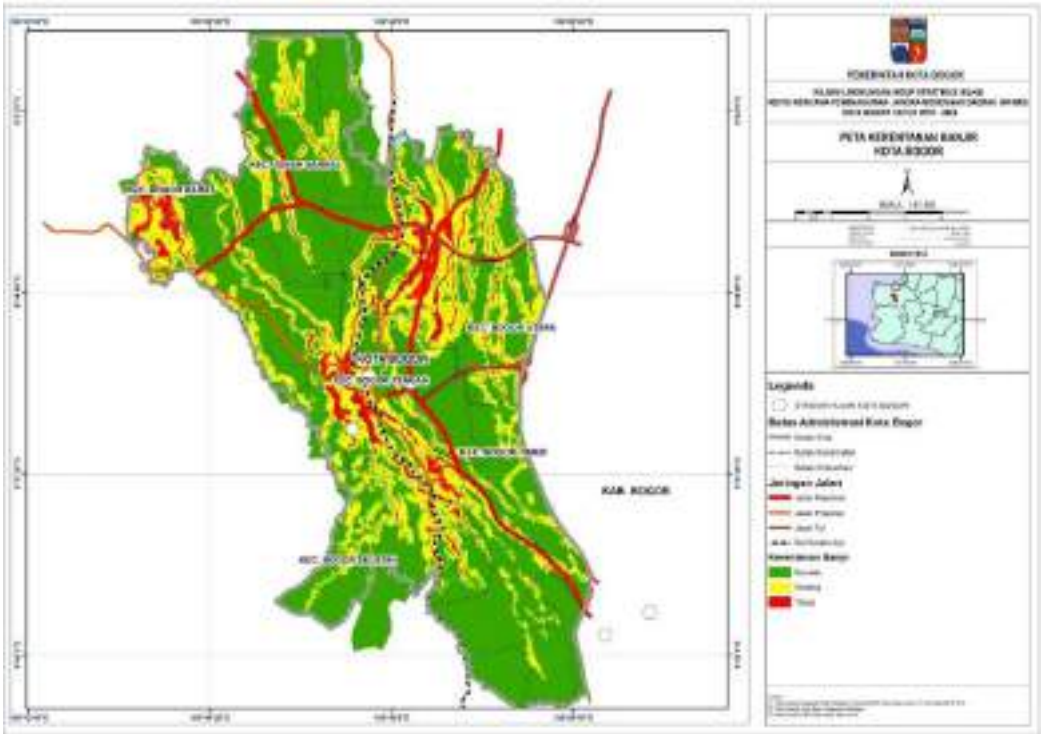
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Nasional

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Bogor Tahun 2022, data historis berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) menunjukkan adanya peningkatan frekuensi kejadian bencana terkait iklim atau hidrometeorologi. Adanya perubahan iklim global mendorong peningkatan cuaca ekstrem di masa depan dapat menjadi sumber terjadinya bencana hidrometeorologi. Dilihat dari Evaluasi Kajian Risiko Bencana, selama periode tahun 1992-2021, bencana tanah longsor adalah bencana yang sering terjadi di Kota Bogor yaitu 53% dari seluruh kejadian bencana yang terjadi. Kemudian bencana angin puting beliung dan banjir masing-masing sebesar 31% dan 14%. Sementara gempa bumi dan kekeringan masing-masing 1% dari seluruh bencana yang terjadi di Kota Bogor.

1. Banjir

Kota Bogor berada pada wilayah dengan dataran menengah serta memiliki bentuk lahan berbukit. Rata-rata ketinggian minimum Kota Bogor adalah 190 mdpl dan maksimum 350 mdpl. Kota Bogor juga berada pada posisi perlintasan dua aliran sungai besar yang menjadi bagian dari DAS Ciliwung dan DAS Cisadane. Sehingga dengan kondisi seperti ini, potensi banjir di Kota Bogor cukup rentan. Wilayah dengan luas kerentanan banjir yang tinggi sebagian besar terdapat di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Barat. Sedangkan wilayah dengan kerentanan rendah yang paling luas terdapat di Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Tanah Sareal.

Gambar 2.7
Peta Kerentanan Banjir Kota Bogor



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024

Berdasarkan data kerentanan terhadap banjir dari KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, terdapat 596,82 Ha wilayah di Kota Bogor yang masuk dalam klasifikasi tinggi. Berikut merupakan data dan peta terkait kerentanan terhadap banjir di Kota Bogor. Sedangkan wilayah dengan kerentanan banjir sedang mencapai 3.373,43 hektar. Secara umum lebih banyak wilayah yang potensi banjir rendah di Kota Bogor.

Tabel 2.9
Kerentanan Banjir per Kecamatan di Kota Bogor

No	Kecamatan	Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Bogor Barat	1.441,50	712,44	177,61	2.331,55
2	Bogor Selatan	2.127,53	817	105,52	3.050,05
3	Bogor Tengah	435,2	326,38	75,1	836,67
4	Bogor Timur	824,29	221,17	2,53	1.048,00
5	Bogor Utara	827,18	820,03	164,94	1.812,14
6	Tanah Sareal	1.512,47	476,41	71,14	2.060,01
Total		7.168,16	3.373,43	596,82	11.138,42

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024

2. Tanah Longsor

Kota Bogor berada pada wilayah yang berbukit, sehingga secara kontur memiliki kemiringan lahan yang bervariasi antar wilayah. Kemiringan lereng di Kota Bogor berada antara 0-3%, 4-15%, 16-30% dan di atas 40%. Sehingga, jika dikaitkan dengan kondisi Kota Bogor yang memiliki curah hujan tinggi, kemiringan lahan di atas 40% merupakan wilayah yang memiliki potensi ancaman tanah longsor yang tinggi karena gerakan tanah akan lebih mudah terjadi. Berdasarkan analisis ancaman bencana tanah longsor di Kota Bogor dari dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana

Penanggulangan Bencana Kota Bogor Tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki ancaman yang rendah. Namun sebagian wilayah juga memiliki ancaman tanah longsor yang tinggi, serta beberapa wilayah memiliki ancaman bahaya tanah longsor yang sangat tinggi. Ancaman bahaya tanah longsor yang tinggi berada di wilayah Kota Bogor bagian Utara dan bagian Timur. Sedangkan ancaman rendah dominan berada pada wilayah Bogor bagian Tengah dan Selatan.

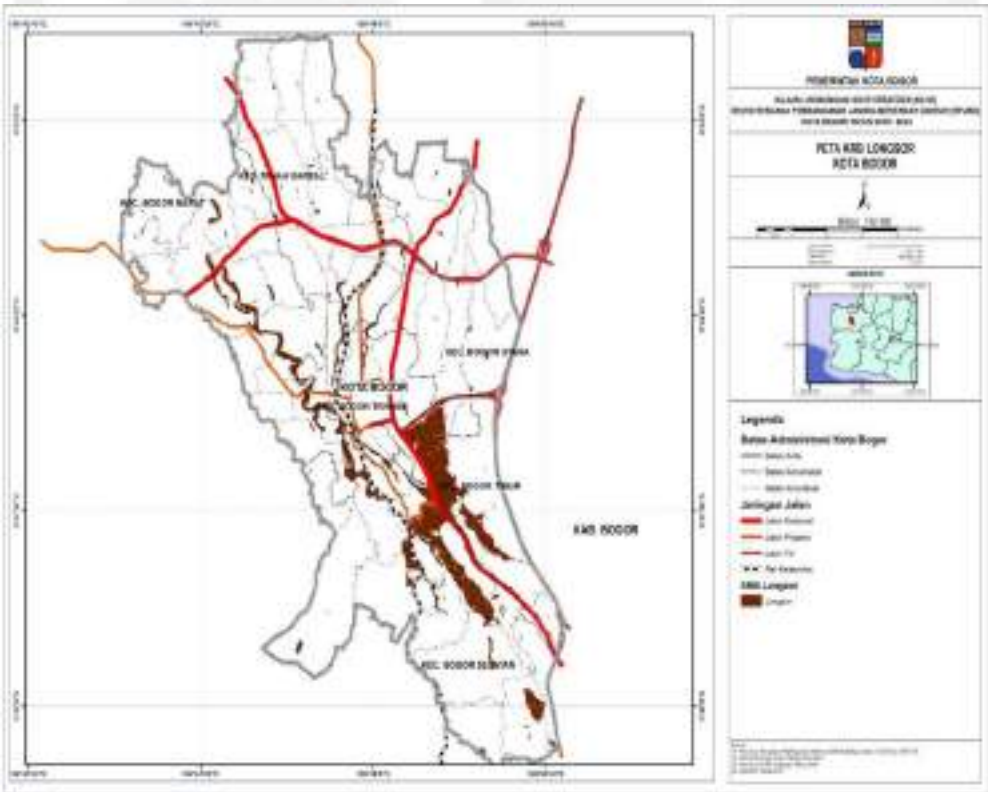
Berdasarkan data KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, terdapat Kawasan rawan longsor seluas 806,79 ha. Wilayah dengan luas rawan longsor yang paling besar ada di wilayah Bogor Selatan disusul wilayah Bogor Timur. Kedua wilayah ini cenderung berbukit. Sedangkan wilayah dengan kerentanan rendah terhadap gerakan tanah adalah wilayah Bogor Utara dan Tanah Sareal. Potensi gerakan tanah perlu diwaspadai terutama pada saat musim hujan. Selain itu upaya mitigasi secara teknis maupun non teknis di masing-masing wilayah rawan gerakan tanah diperlukan.

Tabel 2.10
Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor

No	Kecamatan	Rawan Longsor (ha)
1	Bogor Barat	137,5
2	Bogor Selatan	287,42
3	Bogor Tengah	59,77
4	Bogor Timur	284,2
5	Bogor Utara	16,87
6	Tanah Sareal	21,03
Total		806,79

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024

Gambar 2.8
Peta Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024

3. Kawasan Rawan Kebakaran

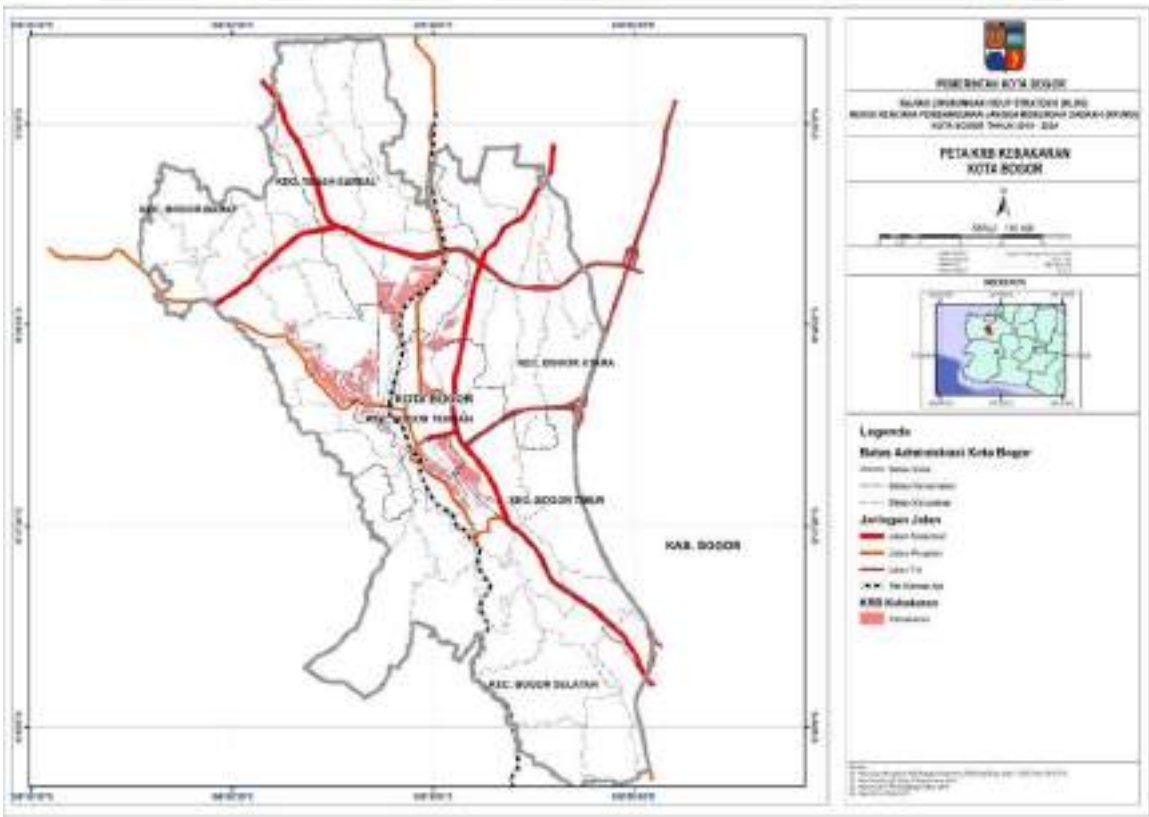
Berdasarkan data KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, terdapat kawasan rawan kebakaran seluas 252,89 ha. Wilayah dengan luas rawan kebakaran yang paling besar ada di wilayah Tanah Sareal disusul Bogor Barat. Sedangkan wilayah dengan kerentanan rendah terhadap kebakaran adalah wilayah Bogor Utara dan Bogor Timur. Potensi terjadinya kebakaran terutama berada pada wilayah yang mempunyai kepadatan bangunan yang cukup tinggi.

Tabel 2.11
Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor

No	Kecamatan	Rawan Kebakaran (ha)
1	Bogor Barat	64,99
2	Bogor Selatan	21,82
3	Bogor Tengah	59,9
4	Bogor Timur	18,66
5	Bogor Utara	19,26
6	Tanah Sareal	68,26
Total		252,89

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024

Gambar 2.9
Peta Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024

4. Angin Puting Beliung/Cuaca Ekstrem

Berdasarkan data kebencanaan yang tercatat pada BNPB dan BPBD Kota Bogor, wilayah Kota Bogor dan sekitarnya telah mengalami peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrem dalam bentuk angin puting beliung. Berdasarkan hasil analisis

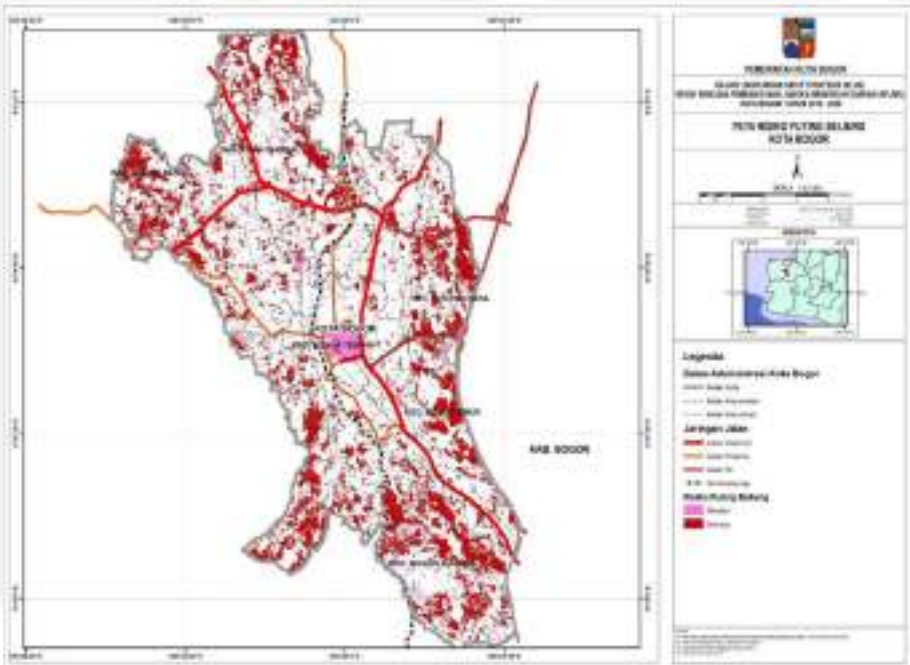
ancaman bahaya di Kota Bogor, indeks ancaman bahaya angin puting beliung secara umum berada pada ancaman yang tinggi dan beberapa wilayah sangat tinggi. Wilayah Kota Bogor yang memiliki ancaman bahaya angin puting beliung sangat tinggi dan paling banyak adalah Kota Bogor bagian selatan. Wilayah dengan kerentanan terhadap cuaca ekstrem (puting beliung) tersebar di hampir seluruh wilayah di Kota Bogor. Kerentanan yang paling rendah berada di Kecamatan Bogor Tengah. Antisipasi terhadap cuaca ekstrem perlu dilakukan dengan melakukan *update* terhadap informasi cuaca dan sosialisasi kepada masyarakat.

Tabel 2.12
Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor

No	Kecamatan	Resiko Puting Beliung (ha)		
		Rendah	Sedang	Total
1	Bogor Barat	10,38	593,19	603,57
2	Bogor Selatan	33,85	953,42	987,27
4	Bogor Timur	11,99	250,74	262,73
5	Bogor Utara	8,45	443,64	452,09
6	Tanah Sareal	13,47	532,5	545,97
Total		180,79	2.822,47	3.003,26

Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024

Gambar 2.10
Peta Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024

Pada tahun 2024, tercatat terdapat 853 kejadian bencana di Kota Bogor yang berdampak pada 1439 KK dan 4830 jiwa. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 2.10 di bawah ini:

Gambar 2.11
Infografis Kebencanaan Kota Bogor Tahun 2024



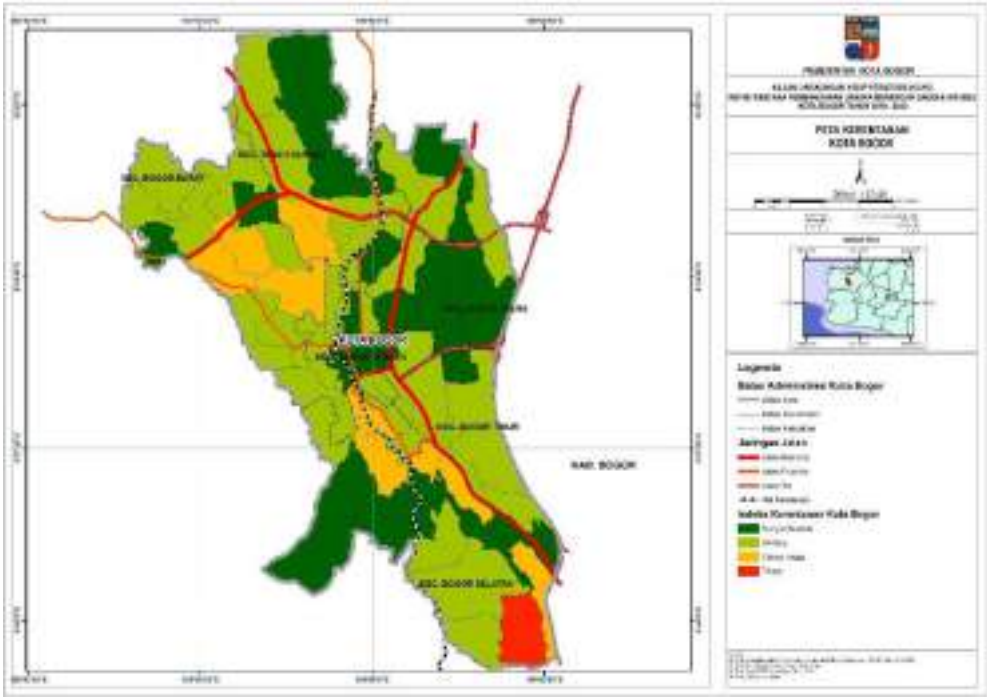
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, 2025

5. Adaptasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena yang nyata dan akan semakin berdampak ke depan. Oleh karena itu Kota Bogor juga perlu terus melakukan adaptasi baik secara struktural maupun non struktural untuk memastikan bahwa ketahanan iklim bisa terus dipertahankan. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan yang dirilis oleh KLHK pada tahun 2018, diketahui bahwa nilai indeks kapasitas adaptasi (IKA) terhadap perubahan iklim di Kota Bogor adalah 0,6960 dari nilai tertinggi 1. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan Kota Bogor dalam menghadapi dampak perubahan iklim baik berupa kekeringan dan banjir berada pada level/ tingkatan sedang. Sedangkan untuk nilai indeks kerentanan dan sensitivitas (IKS) di Kota Bogor terhadap perubahan iklim adalah 0,4980 dari nilai tertinggi 1, artinya tingkat kerentanan masyarakat dan lingkungan terhadap adanya perubahan iklim jika terjadi kekeringan dan banjir berada pada level sedang.

Kerentanan (*Vulnerability*) menggambarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mentolerir suatu perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Apabila perubahan/penyimpangan sudah melewati *batas toleransi dari sistem* maka sistem menjadi rentan karena perubahan iklim. Kerentanan dapat direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi, yang selanjutnya dinyatakan dengan indeks sensitivitas dan keterpaparan. Kota Bogor memiliki empat klasifikasi tingkat kerentanan yaitu kerentanan sangat rendah, sedang, cukup tinggi, dan kerentanan tinggi. Jumlah kelurahan yang berada pada kerentanan sangat rendah berjumlah 19 kelurahan, untuk kelurahan yang berada pada kerentanan sedang berjumlah 38 kelurahan, untuk kelurahan yang berada pada kerentanan cukup tinggi berjumlah 10 kelurahan, dan untuk yang berada pada kerentanan tinggi berjumlah 1 kelurahan yaitu Kelurahan Bojongkerta.

Gambar 2.12
Peta Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kota Bogor



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024

2.1.1.3. Aspek Demografi

Kependudukan merupakan salah satu bagian penting yang menjadi perhatian dalam proses perencanaan, karena penduduk merupakan subjek utama dalam proses pembangunan.

Tabel 2.13
Struktur Kependudukan di Kota Bogor Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Bogor Utara	192.430	17,84	10.610	0,81	103
Bogor Selatan	212.423	19,07	6.964	1,08	104
Bogor Barat	241.738	22,42	10.368	0,91	101
Bogor Tengah	95.758	8,88	11.445	-0,14	101
Bogor Timur	107.573	9,98	10.280	0,82	103
Tanah Sareal	228.429	21,18	11.089	1,24	102
Kota Bogor	1.078.351	100,00	9.681	0,89	103

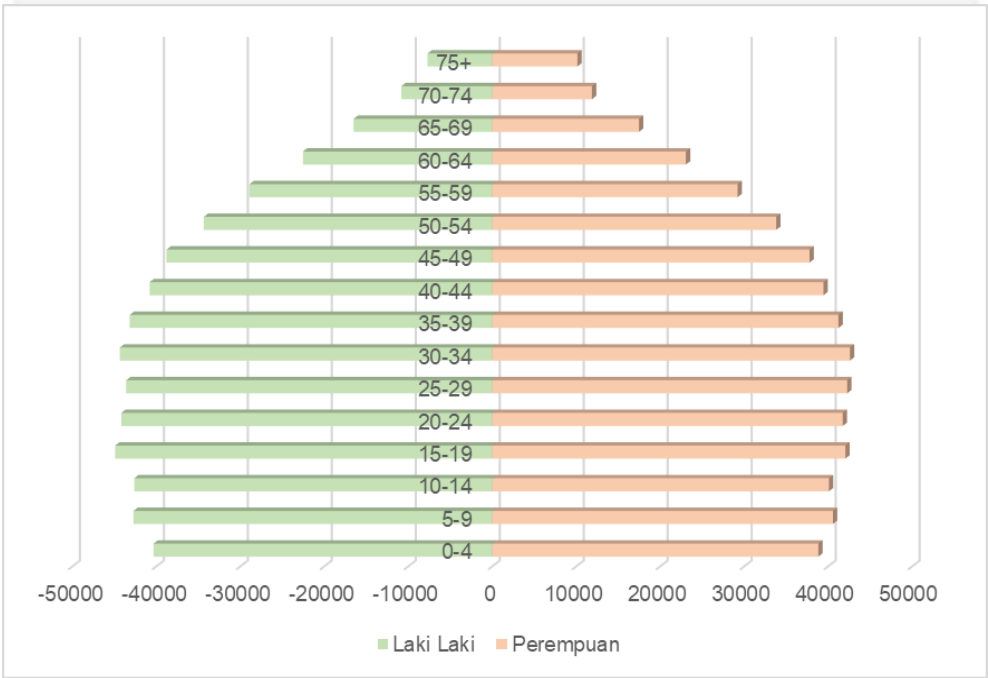
Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2025

Data tahun 2024, berdasarkan proyeksi penduduk jumlah penduduk laki-laki di Kota Bogor sebanyak 545.945 orang, atau 50,63 persen dari penduduk Kota Bogor. Sementara, jumlah penduduk perempuan di Kota Bogor sebanyak 532.406 orang, atau 49,37 persen dari penduduk Bogor. Dari kedua informasi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kota Bogor sebesar 103, yang artinya terdapat 103 laki-laki per 100 perempuan di Kota Bogor pada tahun 2024.

Kepadatan penduduk Kota Bogor sebanyak 9.681 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk Kota Bogor paling besar masih di Kecamatan Bogor Barat. Dengan

luas geografis sebesar 20,93 persen wilayah Kota Bogor, Kecamatan Bogor Barat dihuni oleh 241.738 penduduk atau 22,42 persen penduduk Kota Bogor. Jumlah penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Tanah Sareal dengan jumlah penduduk sebanyak 228.429 orang, yaitu sebesar 21,18 persen. Sementara jumlah penduduk paling kecil di Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Bogor Timur dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 95.758 atau sebesar 8,88 persen dan 107.573 atau sebesar 9,98 persen.

Grafik 2.3
Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2024



Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2025, data diolah

Terlihat dari bentuk piramida penduduk diatas, penduduk Kota Bogor dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0–14 tahun) sebesar 22,73%, jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) sebesar 70,36%, dan jumlah penduduk lansia ($\geq$ 65 tahun) hanya sebesar 6,91%. Hal ini merupakan bonus demografi bagi Kota Bogor apabila bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna, karena mayoritas penduduknya dalam usia produktif.

Tabel 2.14
Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Produktivitas dan Angka Ketergantungan Kota Bogor Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Muda (<15 Tahun) (jiwa)	254.552	253.135	263.022	281.716	245,153
Persentase Penduduk Usia Muda (%)	24,4	24,1	23,6	25,0	22.7
Penduduk Usia Tua (>65 Tahun) (jiwa)	57.775	61.510	70.083	62.442	74,495
Persentase Penduduk Usia Tua (%)	5,5	5,8	6,3	5,5	6.9
Penduduk Usia Produktif (15-65 Tahun) (jiwa)	730.743	737.714	780.913	783.250	758,703
Persentase Penduduk Usia Produktif (%)	70,1	70,1	70,1	69,5	70.4

Kelompok Umur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Ketergantungan	42,74	42,65	42,66	43,94	42.13

Sumber: BPS Kota Bogor (diolah)

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bogor pada tahun 2024 mengalami bonus demografi karena lebih dari 70% penduduknya berada pada usia produktif. Dampak positif adanya bonus demografi adalah jumlah penduduk usia kerja yang tinggi dan dapat diserap oleh pasar kerja sehingga total output dapat meningkat dan tersedianya sumberdaya manusia dalam pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. Tingginya jumlah usia produktif, maka pemerintah Kota Bogor perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, layanan publik dan lapangan kerja sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Angka ketergantungan penduduk yaitu 42,1 yang menunjukkan bahwa 43 orang usia produktif (15 – 64 tahun) menanggung sekitar 100 orang usia non-produktif (0 – 14 dan ≥ 65 tahun) di Kota Bogor.

Tabel 2.15
Jumlah Pemeluk Agama di Kota Bogor Tahun 2024

NO	KECAMATAN	2024					
		ISLAM	PROTESTAN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	LAINNYA
1	Bogor Selatan	205.318	9.188	4.697	98	2.171	106
2	Bogor Timur	97.428	6.415	4.293	78	1.339	34
3	Bogor Utara	191.992	9.348	3.477	480	744	57
4	Bogor Tengah	98.274	5.292	3.473	69	2.090	83
5	Bogor Barat	247.377	5.725	2.704	279	685	89
6	Tanah Sareal	222.261	7.099	3.291	224	646	58
TOTAL		1.062.650	43.103	21.935	1.228	7.675	427

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka 2025, data diolah

Bila dilihat berdasarkan pemeluk agama di Kota Bogor, sebanyak 1.062.650 jiwa menganut agama Islam, 43.103 jiwa menganut agama Protestan, 21.935 jiwa menganut agama Katolik, 1.228 jiwa menganut agama Hindu, 7.675 menganut agama Buddha, dan 427 jiwa menganut kepercayaan lainnya.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

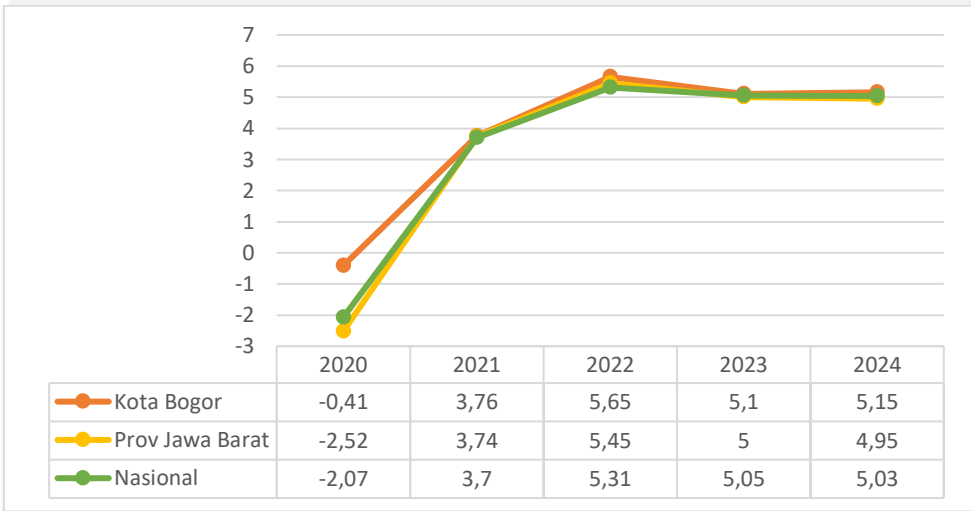
Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat di segala bidang terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta fasilitas publik menjadi salah satu tolok ukur terwujudnya keberhasilan pembangunan. Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi di suatu wilayah. LPE mencerminkan perubahan nilai produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Berdasarkan PDRB ADHK Kota Bogor didapatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor sebesar -0,41 persen, dan tahun 2024 menjadi sebesar 5,15 persen.

Grafik 2.4
Perbandingan LPE Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), data diolah

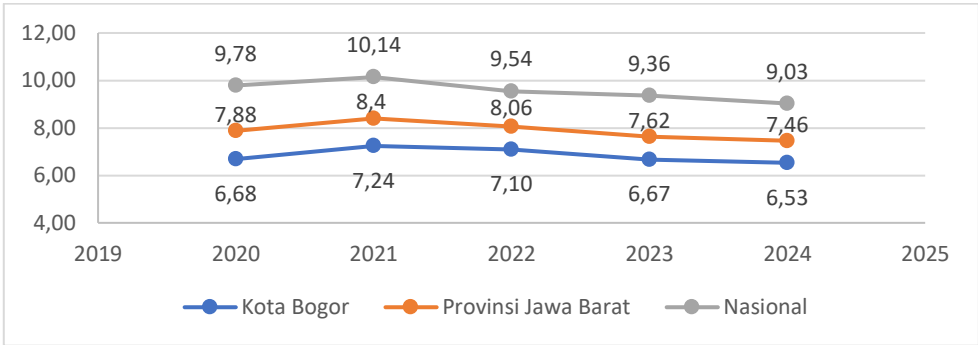
Dibandingkan dengan angka capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional, angka LPE Kota Bogor masih lebih besar dari keduanya. Dilihat dari grafik 2.4 di atas bahwa dari tahun 2022 ke 2024 LPE Nasional dan Jawa Barat mengalami perlambatan. Sedangkan Kota Bogor sempat melambat di tahun 2023 namun kemudian kembali membaik di tahun 2024.

LPE yang melambat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar diantaranya adalah penurunan investasi, penurunan konsumsi, kondisi ekonomi global, perubahan harga komoditas, ketidakstabilan politik global, dan lain-lain.

B. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan ditandai oleh pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu menghambat perkembangan sosial dan ekonomi daerah secara keseluruhan. Tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator makroekonomi diharapkan terus mengalami penurunan kedepannya.

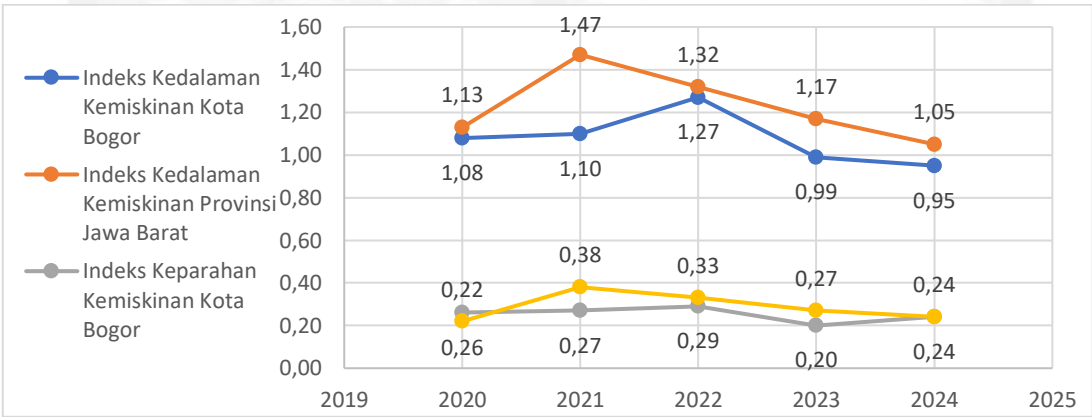
Grafik 2.5
Angka Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025), data diolah

Angka kemiskinan di Kota Bogor pada tahun 2024 adalah sebesar 6,53% atau sebanyak 73,93 ribu jiwa penduduk Kota Bogor berada dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan tersebut mengalami penurunan 0,14% dari tahun 2023 yaitu sebesar 6,67%. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat sebanyak 3,848,67 ribu jiwa (7,46%) sedangkan total penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25.219,2 ribu jiwa (9,03%).

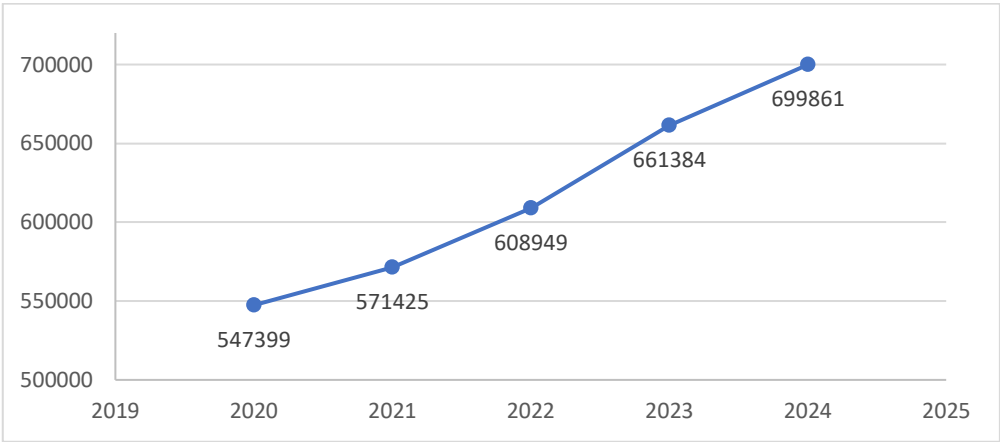
Grafik 2.6
Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024



Sumber: bogorkota.bps.go.id (2025), jabar.bps.go.id (2025)

Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bogor pada tahun 2024 yaitu 0,95, artinya rata- rata pengeluaran dari penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan capaian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2024 mencapai 0,24 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yang artinya bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi.

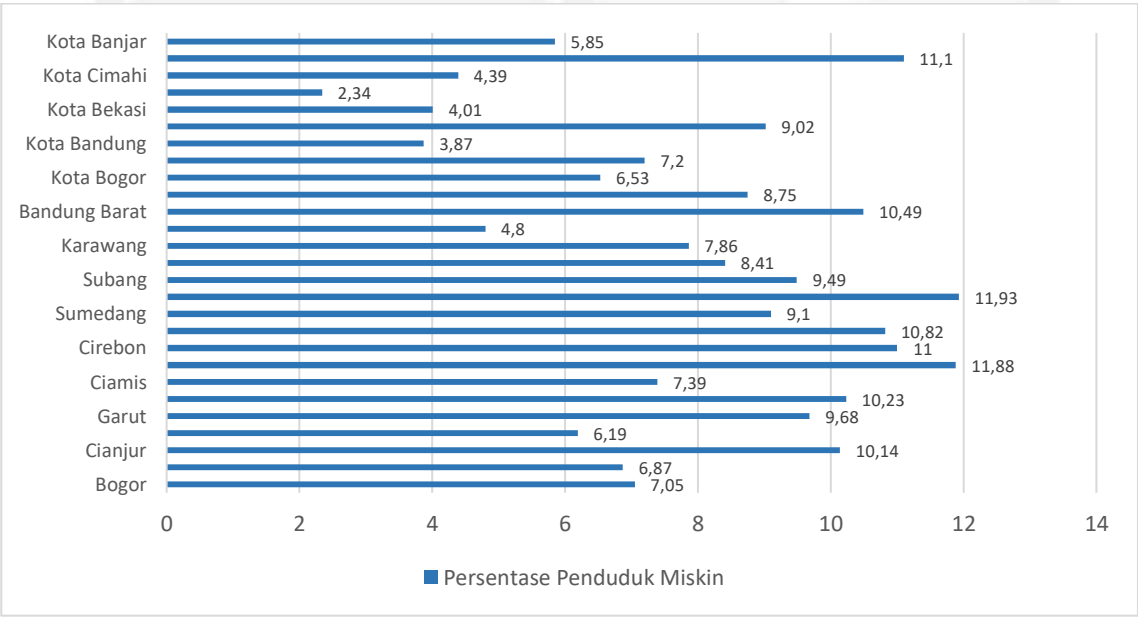
Grafik 2.7
Garis Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2020-2024



Sumber: bogorkota.bps.go.id (2025)

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di masing-masing daerah berbeda yang mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan Kota Bogor tahun 2024 adalah sebesar Rp699.861,- per kapita per bulan. Angka ini mengalami peningkatan Rp38.477,- dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp661.384,-. Artinya untuk menjadi tidak miskin, maka pengeluaran per kapita per bulan masyarakat adalah sebesar Rp699.861,-. Angka ini lebih tinggi dari garis kemiskinan Jawa Barat yaitu sebesar Rp524.052,-, dan jika disandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, garis kemiskinan Kota Bogor adalah tertinggi ketiga setelah Kota Depok dan Kota Bekasi.

Grafik 2.8
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Jawa Barat



Sumber: jabar.bps.go.id (2025)

Dibandingkan dengan angka kemiskinan di kabupaten/kota lain di Jawa Barat, Kota Bogor berada di urutan ke-8 daerah dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Barat. Meski telah mengalami penurunan, dan posisi Kota Bogor dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat cukup baik, namun angka kemiskinan di Kota Bogor belum mencapai target di tahun 2024 yaitu 6,21%. Selain itu, Kota Bogor juga terus berupaya untuk mencapai target SDG's yaitu tanpa kemiskinan pada tahun 2030. Dengan demikian menurunkan angka kemiskinan masih akan menjadi salah satu fokus Kota Bogor kedepannya.

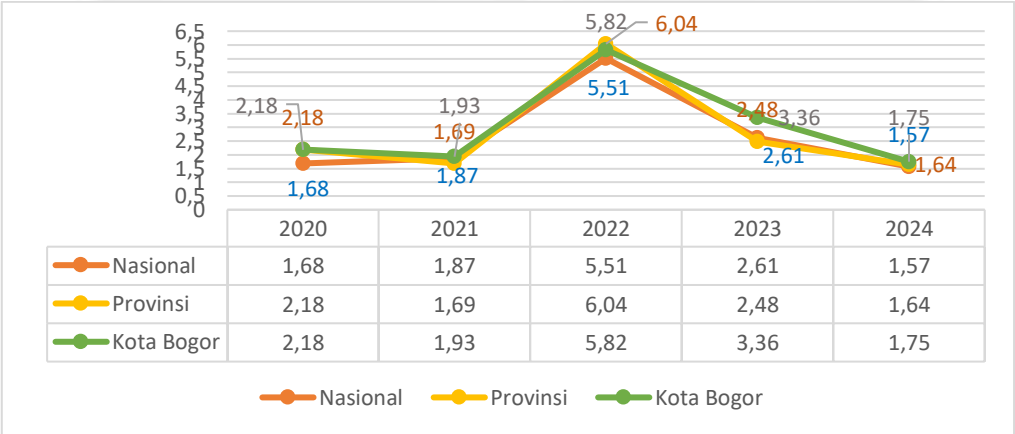
Penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor yang cenderung menurun dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, Peningkatan Pendapatan Masyarakat, dan Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan.

Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bogor pada tahun 2024 yaitu 0,95, artinya rata- rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin menyempit. Sedangkan capaian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2024 mencapai 0,24 dan mengalami kenaikan sebesar 0,04 dari tahun 2023 yang menandakan adanya perbedaan pendapatan yang semakin signifikan antara kelompok.

C. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa dalam suatu wilayah. Tingkat inflasi yang terkendali sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada Kota Bogor, inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga bahan pokok, biaya transportasi. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan dan melemahkan daya beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah kurang menarik bagi para investor/produsen untuk berinvestasi sehingga berdampak juga pada laju pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2.9
Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun 2020-2024



Sumber: bogorkota.bps.go.id (2025), jabar.bps.go.id (2025)

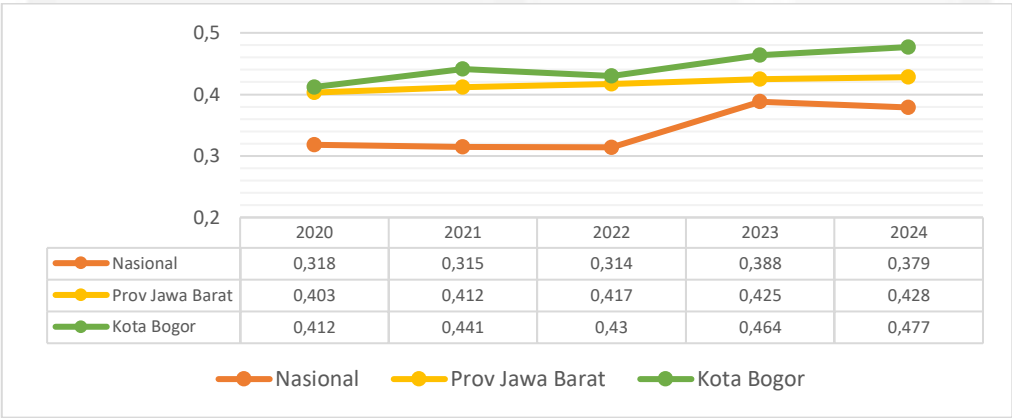
Pada tahun 2024 inflasi Kota Bogor (year on year) sebesar 1,75, turun 1,61 poin dari tahun sebelumnya. Turunnya angka inflasi tidak hanya terjadi di Kota Bogor, tapi juga terjadi di level provinsi dan nasional. Inflasi sebesar 1,75 poin ini masih ada dalam range target inflasi kota Bogor yaitu 1,5-3,5. Dapat dilihat di atas bahwa nilai inflasi tahun 2024 adalah angka terendah yang pernah dicapai Kota Bogor sejak tahun 2020. Pemerintah Kota Bogor telah berupaya mengatasi penyebab inflasi tersebut, di antaranya menyelenggarakan operasi pasar terbuka, inspeksi mendadak atas harga barang komoditas, menggalakan gerakan menanam tanaman pangan tertentu, subsidi transportasi, dan kerja sama dengan daerah lain untuk penyediaan komoditas dengan harga murah.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,37 persen dan terendah pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen.

D. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah secara keseluruhan, dengan skala antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi. Indeks Gini dengan nilai kurang dari 0,3 dikategorikan sebagai ketimpangan "rendah"; nilai antara 0,3 hingga 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan "moderat"; dan nilai di atas 0,5 dianggap sebagai ketimpangan "tinggi".

Grafik 2.10
Perkembangan Rasio Gini di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: jabar.bps.go.id (2025), bps.go.id (2025)

Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2024 adalah sebesar 0,477, artinya pemerataan pendapatan di Kota Bogor mencapai level sedang dan mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023. Memperhatikan grafik 2.10 di atas dapat dilihat bahwa

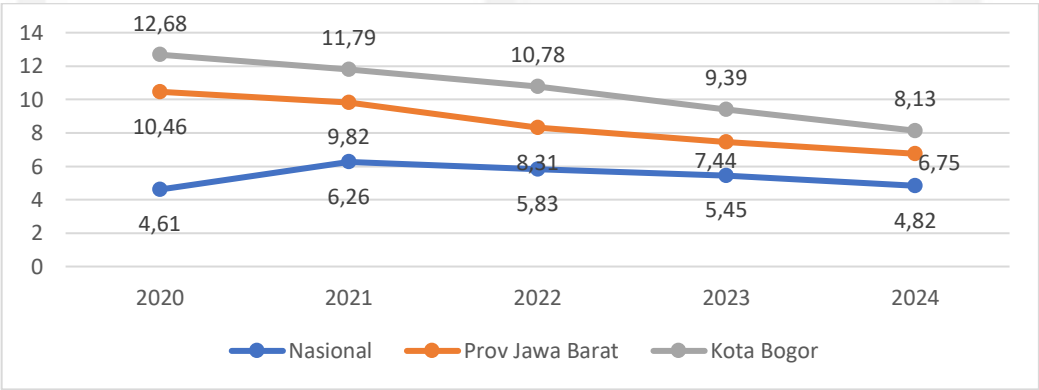
indeks gini Kota Bogor cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 rasio gini Kota Bogor adalah yang tertinggi di Jawa Barat.

Upaya menurunkan angka gini rasio yang dapat dilakukan pemerintah adalah mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, upaya tersebut tidak dapat menjamin akan menurunkan angka gini rasio. Karena ketika pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah berhasil didorong, pemerintah tidak dapat menahan peningkatan penghasilan masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan jika peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan tinggi lebih cepat dari peningkatan pendapatan masyarakat yang didorong peningkatan pendapatannya, angka gini rasio bisa jadi tetap tinggi.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya suplai tenaga kerja. TPT diharapkan terus mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa tenaga kerja telah terserap dengan baik di lapangan. Angkatan kerja sendiri mencakup penduduk usia 15-65 tahun yang mampu dan bersedia bekerja.

Grafik 2.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional 2020-2024



Sumber: jabar.bps.go.id (2025), bps.go.id (2025)

Penurunan angka pengangguran dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan mulai pulihnya sektor ekonomi di Kota Bogor. Pemulihan ini didukung oleh peningkatan investasi, pertumbuhan sektor UMKM, serta berbagai program pemerintah untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Sektor pariwisata, perdagangan, dan industri kreatif yang menjadi tulang punggung ekonomi Bogor juga berangsur pulih, sehingga menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Bogor juga berperan penting dalam upaya ini melalui penyelenggaraan pelatihan yang disesuaikan

dengan kebutuhan industri lokal, fasilitasi penempatan kerja, dan penyelenggaraan bursa kerja secara berkala. Melalui program sertifikasi kompetensi dan pendampingan wirausaha, BLK berkontribusi dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Meskipun telah menunjukkan kemajuan, upaya untuk terus menekan angka pengangguran tetap diperlukan, terutama dengan memperkuat pendidikan, mengembangkan ekosistem wirausaha, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang terus berubah.

Tabel 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor dan Wilayah Sekitar

Wilayah	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bogor	12.68	11.79	10.78	9.39	8.13
Kabupaten Bogor	14.29	12.22	10.64	8.47	7.34
Kota Bekasi	10.68	10.88	8.81	7.9	7.82
Kabupaten Bekasi	11.54	10.09	10.31	8.87	8.82
Kota Tangerang Selatan	8.48	8.6	6.59	5.81	5.09
Kabupaten Tangerang	13.06	9.06	7.88	6.94	6.06
Kota Depok	9.87	9.76	7.82	6.97	6.27

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, BPS Provinsi Banten

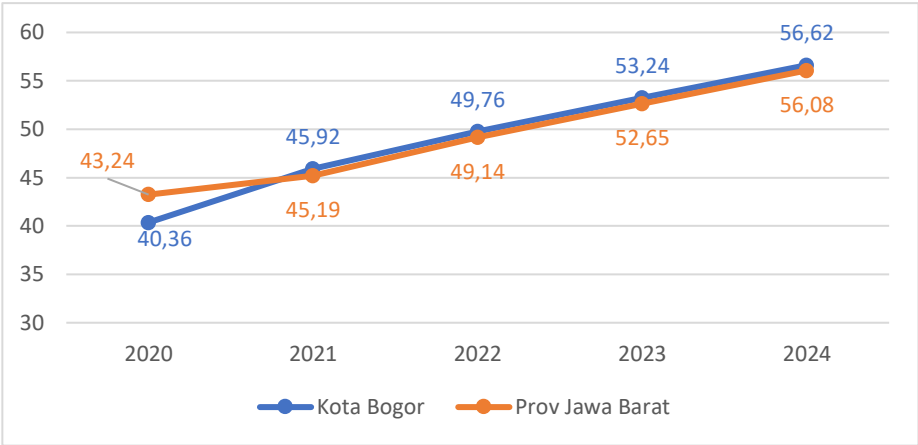
TPT Kota Bogor pada tahun 2024 menempati urutan ke-3 tertinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat, Kota Bogor berada di urutan ke-4 tertinggi di Jawa Barat artinya TPT masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kota Bogor, karena masih merupakan yang tertinggi di Bodetabek dan di Provinsi Jawa Barat.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kota Bogor antara lain: jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, dan kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kota Bogor untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka diantaranya adalah dengan mengadakan pelatihan kerja, mengadakan konsultasi produktivitas untuk pengusaha kecil, pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan peluang saha mandiri, pelatihan wira usaha, dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan ketrampilan dan produktivitas kerja. Selain itu juga untuk mendorong munculnya wirausaha baru.

F. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita mencerminkan pertumbuhan ekonomi penduduk di suatu wilayah dan berfungsi sebagai parameter makro untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi rata-rata individu di wilayah tersebut.

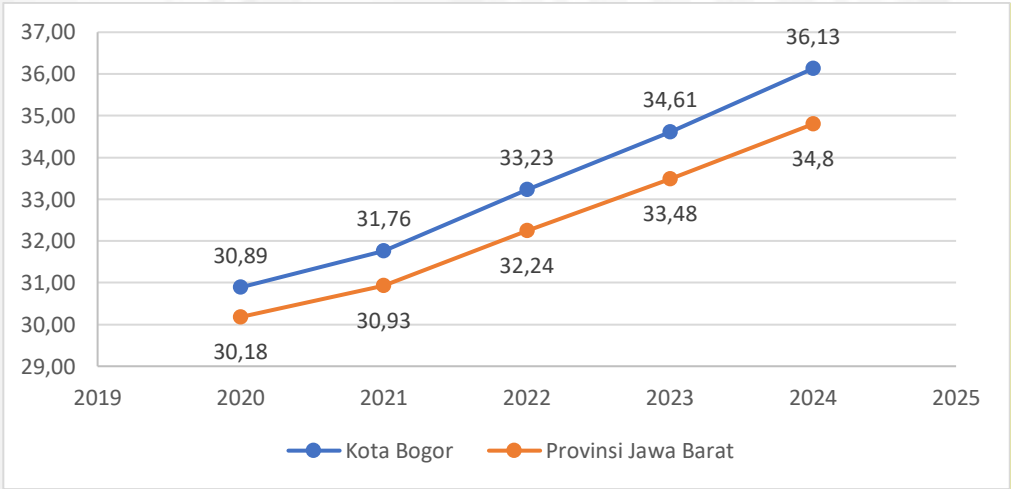
Grafik 2.12
PDRB Per Kapita ADHB Kota Bogor dan Prov. Jawa Barat
Tahun 2020-2024



Sumber: bogorkota.bps.go.id (2025), jabar.bps.go.id (2025)

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Bogor pada tahun 2024 mencapai 56.616 juta rupiah, meningkat sebesar 3.377 juta rupiah dibandingkan dengan 2023 yang sebesar 53,239 rupiah. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan produksi di hampir semua kategori usaha dan faktor inflasi harga.

Grafik 2.13
PDRB Per Kapita ADHK Kota Bogor dan Prov. Jawa Barat
Tahun 2020-2024



Sumber: bogorkota.bps.go.id (2025), jabar.bps.go.id (2025)

PDRB per kapita ADHK Kota Bogor menunjukkan tren yang meningkat secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, PDRB per kapita Kota Bogor tercatat sebesar 30,89 juta rupiah, kemudian terus tumbuh hingga mencapai 36,13 juta rupiah pada tahun 2024. Pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun mencerminkan peran aktif sektor-sektor ekonomi utama Kota Bogor, seperti jasa, perdagangan, dan industri pengolahan, dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat.

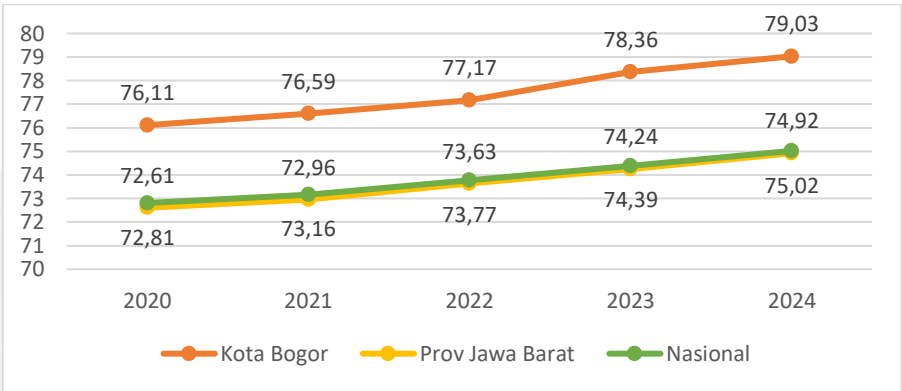
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM mengukur kualitas hidup dengan memperhitungkan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat,

pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ada empat indikator utama yang menjadi komponen perhitungan IPM yaitu usia harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita.

Grafik 2.14
Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor, Jawa Barat, dan Nasional tahun 2020-2024

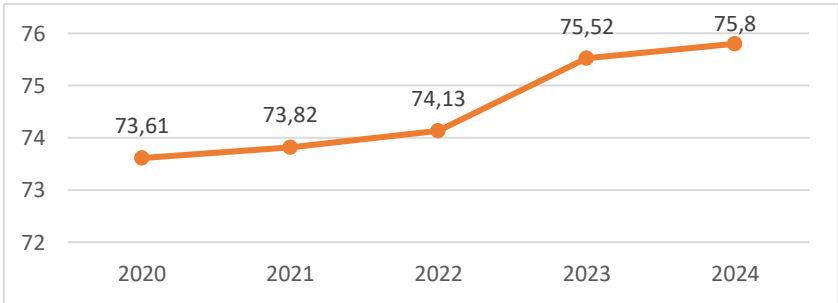


Sumber: bogorkota.bps.go.id (2025), jabar.bps.go.id (2025)

Dilihat dari grafik 2.14 di atas, IPM Kota Bogor terus menunjukkan perbaikan di tiap tahunnya. Pada tahun 2024 IPM Kota Bogor adalah sebesar 79,03, angka ini lebih tinggi dari angka Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Semakin tingginya nilai IPM di Kota Bogor mencerminkan bahwa kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. Kenaikan IPM ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tren di Kota Bogor ini dapat menunjukkan keberhasilan berbagai kebijakan pembangunan, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, program pendidikan yang lebih baik, serta pertumbuhan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Lonjakan signifikan pada 2023 dan 2024 sebagai hasil dari kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan, serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Meskipun demikian, tantangan tetap ada terutama dalam memastikan pemerataan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan bagi seluruh warga. Oleh karena itu, keberlanjutan program pembangunan menjadi faktor penting agar IPM Kota Bogor terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

Pembahasan lebih dalam mengenai indikator penyusun IPM adalah sebagai berikut:

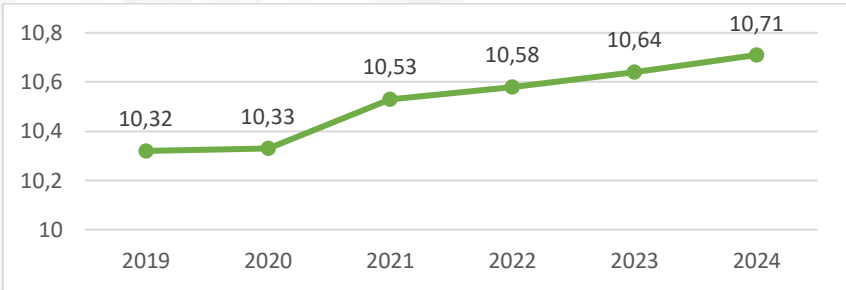
Grafik 2.15
Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Bogor 2020-2024



Sumber: bogorkota.bps.go.id (2025)

Secara umum, Usia Harapan Hidup (UHH) dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 75,8 tahun pada tahun 2024. Tren tersebut mencerminkan peningkatan kualitas layanan kesehatan, kebersihan lingkungan, serta kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan tahun 2024 dapat didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan, program vaksinasi, serta peningkatan fasilitas medis. Selain itu, faktor seperti keberlanjutan program kesehatan masyarakat, edukasi gizi, dan kebijakan penanganan penyakit menular serta tidak menular juga turut berperan. Meskipun demikian, tantangan juga terjadi secara beriringan, seperti kesenjangan dalam akses layanan kesehatan antara masyarakat perkotaan dan pinggiran. Keberlanjutan kebijakan kesehatan dan perbaikan infrastruktur layanan kesehatan akan menjadi kunci utama dalam mempertahankan dan meningkatkan UHH Kota Bogor di masa depan.

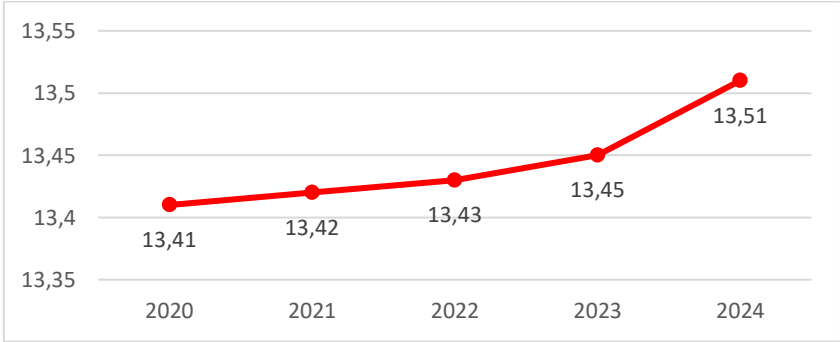
Grafik 2.16
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bogor Tahun 2020-2024



Sumber: bogorkota.bps.go.id (2025)

RLS merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani suatu pendidikan formal. RLS di Kota Bogor tahun 2020–2024, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2024 mencapai angka tertinggi sebesar 10,71 tahun, yang menunjukkan bahwa terdapat perbaikan dalam akses dan partisipasi pendidikan di Kota Bogor. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, termasuk program wajib belajar serta dukungan terhadap fasilitas pendidikan.

Grafik 2.17
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bogor 2020-2024



Sumber: bogorkota.bps.go.id (2025)

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Tren ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan kenaikan yang lebih tajam, mencapai angka tertinggi sebesar 13,51 tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan di Kota Bogor, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pendidikan, program bantuan sekolah, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Kota Bogor menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan harapan lama sekolah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa depan.

Grafik 2.18
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kota Bogor
Tahun 2020-2024



Sumber: bogorkota.bps.go.id (2025)

Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tersebut. Pengeluaran per kapita dapat dihitung dengan keseimbangan kemampuan belanja masyarakat. Tahun 2024 pengeluaran per kapita masyarakat di Kota Bogor sebesar Rp 13.154.000 Orang/Tahun.

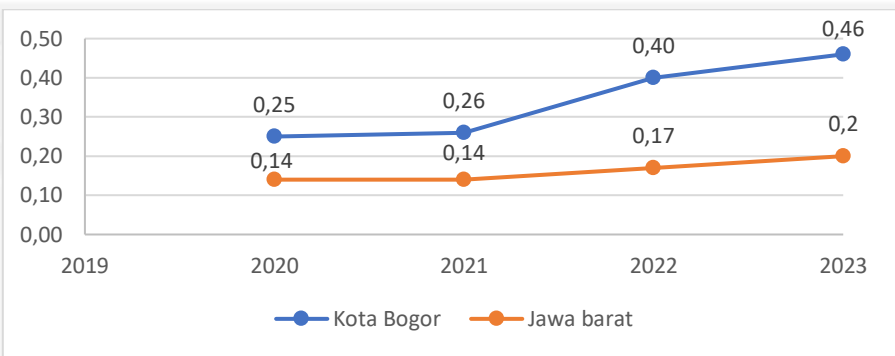
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari keempat komponen tersebut, pengungkit terbesar untuk pertumbuhan IPM di Kota Bogor selama ini adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Adapun indikator lain masih perlu dioptimalkan untuk bisa meningkatkan IPM Kota Bogor, terutama disini adalah HLS yang dari tahun ke tahun pertumbuhannya sangat kecil. Selain HLS, RLS Kota Bogor juga perlu didorong untuk bisa lebih tinggi lagi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Bogor.

2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Kesehatan Masyarakat dimana pada IKS terdapat 12 indikator yang mencakup aspek

eksehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan keluarga. Dengan meningkatkan kualitas hidup dan praktik hidup sehat di keluarga, maka Kesehatan individu dan keluarga secara keseluruhan akan meningkat. Nilai IKS dikategorikan dalam 3 kelompok yaitu Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8; Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS berada diantara 0,5 – 0,8; dan Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5 sebagaimana tersaji dalam grafik 2.19 di bawah ini.

Grafik 2.19
Indeks Keluarga Sehat Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor (2024)

Nilai IKS Kota Bogor dalam kurun waktu 2020 hingga 2023 terlihat terus mengalami peningkatan, sejalan dengan peningkatan di Jawa Barat. Nilai IKS ini meningkat namun jika dikelompokkan ke dalam kategori IKS maka kondisi rata-rata kesehatan keluarga di Kota Bogor berada dalam kategori Keluarga Tidak Sehat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah dalam penyediaan serta kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Kota Bogor. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan nilai IKS Provinsi Jawa Barat, maka nilai IKS Kota Bogor masih lebih tinggi. Pencapaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) didukung oleh 3 (tiga) program prioritas diantaranya yaitu:

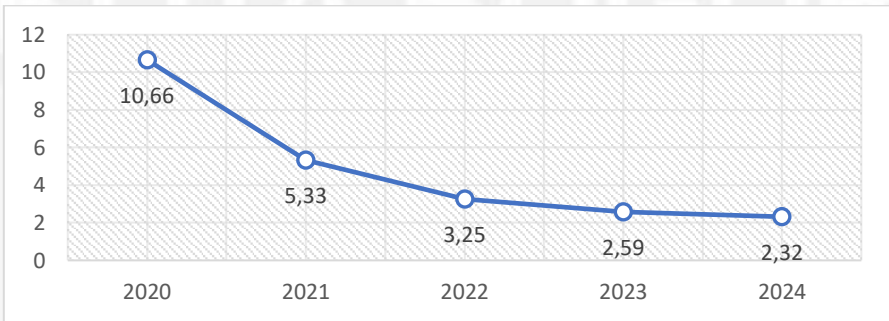
1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

3. Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting)

Pengurangan angka balita sangat pendek dan pendek menjadi salah satu prioritas utama guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya mengatasi permasalahan ini melalui berbagai program, seperti edukasi kesehatan kepada orang tua, peningkatan akses pangan bergizi, serta optimalisasi layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Dengan kebijakan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan angka balita sangat pendek dan pendek dapat terus menurun, sehingga anak-anak di Kota Bogor dapat tumbuh dengan sehat dan memiliki masa depan yang lebih baik. Berdasarkan grafik yang ditampilkan,

persentase balita sangat pendek dan pendek di Kota Bogor menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam periode 2020-2024, hingga mencapai 2,32% pada tahun 2024. Tren penurunan ini menandakan bahwa program peningkatan kualitas gizi, layanan kesehatan anak, serta edukasi kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti peningkatan cakupan imunisasi, penyuluhan pola makan sehat, serta penguatan akses terhadap fasilitas kesehatan ibu dan anak, turut berperan dalam menekan angka balita sangat pendek dan pendek.

Grafik 2.20
Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) di Kota Bogor Tahun 2020-2024

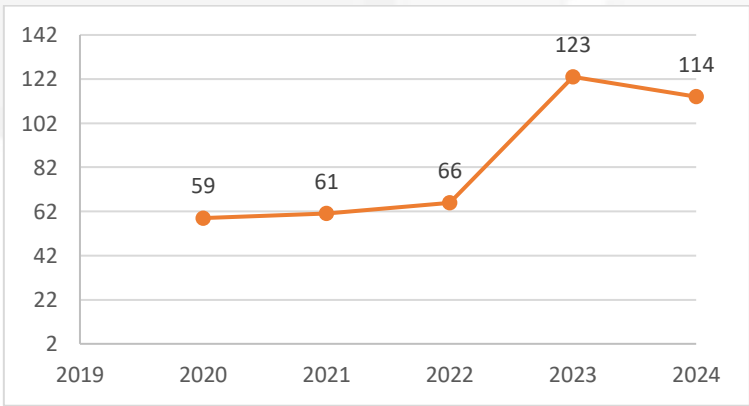


Sumber: Bulan Penimbangan Balita, Dinas Kesehatan Kota Bogor (2025)

4. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan indikator terhadap upaya pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan bayi baru lahir perinatal dan neonatal. AKB menggambarkan besarnya risiko kematian bayi (<1 tahun) dalam 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Kota Bogor tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, jumlah kematian bayi sebesar 123 kematian sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 114 kematian bayi.

Grafik 2.21
Jumlah Kematian Bayi di Kota Bogor Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor (2025)

Dari 114 Kematian bayi tersebut 103 kematian terjadi pada fase Neonatal (0-28 hari) dan 11 kematian pada fase post Neonatal/bayi (29 hari – 11 Bulan). Penyebab Kematian

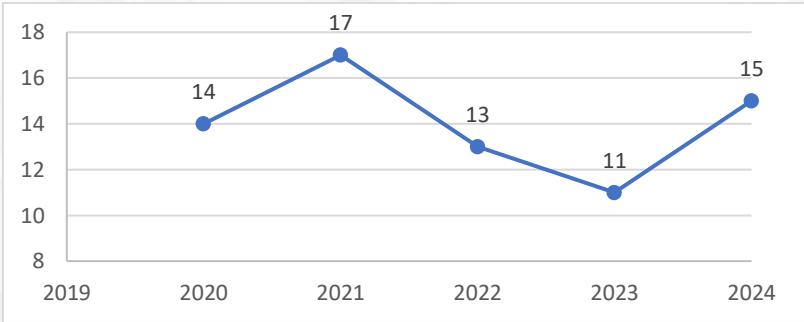
tersebut didominasi oleh kondisi Bayi BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan prematuritas.

5. Angka Kematian Ibu

Status Kesehatan Ibu penting untuk dilakukan pemantauan karna Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator dalam menggambarkan kesejahteraan di suatu wilayah. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menggambarkan besarnya risiko kematian ibu pada fase kehamilan, persalinan dan masa nifas di antara 100.000 Kelahiran Hidup (KH) dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Jumlah kematian ibu pada tahun 2024 di Kota Bogor adalah sebanyak 11 orang atau 92,02 per 100.000 KH. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah kematian ibu di Kota Bogor dari tahun 2023 dimana pada tahun tersebut sebanyak 15 orang atau 59,87 per 100.000 KH.

Grafik 2.22
Jumlah Kematian Ibu di Kota Bogor Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor (2025)

Penyebab terbesar dari kematian ibu di Kota Bogor pada tahun 2024 disebabkan oleh Komplikasi Non Obstetrik dimana masing-masing kasus ditemukan sebanyak 6 orang (40%). Penyebab kematian ibu di Kota Bogor lainnya diantaranya adalah Perdarahan Obstetrik sebanyak 5 orang (33%), Hipertensi dalam Kehamilan, Persalinan, dan Nifas sebanyak 3 orang (20%), dan Komplikasi Obstetrik Lain sebanyak 1 orang (7%).

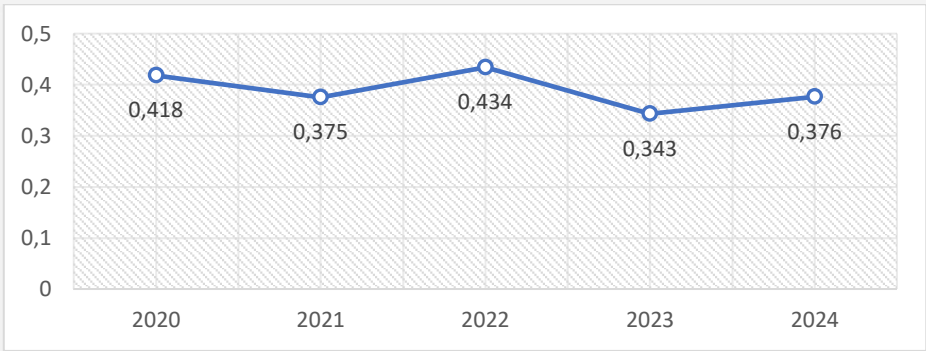
Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP).

6. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesenjangan atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam capaian

pembangunan manusia. IKG memberikan gambaran tentang sejauh mana potensi pembangunan suatu wilayah atau negara "hilang" atau tidak optimal akibat adanya ketimpangan gender. Indeks ini mencakup tiga aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan partisipasi di pasar kerja. IKG berkisar antara 0 hingga 1, dengan skor 0 menunjukkan ketimpangan gender yang sangat tinggi dan skor 1 menunjukkan kesetaraan yang sempurna. Pada tahun 2024, IKG Kota Bogor mengalami peningkatan menjadi 0,376, namun masih berada di bawah IKG Jawa Barat yakni sebesar 0,458.

Grafik 2.23
Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bogor Tahun 2020-2024

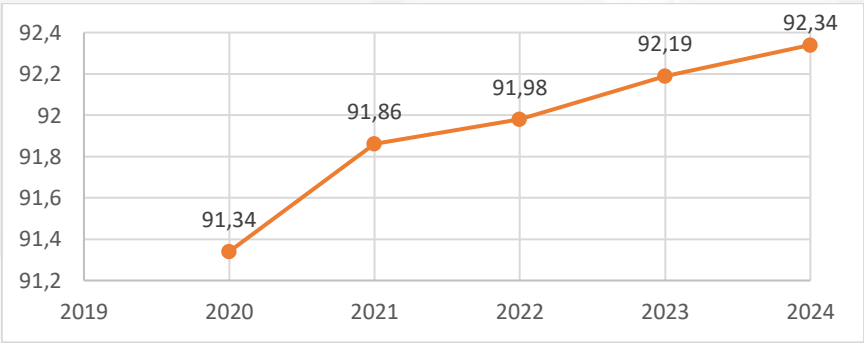


Sumber: BPS Prov. Jawa Barat (2025)

7. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menunjukkan perbandingan antara capaian IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. IPG ini mengukur tingkat ketidaksetaraan gender dalam pembangunan manusia. Semakin kecil jarak nilai IPG dari angka 100, semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. IPG Kota Bogor pada tahun 2024 mencapai 92,34 masih berada di atas IPG Jawa Barat yang mencapai 91,04.

Grafik 2.24
Indeks Pembangunan Gender di Kota Bogor Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Prov. Jawa Barat (2025)

8. Indikator Ketenagakerjaan

Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Kota Bogor tahun 2024 sebanyak 561.986 jiwa dimana 516.284 jiwa telah bekerja dan 45.702 jiwa termasuk kategori pengangguran terbuka atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk tercatat sebesar 67,35% dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah 8,13% terhadap angkatan kerja.

Tabel 2.17
Jumlah Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2024

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Angkatan Kerja	352.382	209.604	561.986
	Bekerja	325.000	191.284	516.284
	Pengangguran Terbuka	27.382	18.320	45.702
2.	Bukan Angkatan Kerja	68.555	203.937	272.492
Total		420.937	413.541	834.478

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2025

Distribusi angkatan kerja yang bekerja dilihat dari tingkat pendidikan untuk tahun 2030 – 2024 terdapat pada tabel 2.18 di bawah ini:

Tabel 2.18
Jumlah Angkatan Kerja Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun 2020 - 2024

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN	2020	2021	2022	2023	2024
Tidak/Belum Tamat Sekolah	NA	NA	NA	NA	NA
Sekolah Dasar (SD)	104.036	116.779	115.073	130.931	141.786
SMP	70.640	65.059	78.754	77.414	86,860
SMA Umum/SMA Kejuruan	183.238	184.881	183.510	185.858	212.207
Diploma /Akademi/ Universitas	91.196	99.926	119.233	90.131	75.431
Jumlah	449,120	466,645	496,570	484,34	516.284

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2025

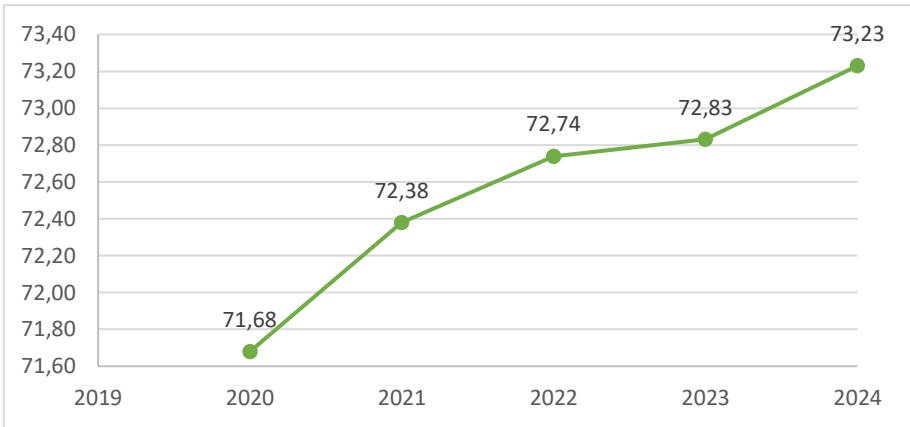
Angkatan kerja yang bekerja berdasarkan pendidikan paling banyak berasal dari jenjang SMA Umum/SMA Kejuruan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar
2.1.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

1. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan mencerminkan hasil pembangunan dalam sektor pendidikan dan juga menunjukkan perkembangan manusia di suatu wilayah, yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2020-2024, menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai 73,23 di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan pendidikan Kota Bogor yang telah berjalan positif dan berkelanjutan.

Grafik 2.25
Indeks Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Bogor (2025)

Tren peningkatan indeks pendidikan dapat dioptimalkan dengan menerapkan beberapa strategi, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Untuk jalur pendidikan formal, peningkatan dapat dicapai dengan memperbaiki infrastruktur pendidikan dan menyelesaikan program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, untuk jalur pendidikan informal, dapat dilakukan dengan membangun jalur alternatif sebagai akselerator, yaitu dengan membuka program kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Selain itu, strategi lainnya adalah dengan meningkatkan anggaran belanja pemerintah untuk pendidikan, sehingga bisa meratakan dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik serta memberikan beasiswa kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke fasilitas Pendidikan

2. **Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

APK digunakan untuk menunjukkan berapa besar tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan serta untuk menunjukkan besaran kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia tertentu. APK SD dan APK SMP berfluktuatif. Namun untuk di tahun 2024, APK SD dan APK SMP mengalami kenaikan dan sudah mencapai lebih dari 100.

APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur sesuai dengan ketentuan kelompok usia di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Pada tahun 2024, APM SD dan APM SMP mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Bogor

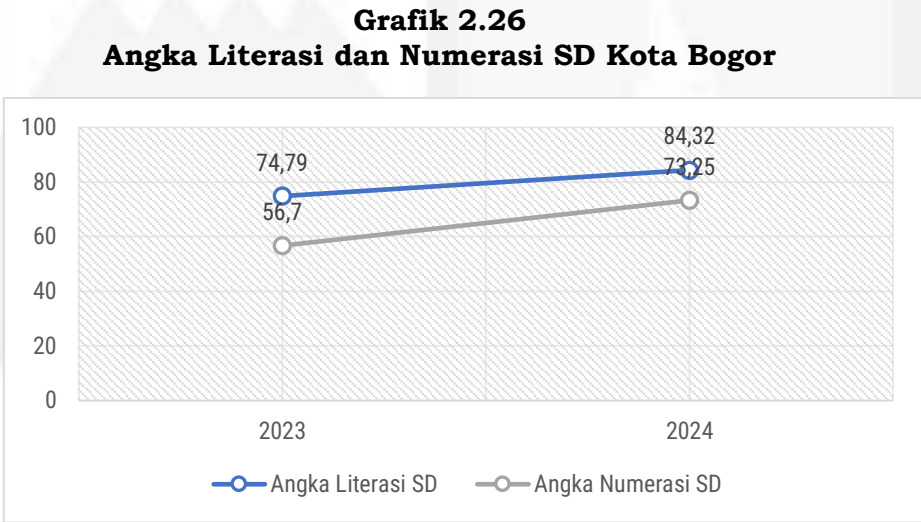
No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Kejar Paket A	107,27	105,98	103,35	95,5	101,16
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Kejar Paket B	107,8	106,4	105,4	95,5	106,54

3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Kejar Paket A	98,06	104,89	106,63	100	98,48
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Kejar Paket B	88,01	82,54	96,27	90	88,43
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99,91	103	101,58	91,92	99,21
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	95,32	89	93,26	89,48	94,61

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2025

3. Angka Literasi dan Numerasi SD

Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik tingkat SD merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan dasar. Literasi, meliputi kemampuan membaca dan memahami informasi, serta numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dasar, menjadi prasyarat penguasaan kompetensi lanjutan. Sebagai hak dasar individu, literasi dan numerasi berperan penting dalam partisipasi sosial dan ekonomi, serta menjadi bagian dari target Sustainable Development Goals (SDGs) pada Tujuan 4 "Pendidikan Berkualitas". Di tingkat nasional, asesmen literasi dan numerasi diprioritaskan melalui Asesmen Nasional (AN) sejak tahun 2021, yang mendorong daerah untuk meningkatkan mutu pembelajaran berbasis kompetensi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Bogor menjadikan penguatan literasi dan numerasi sebagai strategi peningkatan kualitas pendidikan dasar. Evaluasi perkembangan angka literasi dan numerasi SD tahun 2023 hingga tahun 2024 menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas program serta merumuskan kebijakan pendidikan ke depan.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor

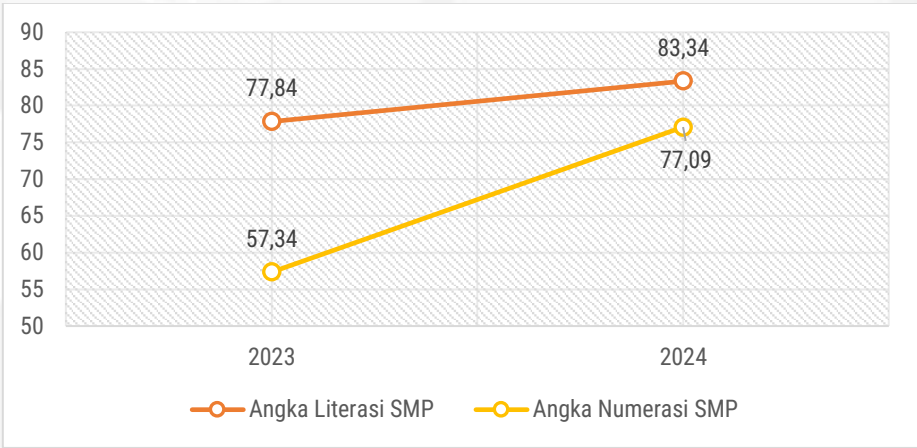
Berdasarkan grafik 2.26 di atas, capaian angka literasi dan numerasi siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Bogor menunjukkan peningkatan antara tahun 2023 dan tahun 2024. Pada tahun 2023, angka literasi SD tercatat sebesar 74,79, sedangkan angka numerasi berada pada 56,7. Tahun 2024, angka literasi meningkat menjadi 84,32 dan angka numerasi juga mengalami lonjakan hingga mencapai 73,25.

Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar memiliki peran strategis dalam membangun kesiapan peserta didik dalam memahami materi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, kemajuan pada indikator ini turut memperkuat daya saing pendidikan Kota Bogor baik di tingkat regional maupun nasional.

4. Angka Literasi dan Numerasi SMP

Penguatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi prioritas strategis untuk memastikan tercapainya kualitas pembelajaran yang relevan, adaptif, dan berdaya saing. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Pemerintah Kota Bogor telah melaksanakan berbagai intervensi untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasi. Kedua aspek ini merupakan prasyarat esensial bagi tumbuhnya kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher-order thinking skills) yang diperlukan dalam menghadapi tantangan. Evaluasi terhadap perkembangan angka literasi dan numerasi dari tahun 2023 hingga tahun 2024 menjadi penting untuk mengukur efektivitas intervensi tersebut, sekaligus memberikan dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih terarah.

Grafik 2.27
Angka Literasi dan Numerasi SMP Kota Bogor



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bogor

Berdasarkan grafik data tahun 2023 hingga tahun 2024, Angka Literasi SMP di Kota Bogor meningkat dari 77,84 menjadi 83,34, sedangkan Angka Numerasi SMP mengalami lonjakan signifikan dari 57,34 menjadi 77,09. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan substansial dalam kemampuan dasar siswa, khususnya pada aspek numerasi yang sebelumnya tertinggal jauh di bawah capaian literasi. Tren peningkatan ini menunjukkan arah yang positif menuju pencapaian tujuan pembangunan pendidikan dan keberhasilan signifikan dari berbagai program penguatan numerasi, termasuk integrasi pendekatan pembelajaran berbasis konteks dan peningkatan kapasitas guru dalam pedagogi numerasi.

5. Sarana Prasarana dan Sumber Daya Pendidikan

Salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bogor adalah tersedianya sarana prasarana berkondisi baik serta sumber-daya manusia yang memadai.

Tabel 2.20
Perkembangan Sarana Prasarana dan Sumber daya Pendidikan di Kota Bogor Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sekolah pendidikan SD/MI berkondisi baik (%)	94,50	96	98	98,73	99,12
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs berkondisi baik (%)	95,00	95,80	96	98	99
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	39	46	44	44	44
4	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah	20,25	33	24	31	32
5	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	86,90	89,20	89,43	92,30	93

Sumber; Dinas Pendidikan Kota Bogor, 2025

Rasio ketersediaan sekolah dan kondisi sekolah berkondisi baik setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru. Berdasarkan UU 14 Tahun 2005 bahwa kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma IV. Berdasarkan tabel 2.20 di atas dapat terlihat bahwa indikator guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 93%.

2.1.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

1. Distribusi Penduduk Kelompok Rentan

Distribusi penduduk kelompok rentan pada tabel 2.21 di bawah ini terlihat bahwa sebagian besar adalah balita 79.144 balita) dan usia lanjut (120.085 jiwa). Hal ini akan mengakibatkan adanya masalah kesehatan dan perlunya penanganan di golongan balita dan lansia, sehingga program-program penunjang ibu hamil, lansia dan balita perlu ditingkatkan seperti posyandu lansia, posyandu balita dan program-program unggulan kesehatan diarahkan kepada peningkatan kesehatan balita dan lansia.

Tabel 2.21
Distribusi Penduduk Kelompok Rentan di Kota Bogor Tahun 2024

No	Kecamatan	Bumil	Bulin	Bayi	Balita	SD	Usila
1	BOGOR SELATAN	3168	3147	3016	15396	29182	23349
2	BOGOR TIMUR	1573	1563	1498	7646	14489	11605
3	BOGOR UTARA	1575	1565	1500	7656	14507	11622
4	BOGOR TENGAH	3678	3653	3502	17875	33874	27127
5	BOGOR BARAT	2953	2933	2812	14353	27203	21771
6	TANAH SAREAL	3337	3315	3178	16219	30737	24612
	Kota Bogor	16284	16176	15506	79144	149992	120085
	Persentase	1,44	1,43	1,38	7,02	13,30	10,65

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024

2. Sarana Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2018 menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Tabel 2.22
Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Bogor Tahun 2024

Sarana Kesehatan	Jumlah	Satuan
Jumlah Rumah Sakit Umum	18	RS
Jumlah Rumah Sakit Khusus	4	RS
Jumlah Puskesmas Rawat Inap	0	Puskesmas
Jumlah Puskesmas non-Rawat Inap	25	Puskesmas
Jumlah Puskesmas Keliling	0	Puskesmas keliling
Jumlah Puskesmas pembantu	31	Pustu
Jumlah Apotek	190	Apotek
Jumlah Klinik Pratama	144	Klinik Pratama
Jumlah Klinik Utama	31	Klinik Utama
RS dengan kemampuan pelayanan gadar level 1	100	%

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024

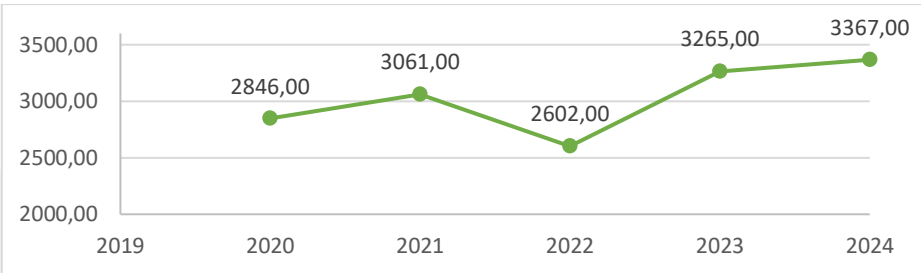
Jumlah Puskesmas di Kota Bogor berjumlah 25 dengan jumlah penduduk 1.144.124 jiwa dan jumlah puskesmas induk 25, maka Ratio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2024 adalah 1:45.764, yang artinya 1 puskesmas melayani 45.764 penduduk, rasio ini belum memenuhi standar Kemenkes di mana perbandingan yang ideal yaitu 1:30.000 penduduk.

Adapun untuk Rumah Sakit terdapat 1 RS kelas A, yaitu RSMM yang merupakan RS Khusus Jiwa; Kelas B sebanyak 3 RS (14%); Kelas C sebanyak 16 RS (73%) dan Kelas D sebanyak 2 RS (9%) dengan 20 RS terakreditasi Paripurna dan 2 RS terakreditasi Utama.

3. Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit

Berikut data perkembangan Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Kota Bogor.

Grafik 2.28
Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit di Kota Bogor
Tahun 2020-2024



Sumber: Profil Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024

Kondisi tahun 2020 jumlah tempat tidur rumah sakit sebanyak 2.846 dari RS yang melapor dan meningkat menjadi 3061 tempat tidur di tahun 2021 karena kondisi pandemic Covid 19 yang mengharuskan RS menambah kapasitas tempat tidur dan di tahun 2022 menurun menjadi 3041 namun di tahun 2023 penambahan tempat tidur kembali sebanyak 3265 tempat tidur dan di tahun 2024 menjadi 3367 Tempat tidur. Rasio Jumlah RS dibandingkan jumlah penduduk di Kota Bogor tahun 2024 adalah 2,94 per 1000 penduduk. Rasio ini telah memenuhi standar rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit per satuan penduduk adalah 1:1000. memberikan gambaran bahwa secara kuantitas ketersediaan tempat tidur di Kota Bogor relatif baik.

4. Jumlah Posyandu dan Posbindu

Posyandu di Kota Bogor tahun 2024 ini berjumlah 983 posyandu, sedangkan posbindu sejumlah 707. Jumlah posyandu aktif adalah 983 (100%). Rasio posyandu dibanding jumlah balita adalah 1,1 per 100 balita. Adapun data distribusi posyandu dan posbindu per kecamatan di Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23
Data Jumlah Posyandu, Posyandu Aktif dan Posbindu
per Kecamatan di Kota Bogor Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Jumlah Posbindu
BOGOR SELATAN	225	225	100%	156
BOGOR TIMUR	98	98	100%	63
BOGOR UTARA	149	149	100%	99
BOGOR TENGAH	128	128	100%	88
BOGOR BARAT	213	213	100%	174
TANAH SAREAL	170	170	100%	127
KOTA BOGOR	983	983	100,00%	707

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024

5. Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga di bidang kesehatan di Kota Bogor pada tahun 2024 mencapai 8.856 orang, yang terdiri dari Dokter Spesialis sebanyak 1.028 orang, Dokter Umum sebanyak 943 orang, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis sebanyak 515 orang, Bidan sebanyak 724 orang, Perawat sebanyak 3.248 orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 185 orang, Tenaga Kesehatan Lingkungan sebanyak 70 orang, Tenaga Gizi sebanyak 108 orang, Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebanyak 304 orang, Tenaga Teknik Biomedika Lainnya sebanyak 135 orang, Tenaga Keterampilan Fisik sebanyak 136 orang, Tenaga Keteknisian Medis sebanyak 134 orang, Teknis Kefarmasian sebanyak 331 orang, Tenaga Apoteker sebanyak 332 orang dan Tenaga Kefarmasian 20 21 sebanyak 663 orang. Adapun rincian Data Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.24
Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Puskesmas	Rumah Sakit	Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	Total	Rasio
Jumlah Penduduk						1.127.408
1	Dokter Spesialis	0	957	71	1028	91,2
2	Dokter Umum	125	359	459	943	83,6
3	Dokter Gigi	51	86	290	427	37,9
4	Perawat	141	2.888	218	3247	288,0
5	Bidan	184	407	724	1315	116,6
7	Tenaga Kefarmasian	74	346	239	659	58,5
8	Gizi	46	57	2	105	9,3
9	Kesehatan Lingkungan	47	18	0	65	5,8
10	Kesehatan Masyarakat	48	41	7	96	8,5
11	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	47	208	49	304	27,0
12	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	8	121	6	135	12,0
13	Keterampilan Fisik	0	124	12	136	12,1
14	Keteknisian Medis	21	111	2	134	11,9
16	Tenaga Penunjang/Pendukung	264	3.425	825	4514	
TOTAL		1056	9148	2904	13108	

Sumber: Profil Kesehatan Kota Bogor Tahun 2024

Berdasarkan data dari tabel 2.24 di atas yaitu mengenai rekapitulasi tenaga kesehatan /100.000 penduduk Kota Bogor Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan di Kota Bogor sudah memenuhi target rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.

2.1.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum

Pembangunan aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum mencakup beberapa komponen penting, baik berupa panjang jalan Kota Bogor dalam kondisi baik serta komponen yang mendukungnya seperti drainase jalan dan trotoar jalan. Selain itu yang menjadi fokus pembangunan urusan pekerjaan umum adalah pembangunan turap penahan longsor dan perbaikan jaringan irigasi.

Tabel 2.25
Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum di Kota Bogor

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	83,47	84,20	88,23	88,95	90,5
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air minimal 1,5 m (meter)	66,7	507,38	518,377	96,121	96,321
Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	3,72	75,12	5,43	5,49	6,07
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	11,17	25,11	25,86	20,15	67,86
Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	0,014	0,509	60,71	0,88	0,82
Rasio Jaringan Irigasi	0,26	0,415	0,345	0,36	0,372
Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik (%)	57,5	51,58	52,62	53,66	54,65
Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	863	921	985	1195	1295
Rasio pemakaman umum per satuan penduduk	12	11,38	11,98	9,74	14,70
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,03	1,57	1,49	1,52	1,54

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

Menurut data BPS, pada tahun 2024 secara keseluruhan hanya 10,25% masyarakat Indonesia yang terlayani air limbah yang aman. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat, hanya 10,54% masyarakat terlayani air limbah yang aman. Dengan demikian, capaian Kota Bogor masih berada dibawah capaian Provinsi dan Nasional.

Pada tahun 2024, rasio jaringan irigasi dan persentase irigasi kota dakam kondisi baik mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Namun perlu adanya penambahan panjang saluran irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian. Jumlah lokasi rawan longsor yang sudah dibangun Tembok Penahan Tebing semakin meningkat yakni mencapai 1295 titik di tahun 2024. Rasio pemakaman umum mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2023.

2. Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Penataan Ruang

Dalam perspektif tata ruang kota, untuk meminimalkan timbulnya fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Keberadaan RTH di wilayah perkotaan adalah untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain. RTH sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan air dan udara bersih bagi masyarakat serta menciptakan estetika kota. Luas RTH di wilayah perkotaan agar dapat menjalankan proses-proses ekologis tersebut minimal 30% dari total luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%.

Tabel 2.26
Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Penataan Ruang di Kota Bogor

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	6,12	6,45	4,24	4,23	4,26
Persentase realisasi rencana struktur ruang	20	40	60	49,45	51,47
Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang	20	40	60	58,76	62,50
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (RTH Publik)	4,18	4,20	4,24	4,23	4,26
Kesesuaian Bangunan dengan IMB yang telah terbangun (%)	94,18	99,88	99,59	99,7	95,79
Pencegahan Bangunan tidak Ber-IMB (%)	87,15	88,45	95,18	86,97	88,59

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pada tahun 2024, sudah 95,79% bangunan di Kota Bogor yang sudah dibangun sesuai dengan IMB serta tindakan pencegahan untuk bangunan yang belum memiliki IMB mencapai 88,59%. Diharapkan pemerintah Kota Bogor dapat terus memperhatikan izin dari bangunan yang akan dibangun sehingga tidak ada bangunan liar/ bangunan yang tidak memiliki izin.

2.1.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Selama lima tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024, jumlah rumah tidak layak huni yang sudah direnovasi adalah sebanyak 21.709 rumah. Hasil dari upaya yang telah dilakukan untuk merenovasi RTLH tersebut adalah turunnya angka persentase rumah tidak layak huni, dari 24,61% di tahun 2020 menjadi 5,43% pada tahun 2024.

Tabel 2.27
Indikator Rumah Layak Huni di Kota Bogor Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio rumah layak huni	18,37	17,36	18,52	21,16	21,41
Rasio permukiman layak huni	95,51	90,99	96,31	89,13	90,56
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	75,00	80,02	82,19	92,82	94,57
Persentase lingkungan permukiman kumuh kewenangan kota	3,99	2,12	2,02	2,02	1,72
Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	94,01	86,68	76,82	72,36	61,68
Berkurangnya jumlah unit RTLH	24,61	19,98	17,81	7,18	5,43
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	11,53	10,72	10,72	12,04	12,71

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, 2025

2.1.3.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3, persentase penegakan perda, cakupan pelayanan bencana kebakaran dan tingkat waktu tanggap bencana.

Tabel 2.28
Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bogor

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100	100
Persentase Penegakan PERDA (%)	100	100	100	100	100
Cakupan petugas perlindungan masyarakat	3739	3739	3739	1049	1049
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%)	100	94	100	50	50
Waktu tanggap pelayanan kebakaran	87,10	100	95,35	95	95
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	15,1	9,3	9,3	11,91	10,65

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, 2025

Berdasarkan data pada tabel 2.28 di atas, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Bogor telah mencapai 100%, ini bermakna seluruh pelanggaran K3 telah diselesaikan. Adapun cakupan penegakan perda Kota Bogor selama menunjukkan angka realisasi 100%. Hal ini bermakna seluruh pelanggaran Perda telah ditindaklanjuti. Hubungan antara ketiga indikator tersebut saling berkesinambungan, sehingga semakin baiknya petugas Satpol PP melakukan patroli maka semakin berkurangnya angka pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat sehingga capaian penegakan Perda pun akan maksimal.

Sementara itu untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Bogor mengalami kenaikan pada tahun 2024 hanya mencapai 50%. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum sub Urusan Kebakaran bahwa Wilayah Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota (Wilayah Manajemen Kebakaran/ WMK) yaitu 1 (satu) Pos Damkar untuk 1 (satu) Wilayah Kecamatan. Di Kota Bogor hanya ada 3 pos damkar di 3 kecamatan.

Untuk waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran di Kota Bogor telah menunjukkan hasil kinerja yang positif. Menurut SPM dalam Permendagri Nomor 69/2012 disebutkan bahwa standar waktu tanggap (*response rate*) sebesar 75%, sementara itu, waktu tanggap bencana di Kota Bogor pada tahun 2024 telah mencapai 95% dengan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time*) daerah layanan WMK rata-ratanya 10,65 menit.

2.1.3.1.6. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang

merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel 2.29
Indikator Sosial di Kota Bogor Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)	92	95	96	100	100
Persentase PMKS yang tertangani	92	95	98	100	100
Persentase penurunan anak terlantar	66,3	100	100	95,45	100
Persentase KK miskin	66,3	19,57	19,26	19,26	19,08
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	32	40	100	100	38
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	92	94	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Bogor, 2025

Target persentase KK miskin adalah 18,46%, tidak tercapainya target indikator ini disebabkan karena sedang dilaksanakan proses pemutakhiran data DTKS ke dalam data DTSN sehingga banyak data yang terhapuskan, turunnya daya beli masyarakat akibat tingginya harga bahan pokok, terjadinya proses PHK yang meningkat, serta belum optimalnya upaya meningkatkan pendapatan.

2.1.3.2. **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

2.1.3.2.1. **Tenaga Kerja**

Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, dapat diukur realisasi kinerja urusan tenaga kerja di Kota Bogor yang mencakup indikator sebagaimana disajikan pada tabel 2.30 di bawah ini:

Tabel 2.30
Indikator Ketenagakerjaan di Kota Bogor

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kesempatan kerja (%)	87,74	91,87	89,22	90,61	91,87
Jumlah tenaga kerja yang terserap pasar kerja	965	2440	7005	6729	5632
Penetapan besaran UMK	4.169.806	4.330.249	4.634.429	4.813.988	5.126.897
Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	64,70	71,43	67,21	76,5	76,5
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	17,48	18,28	18,37	18,62	18,81

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, 2025

Tingkat kesempatan kerja, penetapan besaran UMK, tingkat produktivitas tenaga kerja, dan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Namun jumlah tenaga kerja yang terserap pasar kerja mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Adapun cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di tahun 2024 sebesar 49,27. Dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial

ketenagakerjaan di Kota Bogor memerlukan pendekatan multi-sektoral dan strategi yang terarah. Fokus utama adalah menyasar sektor-sektor yang cakupannya masih rendah, seperti pekerja informal dan UMKM, serta meningkatkan kesadaran dan kemudahan akses. Pemerintah Kota Bogor dapat menerbitkan Perda yang mewajibkan atau mendorong kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi UMKM dan pekerja informal di sektor-sektor tertentu. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga dapat mengalokasikan dana subsidi iuran untuk kelompok pekerja rentan atau UMKM pemula sebagai stimulus awal kepesertaan

2.1.3.2.2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 2.31 berikut ini.

Tabel 2.31
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	22	22	22	22	26
Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	50,77	36,23	36,56	47,66	50,69
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	0,011	0,003	0,0118	0,0127	0,0116
Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	52,46	49	79	84	83
Prevalensi kekerasan terhadap anak	0,0082	0,001	0,0018	0,0021	0,0287
Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak (%)	60	63	79	54	37,93

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor, 2025

Meningkatnya prevalensi kekerasan terhadap Perempuan dan anak ini, sebetulnya adalah hal yang baik yang merupakan hasil dari sosialisasi untuk melaporkan kekerasan terhadap anak. Tren ini juga terjadi di Jawa Barat dan Nasional. Sebelumnya korban maupun orang yang menyaksikan kekerasan terhadap perempuan tidak melaporkan kekerasan yang dialami atau disaksikan. Dengan melapor, korban kemudian mendapatkan perlindungan. Sedangkan sebelumnya, ketika tidak ada yang melapor, korban bisa terus menerus menjadi korban tanpa ada perlindungan

2.1.3.2.3. PANGAN

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan agenda penting pembangunan dalam rangka

memenuhi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik.

Tabel 2.32
Indikator Pangan Kota Bogor Tahun 2020 – 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan pangan utama (kg/kap/tahun)	231,20	156,18	164,92	151,47	152,49
2	Ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hr)	2375	2230	2403	2318	2460
3	Ketersediaan protein per kapita (gram/kap/hr)	68	63,6	81,20	76,40	81,87
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	90,81	93,75	94,68	92,96	92,39

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2025

Ketersediaan pangan utama di tahun 2024 sebesar 152,49 kg/kap/tahun yang mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023. Ketersediaan pangan utama Kota Bogor mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan salah satunya oleh peningkatan jumlah penduduk, semakin minimnya lahan pertanian sehingga harga komoditi di pasar lebih mahal karena pedagang membeli pasokan melalui pengepul dari luar kota. Sehingga diperlukan upaya peningkatan pembudayaan pertanian organik. Semakin berkurangnya jumlah petani juga menjadi faktor penurunan ketersediaan pangan di Kota Bogor. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bogor salah satunya yaitu melalui pembinaan Kebun Organik Herbal Bejo di 68 kelurahan se-Kota Bogor.

Ketersediaan energi di tahun 2024 sebesar 2460 kkal/kap/tahun yang mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2023. Ketersediaan protein di tahun 2024 sebesar 81,87 gram/kap/tahun telah melebihi angka kecukupan energi ideal yaitu 63 gram/kap/hari. Kebutuhan konsumsi protein bagi masyarakat di Kota Bogor pangan Kota Bogor didukung oleh adanya regulasi ketahanan pangan.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan ditujukan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/ perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di tahun 2024 mencapai 92,39%, konsistensi dalam upaya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan perlu terus dilakukan untuk membangun komitmen dalam upaya mewujudkan peredaran pangan yang sehat dan aman dikonsumsi oleh masyarakat.

2.1.3.2.4. Pertanian

Penyelesaian kasus tanah negara menjadi cerminan dalam melihat peran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah negara.

Tabel 2.33
Indikator Urusan Pertanahan di Kota Bogor Tahun 2020-2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara	100	100	100	100	100
2	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal (%)	73	75	80	85	90

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, 2025

Penyelesaian kasus tanah negara di Kota Bogor telah dilaksanakan secara penuh. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus tanah negara di Kota Bogor telah membantu dalam mencapai konsensus dan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan. Meskipun demikian upaya untuk melakukan penyelesaian tanah negara di Kota Bogor perlu dilakukan secara optimal baik dalam memperkuat SDM pengelola aset melalui pembentukan tim kelompok kerja optimalisasi aset tingkat K/L, yang bertugas dalam pengamanan yang belum terdapat pembatas pagar, papan nama, dan lainnya, melakukan pelaporan kepada pengelolaan barang, melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian sebagai tindak lanjut atas persetujuan pengelolaan barang, dan usaha-usaha lain untuk menjaga aset negara secara administratif. Selain itu perlu dilakukan koordinasi dengan pengelola barang untuk senantiasa melakukan pengawasan pada aset-aset negara yang sudah diberikan izin, dan perlu adanya penguatan fungsi APP pada penelaahan perencanaan kebutuhan baik pada perhitungan SBSK maupun lainnya.

Hingga tahun 2024, sudah tersedia 90% lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal. Kondisi daerah Kota Bogor terkait urusan dapat dilihat pula dari penyelesaian permohonan izin lokasi. Proses pembuatan Izin Lokasi dilaksanakan secara kolektif dengan SKPD terkait dengan *leading* sektornya adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengetahui kemudahan investasi sebagai daya tarik investasi dalam mengundang investor. Semakin banyak penyelesaian permohonan izin lokasi menggambarkan semakin mudah dan menarik berinvestasi di suatu daerah.

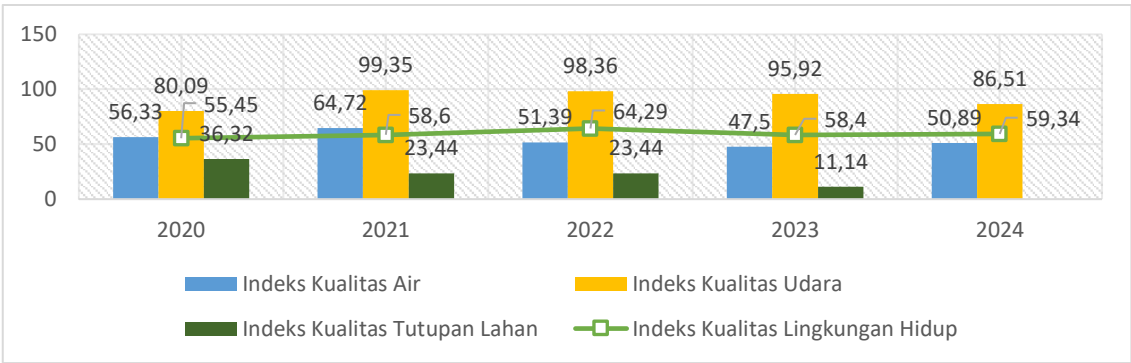
2.1.3.2.5. Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan pemulihan kualitas lingkungan. Pemantauan indikator-indikator lingkungan ini direpresentasikan dalam

IKLH yang mencakup Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Grafik 2.29
Perkembangan IKLH, IKA, IKU dan IKTL di Kota Bogor



Sumber: KLHS RPJMD Kota Bogor 2025-2029

IKU mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai puncaknya sebesar 99,35, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga 86,51 pada tahun 2024. IKA mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dimulai dari 56,33 pada tahun 2020, naik ke 64,72 pada tahun 2021, lalu turun kembali hingga 47,5 pada tahun 2023, dan sedikit membaik menjadi 59,34 pada tahun 2024. IKTL menunjukkan tren yang sangat menurun, dari 36,32 di tahun 2020 menjadi hanya 11,14 di tahun 2023, sebelum sedikit meningkat di tahun 2024.

Secara umum, IKLH di Kota Bogor mengalami peningkatan pada periode 2020-2024. Pada tahun 2020, IKLH berada di angka 55,45. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021 dengan indeks mencapai 58,6 sebelum mencapai puncaknya di 64,29 pada tahun 2022, hal ini mencerminkan kondisi lingkungan yang membaik. Namun, pada tahun 2023 IKLH mengalami penurunan tajam menjadi 58,4, hal ini terjadi akibat aktivitas industri, urbanisasi, atau konversi lahan hijau menjadi pemukiman dan komersial, serta dampak polusi udara akibat transportasi dan industri. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit peningkatan menjadi 59,34, sebagai upaya pemulihan. Fluktuasi ini menggambarkan tantangan Kota Bogor dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kota yang pesat dengan keberlanjutan lingkungan, sehingga diperlukan strategi jangka panjang yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas lingkungan secara konsisten.

2. Persampahan

Permasalahan terkait sampah terus menjadi perhatian utama bagi kota-kota di Indonesia, termasuk Kota Bogor. Tempat penumpukan sampah, yang dikelola baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, dapat berupa area terbuka atau tertutup. Pengelolaan tempat penimbunan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Sampah dibagi menjadi organik dan anorganik, dan upaya pengelolaan sampah diperlukan untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Hal ini mencakup

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan daur ulang material sampah dengan tujuan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan estetika. Selain itu, pengelolaan sampah bertujuan untuk mendaur ulang sumber daya alam. Pemerintah Kota Bogor telah melakukan upaya maksimal dalam menangani masalah sampah demi keberlanjutan lingkungan yang lebih baik.

Tabel 2.34
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Bogor Tahun 2020 – 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	84,81	88,85	89,15	86,84	89,38
2	Timbulan sampah yang ditangani (%)	77,20	81,00	81,32	79,03	81,40
3	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	7,61	7,85	7,80	7,81	7,98
4	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	77,2	81,19	81,32	79,03	81,40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor, 2024

Berdasarkan data pada tabel 2.34 di atas, persentase jumlah sampah yang tertangani di Kota Bogor mencapai angka tertinggi sebesar 89,38% pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, persentase timbulan sampah yang tertangani di angka 81,40% pada tahun 2024. Pada persentase jumlah sampah yang berhasil dikurangi melalui prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (3R), yang menunjukkan peningkatan hingga menjadi 7,98% pada tahun 2024. Meskipun peningkatan relatif kecil, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam menerapkan konsep pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Sementara itu, implementasi pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota, menunjukkan tren yang fluktuasi. Pada tahun 2024 mencapai 81,40%. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam konsistensi pengelolaan sampah, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kapasitas fasilitas pengelolaan sampah, efektivitas regulasi, serta partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah.

2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dan Akte Kelahiran.

Tabel 2.35
Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepemilikan KTP	98	99,34	99,31	100	100
2	Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	23	40	64,79	70,10	80
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	95	96,43	96,51	98	100
4	Cakupan pasangan non muslim berakte kawin	31	53,82	52,49	55	62,34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2025

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepemilikan KTP di Kota Bogor pada tahun 2024 mencapai 100%, karena adanya kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang baik, terjalinnya koordinasi yang baik antara Pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait pemenuhan blangko KTP serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan. Adapun kepemilikan akta kelahiran masyarakat di Kota Bogor pada tahun 2024 telah mencapai 100%.

Diperlukan upaya untuk meningkatkan pendataan dan pemahaman Masyarakat terkait pendataan kelahiran bayi melalui akte kelahiran oleh pemerintah daerah Kota Bogor. Bagi pencatatan akta kelahiran yang terlambat dapat dilakukan upaya pelayanan langsung di kelurahan. Upaya untuk pemberian *feedback* atau pelayanan pendataan kependudukan akta kelahiran dapat selalu ditingkatkan melalui pembentukan saluran hotline pengaduan dan pembentukan dispenduk agen yang bertugas melakukan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi kepada warga masyarakat khususnya di kelurahan di mana dispenduk agent ditugaskan.

2.1.3.2.7. **Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.36
Perkembangan partisipasi masyarakat di Kota Bogor
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	-	7,36	10,29	10,29	14,71
2	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	-	-	98,33	99,9	100
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	75	75	75	75	75

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025

Tabel 2.36 di atas menunjukkan bahwa kelompok binaan PKK aktif di Kota Bogor telah mencapai 100%. Hal ini terbukti dengan perolehan 329 penghargaan dalam 10 tahun terakhir melalui kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah Kota Bogor dalam berbagai program sosial dan keagamaan. Peran PKK di Kota Bogor dalam hal ini telah menunjukkan partisipasi yang cukup baik, sehingga diharapkan dapat semakin dioptimalkan.

2.1.3.2.8. **Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Pengendalian penduduk merupakan sebuah usaha dalam mempengaruhi pola kembang biak penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan

seperti program KB (Keluarga Berencana) dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar lebih seimbang.

Tabel 2.37
Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bogor Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,33	1,19	2,07	0,96	1,27
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,135	2,03	2,03	1,870	1,89
3	Ratio akseptor KB (%)	77,42	78,63	78,66	64,70	63,59
4	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	53,01	58,48	95,4	100	95,73
5	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	31,97	40,57	39,81	71,90	71,91
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	18,03	26,51	8,46	75,93	75,95

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2025

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor pada tahun 2024 cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Meskipun angka kelahiran bukan merupakan satu-satunya faktor bertambahnya jumlah penduduk, namun merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertambahan jumlah penduduk.

Akseptor KB adalah pasangan umur subur yang menggunakan alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB meningkat dari tahun 2020 hingga 2022 namun mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu mencapai 63,59%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kota Bogor dalam penerimaan program KB di Kota Bogor cukup tinggi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan pemahaman masyarakat pada program-program KB dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan adanya pembentukan dan pengembangan kampung-kampung KB di Kota Bogor, apresiasi Kampung KB, berbagai kompetisi terkait ketahanan keluarga, pembentukan duta dan berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan terkait remaja dalam generasi berencana tingkat kota Bogor. Upaya dalam mengembangkan kampung KB yaitu untuk menciptakan keluarga berkualitas tinggi yang mengacu pada peningkatan kualitas hidup di tingkat kota melalui perencanaan kependudukan, keluarga berencana, dan pengembangan keluarga.

2.1.3.2.9. Perhubungan

Angkutan Umum menjadi moda transportasi masyarakat. Fasilitasi penyelenggaraan angkutan umum di Kota Bogor perlu dioptimalisasi sebagai perwujudan dalam pelayanan publik.

Tabel 2.38
Indikator Urusan Perhubungan Kota Bogor Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah arus penumpang angkutan umum	24.060.642	22.442.108	12.201.950	23.069.825	113.953.567
Persentase cakupan pelayanan angkutan Umum	32	78,99	42,15	60,07	60,07
Rasio Izin Trayek	0,0021	0,000152	0,000132	0,0114894	0.000189
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.504	5.304	2.836	2.015	5.662
Rasio Konektivitas angkutan jalan lingkup kota	-	0,78	0,78	0,78	0,80

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bogor, 2025

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah penumpang angkutan umum, salah satunya karena mulai beroperasinya BisKita Trans Pakuan yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi publik di Kota Bogor. Kehadiran BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor disambut baik oleh masyarakat Kota Bogor. BisKita beroperasi dengan empat koridor yaitu Koridor 1 (Terminal Bubulak-Cidangiang), Koridor 2 (Terminal Bubulak-Ciawi), Koridor 5 (Taman Vila Bogor Indah-Stasiun Bogor) dan Koridor 6 (Katulampa-Air Mancur).

Terdapat 108 kendaraan angkutan kota yang dikonversi menjadi angkutan berbasis bus, 330 kendaraan yang direduksi, dan 58 kendaraan yang diberikan kompensasi. Selain itu, juga dilakukan pencabutan izin bagi angkot-angkot yang sudah tidak layak operasi. Hasil dari upaya yang telah dilakukan tersebut, jumlah angkot di Kota Bogor telah mengalami pengurangan dari 3.412 di tahun 2019 menjadi 2.836 di tahun 2024.

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang atau pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Seluruh angkutan umum yang ada di Kota Bogor umum wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Rasio izin trayek pada tahun 2024 sebesar 0.000189.

Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Uji KIR ini diharapkan dapat menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum. Pada tahun 2024, ada sebanyak 5.662 yang mengikuti uji KIR.

2.1.3.2.10. Komunikasi dan Informasi

Secara umum pencapaian indikator urusan komunikasi dan informatika disajikan pada tabel 2.39 berikut:

Tabel 2.39
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bogor Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Nilai SPBE	2,97	3,11	2,75	3,72	4,08
2	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,29	3,1	3,1	3,7	4,1
3	Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,0	2,5	2,5	3,0	4
4	Nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi	NA	3,25	3,25	3,5	3,75
5	Nilai aspek penerapan manajemen SPBE	NA	2,63	2,63	2,88	3,88
6	Persentase keterbukaan informasi publik	98	77,5	79,80	86,40	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, 2025

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan ke pengguna. Nilai SPBE pada tahun 2024 sebesar 4,08 dengan predikat baik. Adapun persentase keterbukaan informasi publik Kota Bogor pada tahun 2024 mencapai 100% (Informatif).

2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pembangunan ini bertujuan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.40
Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Bogor Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif	65,21	66,19	18,75	21,40	32,11
2	Predikat UMKM terhadap Total Kredit	19,11	20,49	18,70	17,75	15,81
3	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	124	1088	260	370	536
4	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	50	223	31	87	175

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor, 2025

Persentase koperasi aktif merupakan perbandingan antara koperasi yang aktif dengan keseluruhan koperasi yang terdaftar. Pada tahun 2024, persentase koperasi aktif mengalami peningkatan menjadi 32,11. Adanya kegiatan yang mendukung tercapainya koperasi aktif yaitu pembinaan dan pendampingan kepada koperasi melalui coaching klinik koperasi, pendampingan laporan RAT bagi koperasi yang belum

melaksanakan RAT, Rapat Kerja Koperasi, Pelatihan Perkoperasian di Wilayah kelurahan dan penyuluhan Perkoperasian di Wilayah kelurahan.

Jumlah UMKM (wirausaha) baru dan jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM semakin meningkat karena adanya hasil kolaborasi dengan PD. Pasar Pakuan Jaya dan PT. Mulyagiri. Pertumbuhan kredit Non UMKM lebih besar dibandingkan kredit UMKM. Banyak UMKM yang terkendala dalam proses kredit.

2.1.3.2.12. Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Tabel 2.41
Perkembangan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

No	Tahun	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Jumlah Investor	Jumlah perizinan yang dikeluarkan
1	2020	1.603.215.590.165	1.060	6473
2	2021	618.472.107.486	1.604	6987
3	2022	1.571.444.371.677	2.748	6621
4	2023	1.934.967.980.187	2.890	7866
5	2024	1.975.787.979.022	4.960	8341

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, 2025

Pada tahun 2024, jumlah nilai investasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 1.975.787.979.022, dengan jumlah investor sebanyak 4.960. Dengan meningkatnya jumlah investor, maka semakin meningkat pula perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPSTP. Perkembangan nilai investasi tersebut menunjukkan pada banyak investor yang mulai berinvestasi di Kota Bogor. Hal tersebut tidak lepas dari kondisi iklim investasi yang baik dan kondusif di Kota Bogor itu sendiri.

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Angka partisipasi Masyarakat dalam berolahraga meningkat setiap tahunnya, hal ini perlu didukung dengan sarana prasarana olahraga sesuai standar yang perlu ditingkatkan sehingga dapat pula meningkatkan prestasi di bidang olahraga.

Tabel 2.42
Indikator Kepemudaan dan Olahraga di Kota Bogor
Tahun 2020-2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Angka Partisipasi Masyarakat dalam berolahraga (APMO)	39	34,10	56,91	57,30	69,6
2	Predikat Kota layak pemuda (Permenpora No 11 Tahun 2017)	30	NA	50	70	80

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase sarana prasarana Olahraga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	33,34	33,34	50	50	50
4	Peningkatan prestasi olahraga	0	60	241	9	141

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, 2025

2.1.3.2.14. **Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan hasil dari karya cipta, rasa, dan karsa manusia yang lingkupnya mencakup banyak aspek kehidupan seperti hukum, keyakinan, seni, adat atau kebiasaan, susila, moral, dan juga keahlian.

Tabel 2.43
Indikator Urusan Kebudayaan di Kota Bogor Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	19	21	38	41	54
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	18	18	20	25	32
3	Presentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya	10	10	30,84	76,5	97,59

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2025

Pada tahun 2024 penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami peningkatan. Artinya, pengembangan budaya melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Bogor harus dioptimalkan untuk mempertahankan karakter daerah, dan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat melalui wisata seni dan budaya. Festival Cap Go Meh dan Helaran Budaya dalam rangka Hari Jadi Bogor menjadi agenda rutin setiap tahunnya.

Banyak Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang membutuhkan perawatan yang dilakukan oleh Juru Pelihara, agar cagar budaya dapat tetap terjaga dan dilestarikan. Partisipasi 76asyarakat dalam mendukung dan mendorong terselenggaranya event/Festival/Pasanggiri/Lomba dan sayembara Karya seni terus yang dilakukan secara berkolaborasi, baik yang dilaksanakan oleh komunitas ataupun oleh pemerintah Kota Bogor.

2.1.3.2.15. **Perpustakaan**

Kunjungan ke perpustakaan bisa menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja perpustakaan, namun tidak satunya-satunya indikator untuk menilai kualitas perpustakaan. Beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menilai kualitas perpustakaan antara lain koleksi buku dan materi lainnya, ketersediaan dan kemudahan akses ke sumber daya digital, kualitas layanan dan program yang ditawarkan, kecukupan dan keterampilan staf, ketersediaan dan kualitas fasilitas dan lingkungan perpustakaan, serta sejauh mana perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan penggunanya.

Tabel 2.44
Perkembangan Jumlah Pengunjung dan Koleksi Buku di Perpustakaan di Kota Bogor

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	9.601	1.084	5.249	99.615	105.234
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	77.684	77.648	78.354	80.834	81.584
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	6	8	12	20	33

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor, 2025

Pada tahun 2024 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan hingga mencapai 105.234 orang dengan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sebanyak 81.584 judul buku. Peningkatan tersebut sebagai wujud dalam usaha meningkatkan bahan literasi bagi masyarakat dan meningkatkan kunjungan di perpustakaan. Untuk koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Kota Bogor diantaranya yaitu karya umum, filsafat, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu terapan, seni dan olahraga, kesastraan, sejarah dan geografi, kanak- kanak, referensi, fiksi, sumbangan, dan hibah Perpusnas. Selain itu, jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat di perpustakaan daerah juga bertambah.

2.1.3.2.16. Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku merujuk pada proses atau sistematisasi yang konsisten dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip dengan mengikuti standar atau pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas, keamanan, dan aksesibilitas arsip dalam jangka waktu yang lama. Standar-standar tersebut dapat bervariasi tergantung pada jenis arsip dan kebutuhan organisasi atau instansi yang melakukan pengelolaan arsip.

Tabel 2.45
Indikator Kearsipan Kota Bogor Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	67	45,48	70	41,7	77,14
Arsip Statis yang diselamatkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan	100	NA	NA	49,38	64
Persentase Perizinan penggunaan arsip yang dilaksanakan sesuai SOP	75	NA	NA	100	100

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bogor, 2025

Pada tahun 2024, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku hanya mencapai 77,14% sedangkan target yang ingin dicapai adalah 95% dikarenakan penyusutan arsip (pindah, musnah, serah) sebagai salah satu aspek penilaian dalam pengawasan kearsipan belum dilaksanakan secara optimal oleh Perangkat Daerah. Masih rendahnya arsip statis yang dimanfaatkan disebabkan

karena terbatasnya jumlah sarana temu balik arsip (sarana akses arsip statis bagi masyarakat) serta minimnya jumlah arsiparis di dinas pengelola arsip.

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.3.3.1. Pariwisata

Kunjungan wisata adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata atau destinasi wisata baik di dalam maupun di luar negeri. Tujuan utama dari kunjungan wisata adalah untuk berlibur dan menikmati berbagai keindahan alam, budaya, sejarah, atau kegiatan rekreasi lainnya.

Tabel 2.46
Indikator Pariwisata Kota Bogor Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan	3.457.722	3.803.494	5.174.317	5.650.637	8.093.203
PAD sektor pariwisata	239.350.000.000	185.661.140.961	287.860.632.150	328.823.584.610	361.077.093.168

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2025

Pertumbuhan jumlah wisatawan semakin berkembang hingga pada tahun 2024 mencapai 8.093.203 wisatawan dengan PAD sektor pariwisata yang didapat sebesar 361.077.093.168. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bogor memiliki potensi pariwisata yang dapat mendukung pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat di Kota Bogor. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dalam penyediaan fasilitas dan pengembangan daya tarik wisata dengan mengoptimalkan peran serta para pengusaha pariwisata Kota Bogor (ODTW).

Tempat wisata utama di Kota Bogor antara lain Kebun Raya, Museum Zoologi dan Istana Bogor. Hal ini diukur dari kunjungan wisatawan ke tempat-tempat tersebut yang relatif lebih tinggi dibandingkan kunjungan ke tempat wisata lainnya. Selain tempat wisata utama di Kota Bogor, ada beberapa tempat yang dapat dikembangkan menjadi tempat wisata, antara lain Wisata Perdesaan di Desa Cikaret Pancasan Bogor, Taman Penelitian Tanaman Obat Industri Cimanggu, Kawasan Perdesaan Situ Gede dan pusat penelitian lainnya. Pengembangan Kampung Wisata seperti Kampung Wisata Mulyaharja dan Kampung Wisata Perca menjadi data tarik wisata baru. Selain mengunjungi tempat wisata tersebut, wisatawan di Kota Bogor juga memiliki potensi ekonomi pada pusat kuliner jajanan dan buah-buahan serta factory outlet pakaian dan koper seperti Jalan Suryakencana, Siliwangi, Pajajaran dan Tajur, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu Idul Fitri dan hari libur.

2.1.3.3.2. Pertanian

Produksi pada pada tahun 2024 sebanyak 2966 ton. Cakupan bina kelompok petani mengalami peningkatan dan telah mencapai target di tahun 2024. Sedangkan

untuk produktivitas pertanian per hektar per tahun belum memenuhi target yang ditetapkan yang seharusnya 13,94 ton/Ha pada tahun 2024.

Tabel 2.47
Indikator Urusan Pertanian di Kota Bogor
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas padi per hektar (ton/ha)	7,18	7,28	7,28	7,28	7,20
2	Cakupan bina kelompok tani (%)	75,08	76,37	89,40	93,08	93,28
3	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/Ha)	13,40	NA	12,92	10,81	13
4	Produksi pertanian padi (ton)	4186	5496	3378	2831	2966

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, 2025

2.1.3.3.3. Perdagangan

Sub sektor perdagangan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk dalam menentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara.

Tabel 2.48
Kontribusi dan Laju Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
di Kota Bogor

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran	19,43	19,22	19,11	19,23	19,09
Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	-7,92	2,72	5,38	3,20	3,13

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2025

Adanya tren penurunan kontribusi terhadap PDRB oleh sektor perdagangan yang memiliki karakteristik daya saing rendah dan pertumbuhan yang lambat. Pada subsektor perdagangan jumlah penduduk dan daya beli masyarakat Kota Bogor sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga berimplikasi pada angka produksi dan daya beli masyarakat Kota Bogor. Oleh karena itu untuk memaksimalkan kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran diperlukan peningkatan ekspor dan investasi, serta adanya peningkatan konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor menunjukkan kategori sektor ekonomi tersier di mana bertumpu pada sektor-sektor non produksi, terutama mengandalkan perekonomian pada kategori jasa. Hal ini selaras dengan karakteristik Kota Bogor yang tidak memiliki potensi besar pada sektor produksi dan lebih bertumpu pada karakteristik urban. Sektor industri dan perdagangan ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan PDRB di Kota Bogor.

2.1.3.3.4. Perindustrian

Sub sektor industri pengolahan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk dalam menentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu negara.

Tabel 2.49
Indikator Urusan Perindustrian di Kota Bogor

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	18,08	19,16	18,98	18,53	18,39
Laju pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran	-0,83	4,46	5,08	3,96	2,45
Cakupan bina kelompok pengrajin	77,5	80,2	86,66	93,25	100

Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2025

Penguatan sub sektor industri terhadap penerimaan PDRB di Kota Bogor perlu terus diupayakan dengan membangun daya saing industri daerah pada leading sector industri tertentu yang terintegrasi antara industri primer (misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan lain lain), industri sekunder (misalnya manufaktur, pengolahan, packaging dan lain-lain), dan industri tersier (misalnya pasar produk daerah) di Kota Bogor.

2.1.3.4. Urusan Penunjang
2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah, diantaranya terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.50
Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan
Kota Bogor Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	-	1
Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	1	-	-	-	-
Jumlah dokumen perencanaan RPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	-	-	1
Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1	2	2	2	2
Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	1	1	-	-	-
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100	100
Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22,9	23,75	23,7	24,05	24,43

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor (2025)

Beberapa dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada pada tahun 2024 diantaranya:

- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 pada tanggal 29 Februari 2024.
- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 pada tanggal 3 Juli 2024.
- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024 pada tanggal 22 Juli 2024.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 pada tanggal 18 November 2024.

2.1.3.4.2. Keuangan

Capaian indikator urusan keuangan dapat dilihat pada tabel 2.51 di bawah ini:

Tabel 2.51
Indikator Urusan Keuangan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA	11,9	14	8	1,77	2,67
3	Persentase belanja pendidikan	21,15	24,14	20,04	21,67	23,85
4	Persentase belanja kesehatan	21,7	12,18	11,56	22,89	22,17
5	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
6	Devisiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	12	4	18,43	4,32	2
7	Devisiasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	6	11	3,32	0,99	1

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor, 2025

Opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2024 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini diberikan oleh BPK dengan 4 kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kecukupan pengungkapan.

SILPA atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pada tahun 2024, SILPA Kota Bogor sebesar 2,67%, artinya terjadi kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencapai 1,77%. Adapun pada tahun 2024, persentase belanja untuk bidang Pendidikan mencapai 23,85% dan belanja untuk bidang Kesehatan sebesar 22,17%.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu suatu dokumen yang menjabarkan estimasi pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran. Penetapan APBD dilakukan setiap tahun oleh pemerintah daerah dan harus disetujui oleh DPRD setempat.

2.1.3.4.3. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Capaian indikator kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel 2.52 berikut ini:

Tabel 2.52
Indikator Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan per JP	1	1	2	22	47
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	94,12	94,4	95,39	85,47	153,3
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	35	35	35	35	31
4	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	157	152	150	150	142
5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan	3651	3483	4015	4723	5583
6	Rasio pegawai fungsional bersertifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	100	100	57,76	57,76	56,28

Sumber: Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Bogor, 2025

Rata-rata lama pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan meningkat signifikan menjadi 47 JP di tahun 2024 dengan 153,3% ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan formal.

2.1.3.4.4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.53
Indikator Urusan Pengawasan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tidak lanjut temuan internal	100	55,5	93,81	94,10	87,74
2	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	100	94,39	91,63	90,20	88,89
3	Persentase pelanggaran pegawai	0,3359	0,016	0,225	0,006	0,004
4	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	72,5	75	84,50	84.31	90
5	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	75,68	83,33	100	100	100

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2025

Faktor pendorong untuk meningkatkan capaian indikator diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Perangkat Daerah yang terdapat temuan rekomendasi Internal/ Eksternal dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal dan eksternal, mengikuti diklat, workshop yang diselenggarakan dalam meningkatkan kualitas APIP.

Adapun faktor penghambatnya antara lain kurangnya sumber daya aparatur pengawas jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan, Tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP belum terlaksana sesuai jadwal dikarenakan perubahan mekanisme tindaklanjut internal, Rekonsiliasi data penyelesaian tindak lanjut khususnya BPK dilakukan setiap semester sehingga Tim Monitoring Inspektorat kesulitan untuk melakukan pemantauan atas data dukung yang disampaikan oleh Perangkat Daerah serta terdapat beberapa hasil temuan pemeriksaan BPK yang sudah ditindaklanjuti, namun belum dianggap cukup oleh BPK walaupun sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

2.1.3.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan memiliki peranan yang penting untuk mendukung pembangunan suatu daerah.

Tabel 2.54
Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kota Bogor Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2023
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	80	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	78,3	97,6	97,6	100	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah	100	100	91,24	63	98
5	Jumlah kampung tematik/ kampung wisata	2	2	3	7	7

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor (2025)

Seluruh target indikator urusan penelitian dan pengembangan tercapai, hal ini disebabkan karena adanya komitmen pemerintah Kota Bogor terhadap penguatan inovasi daerah melalui penguatan di aspek regulasi, keterlibatan masyarakat dengan adanya *Bogor Innovation Award* (BIA) dan keterlibatan perangkat daerah melalui *Innovation Government Award* (IGA).

Tujuh kampung wisata di Kota Bogor yaitu Kampung Wisata Mulyaharja, Kampung Pulo Geulis, Kampung Labirin, Kampung Perca Sindangsari, Ekowisata Situ Gede, Kampung Batik Cibuluh dan Kampung Durian Rancamaya.

2.1.3.4.6. Sekretariat Daerah

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor menunjukkan bahwa nilai sebesar 78,29 dengan predikat “BB”, yakni implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi.

Tabel 2.55
Indikator Sekretariat Daerah di Kota Bogor

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tingkat Kota	BB (73,75)	BB (75,15)	BB (75,20)	BB (76,73)	BB (78,29)
Nilai rata-rata indeks Kepuasan Masyarakat	3,34	3,30	3,50	3,57	3,64
indeks kematangan organisasi	45,41	NA	48	48,5	51
Gap Analysis Kompetensi	NA	21,62	14,70	14,2	13,9

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Bogor, 2025

2.1.3.4.7. Sekretariat DPRD

Peran pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kerja DPRD secara keseluruhan. Beberapa aspek yang dapat diukur untuk mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD melibatkan fungsi dan layanan yang disediakan oleh lembaga tersebut.

Tabel 2.56
Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bogor Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu Sesuai Prolegda	40	81,25	100	100	100
Persentase Perda yang Disosialisasikan	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Bogor, 2025

Sekretariat DPRD Kota Bogor pada tahun 2024 telah melaksanakan capaian fungsi baik pada penyediaan rencana kerja, pengintegrasian program kerja melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran, serta dalam pelaksanaan program. Beberapa faktor pendorong diantaranya adanya pembahasan Rencana Kerja Tahunan pada AKD oleh Badan Musyawarah disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, disusunnya Program/ Jadwal setiap bulan oleh Badan Musyawarah dalam pelaksanaan kegiatan Anggota DPRD dalam melaksanakan

3 Fungsi DPRD yang mana didalamnya terdapat Rapat Kerja bersama dengan Mitra Kerja Pemerintah untuk mendukung Pemerintahan kota Bogor serta adanya rencana kerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Rencana kerja DPRD, serta melaksanakan fasilitasi secara maksimal untuk terlaksananya program kegiatan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

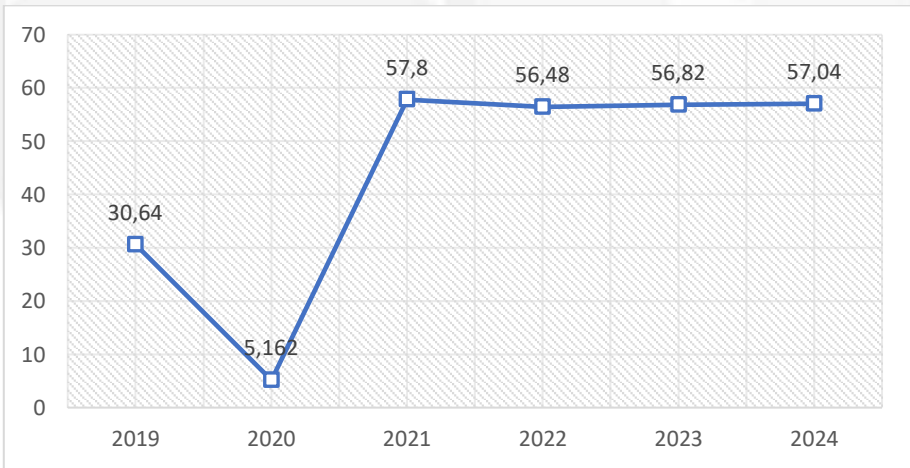
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah dapat mengukur tingkat kemampuan ekonomi suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik, atau internasional. Daya saing daerah memiliki beberapa aspek terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dilakukan oleh Kemenristek BRIN, bahwa skor IDSD Kota Bogor tahun 2024 adalah 4,17 dan masuk pada kategori Daya Saing Tinggi.

2.1.4.1. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor pada tahun 2024 sebesar 57,04 yang mencerminkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan keberhasilan dalam mendorong inovasi pemerintahan pasca-pandemi dan membuktikan komitmen dalam menjalankan prinsip reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih efisien.

Grafik 2.30
Indeks Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2020-2024



Sumber: Bapperida Kota Bogor, 2025

2.1.4.2. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto serta Ekspor Barang dan Jasa dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pengeluaran

PDRB Pengeluaran mencerminkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi untuk memperoleh barang dan jasa yang diproduksi. Selain itu, melalui PDRB Pengeluaran, dapat diamati hubungan antara penyediaan barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri maupun dari impor. Berdasarkan data pada tabel 2.57 di bawah ini, tren PDRB menurut pengeluaran di Kota Bogor menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 yaitu 45.911.864 miliar rupiah menjadi 61.051.690 miliar rupiah pada tahun 2024. Besaran komponen PDRB pengeluaran terbesar ada pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu lebih dari 95 persen dari total PDRB menurut pengeluaran. Sementara komponen PDRB pengeluaran terendah dimiliki oleh komponen net ekspor barang dan jasa, dimana nilainya menunjukkan angka minus sejak tahun 2020-2024. Nilai minus dalam net ekspor dan jasa pada komponen PDRB Pengeluaran menunjukkan bahwa nilai impor barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspornya. Hal tersebut menandakan bahwa Kota Bogor lebih banyak barang dan jasa dari luar negeri daripada yang dijual ke luar negeri, yang berdampak pada pengurangan PDRB secara keseluruhan. Selengkapnya disajikan pada tabel 2.57 berikut ini:

Tabel 2.57
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bogor Tahun 2020-2024

Komponen PDRB Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	45.013.834	47.301.107	52.212.386	56.362.061	61.788.670
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	765.207	788.754	860.784	958.042	1.090.260
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.952.118	4.943.910	4.996.676	5.521.009	5.607.490
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	14.605.098	16.435.042	17.441.679	19.739.334	21.076.370
Perubahan Inventori	855.786	10.208.013	-18.399	7.440	23.680
Net Ekspor Barang dan Jasa	-20.280.179	-20.613.763	-22.578.527	-25.584.127	-28.534.780
Jumlah	45.911.864	48.325.645	52.914.598	57.003.758	61.051.690
Rasio Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (%)	31.81	27.83	32.96	34.63	34.52

Sumber: BPS Kota Bogor, 2025

2.1.4.3. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi dan kualitas infrastruktur di wilayah. Penilaian terhadap infrastruktur menjadi hal penting karena infrastruktur yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan menarik investasi. Indeks infrastruktur berikut ini diperoleh dari bahan perhitungan IDSD Kota Bogor yang bersumber dari BRIN. Perhitungan indeks infrastruktur mencakup infrastruktur transportasi, infrastruktur utilitas kelistrikan, dan infrastruktur utilitas air minum. Pada tahun 2020 hingga 2024, nilai indeks infrastruktur Kota Bogor mengalami fluktuasi dan mencapai nilai 4,71

pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas infrastruktur di daerah tersebut relatif tinggi. Semakin tinggi nilai indeks infrastruktur, semakin baik pula kualitas dan ketersediaan sarana serta prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat secara umum.

Tabel 2.58
Indeks Infrastruktur Kota Bogor Tahun 2020-2024

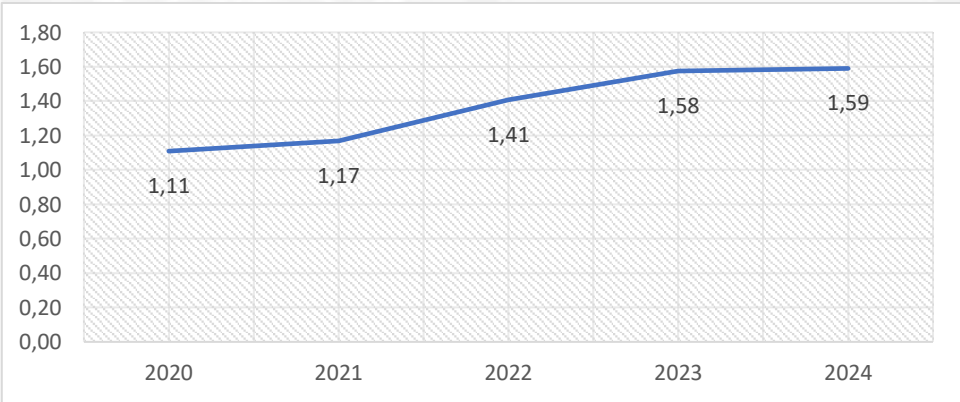
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Infrastruktur	3,33	N/A	2,15	4,05	4,71

Sumber: BRIN, 2025

2.1.4.4. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pendapatan pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan di Kota Bogor. Pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor.

Grafik 2.31
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Bogor Tahun 2020-2024



Sumber: Bapperida Kota Bogor, 2025

Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Bogor mengalami pola fluktuatif selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Fluktuasi tersebut mencerminkan dinamika perekonomian dan kebijakan fiskal daerah. Pemerintah Kota Bogor berupaya untuk meningkatkan rasio pajak daerah melalui optimalisasi sistem pemungutan pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak, serta penguatan regulasi perpajakan yang lebih efektif dan adil. Pada tahun 2020, rasio pajak daerah terhadap PDRB berada di 1,11%, kemudian pada tahun 2021, rasio mulai mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,17%, menandakan adanya pemulihan ekonomi secara bertahap dari dampak pandemi COVID-19 yang menekan sektor ekonomi dan mengurangi penerimaan pajak daerah. Tren pemulihan semakin kuat pada tahun 2022, di mana rasio meningkat ke 1,41%, didorong oleh perbaikan aktivitas ekonomi serta kebijakan optimalisasi pajak daerah. Pada tahun 2023, rasio mencapai 1,58%, dan tahun 2024 mencapai 1,59 yang

menjadikan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil di Kota Bogor selama lima tahun terakhir.

2.1.4.5. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu aspek yang kerap kali menjadi perhatian bagi para pimpinan daerah. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sdm, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Grafik 2.32
Indeks Pelayanan Publik Kota Bogor Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Indeks pelayanan publik di Kota Bogor mengalami fluktuasi selama periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2023, indeks mengalami penurunan ke angka 4,48 dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024, dimana indeks mencapai angka tertinggi selama periode ini, yaitu 4,65. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem pelayanan publik, baik dari segi efektivitas, efisiensi, maupun kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Tantangan utama yang perlu diatasi adalah menjaga konsistensi peningkatan kualitas layanan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, serta memastikan bahwa setiap inovasi yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.

2.1.4.6. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Ketentraman dan ketertiban merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, investor atau pelaku usaha, dan pembangunan daerah. Indeks ini mencakup angka tingkat kriminalitas serta angka kriminalitas yang berhasil ditangani oleh aparat berwenang. Tingginya angka kriminalitas dapat berdampak negatif terhadap kenyamanan warga, aktivitas bisnis, serta citra Kota Bogor sebagai kota yang aman dan tertib. Sebaliknya, semakin tinggi persentase kriminalitas yang tertangani, semakin baik efektivitas sistem penegakan hukum yang diterapkan. Diperlukan strategi yang komprehensif dalam menekan angka kriminalitas dan meningkatkan efektivitas penanganan kasus kejahatan guna memperkuat ketahanan sosial dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Angka kriminalitas di Kota Bogor mengalami fluktuasi dengan tren meningkat dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2023, jumlahnya sedikit menurun menjadi 853 kasus, sebelum akhirnya kembali meningkat tajam pada tahun 2024 dengan 1.022 kasus yang berhasil ditangani. Peningkatan jumlah kasus yang tertangani menunjukkan adanya upaya yang lebih intensif dalam pemberantasan tindak kriminal di Kota Bogor. Namun, strategi pencegahan kejahatan harus terus diperkuat dengan pendekatan berbasis komunitas, peningkatan kesejahteraan sosial, serta penguatan regulasi yang dapat menekan angka kriminalitas secara lebih efektif.

Tabel 2.59
Jumlah Kriminalitas di Kota Bogor Tahun 2020-2024

Data	2020	2021	2022	2023	2024
Angka tingkat kriminalitas	909	978	1.479	1.366	1.717
Angka kriminalitas yang tertangani	644	687	905	853	1.022

Sumber: Reskrim Kota Bogor

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

2.2.1. Capaian Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator makro menggambarkan kemajuan Pembangunan daerah yang bersifat dampak (*Impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya.

Tabel 2.60
Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2024

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Tahun 2024	
			Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,31	79,03
2	Jumlah Penduduk	dalam Ribu Jiwa	1.200	1.078
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	%	1,44	1,27
4	Angka Kemiskinan (%)	%	6,21	6,53
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,37	8,13

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH		Satuan	Tahun 2024	
			Target	Realisasi
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	6,04	5,15
7	Indeks Gini Rasio	Angka	0,34	0,47
8	Tingkat Inflasi	%	1,5-3,5	1.75
9	PDRB per Kapita (AdhB)	Juta Rupiah	50,41	56,62

Sumber: Bapperida Kota Bogor, diolah 2025

Dari sembilan indikator makro RPJMD Kota Bogor terdapat tiga indikator yang belum tercapai, yaitu angka kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, dan indeks gini ratio. Namun demikian, rata-rata ketercapaian indikator makro RPJMD Kota Bogor pada Tahun 2024 menunjukkan 97,41 persen atau hampir mencapai target dengan predikat sangat tinggi.

Penyebab gini rasio mengalami kenaikan diantaranya: (1) Kesenjangan Pendapatan antara Kelompok Atas dan Bawah. Peningkatan pendapatan yang signifikan pada kelompok masyarakat atas tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin lebar; (2) Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali membuat kelompok masyarakat bawah semakin terhimpit, sementara kelompok atas masih mampu bertahan. Hal ini memperburuk ketimpangan pendapatan; (3) Pengurangan atau Penarikan Bantuan Sosial. Penarikan atau pengurangan bantuan sosial pasca pandemi COVID-19 mengurangi daya beli kelompok masyarakat bawah, sementara kelompok atas tidak merasakan dampak signifikan. Hal ini memperlebar jurang ketimpangan; (4) Urbanisasi yang Tidak Terkendali. Tingginya arus urbanisasi ke Kota Bogor menyebabkan peningkatan jumlah penduduk, namun tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja dan fasilitas yang memadai. Hal ini menyebabkan sebagian penduduk terjebak dalam kemiskinan dan memperburuk ketimpangan.

Persentase penduduk miskin di Kota Bogor belum mencapai target pada tahun 2024. Kota Bogor berusaha mengurangi persentase penduduk miskin dari sisi pengeluaran antara lain dengan intervensi melalui Pemberian Bantuan Iuran jaminan Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Tunai Bersyarat baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kota.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024 selain menetapkan Indikator Makro Daerah juga ditetapkan indikator sasaran pembangunan atau Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang ingin dicapai. Data yang disajikan dalam tabel 2.61 di bawah ini adalah capaian IKU Kota Bogor Tahun 2024 yang masih mengacu pada dokumen RPJMD.

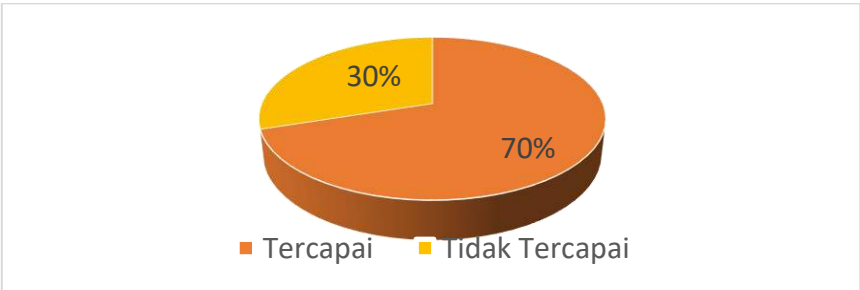
Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daaerah
Kota Bogor Tahun 2024

NO	Indikator	Satuan	2024		Evaluasi
			Target	Realisasi	
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,18	75,80	Tercapai
2	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	%	72,00	73,11	Tercapai
3	Angka Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Angka	58	69,60	Tercapai
4	Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak	%	88,76	98,04	Tercapai
5	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman	%	72,42	72,33	Tidak tercapai
6	Persentase Rumah Tangga yang terlayani sistem air limbah yang layak	%	75,10	79,43	Tercapai
7	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman	%	8,55	6,07	Tidak tercapai
8	Persentase Luasan kawasan kumuh kewenangan kota	%	1,77	1,72	Tercapai
9	Persentase Reduksi Sampah	%	7,90	7,98	Tercapai
10	Indeks Kualitas Air	Angka	38,17	50,89	Tercapai
11	Indeks Kualitas Udara	Angka	79,814	86,51	Tercapai
12	Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik	%	4,25	4,26	Tercapai
13	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,87	10,71	Tidak tercapai
14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,03	13,51	Tidak tercapai
15	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	67,05	NA	
16	Indeks Inovasi Daerah	Angka			
		Kategori	Inovatif	Inovatif	Tercapai
17	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,50	75,60	Tercapai
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	79,26	79,98	Tercapai
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A	A	Tercapai
20	Level Kematangan Smart City	Level	integrative	Smart	Tercapai
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,37	8,13	Tercapai
22	Angka Kemiskinan	%	6,21	6,53	Tidak tercapai
23	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	85,20	85,20	Tercapai
24	PDRB (Atas dasar harga konstan)	Milyar Rp	39.181	38.964,67	Tidak tercapai
25	PDRB Per Kapita (Atas dasar harga berlaku)	Juta Rp	50,41	56,62	Tercapai
26	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	12290	13154	Tercapai
27	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	%	25,00	15,94	Tidak tercapai
28	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	100	51,47	Tidak tercapai
29	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	%	100	62,5	Tidak tercapai
30	Persentase Jalan Berkondisi Baik	%			
	Persentase Jalan Berkondisi Mantap	%	90,00	90,03	Tercapai
31	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	44	60,07	Tercapai

Sumber: Bapperida Kota Bogor , diolah 2025

Bila dilihat pada tabel 2.61 di atas, walaupun masih terdapat 10 (sepuluh) indikator yang belum mencapai targetnya, namun hampir seluruhnya memiliki tingkat capaian diatas 80 persen bahkan ada yang hampir mencapai 100 persen. Dengan demikian, bila menggunakan standar predikat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka capaiannya masuk predikat **Tinggi**. (78 persen ≤ 90 persen).

Grafik 2.33
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024



Sumber: Bapperida Kota Bogor , diolah 2025

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bogor Tahun 2024
yang Tidak Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KETERANGAN TIDAK TERCAPAI
1	Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman	Masih banyak rumah tangga yang belum terlayani air minum perpipaan yang bersumber dari PDAM.
2	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman	Masih minimnya sistem pengolahan air limbah yang aman (disedot dari tangki septik komunal kemudian diangkut ke IPAL/IPLT dan diolah air limbahnya), sehingga perlu peningkatan program LLTT (layanan lumpur tinja terjadwal, tangki septik yang blm sesuai standar teknis)
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	1. Faktor Ekonomi: kemiskinan dan biaya pendidikan 2. Infrastruktur Pendidikan: kekurangan sekolah dan fasilitas dan aksesibilitas ke sekolah
4	Harapan Lama Sekolah (HLS)	1. Faktor Ekonomi: kemiskinan dan biaya pendidikan 2. Infrastruktur Pendidikan: kekurangan sekolah dan aksesibilitas ke sekolah
5	Angka Kemiskinan	Belum optimalnya upaya meningkatkan pendapatan masyarakat
6	PDRB (Atas dasar harga konstan)	Terjadinya perlambatan ekonomi global berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah.
7	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Pertumbuhan kredit Non UMKM lebih besar dibandingkan kredit UMKM.
8	Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	Tidak tercapainya pelaksanaan indikasi program oleh perangkat daerah yang ada di Kota Bogor.
9	Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024)	

Sumber: Bapperida Kota Bogor, diolah 2025

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2024

Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan tahun ke-n;
3. Realisasi Program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan yang direncanakan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian RPJMD dan Kinerja Pembangunan Daerah;
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab itu.

Kinerja pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2024 dapat diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah pada pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dibandingkan dengan target RKPD tahun 2024 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 dengan rincian: < 50% Sangat Rendah; 51% ≤ 65% Rendah; 66% ≤ 75% Sedang; 76% ≤ 90% Tinggi; dan 91% ≤ 100% Sangat Tinggi. Nilai peringkat kinerja realisasi RKPD Tahun 2024 berdasarkan urusan dengan rincian sebagaimana table 2.63 berikut:

Tabel 2.63
Rekapitulasi Ketercapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2024 (%)				
				Triwulan IV				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.975.499.204.971	97,84	Sangat Tinggi	1.904.927.706.756	96,43	Tinggi
1	1.01	Pendidikan	805.097.967.641	98,73	Sangat Tinggi	750.280.119.387	93,19	Sangat Tinggi
		Dinas Pendidikan	805.097.967.641	98,73	Sangat Tinggi	750.280.119.387	93,19	Sangat Tinggi
2	1.02	Kesehatan	646.465.938.611	98,00	Sangat Tinggi	645.750.931.076	99,22	Sangat Tinggi
		Dinas Kesehatan	263.760.263.290	96,00	Sangat Tinggi	252.158.917.316	95,60	Sangat Tinggi
		RSUD	382.705.675.321	100,00	Sangat Tinggi	393.592.013.760	102,84	Sangat Tinggi
3	1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	233.502.470.271	97,67	Sangat Tinggi	225.379.025.584	96,52	Sangat Tinggi
		Dinas PUPR	233.502.470.271	97,67	Sangat Tinggi	225.379.025.584	96,52	Sangat Tinggi
4	1.04	Perumahan dan Permukiman	201.138.483.133	100,00	Sangat Tinggi	196.881.037.983	97,88	Sangat Tinggi
		Dinas Perumkim	201.138.483.133	100,00	Sangat Tinggi	196.881.037.983	97,88	Sangat Tinggi
5	1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	75.267.343.285	96,45	Sangat Tinggi	73.305.574.890	97,39	Sangat Tinggi
		Satpol PP	48.657.113.615	99,37	Sangat Tinggi	48.350.053.690	99,37	Sangat Tinggi
		BPBD	9.133.247.387	95,00	Sangat Tinggi	8.358.011.202	91,51	Sangat Tinggi
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.476.982.283	94,97	Sangat Tinggi	16.597.509.998	94,97	Sangat Tinggi

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2024 (%)				
				Triwulan IV				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	1.06	Sosial	14.027.002.030	96,20	Sangat Tinggi	13.331.017.836	95,04	Sangat Tinggi
		Dinas Sosial	14.027.002.030	96,20	Sangat Tinggi	13.331.017.836	95,04	Sangat Tinggi
B		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	442.611.122.793	99,26	Sangat Tinggi	406.793.256.240	91,91	Sangat Tinggi
7	2.07	Tenaga Kerja	18.858.897.124	99,81	Sangat Tinggi	18.407.697.187	97,61	Sangat Tinggi
		Dinas Tenaga Kerja	18.858.897.124	99,81	Sangat Tinggi	18.407.697.187	97,61	Sangat Tinggi
8	2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.102.343.905	98,15	Sangat Tinggi	14.738.749.941	97,59	Sangat Tinggi
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.102.343.905	98,15	Sangat Tinggi	14.738.749.941	97,59	Sangat Tinggi
9	2.09	Pangan	22.794.197.170	91,11	Sangat Tinggi	22.723.309.155	99,69	Sangat Tinggi
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.794.197.170	91,11	Sangat Tinggi	22.723.309.155	99,69	Sangat Tinggi
11	2.11	Lingkungan Hidup	135.506.617.468	99,61	Sangat Tinggi	127.098.030.817	93,79	Sangat Tinggi
		Dinas Lingkungan Hidup	135.506.617.468	99,61	Sangat Tinggi	127.098.030.817	93,79	Sangat Tinggi
12	2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	16.699.734.530	99,59	Sangat Tinggi	17.345.367.181	103,87	Sangat Tinggi
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.699.734.530	99,59	Sangat Tinggi	17.345.367.181	103,87	Sangat Tinggi
14	2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.745.064.186	98,89	Sangat Tinggi	18.994.459.151	101,33	Sangat Tinggi

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2024 (%)				
				Triwulan IV				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.745.064.186	98,89	Sangat Tinggi	18.994.459.151	101,33	Sangat Tinggi
15	2.15	Perhubungan	124.367.076.930	100,00	Sangat Tinggi	110.167.848.560	88,58	Tinggi
		Dinas Perhubungan	124.367.076.930	100,00	Sangat Tinggi	110.167.848.560	88,58	Tinggi
16	2.16	Komunikasi dan Informatika	7.438.732.991	100,00	Sangat Tinggi	7.945.511.527	106,81	Sangat Tinggi
		Dinas Komunikasi dan Informatika	7.438.732.991	100,00	Sangat Tinggi	7.945.511.527	106,81	Sangat Tinggi
17		Statistik	322.998.800	100,00	Sangat Tinggi	263.967.632	81,72	Tinggi
		Dinas Komunikasi dan Informatika	322.998.800	100,00	Sangat Tinggi	263.967.632	81,72	Tinggi
18		Persandian	105.655.100	100,00	Sangat Tinggi	105.103.220	99,48	Sangat Tinggi
		Dinas Komunikasi dan Informatika	105.655.100	100,00	Sangat Tinggi	105.103.220	99,48	Sangat Tinggi
19	2.17	Koperasi dan UKM	2.392.485.800	100,00	Sangat Tinggi	623.569.500	26,06	Sangat Rendah
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	2.392.485.800	100,00	Sangat Tinggi	623.569.500	26,06	Sangat Rendah
20	2.18	Penanaman Modal	14.966.337.455	100,00	Sangat Tinggi	14.908.427.151	99,61	Sangat Tinggi
		DPMPTSP	14.966.337.455	100,00	Sangat Tinggi	14.908.427.151	99,61	Sangat Tinggi

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2024 (%)				
				Triwulan IV				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	30.999.677.845	100,00	Sangat Tinggi	30.433.136.127	98,17	Sangat Tinggi
		Dinas Pemuda dan Olahraga	30.999.677.845	100,00	Sangat Tinggi	30.433.136.127	98,17	Sangat Tinggi
22	2.22	Kebudayaan	12.079.262.631	101,27	Sangat Tinggi	11.770.614.823	97,44	Sangat Tinggi
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.079.262.631	101,27	Sangat Tinggi	11.770.614.823	97,44	Sangat Tinggi
23	2.23	Perpustakaan	11.116.020.429	100,00	Sangat Tinggi	326.820.950	89,56	Sangat Tinggi
		Dinas Arsip dan Perpustakaan	364.924.400	100	Sangat Tinggi	326.820.950	89,56	Sangat Tinggi
24	2.24	Kearsipan	11.116.020.429	100	Sangat Tinggi	10.940.643.318	98,42	Sangat Tinggi
		Dinas Arsip dan Perpustakaan	11.116.020.429	100,00	Sangat Tinggi	10.940.643.318	98,42	Sangat Tinggi
C		Urusan Pilihan	35.774.454.164	95,69	Sangat Tinggi	31.714.733.652	79,04	Tinggi
25	3.25	Kelautan dan Perikanan	3.384.060.700	100,00	Sangat Tinggi	3.368.756.546	99,55	Sangat Tinggi
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.384.060.700	100,00	Sangat Tinggi	3.368.756.546	99,55	Sangat Tinggi
26	3.26	Pariwisata	949.364.000	97,79	Sangat Tinggi	928.474.536	97,80	Sangat Tinggi
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	949.364.000	97,79	Sangat Tinggi	928.474.536	97,80	Sangat Tinggi
27	3.27	Pertanian	10.285.256.703	80,67	Tinggi	10.055.301.768	97,76	Sangat Tinggi
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.285.256.703	80,67	Tinggi	10.055.301.768	97,76	Sangat Tinggi
28	3.30	Perdagangan	1.700.769.700	100,00	Sangat Tinggi	201.684.475	11,86	Sangat Rendah

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2024 (%)				
				Triwulan IV				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.700.769.700	100,00	Sangat Tinggi	201.684.475	11,86	Sangat Rendah
29	3.31	Perindustrian	19.455.003.061	100,00	Sangat Tinggi	17160516327,00	88,21	Tinggi
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	19.455.003.061	100,00	Sangat Tinggi	17.160.516.327	88,21	Tinggi
D		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	271.394.710.682	101,83	Sangat Tinggi	253.320.182.610	93,57	Sangat Tinggi
30	4.01	Sekretariat Daerah	119.920.186.844	99,35	Sangat Tinggi	114.586.029.571	95,55	Sangat Tinggi
		Bagian Administrasi Pembangunan	273.770.200	100,00	Sangat Tinggi	259.271.730	94,70	Sangat Tinggi
		Bagian Umum	76.552.553.734	96,88	Sangat Tinggi	74.291.006.206	97,05	Sangat Tinggi
		Bagian Organisasi	677.360.100	100,00	Sangat Tinggi	581.763.410	85,89	Tinggi
		Bagian Perekonomian	384.649.400	100,00	Sangat Tinggi	362.953.022	94,36	Sangat Tinggi
		Bagian Prokompim	1.371.910.150	100,00	Sangat Tinggi	1.317.952.362	96,07	Sangat Tinggi
		Bagian PBJ	800.589.250	100,00	Sangat Tinggi	778.179.681	97,20	Sangat Tinggi
		Bagian Hukum dan HAM	2.779.471.200	100,00	Sangat Tinggi	1.221.170.722	43,94	Sangat Rendah
		Bagian Pemerintahan Setda	1.934.291.500	97,23	Sangat Tinggi	1.880.779.970	97,23	Sangat Tinggi
		Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	35.145.591.310	100,00	Sangat Tinggi	33.892.952.468	96,44	Sangat Tinggi

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2024 (%)				
				Triwulan IV				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	4.02	Sekretariat DPRD	151.474.523.838	104,32	Sangat Tinggi	138734153039,00	91,59	Sangat Tinggi
		Sekretariat DPRD	151.474.523.838	104,32	Sangat Tinggi	138.734.153.039	91,59	Sangat Tinggi
E		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	135.888.516.090	97,39	Sangat Tinggi	102.763.073.987	95,26	Sangat Tinggi
32	5.01	Perencanaan	21.381.828.735	100,00	Sangat Tinggi	21.116.783.188	98,76	Sangat Tinggi
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	21.381.828.735	100,00	Sangat Tinggi	21.116.783.188	98,76	Sangat Tinggi
33	5.02	Keuangan	89.289.473.134	94,78	Sangat Tinggi	81.646.290.799	91,44	Sangat Tinggi
		Badan Pendapatan Daerah	47.776.229.836	98,56	Sangat Tinggi	46.698.274.512	97,74%	Sangat Tinggi
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	41.513.243.298	91	Sangat Tinggi	34.948.016.287	84,19%	Tinggi
34	5.03	Kepegawaian	23.689.704.151				92,99	
		BKPSDM	23.689.704.151	90,83	Tinggi	22.028.791.759	92,99	Sangat Tinggi
35	5.05	Penelitian dan Pengembangan	1.527.510.070	100,00	Sangat Tinggi	1.494.615.890	97,85	Sangat Tinggi
		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.527.510.070	100,00	Sangat Tinggi	1.494.615.890	97,85	Sangat Tinggi
F		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	26.684.931.353	91,78	Sangat Tinggi	25.789.260.060	96,64	Sangat Tinggi
36	6.01	Pengawasan	26.684.931.353	91,78	Sangat Tinggi	25.789.260.060	96,64	Sangat Tinggi
		Inspektorat	26.684.931.353	91,78	Sangat Tinggi	25.789.260.060	96,64	Sangat Tinggi

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2024 (%)				
				Triwulan IV				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
G		Unsur Kewilayahan	178.993.421.080	97,43	Sangat Tinggi	174.866.189.714	97,54	Sangat Tinggi
37	7.01	Kecamatan	178.993.421.080	97,43	Sangat Tinggi	174.866.189.714	97,54	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bogor Utara	29.147.909.715	93,81	Sangat Tinggi	28.736.788.238	98,59	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bogor Selatan	46.755.171.044	98,37	Sangat Tinggi	45.471.104.875	97,25	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bogor Timur	23.329.726.210	96,55	Sangat Tinggi	22.525.512.117	96,55	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bogor Barat	44.670.888.514	98,17	Sangat Tinggi	43.854.672.884	98,17	Sangat Tinggi
		Kecamatan Bogor Tengah	35.089.725.597	97,69	Sangat Tinggi	34.278.111.600	97,69	Sangat Tinggi
		Kecamatan Tanah Sareal	38.919.911.084,00	100,00	Sangat Tinggi	37.756.021.963,00	97,01	Sangat Tinggi
H		Unsur Pemerintahan Umum	83.533.651.618	100,00	Sangat Tinggi	81.376.125.425	97,42	Sangat Tinggi
38		Kesatuan Bangsa dan Politik	83.533.651.618	100,00	Sangat Tinggi	81.376.125.425	97,42	Sangat Tinggi
		Badan Kesbangpol	83.533.651.618	100,00	Sangat Tinggi	81.376.125.425	97,42	Sangat Tinggi

Sumber: Bapperida Kota Bogor, 2025

2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2025(%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
1	2	3	4	5				
A		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1.640.169.736.059	17,68		220.086.780.412	17,68	
1	1.01	Pendidikan	601.185.186.712	16,80	Sangat Rendah	100.972.933.485	16,80	Sangat Rendah
		Dinas Pendidikan	601.185.186.712	16,80	Sangat Rendah	100.972.933.485	16,80	Sangat Rendah
2	1.02	Kesehatan	619.756.627.468	8,54	Sangat Rendah	52.932.273.491	8,54	Sangat Rendah
		Dinas Kesehatan	619.756.627.468	8,54	Sangat Rendah	52.932.273.491	8,54	Sangat Rendah
3	1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.052.093.171	16,63	Sangat Rendah	25.292.365.019	16,63	Sangat Rendah
		Dinas PUPR	152.052.093.171	16,63	Sangat Rendah	25.292.365.019	16,63	Sangat Rendah
4	1.04	Perumahan dan Permukiman	171.761.025.947	9,61	Sangat Rendah	16.514.622.214	9,61	Sangat Rendah
		Dinas Perumkim	171.761.025.947	9,61	Sangat Rendah	16.514.622.214	9,61	Sangat Rendah
5	1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	77.166.340.977	24,50	Sangat Rendah	18.906.220.124	24,50	Sangat Rendah
		Satpol PP	47.153.334.534	24,50	Sangat Rendah	12.029.884.780	24,50	Sangat Rendah
		BPBD	9.720.132.310	16,01	Sangat Rendah	1.537.814.419	16,01	Sangat Rendah
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20.292.874.133	6,92	Sangat Rendah	5.338.520.925	6,92	Sangat Rendah
6	1.06	Sosial	18.248.461.784	29,97	Sangat Rendah	5.468.366.079	29,97	Sangat Rendah
		Dinas Sosial	18.248.461.784	29,97	Sangat Rendah	5.468.366.079	29,97	Sangat Rendah
B		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	496.917.045.642	17,87	Sangat Rendah	112.121.439.595	17,87	Sangat Rendah
7	2.07	Tenaga Kerja	17.626.214.913	16,50	Sangat Rendah	2.909.090.843	16,50	Sangat Rendah
		Dinas Tenaga Kerja	17.626.214.913	16,50	Sangat Rendah	2.909.090.843	16,50	Sangat Rendah

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2025(%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
8	2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.968.956.821	22,77	Sangat Rendah	3.180.448.520	22,77	Sangat Rendah
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.968.956.821	22,77	Sangat Rendah	3.180.448.520	22,77	Sangat Rendah
9	2.09	Pangan	19.888.846.043	21,14	Sangat Rendah	4.203.981.357	21,14	Sangat Rendah
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.888.846.043	21,14	Sangat Rendah	4.203.981.357	21,14	Sangat Rendah
10	2.11	Lingkungan Hidup	129.372.896.549	20,35	Sangat Rendah	26.323.857.830	20,35	Sangat Rendah
		Dinas Lingkungan Hidup	129.372.896.549	20,35	Sangat Rendah	26.323.857.830	20,35	Sangat Rendah
11	2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	16.930.103.872	19,51	Sangat Rendah	3.302.961.176	19,51	Sangat Rendah
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.930.103.872	19,51	Sangat Rendah	3.302.961.176	19,51	Sangat Rendah
12	2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.404.995.381	16,42	Sangat Rendah	2.200.772.537	16,42	Sangat Rendah
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.404.995.381	16,42	Sangat Rendah	2.200.772.537	16,42	Sangat Rendah
13	2.15	Perhubungan	142.232.344.377	16,58	Sangat Rendah	23.584.531.126	16,58	Sangat Rendah
		Dinas Perhubungan	142.232.344.377	16,58	Sangat Rendah	23.584.531.126	16,58	Sangat Rendah
14	2.16	Komunikasi dan Informatika	24.774.571.988	23,34	Sangat Rendah	5.782.974.357	23,34	Sangat Rendah
		Dinas Komunikasi dan Informatika	24.774.571.988	23,34	Sangat Rendah	5.782.974.357	23,34	Sangat Rendah
15		Statistik	21.697.071.988	26,60	Sangat Rendah	5.770.608.257	26,60	Sangat Rendah
		Dinas Komunikasi dan Informatika	21.697.071.988	26,60	Sangat Rendah	5.770.608.257	26,60	Sangat Rendah
16		Persandian	3.077.500.000	0,40	Sangat Rendah	12.366.100	0,40	Sangat Rendah
		Dinas Komunikasi dan Informatika	3.077.500.000	0,40	Sangat Rendah	12.366.100	0,40	Sangat Rendah
17	2.17	Koperasi dan UKM	1.293.996.200	0,50	Sangat Rendah	6.450.000	0,50	Sangat Rendah

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2025(%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.293.996.200	0,50	Sangat Rendah	6.450.000	0,50	Sangat Rendah
18	2.18	Penanaman Modal	17.131.717.191	17,31	Sangat Rendah	2.965.120.598	17,31	Sangat Rendah
		DPMPTSP	17.131.717.191	17,31	Sangat Rendah	2.965.120.598	17,31	Sangat Rendah
19	2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	75.972.458.191	34,54	Sangat Rendah	26.240.454.787	34,54	Sangat Rendah
		Dinas Pemuda dan Olahraga	75.972.458.191	34,54	Sangat Rendah	26.240.454.787	34,54	Sangat Rendah
20	2.22	Kebudayaan	12.618.012.689	21,23	Sangat Rendah	2.678.482.440	21,23	Sangat Rendah
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	12.618.012.689	21,23	Sangat Rendah	2.678.482.440	21,23	Sangat Rendah
21	2.23	Perpustakaan	1.037.397.900	1,17	Sangat Rendah	12.112.500	1,17	Sangat Rendah
		Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.037.397.900	1,17	Sangat Rendah	12.112.500	1,17	Sangat Rendah
22	2.24	Kearsipan	10.664.533.527	27,64	Sangat Rendah	2.947.227.167	27,64	Sangat Rendah
		Dinas Arsip dan Perpustakaan	10.664.533.527	27,64	Sangat Rendah	2.947.227.167	27,64	Sangat Rendah
B		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	496.917.045.642	17,87	Sangat Rendah	112.121.439.595	17,87	Sangat Rendah
7	2.07	Tenaga Kerja	17.626.214.913	16,50	Sangat Rendah	2.909.090.843	16,50	Sangat Rendah
		Dinas Tenaga Kerja	17.626.214.913	16,50	Sangat Rendah	2.909.090.843	16,50	Sangat Rendah
8	2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.968.956.821	22,77	Sangat Rendah	3.180.448.520	22,77	Sangat Rendah
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.968.956.821	22,77	Sangat Rendah	3.180.448.520	22,77	Sangat Rendah
C		Urusan Pilihan	27.778.962.266	13,57	Sangat Rendah	4.138.722.876	13,57	Sangat Rendah
23	3.25	Kelautan dan Perikanan	4.799.429.256	1,70	Sangat Rendah	81.578.400	1,70	Sangat Rendah
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.799.429.256	1,70	Sangat Rendah	81.578.400	1,70	Sangat Rendah
24	3.26	Pariwisata	2.541.624.530	0,36	Sangat Rendah	9.098.000	0,36	Sangat Rendah

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2025(%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.541.624.530	0,36	Sangat Rendah	9.098.000	0,36	Sangat Rendah
25	3.27	Pertanian	4.077.186.000	2,02	Sangat Rendah	82.239.192	2,02	Sangat Rendah
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.077.186.000	2,02	Sangat Rendah	82.239.192	2,02	Sangat Rendah
26	3.30	Perdagangan	566.658.308	40,08	Sangat Rendah	227.139.691	40,08	Sangat Rendah
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	566.658.308	40,08	Sangat Rendah	227.139.691,00	40,08	Sangat Rendah
27	3.31	Perindustrian	15.794.064.172	23,67	Sangat Rendah	3.738.667.593	23,67	Sangat Rendah
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	15.794.064.172	23,67	Sangat Rendah	3.738.667.593,00	23,67	Sangat Rendah
D		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	282.746.602.429	21,74	Sangat Rendah	60.947.619.524	21,74	Sangat Rendah
28	4.01	Sekretariat Daerah	124.640.421.504	23,30	Sangat Rendah	29.041.835.977	23,30	Sangat Rendah
		Bagian Administrasi Pembangunan	306.404.600	14,33	Sangat Rendah	43.900.248	14,33	Sangat Rendah
		Bagian Umum	86.716.213.608	23,10	Sangat Rendah	20.034.994.841	23,10	Sangat Rendah
		Bagian Organisasi	602.711.900	16,05	Sangat Rendah	96.718.030	16,05	Sangat Rendah
		Bagian Perekonomian	422.231.700	7,22	Sangat Rendah	30.498.600	7,22	Sangat Rendah
		Bagian Prokompim	2.062.470.400	20,40	Sangat Rendah	420.666.804	20,40	Sangat Rendah
		Bagian PBJ	983.019.589	11,12	Sangat Rendah	109.304.230	11,12	Sangat Rendah
		Bagian Hukum dan HAM	2.425.119.800	27,73	Sangat Rendah	672.564.002	27,73	Sangat Rendah
		Bagian Pemerintahan Setda	1.789.639.203	14,87	Sangat Rendah	266.186.798	14,87	Sangat Rendah
		Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	29.332.610.704	25,12	Sangat Rendah	7.367.002.424	25,12	Sangat Rendah
31	4.02	Sekretariat DPRD	158.106.180.925	20,18	Sangat Rendah	31.905.783.547	20,18	Sangat Rendah
		Sekretariat DPRD	158.106.180.925	20,18	Sangat Rendah	31.905.783.547	20,18	Sangat Rendah
E		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	186.351.490.740	10,43	Sangat Rendah	18.936.097.952	10,43	Sangat Rendah

NO	KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Sd Tahun 2025(%)				
				Triwulan I				
				Fisik (%)	Predikat Fisik	Realisasi Keuangan (Rp.)	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
30	5.01	Perencanaan	22.906.179.599	17,02	Sangat Rendah	3.898.641.512	17,02	Sangat Rendah
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.906.179.599	17,02	Sangat Rendah	3.898.641.512	17,02	Sangat Rendah
31	5.02	Keuangan	134.596.021.701	8,01	Sangat Rendah	10.777.038.586	8,01	Sangat Rendah
		Badan Pendapatan Daerah	51.573.857.351	8,01	Sangat Rendah	3.683.491.750	8,01	Sangat Rendah
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	83.022.164.350	8,54	Sangat Rendah	7.093.546.836	8,54	Sangat Rendah
32	5.03	Kepegawaian	27.412.853.840	15,48	Sangat Rendah	4.243.176.854	15,48	Sangat Rendah
		BKPSDM	27.412.853.840	15,48	Sangat Rendah	4.243.176.854	15,48	Sangat Rendah
33	5.05	Penelitian dan Pengembangan	1.436.435.600	1,20	Sangat Rendah	17.241.000	1,20	Sangat Rendah
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.436.435.600	16,81	Sangat Rendah	17.241.000	16,81	Sangat Rendah
F		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	26.602.770.936	23,48	Sangat Rendah	6.247.068.434	23,48	Sangat Rendah
34	6.01	Pengawasan	26.602.770.936	23,48	Sangat Rendah	6.247.068.434	23,48	Sangat Rendah
		Inspektorat	26.602.770.936	23,48	Sangat Rendah	6.247.068.434	23,48	Sangat Rendah
G		Unsur Kewilayahan	236.541.932.516	21,28	Sangat Rendah	50.339.015.007	21,28	Sangat Rendah
35	7.01	Kecamatan	236.541.932.516	21,28	Sangat Rendah	50.339.015.007	21,28	Sangat Rendah
		Kecamatan Bogor Utara	29.916.540.054	5,40	Sangat Rendah	7.712.685.768	5,40	Sangat Rendah
		Kecamatan Bogor Selatan	54.120.033.897	19,00	Sangat Rendah	10.355.722.521	19,00	Sangat Rendah
		Kecamatan Bogor Timur	25.559.068.168	19,79	Sangat Rendah	5.058.408.956	19,79	Sangat Rendah
		Kecamatan Bogor Barat	51.639.193.827	20,07	Sangat Rendah	10.364.643.141	20,07	Sangat Rendah
		Kecamatan Bogor Tengah	35.321.105.620	24,00	Sangat Rendah	8.532.885.279	24,00	Sangat Rendah
		Kecamatan Tanah Sareal	39.985.990.950	21,00	Sangat Rendah	8.314.669.342	21,00	Sangat Rendah
H		Unsur Pemerintahan Umum	47.544.182.076	37,50	Sangat Rendah	17.828.685.622	37,50	Sangat Rendah
36		Kesatuan Bangsa dan Politik	47.544.182.076	37,50	Sangat Rendah	17.828.685.622	37,50	Sangat Rendah
		Badan Kesbangpol	47.544.182.076	37,50	Sangat Rendah	17.828.685.622	37,50	Sangat Rendah

Sumber: Bapperida Kota Bogor, 2025

Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025 untuk keseluruhan program dan kegiatan di Kota Bogor, capaian kinerja sebesar 20,44% dan capaian keuangan sebesar 20,44% dengan total realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.490.645.429.422.- Capaian kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar 17,68% dan capaian keuangan sebesar 17,68% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp220.086.780.42.- Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar 17,87% dan capaian keuangan sebesar 17,87% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp112.121.439.595.-, Urusan Pilihan sebesar 13,57% dan capaian keuangan sebesar 13,57% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp4.138.722.876.-, Unsur Pendukung Urusan Pemerintah sebesar 21,74 % dan capaian keuangan sebesar 21,74% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp60.947.619.524.-, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar 10,43% dan capaian keuangan sebesar 10,43% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp18.936.097.952.-, Unsur Pengawasan sebesar 23,48% dan capaian keuangan sebesar 23,48% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp6.247.068.434.-, Unsur Kewilayahan sebesar 21,28% dan capaian keuangan sebesar 21,28% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp50.339.015.007.-, dan Unsur Pemerintahan Umum sebesar 37,50% dan capaian keuangan sebesar 37,50% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp17.828.685.622.-.

Dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan triwulan I tahun 2025, secara umum beberapa faktor pendorong dan penghambat yang sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

a. Faktor Pendorong:

- 1) Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaan program dan kegiatan /sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Anggaran dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat, dimana Ketika anggaran yang diberikan mencukupi maka dapat mendorong ketercapaian kinerja program dan kegiatan sedangkan ketika anggaran yang diberikan kurang dari cukup, maka dapat menjadi penghambat keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan;
- 3) Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal;
- 4) LAKIP instansi pada tiap satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bogor telah dibuat secara periodik sebagai bentuk transparansi dan pengukuran kinerja instansi, dengan didukung oleh keselarasan dan kesesuaian indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja

sasaran pada masing-masing satuan unit kerja sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi;

- 5) Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai arahan dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, dukungan dari staf dan bawahan, perencanaan, dukungan anggaran yang tersedia, dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik;
- 6) Sinergitas yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan;
- 7) Dukungan Stakeholder yaitu pihak yang juga memiliki kepentingan dalam keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, misalnya sesama Perangkat Daerah atau juga instansi-instansi lainnya. Ketika stakeholder dapat bekerjasama dengan baik, maka dapat membantu dalam ketercapaian kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan;
- 8) Paradigma pemerintah daerah dalam proses pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu subyek pembangunan;
- 9) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Penghambat:

- 1) Kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan;
- 2) Waktu pelaksanaan berkaitan erat dengan perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, ketika waktu pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan maka dapat menjadi faktor penghambat keberjalanan program, kegiatan, dan sub-kegiatan;
- 3) Kejadian tidak terduga merupakan kejadian yang tidak diduga akan terjadi pada tahun perencanaan, misalnya bencana alam, wabah, dan lain sebagainya yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan;
- 4) Ketersediaan data, ketersediaan data sektoral yang belum lengkap dan terpadu;
- 5) Lemahnya/kurangnya pemahaman para stakeholder terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Kurangnya sarana dan prasana dalam mendukung kinerja pegawai;
- 7) Lemahnya tingkat koordinasi antar instansi terkait;
- 8) Keterbatasan SDM personal;
- 9) Rendahnya/terbatasnya kapasitas fiskal APBD;
- 10) Transisi dari sistem lama ke sistem baru yang masih perlu disosialisasikan.

2. Tindak Lanjut bagi Pelaksanaan Triwulan RKPD Berikutnya

Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah triwulan I tahun 2025, beberapa tindak lanjut yang disarankan untuk dilaksanakan pada triwulan atau RKPD berikutnya adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan;
- 2. FGD di Bidang-Bidang Perencanaan Pembangunan;
- 3. Meningkatkan koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan yang lebih matang;
- 4. Diklat teknis terkait pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

2.2.4. Capaian Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Target capaian indikator kinerja kunci menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu IKK tingkat dampak (*impact*) dan IKK tingkat hasil (*outcome*). IKK tingkat dampak (*impact*) memuat IKU pemerintah daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (*impact*) merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Inflasi	%	1,5-3,5	1.75	Tercapai	Bapperida
2	PDRB per kapita	Juta Rp	50,41	56,62	Tercapai	Bapperida
3	Indeks gini	Point	0,34	0,47	Tidak tercapai	Bapperida
4	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	%	93,79	93,47	Tidak tercapai	Bapperida
5	indeks pembangunan manusia (IPM)	Point	78,89	79,03	Tercapai	Bapperida
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.200.202	1.078.351	Tercapai	Bapperida
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,44	1,27	Tercapai	Bapperida
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,04	5,15	Tidak tercapai	Bapperida
9	angka melek huruf	Persen	99,98	99,98	Tercapai	Disdik
10	rata rata lama sekolah	Tahun	10,86	10,71	Tidak tercapai	Disdik
11	harapan lama sekolah	Tahun	14,83	13,51	Tidak tercapai	Disdik
12	angka usia harapan hidup	Tahun	74,18	75,8	Tercapai	Dinkes
13	Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) SDGs	Persen	9,70	2,32	Tercapai	Dinkes
14	Persentase Balita Gizi buruk dan Gizi Kurang (Underweight)	Persen	3,98	2	Tercapai	Dinkes

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
15	cakupan desa siaga aktif	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
16	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	69,28	67,35	Tidak tercapai	Disnaker
17	tingkat pengangguran terbuka	opini	10,37	8,13	Tercapai	Bapperida
18	rasio penduduk yang bekerja	Persen	65,65	45,41	Tidak tercapai	Disnaker
19	rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun keatas	Persen	90,91	91,87	Tercapai	Disnaker
20	keluarga pra sejahtera	Persen	5,00	NA		DPPKB
21	indeks kepuasan masyarakat	angka	3,55	3,64	Tercapai	Setda
22	persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	45,00	46,01	Tercapai	Bapenda
23	opini BPK	opini	WTP	WTP	Tercapai	BKAD
24	pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	83,70	89,80	Tercapai	DKPP
25	penguatan cadangan pangan	Ton	10	22,24	Tercapai	DKPP
26	kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0,636	0,68	Tercapai	DKPP
27	kontribusi sektor pertanian/kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Konstan	persen	0,66	0,71	Tercapai	DKPP
28	produksi Pertanian (Padi)	ton	3424,40	2966,40	Tidak tercapai	DKPP
29	kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	18,03	18,39	Tercapai	Dinkukmdag in
30	kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	persen	20,85	19,09	Tidak tercapai	Dinkukmdag in
31	kontribusi sektor industri terhadap PDRB	persen	18,03	18,39	Tercapai	Dinkukmdag in
32	kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	0,208	19,09	Tercapai	Dinkukmdag in
33	kontribusi sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB Atas Dasar konstan	persen	0,214	18,45	Tercapai	Dinkukmdag in
34	kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	persen	12,75	14,04	Tercapai	Dishub
35	kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap PDRB Atas Dasar konstan	Persen	12,75	13,66	Tercapai	Dishub
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Pengeluaran konsumsi perkapita	Ribu Rp.	12.290	11.716	Tidak tercapai	Bapperida
2	Angka kriminalitas	Angka	0,00043			Satpol PP
3	Rasio ketergantungan	Persen	43,5	43,5	Tercapai	Disdukcapil
4	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,50			DP3A
5	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	69,28	67,35	Tidak tercapai	Disnaker
III	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1	PENDIDIKAN					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	52,00	53,80	Tercapai	Disdik
2	Angka partisipasi sekolah	Persen	100	99,23	Tidak tercapai	Disdik
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100	100	Tercapai	Disdik
4	Angka Partisipasi Murni					Disdik
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	100,00	97,50	Tidak tercapai	Disdik
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	98,00	80,00	Tidak tercapai	Disdik
5	Angka Partisipasi Kasar					Disdik
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	114,30	108,60	Tidak tercapai	Disdik
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	106,00	127,40	Tercapai	Disdik
6	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	Persen	100,00	99,98	Tidak tercapai	Disdik

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	Persen	98,50	91,66	Tidak tercapai	Disdik
7	Angka Putus Sekolah					Disdik
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,02	0,02	Tercapai	Disdik
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,02	0,02	Tercapai	Disdik
8	Angka kelulusan					Disdik
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	Tercapai	Disdik
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	Tercapai	Disdik
9	Angka Melanjutkan (AM):					Disdik
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100	100	Tercapai	Disdik
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100	100	Tercapai	Disdik
10	Fasilitas Pendidikan:					Disdik
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	99,00	99,12	Tercapai	Disdik
	Sekolah pendidikan SMP/MTs	Persen	98,00	99,00	Tercapai	Disdik
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	44,00	44,00	Tercapai	Disdik
12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	30,00	32,00	Tercapai	Disdik
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	1 : 32	01:33	Tercapai	Disdik
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP	Rasio	1 : 24	1:24	Tercapai	Disdik
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	100,00	100,00	Tercapai	Disdik
16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,98	99,98	Tercapai	Disdik
17	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	Persen	98,00	98,00	Tercapai	Disdik
18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	90,50	93,00	Tercapai	Disdik
19	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Angka	50,50	70,04	Tercapai	Disdik
20	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Angka	107,90	99,98	Tidak tercapai	Disdik
21	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Angka	94,50	91,66	Tidak tercapai	Disdik
22	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Angka	75,50	81,80	Tercapai	Disdik
2	KESEHATAN					
1	Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	55	92,02	Tidak tercapai	Dinkes
2	Rasio Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	Angka	2,80	6,99	Tidak tercapai	Dinkes
3	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Angka	3,00	7,73	Tidak tercapai	Dinkes
4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	Tercapai	Dinkes
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	2,97	1,67	Tidak tercapai	Dinkes
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100,00	100,00	Tercapai	Dinkes
7	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
8	Rasio Puskesmas Per 30,000 penduduk	Per 30.000 penduduk	0,72	0,67	Tidak tercapai	Dinkes
9	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
11	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	99,00	101,82	Tercapai	Dinkes
12	NonPolio AFP rate per 100.000 penduduk	non polio AFP rate	≥ 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun	17,54	Tercapai	Dinkes
13	Cakupan pneumonia balita yang ditangani	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
15	Prevalensi Hipertensi	%	8,40	10,27	Tercapai	Dinkes
16	Prevalensi Diabetes Militus	%	2,05	2,5	Tercapai	Dinkes
17	Persentase kesembuhan TB Paru	Persen	87,5	43,44	Tidak tercapai	Dinkes
18	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	60,00	276,47	Tidak tercapai	Dinkes
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
20	Angka bebas jentik nyamuk DBD	Persen	96,00	94,48	Tidak tercapai	Dinkes
21	Persentase penemuan penderita diare pada balita	Persen	100	392,45	Tidak tercapai	Dinkes
22	Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	<0,5	0,48	Tercapai	Dinkes
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
25	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	%	100	100	Tercapai	Dinkes
26	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	%	100	100	Tercapai	Dinkes
27	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	%	96,3	100,97	Tercapai	Dinkes
28	Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	100	100	Tercapai	Dinkes
29	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
30	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
31	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
32	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
33	Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani	Persen	81	105,04	Tercapai	Dinkes
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
35	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	Tercapai	Dinkes

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
38	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
39	Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	persen	0,29	0,3	Tercapai	Dinkes
40	Persentase Rumah sakit Rujukan tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
41	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	persen	100	100,44	Tercapai	Dinkes
42	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin	persen	100	100,66	Tercapai	Dinkes
43	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	persen	100	104,59	Tercapai	Dinkes
44	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
45	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
46	Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
47	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
48	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
49	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
50	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
51	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
52	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100	100	Tercapai	Dinkes
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	PEKERJAAN UMUM					
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	90	90,05	Tercapai	PUPR
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0,875	0,1942	Tidak tercapai	PUPR
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	Persen	90,00	90,05	Tercapai	PUPR
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	Meter	523,377	96,321	Tidak tercapai	PUPR
5	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	8,55	6,07	Tidak tercapai	PUPR
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	65,00	67,86	Tercapai	PUPR
7	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persen	85	0,82	Tidak tercapai	PUPR
8	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Lokasi	1,345	1295	Tercapai	PUPR
9	persentase irigasi kota dalam kondisi baik	Persen	53,79	54,65	Tercapai	PUPR
	Rasio jaringan irigasi	Point	0,3574	0,3720	Tercapai	PUPR
10	Persentase saluran/ sungai yang ber kondisi baik	Persen	97,62	85,73	Tidak tercapai	PUPR
11	persentase penduduk berakses air minum	Persen	100	84,10	Tidak tercapai	PUPR

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
12	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,perkotaan dan perdesaan	persen	100	84,10	Tidak tercapai	PUPR
13	persentase areal kawasan kumuh kewenangan kota	Persen	1,77	1,72	Tercapai	Perumkim
14	tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	25,00	30,00	Tercapai	DLH
15	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	14,00	14,70	Tercapai	Perumkim
16	rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	0,0350	1,54	Tercapai	Bagian Kesra SETDA
PENATAAN RUANG						
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	persen	20	4.26*	Tidak tercapai	PUPR
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	0,0073	0,0055	Tidak tercapai	PUPR
3	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	persen	90	88,59	Tidak tercapai	PUPR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	rasio rumah layak huni	persen	23,52	21,41	Tidak tercapai	Perumkim
2	rasio permukiman layak huni	persen	96,78	90,56	Tidak tercapai	Perumkim
3	cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	96,78	94,57	Tidak tercapai	Perumkim
4	persentase lingkungan permukiman kumuh kewenangan kota	persen	1,77	1,72	Tercapai	Perumkim
5	persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (kewenangan kota, provinsi, pusat)	persen	1,73	3,05	Tidak tercapai	Perumkim
6	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	persen	0,99	0,76	Tercapai	Perumkim
7	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	98,50	99,86	Tercapai	Perumkim
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Persen	95	100	Tercapai	Perumkim
9	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota	Persen	100	100	Tercapai	Perumkim
10	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani	Persen	67,57	61,68	Tercapai	Perumkim
11	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	Persen	17,26	5,43	Tercapai	Perumkim
12	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Persen	14,29	12,71	Tidak tercapai	Perumkim
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	rasio (RT/linmas)	3739	1049	Tidak tercapai	Satpol PP
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	100	100	Tercapai	Satpol PP
3	Persentase Penegakan PERDA	persen	100	100	Tercapai	Satpol PP
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	persen	100	50	Tidak tercapai	Damkar
5	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana	persen	100	50	Tidak tercapai	Damkar
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	≤15	≤15	Tercapai	Damkar
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	492.202	65.608	65608	BPBD
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan	Jiwa	492.202	35.658	35658	BPBD

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	dan kesiap siagaan terhadap bencana					
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	3.000	4.830	Tercapai	BPBD
10	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100	100	Tercapai	Satpol PP
11	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100	100	Tercapai	Satpol PP
12	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	Tercapai	DPKP
13	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	persen	95	95	Tercapai	DPKP
6	SOSIAL					
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	38,00	38,00	Tercapai	Dinsos
5	Persentase pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100	100	Tercapai	Dinsos
9	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	persen	100	100	Tercapai	Dinsos
10	Persentase korban bencana alam dan sosial yg kebutuhan dasarnya terpenuhi pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota	persen	100	100	Tercapai	Dinsos
B	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR					
1	TENAGA KERJA					
1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	%	92,81	91,87	Tidak tercapai	Disnaker
2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Orang	2500	5632	Tercapai	Disnaker
3	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	Orang	339.564	303.941	Tidak tercapai	Disnaker
4	Penetapan besaran UMK	Rupiah	4.659.429	5.126.897	Tercapai	Disnaker
5	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	%	100	100	Tercapai	Disnaker
6	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja (%)	Juta/Pekerja/ Tahun	77,76	75,47	Tidak tercapai	Disnaker
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Tenaga kerja	150	100	Tidak tercapai	Disnaker
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Tenaga kerja	50	50	Tercapai	Disnaker
9	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	73	84,62	Tercapai	Disnaker

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
10	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	29,49	18,81	Tidak tercapai	Disnaker
11	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Angka	71,5	75,47	Tercapai	Disnaker
12	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	Persen	100	73,62	Tidak tercapai	Disnaker
13	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota	Persen	65,60	94,45	Tercapai	Disnaker
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2,70	2,42	Tidak tercapai	Dp3A
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bogor	Persen	22	26	Tercapai	Dp3A
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	14,22	NA		Dp3A
4	Rasio KDRT	Persen	0,00011	0,93	Tidak tercapai	Dp3A
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	37,10	50,69	Tercapai	Dp3A
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	Tercapai	Dp3A
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	Tercapai	Dp3A
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	Persen	100	100	Tercapai	Dp3A
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	1,7	25	Tercapai	Dp3A
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum	persen	100	100	Tercapai	Dp3A
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	23,30	1,16	Tercapai	Dp3A
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	97,82	100,00	Tercapai	Dp3A
13	rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	99,98	101,05	Tercapai	Dp3A
14	rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	93	80,6	Tercapai	Dp3A
15	rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	98,01	kewenangan provinsi		Dp3A
16	rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen				Dp3A
17	Persentase ARG pada Belanja langsung APBD	poin	25,0	10,3	Tidak tercapai	Dp3A
18	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten /kota	poin	0,0098	0,0267	Tidak tercapai	Dp3A
19	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	poin	0,0086	0,0116	Tidak tercapai	Dp3A
3	PANGAN					
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/tahun	251,81			DKPP

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
2	Ketersediaan energi perkapita	kkal/kap/hr	2,400	2.460	Tercapai	DKPP
3	Ketersediaan protein perkapita	gram/kap/hr	63	81,87	Tercapai	DKPP
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	95,30	92,39	Tidak tercapai	DKPP
4	PERTANAHAN					
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	100	100	Tercapai	SETDA
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	persen	100	100	Tercapai	DPMPSTP
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	persen	90	90	Tercapai	DPMPSTP
5	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Tersusunnya RPPLH kota	ada/tidak	Ada	Ada	Tercapai	DLH
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	ada/tidak	Ada	Ada	Tercapai	DLH
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota	ada/tidak	Ada	Ada	Tercapai	DLH
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	38,17	50,89	Tercapai	DLH
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	79,814	86,510	Tercapai	DLH
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	55	58	Tercapai	DLH
7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	pelatihan	ada	ada	Tercapai	DLH
8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	DLH
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti.	Persen	100	100	Tercapai	DLH
10	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	81,40	81,40	Tercapai	DLH
11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	7,90	7,98	Tercapai	DLH
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	89,95	89,38	Tercapai	DLH
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota	Poin	54,532	59,340	Tercapai	DLH
14	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten / Kota	Poin	81,40	81,40	Tercapai	DLH
15	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Persen	12	58	Tercapai	DLH
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1 : 1	1 : 1	Tercapai	Disdukcapil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	1 : 1	1 : 1	Tercapai	Disdukcapil
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	1 : 1	1 : 1	Tercapai	Disdukcapil
4	Ketersediaan database kependudukan skala Kota	ada/tidak	Ada	Ada	Tercapai	Disdukcapil
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	Sudah	Sudah	Tercapai	Disdukcapil
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100	100	Tercapai	Disdukcapil
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	99	99	Tercapai	Disdukcapil
8	Kepemilikan KTP	Persen	100	100	Tercapai	Disdukcapil
9	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	100	100	Tercapai	Disdukcapil
10	Cakupan pasangan nonmuslim berakte kawin	Persen	60	62,34	Tercapai	Disdukcapil

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	LPM	75	75	Tercapai	DP3A
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	75	75	Tercapai	DP3A
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,44	0,96	Tercapai	DPPKB
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,135	1,89	Tercapai	DPPKB
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB	Persen	51,35	52,78	Tercapai	DPPKB
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	40,54	50,00	Tercapai	DPPKB
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	15	15	Tercapai	DPPKB
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan	Jumlah	1	1	Tercapai	DPPKB
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2	1		DPPKB
8	Ratio Akseptor KB	Persen	78,68	63,59	Tidak tercapai	DPPKB
9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	78,68	63,59	Tidak tercapai	DPPKB
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Persen	14,50	9,9	Tercapai	DPPKB
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,12	0,12	Tercapai	DPPKB
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	11,38	13,88	Tercapai	DPPKB
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	20,45	20,01	Tidak tercapai	DPPKB
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	78,68	63,59	Tidak tercapai	DPPKB
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	95,45	95,73	Tercapai	DPPKB
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	52,78	71,91	Tercapai	DPPKB
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	25,80	75,95	Tercapai	DPPKB
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	-	1	Tercapai	DPPKB
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	50,25	87,34	Tercapai	DPPKB
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	Tercapai	DPPKB
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	persen	39,96	73,02	Tercapai	DPPKB
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100	100	Tercapai	DPPKB
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat	Persen	100	100	Tercapai	DPPKB

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat					
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen	100	100	Tercapai	DPPKB
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	0	0		DPPKB
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	100	Tercapai	DPPKB
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	persen	36,00	58,09	Tercapai	DPPKB
28	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21	21	Tercapai	DPPKB
29	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	Persen	78,68	63,59	Tidak tercapai	DPPKB
30	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	11,38	13,88	Tercapai	DPPKB
9	PERHUBUNGAN					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	25.564.066	113.953.567	Tercapai	Dishub
2	Rasio ijin trayek	rasio (/Jml Pddk)	0,000189	0,000189	Tercapai	Dishub
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	5662	5662	Tercapai	Dishub
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit terminal bis	2	2	Tercapai	Dishub
5	Persentase layanan angkutan darat	persen	0,94	0,94	Tercapai	Dishub
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	100	100	Tercapai	Dishub
7	Pemasangan rambu-rambu	persen	100	100	Tercapai	Dishub
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	1,64	1,64	Tercapai	Dishub
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	penumpang	33.580.638	33.580.638	Tercapai	Dishub
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal	penumpang	7.160.900	7.160.900	Tercapai	Dishub
11	Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	rasio	1	0,8	Tidak tercapai	Dishub
12	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	rasio	0,63	0,63	Tercapai	Dishub
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100	94	Tidak tercapai	Diskominfo
2	Hasil Penilaian SPBE	Indeks	2,99	4,08	Tercapai	Diskominfo
3	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	persen	41	43	Tercapai	Diskominfo
4	Persentase Keterbukaan Informasi publik	persen	100	100	Tercapai	Diskominfo
5	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100	100	Tercapai	Diskominfo
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100	100	Tercapai	Diskominfo
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	persen	74,7	100	Tercapai	Diskominfo
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Persentase Koperasi Aktif	persen	21,45	23,1	Tercapai	DinKUKMda gin

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
2	Persentase Koperasi berkualitas	persen	10,15	10,73	Tercapai	DinKUKMda gin
3	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	UMKM	371	536	Tercapai	DinKUKMda gin
4	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun	Milyar Rupiah	194,2	164	Tidak tercapai	DinKUKMda gin
5	Jumlah PKL yang direlokasi	PKL	683	689	Tercapai	DinKUKMda gin
6	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	PKL	88	175	Tercapai	DinKUKMda gin
7	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	50	175	Tercapai	Disparbud
8	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	%	90	-		DinKUKMda gin
9	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Angka	96	96	Tercapai	DinKUKMda gin
10	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Angka	180	399	Tercapai	DinKUKMda gin
12	PENANAMAN MODAL					
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	trilyun rupiah	2,6	1,650,561,582,215 (s.d. Triw III)	Tidak tercapai	DPMPSTP
2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	1,54	NA		DPMPSTP
3	Persentasi peningkatan investasi di Kabupaten / Kota	persen	100	NA		DPMPSTP
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
1	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	Persen	5	NA		Dispora
2	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	Persen	30	0	Tidak tercapai	Dispora
3	Wirausaha muda	orang	300	120	Tidak tercapai	Dispora
4	Persentase sarana prasarana Olahraga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	Persen	83,33	50	Tidak tercapai	Dispora
5	Rasio ketersediaan SDM Tenaga keolahragaan	Rasio	0,003264:2,08	0,00348:2,08	Tercapai	Dispora
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	0,0148	2,895	Tercapai	Dispora
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	6,06	30,22	Tercapai	Dispora
8	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	15	141	Tercapai	Dispora
14	STATISTIK					
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Diskominfo
2	Data basis pembangunan daerah	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Diskominfo
3	Buku “Kota Bogor Dalam Angka”	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Diskominfo
4	Buku “PDRB”	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Diskominfo
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100	100	Tercapai	Diskominfo
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100	100	Tercapai	Diskominfo
15	PERSANDIAN					
1	Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah	persen	90	100	Tercapai	Diskominfo
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	83	84,2	Tercapai	Diskominfo
16	KEBUDAYAAN					
1	Presentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya	Persen	10	97,59	Tercapai	Disparbud
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	cagar budaya non bangunan	25	32	Tercapai	Disparbud

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
3	jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	buah	39	54	Tercapai	Disparbud
4	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	Persen	0	0		Disparbud
17	PERPUSTAKAAN					
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pemustakaan	144.000	105.234	Tidak tercapai	Diskarpus
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	87370	81584	Tidak tercapai	Diskarpus
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	perpustakaan	8,40	0,57	Tidak tercapai	Diskarpus
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	pemustaka	144.000	105.234	Tidak tercapai	Diskarpus
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	49.517	40.023	Tidak tercapai	Diskarpus
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	15	33	Tercapai	Diskarpus
18	KEARSIPAN					Diskarpus
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	100	77,14	Tidak tercapai	Diskarpus
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	100	100	Tercapai	Diskarpus
C	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN					
1	PARIWISATA					
1	Kunjungan wisata	Orang	6.399.090	8.093.203	Tercapai	Disparbud
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	2-3 hari	1-2 hari	Tidak tercapai	Disparbud
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	312.500.00 0.000	361.077.093. 168	Tercapai	Disparbud
2	PERTANIAN					
1	Produktivitas padi per hektar	ton/ha	7,38	7,20	Tidak tercapai	DKPP
2	Cakupan bina kelompok petani	persen	90,46	93,28	Tercapai	DKPP
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-2,24	-3,14	Tercapai	DKPP
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	13,94	13	Tidak tercapai	DKPP
3	PERDAGANGAN					
1	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor	persen	16,00 77,17	-30,27 79,78	Tidak tercapai Tercapai	DinKUKMda gin
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan (IUUP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko/ swalayan)	persen	99,93	70,3	Tidak tercapai	DinKUKMda gin
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	39,32	52,73	Tercapai	DinKUKMda gin
4	Persentase alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapan nya (UTTP) Bertanda terasah yang berlaku	persen	16,00	-30,27	Tidak tercapai	DinKUKMda gin
4	PERINDUSTRIAN					
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	100	100	Tercapai	DinKUKMda gin
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	persen	52,38	25,6	Tidak tercapai	DinKUKMda gin
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang yang ditetapkan dalam RPIP	persen	0	12,2	Tercapai	DinKUKMda gin
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100	100	Tercapai	DinKUKMda gin
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan	persen	0	0		DinKUKMda gin

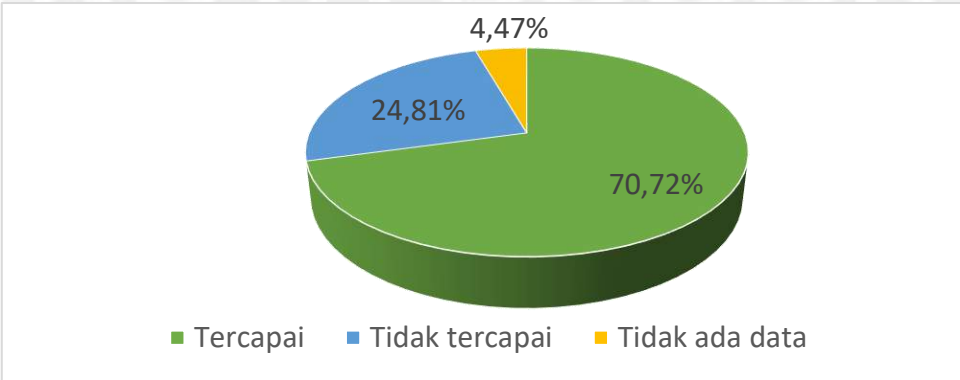
No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten / Kota	persen	0	0		DinKUKMda gin
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	persen	70	70	Tercapai	DinKUKMda gin
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Produksi Ikan Konsumsi	ton	5.353,50	1.685,90	Tidak tercapai	DKPP
2	Jumlah Konsumsi Ikan	kg	32.378.540	32.359,519	Tidak tercapai	DKPP
3	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) wilayah kabupaten/kota (sumber data: One data KKP)	Ton	4.264	1.686	Tidak tercapai	DKPP
D	FOKUS PENUNJANG URUSAN					
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Bapperida
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Bapperida
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Bapperida
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Bapperida
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPDP	persen	100	93	Tidak tercapai	Bapperida
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPDP kedalam APBD	persen	100	100	Tercapai	Bapperida
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	64,69	Tidak tercapai	Bapperida
8	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	-	1	Tercapai	Bapperida
9	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	-	-		Bapperida
10	Jumlah dokumen perencanaan RKPDP yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	1	2	Tercapai	Bapperida
11	Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	-	-		Bapperida
12	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP	persen	100	93	Tidak tercapai	Bapperida
13	Persentase Penjabaran Program RKPDP kedalam APBD	persen	100	100	Tercapai	Bapperida
14	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	100	64,69	Tidak tercapai	Bapperida
	Inspektorat Daerah (Perencanaan dan Keuangan)					
15	Maturitas SPIP	predikat	Level 3	Level 3	Tercapai	Inspektorat
16	Peningkatan kapabilitas APIP	predikat	Level 3	Level 3	Tercapai	Inspektorat
2	KEUANGAN					
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	Tercapai	BKAD
2	Persentase SILPA	persen	8	2,67	Tercapai	BKAD
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	8	2,67	Tercapai	BKAD
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	0	0	Tercapai	BKAD
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	persen	≥20	23,85	Tercapai	BKAD
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	persen	≥10	22,17	Tercapai	BKAD
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tercapai	BKAD

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
8	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	78,70	80,14	Tercapai	BKAD
9	Opini Laporan keuangan	predikat	WTP	WTP	Tercapai	BKAD
10	Devisiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	10	2	Tercapai	BKAD
11	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD setahun sebelumnya	prersen	10	3	Tercapai	BKAD
12	Devisiasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	0	1	Tidak tercapai	BKAD
13	Manajemen Aset					BKAD
14	Adanya Daftar Aset Tetap	predikat	Ya	Ya	Tercapai	BKAD
15	Penyusunan Manual daftar aset tetap	predikat	Ya	Ya	Tercapai	BKAD
16	Adanya proses inventarisasi aset tahunan	predikat	Ya	Ya	Tercapai	BKAD
17	Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	predikat	Ya	Ya	Tercapai	BKAD
3	KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT					
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20	47	Tercapai	BKPSDM
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	96	153,3	Tercapai	BKPSDM
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	persen	85	36,68	Tidak tercapai	BKPSDM
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	35	31	Tidak tercapai	BKPSDM
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	150	142	Tidak tercapai	BKPSDM
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3740	5583	Tercapai	BKPSDM
7	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	58,00	60,34	Tidak tercapai	BKPSDM
8	Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	25,96	22,98	Tidak tercapai	BKPSDM
9	Rasiopegawai fungsional bersertifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	100	56,28	Tidak tercapai	BKPSDM
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	persen	100	100	Tercapai	Bapperida
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	persen	90	100	Tidak tercapai	Bapperida
	Penerapan SIDA:					Bapperida
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	persen	100	100	Tidak tercapai	Bapperida
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	persen	96,50	98,00	Tercapai	Bapperida
5	PENGAWASAN					
1	Persentase pelanggaran pegawai	persen	0,200	0,004	Tercapai	Inspektorat
2	Persentase tindak lanjut temuan internal	persen	94,5	87,74	Tidak tercapai	Inspektorat
3	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	persen	92,7	88,99	Tidak tercapai	Inspektorat
4	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	persen	86,50	90,00	Tercapai	Inspektorat
6	SEKRETARIAT DPRD					
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Setwan
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Setwan

No.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2024		Evaluasi	Dinas
			Target	Realisasi		
	Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)					
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada	ada	Tercapai	Setwan

Sumber: Bapperida Kota Bogor, 2025

Grafik 2.34
Rekap Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2024



Sumber: Bapperida Kota Bogor, data diolah 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh informasi IKK yang menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Tingkat dampak (*impact*) Tahun 2024 berdasarkan tingkat capaiannya. Dari 403 IKK tingkat *impact* Tahun 2024, yang memiliki capaian kinerja Tercapai sebanyak 285 indikator atau 70,72%, Tidak Tercapai sebanyak 100 indikator atau 24,81%, dan Tidak Tersedia Data sebanyak 18 indikator atau 4,47%.

2.2.5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. APBD dialokasikan secara tegas dan jelas untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat. Capaian SPM Kota Bogor meliputi SPM pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pemerintah daerah menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance* dan SPM sebagai usaha pemerintah daerah untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin

SPM dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah, maka penerapannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

2.2.5.1. Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan di Kota Bogor terdiri atas:

- 1. Pendidikan Anak Usia Dini
- 2. Pendidikan Dasar
- 3. Pendidikan Kesetaraan

Pemenuhan pelayanan SPM bidang Pendidikan Tahun 2024 adalah 95.22%, masuk ke kategori TUNTAS UTAMA. Rincian pencapaian per jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.66
Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Per Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Pencapaian SPM		
		% Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	% Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	Pencapaian Total
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	73,39 %	19,21 %	92,60%
2	Pendidikan Dasar	77,79 %	19,25 %	97,03%
3	Pendidikan Kesetaraan	76,03 %	20 %	96,03%

Sumber: Laporan SPM Kota Bogor, 2025

Masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM dan penghitungan capaian SPM bidang pendidikan antara lain:

- 1. Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan Dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata.
- 2. Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif dan tidak segera mengajukan penutupan sekolah. Belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapdik secara berkala.
- 3. Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia.
- 4. Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral.

5. Sudah dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan, namun hanya sebatas jenjang SD dan SMP negeri dan swasta karena terbatasnya anggaran.

2.2.5.2. Kesehatan

Dasar peraturan perundang-undangan terkait SPM adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

Pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan mencapai 99,98 % kategori TUNTAS UTAMA. Adapun rincian pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan per jenis pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel 2.66 berikut:

Tabel 2.67
Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Per Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Pencapaian SPM		
		% Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	% Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	Pencapaian Total
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80 %	20 %	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	80 %	20 %	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	80 %	20 %	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	80 %	19,90 %	99,90%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	80 %	16,76 %	99,82%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	80 %	20 %	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	80 %	17,91%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	80 %	20 %	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80 %	20 %	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	80 %	20 %	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	80 %	20 %	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia Human Immunodeficiency Virus (HIV)	80 %	20 %	100%

Sumber: Laporan SPM Kota Bogor, 2025

Terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan SPM bidang Kesehatan antara lain:

1. Capaian mutu layanan khususnya pada pelayanan anak bayi dan balita yang tidak mencapai 100% karena tidak tercapainya capaian Imunisasi pada beberapa jenis imunisasi dan pada imunisasi lanjutan serta capaian cakupan vitamin A yang juga tidak 100%.
2. Perbedaan sasaran atau target capaian yang ditetapkan oleh kementrian kesehatan berdasarkan data di lapangan sehingga perubahan target seringkali terjadi di tengah tahun berjalan.
3. Pengumpulan data capaian tidak hanya berasal dari puskesmas namun dari seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bogor, meliputi Rumah Sakit dan klinik.

Seringkali pelaporan tersebut terlambat dilaporkan sehingga pengisian capaian di triwulan akhir lebih besar dari bulan sebelumnya.

4. Penganggaran SPM dari APBD tidak terlalu besar karena adanya anggaran APBN (DAK Non Fisik dan BOK untuk Puskesmas) yang diarahkan untuk pencapaian SPM Bidang Kesehatan.

2.2.5.3. Pekerjaan Umum

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Pekerjaan Umum yakni (1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Capaian SPM bidang urusan pekerjaan umum adalah sebesar 80,62% dengan kategori TUNTAS MADYA. Rincian pencapaian per jenis layanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.68
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Per Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Pencapaian SPM		
		% Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	% Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	Pencapaian Total
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	71,40%	20 %	91,40%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	53,28 %	16,54 %	69,83%

Sumber: Laporan SPM Kota Bogor, 2025

2.2.5.4. Perumahan Rakyat

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat dua jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Perumahan Rakyat yakni (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan (2) penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota. Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat tahun 2024 adalah 100% kategori TUNTAS PARIPURNA. Adapun rincian capaian untuk kedua jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.69
Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat Per Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Pencapaian SPM		
		% Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	% Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	Pencapaian Total
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana (kota)	80%	20 %	100%
2	Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena program pemerintah kota	80 %	20 %	100%

Sumber: Laporan SPM Kota Bogor, 2025

2.2.5.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibumlinmas kelompokkan dalam beberapa sub urusan yaitu Trantibum, Bencana Daerah, dan Pemadam Kebakaran. Capaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas per sub urusan adalah sebagai berikut

Tabel 2.70
Capaian SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Per Sub Urusan

No	Sub Urusan	Total pencapaian	Kategori
1	Trantibum	100%	TUNTAS PARIPURNA
2	Bencana Daerah	95,60%	TUNTAS UTAMA
3	Pemadam Kebakaran	100%	TUNTAS PARIPURNA

Sumber: Laporan SPM Kota Bogor, 2025

Rincian per jenis layanan SPM untuk ketiga sub urusan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.71
Rincian Capaian SPM Trantibumlinmas Per Jenis Pelayanan Dasar

No	Sub Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Pencapaian SPM		
			% Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	% Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	Pencapaian Total
1	Trantibum	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	80%	20 %	100%
2	Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	79,99 %	20 %	99,99%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	80%	18,33%	98,33
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	68,70%	19,77%	84,47%
3	Pemadam Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	80%	20%	100%

Sumber: Laporan SPM Kota Bogor, 2025

2.2.5.6. Sosial

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat lima jenis pelayanan dasar yang menjadi SPM Bidang Sosial yakni (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti; (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Capaian SPM Bidang Sosial tahun 2024 adalah 100% dengan kategori TUNTAS PARIPURNA. Adapun capaian kinerja per jenis pelayanan dasar tercantum pada tabel di bawah:

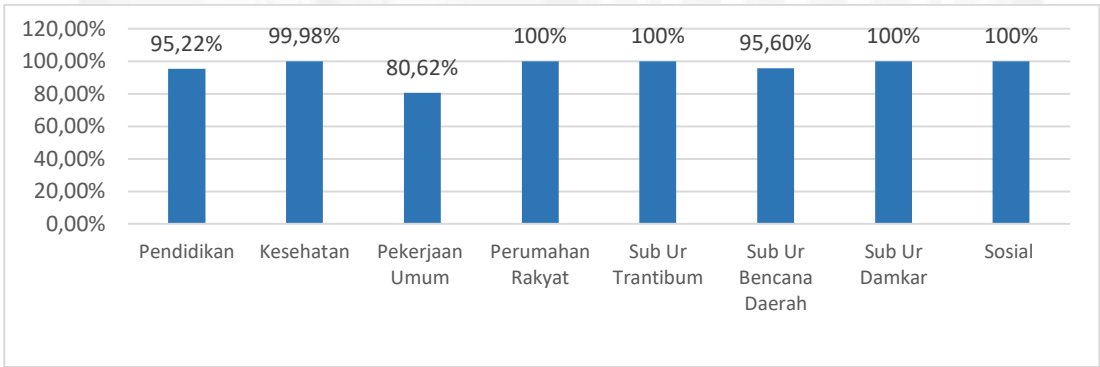
Tabel 2.72
Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial Per Jenis Pelayanan Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Hasil Pencapaian SPM		
		% Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	% Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	Pencapaian Total
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	80%	20 %	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	80 %	20 %	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	80 %	20 %	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	80 %	20 %	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80 %	20 %	100%

Sumber: Laporan SPM Kota Bogor, 2025

Capaian SPM masing-masing bidang urusan dan sub bidang urusan Kota Bogor Tahun 2024 dirangkum dalam grafik 2.35 di bawah ini. Dapat dilihat bahwa capaian SPM Kota Bogor sudah cukup baik dimana ada dua urusan dan dua sub urusan yang mendapat kategori TUNTAS PARIPURNA dengan capaian 100%, dua urusan dan satu sub urusan mendapat kategori TUNTAS UTAMA, dan hanya satu urusan yang mendapat kategori TUNTAS MADYA yaitu urusan pekerjaan umum.

Grafik 2.35
Capaian SPM Kota Bogor Per Bidang Urusan dan Sub Bidang Urusan



Sumber: Laporan SPM Kota Bogor, 2025

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan bentuk dari *gap expectation*: antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan serta antara hal yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa permasalahan yang disampaikan merupakan kondisi yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan yang perlu diperhatikan, yakni terkait permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan ekonomi, permasalahan tata kelola pemerintahan, permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Tabel 2.73
Analisis Permasalahan sebagai Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Belum meratanya akses dan mutu kesehatan	Masih terjadinya ketimpangan pelayanan kesehatan (tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan, SDM tenaga kesehatan, kemampuan finansial masyarakat untuk mendapat layanan kesehatan yang layak)	Urusan Kesehatan, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Masih belum optimalnya pembiasaan pola hidup bersih dan sehat masyarakat (status mutu gizi keluarga dan pengendalian terhadap penyakit menular dan tidak menular/degeneratif, akses masyarakat terhadap air minum, air limbah, persampahan, rumah layak huni, kebiasaan merokok, cuci tangan dengan sabun, kebersihan lingkungan, olahraga)	Urusan Kesehatan
		Masih belum optimalnya penguatan sistem kesehatan dalam penanganan wabah	Urusan Kesehatan
	Belum meratanya akses dan mutu pendidikan	Masih terjadinya ketimpangan layanan pendidikan (tingkat ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan, kemampuan finansial siswa untuk mendapat pendidikan yang layak)	Urusan Pendidikan
	Belum optimal layanan pendidikan Inklusif	Rendahnya pemahaman tenaga pendidik dan kependidikan atas pendidikan inklusif	Urusan Pendidikan
		Kurangnya sarana prasarana untuk pendidikan inklusif	Urusan Pendidikan
	Belum terwujudnya daya saing sumberdaya manusia	Masih terjadinya ketimpangan peran gender dan perlindungan anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan pengangguran	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata
		Belum optimalnya peran pemuda dan prestasi pemuda	Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Sosial
		Belum optimalnya pengembangan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap aktivitas pembangunan	Urusan Penelitian dan Pengembangan
		Masih belum optimalnya tumbuh kembang anak dan remaja	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Masih belum optimalnya pemberdayaan lansia dan kelompok disabilitas	Urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Belum optimalnya pengembangan literasi	Urusan Pendidikan
		Belum optimalnya produktivitas, daya saing, dan serapan tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata Ekraf
		Belum optimalnya layanan untuk pemenuhan, dan integrasi data administrasi kependudukan	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
		Kualitas lulusan sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi pasar kerja	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	Belum tercapainya pengentasan kemiskinan	Belum meratanya peningkatan pendapatan terutama pada kelompok miskin dan rentan miskin	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum meratanya intervensi perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dalam rangka menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin	Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
		Masih adanya kantong kantong kemiskinan (kawasan permukiman kumuh padat penduduk) yang belum tertangani dan dilakukan penataan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Sosial, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan PUPR
		Belum adanya kebijakan redistribusi fiskal yang berorientasi bagi pengembangan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial
	Rendahnya penyerapan tenaga kerja di kalangan menengah bawah	Kualitas SDM masyarakat menengah bawah belum optimal	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum optimalnya sector penyerap tenaga kerja <i>middle low labor</i>	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Para migran yang mengisi kebutuhan kerja	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum optimalnya peluang Usaha Mikro Kecil Menengah menyerap tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	Belum terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi lokal dan sektor unggulan daerah	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum optimalnya pengendalian Inflasi Daerah (masih cukup tingginya inflasi di sektor pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, dan transportasi)	Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pertanian
		Belum terkendalinya tingkat inflasi daerah akibat naiknya sebagian kelompok pengeluaran	Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Belum optimalnya pertumbuhan sektor utama struktur ekonomi kota	Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Belum tingginya peran sektor jasa (tersier) dalam struktur perekonomian kota	Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rendahnya daya saing wilayah dalam menyerap investasi yang menghasilkan tenaga kerja di Kota Bogor	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum optimalnya integrasi program	Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
	pengembangan ekonomi inklusif	Belum meratanya kapasitas/ pemahaman aparaturnya dalam pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perhubungan, Urusan Perdagangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Belum optimalnya pengembangan aktivitas ekonomi informal	Belum optimalnya penanganan tenaga kerja informal	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum optimalnya fasilitasi ruang aktivitas ekonomi informal	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal, dan UMKM	Belum teridentifikasi dengan jelas potensi ekonomi lokal	Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum terbentuknya instansi pembina dan penggerak ekonomi lokal dan ekonomi kreatif	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum meratanya kualitas SDM pelaku ekonomi lokal/ UMKM	Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Masih lemahnya pertumbuhan perusahaan <i>startup</i> di Kota Bogor	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Peran inkubasi bisnis belum optimal	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum meratanya kualitas dan daya saing produk	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum optimalnya manajemen pengelolaan UMKM	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
		Keterbatasan pemasaran produk	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum meratanya pemanfaatan IT & digital economy di lingkup UMKM	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum optimalnya fasilitasi pemerintah dalam membantu masyarakat mengakses pembiayaan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
		Belum optimalnya pengembangan, pemberdayaan, dan pendampingan bagi UMKM	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
	Belum optimalnya peran BUMD	Belum optimalnya pembinaan & pengawasan rutin BUMD	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
		Belum optimalnya kebijakan pengelolaan BUMD sektor keuangan (BPR & LKM)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pendidikan, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
		Kurangnya inovasi pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai sektor	Urusan Komunikasi dan Informasi, Urusan Penelitian dan Pengembangan
	Belum stabilnya kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi salah satu prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Belum optimalnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Urusan Sosial
		Belum optimalnya perumusan dan penegakan ketentuan perundang undangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum stabilnya kondusifitas wilayah	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Masih tingginya	Masih adanya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, atau pekerjaan dengan upah kurang layak	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
	ketimpangan pendapatan	Tingginya pengeluaran kebutuhan RT/kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Belum optimal Kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat bawah	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan UMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Rendahnya peluang usaha bagi masyarakat bawah	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Penanaman Modal, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Belum optimalnya kebijakan struktur, sistem, dan mekanisme penetapan upah	Urusan penunjang perekonomian, Urusan Tenaga Kerja, Urusan industri
	Pertumbuhan ekonomi di kalangan atas kurang dirasakan bagi masyarakat bawah	Peran pemerintah dalam mendorong peran serta masyarakat bagi peningkatan pendapatan masyarakat bawah belum optimal	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Perindustrian
		Belum adanya kebijakan redistribusi fiskal daerah pro masyarakat bawah	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Tenaga Kerja, Urusan KUMKM, Urusan Pariwisata, Urusan Sosial, Urusan Perindustrian, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas dan ramah lingkungan yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah	Belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan (panjang jalan, lebar jalan, kecepatan)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur telekomunikasi dan jaringan penerangan jalan umum	Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Perhubungan
		Belum optimalnya kualitas penataan transportasi perkotaan (layanan, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan)	Urusan Perhubungan
	Belum optimalnya penyediaan layanan utilitas perkotaan	Belum meratanya layanan akses penyediaan air minum dan air limbah yang layak dan aman	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya ketersediaan utilitas pencegahan dan pengendalian resiko bencana	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum optimalnya penanganan genangan dan banjir	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya penyediaan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan rencana tata ruang kota	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Lingkungan Hidup
	Belum optimalnya kualitas penataan kawasan perumahan permukiman	Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh perkotaan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Terbatasnya aksesibilitas terhadap pembiayaan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya kualitas PSU di kawasan perumahan permukiman	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Belum optimalnya penyediaan Rumah Layak Huni	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Belum optimalnya kualitas	Belum terwujudnya struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW)	Urusan PUPR dan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Urusan
	penataan ruang	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian tata ruang kota	Urusan PUPR, Urusan Penanaman Modal, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Belum optimalnya pengendalian kualitas lingkungan dan konservasi lahan	Masih belum terkendalinya kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan	Urusan Lingkungan Hidup
		Masih belum optimalnya kualitas pengelolaan persampahan	Urusan Lingkungan Hidup
		Masih belum optimalnya konservasi kawasan lindung berupa sempadan Sumber Daya Air dan kawasan perlindungan plasma nutfah	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel	Belum optimalnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Urusan Komunikasi dan Informatika
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah, Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Urusan Pengawasan
		Belum optimalnya akuntabilitas keuangan pemerintah	Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Urusan Pengawasan
	Belum optimalnya budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan ASN yang profesional	Integritas, kompetensi, loyalitas ASN belum sepenuhnya terwujud	Urusan Kepegawaian, Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
		Agen agen perubahan belum sepenuhnya mampu mempengaruhi perubahan kinerja organisasi	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah, Urusan Kepegawaian
		Budaya kerja belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan prima dan belum sepenuhnya adaptif menghadapi perubahan dan kondisi ketidakpastian	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah, Urusan Kepegawaian

Sumber: Data diolah, 2025

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

- 1) Belum meratanya akses dan mutu Pendidikan
- 2) Belum optimal layanan pendidikan inklusif
- 3) Belum tercapainya target rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi sekolah
- 4) Belum optimal tenaga pendidik yang memiliki kompetensi

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- 1) Tingginya rasio kematian ibu, bayi dan balita
- 2) Masih tingginya prevalensi hipertensi, diabetes militus serta angka kesakitan akibat DBD
- 3) Rendahnya angka kesembuhan TB Paru
- 4) Penambahan alat kesehatan dan sarana prasarana posyandu
- 5) Belum optimalnya jaminan kesehatan kepada masyarakat
- 6) Belum meratanya akses dan mutu kesehatan
- 7) Belum tercapainya target penurunan balita gizi buruk dan gizi kurang

- 8) Masih terdapat Masyarakat yang masih menggunakan sarana air bersih yang belum layak seperti sumur dan mata air tidak terlindungi

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Sub bidang Penataan Ruang

- a) Belum optimalnya penyediaan ruang terbuka hijau publik
- b) Belum optimalnya realisasi program pemanfaatan ruang pada RTRW
- c) Penegakan hukum penataan ruang masih belum optimal
- d) Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang belum optimal

2) Sub Bidang Pekerjaan Umum

- a) Belum semua rumah tangga dilayani sistem air limbah dan air minum yang aman
- b) Belum meratanya rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan.
- c) Persebaran dan pemanfaatan infrastruktur sanitasi yang belum optimal
- d) Keterbatasan lahan yang tersedia untuk membangun instalasi pengolahan air limbah
- e) Persentase jalan yang terbangun dan yang ditingkatkan belum optimal
- f) Persentase jembatan yang terbangun dan yang ditingkatkan belum optimal

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Persentase luasan permukiman kumuh di Kawasan perkotaan, yang masih tinggi;
- 2) Belum optimalnya kualitas permukiman layak huni melalui pengurangan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
- 3) Belum terpenuhinya target untuk jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Belum optimalnya kelurahan tangguh bencana, kelurahan siaga aktif kebakaran dan bencana serta sekolah aman bencana
- 2) Indeks kesetaraan belum tercapai
- 3) Minimnya jumlah petugas perlindungan Masyarakat

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- 1) Minimnya panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial
- 2) Belum tercapainya pengentasan kemiskinan

- 3) Belum optimalnya fasilitas penyandang disabilitas baik fisik maupun intelektual

2.3.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

- 1) Tingkat penganggaran terbuka masih tinggi
- 2) Belum optimalnya tingkat kesempatan kerja yang ada
- 3) Belum sepenuhnya pekerja memiliki BPJS Ketenagakerjaan
- 4) Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja
- 5) Banyak tenaga kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi
- 6) Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan rasio penduduk yang bekerja

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- 1) Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah
- 2) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta masih rendah
- 3) Minimnya layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- 4) Masih tingginya prevalensi kekerasan terhadap anak dan perempuan serta belum optimalnya penyelesaian kasus tersebut.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- 1) Masih rendahnya pemanfaatan potensi pemanfaatan pekarangan melalui *urban farming* sebagai upaya pemenuhan kemandirian dan ketahanan pangan
- 2) Inflasi menyebabkan akses pangan bagi masyarakat miskin masih kurang
- 3) Belum dilakukan sosialisasi keamanan pangan kepada para pedagang tradisional
- 4) Minimnya produksi perikanan dan hasil olahan perikanan

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- 1) Masih cukup banyak terjadi sengketa kepemilikan lahan, dan sengketa peruntukan/penggunaan lahan
- 2) Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum masih belum terpenuhi terutama proyek-proyek strategis
- 3) Masih banyaknya aset pemerintah daerah yang belum jelas legalitasnya

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh

masyarakat dan pemerintah masih belum optimal sehingga reduksi sampah dari sumbernya masih sangat kecil

- 2) Pengolahan limbah B3 masih belum banyak dimiliki oleh pengusaha
- 3) Penanganan sampah belum optimal
- 4) Belum tercapainya target persentase sungai yang ber kondisi baik akibat dari curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan terjadinya longsor pada TPT yang sudah terbangun

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Arus migrasi masuk penduduk ke Kota Bogor cukup tinggi menyebabkan kendala dalam hal pendataan administrasi kependudukan, antara penduduk asli Kota Bogor dan penduduk non permanen di Kota Bogor
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi untuk keperluan intervensi program/kegiatan pembangunan daerah;

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

- 1) Lembaga pemberdayaan masyarakat belum optimal dalam partisipasi masyarakat
- 2) Program pemberdayaan masyarakat masih belum optimal
- 3) Kecenderungan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Kebutuhan ber-KB belum sepenuhnya terpenuhi
- 2) Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi belum optimal

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- 1) Belum optimalnya program reduksi angkutan kota dan angkutan umum massal;
- 2) Rasio konektivitas Kabupaten/ Kota dan kinerja lalu lintas belum mencapai target.
- 3) Belum terpenuhinya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
- 4) Masih terjadi kemacetan lalu lintas

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- 1) Kualitas dan kuantitas sarana prasana penunjang teknologi informasi pemerintah yang belum optimal
- 2) Belum tersedianya fasilitas penyimpanan data pemerintah yang memenuhi standar.

k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- 1) UMKM belum berdaya saing tinggi
- 2) Produktivitas usaha ekonomi kreatif masih rendah dikarenakan manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah, terbatasnya akses permodalan, dan terbatasnya akses pemasaran produk
- 3) Belum banyaknya koperasi yang berijin dan berkualitas

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- 1) Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN
- 2) Pelayanan berusaha masih terkendala pemahaman proses perizinan
- 3) Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan ada yang belum sesuai SOP
- 4) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit belum tercapai
- 5) Nilai investasi yang perlu ditingkatkan

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

- 1) Masih belum optimal peran dan kapasitas kelembagaan kepemudaan.
- 2) Belum tersedianya Kawasan GOR sesuai standar nasional/lokal di semua kecamatan.
- 3) Tidak adanya pemuda yang mendapatkan predikat Pemuda Pelopor

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- 1) Belum efektifnya pengelolaan data statistik dalam sistem portal satu data
- 2) Masih lemahnya analisa data statistik sektoral sehingga pemanfaatan data tersebut menjadi kurang efektif dan berdaya guna
- 3) Belum adanya data indikator makro di level kecamatan

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- 1) Sistem keamanan data dan informasi masih belum dapat memenuhi standar

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- 1) Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs, dan Kawasan cagar budaya/pusaka
- 2) Belum optimalnya SDM, sarana dan prasarana pembinaan Sejarah

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- 1) Belum maksimalnya masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan
- 2) Keragaman buku baru koleksi perpustakaan belum mampu memenuhi permintaan pengunjung

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- 1) Kuantitas dan kualitas SDM kearsipan belum sebanding dengan jumlah kebutuhan perangkat daerah dan unit kerja sesuai standar;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.
- 3) Penyelenggaraan kearsipan secara tertib/baku beluma ada di seluruh Perangkat Daerah

2.3.4. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pilihan**a. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata masih belum optimal
- 2) Pemasaran pariwisata belum optimal dan terintegrasi

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- 1) Produksi Pertanian mengalami tren perlambatan/penurunan karena semakin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan, dan belum optimalnya penggunaan dan penyediaan sarana prasarana pertanian, serta belum optimalnya penerapan teknologi budidaya pertanian
- 2) Masih rendahnya upaya diversifikasi dan peningkatan daya saing produk pertanian yang dapat mengandalkan pada ketersediaan lahan yang terbatas
- 3) Produktivitas pertanian yang belum optimal

c. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- 1) Inflasi yang cukup tinggi
- 2) Belum optimalnya pertumbuhan ekspor di Kota Bogor
- 3) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB perlu ditingkatkan

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- 1) Industri kecil dan menengah masih terkendala berkembang karena keterbatasan regulasi pada tata ruang
- 2) Masih rendahnya kualitas produksi industri kecil dan menengah

2.3.5. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Urusan Fungsi Penunjang**a. Urusan Perencanaan**

- 1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang belum terealisasi sepenuhnya
- 2) Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;
- 3) Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja.

b. **Urusan Keuangan**

- 1) Belum optimalnya pendapatan daerah Kota Bogor terutama yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
- 2) Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku
- 3) Pengamanan terhadap aset dan BMD khususnya tanah belum dapat dilaksanakan dengan optimal

c. **Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

- 1) Belum terpenuhinya pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan structural
- 2) Masih kurangnya jabatan pimpinan tinggi dan administrasi pada instansi pemerintah
- 3) Pegawai fungsional bersertifikat kompetensi masih rendah

d. **Urusan Penelitian Dan Pengembangan**

- 1) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kelitbangan
- 2) Masih terbatasnya akses informasi kepada masyarakat tentang hasil kelitbangan Kota Bogor

2.3.6. **Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 untuk Dasar Identifikasi Isu Strategis**

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024, masih banyak permasalahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan isu strategis guna menyelesaikan permasalahan utama pembangunan daerah secara bertahap dengan memperhatikan isu strategis pembangunan nasional dan isu strategis pembangunan provinsi.

Tabel 2.74
Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024

Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
Tata kelola pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembangunan manusia belum optimal	1. Belum meratanya akses dan mutu kesehatan 2. Belum meratanya akses dan mutu pendidikan 3. Belum optimal layanan pendidikan Inklusif 4. Belum terwujudnya daya saing sumberdaya manusia 5. Belum tercapainya pengentasan kemiskinan 6. Rendahnya penyerapan tenaga kerja di kalangan menengah bawah	Pembangunan Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Pengembangan daya saing ekonomi daerah belum optimal	1. Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah 2. Belum optimalnya integrasi program pengembangan ekonomi inklusif 3. Belum optimalnya pengembangan aktivitas ekonomi informal 4. Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal, dan UMKM 5. Belum optimalnya peran BUMD	Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi

Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi Isu Strategis
	6. Belum stabilnya kondusifitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi salah satu prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 7. Masih tingginya ketimpangan pendapatan 8. Pertumbuhan ekonomi di kalangan atas kurang dirasakan bagi masyarakat bawah	
Belum optimalnya Ketersediaan infrastuktur yang berkualitas serta lingkungan yang sehat	1. Belum terciptanya konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal 2. Belum optimalnya penyediaan layanan utilitas perkotaan 3. Belum optimalnya kualitas penataan kawasan perumahan permukiman 4. Belum optimalnya kualitas penataan ruang 5. Belum optimalnya pengendalian kualitas lingkungan dan konservasi lahan	Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan
Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang lincah kolaboratif dan akuntabel 2. Belum optimalnya budaya birokrasi yang berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif dan ASN yang profesional	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumber: Bapperida Kota Bogor

BAB 3

KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan rencana pembangunan daerah tahunan yang memuat Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah tahun 2026 yang meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi makro menggambarkan arah dan kebijakan ekonomi Kota Bogor tahun 2026 berdasarkan analisa dan proyeksi dengan berdasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2024. Dalam perumusan kebijakan perekonomian tersebut mempertimbangkan pula kebijakan pembangunan ekonomi Jawa barat, Nasional dan Global.

Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah yang memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2026. Selanjutnya, berdasarkan hal-hal tersebut akan dirumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2026 beserta proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan tahun 2026, termasuk di dalamnya perkiraan potensi sumber dan besaran pendapatan dari seluruh sektor. Kerangka pendanaan menjadi dasar dalam kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip untuk penyelesaian berbagai permasalahan kota yang tertuang dalam isu strategis dan program prioritas, serta perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor untuk tahun 2026, mempertimbangkan amanat Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024 serta kondisi perekonomian tahun 2024 dan awal tahun 2025. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Bogor tahun 2026 memperhatikan pula kondisi perekonomian Provinsi Jawa Barat, Nasional dan Global.

3.1.1. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Global

Saat ini kondisi ekonomi global sedang diuji dengan adanya kebijakan baru dan perubahan mendasar yang mempengaruhi geopolitik dunia. Isu terbaru yang membuat guncangan dalam ekonomi global adalah kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperkenalkan tarif trump atau tarif resiprokal. Tarif resiprokal atau timbal balik ini merupakan kebijakan perdagangan di mana suatu negara menetapkan bea masuk terhadap negara lain yang setara atau sebanding dengan tarif yang ditetapkan oleh negara tersebut terhadap negara pertama. Atau dengan kata lain

kondisi suatu negara yang menerapkan suatu tarif impor terhadap barang dari negeri lain dengan tingkat yang sama seperti tarif yang dikenakan oleh negara tersebut pada barang eksportnya.

Berdasarkan laporan IMF dalam (World Economic Forum) proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan pada angka 3,2% walaupun sedikit meningkat dibanding tahun 2024 yaitu sebesar 3,1%. Pelemahan ekonomi global dipengaruhi oleh kondisi ekonomi China dan Amerika, ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, dampak dari perubahan iklim serta ketidakpastian suku bunga global. Kondisi ini kemungkinan akan diperburuk dengan kebijakan Trump yang menerapkan kebijakan perdagangan dengan tarif resiprokal.

Namun berdasarkan situasi terkini, IMF menurunkan prediksi tersebut menjadi hanya 2,8 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kekhawatiran atas dampak kebijakan proteksionisme perdagangan, termasuk diantaranya kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter yang ketat di negara-negara besar turut memperburuk prospek pertumbuhan global. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,1 persen menjadi 3,0 persen pada 2025.

Inflasi global diperkirakan akan melandai, tetapi masih berada di atas target bank sentral di beberapa negara maju. Sementara itu, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan ekonomi di tengah perlambatan global. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 sebesar 5,1 persen, relatif stabil dibandingkan proyeksi sebelumnya. OECD yang semula optimistis dengan pertumbuhan 5,2 persen di Indonesia, kemudian merevisi proyeksi pertumbuhannya turun menjadi 4,9 persen akibat prospek melemahnya permintaan global. Konsumsi domestik diperkirakan masih akan menjadi penopang utama pertumbuhan Indonesia, didukung oleh investasi swasta yang meningkat serta kondisi inflasi yang terkendali.

Inflasi di Indonesia telah mengalami penurunan ke kisaran target Bank Indonesia, tercatat inflasi sebesar 1,7 persen pada Oktober 2024. Selain itu, pasar tenaga kerja juga menunjukkan pemulihan, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen pada pertengahan tahun 2024. Meski demikian, risiko eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi tantangan utama. Pemerintah Indonesia tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2025 sesuai dengan APBN, sedangkan Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen. Untuk memperkuat pertumbuhan jangka menengah, OECD merekomendasikan Indonesia untuk melanjutkan reformasi struktural, termasuk peningkatan efisiensi belanja publik dan pengurangan subsidi energi.

OECD juga mencatat bahwa meskipun ekspor Indonesia akan diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas global, pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di bawah tren sebelum pandemi. Oleh karena itu, kesinambungan reformasi dan peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif ke depan. Perdagangan internasional telah menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi global, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, tidak semua aspek perdagangan berjalan dengan lancar, dan manfaatnya tidak selalu terdistribusi secara merata. Peningkatan ketegangan perdagangan dan kebijakan proteksionis berpotensi mengganggu rantai pasokan, menaikkan harga barang konsumen, dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, eskalasi ketegangan atau konflik geopolitik dapat merusak perdamaian global dan mengganggu pasar keuangan internasional.

Untuk tahun 2026, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan sedikit meningkat ke 3,0 persen, seiring pelonggaran kebijakan moneter di negara maju dan stabilisasi harga energi. Pertumbuhan di negara berkembang diperkirakan tetap kuat, terutama di Asia, termasuk India dan Indonesia. OECD memperkirakan pertumbuhan Indonesia bisa kembali ke kisaran 5,3 persen pada tahun 2026 dengan asumsi membaiknya ekspor dan meningkatnya investasi infrastruktur. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan momentum pertumbuhan tetap terjaga melalui akselerasi hilirisasi industri, transformasi digital, dan perluasan pasar ekspor non-tradisional. Namun, keberlanjutan pertumbuhan tetap bergantung pada respons terhadap risiko global, termasuk volatilitas pasar keuangan, ketegangan geopolitik, dan transisi energi yang adil dan terencana.

Kondisi Geopolitik Dunia

Kondisi dunia saat ini sepertinya tidak baik-baik saja. Ada tendensi pengaruh dari lembaga multilateral semakin melemah sehingga tidak lagi mempunyai kekuatan untuk memperbaiki tatanan dunia. Lembaga multilateral seperti *Group of Twenty (G20)*, *United Nations*, *World Trade Organization*, *The World Bank* serta *International Monetary Fund (IMF)*, tidak berperan optimal sehingga kebijakan yang tadinya melalui sistem multilateral kemudian mengarah kepada unilateral. Padahal lembaga multilateral diharapkan mampu untuk menstabilkan keuangan global, membantu mengatasi tantangan transnasional, memfasilitasi kerjasama internasional dan juga menguatkan bantuan kemanusiaan.

Kemunduran kerjasama ekonomi ditandai dengan pertarungan dua kelompok negara besar yang tergabung dalam G7 dan BRICS. G7 bertujuan untuk menegakkan tatanan internasional yang bebas dan berbasis aturan, sementara BRICS diprakarsai untuk meningkatkan peran negara berkembang dalam lembaga keuangan

global. Pertarungan pengaruh dua kelompok ini menyebabkan tidak adanya konsensus dalam kebijakan ekonomi global. Selain itu, saat ini yang terjadi di dunia internasional adalah kebijakan *inward looking* dalam rangka proteksionisme yaitu kebijakan ekonomi yang membatasi impor dan melindungi industri dalam negeri yang bertujuan untuk melindungi bisnis dalam negeri dari persaingan asing, mempertahankan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi.

Melemahnya sistem multilateral juga berakibat pada runtuhnya *rulesbased trading system*. Kebijakan yang berkembang bertumpu pada praktik *friendshoring* dan *nearshoring* yaitu strategi perdagangan yang mengalihkan rantai pasokan ke negara-negara sekutu atau mitra dagang yang dianggap sebagai “teman”, kemudian munculnya blok perdagangan berbasis kawasan yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan antar negara yang jadi anggotanya, serta kebijakan unilateral yang pada akhirnya memunculkan retaliasi dari negara pesaing.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

IMF menggambarkan proyeksi perekonomian dunia pada tahun 2025 dan 2026 dengan istilah "resilient but slow", yang mengindikasikan bahwa ekonomi global masih tangguh, namun tumbuh secara perlahan. Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi tantangan besar karena dunia masih diliputi oleh risiko ketidakpastian global, seperti ketegangan geopolitik dan kebijakan proteksionisme perdagangan. Meski demikian, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat sepanjang tahun 2024. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen secara tahunan pada 2024, sedikit di bawah angka tahun sebelumnya sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemilu, serta investasi infrastruktur yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Dari segi capaian inflasi Indonesia pada akhir tahun 2024 masih tetap terkendali. Secara tahunan (year-on-year), inflasi mencapai 1,57 persen pada Desember 2024, masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen $\pm$ 1 persen. Stabilitas harga ini membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang masa transisi pemerintahan. Selain itu, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur.

Indonesia kembali ke zona ekspansi, mencatatkan angka 51,2 pada Desember 2024, yang mencerminkan peningkatan produksi dan optimisme pelaku industri. Dari sisi sektoral, hampir semua sektor ekonomi tumbuh positif pada tahun 2024, termasuk sektor perdagangan, manufaktur, pertanian, konstruksi, dan transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia bersifat menyeluruh, bukan hanya bertumpu pada satu sektor. Kinerja ekspor Indonesia memang tertekan akibat

melemahnya permintaan global, namun tetap ditopang oleh harga komoditas yang relatif tinggi.

Untuk tahun 2025, sejumlah lembaga internasional telah mengeluarkan proyeksi mereka terhadap perekonomian Indonesia. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di angka 4,7 persen pada 2025 dan tetap stabil di level yang sama pada 2026. World Bank juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, kemudian meningkat menjadi 4,9 persen pada 2026. Di sisi lain, OECD lebih optimistis dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dengan angka pertumbuhan sebesar 5,2 persen pada tahun 2025 dan 5,1 persen pada tahun 2026. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN Tahun Anggaran 2025, sementara Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran antara 4,7 persen hingga 5,5 persen.

Ketahanan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh belanja pemerintah yang masih tumbuh positif, serta investasi swasta yang meningkat di sektor energi dan manufaktur. Meskipun demikian, Indonesia tetap perlu waspada terhadap risiko eksternal seperti gejolak pasar keuangan global, perubahan arah kebijakan suku bunga The Fed, serta fluktuasi harga komoditas global. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Indonesia didorong untuk terus melakukan reformasi struktural, memperkuat daya saing industri, serta memperluas pasar ekspor nontradisional. OECD juga menyarankan agar efisiensi belanja publik ditingkatkan, termasuk dengan mengurangi subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

fundamental ekonomi yang relatif kuat dan inflasi yang terkendali, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global. Fokus pada hilirisasi industri, transformasi digital, serta keberlanjutan fiskal menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di tahun-tahun mendatang.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5 persen diperkirakan tidak cukup untuk mendorong Indonesia keluar dari Middle Income Trap sebelum 2045, sehingga diperlukan rata - rata pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6 sampai dengan 7 persen pada tahun 2025-2045. Berlandaskan pada Asta Cita, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 8 persen dalam eriode 2025-2029 (Gambar 3.1), yang didorong melalui transformasi perekonomian sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas untuk peningkatan output potensial dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Sumber-sumber pertumbuhan baru yang berasal dari proyek prioritas;
- c. Peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan proyek prioritas.

Gambar 3.1
Trayektori Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Sumber: Exercise Bappenas, Ranhir RKPD Jabar 2026

Dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, pemerintah pada tahun 2026 mengagendakan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, sebanyak 77 PSN yang diharapkan dapat mendorong produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional. Dari 77 PSN, yang dilaksanakan di seluruh Indonesia yaitu:

1. Makan Bergizi Gratis (MBG): lokasi Nasional; pelaksana Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator).
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator).
3. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (koordinator).
4. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan.
5. Program Penuntasan TBC: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kesehatan.
6. Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate: lokasi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan; pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta.
7. Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Kehutanan (koordinator).
8. Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional: lokasi Nasional; pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum.

Strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 antara lain diarahkan untuk: (i) memperkuat ketahanan pangan; (ii) mendorong ketahanan energi; (iii) meningkatkan

kualitas layanan pendidikan; (iv) meningkatkan kualitas layanan kesehatan; (v) mendukung efektivitas MBG; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; dan (vii) akselerasi investasi.

Belanja daerah diarahkan untuk peningkatan belanja produktif. Hal tersebut dilakukan melalui perencanaan yang lebih matang, pelaksanaan yang lebih tepat sasaran, dan evaluasi berkala berbasis hasil. Dalam konteks kewilayahan, prioritas belanja harus mempertimbangkan ketimpangan antarwilayah, khususnya daerah dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih rendah atau daerah tertinggal.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa strategi. Strategi tersebut antara lain (i) memperkuat implementasi mandatory spending (khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur) dan belanja kesehatan; (ii) menetapkan target pertumbuhan belanja modal yang proporsional dan terukur; (iii) memperkuat skema TKD yang berbasis kinerja; dan (iv) merancang program pembangunan yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap tantangan jangka menengah (a.l. ketahanan pangan berbasis lokal, peningkatan literasi digital, serta mitigasi risiko bencana).

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Jawa Barat

Perekonomian Provinsi Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, terutama melalui perdagangan barang dan jasa. Selain itu, proporsi konsumsi rumah tangga yang mencapai 66,2 persen dari PDRB, menjadikan intervensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang lebih tinggi. Perekonomian Jawa Barat sepanjang tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen, pencapaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang pertumbuhan ekonominya mencapai 5,00 persen. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan target ekonomi makro pada tahun 2026.

Tabel 3.1
Target Ekonomi Makro Jawa Barat Tahun 2025-2026

No	Indikator	Realisasi 2024 ¹⁾	Target 2025 ²⁾	Target 2026 ³⁾
1	LPE (% <i>, c-to-c</i>)	4,95	4,96 – 5,37	5,15 - 6,20
2	Laju Inflasi (% <i>, y-o-y</i>)	1,67	2,5 ± 1	2,5 ± 1
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	41,39	41.15 -41.38	40,10 - 42,00
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (% PDRB)	3,07	2,88	3,21 - 3,46

No	Indikator	Realisasi 2024 ¹⁾	Target 2025 ²⁾	Target 2026 ³⁾
5	PMTB (% PDRB)	24,70	23,60	23,82 - 23,84
6	Rasio Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,53	26,3	20,50 - 20,54

Sumber:
1) BPS Provinsi Jawa Barat, Februari 2025;
2) RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dan;
3) Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diproyeksikan tumbuh sebesar 5,15 - 6,20 persen pada tahun 2026 yang didukung oleh stabilitas perekonomian di Tengah perlambatan ekonomi global.

Terkendalnya perekonomian ditunjukkan oleh terkendalnya inflasi pada tingkat 2,5 + 1 persen yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali juga mencerminkan tingkat produksi barang dan jasa yang terkendali seiring dengan peningkatan efektivitas produksi dan distribusi bahan pokok penting. Secara bersamaan, prospek ekonomi global dan nasional yang masih tumbuh lebih lambat juga mempengaruhi kondisi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari peranan industri pengolahan yang signifikan. Kontribusi industri Jawa Barat terhadap industri Nasional mencapai 27,8 persen pada tahun 2024, yang merupakan tertinggi di antara provinsi lainnya. Dengan pencapaian tersebut, Jawa Barat diperkirakan akan tetap menjadi pusat industri nasional hingga tahun 2045. Pada tahun 2026, industri Jawa Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan output pada sektor Pertanian, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan, Transportasi, dan Real Estate. Sektor Industri Pengolahan di Jawa Barat diproyeksikan tumbuh 4,69 - 5,65 persen yang didorong oleh sub sektor industri Alat Angkutan, Barang dari Logam, Makan dan minum, dan Tekstil.

Pertumbuhan pariwisata di wilayah yang menjadi koridor pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rancangan RPJMN, yang mencakup Bogor-Sukabumi-Cianjur dan Cekungan Bandung, pada tahun 2026 diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan yang penting dalam mendorong pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan Jawa Barat sebesar 8,58 - 10,33 persen, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,97 - 9,59 persen. Tingginya pertumbuhan sektor transportasi didukung oleh peningkatan konektivitas antar wilayah di Jawa Barat seiring dengan pembangunan berbagai infrastruktur transportasi di wilayah perkotaan dan Jawa Barat bagian selatan.

Pertumbuhan yang solid di sektor lapangan usaha pada tahun 2026 didukung oleh tingginya pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar 6,30 - 7,58 persen (c-to-c), dengan nilai ADHB sebesar Rp 793,36 - 804,52 T. Sementara itu nilai realisasi investasi Jawa Barat pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 342 T, atau sekitar 15 persen terhadap target realisasi investasi nasional. Upaya pencapaian realisasi investasi tersebut dilakukan melalui perbaikan iklim investasi, baik melalui peningkatan

kepastian hukum, ketersediaan sumber daya input, serta stabilitas ekonomi dan politik. Penerapan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan juga menjadi penting, utamanya melalui implementasi green economy dan blue economy, ketersediaan infrastruktur dan pemerataan investasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan potensi masing-masing, serta hilirisasi sektor primer bernilai tambah tinggi di Jabar Selatan. Pengembangan ekonomi di Jabar Selatan melalui promosi investasi juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan Jawa Barat.

a. Kondisi dan Prospek Komponen PDRB

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan yang akan dihadapi ke depan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat didorong ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dari pertumbuhan 4,95 persen (c-to-c) pada tahun 2024 menjadi 5,15 - 6,20 persen pada tahun 2026. Proyeksi ini tidak terlepas dari trayektori ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan 8 persen pada akhir periode RPJMN 2025-2029, tetapi tetap memperhatikan fenomena perlambatan pertumbuhan global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jawa Barat yang masih terbilang tinggi di tengah resiliensi pertumbuhan ekonomi global, menjadi momentum yang perlu dimanfaatkan dalam melakukan perluasan pasar ekspor, peningkatan produksi sektor industri pengolahan, serta percepatan pembangunan yang melibatkan investasi dalam dan luar negeri.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026 diharapkan telah memasuki fase pemantapan dan stabilisasi pertumbuhan dalam menyongsong tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045. Pemantapan ekonomi tersebut diterjemahkan ke dalam komponen PDRB baik dari sisi pengeluaran maupun produksi. Dari sisi komponen pengeluaran, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 didukung oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor.

Konsumsi Rumah Tangga diproyeksikan meningkat seiring dengan terjaganya tingkat inflasi pada target 2,5 + 1 persen. Pengendalian inflasi pada berbagai peak season, efektivitas sistem distribusi komoditas, dan kemudahan sistem pembayaran dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Selain itu, peningkatan penyerapan tenaga kerja, stabilitas suku bunga, dan berlanjutnya berbagai program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, dapat menjadi sebab yang penting dalam meningkatkan konsumsi masyarakat.

Pada tahun 2026, PMTB diproyeksikan tumbuh lebih ekspansif pada tingkat 6,30 - 7,58 persen, seiring dengan penyelesaian berbagai proyek infrastruktur dan mulai beroperasinya kawasan industri baru yang tentunya dapat meningkatkan akumulasi modal pada tahun tersebut. Selain itu, fokus pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas layanan dasar di Jabar Selatan,

diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan PMTB ke tingkat yang lebih tinggi.

Kinerja Ekspor Luar Negeri Jawa Barat tahun 2026 diperkirakan akan tumbuh dalam rentang 7,21 - 8,18 persen dengan dorongan ekspor non migas khususnya produk-produk Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, serta Karet. Penguatan peran dan fungsi pelabuhan patimban dan BLJB secara efisien sebagai simpul transportasi berskala internasional untuk aktivitas ekspor, serta diversifikasi produk unggulan ekspor Jawa Barat juga akan turut mendorong kontribusi kinerja ekspor di tahun 2026.

Dari sisi produksi, terdapat 3 (tiga) sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat tahun 2024 yaitu Industri Pengolahan (41,39 persen), Perdagangan Besar dan Eceran (14,46 persen), serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (8,42 persen). Ketiga sektor ini diharapkan dapat tumbuh di tingkat yang lebih tinggi, terutama pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang ditargetkan tumbuh 2,16 - 2,60 persen pada tahun 2026. Target pertumbuhan tahun 2026 dapat diwujudkan melalui peran Jawa Barat sebagai penunpu ketahanan pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan, serta hilirisasi blue economy.

Target pertumbuhan yang lebih tinggi juga diberikan kepada sektor Industri pengolahan di tingkat 4,69 - 5,65 persen pada tahun 2026. Peningkatan ini diharapkan dapat tercapai seiring dengan upaya Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing produksi di luar industri besar, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam dan luar negeri, maupun kebutuhan produksi industri besar melalui link and match. Selain itu, hilirisasi sektor primer juga diharapkan mampu meningkatkan output pada sub sektor industri Makan Minum.

Fokus pembangunan provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 dan 2026 yang berfokus pada peningkatan layanan infrastruktur transportasi, serta pembangunan kawasan industri di Subang Smartpolitan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi. Pada tahun 2026, sektor Konstruksi ditargetkan tumbuh pada rentang 6,66 - 8,02 persen.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional, dan global. Resiliensi pertumbuhan global diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan yang lebih tinggi bagi Jawa Barat. Selain itu, pertumbuhan nasional yang ditargetkan lebih tinggi selama periode RPJMN Tahun 2025-2029 didorong oleh peningkatan pembangunan infrastruktur, serta eksplorasi yang lebih luas dalam mengembangkan komoditas unggulan di Jawa Barat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah terkait peningkatan pembangunan infrastruktur dan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2026.

Tabel 3.2
Proyeksi Pertumbuhan Komponen PDRB Tahun 2025-2026 (Persen)

Komponen PDRB	Share	Realisasi	Proyeksi	
	2024 ¹⁾	2024 ²⁾	2025 ³⁾	2026 ⁴⁾
Pengeluaran				
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	66,20	5,01	3,94	5,03 - 6,06
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,68	7,89	3,34	0,94 - 1,93
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,89	1,39	2,46	6,56 - 7,85
Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,70	6,96	4,10	6,30 - 7,58
Ekspor Barang dan Jasa	60,62	12,09	5,52	7,21 - 8,18
Impor Barang dan Jasa	57,14	15,07	5,07	0,32 - 1,32
Produksi				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,42	1,59	4,54	2,16 - 2,60
Pertambangan dan Penggalian	0,97	-0,28	-0,08	0,66 - 0,79
Industri Pengolahan	41,39	3,52	5,84	4,69 - 5,65
Pengadaan Listrik dan Gas	0,43	-0,60	3,86	4,63 - 5,58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	5,48	4,90	2,75 - 3,32
Konstruksi	8,45	7,09	5,91	6,66 - 8,02
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,46	4,85	4,85	4,57 - 5,51
Transportasi dan Pergudangan	6,24	12,34	6,78	8,58 - 10,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,07	6,43	12,85	7,97 - 9,59
Informasi dan Komunikasi	3,83	8,20	8,64	6,27 - 7,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,78	4,20	4,01	5,45 - 6,56
Real Estate	1,16	6,64	5,34	6,90 - 8,31
Jasa Perusahaan	0,46	2,49	7,28	6,01 - 7,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,79	8,73	2,00	2,99 - 3,56
Jasa Pendidikan	3,27	5,95	6,18	5,65 - 6,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	5,98	7,60	6,44 - 7,75
Jasa Lainnya	2,37	7,93	6,71	6,76 - 8,14

Sumber:
1) BPS Provinsi Jawa Barat 2024 (% PDRB);
2) BPS Provinsi Jawa Barat 2024 (% , c-to-c);
3) RKPD Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat, dan;
4) Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Target Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	Target 2026
1	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,56
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,51 – 6,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,30 - 6,65
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,15 - 6,20
5	Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah/Kapita)	64,60

6	Gini Ratio (Poin)	0,420 - 0,425
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2,62

Sumber: Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.

Kerangka ekonomi daerah yang kokoh dan resilien terhadap berbagai guncangan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi aktivitas perekonomian dan membawa pertumbuhan pada tingkat yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan, kondisi tersebut juga dapat memberikan dampak terhadap semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan membaiknya Indeks Modal Manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataannya.

Dalam rangka peningkatan Indeks Modal Manusia, Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya strategis, diantaranya peningkatan kualitas pendidikan melalui program pelatihan dan sejumlah beasiswa. Selain itu, juga memperkuat sektor kesehatan dengan memperluas akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat. Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi juga terus digencarkan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang merata. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan IMM sebesar 0,56 poin di tahun 2026.

Pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat dijalankan melalui strategi kebijakan yang mencakup:

- 1) Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan masyarakat miskin, terutama yang berada dalam kategori miskin ekstrem, mendapatkan perlindungan sosial, bantuan, dan jaminan sosial. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Beberapa strategi yang dilakukan di antaranya adalah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran, Memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran, seperti untuk biaya mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya.
- 2) Peningkatan Pendapatan Masyarakat Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upaya dilakukan dengan mempermudah akses masyarakat miskin terhadap permodalan dan izin usaha. Hal ini mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga masyarakat tidak tergantung pada lembaga keuangan informal dengan bunga tinggi.
- 3) Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan Program seperti "Kampung Anti Miskin" difokuskan pada penurunan kemiskinan ekstrem di wilayah-

wilayah tertentu di Jawa Barat. Mengurangi jumlah kemiskinan dengan meminimalkan ketimpangan antar wilayah sehingga dapat mengurangi kemiskinan secara keseluruhan. Meningkatkan akses masyarakat miskin di wilayah dengan kantong kemiskinan tinggi terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya. Kolaborasi dengan perguruan tinggi juga dilakukan untuk menjalankan program-program pengentasan kemiskinan, termasuk pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam menyusun, menjalankan serta mengelola program/kegiatan serta melakukan kolaborasi dengan semua unsur terkait. Pengelola program/kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan diperlukan Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas tinggi. Peningkatan Komitmen semua pihak dan unsur stakeholder menjadi model penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.

Dalam implementasinya, Jawa Barat menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk menentukan sasaran program secara tepat. Data ini membantu dalam mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi, termasuk dalam pelaksanaan program seperti Sekolah Rakyat yang berkaitan dengan strategi kebijakan pengentasan kemiskinan.

Secara statistik, penduduk miskin di Jawa Barat menurun dari 3,85 juta pada Maret 2024 menjadi 3,67 juta pada September 2024, atau menurun sebesar 0,38 persen. Meskipun persentase kemiskinan di Jawa Barat (7,08 persen) lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (8,57 persen), jumlah absolutnya terhitung masih tinggi karena populasi Jawa Barat yang mencapai 50 juta jiwa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen secepat-cepatnya pada tahun 2025, dan selambatnya pada tahun 2026. Untuk mencapai target ini, penguatan kelembagaan dan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menjadi langkah strategis yang diambil. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, diharapkan program-program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat mandiri dan sejahtera.

Dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta perluasan kesempatan kerja, kebijakan diarahkan dengan mendorong investasi, khususnya investasi padat karya serta pemberdayaan usaha mandiri melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas. Dalam peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan berbagai pelatihan keterampilan kerja baik keterampilan kompetensi industri maupun usaha mandiri, serta sertifikasi keahlian. Untuk memperkuat akses ke pasar kerja, difasilitasi

penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri (migran), pelaksanaan job fair dan platform informasi lowongan kerja.

Di sektor perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan perluasan akses pekerjaan yang berfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat miskin akan memberikan andil dalam menurunkan tingkat kemiskinan daerah pada level 6,35 - 6,87 persen pada tahun 2026.

Upaya mempersempit ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat antara lain dilakukan melalui pengembangan aktivitas perekonomian yang bertumpu pada kelompok masyarakat kelas bawah dan menengah seperti UMKM, IKM dan Ekonomi kreatif, serta mendorong aktivitas perekonomian berbasis potensi lokal, pemerataan infrastruktur dan investasi di wilayah afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan.

Langkah-langkah untuk memitigasi dampak perubahan iklim terhadap perekonomian juga diagendakan melalui pengarusutamaan penerapan ekonomi hijau serta penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca pada berbagai sektor-sektor pembangunan. Penurunan intensitas emisi GRK pada tahun 2026 ditargetkan pada angka 2,62 persen melalui 4 sektor utama yaitu sektor berbasis lahan (kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, lahan mangrove), sektor energi dan transportasi, serta sektor limbah dan persampahan terhadap PDRB.

b. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat

Kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

- 1) penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
- 2) penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan ramah lingkungan dan ekonomis;
- 3) penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian;
- 4) pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- 5) Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
- 6) Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

- 7) penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta perlindungan konsumen
- 8) penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
- 9) penyiapan dan penataan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah afirmasi 3 TP (Khususnya Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya demand;
- 10) pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global
- 11) penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;
- 12) penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis;
- 13) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di daerah afirmasi 3 TP (di Jawa Barat Bagian Selatan);
- 14) penyiapan pemetaan dan peningkatan kualitas SDM pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling;
- 15) penguatan tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia, serta pengembangan ekosistem PMI dan diaspora berkualifikasi menengah dan tinggi;
- 16) peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
- 17) peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM;
- 18) penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan;
- 19) industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna;
- 20) penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment);

- 21) pemberian deregulasi kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan;
- 22) Penataan dan restrukturisasi BUMD.

3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Bogor

Perekonomian Kota Bogor ditargetkan optimis naik mencapai 5,58 % pada tahun 2026 dengan mempertahankan inflasi 2-4 %. Sebagai kota yang mempunyai Visi Jangka Panjang sebagai Kota Sains Kreatif, sektor ekonomi kreatif seperti akomodasi makan dan minum serta industri kecil dan menengah menjadi sektor andalan yang terus didorong sebagai motor penggerak perekonomian Kota.

Dengan PMTB di atas 30% maka menunjukkan **komitmen kuat terhadap investasi jangka panjang**, dan merupakan level yang konsisten dengan **pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan**.

Tabel 3.4
Indikator Ekonomi Makro Kota Bogor

No	Indikator	Realisasi 2024 ¹⁾	Target 2025 ²⁾	Target 2026 ³⁾
1	LPE (% <i>c-to-c</i>)	5,15	5,3	5,58
2	Laju Inflasi (% <i>y-o-y</i>)	1,75	2-4	2-4
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	18,39	18.70	18.74
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (% PDRB)	5,06	5.19	5.27
5	PMTB (% PDRB)	0,04	34,7	34,76

Sumber: BPS Kota Bogor, Bapperida Kota Bogor 2025

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bogor

PDRB Harga Berlaku Menurut Pengeluaran adalah pendekatan untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan total pengeluaran atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya setahun), dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan (belum disesuaikan inflasi). Komponen PDRB menurut Pengeluaran:

- a. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga: Jika daya beli masyarakat meningkat, konsumsi rumah tangga akan tumbuh, yang pada akhirnya meningkatkan PDRB.
- b. Kebijakan Kebijakan Fiskal Pemerintah: Peningkatan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

- c. Investasi Investasi dan Modal: Jika tingkat investasi tinggi, maka kapasitas produksi meningkat, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.
- d. Perdagangan Antarwilayah dan Ekspor: Kinerja ekspor daerah, baik dalam bentuk barang maupun jasa, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Berdasarkan Tabel 3.4 tentang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kota Bogor tahun 2020–2024, dapat dilihat bahwa struktur pengeluaran masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, yang terus meningkat setiap tahunnya, dari Rp45.013,83 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp61.788,67 miliar pada tahun 2024. Komponen ini menjadi motor utama penggerak perekonomian Kota Bogor.

Konsumsi lembaga nonprofit (LNPRT) dan konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan stabil, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan konsumsi rumah tangga.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan tren positif, meningkat dari Rp14.605,10 miliar di 2020 menjadi Rp21.475,37 miliar di 2024, menandakan geliat investasi di sektor-sektor produktif. Sebaliknya, Sebaliknya, Net Ekspor Barang dan Jasa terus mencatat nilai negatif dan cenderung semakin dalam, dari Rp-20.280,18 miliar di 2020 menjadi Rp-28.534,78 miliar di 2024. Ini menunjukkan ketergantungan Kota Bogor terhadap barang dan jasa dari luar wilayahnya, yang menjadi tantangan besar dalam memperkuat sektor produksi lokal.

Secara umum, PDRB Kota Bogor tahun 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Kenaikan terbesar masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang stabil dan kuat, serta peningkatan investasi (PMTB) yang cukup signifikan. Namun, adanya kontribusi negatif dari net ekspor mengindikasikan ketergantungan ekonomi Kota Bogor terhadap pasokan dari luar daerah, yang bisa menjadi risiko dalam jangka panjang. Oleh karena itu, selain menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi, diperlukan strategi untuk menguatkan sektor produksi lokal agar ketergantungan impor bisa ditekan, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan.

Selain atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir.

Tabel 3.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar) Kota Bogor Tahun 2020 – 2024

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah Tangga	29.733,52	30.659,69	32.438,61	33.546,74	34.788,98
Konsumsi LNPRT	552,89	563,21	589,91	626,92	701,69
Konsumsi Pemerintah	3.094,63	3.011,38	2.983,11	3.274,02	3.191,92
PMTB	10.482,87	11.113,12	11.316,17	12.381,00	12.852,69
Perubahan Inventori	519,63	-300,58	-10,40	4,05	12,6
Net (Expor Impor)	-12.220,79	-11.674,35	-12.058,53	-12.777,35	-12.583,20
PDRB	32.162,74	33.372,48	35.258,87	37.055,36	38.964,67

Sumber: BPS Kota Bogor, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.5 di atas mengenai PDRB Kota Bogor atas dasar harga konstan 2010 menurut pengeluaran periode 2020–2024, dapat dilihat bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor utama terhadap PDRB dengan tren yang terus meningkat dari Rp29.733,52 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp34.788,96 miliar pada tahun 2024. Komponen lain yang menunjukkan pertumbuhan stabil adalah konsumsi lembaga nonprofit (LNPRT) dan konsumsi pemerintah, walaupun dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan konsumsi rumah tangga. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami peningkatan signifikan, mencerminkan investasi yang lebih aktif dalam perekonomian. Namun, net ekspor barang dan jasa terus mengalami deficit sepanjang periode tersebut, tercermin dari nilai negatif yang semakin besar, yang mengindikasikan bahwa Kota Bogor lebih banyak mengimpor dibandingkan mengekspor.

Tabel 3.5 di atas juga memperjelas pola ini dengan menunjukkan dominasi konsumsi rumah tangga dalam struktur PDRB, sedangkan sektor net ekspor selalu berada di area negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bogor masih sangat bergantung pada permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, sementara kontribusi sektor eksternal (perdagangan luar negeri) masih menjadi tantangan.

Secara keseluruhan, struktur pengeluaran PDRB Kota Bogor memperlihatkan arah pertumbuhan yang stabil berbasis konsumsi domestik dan investasi, namun memerlukan perhatian terhadap penguatan ekspor untuk menjaga keseimbangan ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa depan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi pada suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Besarnya peranan berbagailapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB Atas Dasar Harga konstan disusun berdasarkan harga tahun

dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan PDRB harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada tahun 2019-2024 diperlihatkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Proyeksi Pertumbuhan Komponen PDRB Produksi Tahun 2025-2026 (Persen)

Komponen PDRB Produksi	Share	Realisasi	Proyeksi Share	
	2024	2024	2025	2026
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,68	1,19	0,70	0,68
Pertambangan dan Penggalian				
Industri Pengolahan	18,39	2,45	18,05	17,93
Pengadaan Listrik dan Gas	3,66	-2,86	2,06	1,96
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	8,65	0,12	0,12
Konstruksi	11,18	1,17	10,74	10,67
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,09	3,13	18,41	18,17
Transportasi dan Pergudangan	14,04	12,20	13,47	13,82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,06	7,43	5,03	5,02
Informasi dan Komunikasi	5,71	10,88	10,01	10,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,75	3,59	6,19	6,15
Real Estate	2,30	6,84	2,47	2,48
Jasa Perusahaan	1,98	3,08	1,82	1,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,32	8,27	1,97	1,92
Jasa Pendidikan	3,46	2,01	3,34	3,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	2,49	1,61	1,62
Jasa Lainnya	3,69	9,08	4,00	4,10

Sumber: BPS Kota Bogor, Bapperida, 2025

Struktur perekonomian Kota Bogor pada tahun 2026 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan. Adapun sektor-sektor diproyeksikan mengalami kenaikan yaitu sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya.

Sektor perdagangan diproyeksikan menurun proporsinya dikarenakan keberadaan marketplace yang menyebabkan pasar, grosir, pusat perbelanjaan mengalami penurunan transaksi. Saat ini telah dilakukan revitalisasi terhadap Pasar Tradisional seperti Pasar Sukasari dan Pasar Jambu Dua. Upaya tersebut sudah mendukung, namun perlu dibarengi dengan peningkatan pelayanan termasuk kemudahan akses untuk memberikan nuansa pengalaman berbelanja yang lebih menarik dan berkesan, sehingga masyarakat tertarik untuk mengunjungi pasar. Sehingga pasar menjadi salah satu destinasi wisata belanja yang lebih baik. Pasar sebagai outlet produk-produk UMKM yang mempunyai harga yang menarik.

Untuk sektor akomodasi dan makan minum, Kota Bogor sebagai destinasi wisata termasuk wisata MICE, diperkirakan tahun 2025 ini terdampak adanya Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD. Namun demikian perlu peningkatan atraksi wisata melalui event-event yang dapat mendatangkan wisatawan untuk

menginap dan berkuliner di Kota Bogor. Kemudahan dalam berinvestasi wisata kuliner maupun UMKM berperan penting dalam menggerakkan sektor ini.

Sektor Jasa Pendidikan yang mengalami kenaikan, Kota Bogor merupakan destinasi untuk menempuh pendidikan, baik usia dini sampai dengan universitas, karena pelaku pendidikan di Kota Bogor kreatif dalam menciptakan metode pendidikan yang bervariasi, khususnya sekolah swasta. Keberadaan IPB, serta perguruan tinggi lainnya serta suasana lingkungan Kota Bogor yang nyaman menjadi daya tarik lainnya untuk menempuh pendidikan di Kota Bogor.

Sektor Kesehatan, keberadaan 25 rumah sakit serta beragam klinik lainnya di Kota Bogor, menjadikan Kota Bogor sebagai tujuan untuk berobat. Sehingga bisnis kesehatan di Kota Bogor sangat menjanjikan.

Tantangan dan prospek perekonomian tersebut berdampak terhadap penetapan target makro pembangunan Kota Bogor Tahun 2026 seperti pada Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
Target Indikator Makro Pembangunan

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,80	5,58	5,58
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	53,24	53,39	56,54
3	Kontribusi PDRB Kota Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat	%	34,7	34,76	2,16
4	Tingkat Kemiskinan	%	6,53	6,44	5,95
5	Rasio Gini	Indeks	0,46	0,46	0,45
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,03	80,13	81,22
7	Penurunan Emisi GRK	Ton CO2 eq per Miliar Rupiah	NA	0,38	0,71
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	59,34	57,84	58,09
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,13	8,13	7,99

Sumber: *) BA Penyepakatan Target 2026, Hasil Analisis Tim KEM Bapperida, 2025

Dengan target LPE sekitar 5,26-6,24 persen diharapkan ekonomi Kota Bogor pulih seperti sebelum Pandemi Covid-19. Sasaran penguatan indikator makro yang harus terus ditingkatkan di Kota Bogor adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi, Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih tinggi. Untuk Gini Ratio, sebagai Kota yang berlokasi di kawasan aglomerasi Jakarta, variasi tingkat kesejahteraannya sangat beragam baik yang sangat tinggi maupun miskin. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kaum miskin agar keluar dari garis kemiskinan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sebagai pelaksanaan dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Bogor. Diperlukan dukungan sumber pendanaan Non APBD Kota Bogor berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan melalui APBN, APBD Provinsi, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), obligasi daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/Public Private Partnership (PPP) serta swadaya masyarakat melalui konsep pemanfaatan dana umat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

RKPD merupakan dasar bagi penyusunan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah) yang dituangkan dalam APBD. Kebutuhan belanja pembangunan daerah dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan, yang dalam hal ini target kinerja pembangunan pada RKPD Kota Bogor Tahun 2026 mengacu pada target kinerja yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029, yang disertai dengan kebutuhan pendanaan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan APBD Tahun 2026. Untuk mensinkronkan antara kebutuhan dengan kapasitas keuangan daerah, perlu ditetapkan arah kebijakan keuangan daerah.

Untuk mengukur keuangan daerah, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah serta proyeksi keuangan daerah, sehingga dapat ditetapkan rancangan struktur keuangan daerah. Dalam menganalisa penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan

bahwa Analisa Standar Biaya merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Ketepatan analisis standar biaya akan mempengaruhi dalam penetapan proyeksi keuangan daerah.

Untuk meningkatkan kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah sistem untuk pengelolaan informasi tentang pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis elektronik. Proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah diwajibkan menggunakan SIPD.

Dalam penetapan arah kebijakan keuangan daerah dituangkan dalam struktur APBD Kota Bogor terdiri dari : (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dirumuskan berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa yang akan datang.

Penetapan arah kebijakan keuangan daerah, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional akan mewarnai arah kebijakan keuangan daerah pada RKPD maupun APBD Tahun 2026.

Gambar 3.2
Kolaborasi Pendanaan Pembangunan



Sumber: Diolah Bapperida, 2025

3.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek kinerja pelaksanaan APBD. Sebagai dasar penetapan kebijakan keuangan tahun 2026, maka diukur kinerja keuangan masa lalu atau tahun sebelum tahun 2026, baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah.

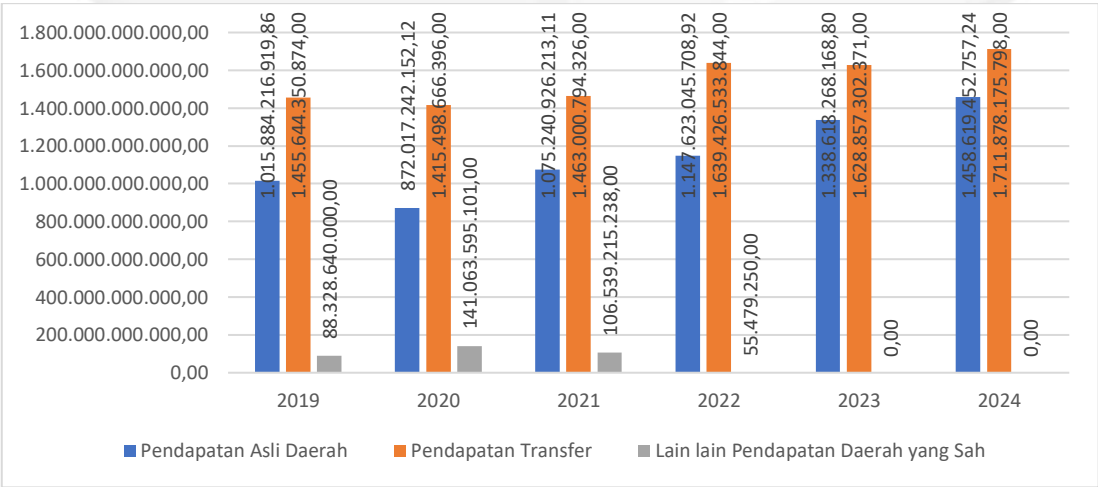
3.2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan pengertian tersebut, Pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah.

Pendapatan Daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Selama ini dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bogor masih sangat bergantung terhadap bantuan keuangan pusat maupun provinsi dalam mendukung terlaksananya pembangunan daerah melalui pendapatan transfer. Berikut unsur-unsur yang tertuang dalam elemen pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Rata rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bogor dari Tahun 2013-2022 berada dikisaran 42,83 persen, sedangkan rata rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Bogor dari tahun 2020-2024 sebesar 8,30 persen. Berikut disampaikan realisasi pendapatan daerah Kota Bogor pada grafik 3.1.

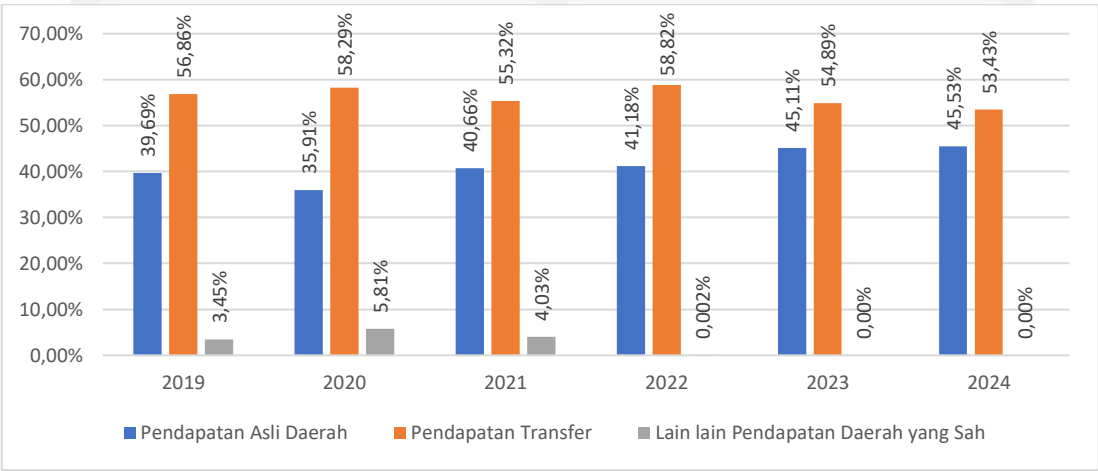
Grafik 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024



Sumber: Simral LRA, 2025

Dari gambaran grafik 3.1 di atas, mencerminkan bahwa pada tahun 2024 masih adanya ketergantungan keuangan Kota Bogor terhadap anggaran dari Pemerintah Pusat apabila disandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah. Rata rata kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dari tahun 2020-2024 sebesar 41,34 persen, angka tersebut cenderung naik dimana pada tahun 2019 kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan Kota Bogor sebesar 39,69 persen dan pada tahun 2024 kontribusinya sebesar 45,53 persen. Berikut persentase komponen pendapatan daerah yang tertuang dalam grafik 3.2.

Grafik 3.2
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor
Tahun 2019-2024



Sumber: Simral LRA, 2025

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dalam kurun waktu tahun 2019 - 2024 kondisi keuangan daerah mengalami fluktuasi yang sangat signifikan yang disebabkan adanya wabah pandemi covid 19 pada awal tahun 2020 hingga tahun 2022, tentunya hal tersebut berimplikasi terhadap seluruh komponen pendapatan daerah yang merupakan pendapatan riil suatu daerah.

Rata rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor pada tahun 2020-2024 mencapai 8,30 persen. Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor tahun 2019-2024 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Rata rata pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2020-2024 sebesar 8,95 persen. Rata rata pertumbuhan retribusi daerah dari tahun 2020-2024 sebesar 242,08 persen.

Rata rata pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun 2020-2024 sebesar 4,07 persen. Rata rata pertumbuhan lain lain pendapatan asli daerah yang sah dari tahun 2020-2024 sebesar -8,60 persen. Hal utama yang menyebabkan trend negatif pada pertumbuhan pendapatan asli daerah tahun 2020-2024 salah satunya akibat adanya pandemi covid 19, dimana aktifitas perekonomian Kota Bogor menjadi lumpuh dengan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Berikut disampaikan realisasi pendapatan asli daerah Kota Bogor tahun 2019-2024 pada tabel 3.8 berikut ini:

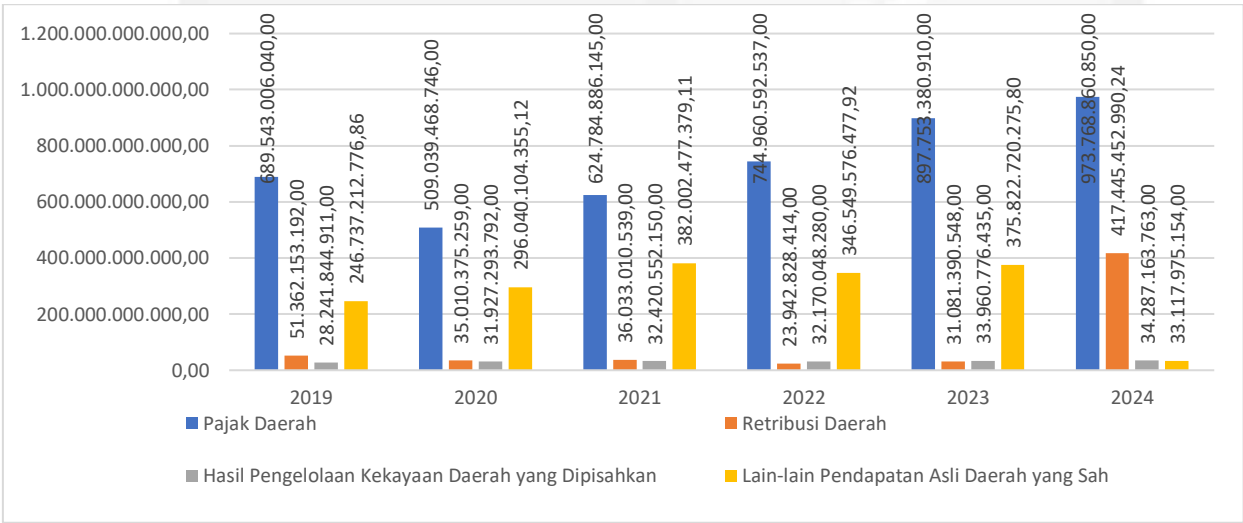
Tabel 3.8
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024
1	PENDAPATAN DAERAH						
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
1.1.1	Pajak Daerah	689,543,006,04 0.00	509,039,468,74 6.00	624,784,886,14 5.00	744,960,592,53 7.00	897,753,380,91 0.00	973,768,860,85 0.00
1.1.2	Retribusi Daerah	51,362,153,192. 00	35,010,375,259. 00	36,033,010,539. 00	23,942,828,414 .00	31,081,390,548. 00	417,445,452,99 0.24
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28,241,844,911. 00	31,927,293,792. 00	32,420,552,150. 00	32,170,048,280 .00	33,960,776,435. 00	34,287,163,763. 00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	246,737,212,77 6.86	296,040,104,35 5.12	382,002,477,37 9.11	346,549,576,47 7.92	375,822,720,27 5.80	33,117,975,154. 00
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH		1,015,884,216, 919.86	872,017,242,1 52.12	1,075,240,926, 213.11	1,147,623,045, 708.92	1,338,618,268, 168.80	1,458,619,452, 757.24

Sumber: Simral LRA, 2025

Berikut dilampirkan trend Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019-2024 pada grafik 3.3 berikut ini:

Grafik 3.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Per Komponen Tahun 2019-2024



Sumber: Simral LRA 2025

Di tahun 2024 dalam upaya memaksimalkan penerimaan pendapatan dikeluarkan beberapa kebijakan antara lain:

1. Kebijakan penerimaan pajak dan retribusi daerah mengacu pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan;
3. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut;
4. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga secara lebih efektif dan efisien dalam rangka peningkatan PAD;
5. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dikeluarkan beberapa kebijakan diantaranya:
 - a) Penyesuaian terhadap Nilai Jual Obyek Pajak PBB-P2 dengan asumsi dapat meningkatkan rasa keadilan diantara para wajib pajak, sekaligus dapat mendekati nilai jual obyek pajak dengan harga pasar;
 - b) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, dengan menitikberatkan pada pengintegrasian sistem informasi;
 - c) Pembentukan profil potensi Pendapatan Asli Daerah Wajib Pajak Daerah non PBB, BPHTB;
 - d) Meningkatkan peran perangkat daerah penghasil dalam pelayanan dan ekstensifikasi, intensifikasi pendapatan;
 - e) Inventarisasi aset dengan pengelolaan pemanfaatan kekayaan daerah;
 - f) Meningkatkan upaya penagihan piutang pajak khususnya PBB dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan aparat wilayah;
 - g) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
 - h) Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber pendapatan daerah;
 - i) Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di Kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;
 - j) Peningkatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;

- k) Peningkatan sinergitas, koordinasi dan kerjasama tentang pendapatan asli daerah dengan instansi terkait;
- l) Penerapan pola insentif dan disinsentif bagi Wajib Pajak;
- m) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memaksimalkan pendapatan.

Dengan adanya kebijakan tersebut maka komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah pada tahun 2024 apabila disandingkan dengan total pendapatan asli daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah memberikan kontribusi yang sangat besar dimana pada tahun 2024 pendapatan pajak daerah mencapai Rp.973.768.860.850,- atau meningkat sebesar 8,95 persen dari total Rp.897.753.380.910,- di tahun 2023;
- b. Retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar kedua dimana pada tahun 2024 Retribusi daerah mencapai Rp.417.445.452.990,24,- atau naik sebesar 1243,07 persen dari total Rp.31.081.390.548,00,- di tahun 2023;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terbesar ketiga dimana pada tahun 2024 Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan mencapai Rp.34.287.163.763,- atau naik sebesar 0,96 persen dari total Rp.33.960.776.435,00,- di tahun 2023;
- d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi terbesar keempat dimana pada tahun 2024 Lain lain pendapatan asli daerah yang sah mencapai Rp.33.117.975.154,- atau turun sebesar 91,19 persen dari total Rp.375.822.720.275,80,- di tahun 2023.

Komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah yang dapat terus menerus dilakukan upaya-upaya intensifikasi yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sementara untuk komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah besaran kontribusinya sangat bergantung dari kebijakan eksternal.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Dana perimbangan dari pusat merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan Pendapatan Daerah dari Provinsi adalah pendapatan transfer yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer/Dana Perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Insentif Fiskal dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Secara umum dapat diartikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keseluruhan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri netto dan ditetapkan dalam APBN. Besarnya proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat dinamis, yang artinya besaran Dana Alokasi Umum (DAU) per daerah dan realisasi penyalurannya, akan mengikuti perkembangan Pendapatan Dalam Negeri netto. Pada saat Pendapatan Dalam Negeri netto naik, maka pagu Dana Alokasi Umum (DAU) nasional akan ikut naik sehingga alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada tiap daerah juga akan ikut meningkat dan begitu pula sebaliknya.

Di sisi lain, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik dialokasikan untuk daerah tertentu dalam membiayai kegiatan khusus di mana hal itu menjadi bagian dari program prioritas nasional yang menjadi urusan daerah. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah yang memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik berdasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam, dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.

Insentif Fiskal merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dan mendukung kebijakan strategis nasional, sedangkan kriteria dan kategori yang diturunkan melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 91 tahun 2024 meliputi dukungan pemerintah daerah dalam mendukung infrastruktur pelayanan publik, peningkatan perekonomian, pelayanan kesehatan dan atau pelayanan pendidikan.

Di tahun 2024, kebijakan pendapatan daerah untuk pendapatan transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi pajak (PPN, Pph, dll);
2. Meningkatkan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengusulan dan implementasi Dana Perimbangan;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam pengusulan Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer dalam APBD Kota Bogor pada tahun 2020-2024, terlihat bahwa pendapatan transfer terus mengalami peningkatan yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,42 persen. Berikut disampaikan realisasi pendapatan transfer baik yang bersumber dari Pusat dan Provinsi sebagaimana tergambar dalam tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9
Realisasi Pendapatan Transfer Kota Bogor Tahun 2019-2024

KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
4.2	PENDAPATAN TRANSFER						
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,147,567,416,814.00	1,112,100,550,899.00	1,127,139,550,566.00	1,249,992,463,277.00	1,249,655,329,523.00	1,369,427,755,442.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	308,076,934,060.00	303,398,115,497.00	335,861,243,760.00	389,434,070,567.00	379,201,972,848.00	342,450,420,356.00
Total Pendapatan Transfer Kota Bogor		1,455,644,350,874.00	1,415,498,666,396.00	1,463,000,794,326.00	1,639,426,533,844.00	1,628,857,302,371.00	1,711,878,175,798.00

Sumber: Simral LRA, 2025

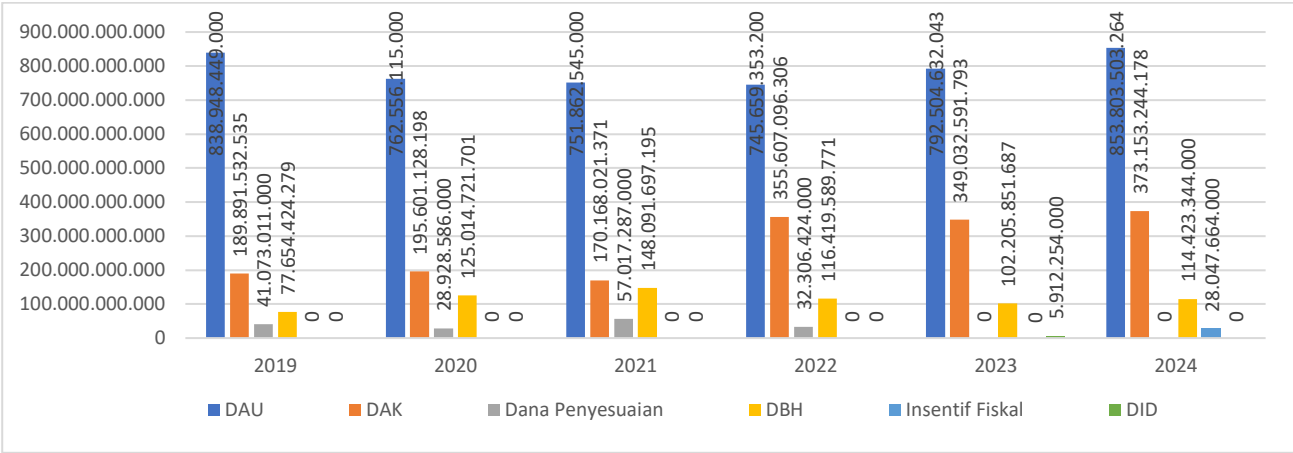
Dilihat dari tabel 3.9 di atas masih besarnya ketergantungan terhadap pendapatan transfer baik Pusat maupun Provinsi, hal tersebut menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pencapaian pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi ini, berisiko bagi APBD dan pembangunan di daerah, karena pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah yang akan diterima dapat naik atau turun tergantung pada realisasi penerimaan negara dimana hal tersebut secara eksplisit dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam setiap tahunnya.

Tidak berbeda halnya dengan pendapatan transfer Pemerintah Pusat untuk alokasi pendapatan transfer antar daerah pun bersifat dinamis, hal tersebut menuntut daerah untuk terus dapat menetapkan program prioritas agar dinamika alokasi pendapatan transfer dapat segera direspon dengan tetap mengutamakan prioritas pembangunan daerah. Poin penting lainnya tentu pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran tetap harus diperhatikan.

Dalam kurun waktu Tahun 2020 - 2024, rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,54 persen, hal tersebut berlaku pula apabila disandingkan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total Pendapatan Daerah. Pendapatan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 sebesar Rp.838.948.449.000,- menurun sebesar -9,11 persen bila dibandingkan dengan tahun 2020 senilai Rp.762.556.115.000, menurun sebesar -1,40 persen ditahun 2021 dengan pendapatan DAU senilai Rp.751.862.545.000,- menurun sebesar -0,83 persen ditahun 2022 dengan pendapatan DAU senilai Rp.745.659.353.200,- terjadi kenaikan di tahun 2023 sebesar 6,28 persen dengan pendapatan DAU senilai Rp792.504.632.043,- dan di tahun 2024 naik sebesar 7,73

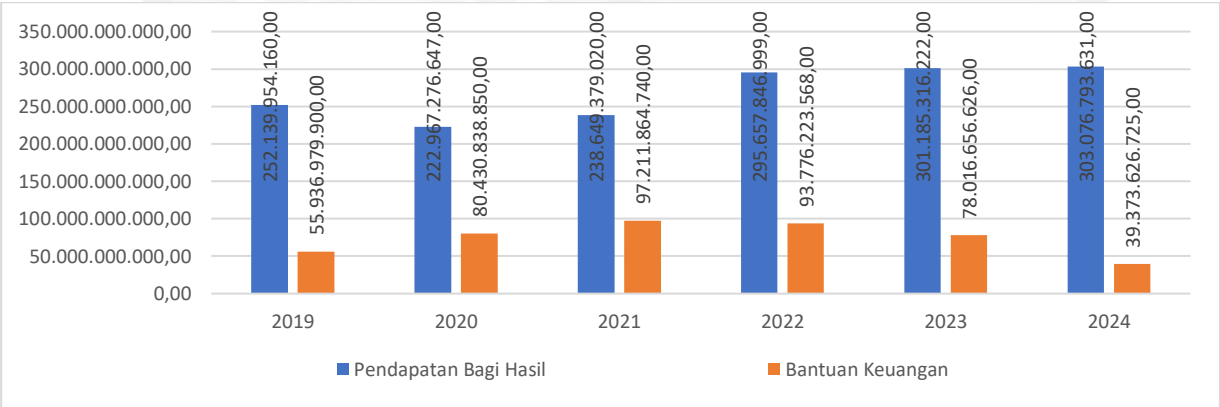
persen dengan pendapatan DAU senilai Rp853.803.503.264,- Berikut persentase Pendapatan transfer Pemerintah Pusat pada grafik 3.4 dan Pendapatan transfer Antar Daerah pada grafik 3.5 sebagai berikut:

Grafik 3.4
Pendapatan Transfer Pemerintah pusat Tahun 2019-2024



Sumber: Simral LRA 2025

Grafik 3.5
Komposisi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2019-2024



Sumber: Simral LRA 2025

c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada tahun 2024, kebijakan yang ditetapkan untuk Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan koordinasi sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Penghasil;
- 2. Melakukan upaya peningkatan alokasi dana dari pusat di luar alokasi dana perimbangan ke daerah.

Pendapatan Hibah merupakan penerimaan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali. Pemerintah akan mendapatkan manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Umum Daerah. Terhitung dari tahun 2019-2022 Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Hibah Dana BOS dari Pemerintah Pusat dalam rangka membantu sekolah agar dapat memberikan pembelajaran lebih optimal, namun pada tahun 2022 nomenklaturnya menjadi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut disampaikan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana tergambar dalam Tabel 3.10 berikut ini:

Tabel 3.10
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bogor Tahun 2019-2024

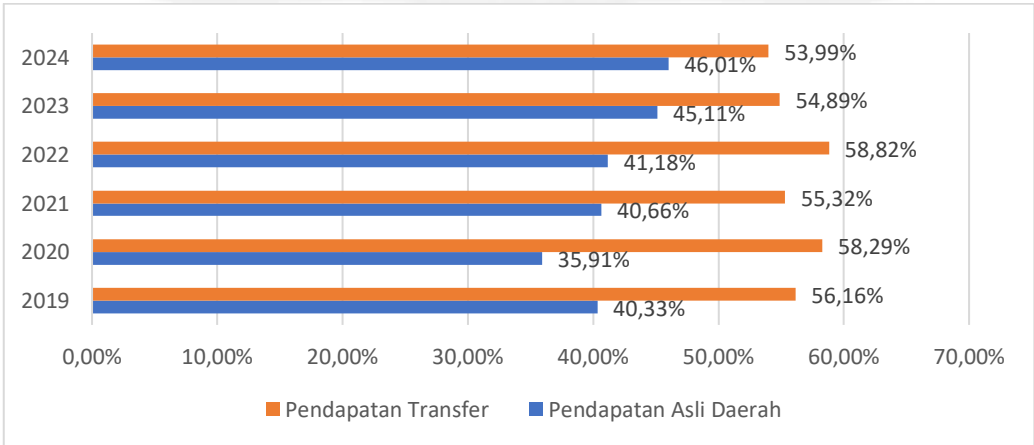
KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
4.3.1	Pendapatan Hibah	88,328,640,000	141,063,595,101	106,539,215,238	0	-	-
	Pendapatan Hibah Dana BOS	88,328,640,000	141,063,595,101	106,324,704,000	0	-	-
4.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	-	-
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	55,479,250	-	-
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0	0	214,511,238	0	-	-
Total Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bogor		88,328,640,000	141,063,595,101	106,539,215,238	55,479,250	-	-

Sumber: Simral LRA 2025

d. Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Berikut disampaikan rasio kemandirian fiskal pada grafik 3.6:

Grafik 3.6
Kemandirian Fiskal Kota Bogor Tahun 2019-2024



Sumber: Simral LRA 2025

Berdasarkan grafik 3.6 di atas dapat dilihat bahwa rata rata kemandirian fiskal Kota Bogor diangka 41,53% dimana pada tahun 2019 kemandirian fiskal Kota Bogor berada diangka 40,33%, pada tahun 2020 berada diangka 35,91%, pada tahun 2021 berada diangka 40,66%, pada tahun 2022 berada diangka 41,18% dan naik kembali pada tahun 2023 berada di angka 45,11%. Serta pada tahun 2024 meningkat berada di angka 46,01%.

Apabila diukur dari sisi Pendapatan Asli Daerah serta Pendapatan Transfer, trend dari Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya meningkat begitu juga dengan Pendapatan Transfer namun persentase besaran dari sisi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, hal tersebut menyimpulkan bahwa rasio indeks kemandirian fiskal Pemerintah Kota Bogor masuk dalam kategori Menuju Kemandirian dengan ukuran rasio ($0,25 \leq IKF < 0,50$). Berikut Analisa Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Bogor pada Tabel 3.11:

Tabel 3.11
Analisa Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kota Bogor

DESKRIPSI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	0.4033	0.3591	0.4066	0.4118	0.4511	0.4601
Pendapatan Transfer	0.5616	0.5829	0.5532	0.5882	0.5489	0.5399
Indeks Kemandirian Fiskal						
Sangat Mandiri ($IKF \geq 0,75$)						
Mandiri ($0,50 \leq IKF < 0,75$)						
Menuju Kemandirian ($0,25 \leq IKF < 0,50$)	0.4033	0.3591	0.4066	0.4118	0.4511	0.4601
Belum Mandiri ($IKF < 0,25$)						

Sumber: Diolah Bapperida, 2025

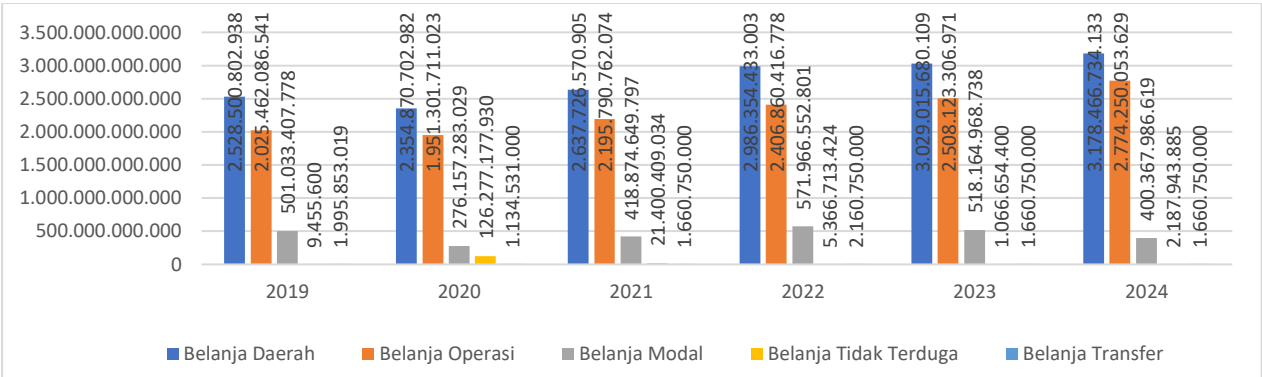
3.2.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewenangan daerah dalam mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintahan pilihan, Pendukung urusan pemerintahan, Penunjang urusan pemerintahan, Pengawasan urusan pemerintahan, kewilayahan dan Pemerintahan umum.

Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek yang berpedoman pada standar harga satuan daerah, analisis standar belanja, atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun besaran belanja

daerah dalam mendukung prioritas pembangunan dari tahun 2019-2024 tertuang dalam Grafik 3.7 Berikut ini:

Grafik 3.7
Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024



Sumber : Simral LRA, 2025

Berdasarkan grafik 3.7 di atas dapat disimpulkan bahwa belanja operasi masih yang paling dominan dibandingkan dengan komponen lainnya. Rata rata belanja operasi apabila diukur terhadap belanja daerah dari tahun 2020-2024 sebesar 6,66 persen, rata rata belanja modal apabila diukur terhadap belanja daerah dari tahun 2020-2024 sebesar 2,24 persen, dan rata rata belanja transfer apabila diukur terhadap belanja daerah dari tahun 2020-2024 sebesar 2,04 persen.

Di sisi lain Belanja Daerah dalam pendanaannya disusun berdasarkan hasil analisa dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor tahun 2025-2029. Berikut gambaran realisasi Belanja Daerah tahun 2019-2024 yang disajikan dalam Tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Total Realisasi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI						
5.1.1	Belanja Pegawai	1,181,889,361,829.00	1,010,111,841,189.00	1,091,969,595,660.00	1,128,093,224,058.00	1,063,654,426,888.00	1,242,957,964,907.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	711,101,422,815.19	798,841,580,650.00	981,671,384,413.00	1,066,553,405,102.00	1,236,457,277,949.00	1,304,164,987,240.00
5.1.3	Belanja Bunga	6,578,046,142.00	5,427,749,091.00	4,047,853,424.00	4,282,366,790.00	6,191,682,700.00	7,027,746,595.00
5.1.4	Belanja Hibah	79,149,334,000.00	93,233,837,587.00	68,284,278,577.00	146,302,919,328.00	147,381,004,434.00	176,519,335,387.00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	46,743,921,755.00	43,686,702,506.00	49,817,650,000.00	61,628,501,500.00	54,438,915,000.00	43,580,019,500.00
	TOTAL BELANJA OPERASI	2,025,462,086,541.19	1,951,301,711,023.00	2,195,790,762,074.00	2,406,860,416,778.00	2,508,123,306,971.00	2,774,250,053,629.00
5.2	BELANJA MODAL						
5.2.1	Belanja Modal Tanah	18,044,020,000.00	2,772,077,406.00	456,222,600.00	17,328,944,627.00	1,287,152,960.00	2,477,717,100.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99,754,707,372.00	129,790,481,080.00	134,821,926,240.00	93,283,801,959.00	97,928,993,032.00	133,226,642,367.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144,703,165,317.00	30,694,955,339.00	75,413,812,539.00	188,457,698,905.00	178,951,840,395.00	141,166,601,172.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235,965,307,071.00	109,784,631,710.00	206,667,544,270.00	271,189,473,185.00	238,985,747,391.00	112,729,496,656.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,910,823,018.00	1,789,184,630.00	1,037,371,248.00	708,136,673.00	911,157,960.00	10,693,173,754.00

KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	655,385,000.00	1,325,953,375.00	477,772,759.00	998,497,452.00	100,077,000.00	74,355,570.00
	TOTAL BELANJA MODAL	501,033,407,778.00	276,157,283,029.00	418,874,649,797.00	571,966,552,801.00	518,164,968,738.00	400,367,986,619.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA						
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	9,455,600.00	126,277,177.90	21,400,409.03	5,366,713,424.00	1,066,654,400.00	2,187,943,885.00
	TOTAL BELANJA TIDAK TERDUGA	9,455,600.00	126,277,177,930.00	21,400,409,034.00	5,366,713,424.00	1,066,654,400.00	2,187,943,885.00
5.4	BELANJA TRANSFER						
5.4.1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1,023,845,129.00	1,134,531,000.00	1,660,750,000.00	2,160,750,000.00	1,660,750,000.00	1,660,750,000.00
5.4.2	Bantuan Keuangan Lainnya	972,007,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL BELANJA TRANSFER	1,995,853,019.00	1,134,531,000.00	1,660,750,000.00	2,160,750,000.00	1,660,750,000.00	1,660,750,000.00
	TOTAL BELANJA DAERAH	2,528,500,802,938.19	2,354,870,702,982.00	2,637,726,570,905.00	2,986,354,433,003.00	3,029,015,680,109.00	3,178,466,734,133.00

Sumber: Simral LRA, 2025

A. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi:

1. Belanja pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara serta ASN baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi urusan pemerintah daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial.

3. Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah belanja untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang, sesuai dengan perjanjian pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada calon penerima sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Berikut realisasi belanja operasi selama Tahun 2019-2024 yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan pada tabel 3.13:

Tabel 3.13
Realisasi Belanja Operasi Kota Bogor Tahun 2019-2024

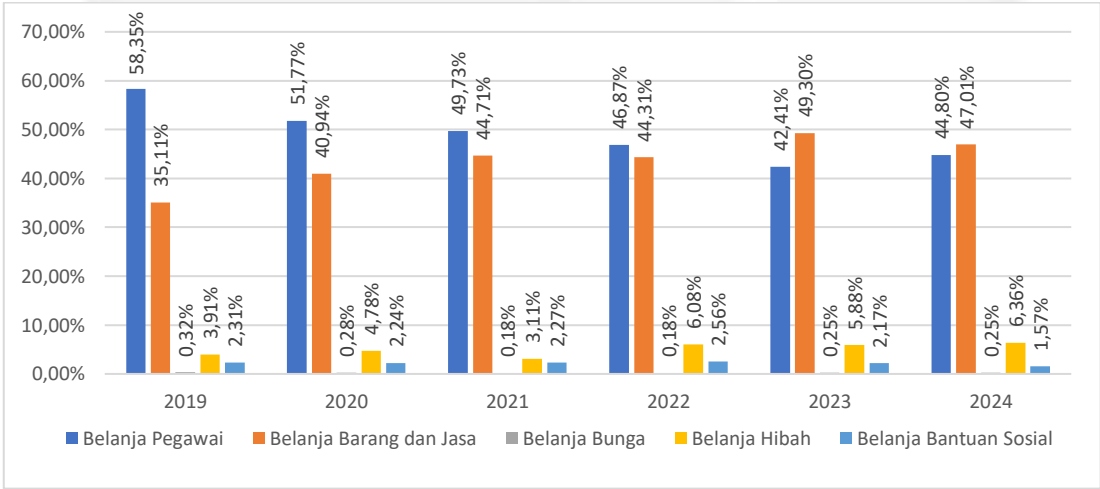
KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
5.1	BELANJA OPERASI						
5.1.1	Belanja Pegawai	1,181,889,361,829	1,010,111,841,189	1,091,969,595,660	1,128,093,224,058	1,063,654,426,888	1,242,957,964,907
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	711,101,422,815.19	798,841,580,650	981,671,384,413	1,066,553,405,102	1,236,457,277,949	1,304,164,987,240
5.1.3	Belanja Bunga	6,578,046,142	5,427,749,091	4,047,853,424	4,282,366,790	6,191,682,700	7,027,746,595
5.1.4	Belanja Hibah	79,149,334,000	93,233,837,587	68,284,278,577	146,302,919,328	147,381,004,434	176,519,335,387
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	46,743,921,755	43,686,702,506	49,817,650,000	61,628,501,500	54,438,915,000	43,580,019,500
TOTAL BELANJA OPERASI		2,025,462,086,541.19	1,951,301,711,023	2,195,790,762,074	2,406,860,416,778	2,508,123,306,971	2,774,250,053,629

Sumber: Simral LRA 2025

Melihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa belanja pegawai di tahun 2023-2024 merupakan belanja terbesar kedua dalam komponen belanja operasi walaupun secara ketentuan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bahwa total belanja pegawai pemerintah daerah tidak boleh lebih dari 30 persen dari total APBD dan maksimal sudah harus diimplementasikan pada tahun 2027 atau 5 tahun dari ditetapkannya Undang undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat persentase belanja pegawai di Kota Bogor masih diatas 30 persen.

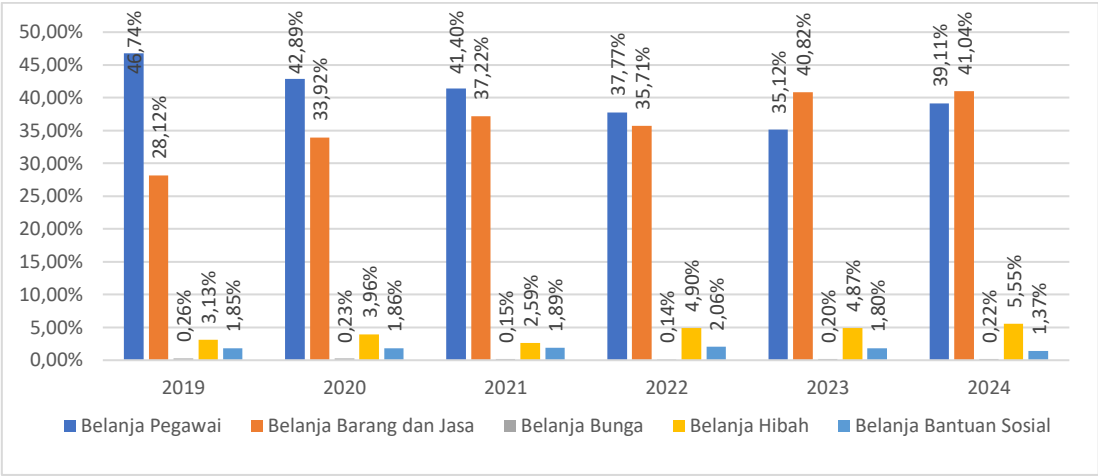
Berikut disampaikan persentase komponen belanja operasi terhadap total belanja operasi pada grafik 3.8 dan persentase komponen belanja operasi terhadap total belanja daerah pada grafik 3.9:

Grafik 3.8
Persentase Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja Operasi Tahun 2019-2024



Sumber: Simral LRA 2025

Grafik 3.9
Persentase Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2019-2024



Sumber: Simral LRA 2025

Pada grafik 3.9 menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena diantaranya terdapat belanja yang cukup besar yakni belanja untuk Non ASN, belanja jasa penyediaan listrik, air, telpon, internet, pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas, belanja barang habis pakai, pembelian suku cadang kendaraan dinas dan belanja barang jasa lainnya.

B. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal antara lain meliputi:

1. Belanja Tanah

Belanja Tanah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Jalan

Belanja Jalan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional.

Berikut realisasi belanja modal selama Tahun 2019-2024 yang mengacu terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan pada tabel 3.14:

Tabel 3.14
Realisasi Komponen Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2019-2024

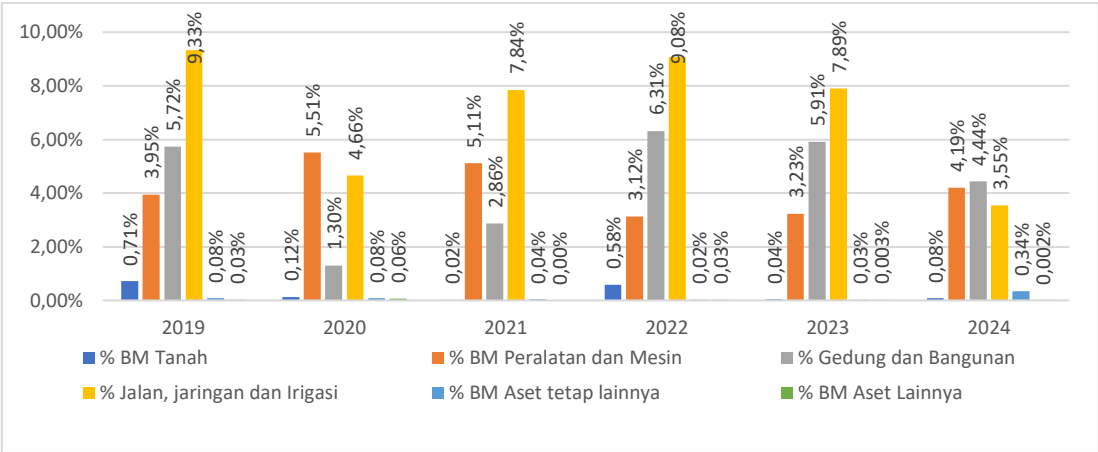
KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
5.2	BELANJA MODAL						
5.2.1	Belanja Modal Tanah	18,044,020,000.00	2,772,077,406.00	456,222,600.00	17,328,944,627.00	1,287,152,960.00	2,477,717,100.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99,754,707,372.00	129,790,481,108.00	134,821,926,424.00	93,283,801,959.00	97,928,993,032.00	133,226,642,367.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144,703,165,317.00	30,694,955,339.00	75,413,812,539.00	188,457,698,905.00	178,951,840,395.00	141,166,601,172.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	235,965,307,071.00	109,784,631,171.00	206,667,544,227.00	271,189,473,185.00	238,985,747,391.00	112,729,496,656.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,910,823,018.00	1,789,184,630.00	1,037,371,248.00	708,136,673.00	911,157,960.00	10,693,173,754.00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	655,385,000.00	1,325,953,375.00	477,772,759.00	998,497,452.00	100,077,000.00	74,355,570.00
TOTAL BELANJA MODAL		501,033,407,778.00	276,157,283,029.00	418,874,649,797.00	571,966,552,801.00	518,164,968,738.00	400,367,986,619.00

Sumber: Simral LRA, 2025

Belanja modal menurun di tahun 2024 dikarenakan menurunnya anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset lainnya.

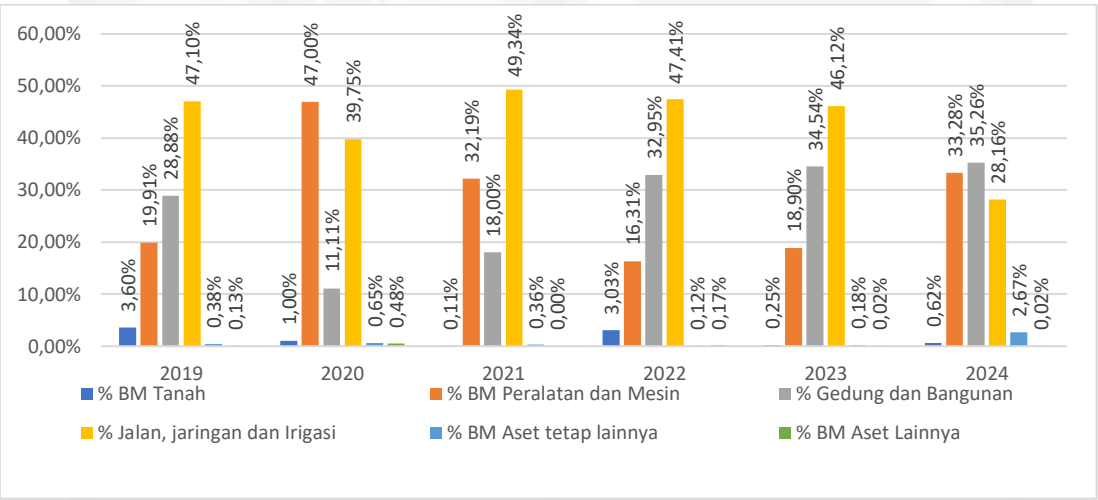
Berikut disampaikan persentase komponen belanja modal terhadap total belanja daerah pada grafik 3.10 dan persentase komponen belanja modal terhadap total belanja modal pada Grafik 3.11, berikut ini:

Grafik 3.10
Persentase Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024



Sumber: Simral LRA 2025

Grafik 3.11
Persentase Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2019-2024

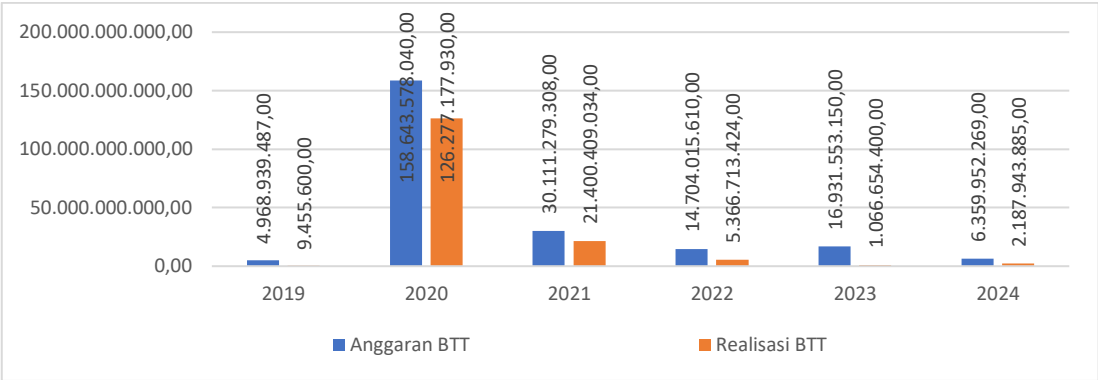


Sumber: Simral LRA 2025

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp.9.455.600,-, pada tahun 2020 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp.126.277.177.930,-, pada tahun 2021 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp.21.400.409.034,-, pada tahun 2022 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp.5.366.713.424,-, tahun 2023 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp.1.066.654.400,- dan tahun 2024 realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp.2.187.943.885,- Berikut gambaran realisasi belanja tidak terduga yang dituangkan pada grafik 3.12.

Grafik 3.12
Total Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Bogor
Tahun 2019-2024



Sumber: Simral LRA 2025

D. Belanja Transfer

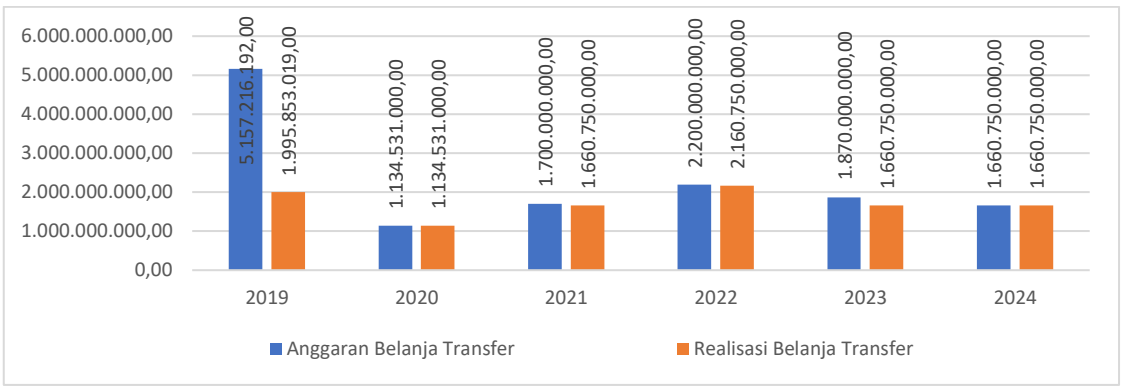
Belanja transfer adalah belanja pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Belanja transfer yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bogor digunakan untuk kepentingan sosial di kawasan tempat pembuangan akhir sampah di Galuga. Pada tahun 2019 realisasi belanja transfer sebesar Rp.1.995.853.019,- pada tahun 2020 realisasi belanja transfer sebesar Rp.1.134.531.000,- pada tahun 2021 realisasi belanja transfer sebesar Rp.1.660.750.000,- pada tahun 2022 realisasi belanja transfer sebesar Rp.2.160.750.000,- pada tahun 2023 realisasi belanja transfer sebesar Rp.1.660.750.000,- dan pada tahun 2024 realisasi belanja transfer sebesar Rp.1.660.750.000,- Berikut gambaran realisasi belanja transfer yang dituangkan pada tabel 3.15 dan realisasi belanja transfer terhadap anggaran belanja transfer pada grafik 3.13:

Tabel 3.15
Realisasi Belanja Transfer Kota Bogor Tahun 2019-2024

KODE	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
54	BELANJA TRANSFER						
5.4.1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1,023,845,129.00	1,134,531,000.00	1,660,750,000.00	2,160,750,000.00	1,660,750,000.00	1,660,750,000.00
5.4.2	Bantuan Keuangan Lainnya	972,007,890.00	0.00	0.00			
TOTAL TRANSFER		1,995,853,019.00	1,134,531,000.00	1,660,750,000.00	2,160,750,000.00	1,660,750,000.00	1,660,750,000.00

Sumber: Simral LRA, 2025

Grafik 3.13
Realisasi Belanja Transfer Terhadap Anggaran Belanja Transfer Kota Bogor
Tahun 2019-2024



Sumber: Simral LRA 2025

Dalam Menyusun Belanja Daerah selain mengalokasikan untuk menunjang prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerahnya masing masing. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, maupun penanaman modal. Urusan Pemerintahan Pilihan dipetakan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, antara lain bidang pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan dan perindustrian.

Undang undang pun memperkenalkan terminologi urusan pemerintahan yang baru, yaitu Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN. Bupati/Wali kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan kewenangannya kepada camat. Adapun yang menjadi Urusan Pemerintahan Umum, meliputi:

- 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sesuai wilayah kerja, dimana Forkopimda kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/wali kota, dengan anggota pimpinan DPRD; pimpinan kepolisian daerah; pimpinan kejaksaan; dan pimpinan satuan teritorial TNI di daerah. Forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan dipimpin oleh camat, dengan anggota pimpinan kepolisian di kecamatan dan pimpinan kewilayahan TNI di kecamatan.

Berikut ini adalah tren realisasi Belanja Daerah dari Tahun 2019-2024 yang dialokasikan untuk setiap urusan pada tabel 3.16:

Tabel 3.16
Alokasi Anggaran Per Urusan Kota Bogor Tahun 2019-2024

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
ALOKASI ANGGARAN PER URUSAN						
Urusan urusan wajib pelayanan dasar	1,532,530,784,052	1,304,066,877,399				
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar			1,658,681,026,130	1,870,500,199,093	1,991,151,542,829	2,020,800,000,000
Urusan urusan wajib bukan pelayanan dasar	308,144,180,404	284,843,485,552				
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			405,489,470,829	479,549,204,522	419,273,230,146	465,703,000,000
Urusan urusan pilihan	31,901,626,211	24,487,211,303				
Urusan pemerintahan pilihan			19,025,209,432	25,028,992,917	21,673,610,592	31,724,163,252
Unsur pendukung urusan pemerintahan			213,158,206,501	242,844,151,310	240,460,748,576	254,580,000,000
Urusan urusan pemerintahan fungsi penunjang	589,194,702,551	741,473,128,728				
Unsur penunjang urusan pemerintahan			142,263,485,763	146,914,101,090	121,541,232,491	126,286,000,000

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Unsur pengawasan urusan pemerintahan			16,647,657,802	18,980,289,880	19,907,585,103	25,789,260,060
Unsur kewilayahan			169,041,868,537	174,995,510,196	160,531,608,416	172,204,000,000
Unsur pemerintahan umum			13,419,645,911	27,541,983,995	54,476,121,956	81,376,125,425
Urusan urusan umum/non urusan	66,729,509,720					
TOTAL	2,528,500,802,938	2,354,870,702,982	2,637,726,570,905	2,986,354,433,003	3,029,015,680,109	3,178,462,548,737

Sumber: Simral LRA, 2025

E. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Selanjutnya gambaran tentang realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Bogor yang menginformasikan kebutuhan belanja aparatur selama tahun 2019-2024. disajikan pada tabel 3.17 dibawah ini:

Tabel 3.17
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bogor Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A BELANJA PEGAWAI							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	474,675,837,587	476,299,627,451	456,499,514,837	456,949,303,955	483,142,741,393	572,966,490,524
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	430,063,148,526	387,234,448,397	307,600,560,540	344,689,616,254	314,944,193,159	393,170,766,177
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			159,178,557,231	149,321,715,538	145,108,326,637	148,571,534,471
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD			41,203,910,676	41,167,712,768	47,497,252,680	47,141,457,844
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH			180,615,830	177,312,422	179,275,989	64,134,616
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	16,066,860,000	17,247,620,000	1,815,120,000	2,041,320,000	2,018,520,000	2,329,008,000
7	Belanja Pegawai BLUD	63,323,315,053	78,436,590,917	125,491,316,546	133,746,243,121	70,764,117,030	78,714,573,275
8	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	25,425,320,280	21,940,471,029				
9	Honorarium PNS	11,859,459,500	1,682,957,500				
10	Honorarium Non PNS	121,851,695,045	6,150,374,618				
11	Uang Lembur	2,350,190,000	1,141,104,000				
12	Belanja Pegawai BOS	36,273,535,838	19,978,647,277				
JUMLAH		1,181,889,361,829	1,010,111,841,189	1,091,969,595,660	1,128,093,224,058	1,063,654,426,888	1,242,957,964,907
B BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Belanja Barang	82,666,691,631	80,412,009,552	142,217,707,109	146,080,004,316	175,422,007,590	237,760,321,885
2	Belanja Jasa	206,075,862,973	367,337,085,563	439,675,316,197	449,890,541,627	423,062,067,821	414,617,730,955
3	Belanja Pemeliharaan	72,629,116,248	60,934,772,960	64,935,041,152	64,032,357,837	129,645,432,722	116,798,066,547
4	Belanja Perjalanan Dinas	98,925,696,726	56,126,654,891	48,948,157,743	79,437,586,151	85,890,101,324	85,268,016,110
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	245,468,226,087	62,481,107,900	36,222,759,778	39,066,286,779	56,273,712,418	46,269,973,715
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	842,198,250	55,969,546,386	75,434,258,712	79,728,949,884	81,091,691,202	75,033,649,408
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0	0	0	0	0	16,531,191,292

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4,493,630,900	115,580,403,398	174,238,143,722	208,317,678,508	285,072,264,872	311,886,037,328
JUMLAH		711,101,422,815	798,841,580,650	981,671,384,413	1,066,553,405,102	1,236,457,277,949	1,304,164,987,240
C BELANJA MODAL							
1	Belanja Tanah	18,044,020,000	2,772,077,406	456,222,600	17,328,944,627	1,287,152,960	2,477,717,100
2	Belanja Peralatan dan Mesin	99,754,707,372	129,790,481,108	134,821,926,424	93,283,801,959	97,928,993,032	133,226,642,367
3	Belanja Gedung dan Bangunan	144,703,165,317	30,694,955,339	75,413,812,539	188,457,698,905	178,951,840,395	141,166,601,172
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	235,965,307,071	109,784,631,171	206,667,544,227	271,189,473,185	238,985,747,391	112,729,496,656
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,910,823,018	1,789,184,630	1,037,371,248	708,136,673	911,157,960	10,693,173,754
6	Belanja Modal Aset Lainnya	655,385,000	1,325,953,375	477,772,759	998,497,452	100,077,000	74,355,570
JUMLAH		501,033,407,778	276,157,283,029	418,874,649,797	571,966,552,801	518,164,968,738	400,367,986,619
TOTAL		2,394,024,192,422	2,085,110,704,868	2,492,515,629,870	2,766,613,181,961	2,818,276,673,575	2,947,490,938,766

Sumber: Simral LRA, 2025

F. Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Pembiayaan Tahun 2019-2024

Gambaran tentang pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Bogor yang menginformasikan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2019-2024. disajikan pada tabel 3.18 di bawah ini:

Tabel 3.18
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A BELANJA PEGAWAI							
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	474,675,837,587	476,299,627,451	456,499,514,837	456,949,303,955	483,142,741,393	572,966,490,524
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	430,063,148,526	387,234,448,397	307,600,560,540	344,689,616,254	314,944,193,159	393,170,766,177
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			159,178,557,231	149,321,715,538	145,108,326,637	148,571,534,471
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD			41,203,910,676	41,167,712,768	47,497,252,680	47,141,457,844
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH			180,615,830	177,312,422	179,275,989	64,134,616
6	Belanja Penerimaan Lainnnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	16,066,860,000	17,247,620,000	1,815,120,000	2,041,320,000	2,018,520,000	2,329,008,000
7	Belanja Pegawai BLUD	63,323,315,053	78,436,590,917	125,491,316,546	133,746,243,121	70,764,117,030	78,714,573,275
8	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	25,425,320,280	21,940,471,029				
9	Honorarium PNS	11,859,459,500	1,682,957,500				
10	Honorarium Non PNS	121,851,695,045	6,150,374,618				
11	Uang Lembur	2,350,190,000	1,141,104,000				
12	Belanja Pegawai BOS	36,273,535,838	19,978,647,277				
JUMLAH		1,181,889,361,829	1,010,111,841,189	1,091,969,595,660	1,128,093,224,058	1,063,654,426,888	1,242,957,964,907
B PENGELUARAN PEMBIAYAAN							
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	16,000,000,000	24,300,000,000	-	4,394,083,430		
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	139,495,608,833	56,245,341,402				
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					71,336,251,300	
4	Pembentukan Dana Cadangan			135,617,812,976	5,484,766,176	5,484,766,176	132,184,766,176
JUMLAH		155,495,608,833	80,545,341,402	135,617,812,976	9,878,849,606	76,821,017,476	132,184,766,176
TOTAL (A+B)		1,337,384,970,662	1,090,657,182,591	1,227,587,408,636	1,137,972,073,664	1,140,475,444,364	1,375,142,731,083

Sumber: Simral LRA, 2025

3.2.1.3. Neraca Daerah

Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Di sisi neraca daerah, total aset Pemerintah Kota Bogor yang tercatat pada tahun 2019 sebesar Rp.8.450.865.944.760,55,- pada tahun 2020 total aset Pemerintah Kota Bogor mencapai Rp.9.203.864.257.664,83,- pada tahun 2021 total aset Pemerintah Kota Bogor mencapai Rp.9.913.070.916.181,37,- pada tahun 2022 total aset Pemerintah Kota Bogor mencapai Rp.10.316.556.025.616,50,- pada tahun 2023 sebesar Rp.10.792.438.087.151,- serta pada tahun 2024 sebesar Rp.11.042.144.290.257,70. Apabila melihat dari data tersebut rata rata pertumbuhan aset Pemerintah Kota Bogor mencapai 5,68 persen. Dalam komponen aset tetap kenaikan yang paling dominan ada pada komponen Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mengalami peningkatan rata rata sebesar 11,38 persen. Berikut ini adalah perkembangan kondisi neraca daerah dalam kurun waktu 2019-2024 yang tergambar dalam tabel 3.19:

Tabel 3.19
Kondisi Neraca Daerah Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET						
11	ASET LANCAR						
1101	Kas dan Setara Kas	277,944,006,959.19	327,762,756,815.31	365,047,806,990.42	161,607,780,851.34	53,955,641,102.14	83,616,865,127.38
1110101	Kas di Kas Daerah	256,115,222,198.00	305,390,350,678.00	299,917,646,333.00	130,401,482,495.00	33,520,359,707.00	79,503,327,898.00
1110102	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-		922,000.00	0.00
1110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	153,905,685.00	2,200,525.00	0.00		1,810,000.00	0.00
1110104	Kas di BLUD	8,107,669,667.19	8,109,372,432.31	58,709,937,450.42	29,011,343,370.34	17,674,780,233.14	2,153,130,596.38
1110105	Kas di Bendahara FKTP	9,337,552,993.00	8,356,906,451.00	0.00			
1110106	Kas Lainnya	0.00	25,000.00	0.00	204,120,800.00	1,108,045,406.00	1,012,808,839
1110107	Kas Dana Bos	4,229,656,416.00	5,903,901,729.00	6,420,223,207.00	1,990,834,186.00	1,649,723,756.00	947,597,794
1110108	Setara Kas	-	-	-			-
	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
110	Piutang Pendapatan:	454,435,483,328.82	520,862,986,236	660,421,877,975	649,127,643,510.86	750,326,016,471.70	896,477,454,131.70
1103	Piutang Pajak Daerah					520,712,992,274.00	617,775,532,829.00
1104	Piutang Retribusi Daerah					5,848,053,235.00	84,392,660,913.70
1105	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan					4,961,512,690.00	4,510,852,544.00

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1106	Piutang Lain-lain PAD yang sah					207,821,455,185.70	177,064,672,727.00
1107	Piutang Transfer Pemerintah Pusat					0.00	0.00
1108	Piutang Transfer Antar Daerah					10,982,003,087.00	12,733,735,118.00
1109	Piutang Lainnya	150,777,331,093.38	127,973,208,139	76,051,221,804	70,566,455,628.00	65,081,689,452.00	59,596,923,188.00
1110	Penyisihan Piutang	(197,644,133,020.74)	(239,164,821,612)	(246,794,451,502.85)	(279,787,959,764.01)	-327,357,002,657.22	-389,964,184,114.24
1111	Beban Dibayar Dimuka	844,904,499.12	857,645,340	557,238,076.72	281,653,702.54	515,022,118.72	505,228,167.24
1112	Persediaan	32,596,243,908.48	44,188,378,065	44,896,845,500	42,886,362,633.34	59,870,448,656.74	49,525,803,484.97
JUMLAH ASET LANCAR		718,953,836,768.25	782,480,152,983.31	900,180,538,843.03	644,681,936,562.07	602,391,815,144.08	699,758,089,985.05
12	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1201	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	63,742,100	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1210101	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara	-	-	-	-	-	-
1210102	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-	-	-	-
1210103	Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-	-
1210104	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
1210105	Dana Bergulir	63,742,100	63,742,100	63,742,100	63,742,100	63,742,100.00	51,753,390.00
1210106	Penyisihan Dana Bergulir		-63,742,100.00	(63,742,100)	(63,742,100)	-63,742,100.00	-51,753,390.00

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
122	Investasi Jangka Panjang Permanen	523,642,733,332.61	547,890,119,989	0	831,636,916,668.80	835,123,845,482.75	841,185,696,214.04
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	523,642,733,332.61	547,890,119,989	547,014,085,809.35	831,636,916,668.80	835,123,845,482.75	1,002,293,416,444.24
12202	Investasi Permanen Lainnya	-	-				
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		523,706,475,432.61	547,890,119,989	547,014,085,809.35	831,636,916,668.80	835,123,845,482.75	841,185,696,214.04
13	ASET TETAP						
1301	Tanah	4,767,414,421,962.63	4,977,048,911,208.63	5,517,251,620,522.63	5,675,827,547,827.63	5,938,980,428,024.63	5,796,161,596,908.69
1302	Peralatan dan Mesin	743,613,685,335.72	878,774,080,882	968,486,651,160.86	1,041,697,508,364.03	1,136,877,015,590.06	1,256,136,708,584.89
1303	Gedung dan Bangunan	1,206,807,131,742.41	1,233,596,418,612.15	1,258,734,833,812.17	1,357,632,385,067.17	1,582,373,719,962.85	1,888,200,567,932.12
1304	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2,124,872,812,527.01	2,734,857,301,296.41	2,943,360,774,448.42	3,204,080,524,732.92	3,483,468,228,932.92	3,588,464,657,486.93
1305	Aset Tetap Lainnya	9,905,925,846.82	10,771,560,023.70	8,810,740,200.87	10,425,280,533.84	11,314,989,293.84	15,088,820,384.99
1306	Konstruksi dalam Pengerjaan	57,861,964,006.16	58,350,074,015.93	142,128,833,375.25	256,117,091,612.52	224,422,793,771.34	15,583,780,825.00
1307	Akumulasi Penyusutan	(1,817,462,723,225.40)	(2,135,442,627,196)	(2,444,000,342,178.11)	(2,788,162,647,260.66)	-3,162,527,131,333.85	-3,521,544,006,794.74
JUMLAH ASET TETAP		7,093,013,218,195.35	7,757,955,718,842.85	8,394,773,111,342.09	8,757,617,690,877.45	9,214,910,044,241.79	9,038,092,125,327.88
14	DANA CADANGAN						
1401	Dana Cadangan					46,125,787,358.00	8,398,684,760.00
JUMLAH DANA CADANGAN						46,125,787,358.00	8,398,684,760.00
15	ASET LAINNYA						
1501	Tagihan Jangka Panjang	3,266,687,864	3,271,317,337	3,254,915,012	3,241,564,412	0.00	0

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1502	Tagihan Penjualan Angsuran					873,259,125.00	770,678,122.00
1503	Tuntutan Ganti Rugi					334,362,178.57	351,103,844.90
1504	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	52,526,184,310	52,526,184,310	11,014,184,310	11,014,184,310	11,014,184,310.00	11,014,184,310.00
1505	Aset Tak Berwujud	13,345,818,781.80	14,765,690,156.80	15,209,471,381.80	16,120,188,183.80	16,945,217,083.80	16,970,742,403.80
1506	Aset Lain-lain	175,679,958,444.04	176,686,747,836.78	170,118,925,126.05	189,420,063,755.95	199,888,450,262.74	187,940,474,139.24
1507	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-12,013,269,674.60	-13,057,680,075.53	(14,010,403,525.57)	(14,857,922,126.05)	-16,066,792,926.55	-16,493,115,025.80
1508	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-117,612,965,360.89	(118,653,993,715.38)	(114,483,912,117.38)	(134,718,785,714.59)	-142,870,965,109.14	-131,320,042,007.03
1509	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)				12,400,188,687.00	23,768,880,000.00	7,169,764,000.00
JUMLAH ASET LAINNYA		115,192,414,364.35	115,538,265,849.67	71,103,180,186.90	82,619,481,508.11	93,886,594,924.42	76,403,789,787.11
JUMLAH ASET		8,450,865,944,760.56	9,203,864,257,664.83	8,465,876,291,529	10,316,556,025,616.40	10,792,438,087,151.00	10,903,524,460,966.10
2	KEWAJIBAN						
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	268,757,122	258,325,090	45,871,292	249,302,783	260,050,896.00	158,277,901.00
2102	Utang Bunga	155,902,381	0	0			543,668,056.00
2103	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5,484,766,176.84	5,484,766,176	5,484,766,176	6,284,285,132	10,281,879,912.00	10,281,879,912.00
2104	Pendapatan Diterima Dimuka	1,705,986,062.69	1,350,712,398	940,091,752.45	278,229,328.39	413,113,467.07	2,569,064,213.13
2105	Utang Belanja	8,176,671,331	31,041,506,440	64,449,665,375	52,449,022,792.09	95,418,767,474.00	96,531,896,093.66

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2106	Utang Jangka Pendek Lainnya	32,113,634,366	2,231,465,191	63,032,752		900,000.00	6,666,000.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		47,905,717,439.53	40,366,775,295.00	70,983,427,347.45	59,260,840,035.48	106,374,711,749.07	110,091,452,175.79
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri:	71,301,960,298.90	65,817,194,123	90,737,842,698	82,830,822,901	72,948,702,467.00	62,666,822,555.00
2201	Utang Kepada Pemerintah Pusat					49,362,895,595.00	43,878,129,419.00
2202	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)					23,585,806,872.00	18,788,693,136.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		71,301,960,299	65,817,194,123	90,737,842,698	82,830,822,901	72,948,702,467.00	62,666,822,555.00
JUMLAH KEWAJIBAN		119,207,677,738.43	106,183,969,418	161,721,270,045.45	142,091,662,936.48	179,323,414,216.07	172,758,274,730.79
3	EKUITAS						
311	Ekuitas	8,331,658,267,022.12	9,097,680,288,246.83	9,751,349,646,135.92	10,174,464,362,680.00	10,613,114,672,934.90	10,869,386,015,526.90
JUMLAH EKUITAS		8,331,658,267,022.12	9,097,680,288,247	9,751,349,646,135.92	10,174,464,362,680.0	10,613,114,672,934.90	10,869,386,015,526.90
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		8,450,865,944,760.55	9,203,864,257,664.83	9,913,070,916,181.37	10,316,556,025,616.50	10,792,438,087,151.00	11,042,144,290,257.70

Sumber: Simral LRA, 2025

3.2.1.4. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pinjaman dari pemerintah pusat.

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan, realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya. Berikut ini adalah perkembangan penutup defisit riil anggaran daerah dalam kurun waktu 2019-2024 yang tergambar dalam tabel 3.20:

Tabel 3.20
Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bogor Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2,559,857,20 7,793.86	2,428,579,503 ,649.12	2,644,780,935,7 77.11	2,787,105,0 58,802.92	2,967,475,5 70,539.80	3,170,497,6 28,555.24
Dikurangi realisasi :							
2	Belanja Daerah	2,528,500,80 2,938.19	2,354,870,702 ,982.00	2,637,726,570,9 05	2,986,354,4 33,003	3,029,015,6 80,109	3,178,466,7 34,133
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	155,495,608, 833.00	80,545,341,40 2.00	135,617,812,976	9,878,849,6 06	76,821,017, 476	132,184,766 ,176
A	Defisit riil	(124,139,203 ,977.33)	(6,836,540,73 4.88)	(128,563,448,1 03.89)	(209,128,22 3,806.08)	(138,361,12 7,045.20)	(140,153,87 1,753.76)
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:							
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	256,564,582, 703.52	277,640,687,0 80.19	327,542,156,075 .31	365,001,935 ,698.42	161,360,978 ,068.34	54,255,954, 664.14
5	Pencairan Dana Cadangan	-				25,765,828, 400.00	38,648,742, 600.00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					-	
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	139,752,780, 949.00	32,159,096,03 2.00	160,538,461,551 .00			126,700,000 ,000.00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5,484,766,17 8.00	5,484,766,176 .00	5,484,766,176.0 0	5,484,766,1 76.00	5,484,766,1 76.00	5,484,766,1 76.00
9	Penerimaan Piutang Daerah		19,053,167,68 7.00				
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	401,802,129, 830.52	334,337,716, 975.19	493,565,383,80 2.31	370,486,70 1,874.42	192,611,57 2,644.34	225,089,46 3,440.14
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	277,662,925, 853.19	327,501,176, 240.31	365,001,935,69 8.42	161,358,47 8,068.34	54,250,445, 599.14	84,935,591, 686.38

Sumber : Simral LRA, 2025

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang terdiri atas pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Realisasi penerimaan pembiayaan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019 penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.401.802.129.830,- pada tahun 2020 penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.334.337.716.975,19,- pada tahun 2021 realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.493.565.383.802,31,- pada tahun 2022 realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.370.486.701.874,42,- pada tahun 2023 realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.192.611.572.644,34,- besaran realisasi penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp.161.360.978.068,34,- pencairan dana cadangan untuk Pilkada sebesar Rp.25.765.828.400,- penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.5.484.766.176,- dan pada tahun 2024 realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp.225.089.463.440,14,- besaran realisasi penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp.54.255.954.664,14,- pencairan dana cadangan untuk Pilkada sebesar Rp.38.648.742.600,- penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.126.700.000.000,- penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.5.484.766.176,-. Berikut disampaikan data penerimaan pembiayaan daerah pada tabel 3.21:

Tabel 3.21
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	401,802,129,830.52	334,337,716,975.19	493,565,383,802.31	370,486,701,874.42	192,611,572,644.34	225,089,463,440.14
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	256,564,582,704	277,640,687,080.19	327,542,156,075.31	365,001,935,698.42	161,360,978,068.34	54,255,954,664.14
1.2	Pencairan Dana Cadangan					25,765,828,400.00	38,648,742,600.00
1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah	139,752,780,949	32,159,096,032.00	160,538,461,551.00		-	126,700,000,000.00
1.4	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5,484,766,178	5,484,766,176.00	5,484,766,176.00	5,484,766,176.00	5,484,766,176.00	5,484,766,176.00
1.5	Penerimaan Piutang Daerah		19,053,167,687.00			-	-
1.6	Pelampauan Penerimaan dan Penghematan Belanja						

Sumber : Simral LRA 2025

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD, pembayaran pinjaman daerah serta pembentukan Dana Cadangan. Pada tahun 2019 realisasi pengeluaran pembiayaan daerah adalah Rp.155.495.608.833,- pada tahun 2020 realisasi pengeluaran pembiayaan daerah adalah Rp.80.545.341.402,- pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp.135.617.812.976,- Naiknya pembiayaan daerah dikarenakan adanya pinjaman/loan ke PT. SMI sebagai upaya pemerintah dalam menjalankan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai bentuk percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid 19. Pada tahun 2022 realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.9.878.849.606,- pada tahun 2023 sebesar Rp.76.821.017.476,- dengan rincian pengeluaran pembiayaan yakni pembentukan Dana Cadangan untuk Pilkada serentak sebesar Rp.71.336.251.300,- dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp.5.484.766.176,- pada tahun 2024 sebesar Rp.132.184.766.176,- dengan rincian pengeluaran pembiayaan yakni Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp.126.700.000.000,- dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp.5.484.766.176,-. Seperti tergambar dalam pengeluaran pembiayaan daerah pada tabel 3.22 sebagai berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	155,495,608,833.00	80,545,341,402.00	135,617,812,976.00	9,878,849,606.00	76,821,017,476.00	132,184,766,176.00
2.1	Pembentukan Dana Cadangan					71,336,251,300.00	
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16,000,000,000.00	24,300,000,000.00		4,394,083,430.00		
2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo (Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri)	139,495,608,833.00	56,245,341,402.00	135,617,812,976.00	5,484,766,176.00	5,484,766,176.00	5,484,766,176.00
2.4	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank						126,700,000,000.00

Sumber: Simral LRA 2025

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Struktur Anggaran pada Tahun 2026 sesuai yang tertuang pada Peraturan Pemerintah nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 27 ayat 1 bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- 1. Pendapatan Daerah;
- 2. Belanja Daerah, dan;
- 3. Pembiayaan Daerah.

3.2.2.1. Rencana Pendapatan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berikut disampaikan pendapatan daerah Kota Bogor pada tabel 3.23:

Tabel 3.23
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2024 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2026

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,075,240,926,213.11	1,147,623,045,708.92	1,338,618,268,168.80	1,458,619,452,757.24	1,654,518,679,231.40	1,730,081,966,730.00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	624,784,886,145.00	744,960,592,537.00	897,753,380,910.00	973,768,860,850.00	1,222,320,064,120.40	1,275,915,308,819.00
4.1.02	Retribusi Daerah	36,033,010,539.00	23,942,828,414.00	31,081,390,548.00	417,445,452,990.24	383,413,215,500.00	403,348,220,579.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	32,420,552,150.00	32,170,048,280.00	33,960,776,435.00	34,287,163,763.00	38,044,022,766.00	40,078,356,377.00
4.1.04	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	382,002,477,379.11	346,549,576,477.92	375,822,720,275.80	33,117,975,154.00	10,741,376,845.00	10,740,080,955.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,463,000,794,326.00	1,639,426,533,844.00	1,628,857,302,371.00	1,711,878,175,798.00	1,268,774,129,569.00	1,268,774,129,569.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,127,139,550,566.00	1,249,992,463,277.00	1,249,655,329,523.00	1,369,427,755,442.00	1,138,956,711,000.00	1,138,956,711,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	335,861,243,760.00	389,434,070,567.00	379,201,972,848.00	342,450,420,356.00	129,817,418,569.00	129,817,418,569.00
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	106,539,215,238.00	55,479,250.00				
4.3.1	Hibah	106,324,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	214,511,238.00	55,479,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	2,644,780,935,777.11	2,787,105,058,802.92	2,967,475,570,539.80	3,170,497,628,555.24	2,923,292,808,800.40	2,998,856,096,299.00

Sumber: Diolah Bapperida, Simral, SIPD RI, 2025

Dalam menentukan rencana pendapatan daerah perlu dilakukan analisis agar terukur secara logis, karena hal tersebut akan dijadikan dasar kemampuan keuangan daerah dalam merencanakan belanja daerah untuk mendukung capaian prioritas

pembangunan daerah. Berikut penjelasan komponen yang tertuang dalam pendapatan daerah yang terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Melihat pada realisasi rata rata pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2020-2024 sebesar 8,30 persen. Maka rencana pendapatan asli daerah Kota Bogor untuk tahun 2026 apabila disandingkan dengan rencana pendapatan asli daerah dalam proyeksi keuangan daerah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029 terdapat penurunan sebesar Rp. 6.921.328.197,60. Rencana pendapatan asli daerah pada Tahun 2026 dihitung dengan asumsi dan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing- masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Proyeksi pendapatan asli daerah diasumsikan naik pada komponen pajak daerah seperti PBB, BPHTB, pajak hotel, pajak makanan dan minuman (restoran), pajak hiburan, serta penambahan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB sebagai dampak dari adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk peningkatan retribusi daerah dilakukan dengan cara optimalisasi target pendapatan, sedangkan untuk peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilaksanakan dengan cara optimalisasi target pendapatan BUMD/Perumda.

Berikut gambaran struktur pendapatan asli daerah yang dituangkan pada tabel 3.24.

Tabel 3.24
Rencana Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2026

KODE	URAIAN	RPJMD TAHUN 2026	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	1,215,681,246,495.00	1,222,320,064,120.40	1,275,915,308,819.00
4.1.02	Retribusi Daerah	396,974,657,213.00	383,413,215,500.00	403,348,220,579.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	38,044,022,766.00	38,044,022,766.00	40,078,356,377.00
4.1.04	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10,740,080,955.00	10,741,376,845.00	10,740,080,955.00
		1,661,440,007,429.00	1,654,518,679,231.40	1,730,081,966,730.00

Sumber : Diolah Bapperida, Rancangan RPJMD 2025-2029 dan SIPD-RI, 2025

Berikut disampaikan Rencana Pendapatan DBH Pajak Daerah Provinsi untuk Kota Bogor Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Pendapatan Opsen Tahun Anggaran 2026, dalam tabel 3.25:

Tabel 3.25
Rencana Pendapatan DBH Pajak Daerah Kota Bogor Tahun 2026

NO.	KOTA	PBBKB	PAP	PAJAK ROKOK	TOTAL DANA BAGI HASIL
1	KOTA BOGOR	71.096.651.357	275.117.136	64.765.634.148	136.137.402.641

Sumber : Bapenda Kota Bogor, 2025

Rencana Anggaran Opsen Kota Bogor Tahun Anggaran 2026, dituangkan dalam tabel 3.26 sebagai berikut:

Tabel 3.26
Rencana Pendapatan Opsen Kota Bogor Tahun Anggaran 2026

NO.	KOTA	OPSEN PKB	OPSEN BBNKB	TOTAL OPSEN
1	KOTA BOGOR	165.826.264.899	82.622.618.342	248.448.883.241

Sumber : Bapenda Kota Bogor, 2025

- b. Pendapatan transfer, yang meliputi transfer pemerintah pusat berupa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, insentif fiskal, dana bagi hasil serta transfer antar daerah berupa pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Melihat pada realisasi rata rata penerimaan pendapatan transfer dari tahun 2019-2024 sebesar 3,42 persen, maka rencana penerimaan pendapatan transfer Kota Bogor untuk tahun 2026 apabila dibandingkan dengan rencana penerimaan pendapatan transfer dalam proyeksi keuangan daerah Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029 tidak terdapat perubahan. Rencana pendapatan transfer pada Tahun 2026 dihitung dengan asumsi atas penerimaan pendapatan transfer tahun 2025 diluar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH) dan Bantuan Keuangan Provinsi seperti yang digambarkan pada tabel 3.27 berikut ini:

Tabel 3.27
Rencana Pendapatan Transfer Kota Bogor Tahun 2026

KODE	URAIAN	RPJMD TAHUN 2026	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
4.2	PENDAPATAN TRANSFER			
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,138,956,711,000.00	1,138,956,711,000.00	1,138,956,711,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129,817,418,569.00	129,817,418,569.00	129,817,418,569.00
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER		1,268,774,129,569.00	1,268,774,129,569.00	1,268,774,129,569.00

Sumber: Diolah Bapperida, Rancangan RPJMD 2025-2029 dan SIPD-RI, 2025

3.2.2.2. Rencana Belanja Daerah Tahun 2026

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Bogor. Berikut disampaikan belanja daerah Kota Bogor pada tabel 3.28:

Tabel 3.28
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021-2024 dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2026

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
5	BELANJA DAERAH						
5.1	BELANJA OPERASI	2,195,790,762, 074.00	2,406,860,416, 778.00	2,508,123,306, 971.00	2,774,250,053, 629.00	3,002,006,685, 211.81	2,754,926,25 2,331.00
5.1.1	Belanja Pegawai	1,091,969,595,6 60.00	1,128,093,224,0 58.00	1,063,654,426,8 88.00	1,242,957,964,9 07.00	1,314,364,657,7 85.00	1,339,776,719, 374.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	981,671,384,413 .00	1,066,553,405,1 02.00	1,236,457,277,9 49.00	1,304,164,987,2 40.00	1,433,508,552,5 53.81	1,292,761,571, 833.00
5.1.3	Belanja Bunga	4,047,853,424.0 0	4,282,366,790.0 0	6,191,682,700.0 0	7,027,746,595.0 0	9,500,000,000.0 0	7,000,000,000. 00
5.1.5	Belanja Hibah	68,284,278,577. 00	146,302,919,328 .00	147,381,004,434 .00	176,519,335,387 .00	205,977,195,873 .00	83,529,244,49 0.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	49,817,650,000. 00	61,628,501,500. 00	54,438,915,000. 00	43,580,019,500. 00	38,656,279,000. 00	31,858,716,63 4.00
5.2	BELANJA MODAL	418,874,649,79 7.00	571,966,552,80 1.00	518,164,968,73 8.00	400,367,986,61 9.00	324,752,006,61 6.38	265,612,244, 049.00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	456,222,600.00	17,328,944,627. 00	1,287,152,960.0 0	2,477,717,100.0 0	20,037,106,029. 00	18,169,279,77 1.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134,821,926,424 .00	93,283,801,959. 00	97,928,993,032. 00	133,226,642,367 .00	74,156,304,448. 00	54,532,719,30 5.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75,413,812,539. 00	188,457,698,905 .00	178,951,840,395 .00	141,166,601,172 .00	135,248,298,925 .38	125,153,386,1 80.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	206,667,544,227 .00	271,189,473,185 .00	238,985,747,391 .00	112,729,496,656 .00	94,945,440,014. 00	67,382,788,59 2.00
5.2.5	Belanja Modal Aset	1,037,371,248.0 0	708,136,673.00	911,157,960.00	10,693,173,754. 00	267,184,000.00	270,234,744.0 0

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
	Tetap Lainnya						
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	477,772,759.00	998,497,452.00	100,077,000.00	74,355,570.00	97,673,200.00	103,835,457.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	21,400,409,034.00	5,366,713,424.00	1,066,654,400.00	2,187,943,885.00	31,647,508,042.00	30,000,000,000.00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	21,400,409,034.00	5,366,713,424.00	1,066,654,400.00	2,187,943,885.00	31,647,508,042.00	30,000,000,000.00
6	BELANJA TRANSFER	1,660,750,000.00	2,160,750,000.00	1,660,750,000.00	1,660,750,000.00	1,711,375,000.00	1,711,375,000.00
6.2	Belanja Bantuan Keuangan	1,660,750,000.00	2,160,750,000.00	1,660,750,000.00	1,660,750,000.00	1,711,375,000.00	1,711,375,000.00
TOTAL BELANJA DAERAH		2,637,726,570,905.00	2,986,354,433,003.00	3,029,015,680,109.00	3,178,466,734,133.00	3,360,117,574,870.19	3,052,249,871,380.00

Sumber : Diolah Bapperida, Rancangan RPJMD 2025-2029 dan SIPD-RI, 2025

Persentase Anggaran Mandatory Spending yang direncanakan untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29
Persentase Rencana Anggaran Mandatory Spending Tahun 2026

NO.	URAIAN	PERSENTASE
1	PENINGKATAN KAPABILITAS APIP	0,11
2	KEWILAYAHAN	5,83
3	PENINGKATAN KOMPETENSI ASN	0,08
4	KESEHATAN	19,12
5	INFRASTRUKTUR	40,16
6	PENDIDIKAN	17,93

Sumber : Diolah Bapperida, SIPD-RI, 2025

Anggaran Belanja Opsen yang direncanakan untuk Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30
Rencana Anggaran Belanja Opsen PKB/BBNKB Tahun 2026

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
			DPUPR
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	
2	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	
3	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	

4	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	
5	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	
6	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	
7	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	
8	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	
			DISHUB
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	
10			
11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	
12	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	
13	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	
14			
15	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	
16	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	
17			
18			
			DISPERUMKIM
19	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	
20	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	
21	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Sementara, belanja untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, dan belanja untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Berikut penjelasan komponen yang tertuang dalam belanja daerah yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi
- Merupakan pengeluaran anggaran dalam mendukung kegiatan sehari-hari pemerintah daerah dalam mendukung tercapainya target kinerja. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Berikut rencana belanja operasi tahun 2026 yang disandingkan dengan proyeksi keuangan daerah dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029 pada tabel 3.31.

Tabel 3.31
Rencana Belanja Operasi Kota Bogor Tahun 2026

KODE	URAIAN	RPJMD TAHUN 2026	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1,313,506,587,622.00	1,314,364,657,785.00	1,339,776,719,374.00

5.1.02	Belanja barang dan jasa	1,267,413,305,719.00	1,433,508,552,553.81	1,292,761,571,833.00
5.1.03	Belanja Bunga	7,000,000,000.00	9,500,000,000.00	7,000,000,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	81,891,416,166.00	205,977,195,873.00	83,529,244,490.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31,234,035,916.00	38,656,279,000.00	31,858,716,634.00
		2,701,045,345,423.00	3,002,006,685,211.81	2,754,926,252,331.00

Sumber: Diolah Bapperida, Rancangan RPJMD 2025-2029 dan SIPD-RI, 2025

b. Belanja Modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya serta aset lainnya. Apabila melihat pada tabel 3. total belanja modal yang direncanakan pada 2026 disandingkan dengan proyeksi keuangan daerah dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029 terdapat kenaikan sebesar Rp. 64.347.845.784,38, hal tersebut disebabkan karena kenaikan dari komponen belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Berikut terlampir rencana belanja modal tahun 2026 pada tabel 3.32:

Tabel 3.32
Rencana Belanja Modal Kota Bogor Tahun 2026

KODE	URAIAN	RPJMD TAHUN 2026	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17,813,019,383.00	20,037,106,029.00	18,169,279,771.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53,463,450,299.00	74,156,304,448.00	54,532,719,305.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122,699,398,215.00	135,248,298,925.38	125,153,386,180.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66,061,557,443.00	94,945,440,014.00	67,382,788,592.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	264,936,024.00	267,184,000.00	270,234,744.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	101,799,468.00	97,673,200.00	103,835,457.00
		260,404,160,832.00	324,752,006,616.38	265,612,244,049.00

Sumber: Diolah Bapperida, Rancangan RPJMD 2025-2029 dan SIPD-RI, 2025

c. Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Berikut rencana belanja tidak terduga tahun 2026 yang disandingkan dengan proyeksi keuangan daerah dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029 terdapat kenaikan sebesar Rp.1.647.508.042,- mengantisipasi kebutuhan belanja kaitan kebencanaan, dituangkan pada tabel 3.33:

Tabel 3.33
Rencana Belanja Tidak Terduga Kota Bogor Tahun 2026

KODE	URAIAN	RPJMD TAHUN 2026	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
5	BELANJA DAERAH			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	31.647.508.042,00	30.000.000.000,00
		30.000.000.000,00	31.647.508.042,00	30.000.000.000,00

Sumber : Diolah Bapperida, Rancangan RPJMD 2025-2029 dan SIPD-RI, 2025

d. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, pemanfaatan belanja transfer Kota Bogor tahun 2026 untuk kepentingan sosial disekitar wilayah tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Galuga. Berikut rencana belanja transfer Tahun 2026 yang disandingkan dengan proyeksi keuangan daerah dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029 pada tabel 3.34.

Tabel 3.34
Rencana Belanja Transfer Kota Bogor Tahun 2026

KODE	URAIAN	RPJMD TAHUN 2026	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1,711,375,000.00	1,711,375,000.00	1,711,375,000.00
		1.711.375.000,00	1.711.375.000,00	1.711.375.000,00

Sumber : Diolah Bapperida, Rancangan RPJMD 2025-2029 dan SIPD-RI, 2025

3.2.2.3. Rencana Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Berikut disampaikan pembiayaan Kota Bogor pada tabel 3.35:

Tabel 3.35
Realisasi Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2021-2024 dan Rencana Pembiayaan Tahun 2026

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	493,565,383, 802.31	370,486,701, 874.42	192,611,572, 644.34	225,089,463, 440.14	61,497,032,2 60.00	35,497,032, 260.00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	327,542,156,0 75.31	365,001,935,6 98.42	161,360,978,0 68.34	54,255,954,66 4.14	30,000,000,0 00.00	30,000,000,0 00.00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan			25,765,828,40 0.00	38,648,742,60 0.00	26,000,000,0 00.00	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	160,538,461,5 51.00			126,700,000,0 00.00	0.00	
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5,484,766,176. 00	5,484,766,176 .00	5,484,766,176 .00	5,484,766,176 .00	5,497,032,26 0.00	5,497,032,26 0.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	135,617,812, 976.00	9,878,849,60 6.00	76,821,017,4 76.00	132,184,766, 176.00	10,294,145,9 96.00	25,294,145, 996.00
6.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	135,617,812,9 76.00	5,484,766,176 .00	5,484,766,176 .00	5,484,766,176 .00	10,294,145,9 96.00	10,294,145,9 96.00
	Pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank				126,700,000,0 00.00		
6.2.2	Penyertaan modal daerah		4,394,083,430 .00	0.00	0.00	0.00	15,000,000,0 00.00
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan			71,336,251,30 0.00	0.00	0.00	
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya			0.00	0.00	0.00	0.00
PEMBIAYAAN NETTO		357,947,570, 826.31	360,607,852, 268.42	115,790,555, 168.34	92,904,697,2 64.14	51,202,886,2 64.00	10,202,886, 264.00

Sumber: Diolah Bapperida, Rancangan RPJMD 2025-2029 dan SIPD-RI, 2025

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan, yaitu berupa SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengeluaran pembiayaan, yaitu pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo/Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyertaan modal daerah, Pembentukan Dana Cadangan .

Berikut rencana pembiayaan Tahun 2026 yang disandingkan dengan proyeksi keuangan daerah dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029 pada tabel 3.30:

Tabel 3.36
Rencana Pembiayaan Kota Bogor Tahun 2026

KODE	URAIAN	RPJMD TAHUN 2026	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35,497,032,260.00	61,497,032,260.00	35,497,032,260.00

KODE	URAIAN	RPJMD TAHUN 2026	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
6.1.02	Pencairan Cadangan Dana	0.00	26,000,000,000.00	
6.1.04	Penerimaan Daerah Pinjaman	0.00	0.00	
6.1.05	Penerimaan Pemberian Daerah Kembali Pinjaman	5,497,032,260.00	5,497,032,260.00	5,497,032,260.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25,294,145,996.00	10,294,145,996.00	25,294,145,996.00
6.2.01	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	10,294,145,996.00	10,294,145,996.00	10,294,145,996.00
6.2.02	Penyertaan modal daerah	15,000,000,000.00	0.00	15,000,000,000.00
6.2.03	Pembentukan Cadangan Dana	0.00	0.00	
PEMBIAYAAN NETTO		10,202,886,264.00	51,202,886,264.00	10,202,886,264.00

Sumber: Diolah Bapperida, Rancangan RPJMD 2025-2029 dan SIPD-RI, 2025

Sebagaimana Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029, Rencana Struktur Anggaran yang disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut rencana struktur pendanaan RKPD tahun 2026 yang disandingkan dengan proyeksi keuangan daerah dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029, pada tabel 3.37 berikut:

Tabel 3.37
Struktur Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2026

KODE	URAIAN	RPJMD TAHUN 2026	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
4	PENDAPATAN DAERAH	2,930,214,136,998.00	2,923,292,808,800.40	2,998,856,096,299.00

KODE	URAIAN	RPJMD TAHUN 2026	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
4.1	PENDAPATAN DAERAH (PAD) ASLI	1,661,440,007,429.00	1,654,518,679,231.40	1,730,081,966,730.00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	1,215,681,246,495.00	1,222,320,064,120.40	1,275,915,308,819.00
4.1.02	Retribusi Daerah	396,974,657,213.00	383,413,215,500.00	403,348,220,579.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	38,044,022,766.00	38,044,022,766.00	40,078,356,377.00
4.1.04	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10,740,080,955.00	10,741,376,845.00	10,740,080,955.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,268,774,129,569.00	1,268,774,129,569.00	1,268,774,129,569.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,138,956,711,000.00	1,138,956,711,000	1,138,956,711,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129,817,418,569.00	129,817,418,569	129,817,418,569.00
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0	0,00	0,00
4.3.1	Hibah	0	0,00	0,00
4.3.3	Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	0	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	2,993,160,881,255.00	3,360,117,574,870.19	3,052,249,871,380.00
5.1	BELANJA OPERASI	2,701,045,345,423.00	3,002,006,685,211.81	2,754,926,252,331.00
5.1.01	Belanja Pegawai	1,313,506,587,622.00	1,314,364,657,785.00	1,339,776,719,374.00
5.1.02	Belanja barang dan jasa	1,267,413,305,719.00	1,433,508,552,553.81	1,292,761,571,833.00
5.1.03	Belanja Bunga	7,000,000,000.00	9,500,000,000.00	7,000,000,000.00
5.1.05	Belanja hibah	81,891,416,166.00	205,977,195,873.00	83,529,244,490.00
5.1.06	Belanja bantuan social	31,234,035,916.00	38,656,279,000.00	31,858,716,634.00
5.2	BELANJA MODAL	260,404,160,832.00	324,752,006,616.38	265,612,244,049.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	17,813,019,383.00	20,037,106,029.00	18,169,279,771.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53,463,450,299.00	74,156,304,448.00	54,532,719,305.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122,699,398,215.00	135,248,298,925.38	125,153,386,180.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66,061,557,443.00	94,945,440,014.00	67,382,788,592.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	264,936,024.00	267,184,000.00	270,234,744.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	101,799,468.00	97,673,200.00	103,835,457.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30,000,000,000.00	31,647,508,042.00	30,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30,000,000,000.00	31,647,508,042.00	30,000,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	1,711,375,000.00	1,711,375,000.00	1,711,375,000.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1,711,375,000.00	1,711,375,000.00	1,711,375,000.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	-62,946,744,257.00	-436,824,766,069.79	-53,393,775,081.00
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35,497,032,260.00	61,497,032,260.00	35,497,032,260.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0.00	26,000,000,000.00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	
6.1.05	Penerimaan Pemberian Kembali Pinjaman Daerah	5,497,032,260.00	5,497,032,260.00	5,497,032,260.00

KODE	URAIAN	RPJMD TAHUN 2026	RKPD TAHUN 2026	PROYEKSI TAHUN 2027
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25,294,145,996.00	10,294,145,996.00	25,294,145,996.00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	
6.2.02	Penyertaan modal daerah	15,000,000,000.00	0.00	15,000,000,000.00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10,294,145,996.00	10,294,145,996.00	10,294,145,996.00
PEMBIAYAAN NETTO		10,202,886,264.00	51,202,886,264.00	10,202,886,264.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN		-52,743,857,993.00	-385,621,879,805.79	-43,190,888,817.00
TOTAL APBD		2,965,711,169,258.00	2,984,789,841,060.40	3,034,353,128,559.00

Sumber : Diolah Bapperida, Rancangan RPJMD 2025-2029 dan SIPD-RI, 2025

3.2.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2026

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam Rancangan APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
4. Implementasi pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tercatat sebagai pendapatan transfer menjadi pajak daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
5. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya;
6. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi terkini;
7. Meningkatkan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Bogor untuk setiap obyek dari pendapatan transfer sebagaimana peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

8. Mengintensifkan komunikasi dengan lembaga di tingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan pendapatan transfer bagi kabupaten/kota;
9. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kota Bogor sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.2.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah 2026

Dalam upaya terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bogor sebagai salah satu sumber dana penopang pembangunan Kota Bogor Tahun 2026 maka arah kebijakan yang ditetapkan untuk memenuhi penerimaan pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2026 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arah Kebijakan yang ditetapkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tercatat sebagai pendapatan transfer menjadi pajak daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
4. Pemantapan kelembagaan dan system pemungutan pendapatan daerah;
5. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
6. Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di Kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;
7. Peningkatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
8. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan kerjasama pendapatan asli daerah dengan instansi terkait;
9. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran

masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;

10. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
11. Penerapan pola insentif dan disinsentif bagi Wajib Pajak;
12. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
13. Peningkatan digitalisasi dan elektronifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
14. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan mendukung upaya BUMD untuk memaksimalkan pendapatan;
15. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
16. Melaksanakan sensus data kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Bogor;
17. Sinergi pemungutan pajak opsen PKB dan BBNKB dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bogor;
18. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah;
19. Kewajiban melaksanakan validasi pada saat proses peralihan hak BPHTB;
20. Optimalisasi monitoring dan evaluasi penggunaan Tapping Box.

3.2.3.2. Arah Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Dari Pendapatan Transfer 2026

Arah kebijakan pendapatan untuk penerimaan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN, PPh Pasal 21);
2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pendapatan Transfer;
4. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA. 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil TA. 2026, Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA. 2026 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil TA. 2026 belum ditetapkan, perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil dapat direncanakan berdasarkan pada: Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil 5 (lima) tahun terakhir yaitu TA. 2020, TA. 2021, TA. 2022, TA. 2023, TA. 2024 dan TA. 2025/Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA. 2026;
5. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA. 2026, Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum

ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA. 2026 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan, Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU dapat direncanakan berdasarkan pada alokasi DAU TA. 2025;

6. Mematangkan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional;
7. Mematangkan usulan Bantuan Keuangan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.2.3.3. Arah Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Dari Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2026

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Arah kebijakan pendapatan untuk penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah dengan melakukan optimalisasi dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan rencana kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diatas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2026 perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan perencanaan Pendapatan Daerah yaitu dengan:

Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:

1. Peningkatan keterlibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan pendapatan asli daerah melalui forum diskusi, seminar dan sebagainya;
2. Peningkatan sosialisasi kepatuhan pajak dan retribusi daerah;
3. Penyempurnaan dasar hukum pengelolaan pendapatan asli daerah;
4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat di semua Perangkat Daerah yang melayani masyarakat secara langsung;
5. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
6. Implementasi pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tercatat sebagai pendapatan transfer menjadi pajak daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
7. Peningkatan upaya yang dapat mengembalikan peningkatan potensi di sektor pariwisata Kota Bogor dengan melaksanakan:
 - a. Sosialisasi potensi pariwisata Kota Bogor;

- b. Penyelenggaraan kegiatan skala nasional dan internasional;
- c. Melakukan edukasi terhadap Warga, Kelompok Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan di Kota Bogor dalam membangun citra pariwisata Kota Bogor;
- d. Meningkatkan rasa nyaman dan aman wisatawan di Kota Bogor;
- e. Melakukan penataan kuliner sehingga lebih bersih, rapi, dan nyaman sebagai salah satu potensi wisata dan potensi pendapatan asli daerah;
- f. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- h. Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil;
- i. Peningkatan profesionalitas sumber daya aparatur pengelola PAD melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, fungsionalisasi jabatan dan lain sebagainya;
- j. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam membangun sinergitas antar kabupaten/kota;
- k. Optimalisasi pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
- l. Penguatan regulasi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan law enforcement pengelolaan PAD.

Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:

- a. Peningkatan kerjasama dengan KPP Pratama Bogor;
- b. Peningkatan koordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dalam meningkatkan kapasitas pendapatan daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI serta Pemprov Jabar dalam upaya meningkatkan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak);
- d. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Lainnya dalam rangka meningkatkan besaran target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.2.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026

Belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

Ketentuan umum alokasi belanja daerah Tahun 2026 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di atasnya adalah sebagai berikut:

1. Pagu Belanja setiap Perangkat Daerah maksimal sama dengan nilai pagu indikatif yang ditetapkan;
2. Prioritas Belanja Tahun 2026:
 - a) Belanja wajib dan mengikat dianggarkan untuk 1 (satu) tahun anggaran;
 - b) Program strategis yang terkait dengan Provinsi dan Nasional yang diselaraskan dengan Belanja prioritas dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 (janji politik wali kota dan prioritas pembangunan lainnya), Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Indikasi program pada Rencana Tata Ruang Wilayah serta hasil Rakortekrenbang untuk penyelarasan dukungan Pemerintah Daerah terhadap Asta Cita Presiden;
 - c) Belanja yang mendukung langsung IKU, IKK (baik di Tingkat Kota ataupun Perangkat Daerah), Indikator Program serta berdasarkan hasil analisis *crosscutting* antar Perangkat Daerah;
 - d) Belanja Pendidikan difokuskan untuk akses dan kualitas pendidikan;
 - e) Belanja Kesehatan difokuskan untuk akses dan kualitas penanganan kesehatan, infrastruktur puskesmas dan RSUD, penanganan penyakit menular (HIV, Lepra, TBC), pemenuhan universal health coverage (UHC);
 - f) Belanja Lingkungan Hidup difokuskan untuk TPA, armada pengangkut sampah, timbulan sampah, pengurangan dan pemilahan sampah dimulai dari rumah tangga, TPS 3R, evaluasi kinerja kebersihan kelurahan, kecamatan;
 - g) Alokasi anggaran pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan serta wilayah cakupannya;
 - h) Alokasi anggaran yang bersifat mandatory;
 - i) Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan yang didanai dari opsen PKB/BBNKB;
 - j) Musrenbang;
 - k) Pokok-Pokok Pikiran DPRD;

- l) Belanja Sarana Prasarana Kelurahan bersumber dari Usulan Musrenbang yang sudah diverifikasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman;
- m) Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang belum terselesaikan di Tahun 2025 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- n) Alokasi Belanja Daerah direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yaitu;
 - Dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (time bound);
 - Dalam pendanaan yang direncanakan menganut prinsip “money follow program” dengan memperhatikan permasalahan serta isu prioritas pembangunan pada Tahun 2026 sebagai dasar pengalokasian pendanaan prioritas.
- o) Perencanaan belanja daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan harus melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan target kinerja yang dituangkan dalam Rancangan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;
- p) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial, termasuk di dalamnya belanja penanganan darurat dan mendesak;
- q) Melaksanakan kegiatan lelang dini pada kegiatan PBJ Strategis untuk menghindari terjadinya keterlambatan proses PBJ sesuai ketentuan yang berlaku;
- r) Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
- s) Belanja Daerah yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan diutamakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021;
- t) Dalam hal terjadi kelebihan pendapatan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi maka akan dialokasikan kepada pemenuhan belanja

prioritas dan/atau belanja tidak terduga, kecuali untuk alokasi kegiatan yang sudah diatur penggunaannya oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

3. Gaji dan Tunjangan:

- a) Perhitungan gaji, tunjangan dan TPP ASN untuk 14 kali (termasuk Gaji dan Tunjangan ke-13 dan ke-14, menyesuaikan dengan regulasi dari Pemerintah Pusat) termasuk iuran jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian serta insentif atas pajak untuk ASN (Bapenda, Setda, Kecamatan) sesuai alokasi perhitungan dari Bapenda;
- b) Perhitungan gaji dan tunjangan untuk KDH dan WKDH termasuk iuran jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian;
- c) Perhitungan gaji dan tunjangan untuk Anggota DPRD termasuk iuran jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian;
- d) Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dinyatakan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku, Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN. Oleh karena itu, dalam rangka penataan pegawai non ASN, Pemerintah Daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi PPPK dan/atau PPPK Paruh Waktu, apabila masih mengangkat lagi pegawai non ASN maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non ASN adalah sejak berlakunya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023;
- e) Pengaturan penganggaran gaji bagi pegawai PPPK Paruh Waktu dilaksanakan berdasarkan Diktum PERTAMA, Diktum KETIGA, Diktum KESEMBILAN BELAS, dan Diktum KEDUA PULUH Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu;
- f) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran PPPK Paruh Waktu dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut:
 - 5.1.02.02.01.0083 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru;
 - 5.1.02.02.01.0084 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan Kerja;

- 5.1.02.02.01.0085 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga Kesehatan;
 - 5.1.02.02.01.0086 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis;
 - 5.1.02.02.01.0087 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola umum operasional;
 - 5.1.02.02.01.0088 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional;
 - 5.1.02.02.01.0089 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional;
 - 5.1.02.02.01.0090 Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional;
4. Operasional dan Pemeliharaan Aset;
- a) Belanja air, listrik, telepon, dan internet dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan dengan menerapkan prinsip efisiensi;
 - b) Pemeliharaan BMD dan Pengadaan BMD harus mengacu pada Dokumen SKB/RKBMD 2026;
 - c) Pemeliharaan kendaraan hanya untuk kendaraan dinas yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor dan masih digunakan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - d) Kendaraan yang rusak berat dan kendaraan yang bersifat rekondisi atau overhaul, tidak dianggarkan lagi untuk pemeliharaan, diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris;
 - e) Menganggarkan pajak untuk semua kendaraan yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor, kecuali yang rusak berat;
 - f) Harga satuan pemeliharaan kendaraan mengacu pada Standar Harga Satuan Jasa 2026;
 - g) Harga satuan pemeliharaan kendaraan dinas pejabat atau kendaraan dinas operasional sudah termasuk BBM.
5. Belanja Barang dan Jasa;
- a) Penganggaran BLUD alokasi sesuai dengan target pendapatan tahun 2026 (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal);
 - b) Alokasi PBI disesuaikan dengan proporsi penyediaan anggaran oleh Pemerintah Kota Bogor;
 - c) Alokasi BOS Kota Bogor sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada dapodik tahun 2025;
 - d) Belanja persediaan untuk operasional kantor dialokasikan pada sub kegiatan:
 - Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah dialokasikan di sub kegiatan Pemeliharaan BMD.
- e) Belanja sistem informasi/aplikasi agar mendapatkan persetujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memegang prinsip efisiensi, integrasi dan interoperabilitas serta satu data Kota Bogor.
6. Belanja Honorarium;
- a) Penganggaran belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan (BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK—SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu) dan honorarium pengadaan barang dan jasa maksimal sebesar 10% dari Pagu PD diluar Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Tidak ada honorarium lembur untuk ASN;
 - c) Honorarium Lembur dapat diberikan kepada non ASN yang menangani kejadian bencana pada saat kejadian bencana, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru;
 - d) Pemberian Honorarium ASN Kota Bogor hanya diperkenankan untuk:
 - 1) Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan;
 - 2) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - 3) Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa di luar Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian PBJ;
 - 4) Honorarium Panitia Besar Kota Bogor Pekan Olahraga Provinsi ke-XV Jawa Barat Tahun 2026 sesuai dengan Keputusan Walikota Bogor No. 400.4/Kep.150-Dispora/2025 tentang Pembentukan Panitia Besar Kota Bogor Pekan Olahraga Provinsi ke-XV Jawa Barat Tahun 2026;
 - e) Perjalanan Dinas dalam kota untuk ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bogor diperkenankan hanya untuk anggaran yang bersumber dari dana transfer sesuai juklak dan juknis yang berlaku.
7. Perjalanan Dinas;
- a) Perjalanan dinas termasuk paket meeting memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta mengikuti ketentuan dan anggaran hasil efisiensi tahun anggaran 2025;
 - b) Belanja perjalanan dinas untuk mobilitas dari tempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula, dengan pengaturan sebagai berikut:

- 1) untuk pegawai Pemerintah Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, dengan ketentuan:
 - a. dalam rangka koordinasi/konsultasi atas inisiatif perangkat daerah dengan jumlah peserta paling banyak 3 (tiga) orang termasuk pengemudi;
 - b. dalam rangka memenuhi undangan dengan jumlah peserta paling banyak 4 (empat) orang termasuk pengemudi, sepanjang tidak ditentukan lain dalam surat undangan;
 - c. dalam rangka studi banding, kunjungan kerja, dan atau sejenisnya atas inisiatif sendiri dengan maksimal jumlah peserta 10 (sepuluh) orang, dianggarkan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk 1 (satu) perangkat daerah.
 - 2) Untuk narasumber pada kegiatan atau saksi yang dibutuhkan dan atau dihadirkan oleh Pemerintah Kota Bogor.
8. Penyelenggaraan Pertemuan;
- a) Pelaksanaan pertemuan berupa rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, FGD dan sejenisnya diarahkan dalam bentuk online atau menggunakan fasilitas gedung pemerintah khususnya Pemerintah Kota Bogor, sedangkan jika menggunakan fasilitas di luar gedung pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) peserta berasal dari lintas (lebih dari satu) perangkat daerah dan jumlah peserta lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
 - 2) dilaksanakan di wilayah Kota Bogor;
 - 3) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk rapat kerja dengan Kepala Daerah dan rapat kerja dengan DPRD.
 - b) Penyediaan makan dan minum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tidak menyediakan makan dan minum rapat yang dilaksanakan internal Perangkat Daerah;
 - 2) Tidak menyediakan makan dan minum tamu dalam rangka kunjungan kerja, studi banding, dan atau sejenisnya, kecuali untuk tamu yang diterima oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah.
9. Belanja Subsidi;
- Belanja subsidi dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Belanja Bunga;
- a) Pembayaran bunga atas pinjaman PDAM kepada World Bank;
 - b) Pembayaran bunga atas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
 - c) Pembayaran bunga atas pinjaman Pemerintah Daerah.
11. Penggunaan Dana Transfer;

a) Dana Alokasi Umum, DAU yang sudah ditentukan penggunaannya dialokasikan berdasarkan PMK Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, dengan pengalokasian DAU tersebut:

- 1) Pendidikan (Disdik): Rp.70.049.238.000;
- 2) Kesehatan (Dinkes): Rp.43.485.470.000;
- 3) Pekerjaan Umum (DPUPR): Rp.2.387.870.000;
- 4) Pendanaan Kelurahan (sarpras dan pemberdayaan): Rp.13.971.045.631;
- 5) Pendanaan untuk Penggajian P3K (Disdik): Rp.5.645.224.000;
- 6) Penggunaan Pendapatan Opsen PKB : untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan
 - a. Opsen PKB: Rp.165.826.264.899;
 - b. Opsen BBNKB: Rp.82.622.618.342;
- 7) DBHCHT/Pajak Rokok: Rp.64.765.634.148.

12. Hibah dan Bantuan Sosial:

- a) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, efisien, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, serta untuk masyarakat miskin dan penerima bantuan sosial harus terdaftar dalam database di aplikasi SOLID dan pengajuan usulannya melalui aplikasi SAHABAT;
- b) Belanja Hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Belanja Hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) Penganggaran Hibah Bansos pada RKPD tahun 2026 berdasarkan BNBA yang sudah terverifikasi.

13. Belanja Modal:

- a) Belanja modal harus memperhatikan batasan nilai kapitalisasi dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, batasan nilai kapitalisasi mengacu pada Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- b) Pemenuhan fasilitas kendaraan dinas secara selektif, efektif dan efisien;
- c) Belanja pengadaan tanah didasarkan pada dokumen Rencana Pengadaan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku;

- d) Readiness criteria seperti DED dan kesiapan lahan kecuali pekerjaan fisik di bawah 400 juta dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Porprov ke-XV.

14. Prioritas Pembangunan /Janji Politik Wali Kota;

a) Bogor Cerdas

- 1) Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru;
- 2) Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu;
- 3) Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur;
- 4) Meningkatkan gaji dan fasilitas guru honorer;
- 5) Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu;
- 6) Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal;
- 7) Memfasilitasi akses beasiswa LPDP dan dari berbagai Lembaga;
- 8) Mengembangkan command center;
- 9) Pengembangan CCTV di lokasi strategis;
- 10) Pemasangan Wifi gratis di seluruh Fasilitas publik;
- 11) Pembangunan gedung pemerintahan terpadu;
- 12) Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online berkolaborasi dengan aparaturnya penegak hukum dan wilayah;
- 13) Memberikan bantuan hukum gratis kepada Masyarakat yang Berhadapan dengan Hukum;
- 14) Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan;
- 15) Pelayanan jemput bola perizinan;
- 16) Penguatan sarana prasarana pelayanan publik.

b) Bogor Sehat

- 1) Pelayanan Kesehatan Prima
 - a. Pemeriksaan kesehatan gratis;
 - b. Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan sub spesialis di Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya;
 - c. Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas;
 - d. Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat dan bencana alam;
 - e. Membuat sistem pelayanan rujukan yang terpusat dan terintegrasi keseluruh Rumah Sakit di dalam dan diluar Kota Bogor;
 - f. Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin;

- g. Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling;
 - h. Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas & Lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling;
 - i. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan;
 - j. Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur.
- 2) Pelayanan Kebersihan
- a. Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
 - b. Penyediaan fasilitas & armada angkutan sampah yang layak & memadai;
 - c. Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum);
 - d. Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan ekspos perubahan iklim dan resiko bencana.
- 3) Ketahanan Keluarga
- a. Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu;
 - b. Memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin;
 - c. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
 - d. Pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat di 4 kecamatan;
 - e. Revitalisasi Gor Pajajaran Menjadi Pusat Olahraga dan Gedung Kreatif dan Seni Terpadu.

c) Bogor Sejahtera

- 1) Pengangguran
- a. Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional;
 - b. Memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor.
- 2) Ekonomi Kreatif
- a. Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan;
 - b. Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya lokal;

- c. Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dan sistem pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM);
- d. Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif;
- e. Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas.

d) Bogor Lancar

- 1) Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik;
- 2) Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda;
- 3) Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- 4) Promosi Penggunaan Transportasi Umum: Melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum dengan memperkenalkan program-program insentif seperti tarif terjangkau atau diskon untuk pelajar dan pekerja;
- 5) Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang/Fly Over Jl Kebon Pedes;
- 6) Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi;
- 7) Pembangunan lanjutan R3, R2, Bogor Inner Ring Road (BIRR).

3.2.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2026

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah, Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Pembiayaan daerah di Kota Bogor diarahkan untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat

mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok cicilan utang yang jatuh tempo dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran cicilan pokok utang dan penyertaan modal daerah. Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana.

Arah kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2026 diantaranya kaitan dengan pencairan dana cadangan Porprov Jabar ke-XV untuk pelaksanaan Porprov Jabar ke-XV di Kota Bogor.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan;
 - a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025, dengan memperhitungkan sumber-sumber SiLPA dimaksud;
 - b) Penerimaan Cicilan Utang Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Perumda Tirta Pakuan.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Pembayaran cicilan pokok utang terkait:
 - 1) Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Perumda Air Minum Tirta Pakuan;
 - 2) Pinjaman PEN Daerah Kota Bogor;
 - 3) Pinjaman daerah lainnya.

3.2.6. Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2026

Besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di Kota Bogor dan terbatasnya sumber \-sumber penerimaan konvensional mendorong pemerintah Kota Bogor untuk mencari alternative pembiayaan, Sumber-sumber pendanaan pembangunan non APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternative pembiayaan pembangunan diantaranya : APBN (Dana Transfer dan Belanja DIPA K/L di Daerah), APBD Provinsi, Dana umat, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Sumber Pendanaan Lainnya (PHLN, Obligasi dan Sukuk).

3.2.7. APBN (Dana Transfer Dan Belanja Dipa K/L Di Daerah)

Dana APBN yang masuk ke Pemerintah daerah berupa Transfer ke Daerah yang terdiri dari dana Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Insentif Fiskal. Beberapa kebijakan utama yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Bogor agar pemanfaatan Dana Transfer di daerah dapat terwujud di antaranya:

1. Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
2. DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, irigasi dan pertanian, perumahan, dan jalan) serta afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Sedangkan DAK non-fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tambahan Penghasilan (Tamsil), Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), dan bantuan operasional kesehatan untuk Puskesmas.
3. Pemberian insentif fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan terkait pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap kebijakan strategis nasional, dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

3.2.8. APBD Provinsi (Dana Transfer Dan Belanja Di Daerah Kabupaten/Kota)

Pendapatan Daerah dari Provinsi adalah pendapatan transfer yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari penerimaan pajak

dan sumber daya alam yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi serta Opsen yang bersumber dari pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu baik opsen PKB dan BBNKB.

3.2.9. Dana Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Kota Bogor adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Kota Bogor yang cukup besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar, tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat.

Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Kota Bogor secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.2.10. Peran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Dalam Pembangunan Daerah

Sumber pendapatan Daerah Tahun 2026 selain berasal dari sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud diatas, potensi pendapatan daerah juga berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) atau biasa disebut Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Kegiatan program CSR/TJSLP pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun ekonomi, ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendidikan, dan lingkungan. Implementasi CSR/TJSLP di Kota Bogor disesuaikan

dengan kapasitas masing-masing perusahaan dan skala prioritas pembangunan di Kota Bogor.

Peran perusahaan/sector swasta dalam memenuhi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada Tahun 2026 akan diarahkan untuk:

- a. Pembangunan sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Pemerlu Perlindungan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b. Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
- c. Kesehatan, yang diarahkan untuk penyelenggaraan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- e. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan;
- g. Sarana dan prasarana keagamaan;
- h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan menunjang prioritas pembangunan Kota Bogor yang telah dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendorong minat perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah melalui Program CSR/TJSLP, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan upaya – upaya melalui:

1. Diseminasi/Sosialisasi program CSR/TJSLP Kota Bogor;
2. Peningkatan koordinasi sinergi prioritas pembangunan dengan perusahaan – perusahaan yang telah bermitra di Kota Bogor;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi CSR/TJSLP;
4. Peningkatan kerjasama melalui updating data penawaran program prioritas pembangunan melalui CSR/TJSLP;

5. Berkolaborasi dengan Pemerintah Jawa Barat dalam mendorong peningkatan peran perusahaan untuk berkontribusi dalam program CSR/TJSLP, berdasarkan upaya-upaya diatas diharapkan adanya peningkatan jumlah mitra CSR/TJSLP di Kota Bogor serta peminatan program dan kegiatan pembangunan yang ditawarkan pada perusahaan di Kota Bogor.

Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Bogor dalam menuntaskan Prioritas Pembangunan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor melakukan alternatif pendanaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor dalam program CSR/TJSLP sebagai sekretariat yang kemudian memfasilitasi dalam pembentukan Forum CSR/TJSLP, dimana dalam kepengurusannya terdiri dari para pengusaha dan unsur pemerintah. Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor bertugas untuk menyelaraskan program, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Forum CSR/TJSLP sehingga tepat sasaran serta sinergi dengan prioritas pembangunan Kota Bogor.

Kedepannya keselarasan antara pelaksanaan CSR/TJSLP dengan program pembangunan dan arah kebijakan perlu terus diupayakan. Dengan demikian, peran CSR/TJSLP sebagai alternatif pendanaan program pembangunan daerah dapat terlaksana dengan optimal.

Pelaksanaan fasilitasi CSR/TJSLP Kota Bogor masih mengalami kendala dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Bogor, hal tersebut terjadi karena:

1. Belum semua pelaku usaha yang melaksanakan CSR/TJSLP di Kota Bogor melakukan pelaporan;
2. Belum semua perangkat daerah melaporkan pelaksanaan CSR/TJSLP yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah terkait;
3. Belum adanya batasan yang jelas mengenai pengertian CSR/TJSLP sehingga tim fasilitasi masih kesulitan memilah kegiatan-kegiatan yang merupakan CSR/TJSLP dan bukan;
4. Laporan yang masuk sebagian merupakan kegiatan yang dilaksanakan diluar Kota Bogor;
5. Belum optimalnya pelaporan melalui website CSR/TJSLP;
6. Belum terbentuknya Forum CSR/TJSLP;
7. Belum adanya update terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang CSR/TJSLP di Kota Bogor.

Dengan adanya kendala tersebut, maka perlu dilakukan rencana tindak lanjut agar pemanfaatan CSR/TJSLP di Kota Bogor sesuai dengan prioritas pembangunan

daerah yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029, adapun hal yang perlu dilakukan seperti:

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat daerah di Kota Bogor, agar seluruh pelaksanaan kegiatan CSR/TJSLP di perangkat daerah terkait dapat tercatat dan dilaporkan kepada Tim Fasilitasi;
2. Melakukan sosialisasi kembali mengenai pelaporan CSR/TJSLP dan pemanfaatan website CSR/TJSLP Kota Bogor kepada pelaku usaha dan perangkat daerah;
3. Pembaruan terhadap peraturan yang mengatur tentang CSR/TJSLP, untuk memberikan batasan yang jelas mengenai pengertian CSR/TJSLP, bidang-bidang yang dapat didanai dengan CSR/TJSLP, pembaruan format laporan CSR/TJSLP, dan lain-lain;
4. Pembentukan dan aktivasi kembali Forum CSR/TJSLP Kota Bogor.

3.2.11. Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Atau Public Private Partnership (PPP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan.

Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dari aspek pembiayaan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bersama-sama membiayai pengakselerasian pembangunan.

3.2.12. Hibah

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan diberbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diantaranya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.

Pengusulan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN dapat dilakukan oleh Kementerian Negara (departemen dan non- departemen), lembaga pemerintahan non departemen (selanjutnya disebut lembaga), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3.2.13. Pendanaan Obligasi Daerah Dan Sukuk

Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum dipasar modal. Penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan resiko yang ada. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan ketentuan tersebut, maka obligasi daerah yang diterbitkan pemerintah daerah hanya jenis obligasi pendapatan (revenue bond). Selain Obligasi Daerah, potensi sumber pembiayaan daerah lainnya adalah Obligasi Syariah atau Sukuk.

BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD Tahun 2026 merupakan bagian dari proses transisi yang merupakan penjabaran dari rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029. Pemerintah Kota Bogor tengah merancang dokumen RPJMD yang berisi arah kebijakan, strategi, serta penetapan ukuran keberhasilan Pembangunan daerah kemudian nantinya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut akan menjadi gambaran riil mengenai kondisi dan perkembangan keberhasilan pembangunan daerah yang selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pemerintah daerah Kota Bogor. Selain itu capaian lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), dokumen perencanaan strategis lainnya serta kondisi sosial dan ekonomi tentunya akan tetap menjadi salah satu acuan bagi pengambilan keputusan pimpinan daerah.

Pada proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun dilakukan analisis dan kajian terhadap berbagai dokumen perencanaan baik tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor, selain itu hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan yang dilengkapi isu strategis dan prioritas Pembangunan nasional serta provinsi menjadi acuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga pada akhirnya ditentukan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2026 yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tetap disandingkan Bersama program unggulan kepala daerah untuk menjadi fokus dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bogor Tahun 2026.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam proses penyusunan RKPD Kota Bogor Tahun 2026, prosesnya memperhatikan tujuan dan

sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan, baik di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor.

4.1.1. Penelahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya

Dalam mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, pembangunan perlu dilaksanakan dengan bekerja sama antara seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan berasar pada fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan cita-cita Indonesia Emas dapat tercapai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 memiliki 8 (delapan) Misi atau Asta Cita yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional atau *goals* (tujuan) yang ingin dicapai, sebagaimana dijelaskan pada gambar 4.1.

Sasaran utama pembangunan nasional pada jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN tahap I Tahun 2025-2029. Sasaran utama pembangunan nasional tersebut tercermin dalam 5 (lima) sasaran utama, yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; peningkatan daya saing sumber daya manusia; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission. Kelima sasaran utama pembangunan nasional memiliki target dijelaskan pada gambar 4.1

Gambar 4.1
8 Misi (Asta Cita) Prioritas Nasional



Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Gambar 4.2
Target Indikator Makro Pembangunan Nasional 2025-2029

1

Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

INDIKATOR	BASLINE 2025	TARGET 2029
1. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	8
2. CNI Per Capita (USD)	5.430	8.000
3. Kontribusi PDB Maritim (%)	8,1	9,1
4. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	30,8	31,9

2

Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

INDIKATOR	BASLINE 2025	TARGET 2029
1. Global Power Index (peringkat)	33	29

3

Kemiskinan Menurun Dan Ketimpangan Berkurang

INDIKATOR	BASLINE 2025	TARGET 2029
1. Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8	4,9-5,0
2. Gini Coef (Indeks)	0,378 - 0,382	0,372 - 0,375
3. Kontribusi PDB KTI (%)	31,4	32,4

4

Daya Saling Sumber Daya Manusia Meningkat

INDIKATOR	BASLINE 2025	TARGET 2029
1. Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56	0,59

5

Intensitas Emisi GRK menurun menuju net zero emission

INDIKATOR	BASLINE 2025	TARGET 2029
1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	35,53	62,37
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (2025)	78,49	77,20

Sumber: Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Tema besar pembangunan tahun 2025-2029 yaitu: penguatan fondasi transformasi dilaksanakan melalui penguatan 5 transformasi yaitu:

- 1. Transformasi sosial

meliputi Kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas dan merata, dan perlindungan sosial yang adaptif

2. Transformasi ekonomi

Meliputi Industri, pariwisata, ekonomi biru, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, ketenagakerjaan, BUMN, percepatan transisi energi, ekonomi sirkular industri, tenaga kerja hijau, pengelolaan hutan lestari, digital, integrasi ekonomi domestik dan global, dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

3. Transformasi Tata Kelola

Meliputi transformasi dan digitalisasi pelayanan publik, sistem penggajian tunggal, kualitas regulasi, manajemen talenta, integrasi proses bisnis, sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, dan integritas partai politik.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Meliputi stabilitas makro, politik luar negeri, pertahanan, hukum, keamanan, dan demokrasi

5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi

Meliputi: isu agama, isu budaya, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif, pangan, kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, dan energy.

Tabel 4.1
Telaah Lokasi Prioritas RPJMN 2025-2029 di Kota Bogor

Wilayah Jawa		
NO	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
1	Kawasan Aglomerasi Jakarta/WM Jakarta Provinsi Jawa Barat (khusus Kota Bogor)	
		1. Pengembangan Greater Jakarta Integrated Transit Based Living Area, antara lain melalui:
		-Pembangunan LRT Jabodebek Trase Harjamukti-Baranangsiang dan pembangunan LRT Jabodebek Trase Harjamukti-Pondokcina
		2. Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di kawasan aglomerasi Jakarta (termasuk Tangerang Raya, Bekasi Raya, Depok, dan Bogor Raya) termasuk penerapan SIK3 dan FEWS
		3. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja serta sesuai kebutuhan industri wilayah
2	Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur (khusus kota Bogor)	
		1. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi, antara lain melalui:
		- Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang terpadu
		- Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
		- Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
		- Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan

Wilayah Jawa		
NO	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		2. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi (PHTC)
		3. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, kususunya pada RSUD Kota Bogor (PHTC)
		4. Pembangunan tol Bogor Ring Road
		5. Pengembangan SPAM Bogor Raya
		6. Pengembangan World Class Research University Berbasis potensi wilayah pada Institut Pertanian Bogor
		7. Pengembangan SPAL Regional Kota Bogor
		Urban renewal pada kota-kota wisata, antara lain : Bogor dan Sukabumi
		8. Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense pada RS Tk III Salak dr. H. Sadjiman (Kota Bogor)

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen RKP Tahun 2026 berkedudukan sangat strategis, karena termasuk dalam bagian fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Tema RKP Tahun 2026 yaitu “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional, yang secara spesifik tercantum pada gambar 4.3 di bawah ini:

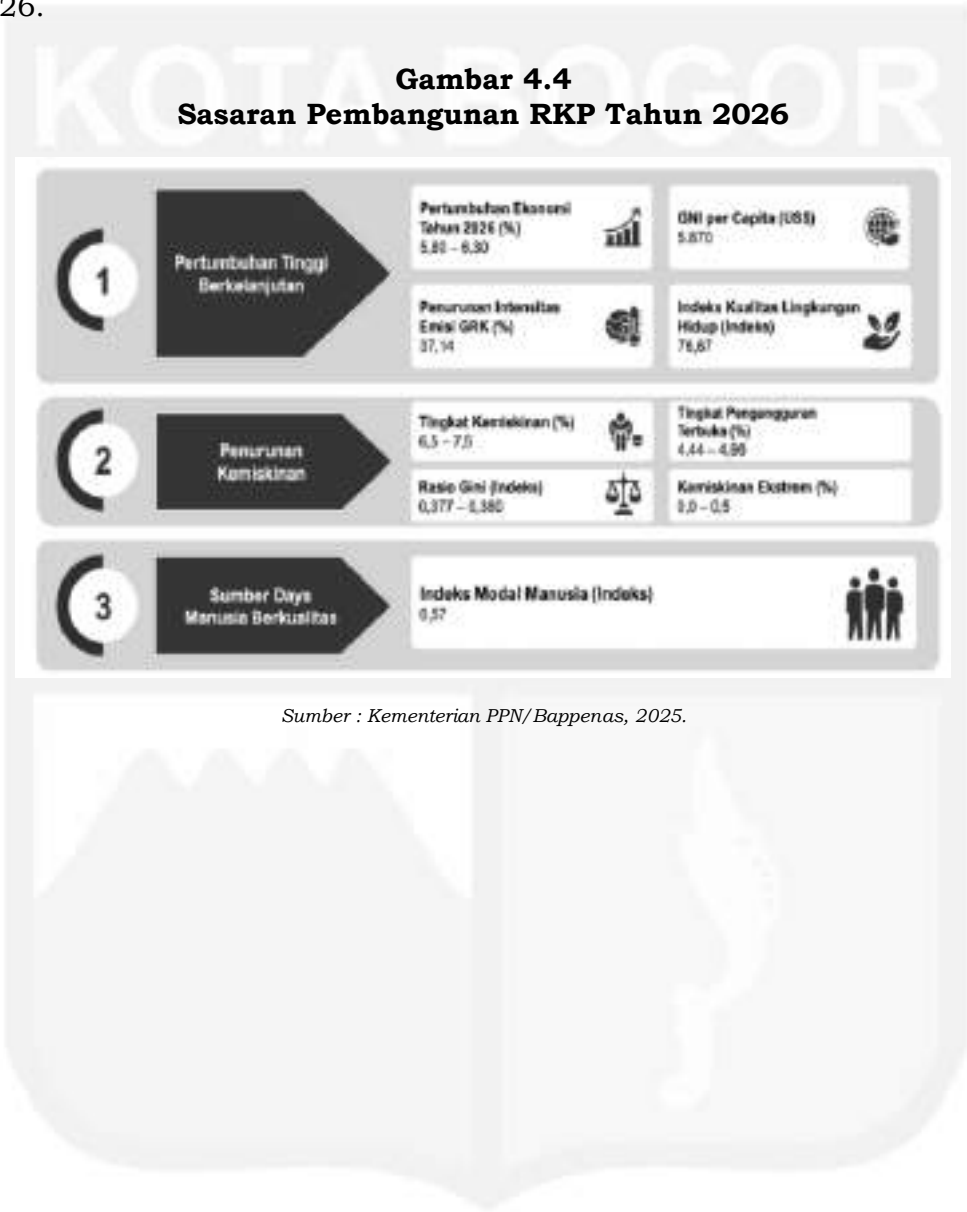
Gambar 4.3
Prioritas Pembangunan RKP 2026



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan

pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Berikut adalah tabel 4.4 target indikator sasaran Pembangunan Tahun 2026.



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2025.

Tabel 4.2
Telaah Dukungan RKPD Kota Bogor Terhadap Lokasi Prioritas RKP Tahun 2026

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		PIC
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
	NASIONAL				
1	Pengelolaan Sampah Terpadu				
	Wilayah metropolitan dengan timbulan sampah >1.000 ton/hari: Kota Adm. Jakarta Timur, Kota Adm. Jakarta Barat, Kota Adm. Jakarta Selatan, Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Tangerang, Kota Adm. Jakarta Utara, Kota Depok, Kota Palembang, Kota Semarang, Kota Makassar, Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota Batam, Kota Tangerang Selatan, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Bandar Lampung, Kota Bogor, Kota Malang, Kota Padang, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin dan sekitarnya, Kota Jambi dan sekitarnya, Kota Pontianak dan sekitarnya, Kota Surakarta dan sekitarnya, Kota Yogyakarta dan sekitarnya, Kota Manado dan sekitarnya, Kab. Bogor, Kab. Tangerang, Kab. Bekasi.	Pengelolaan persampahan terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan output Pembangunan PLTSA	Kota Bogor	Program : Pengelolaan persampahan Kegiatan : Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan : - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus - Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus - Pelaksanaan penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kab/kota kewenangan Program : Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan - Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	DLH
2	Sekolah Rakyat : Memutus Rantai Kemiskinan melalui Penyediaan Pendidikan Berkualitas Untuk Anak dari Keluarga Miskin Ekstrem dan Miskin				

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		PIC
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
	Fokus kepada daerah yang sudah memiliki kesiapan sarana dan prasarana (Sentra, Balai, Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL), Pemerintah Daerah) untuk pengembangan area pendidikan yang menyangkut pendidikan untuk kelompok miskin dan rentan yang inklusif.	Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan dengan output pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.	Kota Bogor	Pengusulan lokasi Sekolah Rakyat di Kota Bogor Mengikutsertakan 85 pelajar Kota Bogor di Sekolah Rakyat Inten Suweno, Cibinong, Kab. Bogor	Dinsos
3	Peningkatan Ekonomi Lokal Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih				
	Seluruh desa/kelurahan di Indonesia, dengan prioritas pengembangan berdasarkan potensi ekonomi dan kesiapan kelembagaan.	• Peningkatan kapasitas usaha koperasi; • Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi.	Kota Bogor	Program : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Aktivitas : Bantuan Finansial untuk Pembentukan Badan Hukum Koperasi sebanyak 34 Koperasi	DKUKM Dagin
4	Penguatan Pendidikan Literasi, numerasi, dan sains teknologi melalui penerapan digitalisasi pendidikan				
	38 Provinsi	Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran dengan output: • Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran;	Kota Bogor	Dinas Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : 1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan Dukungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Program : Kegiatan : Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Disdik, Diskarpus

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		PIC
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
		• SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran; • SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran.			
	KEWILAYAHAN				
1	PROVINSI DKI JAKARTA				
	Kawasan Aglomerasi Jakarta/WM Jakarta • Provinsi DKI Jakarta • Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Cianjur • Provinsi Banten: Kab.Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	Pengembangan Greater Jakarta Integrated Transit Based Living Area, melalui :			
		Persiapan Lanjutan Pembangunan LRT Jabodebek;	Baranang Siang	Program: Penyelenggaraan Jalan Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	DPUPR
		Subsidi Angkutan Penumpang (Buy the Service) di Jabodetabek; (Blok M - Kota Bogor)	Cidangiang, Pool Damri	Program: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan: Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dishub
		Preservasi Jalan Akses Simpul Transportasi Jl Padjadjaran (Bogor)	Simpang Jl Padjajaran, Simpang Tugu Bogor, Simpang Ciawi, Kedung Halang, Simpang Yasmin	Program: Penyelenggaraan Jalan Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	DPUPR
2	PROVINSI JAWA BARAT				

KODE	RKP 2026		RKPD 2026		PIC
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6
	Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor Sukabumi-Cianjur: - Kota Bogor	Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bogor Sukabumi, antara lain dengan output peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan biodefense (manusia, hewan, tumbuhan) pada RS Tk. III Salak dr. H. Sadjiman (Kota Bogor);	Kota Bogor	Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinkes
		Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road;	-	-	-
		Pengembangan SPAM Bogor Raya;	Katulampa	Program : Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DPUPR
		Pengembangan SPALD Perkotaan Kota Bogor	Kayu Manis	Program : Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	DPUPR
2	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bogor Sukabumi-Cianjur (Sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Regeneratif Greater Jakarta)	Urban Renewal pada kota-kota wisata: Bogor dan Sukabumi;	Batu Tulis	Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sub Kegiatan :	Disparbud

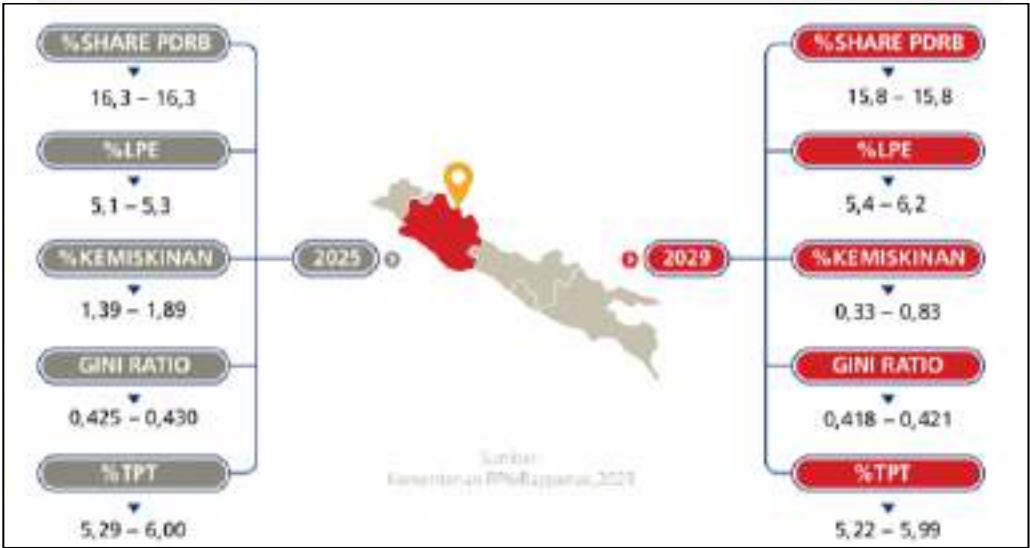
KODE	RKP 2026		RKPD 2026		PIC
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	2	3	4	5	
1				- Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	6

Sumber : Analisis Bapperida, 2025

4.1.2. Penelahaan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Arah pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 dibagi berdasarkan wilayah, untuk wilayah pulau Jawa tema pembangunan dikhususkan menjadi “Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi dan Berkelanjutan”. Provinsi Jawa Barat (Jabar) difokuskan menjadi “Pusat *cutting-edge industry*, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional” dengan indikator makro seperti gambar 4.5 di bawah ini:

Gambar 4.5
Target Makro Provinsi Jabar 2025-2029



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih periode tahun 2025-2029, yaitu **“JAWA BARAT ISTIMEWA, Lembur diurus, Kota ditata”**. Dengan misi:

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa, dan professional pada bidang tugasnya masing-masing
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berbasis sains, dan teknologi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini;
3. Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dan mendorong masuknya investasi serta pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup yang proporsional;
4. Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap pelayanan public yang bermartabat, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan *clear governance*

Adapun tujuan dan sasaran pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang *Cageur Bageur, Bener, Pinter, dan Singer*, dengan sasaran:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Terbentuknya individu beretika dan berbudaya;
3. Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum;
4. Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan;
5. Terbentuknya individu kreatif dan inovatif.

Tujuan 2.1

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan untuk Swasembada Pangan;
3. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa;
4. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif.

Tujuan 2.2

Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja;
2. Meningkatnya Kualifikasi, kompetensi dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja;
3. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Kewilayahan, Infrastruktur Dasar di Pedesaan dan Kawasan Konservasi, Serta Penataan Perkotaan yang Berbasis Lingkungan;

2. Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil;
3. Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat.

Tujuan 4.1

Terciptanya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:

1. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan;
2. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.

Tujuan 4.2

Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran: Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

Selanjutnya, Implementasi visi dan misi diterjemahkan kedalam program unggulan Sembilan langkah membangun Jawa Barat Istimewa (*Salapan langkah ngawangun Jawa Barat Istimewa*) yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur jalan di seluruh pelosok desa dan perkotaan, pembangunan rumah rakyat miskin, mewujudkan Jabar Caang melalui 100% elektrifikasi masyarakat, serta penataan sanitasi lingkungan dengan membuat sarana mandi, cuci, kakus, di lingkungan permukiman sekitar daerah aliran sungai, sehingga terwujud Jabar ODF (Open Defecation Free/bebas buang air besar sembarangan).
2. Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya.
3. Pengembangan Pendidikan Berkarakter, dengan didukung ketercukupan ruang kelas, guna menjaga kesetaraan ruang kelas antar jenjang pendidikan, pembentukan 10 sekolah kejuruan unggulan dengan sistem boarding, berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, dengan kurikulum link and match dengan dunia kerja, sehingga membentuk manager-manager baru di Jawa Barat, serta pengembangan program beasiswa D1, D3, S1, S2, S3, untuk siswa berprestasi di Perguruan-Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan permasalahan Jawa Barat
4. Mengembangkan lapangan kerja baru, dengan mendorong investasi di wilayah Kabupaten/Kota bertata ruang industri, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lingkungan;

[illegible]

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan;

- 3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan;
- 4. Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029, yaitu "Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola", maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah:

“PEMERATAAN DISTRIBUSI AKSES LAYANAN DASAR”

Tema tersebut memiliki makna bahwa aksesibilitas layanan dasar perlu merata. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa yang ditandai dengan fokus pembangunan pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dimulai dari layanan dasar melalui peningkatan intensitas dan cakupan, baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya pada daerah-daerah yang belum merata namun memiliki nilai strategis yang tinggi. Dengan Target makro pembangunan tahun 2026 sebagai berikut:

Gambar 4.7
Target Makro Pembangunan Provinsi Jabar 2026

1. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dengan target indikator:	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,3
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14
GNI per Capita	5.870
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,67
2. Penurunan Kemiskinan dengan target indikator:	
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4.96
Kemiskinan Ekstrem (%)	0
Rasio Gini	0,377 – 0,380
3. Sumber Daya Manusia Berkualitas dengan target indikator:	
Indeks Modal Manusia	0,57

Sumber : RKPD Jawa Barat Tahun 2026, 2025

4.1.3. Tujuan dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor

Berdasarkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029. Telah dirumuskan visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Walikota dan Wakil Walikota Bogor periode 2025-2029 sebagai berikut:

Visi:

“BOGOR BERES – BOGOR MAJU”

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut:

Berakar dari keinginan kuat untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang tertata dan berdaya saing tinggi di berbagai aspek kehidupan. Fokus pada perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kota Bogor dapat tumbuh menjadi kota maju yang berkelanjutan.

Bogor Beres artinya mengajak seluruh lapisan masyarakat dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun Kota Bogor sampai beres. Beres tidak hanya bermakna menata secara fisik, tetapi menata kualitas secara keseluruhan, termasuk beres pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga kota. Beres juga mengandung makna bahwa untuk bergerak kedepan, permasalahan (lama) yang masih ada perlu diselesaikan (dibereskan) segera. Tidak mungkin kota bergerak maju kedepan jika permasalahan dasar masih belum terurai.

Bogor Maju artinya membangun kemajuan Kota Bogor. Kemajuan sering kali ditandai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi (atau inovasi). Hal ini juga menjadi salah satu pilar dari kemajuan Kota Bogor. Namun, kemajuan ini perlu juga disokong dengan pilar-pilar lainnya, termasuk kota yang memiliki kebudayaan dan karakter masyarakat yang kuat, manusia yang berkualitas, serta infrastruktur yang memadai.

Misi:

1. Misi pertama BOGOR CERDAS, mencerminkan perwujudan kualitas intelektualitas manusia, tata kelola pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, misi ini memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memperdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal. Selain itu, misi ini juga memastikan pengelolaan pembangunan yang baik, disertai dengan aparatur yang cerdas dan pelayanan publik yang semakin prima.
2. Misi kedua BOGOR SEHAT, mencerminkan perwujudan kualitas warga dan lingkungan yang sehat. Dengan demikian, misi ini memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selain itu, misi ini juga

memastikan penciptaan kualitas lingkungan binaan dan hidup yang menopang kesehatan dan kualitas hidup warganya.

3. Misi ketiga BOGOR SEJAHTERA, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas ekonomi kota yang berkeadilan. Dengan demikian, misi ini memastikan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Misi keempat BOGOR LANCAR, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas mobilitas dan tata ruang. Dengan demikian, misi ini berupaya untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik.

Tujuan:

Adapun tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya sumberdaya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi (Smart People), dengan sasaran:

1. Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui Wajib Belajar 13 tahun;
2. Meningkatnya pemajuan Kebudayaan Bangsa;
3. Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan Keluarga sebagai pilar utama penggerak pembangunan SDM Unggul;
4. Meningkatnya kualitas dan daya saing generasi muda.

Tujuan 2

Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif (Smart Government), dengan sasaran:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
2. Meningkatnya Kualitas Kebijakan;
3. Terwujudnya ASN yang memiliki integritas tinggi berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta menguatnya sistem pengendalian internal pemerintah.

Tujuan 3

Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, nyaman, efisien dan layak huni (Smart Living) dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas hunian masyarakat;
2. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar;
3. Menurunnya resiko bencana di seluruh wilayah.

Tujuan 4

Terwujudnya layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas (Smart Health) dengan sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Tujuan 5

Terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan (Smart Environment), dengan sasaran:

1. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca ;
2. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan.

Tujuan 6

Terwujudnya ekosistem perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah (Smart Economy), dengan sasaran:

1. Terciptanya akselerasi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan Sosial;
2. Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
3. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah;
4. Menguatnya Stabilitas Daerah.

Tujuan 7

Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi;
2. Meningkatnya kualitas jalan;
3. Meningkatnya kualitas ruang kota.

Program Prioritas/Unggulan

Selanjutnya, Implementasi visi dan misi diterjemahkan kedalam program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Bogor Cerdas

- a. Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru.
- b. Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu.
- c. Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur.
- d. Meningkatkan gaji dan fasilitas guru honorer.
- e. Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu.
- f. Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal.
- g. Memfasilitasi akses beasiswa LPDP dan dari berbagai lembaga.

2. Bogor Sehat

- a. Pemeriksaan kesehatan gratis
- b. Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas
- c. Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan subspesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya.
- d. Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat
- e. Membuat sistem pelayanan rujukan yang terpusat dan terintegrasi ke seluruh Rumah sakit di dalam dan diluar Kota Bogor
- f. Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin
- g. Menyediakan layanan armada ambulan gratis di setiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling
- h. Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas & lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling
- i. Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur
- j. Penyediaan fasilitas & armada angkutan sampah yang layak & memadai
- k. Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
- l. Peningkatan kualitas sanitasi ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan
- m. Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan ekspos perubahan iklim dan resiko bencana.

3. Bogor Sejahtera

- a. Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional.
- b. Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor
- c. Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan

- d. Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya local
- e. Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)
- f. Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif
- g. Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas
- h. Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu
- i. Memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin
- j. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
- k. Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online berkolaborasi dengan aparaturnya penegak hukum dan wilayah
- l. Memberikan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Yang Berhadapan dengan Hukum.

4. Bogor Lancar

- a. Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik
- b. Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda
- c. Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
- d. Promosi Penggunaan Transportasi Umum: Melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum dengan memperkenalkan program-program insentif seperti tarif terjangkau atau diskon untuk pelajar dan pekerja
- e. Pemasangan CCTV di lokasi-lokasi strategis untuk keamanan dan pemantauan arus lalu lintas.
- f. Pemasangan Wifi gratis di seluruh Fasilitas publik
- g. Pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat di 4 kecamatan

- h. Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Kebon Pedes
- i. Pembangunan gedung pemerintahan terpadu
- j. Revitalisasi GOR Padjadjaran Menjadi Pusat Olahraga dan Gedung kreatif dan seni terpadu
- k. Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi

4.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bogor

Tujuan dan sasaran pembangunan dicapai melalui penetapan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah pemahaman yang diperlukan oleh pemerintah daerah Kota Bogor untuk mengelola setiap program kegiatannya dengan menyusun metode, tahapan, atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Rumusan strategi berisi pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan, dan merupakan salah satu referensi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan rancangan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bogor

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 1 Terwujudnya BOGOR CERDAS	: Terwujudnya sumberdaya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi (Smart People)		Indeks Pendidikan	73,28	73,35	73,43	73,49	73,59	73,64
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	54,70 - 54,73	55,29 - 55,33	55,89 - 55,95	56,49 - 56,56	57,09 - 57,18	57,69 - 57,79
			Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan	58,87	58,92	58,97	59,02	59,07	59,12
		Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui Wajib Belajar 13 tahun	Harapan lama Sekolah	13,53	13,54	13,56	13,57	13,59	13,6
			Rerata Capaian Pembelajaran (Average Harmonized Test Scores)	74,28	74,35	74,41	74,47	74,53	74,6
		Meningkatnya pemajuan Kebudayaan Bangsa	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	7,85	8,63	9,41	10,2	10,98	11,76
		Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan Keluarga sebagai pilar utama penggerak pembangunan SDM Unggul	Indeks Pembangunan Keluarga	62,91	63,11	63,21	63,31	63,41	63,51
		Meningkatnya kualitas dan daya saing generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda	65,87	65,71	65,75	65,79	65,81	65,85
			Indeks reformasi Birokrasi	90,38	90,4	90,5	90,75	91	91,01

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif (Smart Government)	Terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	4,09	4,1	4,11	4,12	4,13	4,14
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	67,5	67,5	70	70	72,5	72,5
		Terwujudnya ASN yang memiliki integritas tinggi berorientasi pada pelayanan, akuntable, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif	Nilai hasil survey penilaian integritas	77,83	78,12	78,41	78,7	78,99	79,28
			Indeks Berakhlak	74,6	76,1	77,6	78,5	79	80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69	4,7
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta menguatnya sistem pengendalian internal pemerintah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			SAKIP Tingkat Kota	BB (77,50)	BB (78,25)	BB (78,50)	BB (79,00)	BB (79,50)	A (80,01)
Misi 2: Terwujudnya BOGOR SEHAT	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, nyaman, efisien dan layak huni (Smart Living)		Predikat Kota Sehat	Swastisaba Wistara	Swastisaba Wistara	Swastisaba Wistara	Swastisaba Wistara	Swastisaba Wistara	Swastisaba Wistara
		Meningkatnya kualitas hunian masyarakat	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	52,4	53,62	54,84	56,06	57,27	59,94
			Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan	72,8	73,8	74,8	75,8	76,8	77,8

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar	Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%)						
			Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	6,27	6,49	6,7	6,91	7,12	7,25
		Menurunnya resiko bencana di seluruh wilayah	Indeks Resiko Bencana	58,03	58,02	60	59	58,07	58,02
	Terwujudnya layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas (Smart Health)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	86,05	86,37	86,69	87,01	87,34	87,66
			Umur Harapan Hidup	75,93	76,14	76,35	76,56	76,77	76,98
			Prevalensi Stunting (Data BPB)	2,3	2,25	2,2	2,15	2,1	2,1
			Prevalensi Stunting	15,93	14,97	14,08	13,23	12,44	11,69
	terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan (Smart Environment)		Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO ₂ Eq/Miliar)	0,38	0,71	1,05	1,48	2,07	2,51
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,84	58,09	58,34	58,6	58,85	58,85
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO ₂ Eq)	21.798,45	35.147,05	53.794,32	82.180,71	130.547,42	191.425,41
		Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks kualitas udara	55,63	56,03	56,43	56,83	57,23	57,23
			Indeks Kualitas Air	71,3	71,5	71,7	71,9	72,1	72,1
			Indeks kualitas Tutupan lahan	38,81	38,88	38,95	39,02	39,09	39,09
	Terwujudnya ekosistem perekonomian		Gini Rasio	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,58	5,86	6,15	6,46	6,78	7,12

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 3 : Terwujudnya Bogor Sejahtera	daerah yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah (Smart Economy)		Indeks Ekonomi Hijau	66,6	66,65	66,7	66,75	66,8	66,85
			Indeks akses keuangan daerah (IKAD)	6,76	6,8	6,85	6,9	6,95	7,05
		Terciptanya akselerasi penanggulangan kemiskinan & peningkatan kesejahteraan Sosial	Angka Kemiskinan	6,44	6	5,38	4,64	3,85	3,65
		Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,13	7,99	7,98	7,94	7,91	7,86
			Laju PDRB sektor Jasa akomodasi dan Makan Minum (ADHB)	5,19	5,27	5,34	5,41	5,49	5,57
			Laju PDRB Sektor Perdagangan	19,02	18,97	18,94	18,93	18,92	18,91
			Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan	18,70	18,74	18,77	18,80	18,87	18,90
			Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)	34,7	34,76	34,82	34,88	34,94	34,99
		Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	69,14	71,65	74,26	76,96	79,75	82,63
		Menguatnya Stabilitas Daerah	Tingkat Inflasi (%)	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
			Kapasitas fiskal daerah	2	2	2	2	2	2
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	80,9	81,21	81,51	81,82	82,13	82,13
			IDSD (Pilar Infrastruktur)	4,73	4,75	4,77	4,79	4,8	4,8

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 4 Terwujudnya BOGOR LANCAR	: Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,55
		Meningkatnya kualitas jalan	Presentase Jalan dalam Kondisi Mantap	90,04	90,05	90,06	90,07	90,08	90,09
		Meningkatnya kualitas ruang kota	Persentase ketercapaian rencana struktur ruang	52,47	53,47	54,47	55,47	56,47	57,47

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

Tabel 4.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan RKPD Kota Bogor Tahun 2026

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1	Terwujudnya sumberdaya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi (Smart People)		
	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui Wajib Belajar 13 tahun	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berstandar Nasional: Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru untuk meningkatkan daya tampung serta mengembangkan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif dari tingkat dasar hingga menengah.
			Transformasi Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Meningkatkan literasi dan edukasi melalui inovasi kurikulum berbasis TIK serta mengintegrasikan model pembelajaran hybrid dan digital untuk memperluas akses pendidikan.
			Penguatan Kompetensi Pendidik yang Adaptif dan Modern: Meningkatkan gaji dan fasilitas bagi guru honorer serta memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran digital dan inovatif.

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Pengembangan Kurikulum Berbasis Sains Kreatif dan Design Thinking dengan merancang kurikulum yang menekankan kreativitas, pemecahan masalah, dan inovasi serta memastikan materi ajar sesuai dengan standar industri dan perkembangan ilmu pengetahuan global.
			Penguatan Sistem Penjaminan Mutu dan Tata Kelola Pendidikan Daerah dengan memastikan setiap siswa yang lulus pendidikan formal dan non-formal (SD, SMP) mendapatkan ijazah serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
			Pemerataan dan Peningkatan Akses Pendidikan di Semua Jenjang dengan memberikan subsidi biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu di SD dan SMP serta memastikan inklusivitas dalam pendidikan, terutama bagi kelompok rentan dan daerah terpencil.
			Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi Melalui Beasiswa dan Kerja Sama Akademik dengan memperluas beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu serta membangun kerja sama dengan perguruan tinggi nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas lulusan.
			Pengembangan Fasilitas Sekolah Berbasis Sains Kreatif melalui penyediaan laboratorium dan ruang inovasi untuk mendukung pengembangan sains kreatif serta mendorong integrasi teknologi dan metode pembelajaran interaktif dalam proses pengajaran.
	Meningkatnya pemajuan Kebudayaan Bangsa;	Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan bangsa	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan ber standar Nasional Perpustakaan (SNP)
			Peningkatan kualitas pemerataan, pembinaan perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat dalam peningkatan literasi masyarakat dengan memperluas akses terhadap perpustakaan, meningkatkan koleksi buku, serta mendorong program literasi berbasis komunitas.
			Peningkatan penyelenggaraan pengembangan kebudayaan melalui festival budaya, pertunjukan seni, dan program edukasi berbasis kearifan lokal untuk melestarikan warisan budaya.
			Peningkatan jumlah pelaku dan lembaga kesenian tradisional dalam pelestarian seni dan budaya dengan memberikan pelatihan, fasilitasi akses panggung, dan dukungan finansial bagi seniman tradisional.
			Peningkatan pembinaan sejarah melalui edukasi sejarah bagi masyarakat, peningkatan dokumentasi sejarah lokal, serta penguatan kurikulum sejarah di lembaga pendidikan.
			Peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan revitalisasi situs bersejarah, perlindungan dari ancaman kerusakan, serta promosi nilai budaya kepada masyarakat luas.

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Peningkatan kunjungan ke museum melalui modernisasi museum, peningkatan koleksi dan daya tarik wisata edukatif, serta program edukasi berbasis pengalaman bagi pengunjung.
	Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan Keluarga sebagai pilar utama penggerak pembangunan SDM Unggul;	Meningkatkan kesejahteraan keluarga	Peningkatan kualitas pembinaan dan pendampingan keluarga melalui penyuluhan keluarga, program parenting berbasis riset, serta layanan konseling bagi keluarga yang menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi.
			Pengendalian jumlah penduduk dengan mengoptimalkan program Keluarga Berencana (KB), edukasi kesehatan reproduksi, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang mendukung keseimbangan pertumbuhan penduduk.
		Meningkatkan kualitas legalitas struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya dalam keluarga	Peningkatan kualitas keluarga melalui program edukasi keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta penguatan ketahanan keluarga berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai sosial.
		Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak	Pemenuhan hak anak dengan memastikan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lingkungan yang aman, serta program perlindungan sosial untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
			Perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi dengan memperkuat regulasi, layanan rehabilitasi korban, serta kampanye pencegahan kekerasan berbasis komunitas.
	Meningkatnya kualitas dan daya saing generasi muda	Meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda	Peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan dengan memperluas akses beasiswa, pelatihan vokasi, dan program magang di sektor industri kreatif dan teknologi.
			Penguatan kepemimpinan dan karakter pemuda melalui program mentorship, pelatihan kepemimpinan, serta fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan untuk membentuk pemimpin muda yang berintegritas dan inovatif.
			Peningkatan prestasi pemuda dalam bidang olahraga, seni, dan sains dengan menyediakan pelatihan intensif, dukungan fasilitas, serta kompetisi berjenjang dari tingkat lokal hingga internasional.
			Pengembangan ekosistem inovasi dan kewirausahaan pemuda melalui inkubasi bisnis, startup hub, serta akses pendanaan bagi pemuda berbakat di bidang teknologi, ekonomi kreatif, dan bisnis berkelanjutan.

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Revitalisasi GOR Pajajaran menjadi pusat olahraga dan gedung kreatif terpadu untuk mendukung pengembangan bakat pemuda dalam bidang olahraga, seni, dan budaya dengan fasilitas yang modern dan kompetitif.
			Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah dan nasional dengan memperluas keterlibatan pemuda dalam perumusan kebijakan, program pembangunan berkelanjutan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan.
			Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi bagi pemuda dengan membangun platform digital untuk pengembangan keterampilan, kolaborasi kreatif, dan jejaring global dalam bidang akademik, bisnis, serta inovasi sosial.
Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif (Smart Government)			
Terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik		Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart government dengan memperkuat sistem digitalisasi layanan, memperluas akses e-government, serta membangun sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan penguatan pemerintahan digital melalui audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), optimalisasi platform layanan terpadu, serta peningkatan responsivitas terhadap laporan masyarakat.
			Penguatan infrastruktur dan literasi digital untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor prioritasdengan membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merata, meningkatkan pemanfaatan teknologi di sektor strategis, serta memperluas edukasi digital bagi masyarakat.
			Pengembangan smart city yang inklusif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan Internet of Things (IoT), menerapkan konsep ekonomi sirkular, memperluas jaringan internet di area blankspot, serta membangun command center, CCTV di lokasi strategis, dan Wi-Fi gratis di fasilitas publik untuk meningkatkan keamanan dan aksesibilitas layanan masyarakat.
	Peningkatan Kualitas Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi		Optimalisasi sistem keamanan digital dalam pemerintahan berbasis elektronik melalui enkripsi data, penguatan firewall, serta penerapan teknologi blockchain
			Peningkatan penerapan keamanan informasi di pemerintah kota dengan memperkuat sistem proteksi data, implementasi standar keamanan siber, serta membangun pusat keamanan informasi

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Penguatan regulasi dan kebijakan tata kelola keamanan informasi
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan data statistik sektoral	Peningkatan pengelolaan satu data Indonesia dan statistik sektoral
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
		Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD	Optimalisasi Peran Sekretariat DPRD dalam Fasilitasi Komunikasi Politik dan Hubungan Kelembagaan, Penguatan Kemitraan antara DPRD, Eksekutif, dan Masyarakat Sipil,
		Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan melalui
			1. Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan
			2. Pelayanan jemput bola perizinan
			3. Penguatan sarana prasarana pelayanan publik
			Peningkatan kualitas layanan protokol dan komunikasi pimpinan
		Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas	Peningkatan pemanfaatan sistem informasi pengadaan barang dan jasa, menguatnya SDM dan kelembagaan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
		Terwujudnya Percepatan pelaksanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Arsip Daerah dan Arsip Perangkat Daerah
			Peningkatan kualitas penyelamatan dan pelestarian arsip
			Peningkatan kualitas pemanfaatan Arsip
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Peningkatan Pemanfaatan hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman
			Penyusunan roadmap sains kreatif
			Pembentukan design council dan forum sains kreatif

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian terapan melalui modernisasi laboratorium, penyediaan fasilitas riset yang memadai, serta penguatan infrastruktur teknologi untuk menunjang inovasi ekonomi berbasis sains.
			Peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM peneliti dengan mendorong peningkatan kapasitas akademik, memberikan insentif bagi peneliti dan inovator, serta memperkuat ekosistem riset berbasis kolaborasi lintas sektor.
			Pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi terapan melalui digitalisasi hasil riset, peningkatan akses bagi industri dan UMKM terhadap inovasi teknologi, serta membangun ekosistem transfer teknologi yang lebih inklusif.
			Inisiasi Innovation Valley Kota Bogor dan penguatan kolaborasi dalam ekosistem sains kreatif dengan menjadikan Kota Bogor sebagai University Town yang mendorong sinergi antara lembaga penelitian, universitas, komunitas sains kreatif, serta sektor industri guna mempercepat penerapan hasil riset dalam dunia usaha.
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan pemanfaatan produk hukum daerah serta kualitas layanan bantuan hukum	Peningkatan penyelenggaraan penataan produk hukum daerah dan bantuan hukum daerah
			Peningkatan kualitas layanan bantuan hukum
		Meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Perangkat Daerah	Peningkatan unit kerja yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM
	Terwujudnya ASN yang memiliki integritas tinggi berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif	Terciptanya Manajemen ASN Yang Memiliki Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Yang Diberlakukan Secara Adil dan Wajar Tanpa Diskriminasi.	Peningkatan kualitas pengelolaan SDM Aparatur Peningkatan kompetensi SDM Aparatur
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Adaptif dan Responsif, Reformasi Birokrasi Berbasis Digital dan Inovasi Pelayanan Publik, Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		Meningkatkan kinerja pelayanan publik di wilayah Kecamatan	Pemeliharaan Kantor Kecamatan Bogor Barat dan beberapa kelurahan termasuk Kel. Loji, Kel. Gunung Batu, Kelurahan Bubulak, Kel. Pasir Jaya, serta pembebasan lahan dan pembangunan Kantor Kel. Situgede guna meningkatkan pelayanan administratif bagi masyarakat.
			Pemeliharaan Kantor Kecamatan Bogor Selatan dan sejumlah kelurahan seperti Kel. Batu Tulis, Kel. Bojongkerta, Kel. Bondongan, Kel. Cikaret, Kel. Cipaku, Kel. Empang, Kel. Genteng, Kel. Harjasari, Kel. Kertamaya, Kel. Lawang Gintung, Kel. Muarasari, Kel. Mulyaharja, Kel. Pamoyanan, Kel. Rancamaya, Kel. Ranga Mekar, serta pengadaan Kantor Kel. Pakuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik.
			Pemeliharaan Kantor Kecamatan Bogor Utara dan beberapa kelurahan seperti Kel. Bantarjati, Kel. Cibuluh, Kel. Ciluar, Kel. Cimahpar, Kel. Ciparigi, Kel. Kedunghalang, Kel. Tanah Baru, dan Kel. Tegal Gundil dalam rangka memperkuat sarana pelayanan pemerintahan daerah.
			Pemeliharaan kantor kelurahan di wilayah pusat Kota Bogor, termasuk Kel. Pabaton, Kel. Sempur, Kel. Babakan, Kel. Tegal Lega, Kel. Kebon Kelapa, Kel. Paledang, Kel. Babakan Pasar, Kel. Gudang, dan Kel. Cibogor guna meningkatkan kenyamanan serta efisiensi pelayanan publik.
			Pemeliharaan dan pembangunan kantor kelurahan di wilayah timur meliputi Kel. Baranangsiang, Kel. Sindangrasa, DED dan pembangunan Kel. Sindangsari, serta pemeliharaan Kel. Katulampa dan Kel. Sukasari untuk memperkuat infrastruktur pelayanan masyarakat.
			Pembangunan Kantor Kel. Sukaresmi serta pemeliharaan sejumlah kelurahan lainnya seperti Kel. Sukadamai, Kel. Mekarwangi, Kel. Tanah Saeral, Kel. Kedungjaya, Kel. Kencana, dan Kel. Cibadak dalam rangka meningkatkan kapasitas serta efektivitas pelayanan pemerintahan lokal.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama daerah	Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta menguatnya sistem pengendalian internal pemerintah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan prestasi kerja pemerintah melalui penerapan transparansi anggaran, penguatan sistem akuntabilitas keuangan daerah, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
			Peningkatan penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dengan pendekatan digitalisasi manajemen aset, inventarisasi dan legalisasi aset strategis, serta optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan efisiensi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui peningkatan literasi kebijakan publik, keterlibatan dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif, serta penguatan mekanisme kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas perencanaan lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan
			Peningkatan kualitas perencanaan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Peningkatan pencapaian kinerja pembangunan daerah
			Peningkatan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan
			Peningkatan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama daerah	Optimalisasi pencapaian pelaksanaan program dan SPM di setiap urusan pemerintahan dan penguatan kerjasama daerah
2	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, nyaman, efisien dan layak huni (Smart Living)	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kematangan SPIP Perangkat Daerah	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Integrasi dan Sinergi Pengawasan Intern dengan Manajemen Risiko.
		Meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Perangkat Daerah	Peningkatan unit kerja yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	Meningkatnya kualitas hunian masyarakat	Meningkatkan Kualitas Perumahan layak Huni	Peningkatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pembinaan dan pengawasan melalui penguatan sistem audit internal, peningkatan kapasitas SDM auditor, serta penerapan teknologi dalam monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan.
		Meningkatkan Rumah Layak Huni	Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh melalui program rehabilitasi permukiman, peningkatan akses sanitasi, penyediaan infrastruktur permukiman, serta pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas hunian.
			Optimalisasi pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dengan penyediaan skema bantuan hunian berbasis kebutuhan korban, percepatan rehabilitasi pascabencana, serta penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan permukiman terhadap risiko bencana.
		Berkurangnya luasan kawasan kumuh kewenangan Kota	Meningkatkan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) guna mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan penyediaan infrastruktur dasar, optimalisasi tata ruang, serta pemenuhan aksesibilitas bagi masyarakat.
			Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni dan berkurangnya luas kawasan kumuh dengan program rehabilitasi rumah bagi warga berpenghasilan rendah, percepatan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta penataan kawasan padat penduduk dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat.
	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar;	Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan sanitasi	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bogor melalui peningkatan kapasitas produksi dan distribusi air bersih oleh PDAM Tirta Pakuan, perluasan jaringan perpipaan, optimalisasi sumber air baku, serta penerapan teknologi pengolahan air ramah lingkungan
			Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dengan memperluas jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak, mengembangkan kebijakan pengelolaan air limbah berbasis kawasan, serta mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan terhadap pembuangan limbah rumah tangga dan industri kecil di Kota Bogor.
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air di Kota Bogor dengan konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, Cisadane, dan sungai-sungai lainnya, penguatan sistem peringatan dini terhadap risiko banjir dan krisis air, serta peningkatan kolaborasi antar-institusi dalam pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan air di Kota Bogor.
	Menurunnya resiko bencana di seluruh wilayah	Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana	Optimalisasi upaya pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas mitigasi bencana berbasis komunitas di daerah rawan longsor dan banjir seperti wilayah Bogor Selatan dan Bogor Barat, membangun

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			infrastruktur tahan bencana, serta memperkuat sistem peringatan dini untuk bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Kota Bogor.
		Meningkatkan respons time penanganan kebakaran serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Optimalisasi pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran serta non-kebakaran melalui peningkatan kapasitas dan jumlah pos pemadam kebakaran di kecamatan yang memiliki permukiman padat seperti Bogor Tengah dan Bogor Utara, modernisasi armada dan peralatan pemadam kebakaran, serta penguatan edukasi masyarakat terkait pencegahan kebakaran dan respons cepat terhadap keadaan darurat.
		Meningkatkan pembudayaan Olah raga dan peningkatan kapasitas serta daya saing olahraga	Meningkatkan fasilitas olahraga yang sesuai standar, aman, dan inklusif, Meningkatkan event olahraga sebagai sarana promosi pariwisata dan ekonomi lokal.
Terwujudnya layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas (Smart Health)			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga	Terpenuhinya SDM Kesehatan Unggul
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana kefarmasian, alat kesehatan dan produk makanan minuman yang memenuhi standar kesehatan
			Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat
			Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
		Meningkatkan pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta tersedia dalam jumlah cukup, terdistribusi merata, dan harga terjangkau	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pangan Masyarakat
			Peningkatan kualitas pangan segar asal tumbuhan
			Peningkatan kualitas pangan asal hewan
		Meningkatkan akses pangan masyarakat	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan
		Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Percepatan penuntasan stunting, dan kelebihan gizi melalui peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam, pengayaan zat gizi, dan jaminan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan
			Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
		Meningkatkan kesehatan reproduksi pasangan usia subur	Peningkatan kesertaan ber-KB
			Menurunnya angka kelahiran pada usia remaja
	Terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan (Smart Environment)		
	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang	Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang
		Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah	Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Kota Bogor
		Meningkatkan Reduksi Sampah di sumber	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui optimalisasi program bank sampah, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) di setiap kecamatan, serta penguatan peran masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
	Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Meningkatkan Kualitas Pengolahan Sampah di fasilitas pengolahan sampah	Penyediaan fasilitas dan armada angkutan sampah yang layak dan memadai dengan penambahan unit truk sampah, peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga dengan pendekatan sanitary landfill, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah modern seperti RDF (Refuse-Derived Fuel) untuk mengurangi ketergantungan pada lahan pembuangan sampah.
			Perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan ekspos perubahan iklim dan risiko bencana dengan penerapan konsep kota hijau (green city), penataan kawasan sempadan sungai dan daerah rawan bencana seperti Bogor Selatan dan Bogor Barat, serta integrasi strategi mitigasi perubahan iklim dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor.
Terkendalinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup		Peningkatan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	
		Peningkatan responsivitas penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Peningkatan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
			Meningkatnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Peningkatan Pemahaman Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Kegiatan/Usaha Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga yang melakukan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
			Peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup
		Meningkatkan konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Peningkatan kualitas pengelolaan Ruang terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung
5	Terwujudnya ekosistem perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah (Smart Economy)		
	Terciptanya akselerasi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi masyarakat pemerlu Kesejahteraan Sosial
			Peningkatan pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat pemerlu kesejahteraan sosial
			Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana
			Peningkatan keterpaduan dan ketepatan sasaran intervensi program pengentasan kemiskinan
			Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat
		Meningkatkan Kualitas Kesehatan Keluarga	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi layanan di Puskesmas dan RSUD, penyediaan layanan kesehatan berbasis teknologi (telemedicine), serta peningkatan cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan rentan.
		Meningkatkan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Penguatan Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berbasis Data dan Evidence-Based Policy

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Peningkatan Keterbukaan Kesempatan Kerja
			Peningkatan kompetensi Para Pencari Kerja
		Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Peningkatan Kualitas Kebijakan dan kualitas layanan penyelesaian kasus di Sektor Ketenagakerjaan
		Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif	Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan sebagai pusat ekonomi lokal berbasis wisata kuliner dengan melibatkan komunitas setempat serta mendukung produk khas daerah.
			Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya tarik wisata berbasis budaya lokal, dengan menata infrastruktur, meningkatkan branding wisata, serta menjadikannya sebagai ruang kreatif bagi masyarakat untuk menampilkan seni dan budaya.
			Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam akses permodalan dan pemasaran melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di setiap kelurahan, regulasi yang mendorong ASN membeli produk UMKM, serta kemitraan dengan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar.
			Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk mendorong pelaku usaha baru naik kelas dengan menyediakan pelatihan, mentoring bisnis, serta akses ke jaringan investor dan pasar global.
			Penyediaan portal akses promosi dan pemasaran bagi UMKM dan industri kreatif dengan membangun platform digital yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen serta meningkatkan literasi digital bagi UMKM agar mampu bersaing di era e-commerce.
			Revitalisasi GOR Pajajaran menjadi pusat olahraga dan gedung kreatif serta seni budaya dengan konsep multi-fungsi, termasuk ruang pameran seni, coworking space bagi pelaku industri kreatif, serta fasilitas olahraga yang lebih modern dan inklusif.
		Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah	Peningkatan kualitas usaha dan pendapatan UMKM
			Peningkatan pemberdayaan usaha mikro dan usaha ultra mikro
			Peningkatan pelayanan Izin Usaha simpan pinjam
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
			Peningkatan kualitas pengawasan dan pemeriksaan koperasi
			Peningkatan penilaian kesehatan Koperasi
			Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
		Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan perekonomian daerah	Peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan sektor UMKM
		Meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan Pemasaran Produk Dalam negeri
		Optimalisasi pembinaan pada sektor perdagangan	Peningkatan nilai penjualan produk ke Luar negeri (Ekspor)
			Peningkatan peningkatan sarana distribusi perdagangan
			Optimalisasi pengawasan dan pengendalian perizinan serta pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan
			Peningkatan pengawasan terhadap standarisasi sarana perdagangan
		Meningkatkan IKM Berdayasaing	Peningkatan perusahaan industri yang terdaftar dalam sistem informasi industri nasional (SIINas)
			Peningkatan pengembangan Industri Kecil Menengah
		Meningkatkan fasilitasi penanaman modal	Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan dan Non perizinan
		Membangun ekosistem halal terintegrasi	Peningkatan realisasi Halal Food Center, peningkatan sertifikasi produk UMKM, penguatan literasi halal, dan pengembangan pariwisata syariah, dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Bogor sebagai destinasi halal unggulan.
	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan akses pangan masyarakat	Penurunan jumlah penduduk rawan pangan melalui optimalisasi program ketahanan pangan berbasis urban farming, penguatan distribusi pangan murah, serta pengembangan sistem data dan informasi ketahanan pangan yang terintegrasi dengan program kesejahteraan sosial.
			Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pangan Masyarakat

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		Meningkatkan pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta tersedia dalam jumlah cukup, terdistribusi merata, dan harga terjangkau	Peningkatan kualitas pangan segar asal tumbuhan
			Peningkatan kualitas pangan asal hewan
		Meningkatkan akses pangan masyarakat	Penurunan jumlah penduduk rawan pangan
			Peningkatan Pemberdayaan pembudidaya ikan
			Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan
			Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
			Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
			Peningkatan Penyuluhan Pertanian
	Menguatnya Stabilitas Daerah	Terkendalinya Inflasi Daerah	Optimalisasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah
		Terkendalinya harga kebutuhan pokok dan barang penting	Peningkatan pengawasan terhadap stabilitas harga bahan pokok dan barang penting
		Meningkatkan realisasi PAD	Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
		Optimalisasi Kinerja BUMD	Peningkatan kinerja BUMD dan kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan BUMD
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
			Peningkatan kompetensi anggota satpol pp dan Linmas
			Peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah
		Meningkatkan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	optimalisasi ketepatan sasaran intervensi program kesejahteraan rakyat di bidang pelayanan dasar dan pelayanan non dasar

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial
			Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan
			Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Peningkatan peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
			Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Optimalisasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Peningkatan kualitas pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah		
	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan	Peningkatan produktivitas di berbagai sektor perekonomian melalui investasi di bidang teknologi, inovasi, dan infrastruktur dengan mendorong penerapan teknologi dalam sektor industri, pertanian, dan jasa, serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital dan smart economy.
			Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi jaringan produksi dan distribusi dengan memperbaiki konektivitas antarwilayah, optimalisasi logistic hub, dan modernisasi sistem distribusi barang untuk mendukung daya saing ekonomi lokal dan global.
			Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau dengan membangun kawasan berbasis TOD yang terintegrasi dengan pusat bisnis dan permukiman, serta mendorong pemanfaatan kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya.
			Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan dengan peningkatan layanan angkutan umum yang terjangkau, ramah lingkungan, dan terkoneksi dengan moda transportasi lainnya untuk mengurangi kemacetan dan emisi karbon.
			Peningkatan pengelolaan Perlintasan kereta api dalam daerah kota
	Meningkatnya kualitas jalan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan diantaranya dengan Pembangunan Fly Over Bondes, Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi, Pembangunan gedung pemerintahan terpadu

No	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		Meningkatkan kualitas drainase	Peningkatan kualitas drainase, Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Drainase secara Teknis dan Fungsional.
		Terwujudnya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkualitas	Peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas
	Meningkatnya kualitas ruang kota	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang wilayah	Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung
			Peningkatan kualitas penataan bangunan dan lingkungan

Sumber : Analisis Bapperida, 2025

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2026

Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah kota Bogor Tahun 2026 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran Pembangunan nasional, isu strategis daerah, prioritas Pembangunan daerah dan arah kebijakan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029.

4.2.1. Isu strategis dan Tema Pembangunan Kota Bogor Tahun 2026

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rancangan RPJMD guna melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Perumusan isu strategis Kota Bogor Tahun 2026 diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2024;
2. Kondisi terkini Tahun 2026;
3. Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025 – 2029;
4. Arah kebijakan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026;
5. Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat Tahun 2025 – 2029.
6. Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Ditetapkan isu strategis Pembangunan Kota Bogor sebagai berikut:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan yakni sebagai modalitas utama pembangunan daerah Kota Bogor. Dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana masyarakat/penduduk Kota Bogor dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

IPM Kota Bogor memiliki tren yang terus meningkat sejak tahun 2019 s.d tahun 2024. IPM Kota Bogor mengalami fluktuasi kecil di awal, dengan sedikit penurunan dari 76,23 pada tahun 2019 menjadi 76,11 pada tahun 2020. Namun, tren meningkat cukup signifikan pada tahun 2021, mencapai 76,59. Tren kenaikan berlanjut menjadi 77,17 pada tahun 2022, 78,36 pada tahun 2023, dan akhirnya mencapai 79,03 pada tahun 2024. Semakin tingginya nilai IPM di Kota Bogor mencerminkan bahwa kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. Kenaikan IPM ini dapat menunjukkan keberhasilan berbagai kebijakan pembangunan, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, program pendidikan yang lebih baik, serta pertumbuhan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga peningkatan layanan-layanan tersebut, target IPM tahun 2026 ditargetkan sebesar 79,98.

Indikator penting dalam pembangunan manusia adalah Prevelensi stunting karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Tingkat prevelensi stunting di Kota Bogor pembangunan manusia di Kota Bogor juga menunjukkan hasil tren yang positif, Pada Tahun 2020, tercatat capaian stunting kota Bogor sebesar 10,66%, kemudian turun drastis menjadi 5,33% pada tahun 2021. Penurunan terus berlanjut dengan angka 3,25% pada tahun 2022, 2,59% pada tahun 2023 hingga mencapai angka 2,32% di tahun 2024. Tren penurunan ini menandakan bahwa program peningkatan kualitas gizi, layanan kesehatan anak, serta edukasi kepada masyarakat telah berjalan dengan baik. Berbagai intervensi yang dilakukan berupa peningkatan cakupan imunisasi, penyuluhan pola makan sehat, serta penguatan akses terhadap fasilitas kesehatan ibu dan anak terus dilakukan, target capaian stunting pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 2,25 %.

2. Identitas Kota Bogor dari Aspek Sains dan Sejarah

Kota Bogor mempunyai aspek kesejarahan cukup kental dan turut mewarnai pembangunannya hingga kini. Salah satu karakter Kota Bogor yang tak lekang oleh zaman adalah sebagai pusat sains. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu simbol perkembangan sains di Kota Bogor. Reputasi sejarah dari Kebun Raya Bogor, yang didirikan pada 18 Mei 1817, melahirkan banyak lembaga penelitian dan menjadi pusat penelitian biologi tropis kelas dunia, termasuk suatu institusi pendidikan di bidang pertanian yang sekarang bernama Institut Pertanian Bogor.

Sains dan sejarah merupakan unsur penting pembentuk karakteristik Kota Bogor dari sisi sosial dan kebudayaan. Namun, dimensi ini juga mempunyai nilai ekonomi, salah satunya adalah melalui pengembangan pariwisata. Pariwisata yang mengedepankan edukasi akan sangat terkait dengan potensi sains dan sejarah Kota Bogor. Selain itu, jika sains dan pembangunan Kota Bogor dapat terkoneksi dengan baik, potensi untuk mengembangkan riset dan inovasi sebagai basis pembangunan kota akan semakin tumbuh.

3. Transformasi Ekonomi dan Masyarakat

Transformasi ekonomi kota Bogor yang secara gradual semakin menguat di sektor jasa, termasuk dalam hal ini adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, ekonomi hijau juga menjadi bagian penting arah pembangunan ekonomi Kota Bogor ke depan dengan memperkuat pengembangan ekonomi sirkular di sektor persampahan. Peletakan awal fondasi transformasi ekonomi ini perlu mengedepankan kombinasi antara daya saing dengan inklusivitas, termasuk inklusif gender. Daya saing menandakan tingkatan kualitas adapun inklusivitas memberikan makna pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dari beragam potensi yang ada.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpotensi mengurangi kemiskinan, karena dapat meningkatkan lapangan kerja dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor, pada tahun 2020, memperoleh angka negatif karena pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kota Bogor mencatat pertumbuhan sebesar 3,76 persen, yang terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 5,65 persen. Pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 5,10 persen. Kemudian Tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor kembali mengalami peningkatan yakni 5,15 persen. Berdasarkan capaian tersebut dan kondisi ekonomi terkini, target LPE tahun 2026 ditetapkan sebesar 5,86%.

Kemudian, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perkembangan TPT Kota Bogor cenderung mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2024. Meskipun terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020, namun nilai TPT pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kondisi yang relatif baik karena semakin rendah angka TPT menunjukkan bahwa pemerintah telah mampu menurunkan tingkat pengangguran diantara penduduk pada usia angkatan kerja. Pada tahun 2019, TPT berada di angka 9,1%, namun meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 12,68%. Lonjakan ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak usaha tutup, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta terbatasnya kesempatan kerja akibat perlambatan ekonomi. Pada tahun 2021, angka pengangguran sedikit menurun

menjadi 11,79%, menunjukkan awal dari pemulihan ekonomi meskipun masih berada di tingkat yang cukup tinggi. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan TPT sebesar 10,78%, lalu semakin membaik pada tahun 2023 dengan 9,39%, hingga akhirnya mencapai 8,13% pada tahun 2024. Intervensi terus dilakukan, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan Target TPT tahun 2026 adalah sebesar 7,99%.

Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu namun juga pada kesejahteraan keluarga dan stabilitas ekonomi secara luas, salah satunya adalah meningkatnya resiko kemiskinan, Tingkat kemiskinan Kota Bogor jika dibandingkan dengan wilayah pembandingnya menunjukkan posisi yang cenderung menengah. Kota Bogor sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebagai dampak dari pandemi COVID-19, yaitu dari 6,68 persen pada tahun 2020 menjadi 7,24 persen di tahun 2021. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan daerah, tren penurunan mulai terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, angka kemiskinan Kota Bogor turun menjadi 7,10 persen, lalu menjadi 6,67 persen pada tahun 2023, dan kembali turun menjadi 6,53 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut menjadi acuan menentukan target kedepan, pada tahun 2026 target angka kemiskinan ditargetkan sebesar 6 %.

Terakhir, Indeks Gini Kota Bogor selama tahun 2019-2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2019 capaian Indeks Gini sebesar 0,386 dan di tahun 2024 mencapai 0,47. Peningkatan yang terus terjadi sejak tahun 2019 hingga tahun 2021, mencerminkan semakin timpangnya perekonomian di Kota Bogor. Namun, penurunan nilai Indeks Gini terjadi pada tahun 2022 yaitu menjadi sebesar 0,43. Namun pada tahun 2023 hingga 2024, nilai Indeks Gini meningkat kembali. Melihat Indeks Gini Kota Bogor yang cenderung meningkat sejak 2019, hal tersebut cenderung berbeda dengan tren tahun 2015-2022 yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor berhasil menurunkan ketimpangan dari 0,47 menjadi 0,43 bahkan dengan terendah di periode tersebut sebesar 0,39 pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini menjadi acuan bagi perhitungan proyeksi Indeks Gini Kota Bogor hingga 2030 yang memungkinkan adanya penurunan nilai Indeks Gini menjadi sebesar 0,38.

4. Sistem Permukiman yang Nyaman dengan Penataan Ruang yang Berkelanjutan.
Penataan ruang dalam hal ini perlu menjadi rujukan bersama sehingga perkembangan Kota Bogor dapat mendukung upaya penciptaan ruang yang lebih nyaman serta pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai rujukan bersama, peningkatan partisipasi masyarakat serta proses pemantauan dan evaluasi penataan ruang perlu semakin didorong. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemantapan *smart city*, utamanya bagaimana penggunaan teknologi informasi komunikasi yang didukung oleh data raksasa secara *real time* menjadi bagian tidak terpisahkan dari implementasi penataan ruang. Semua sektor

- pemerintah terkait beserta kalangan masyarakat dapat memanfaatkannya untuk mengajukan perizinan hingga proses pemantauan pembangunan (potensi pelanggaran tata ruang) dan kinerja sarana dan prasarana.
- Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi**

Sektor transportasi menjadi salah satu pendorong transisi menjadi ekonomi hijau. Dalam hal ini, pengurangan emisi yang dihasilkan dari kendaraan menjadi kunci akan transisi yang dijalankan. Diperlukan upaya bersama dari multi-pihak untuk membangun solusi yang efektif dalam penciptaan sistem transportasi yang terintegrasi dan lebih hijau, antara lain melalui peningkatan jaringan transportasi umum, pengembangan jalur sepeda, dan penerapan *smart city* untuk mengelola arus lalu lintas dengan lebih efisien.
 - Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global**

Resiliensi dalam level perkotaan diwujudkan dalam penguatan sistem perkotaan. Salah satu perwujudan dari sistem ini adalah dengan penataan ruang yang mempertimbangkan ketahanan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim. Kepatuhan dalam pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang menjadi satu hal kunci yang perlu didorong, selain membangun sistem resiliensi di masyarakat. Begitu pun dengan pemanfaatan *smart city* untuk menguatkan *early warning system* untuk mengurangi risiko bencana.
 - Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif**

Kolaborasi multi-pihak dalam tata kelola pemerintahan juga diperlukan dalam konteks pembangunan, terutama karena adanya keterbatasan fiskal daerah serta kebijakan nasional terkait dengan efisiensi anggaran.

Isu strategis diatas sangat erat kaitannya dengan kerangka utama indikator makro daerah berupa: Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, dan Indeks Gini. Berikut adalah strategi pencapaian penyelesaian isu strategis kota Bogor tahun 2026:

Tabel 4.5
Isu strategis dan Arah Kebijakan

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029
Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan ber standar Nasional Perpustakaan (SNP) 2. Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga 3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga 4. Meningkatkan kualitas legalitas struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya dalam keluarga 5. Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak 6. Meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda 7. Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga\ 8. Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 9. Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan sanitasi

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029
	10. Meningkatkan pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta tersedia dalam jumlah cukup, terdistribusi merata, dan harga terjangkau 11. Meningkatkan akses pangan Masyarakat 12. Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga 13. Meningkatkan kesehatan reproduksi pasangan usia subur 14. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang 15. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Keluarga 16. Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat 17. Meningkatkan pembudayaan Olah raga dan peningkatan kapasitas serta daya saing olahraga 18. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan ber standar Nasional Perpustakaan (SNP)
1. Transformasi Ekonomi dan Masyarakat 2. Citra Kota Bogor dari Aspek Sains dan Sejarah	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja 2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja 3. Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif 4. Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah 5. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan perekonomian daerah 6. Optimalisasi pembinaan pada sektor perdagangan 7. Meningkatkan IKM Berdaya saing 8. Meningkatkan fasilitasi penanaman modal 9. Membangun ekosistem halal terintegrasi 10. Terkendalnya Inflasi Daerah 11. Terkendalnya harga kebutuhan pokok dan barang penting 12. Meningkatkan realisasi PAD 13. Optimalisasi Kinerja BUMD
1. Sistem Permukiman yang Nyaman dengan Penataan Ruang yang Berkelanjutan 2. Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi 3. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global	1. Meningkatkan Kualitas Perumahan layak Huni 2. Meningkatkan Rumah Layak Huni 3. Berkurangnya luasan kawasan kumuh kewenangan Kota 4. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana 5. Meningkatkan Kualitas Pengolahan Sampah di fasilitas pengolahan sampah 6. Meningkatkan Reduksi Sampah di sumber 7. Terkendalnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup 8. Meningkatkan konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung 9. Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah 10. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air 11. Terwujudnya Percepatan pelaksanaan Pembangunan Daerah 12. Meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Perangkat Daerah 13. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah 14. Optimalisasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan 16. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan 17. Meningkatkan kualitas drainase 18. Terwujudnya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkualitas 19. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang wilayah 20. Meningkatkan respons time penanganan kebakaran serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026		Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029
		21. Peningkatan Pemanfaatran hasil litbang jirap,serta invensi dan inovasi sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah
Tata Pemerintahan Kolaboratif	Kelola yang	1.Peningkatan Kualitas Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi 2.Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik 3.Peningkatan kualitas penyelenggaraan data statistik sektoral 4.Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD 5.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah 6.Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas 7.Meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip Daerah 8.Meningkatkan kualitas perencanaan dan pemanfaatan produk hukum daerah serta kualitas layanan bantuan hukum 9.Terciptanya Manajemen ASN Yang Memiliki Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Yang Diberlakukan Secara Adil dan Wajar Tanpa Diskriminasi. 10.Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 11.Meningkatkan kinerja pelayanan publik di wilayah Kecamatan 12.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama daerah 13.Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 14.Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 15.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama daerah 16.Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kematangan SPIP Perangkat Daerah 17.Meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Perangkat Daerah 18.Meningkatkan kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada 19.Meningkatkan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 20.Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah 21.Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan bangsa 22.Meningkatkan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut ditetapkan tema Pembangunan RKPD Kota Bogor Tahun 2026 adalah “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Menopang Daya Saing Daerah”.

4.2.2. Keterkaitan Isu Strategis dengan Permasalahan Pembangunan

Hasil analisis terhadap hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka keterkaitan isu strategis dengan permasalahan Pembangunan dituangkan pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.6
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2026

Arah Kebijakan Nasional	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026	Isu Strategis RPJMD Kota Bogor Tahun 2026	Permasalahan Pembangunan Kota Bogor Tahun 2024	Isu Strategis Pembangunan Kota Bogor Tahun 2026
1. Sumber Daya Manusia berkualitas 2. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan 3. Infrastruktur berkualitas	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.	1. Pengaruh lingkungan sekolah terhadap tumbuh kembang siswa 2. Inklusivitas dan pemerataan kualitas pendidikan 3. Daya saing manusia (Pendidikan & Kesehatan) 4. Inklusi dan pengetahuan kesehatan 5. Inklusi kelompok rentan	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.
	Pembangunan Ekonomi dan Berkelanjutan	1. Transformasi Ekonomi dan Masyarakat 2. Citra Kota Bogor dari Aspek Sains dan Sejarah.	1. Ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan kota 2. Pergeseran ekonomi Kota Bogor 3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi baru 4. Belum optimalnya pengembangan UMKM dan pasar 5. Pembangunan tabula rasa dan ancaman terhadap karakter Kota Bogor	1. Transformasi Ekonomi dan Masyarakat 2. Citra Kota Bogor dari Aspek Sains dan Sejarah.
	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1. Sistem Permukiman yang Nyaman dengan Penataan Ruang yang Berkelanjutan 2. Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi 3. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global	1. Laju pertumbuhan penduduk relatif rendah tetapi tetap memberikan tekanan lingkungan hidup 2. Tekanan kualitas lingkungan hidup dan produksi polusi 3. Penanganan sampah masih perlu dioptimalkan 4. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 5. Ketahanan Pangan 6. Permukiman yang belum sepenuhnya nyaman 7. Kinerja utilitas belum optimal 8. Pemerataan infrastruktur kota 9. Kinerja sistem transportasi belum optimal	1. Sistem Permukiman yang Nyaman dengan Penataan Ruang yang Berkelanjutan 2. Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi 3. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global
	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif	1. Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi masih belum optimal 2. Kinerja inovasi daerah yang belum optimal 3. 7. Pendapatan daerah yang belum optimal	Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif

Sumber : Analisis Bapperida, 2025

4.2.3. Keterkaitan Isu Strategis dengan Arah Kebijakan RKPD dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Pada Tahun 2026, Rencana kerja pemerintah (RKP) Republik Indonesia mengusung tema Pembangunan “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Barat mengusung tema Pembangunan “Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar”. Kemudian RKPD Kota Bogor mengusung tema “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Menopang Daya Saing Daerah” Keselarasan dokumen-dokumen tersebut diujikan melalui keterkaitan Isu Strategis dan Arah Kebijakan. Berikut adalah tabel 4.3 keselarasan Isu Strategis Kota Bogor Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2026.

Tabel 4.7
Keselarasan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Perangkat Daerah

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	19. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan ber standar Nasional Perpustakaan (SNP) 20. Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga 21. Meningkatkan kesejahteraan keluarga 22. Meningkatkan kualitas legalitas struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya dalam keluarga 23. Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak 24. Meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda 25. Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga\ 26. Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 27. Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan sanitasi 28. Meningkatkan pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 2. Penyiapan dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 3. Penataan dan pemenuhan infrastruktur layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. 4. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 5. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Diantaranya sebagai berikut: 1. Kualitas pendidikan masih rendah 2. Kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi 3. Kualitas lulusan masih rendah 4. Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun 5. Angka Kematian Ibu masih tinggi 6. Stunting masih tinggi 7. Prevalensi obesitas terus meningkat 8. Kasus baru TBC peringkat ke-2 dunia 9. Kasus baru Kusta peringkat ke 3 dunia 10. Puskesmas tidak tersedia 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 11. Akurasi Program Bantuan Sosial masih rendah	SDM Berdaya Saing dan Produktif

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
	Gizi (AKG) serta tersedia dalam jumlah cukup, terdistribusi merata, dan harga terjangkau 29. Meningkatkan akses pangan Masyarakat 30. Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga 31. Meningkatkan kesehatan reproduksi pasangan usia subur 32. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang 33. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Keluarga 34. Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat 35. Meningkatkan pembudayaan Olah raga dan peningkatan kapasitas serta daya saing olahraga 36. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan ber standar Nasional Perpustakaan (SNP)		6. Peningkatan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan nonformal. 7. Penyiapan akses dan pembangunan pendidikan kejuruan negeri bagi warga tidak mampu. 8. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 9. Peningkatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan hub pendidikan tinggi global. 10. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 11. Penyiapan dan pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. 12. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 13. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga medis serta pemerataan tenaga kesehatan. 14. Peningkatan kualitas kesehatan lansia dan kelompok rentan lainnya.	12. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum optimal dan inklusif 13. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga 14. Tingginya ketimpangan gender 15. Belum kokohnya karakter dan jati diri bangsa	

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			15. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular melalui deteksi dini/screening, pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi, penggunaan obat yang rasional serta ketahanan jiwa pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat yang berbasis bukti serta imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. 16. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 17. Peningkatan penuntasan dan pencegahan stunting. 18. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang prima. 19. Penataan dan pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 20. Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 21. Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 22. Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat. 23. Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama. 24. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 25. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 26. Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga.		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
3. Transformasi Ekonomi dan Masyarakat 4. Citra Kota Bogor dari Aspek Sains dan Sejarah	1. Meningkatkan Kesempatan Kerja 2. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja 3. Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif 4. Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah 5. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan perekonomian daerah 6. Optimalisasi pembinaan pada sektor perdagangan 7. Meningkatkan IKM Berdaya saing 8. Meningkatkan fasilitasi penanaman modal 9. Membangun ekosistem halal terintegrasi 10. Terkendalnya Inflasi Daerah 11. Terkendalnya harga kebutuhan pokok dan barang penting 12. Meningkatkan realisasi PAD 13. Optimalisasi Kinerja BUMD	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	1. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi). 2. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan dry port KA Pelabuhan Patimban, serta dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon. 3. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan kebutuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 4. Penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta pada perlindungan konsumen. 5. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. 6. Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah	Diantaranya sebagai berikut: 1. Pertumbuhan Ekonomi Potensial Indonesia dalam tren Melambat 2. Ekonomi Indonesia hanya tumbuh rata rata 5,0% dalam 20 tahun terakhir 3. Total Factor Productivity (TFP) Indonesia dalam Tren Menurun	Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 7. Penyiapan dan penataan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya demand. 8. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. 9. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global. 10. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri. 11. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 12. Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 13. Penguatan Tata kelola pelatihan, penyaluran/ penempatan, dan perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI), serta pengembangan ekosistem PMI dan Diaspora berkualifikasi menengah tinggi. 14. Penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan. 15. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna. 16. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM. 17. Penataan dan restrukturisasi BUMD. 18. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan.		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			19. Penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. 20. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 21. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, ekonomi dan keuangan syariah, obligasi, sukuk, dan inovasi pembiayaan daerah lainnya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. 22. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. 23. Penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment). 24. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. 25. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 26. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. 27. Pengembangan teknologi dan inovasi untuk pemanfaatan sumber daya laut dan pantai. 28. Rehabilitasi wilayah laut dan pesisir untuk menyiapkan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. 29. Pengembangan budidaya laut dan perikanan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan. 30. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. 31. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. 32. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. 33. Pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan. 34. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 35. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.		
4. Sistem Permukiman yang Nyaman dengan Penataan Ruang yang Berkelanjutan 5. Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi 6. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global	22. Meningkatkan Kualitas Perumahan layak Huni 23. Meningkatkan Rumah Layak Huni 24. Berkurangnya luasan kawasan kumuh kewenangan Kota 25. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana 26. Meningkatkan Kualitas Pengolahan Sampah di fasilitas pengolahan sampah 27. Meningkatkan Reduksi Sampah di sumber 28. Terkendalinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup 29. Meningkatkan konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya. 2. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. 4. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. 5. Pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan	Diantaranya sebagai berikut: 1. Kualitas Jalan Daerah yang masih rendah 2. Penuntasan manfaat bendungan terbangun 3. Gap Pengelolaan Sampah	Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
	30. Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah 31. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air 32. Terwujudnya Percepatan pelaksanaan Pembangunan Daerah 33. Meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Perangkat Daerah 34. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah 35. Optimalisasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 36. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan 37. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan 38. Meningkatkan kualitas drainase 39. Terwujudnya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkualitas 40. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang wilayah 41. Meningkatkan respons time penanganan kebakaran serta		elayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). 6.Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 7.Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. 8.Pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. 9.Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar air minum jaringan perpipaan. 10.Meningkatkan jumlah Desa Mandiri melalui pengembangan infrastruktur dasar permukiman perdesaan. 11.Pengelolaan basis data perencanaan, pengadaan dan pencadangan tanah pada lahan-lahan untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas. 12.Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas baik vertikal maupun horizontal di wilayah utara-selatan.		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
	kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran 42. Peningkatan Pemanfaatan hasil litbang jirap,serta invensi dan inovasi sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah		13.Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistemtransmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. 14.Persiapan pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Jabodetabek dan metropolitan Bandung. 15.Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. 16.Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Barat untuk		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Cibadak-Palabuhanratu; Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Ciranjang; Ciranjang-Padalarang; Garut-Pameungpeuk; Kalipucang-Pangandaran; Cirebon-Indramayu; dan Cirebon-Kuningan; Kertajati-Indramayu; Gedebage-Garut-Tasikmalaya-KalipucangCilacap; Akses Pelabuhan Patimban. 17.Pembangunan (peningkatan kualitas dan spesifikasi) jalan khusus terutama jalan akses tambang di wilayah perkotaan. 18.Penyiapan Pembangunan sarana dan prasarana kereta api logistik, terutama akses KA Pelabuhan Patimban dan dry port KA Pelabuhan Patimban, serta dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon. 19.Reaktivasi layanan perkeretaapian terutama pada ruas Banjar-Pangandaran.		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			20.Reaktivasi layanan perkeretaapian ruas 21.Cipatat-Padalarang 22.Reaktivasi layanan perkeretaapian Bandung Ciwidey 23.Reaktivasi layanan perkeretaapian Rancaekek-Tanjungsari 24.Peningkatan prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor-Sukabumi (termasuk elektrifikasi) dan Cipatat-Padalarang. 25.Persiapan elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung. 26.Pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon Semarang-Surakarta-Surabaya. 27.Penyiapan pembangunan multi infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa."		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			28.Pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul /pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Pelabuhan Palabuhanratu. 29.Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/ konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Kertajati). 30.Pengembangan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. 31.Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah Aliran Sungai Prioritas, wilayah pesisir dan laut, tanah dan air. 32.Implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. 33.Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga. 34.Percepatan operasionalisasi pengelolaan sampah di hilir melalui fasilitas pengolahan regional (TPPASR Legok Nangka dan TPPASR Lulut Nambo).		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			35.Fasilitasi dan persiapan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah (TPPASR Cirebon Raya, TPPASR Bekarpur, TPA Bersama Sukabumi, TPA Bersama Tasikmalaya). 36.Penyiapan dan penetapan instrumen circular economy dalam pengelolaan sampah. 37.Penyiapan kawasan strategis pertanian di wilayah Citarum-Cimanuk-Cisanggarung dan Citanduy. 38.Pengelolaan susut dan sisa pangan 39.Peningkatan pelayanan sistem irigasi 40.Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. 41.Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air. 42.Peningkatan kapasitas tampung dan jaringan infrastruktur sumber daya air untuk pemenuhan air baku dan pengendali banjir, terutama melalui pembangunan Bendungan/waduk baru, yaitu: • Bendungan/Waduk Matenggeng Kab. Ciamis		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			• Bendungan/Waduk Cipunagara, Waduk Maya, dan Waduk Bodas Kab. Subang • Bendungan/Waduk Cipundaan Kabupaten Cirebon; • Bendungan/Waduk Cibeet dan Waduk Cijuray Kabupaten Bogor; • Bendungan/Waduk Kadumalik Kabupaten Majalengka; • Bendungan Waduk Multiguna di Cekungan Bandung. 43.Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis energi baru terbarukan dan jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. 44.Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas di Jawa, terutama yang menghubungkan Cirebon-Semarang. 45.Pembangunan akses infrastruktur ketenagalistrikan berbasis pengembangan energi baru dan terbarukan diarahkan untuk pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; 46.Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; 47.Pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; 48.Pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; 49.Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; 50.Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; 51.Pengembangan sistem 52.Penyimpanan/cadangan energi; 53.Perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; 54.Pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan 55.Pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
			sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 56. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. 57. Mengembangkan mekanisme pendukung perdagangan karbon dan pajak karbon.		
Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif	23. Peningkatan Kualitas Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi 24. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik 25. Peningkatan kualitas penyelenggaraan data statistik sektoral 26. Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD 27. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	1. Penataan kelembagaan dan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah. 2. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. 3. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pemerintahan. 4. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 5. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui	Diantaranya sebagai berikut: 1. Kontribusi Iptek dan Inovasi terhadap Pembangunan Indonesia masih rendah 2. Terdapat desa/kelurahan serta layanan pendidikan dan kesehatan yang belum mendapatkan akses internet blankspot 3. Penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI) dan Keamanan Siber Nasional	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Produktif

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
	28.Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas 29.Meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip Daerah 30.Meningkatkan kualitas perencanaan dan pemanfaatan produk hukum daerah serta kualitas layanan bantuan hukum 31.Terciptanya Manajemen ASN Yang Memiliki Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Yang Diberlakukan Secara Adil dan Wajar Tanpa Diskriminasi. 32.Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 33.Meningkatkan kinerja pelayanan publik di wilayah Kecamatan 34.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama daerah 35.Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 36.Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. 6.Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan 7.Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. 8.Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 9.Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). 10.Penataan dan pengembangan sistem kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. 11.Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat.		

Isu Strategis RKPD Kota Bogor 2026	Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029	Isu Strategis RKPD Prov Jabar 2026	Arah Kebijakan RPJMD Prov Jabar 2025-2029	Isu Strategis/Tantangan RKP Tahun 2025	Arah Kebijakan RKP 2026
	37.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama daerah 38.Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kematangan SPIP Perangkat Daerah 39.Meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Perangkat Daerah 40.Meningkatkan kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada 41.Meningkatkan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat 42.Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah 43.Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan bangsa 44.Meningkatkan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat		12.Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 13.Peningkatan aspek-aspek Indeks Demokrasi melalui penguatan struktural, budaya, dan agensi. 14.Peningkatan penyelenggaraan trantibumlinmas dan penyediaan sarana dan prasarana bidang trantibumlinmas.		

4.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2026

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah kota Bogor dilaksanakan melalui 4 (empat) prioritas daerah, diantaranya adalah:

- 1. Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani
- 2. Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan
- 3. Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi
- 4. Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana.

Keempat prioritas Pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2026 dijabarkan kedalam sasaran prioritas pembangunan daerah yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan sasaran Pembangunan daerah pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029. Prioritas, sasaran dan indicator sasaran Pembangunan daerah kota Bogor tahun 2026 dituangkan pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Kondisi Awal (2024)	TARGET KINERJA
					2026
1	Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	(S1) Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	72,74	73,35
		(S2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	83,28	86,37
			Predikat Kota Sehat	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)	Swastisaba Wistara (Kategori Tertinggi)
		(S3) Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	12.656	12.700
			Angka Kemiskinan	6,67	6
			Tingkat Pengangguran Terbuka	9,39	7,99
			Gini Ratio	0,464	0,45
		(S4) Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif	Indeks Pembangunan Keluarga	61,81	63,11
			Indeks Ketimpangan Gender	0,434	0,419

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Kondisi Awal (2024)	TARGET KINERJA
					2026
2	Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	(S1) Optimalisasi potensi UMKM dan koperasi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor unggulan penggerak perekonomian daerah	Laju pertumbuhan PDRB sektor jasa akomodasi dan makan minum (ADHK)	5,26	5,27
		(S2) Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Persentase peningkatan realisasi investasi per tahun	20,94	21,25
			Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	16,57	12,33
			Persentase peningkatan kontribusi bagian laba BUMD pada PAD	2,36	2,36
			Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	6	6
		(S3) Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (ADHK)	3,96	4,5
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (ADHK)	3,73	3,79
			Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (ADHK)	3,2	3,89
		(S4) Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,98	81,21
			Indeks Risiko Bencana	63,49	58,02
3	Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan	(S1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal	Persentase realisasi capaian kinerja penataan rang	48	60
			Volume to Capacity Ratio	0,63	0,63
			Rasio konektivitas	0,78	0,79
		(S2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,4	58,09
4	Penguatan Tata Kelola	(S1) Terciptanya tata kelola pemerintahan	Indeks SPBE	3,72	4,1
			Nilai AKIP Tingkat Kota	BB (76,23)	BB (78,25)

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja	Kondisi Awal (2024)	TARGET KINERJA
					2026
	Pelayanan Publik	digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Opini BPK	WTP	WTP
			Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,296)	Level 3 (3,335)
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	97,23	98
			Indeks Kualitas Kebijakan	65	70
			Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Level 3 (3,045)	Level 3 (3,055)
		(S2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	Indeks Ber-Akhlak	60,5	76,1
			Nilai Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) diatas rata-rata Kota Kabupaten se-Jawa Barat	71,29	72

Sumber : Analisis Bapperida, 2025

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2026 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis Pembangunan tahun 2026, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2026. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2026 ditetapkan untuk mendukung prioritas Pembangunan Jawa Barat dan Pembangunan Nasional Tahun 2026.

Keterkaitan prioritas Pembangunan daerah dengan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029, permasalahan Pembangunan dan isu strategis, dituangkan pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bogor 2025-2029

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2029
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif 2. Pengaruh lingkungan sekolah terhadap tumbuh kembang siswa 3. Inklusivitas dan pemerataan kualitas Pendidikan 4. Daya saing manusia (Pendidikan & Kesehatan)	1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia. 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif	• Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan ber standar Nasional Perpustakaan (SNP) • Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga • Meningkatkan kesejahteraan keluarga • Meningkatkan kualitas legalitas struktur, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya dalam keluarga • Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak • Meningkatkan kualitas dan prestasi pemuda • Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik • Peningkatan Kualitas Penerapan Persandian dan Sistem Pengamanan Informasi • Peningkatan kualitas penyelenggaraan data statistik sektoral • Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD • Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah • Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa yang berkualitas • Meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip Daerah • Meningkatkan kualitas perencanaan dan pemanfaatan produk hukum daerah serta kualitas layanan bantuan hukum	(P1) Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani

PERMASALAHAN TAHUN 2026	PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2029
			• Terciptanya Manajemen ASN Yang Memiliki Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja Yang Diberlakukan Secara Adil dan Wajar Tanpa Diskriminasi. • Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah • Meningkatkan kinerja pelayanan publik di wilayah Kecamatan • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama daerah • Meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah • Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama daerah • Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kematangan SPIP Perangkat Daerah • Meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Perangkat Daerah • Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga • Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	
1. Inklusi dan pengetahuan Kesehatan 2. Laju pertumbuhan penduduk relatif rendah tetapi tetap memberikan tekanan lingkungan hidup 3. Tekanan kualitas lingkungan hidup dan produksi polusi		1. Sistem Permukiman yang Nyaman dengan Penataan Ruang yang Berkelanjutan	• Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dan Pelayanan Perpustakaan ber standar Nasional Perpustakaan (SNP) • Peningkatan Pemanfaatan hasil litbang jirap,serta invensi dan inovasi sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah • Meningkatkan Kualitas Perumahan layak Huni	(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan

PERMASALAHAN TAHUN 2026	PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2029
4. Penanganan sampah masih perlu dioptimalkan 5. Permukiman yang belum sepenuhnya nyaman			• Meningkatkan Rumah Layak Huni • Berkurangnya luasan kawasan kumuh kewenangan Kota • Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan sanitasi • Meningkatkan kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air • Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanggulangan bencana • Meningkatkan pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta tersedia dalam jumlah cukup, terdistribusi merata, dan harga terjangkau • Meningkatkan akses pangan Masyarakat • Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga • Meningkatkan kesehatan reproduksi pasangan usia subur • Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang • Optimalisasi pemenuhan akses air minum dan air limbah • Meningkatkan Reduksi Sampah di sumber • Meningkatkan Kualitas Pengolahan Sampah di fasilitas pengolahan sampah • Terkendalinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup • Meningkatkan konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung • Meningkatkan Kualitas Kesehatan Keluarga	

PERMASALAHAN TAHUN 2026	PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2029
1. Inklusi kelompok rentan 2. Ketimpangan, pengangguran dan kemiskinan kota 3. Pergeseran ekonomi Kota Bogor 4. Belum optimalnya pengembangan ekonomi baru 5. Belum optimalnya pengembangan UMKM dan pasar 6. Pembangunan tabula rasa dan ancaman terhadap karakter Kota Bogor		1. Transformasi Ekonomi dan Masyarakat 2. Citra Kota Bogor dari Aspek Sains dan Sejarah.	• Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka pemajuan kebudayaan bangsa • Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah • Meningkatkan pembudayaan Olah raga dan peningkatan kapasitas serta daya saing olahraga • Meningkatkan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat • Meningkatkan Kesempatan Kerja • Meningkatkan produktivitas tenaga kerja • Meningkatkan pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif • Optimalisasi Potensi Koperasi dan UMKM sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah • Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan perekonomian daerah • Optimalisasi pembinaan pada sektor perdagangan • Meningkatkan IKM Berdaya saing • Meningkatkan fasilitasi penanaman modal • Membangun ekosistem halal terintegrasi • Meningkatkan akses pangan Masyarakat • Meningkatkan pemanfaatan pangan yang beragam, sehat dan aman sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta tersedia dalam jumlah cukup, terdistribusi merata, dan harga terjangkau • Meningkatkan akses pangan Masyarakat • Terkendalnya Inflasi Daerah • Terkendalnya harga kebutuhan pokok dan barang penting	(P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi

PERMASALAHAN TAHUN 2026	PEMBANGUNAN	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN TAHUN 2026	ARAH KEBIJAKAN RPJMD 2025-2029	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2025-2029
			• Meningkatkan realisasi PAD • Optimalisasi Kinerja BUMD • Meningkatkan kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada • Meningkatkan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat • Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, gotong royong, kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat	
1. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 2. Ketahanan Pangan 3. Kinerja utilitas belum optimal 4. Pemerataan infrastruktur kota 5. Kinerja sistem transportasi belum optimal		1 Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi 2 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global	• Terwujudnya Percepatan pelaksanaan Pembangunan Daerah • Meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada Perangkat Daerah • Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah • Meningkatkan respons time penanganan kebakaran serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran • Optimalisasi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan • Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan • Meningkatkan kualitas drainase • Terwujudnya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkualitas • Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang wilayah	(P4) Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana

Sumber : Analisis Bapperida, 2025

4.2.5. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

Pemerintah kota Bogor melakukan penjaringan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang diinput ke dalam aplikasi SIPD RI, kemudian hasil pokir yang telah diakomodir di-import ke aplikasi internal Pemerintah Kota Bogor yaitu SIAPMANG (Sistem informasi Aspirasi Perencanaan dan Monitoring Pembangunan). Hal ini dilakukan untuk memastikan supaya tidak adanya tumpang tindih antara usulan pokir dengan usulan pokir lainnya maupun usulan pokir dengan usulan musrenbang. Pokir yang diakomodir dan yang telah dikelompokkan ke dalam urusan Perangkat Daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, berikut adalah keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokir DPRD Tahun 2026

Tabel 4.10
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

Pokok Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Kota Bogor
Permasalahan Bidang Pendidikan Pembangunan/Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	(P1) Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani
Permasalahan Bidang Kesehatan a. Penyediaan alat kesehatan; b. Sarana dan Prasarana Posyandu.	(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan
Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Penanganan infrastruktur ruas jalan skala kota; b. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan skala kota; c. Pembangunan/Rehabilitasi septictank komunal; d. Pembangunan/Rehabilitasi Drainase skala Kota; e. Pembangunan/Rehabilitasi TPT dasar Sungai.	(P4) Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana
Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup Pengadaan sarana dan prasarana persampahan	(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan
Permasalahan Bidang Perumahan dan Permukiman a. Pemeliharaan Jalan Lingkungan; b. Pembangunan TPT skala pemukiman.	(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan
Permasalahan Bidang Sosial Penyediaan Alat Bantu Disabilitas, Lansia dan Anak	(P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi
Permasalahan Bidang Tenaga Kerja Pelatihan Kompetensi dan Kewirausahaan	(P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi

Pokok Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Kota Bogor
Permasalahan Bidang Perhubungan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum, meliputi Ruas Jalan Kota dan jalan lingkungan;	(P4) Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana
Permasalahan Bidang Pertanian a. Pemberian prasarana bibit hewan dan tanaman; b. Pelatihan budidaya ikan, pembibitan hewan dan tanaman.	P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi
Permasalahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Peningkatan SDM para pelaku UMKM; b. Peningkatan SDM para pelaku koperasi;	(P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi
Permasalahan Bidang Kepemudaan dan olahraga Sarana dan prasarana olah raga	(P1) Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani
Permasalahan Bidang Pariwisata a. Sarana dan prasarana kesenian; b. Peningkatan SDM pengelola Pariwisata;	(P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi

Sumber : Analisis Bapperida, 2025

4.2.6. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional Pada RKP Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan ditetapkan pada RKP Tahun 2026 sebagai pelaksanaan kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan. Prioritas Pembangunan pada RKP 2026 meliputi :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Keterkaitan prioritas, sasaran dan indikator sasaran Pembangunan daerah tahun 2026 dengan Prioritas, Sasaran serta Indikator Sasaran Prioritas Nasional dan Jawa Barat Tahun 2026 disajikan pada tabel 4.9 di bawah ini:



Tabel 4.11
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Indikator Sasaran Provinsi Jawa Barat dan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi	P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip <i>Good dan Clean Governance</i>		-	-
S1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	1. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan	S17. Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Indeks Demokrasi Indonesia	-	-
	2. Indeks Aktualisasi Pancasila Aspek Rumah Tangga				
	3. Indeks Kemerdekaan Pers				
	4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik				
	5. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik				
	6. Persentase kader yang menempati Jabatan Strategis				
	7. Indeks Demokrasi Indonesia				
	8. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi				
	9. Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesenjangan				
	10. Indeks Hak Asasi Manusia				
	11. Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya				
	12. Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik				
	13. Indeks Akses terhadap Keadilan				
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan,		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul		P1) Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		(P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		-	
S2. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	1. Asia Power Index (Military Capability)	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	-	-
	2. Asia Power Index (Diplomatic Influence)			-	-
	3. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-
	4. Global Cybersecurity Index			-	-
	5. Indeks Keamanan Laut Nasional			-	-
S3. Terbangunnya Eco-region Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal	6. Indeks Ketahanan Pangan	S7. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan
	7. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan				
	8. Meningkatkan Produksi Pangan				
	9. Berkurangnya Impor Pangan				
	10. Nilai Tukar Petani Indeks Kesejahteraan Petani	S12. Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani	-	-
S4. Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih	11. Indeks Ketahanan Energi	S13. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif b. Tahunan	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah
	12. Pasokan Energi Primer				
	13. Konsumsi Energi Final per Kapita				
	14. Porsi EBT dalam Bauran Energi				
	15. Intensitas Energi Primer				
	16. Kapasitas Tampung Air per Kapita		Indeks Kualitas Infrastruktur		Persentase Rumah

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
	17. Meningkatnya Air Minum Jaringan Perpipaan			Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar	Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan
	18. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Aman				-
	19. Menurunnya luas lahan kritis				-
	20. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi Aman				Persentase Rumah tangga Dengan Akses Sanitasi Aman
	21. Mengentaskan perilaku BABS di tempat terbuka				-
S5. Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi	22. Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (Peringkat GIEI)	S8. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	Inklusi Keuangan	-	-
	23. Kontribusi PDB Syariah				
S6. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	24. Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB				
	25. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)				
S7. Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	26. Indeks Ekonomi Hijau	S7. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-
	27. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	S13. Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	-	-

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
	28. Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	S13. Meningkatkan layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK a. Kumulatif b. Tahunan	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah
	29. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				
	30. Proporsi Tenaga Kerja Hijau				
	31. Tingkat Input Material Sirkular				
S8. Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru	32. Nilai Tambah Sektor Ekonomi Biru	S7. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-
	33. Perlindungan Kawasan Perairan				
	34. Kapasitas Sumber Daya Manusia Sektor Ekonomi Biru				
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		(P4) Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	
S9. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan	1. Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	S13. Meningkatkan layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur	-	-
	2. Waktu Tempuh pada Lintas Utama (Jam/100 Km)				
	3. Peningkatan Kinerja Bongkar Muat Pelabuhan (%)	-	-	-	-
	4. On Time Performance Udara (%)				
	5. Penurunan Rasio Fatalitas Kecelakaan Jalan (%)				
	6. Kondisi Jalur KA sesuai Standar (TQI) Kategori 1 dan 2 (%)				
	7. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan (Juta Penumpang)				
	8. Indeks Pembangunan TIK Nasional				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
	9. Konsumsi Listrik per Kapita (kwh)				
S10. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB	10. Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	S8. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	Inklusi Keuangan	-	-
	11. Aset Perbankan/PDB (%)				
	12. Aset Dana Pensiun/PDB (%)				
	13. Aset Asuransi/PDB (%)				
	14. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)				
	15. Total Kredit/PDB (%)				
	16. Inklusi Keuangan (%)				
S11. Meningkatnya nilai tambah pariwisata	17. Rasio PDB Pariwisata (%)	S9. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum		
	18. Devisa Pariwisata (Miliar USD)	S10. Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal		
S12. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	19. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)				
	20. Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDB (%)				
	21. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)				
	22. Rasio Kewirausahaan (%)	S14. Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil	Rasio Daerah Kewirausahaan		
S13. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	23. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	S9. Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional		
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul		(P1) Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		(P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		(P4) Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	
S14. Pendidikan Berkualitas yang Merata	1. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun keatas (tahun)	S4. Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah
	2. Harapan Lama Sekolah (tahun)		Harapan Lama Sekolah		Harapan Lama Sekolah
	3. Rata-rata nilai PISA a. Membaca b. Matematika c. Sains		-	-	-
	4. Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional 17.03 a. Literasi Membaca b. Numerasi		-	-	-
	5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)		-	-	-
	6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)		-	-	-
	7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	S11. Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	-	-
	8. Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran		-	-	-

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
S15. Kesehatan untuk Semua	9. Usia Harapan Hidup (tahun)	S1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
	10. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)		-	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	-
	11. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		-		-
	12. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		Prevalensi Stunting
	13. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		-		-
	14. Prevalensi obesitas >18 tahun		-		-
	15. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)		-		-
S16. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	16. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Inovatif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
	17. Indeks Perlindungan Anak		Indeks Perlindungan Anak		-
	18. Indeks Pembangunan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		-
	19. Indeks Ketimpangan Gender		Indeks Ketimpangan Gender		-
	20. Indeks Pembangunan Gender	S15. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	-		-
	21. Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)		Indeks Kesejahteraan Sosial	-	-
	22. Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)		-	-	-
S17. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	23. Peringkat Indeks Inovasi Global	S10. Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka
	24. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
	25. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)		Indeks Inovasi Daerah	-	-

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
	26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	S16. Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan			
S18. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga	27. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	S5. Terbentuknya individu Kreatif dan Inovatif	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	-
	28. Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games				
	29. Peringkat pada Asian Games				
	30. Peringkat pada Asian Para Games				
	31. Peringkat pada SEA Games				
	32. Peringkat pada ASEAN Para Games				
	33. Persentase penduduk berumur 10 tahun keatas yang aktif berolahraga (%)				
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		(P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	
S19. Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan	1. Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	S6. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)
	2. Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)				
	3. Nilai Tambah Industri Pengolahan (MVA) per Kapita (Rp Juta)				
	4. Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan (%)				
S20. Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	5. Biaya Logistik (%PDB)	S8. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan		
	6. Biaya Transportasi Logistik terhadap PDB (%)				
S21. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB)	S10. Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Meningkatnya pertumbuhan	Pembentukan Modal Tetap Bruto
	8. Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)		-		

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
	9. Nilai PMA dan PMDN (Rp. Triliun)		-	Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan	-
	10. Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia (%)		-		-
	11. Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global (%)		-		-
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan (P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	
S22. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	1. Tingkat Kemiskinan	S15. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan & kesejahteraan Sosial	Tingkat Kemiskinan
	2. Proporsi penduduk kelas menengah				
	3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal				
	4. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				
S23. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	5. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	S13. Meningkatnya layanan infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas hunian masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
S24. Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	6. Persentase desa mandiri (%)		Indeks Desa		
S25. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	7. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional		-		
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul P4: Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance		(P1) Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
		P2: Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif		(P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	
S26. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi	1. Indeks Integritas Partai Politik	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	-	-
	2. Indeks Pembangunan Hukum				
	3. Indeks Materi Hukum				
	4. Indeks Persepsi Korupsi				
	5. Indeks Integritas Nasional				
S27. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	6. Indeks Pelayanan Publik	S18. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik
	7. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
	8. Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri				
S28. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	9. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika	S3. Terbentuknya individu Berintegritas dan taat Hukum	Tingkat Kriminalitas	-	-
S29. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan	10. <i>Clearance rate</i> tindak pidana judi				
	11. <i>Clearance rate</i> tindak pidana penyelundupan				
S30. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	12. Return on Asset (ROA) BUMN (%)	S8. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Menguatnya Stabilitas Daerah	Kapasitas fiskal daerah
S31. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi	13. Rasio pendapatan negara terhadap PDB (%)		Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi		
	14. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)				

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Kota Bogor	Indikator Sasaran Pembangunan Kota Bogor
S32. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	15. Tingkat Inflasi (%)	S8. Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa	Tingkat Inflasi	Menguatnya Stabilitas Daerah	Tingkat Inflasi
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		P1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul		(P1) Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	
		P3: Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan, Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	
S33. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	S2. Terbentuknya Individu Beretika dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Menguatnya Stabilitas Daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama
	2. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)				
	3. Indeks Layanan Keagamaan				
	4. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)				
	5. Nilai Dimensi Kohesi Sosial IPMas		Indeks Pembangunan Kebudayaan		Indeks Pembangunan Kebudayaan
S34. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	6. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	S13. Meningkatnya layanan infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di pedesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Risiko Bencana	Menurunnya risiko bencana di seluruh wilayah	Indeks Risiko Bencana
	7. Penurunan Potensi Kerugian Ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB pada empat sektor prioritas (kelautan&pesisir, air, pertanian dan kesehatan)				
	8. Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana				

Sumber: Analisis Bapperida, 2025

4.3. PROGRAM PRIORITAS DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2026

Prioritas dan sasaran Pembangunan daerah Kota Bogor 2026 diimplementasikan melalui program prioritas dan program Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota Bogor. Penjabaran prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor pada RKPD Tahun 2026 ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah disajikan pada tabel 4.10 berikut:



Tabel 4.12
Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah dalam Program dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah
Kota Bogor Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Daerah	JANJI POLITIK		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
(P1) Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani			147.290.540.542	
	1	Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru	24.417.108.000	Dinas Pendidikan
	2	Subsidi biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu	14.310.750.000	Dinas Pendidikan
	3	Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur	7.680.000.000	Setda
	4	Meningkatkan gaji dan fasilitas guru honorer	53.001.722.600	Setda
	5	Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu	1.381.208.000	Dinas Pendidikan
	6	Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal	5.141.279.000	
	7	Mengembangkan command center	15.134.559.400	Diskominfo
	8	Pengembangan CCTV di Lokasi Strategis	514.995.000	Diskominfo
	9	Pemasangan Wifi gratis di seluruh Fasilitas Publik	1.190.836.600	Diskominfo
	10	Pembangunan gedung pemerintahan terpadu	2.905.055.220	DPUPR
	11	Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online berkolaborasi dengan aparaturn penegak hukum dan wilayah	414.397.632	Diskominfo
	12	Memberikan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Yang Berhadapan dengan Hukum	354.800.000	Setda
	13	PELAYANAN JEMPUT BOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.102.737.400	Disdukcapil
	14	Pelayanan Jemput Bola Perizinan	121.064.980	DPMPTSP

Prioritas Pembangunan Daerah	JANJI POLITIK		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	15	Penguatan sarana prasarana pelayanan publik (Kantor kecamatan dan kelurahan)	19.620.026.710	DPUPR
(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan			347.791.818.841	
	1	Pemeriksaan kesehatan gratis	14.402.146.505	Dinkes
	2	Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan sub spesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya.	8.981.683.340	Dinkes
	3	Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas	3.034.932.000	Dinkes
	4	Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat dan bencana alam	1.377.717.596	Dinkes
	5	Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin	83.025.768.000	Dinkes
	6	Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling	83.025.768.000	Dinkes
	7	Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (8 Disabilitas & lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling.	3.267.527.000	Dinkes
	8	Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur	4.801.551.000	DPPKB
	9	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan.	470.096.000	DKPP
	10	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	1.137.750.000	DLH
	11	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)	2.565.629.700	DPUPR

Prioritas Pembangunan Daerah	JANJI POLITIK		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	12	Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan ekspos perubahan iklim dan resiko bencana	350.000.000	DPUPR
	13	Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu	33.254.000.000	Disperumkim
	14	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	1.671.995.500	Disdik
	15	Pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat di 4 kecamatan	8.884.600.000	Dispora
	16	Revitalisasi Gor Pajajaran Menjadi Pusat Olahraga dan Gedung kreatif dan seni terpadu	90.506.681.000	Dispora
(P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi			19.852.290.687	
	1	Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional	13.280.831.424	DKUKMDagin
	2	Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor	4.136.496.864	Disnaker
	3	Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan	66.600.000	DKUKMDagin
	4	Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya lokal	686.562.600	Disparbud
	5	Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)	310.579.200	DKUKMDagin

Prioritas Pembangunan Daerah	JANJI POLITIK		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	6	Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif	406.001.700	DKUKMDagin
	7	Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas	965.218.899	Dispora
(P4) Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana			67.691.389.382	
	1	Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik	50.182.476.148	Dishub
	2	Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda	97.636.200	Dishub
	3	Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	7.339.380.200	Dishub
	4	Promosi Penggunaan Transportasi Umum: Melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum dengan memperkenalkan program-program insentif seperti tarif terjangkau atau diskon untuk pelajar dan pekerja	200.000.000	Dishub
	5	Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Kebon Pedes		DPUPR
	6	Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi	200.000.000	DPUPR
	7	Pembangunan lanjutan R3	5.492.215.734	DPUPR
	8	Pembangunan lanjutan R2	3.200.000.000	DPUPR

Prioritas Pembangunan Daerah	JANJI POLITIK		ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
	9	Proses persiapan dokumen perencanaan pembangunan Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR)		DPUPR
	10	Pemasangan CCTV di lokasi-lokasi strategis untuk keamanan dan 5 pemantauan arus lalu lintas.	979.681.100	DisKominfo
TOTAL			896.207.107.358	

4.3.1. Penjabaran Prioritas Pembangunan ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah

Penjabaran prioritas dan sasaran Pembangunan daerah tahun 2026 kedalam program prioritas dan program Pembangunan daerah, disertai indicator kinerja program, pagu anggaran dan perangkat daerah penanggung jawab, sebagaimana disajikan pada tabel 4.10 di bawah ini:



Tabel 4.13
Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 1

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
1	Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui Wajib Belajar 13 tahun	Harapan lama Sekolah	13,54	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berstandar Nasional: Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru untuk meningkatkan daya tampung serta mengembangkan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif dari tingkat dasar hingga menengah. 2. Transformasi Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Meningkatkan literasi dan edukasi melalui inovasi kurikulum berbasis TIK serta mengintegrasikan model pembelajaran hybrid dan digital untuk memperluas akses pendidikan. 3. Penguatan Kompetensi Pendidik yang Adaptif dan Modern: Meningkatkan gaji dan fasilitas bagi guru honorer serta memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran digital dan inovatif. 4. Pengembangan Kurikulum Berbasis Sains Kreatif dan Design Thinking dengan merancang kurikulum yang menekankan kreativitas, pemecahan masalah, dan inovasi serta memastikan materi ajar sesuai dengan standar industri dan perkembangan ilmu pengetahuan global. 5. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu dan Tata Kelola Pendidikan Daerah dengan memastikan setiap siswa yang lulus pendidikan formal dan non-formal	Program Pengelolaan Pendidikan	Presentase Anak Putus Sekolah yang lulus Paket A, Paket B dan Paket C	78.805	Dinas Pendidikan
			Rerata Capaian Pembelajaran (Average Harmonized Test Scores)	74,35		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penduduk miskin yang bersekolah di MA, SMA/SMK dan Mahasiswa yang mendapat bantuan sosial siswa Miskin	32	Bagian Kesejahteraan Rakyat
						Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks SPM (Pendidikan)	78,81	Dinas Pendidikan
							Jumlah Kumulatif beasiswa yang diberikan pada mahasiswa beprestasi tidak mampu	115	
		Persentase siswa miskin yang mendapatkan BSM	N/A						
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1)	0,6067		Dinas Arsip dan perpustakaan			
			Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM 2)	0,1717					
			Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3)	1,00000					

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					(SD, SMP) mendapatkan ijazah serta memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. 6. Pemerataan dan Peningkatan Akses Pendidikan di Semua Jenjang dengan memberikan subsidi biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu di SD dan SMP serta memastikan inklusivitas dalam pendidikan, terutama bagi kelompok rentan dan daerah terpencil. 7. Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi Melalui Beasiswa dan Kerja Sama Akademik dengan memperluas beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu serta membangun kerja sama dengan perguruan tinggi nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas lulusan. 8. Pengembangan Fasilitas Sekolah Berbasis Sains Kreatif melalui penyediaan laboratorium dan ruang inovasi untuk mendukung pengembangan sains kreatif serta mendorong integrasi teknologi dan metode pembelajaran interaktif dalam proses pengajaran. 9. Peningkatan kualitas pemerataan, pembinaan perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat dalam peningkatan literasi masyarakat dengan memperluas akses terhadap perpustakaan, meningkatkan koleksi buku, serta mendorong program literasi berbasis komunitas.		Tingkat kunjungan masyarakat perhari (UPLM 4) Perpustakaan yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan (SNP) (UPLM 5) Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6) Anggota Perpustakaan (UPLM 7)	0,8497 1,0000 1,0000 1,0000	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
		Meningkatnya pemajuan Kebudayaan Bangsa	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	8,63	1. Peningkatan penyelenggaraan pengembangan kebudayaan melalui festival budaya, pertunjukan seni, dan program edukasi berbasis kearifan lokal untuk melestarikan warisan budaya. 2. Peningkatan jumlah pelaku dan lembaga kesenian tradisional dalam pelestarian seni dan budaya dengan memberikan pelatihan, fasilitasi akses panggung, dan dukungan finansial bagi seniman tradisional. 3. Peningkatan pembinaan sejarah melalui edukasi sejarah bagi masyarakat, peningkatan dokumentasi sejarah lokal, serta penguatan kurikulum sejarah di lembaga pendidikan. 4. Peningkatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan revitalisasi situs bersejarah, perlindungan dari ancaman kerusakan, serta promosi nilai budaya kepada masyarakat luas. 5. Peningkatan kunjungan ke museum melalui modernisasi museum, peningkatan koleksi dan daya tarik wisata edukatif, serta program edukasi berbasis pengalaman bagi pengunjung.	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang diinventarisasi	100	Dinas Arsip dan perpustakaan
						Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah event seni budaya di Kota Bogor	58	Dinas Pariwisata dan kebudayaan
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase lembaga seni tradisional yang dibina	60	
						Program Pembinaan Sejarah	Persentase pelaku pelestari sejarah yang ditingkatkan kompetensinya	15.8	
						Program pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase status ODCB menjadi CB	8.2	
						Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah kunjungan ke museum	240,187	
		Meningkatnya kesejahteraan dan ketahanan Keluarga sebagai pilar utama penggerak pembangunan	Indeks Pembangunan Keluarga	63,11	1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pendampingan keluarga melalui penyuluhan keluarga, program parenting berbasis riset, serta layanan konseling bagi keluarga yang menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi. 2. Pengendalian jumlah penduduk dengan mengoptimalkan program Keluarga Berencana (KB), edukasi kesehatan reproduksi, serta peningkatan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase layanan konseling /konsultasi yang terlayani PUSPAGA	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Pemenuhan Hak Anak	1 Skor pada Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) KLA	104	
							2 Skor pada Klaster2 (Perlindungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) KLA	135	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
		n SDM Unggul			akses terhadap layanan kesehatan yang mendukung keseimbangan pertumbuhan penduduk. 3. Peningkatan kualitas keluarga melalui program edukasi keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta penguatan ketahanan keluarga berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai sosial. 4. Pemenuhan hak anak dengan memastikan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lingkungan yang aman, serta program perlindungan sosial untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. 5. Perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi dengan memperkuat regulasi, layanan rehabilitasi korban, serta kampanye pencegahan kekerasan berbasis komunitas.		3 Skor pada klaster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) KLA	145	
							4 Skor pada Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) KLA	102	
						Program Perlindungan Khusus Anak	Skor pada Klaster V (Perlindungan Khusus Anak)	102	
						Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender	100	
							Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	100	
						Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100000 penduduk perempuan)	11.48	DPPKB
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif	70	
						Program Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	58,85	
							1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	100	Dinas Kependudukan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Pendaftaran Penduduk	2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	80,01	dan Catatan Sipil
						Program Pencatatan Sipil	1. Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang Melaporkan	70	
							2. Persentase anak berusia 0-5 Tahun nyang memiliki akta kelahiran	97,0	
							3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	63	
							4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	63,0	
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	50	
		Meningkatnya kualitas dan daya saing generasi muda	Indeks Pembangunan Pemuda	65,71	1. Peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan dengan memperluas akses beasiswa, pelatihan vokasi, dan program magang di sektor industri kreatif dan teknologi. 2. Penguatan kepemimpinan dan karakter pemuda melalui program mentorship, pelatihan kepemimpinan, serta fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan untuk membentuk pemimpin muda yang berintegritas dan inovatif. 3. Peningkatan prestasi pemuda dalam bidang olahraga, seni, dan sains dengan menyediakan pelatihan intensif, dukungan fasilitas, serta kompetisi berjenjang dari tingkat lokal hingga	Program Pengembangan Kapasitas Dan Daya Saing Kepemudaan	Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	55	Dinas Pemuda dan Olah Raga
							Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	45	
							persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	22	
							Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	4	
							Persentase pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan	2,18	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					internasional. 4. Pengembangan ekosistem inovasi dan kewirausahaan pemuda melalui inkubasi bisnis, startup hub, serta akses pendanaan bagi pemuda berbakat di bidang teknologi, ekonomi kreatif, dan bisnis berkelanjutan. 5. Revitalisasi GOR Pajajaran menjadi pusat olahraga dan gedung kreatif terpadu untuk mendukung pengembangan bakat pemuda dalam bidang olahraga, seni, dan budaya dengan fasilitas yang modern dan kompetitif. 6. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah dan nasional dengan memperluas keterlibatan pemuda dalam perumusan kebijakan, program pembangunan berkelanjutan, serta partisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan. 7. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi bagi pemuda dengan membangun platform digital untuk pengembangan keterampilan, kolaborasi kreatif, dan jejaring global dalam bidang akademik, bisnis, serta inovasi sosial.		Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional	35	
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	100	
						Program Pengembangan Daya Saing Kapasitas Keolahragaan	Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR berstandar Nasional atau Internasional	100	
							Persentase Peningkatan Masyarakat yang menggunakan sarana prasarana Olahraga dikelola Dispora	6	
						Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (cross cutting)	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender	100.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Pengelola Sistem Data Gender dan Anak (cross cutting)	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	100.00	
						Program Perlindungan Perempuan (cross cutting)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100000 penduduk perempuan)	11.48	
							Indeks SPM (Pendidikan)	77,77	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Pengelolaan Pendidikan (Cross Cutting)	Jumlah Kumulatif beasiswa yang diberikan pada mahasiswa beprestasi tidak mamapu	115	Dinas Pendidikan
							Presentase Anak Putus Sekolah yang lulus Paket A, Paket B dan Paket C	N/A	
							Persentase siswa msikin yang mendapatkan BSM	N/A	
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (cross cutting)	Angka Kematian Ibu	91	Dinas Kesehatan
							Angka Kematian Bayi	6,8	
							Angka Kematian Balita	7,5	
							Prevalensi Penderita Hipertensi	8,7	
							Prevalensi Diabetes Melitus	2,08	
							Prevalensi ODGJ	0,14	
							Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	92	
							Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90	
							Insiden rate HIV	0,18	
							Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100	
							Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,2	
							Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100	
							Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,67	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
							Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar	84	
							Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	60	
							Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui kunjungan rumah	95	
							Predikat STBM	Madya	
							Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional)	100	
							Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,10	
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (cross Cutting)	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif	70	DPPKB
						Program Penempatan Tenaga Kerja (cross cutting)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	94.80	Dinas Tenaga Kerja
						Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (cross cutting)	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi	100	
						Program Pengelolaan Aplikasi Dan Informatika	Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penilaian SPBE	3.77	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terciptanya tata kelola pemerintah	Indeks SPBE	4,1	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart government dengan memperkuat sistem digitalisasi layanan, memperluas				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah	
		n berbasis elektronik			akses e-government, serta membangun sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. 2. Percepatan digitalisasi layanan publik dan penguatan pemerintahan digital melalui audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), optimalisasi platform layanan terpadu, serta peningkatan responsivitas terhadap laporan masyarakat. 3. Penguatan infrastruktur dan literasi digital untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor prioritasdengan membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merata, meningkatkan pemanfaatan teknologi di sektor strategis, serta memperluas edukasi digital bagi masyarakat. 4. Pengembangan smart city yang inklusif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan Internet of Things (IoT), menerapkan konsep ekonomi sirkular, memperluas jaringan internet di area blankspot, serta membangun command center, CCTV di lokasi strategis, dan Wi-Fi gratis di fasilitas publik untuk meningkatkan keamanan dan aksesibilitas layanan masyarakat. 5. Optimalisasi sistem keamanan digital dalam pemerintahan berbasis elektronik melalui enkripsi data, penguatan firewall, serta penerapan teknologi blockchain 6. Peningkatan penerapan keamanan informasi di pemerintah kota dengan memperkuat sistem proteksi data, implementasi standar keamanan siber, serta membangun pusat keamanan informasi		Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan keamanan informasi Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Indeks Pembangunan Statistik Indeks Prinsip Satu Data Indonesia Indeks Kualitas Data Indeks Proses Bisnis Statistik Indeks Kelembagaan Indeks Statistik Nasional Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Persentase Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi	4.12 04.02 3.90 85.71 N/A 2.75 N/A N/A N/A N/A 70,05 90	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					7. Penguatan regulasi dan kebijakan tata kelola keamanan informasi. 8. Peningkatan pengelolaan satu data Indonesia dan statistik sektoral 9. Peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik				
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	70	1. Optimalisasi Peran Sekretariat DPRD dalam Fasilitasi Komunikasi Politik dan Hubungan Kelembagaan, Penguatan Kemitraan antara DPRD, Eksekutif, dan Masyarakat Sipil, 2. Peningkatan kualitas pelayanan melalui: a. Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan b. Pelayanan jemput bola perizinan c. Penguatan sarana prasarana pelayanan publik 3. Peningkatan kualitas layanan protokol dan komunikasi pimpinan 4. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi pengadaan barang dan jasa, menguatnya SDM dan kelembagaan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 5. Peningkatan kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan 6. Optimalisasi Pengelolaan Arsip Daerah dan Arsip Perangkat Daerah 7. Peningkatan kualitas penyelamatan dan pelestarian arsip 8. Peningkatan kualitas pemanfaatan Arsip 9. Penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman 10. Penyusunan roadmap sains kreatif	Program Penelitian dan pengembangan	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKK dimensi Perencanaan, transparansi dan keterlibatan AK dalam perumusan Kebijakan $\geq 29,25$ Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKK dimensi Implementasi dan evaluasi kemanfaatan Kebijakan $\geq 35,75$ Persentase dokumen rekomendasi kebijakan yang diusulkan menjadi kebijakan	57,1 57,1 100	Bapperida
						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Aspek harmonisasi produk hukum daerah Nilai Aspek kompetensi SDM perancang produk hukum daerah Nilai Aspek deregulasi produk hukum daerah Nilai Aspek penataan data base per-UU Daerah Persentase terfasilitasinya layanan bantuan hukum litigasi Persentase terfasilitasinya layanan bantuan hukum non litigasi	22 24,6 27,3 20 100 100	Bagian Hukum dan HAM

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					11. Pembentukan design council dan forum sains kreatif 12. Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan 13. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian terapan melalui modernisasi laboratorium, penyediaan fasilitas riset yang memadai, serta penguatan infrastruktur teknologi untuk menunjang inovasi ekonomi berbasis sains. 14. Peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM peneliti dengan mendorong peningkatan kapasitas akademik, memberikan insentif bagi peneliti dan inovator, serta memperkuat ekosistem riset berbasis kolaborasi lintas sektor. 15. Pengembangan platform diseminasi produk penelitian dan inovasi terapan melalui digitalisasi hasil riset, peningkatan akses bagi industri dan UMKM terhadap inovasi teknologi, serta membangun ekosistem transfer teknologi yang lebih inklusif. 16. Inisiasi Innovation Valley Kota Bogor dan penguatan kolaborasi dalam ekosistem sains kreatif dengan menjadikan Kota Bogor sebagai University Town yang mendorong sinergi antara lembaga penelitian, universitas, komunitas sains kreatif, serta sektor industri guna mempercepat penerapan hasil riset dalam dunia usaha. 17. Peningkatan penyelenggaraan penataan produk hukum daerah dan bantuan hukum daerah 18. Peningkatan kualitas layanan				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					bantuan hukum 19. Peningkatan unit kerja yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM				
		Terwujudnya ASN yang memiliki integritas tinggi berorientasi pada pelayanan, akuntable, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif	Nilai hasil survey penilaian integritas	78,12	1. Peningkatan kualitas pengelolaan SDM Aparatur 2. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Assistensi	Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pembangunan ZI dengan nilai ≥ 75	45.71	Inspektorat
	Indeks Berakhlak		76,1			Program Kepegawaian Daerah	Indek Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan.	114	BKPSDM
							Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemen Kinerja, Disiplin dan Penghargaan	165	
							Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	44	
			Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat		38			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,66	1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Adaptif dan Responsif, Reformasi Birokrasi Berbasis Digital dan Inovasi Pelayanan Publik, Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pemeliharaan Kantor Kecamatan Bogor Barat dan beberapa kelurahan termasuk Kel. Loji, Kel. Gunung Batu, Kelurahan Bubulak, Kel. Pasir Jaya, serta	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Inovasi dengan tingkat kematangan > 100 pada tahun ke n	22	Bapperida	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai kematangan organisasi lebih dari 50 poin	57,14	Bagian Organisasi Setda	
						Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM diatas sama dengan 3.5	81		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					pembebasan lahan dan pembangunan Kantor Kel. Situgede guna meningkatkan pelayanan administratif bagi masyarakat. 3. Pemeliharaan Kantor Kecamatan Bogor Selatan dan sejumlah kelurahan seperti Kel. Batu Tulis, Kel. Bojungkerta, Kel. Bondongan, Kel. Cikaret, Kel. Cipaku, Kel. Empang, Kel. Genteng, Kel. Harjasari, Kel. Kertamaya, Kel. Lawang Gintung, Kel. Muarasari, Kel. Mulyaharja, Kel. Pamoyanan, Kel. Rancamaya, Kel. Ranga Mekar, serta pengadaan Kantor Kel. Pakuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik.		Rata Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah aspek Pelaporan Kinerja	12,65	
					4. Pemeliharaan Kantor Kecamatan Bogor Utara dan beberapa kelurahan seperti Kel. Bantarjati, Kel. Cibuluh, Kel. Ciluar, Kel. Cimahpar, Kel. Ciparigi, Kel. Kedunghalang, Kel. Tanah Baru, dan Kel. Tegal Gundil dalam rangka memperkuat sarana pelayanan pemerintahan daerah.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Rencana Kerja DPRD yang di fasilitasi sesuai fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	100	Sekretariat DPRD
					5. Pemeliharaan kantor kelurahan di wilayah pusat Kota Bogor, termasuk Kel. Pabaton, Kel. Sempur, Kel. Babakan, Kel. Tegal Lega, Kel. Kebon Kelapa, Kel. Paledang, Kel. Babakan Pasar, Kel. Gudang, dan Kel. Cibogor guna meningkatkan kenyamanan serta efisiensi pelayanan publik.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	26,00 26,10 12,00 20,00	Seluruh Perangkat Daerah
					6. Pemeliharaan dan pembangunan kantor kelurahan di wilayah timur meliputi Kel. Baranangsiang, Kel. Sindangrasa, DED dan pembangunan Kel. Sindangsari, serta pemeliharaan Kel. Katulampa dan Kel. Sukasari untuk	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	95%	Kecamatan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					memperkuat infrastruktur pelayanan masyarakat. 7. Pembangunan Kantor Kel. Sukaresmi serta pemeliharaan sejumlah kelurahan lainnya seperti Kel. Sukadamai, Kel. Mekarwangi, Kel. Tanah Saeral, Kel. Kedungjaya, Kel. Kencana, dan Kel. Cibadak dalam rangka meningkatkan kapasitas serta efektivitas pelayanan pemerintahan lokal. 8. Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan 9. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan	23%	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	23%	Kecamatan
						Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rata-rata Nilai Skor EPDESKEL	371	Bagian Administrasi Pemerintahan
							Rata-rata Nilai skor PRODESKEL	0,74	
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan kelurah	70	
						Program Penataan Bangunan Gedung (cross cutting)	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	30	Dinas PUPR
							Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin	65	
						Program Pelayanan Penanaman Modal (cross cutting)	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100	DPMPTSP

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
		Meningkatny a akuntabilitas kinerja dan keuangan serta menguatnya sistem pengendalian internal pemerintah	Opini BPK	WTP	1. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan prestasi kerja pemerintah melalui penerapan transparansi anggaran, penguatan sistem akuntabilitas keuangan daerah, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 2. Peningkatan penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dengan pendekatan digitalisasi manajemen aset, inventarisasi dan legalisasi aset strategis, serta optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan efisiensi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah. 3. Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui peningkatan literasi kebijakan publik, keterlibatan dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif, serta penguatan mekanisme kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. 4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 5. Peningkatan kualtas perencanaan lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan 6. Peningkatan kualtas perencanaan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 7. Peningkatan pencapaian kinerja pembangunan daerah	Program Peyelenggaraan Pengawasan	Persentase Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Tingkat Perangkat Daerah denga	97,22	Inspektorat
			SAKIP Tingkat Kota	BB (78,25)		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100	BKAD
			Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 (3,335)			Persentase kepatuhan pengalokasian anggaran mandatory sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	
							Persentase transparansi perencanaan Penganggaran	100	
							Persentase transparansi pelaksanaan APBD	100	
							Persentase penyerapan realisasi anggaran dalam APBD	90,5	
							Persentase Kepatuhan Pensertifikatan tanah	100	
							Persentase Kepatuhan Pengamanan Fisik	100	
							Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan stock opname dan BA rekon	100	
							Persentase Capaian Kelengkapan Atribut Peralatan dan Mesin BMD	98,01	
						Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Perencanaan Kinerja minimal 25.50	94,29	Bapperida

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					8. Peningkatan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan 9. Peningkatan kinerja pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 10. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah 11. Optimalisasi pencapaian pelaksanaan program dan SPM di setiap urusan pemerintahan dan penguatan kerjasama daerah 12. Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Integrasi dan Sinergi Pengawasan Intern dengan Manajemen Risiko. 13. Peningkatan unit kerja yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24.00	82,86	
						Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	27,00	
							Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia	26,35	
							Rata-Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Perencanaan Kinerja lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan	27,50	
							Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan	27,30	
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan protokol dan komunikasi pimpinan	100	Bagian Organisasi Setda
						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penyelenggaraan Pemerintahan/ Persentase peningkatan capaian realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penyelenggaraan Pemerintahan	96,03	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase capaian SPM (Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal)	96	Bagian PBJ Setda
							Persentase Kebijakan di Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kewilayah Yang Terlaksana	100	
							Persentase kerjasama yang diimplementasikan	92,5	
							Persentase Realisasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Strategis	87,25	
							Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan sesuai perencanaan	67,44	
						Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Strategis	87,25	Bagian Administrasi Pembangunan Setda
							Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan sesuai perencanaan	67,44	
						Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang hasil audit kearsipan bernilai minimal Baik	80	Dinas Arsip dan Perpustakaan
						Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang diselamatkan, dilestarikan dan dimanfaatkan	54	
						Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase arsip tertutup yang dibuatkan sarana temu baliknya	34	
						Program Perumusan	Nilai Komponen Struktur dan Proses SPIP	2,94	Inspektorat

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Capaian MCP KPK Pada Komponen Pengawasan APIP	91	
						Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Cross cutting)	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Perencanaan Kinerja minimal 25.50	94,29	Bapperida
							Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Pengukuran Kinerja minimal 25.50	85,71	
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah (cross cutting)	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	100	BKAD
							Persentase kepatuhan pengalokasian anggaran mandatory sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	
							Persentase transparansi perencanaan Penganggaran	100	
							Persentase transparansi pelaksanaan APBD	100	
							Persentase penyerapan realisasi anggaran dalam APBD	90,5	
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (cross cutting)	Persentase Kepatuhan Pensertipikatan Tanah	100	BKAD
							Persentase Kepatuhan Pengamanan Fisik	100	
							Persentase Ketepatan waktu penyampaian laporan stock opname dan BA rekon	100	
							Persentase Capaian Kelengkapan Atribut Peralatan dan Mesin BMD	98,01	

Tabel 4.14
Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada prioritas Pembangunan 2

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
2	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas hunian masyarakat	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	53,62	1. Peningkatan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pembinaan dan pengawasan melalui penguatan sistem audit internal, peningkatan kapasitas SDM auditor, serta penerapan teknologi dalam monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan. 2. Pengurangan jumlah rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh melalui program rehabilitasi permukiman, peningkatan akses sanitasi, penyediaan infrastruktur permukiman, serta pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas hunian. 3. Optimalisasi pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dengan penyediaan skema bantuan hunian berbasis kebutuhan korban, percepatan rehabilitasi pascabencana, serta penguatan sistem mitigasi dan	Program Peningkatan Prasarana Sarana Umum	Persentase panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	30%	Dinas Perumahan dan Permukiman
							Persentase drainase perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	30%	
							Persentase luas tembok penahan tanah yang dibangun untuk pengamanan kawasan permukiman dan pencegahan bencana	37%	
							Persentase Pengelolaan Makam yang di kelola Pemerintah	25,29	
						Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah	40%	
							Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	18,41%	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					kesiapsiagaan permukiman terhadap risiko bencana. 4. Meningkatkan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) guna mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memastikan penyediaan infrastruktur dasar, optimalisasi tata ruang, serta pemenuhan aksesibilitas bagi masyarakat. 5. Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni dan berkurangnya luas kawasan kumuh dengan program rehabilitasi rumah bagi warga berpenghasilan rendah, percepatan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), serta penataan kawasan padat penduduk dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat.		Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	11,39%	
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni	100	
							Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang di fasilitasi untuk menghuni rumah layak huni	100	
							Persentase tingkat hunian rusunawa	95,37	
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di luar kawasan kumuh kewenangan kota yang mendapat bantuan perbaikan rumah	31	
		Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar	Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	6,49	1. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bogor melalui peningkatan kapasitas produksi dan distribusi air bersih oleh PDAM Tirta Pakuan, perluasan jaringan perpipaan, optimalisasi sumber air baku, serta penerapan teknologi pengolahan air ramah lingkungan 2. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dengan memperluas jaringan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Cakupan layanan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	74,33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian	73,8			Cakupan layanan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	99,04	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	81,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
			Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%)		komunal, meningkatkan cakupan layanan sanitasi layak, mengembangkan kebijakan pengelolaan air limbah berbasis kawasan, serta mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan terhadap pembuangan limbah rumah tangga dan industri kecil di Kota Bogor.		Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	6,49	
		Menurunnya resiko bencana di seluruh wilayah	Indeks Resiko Bencana	58,02	1. Optimalisasi upaya pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas mitigasi bencana berbasis komunitas di daerah rawan longsor dan banjir seperti wilayah Bogor Selatan dan Bogor Barat, membangun infrastruktur tahan bencana, serta memperkuat sistem peringatan dini untuk bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di Kota Bogor. 2. Optimalisasi pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran serta non-kebakaran melalui peningkatan kapasitas dan jumlah pos pemadam kebakaran di kecamatan yang memiliki permukiman padat seperti Bogor Tengah dan Bogor Utara, modernisasi armada dan peralatan pemadam kebakaran, serta penguatan edukasi masyarakat terkait pencegahan kebakaran dan respons cepat terhadap keadaan darurat.	Program Pengelolaan Sumberdaya Air	Persentase Sungai yang ber kondisi baik (%)	89,97	
							Persentase Irigasi yang ber kondisi baik (%)	56,13	
							Persentase rawan banjir yang ditangani	20,24	
						Program Penanggulangan Bencana	Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	100%	BPBD
							Persentase masyarakat tangguh bencana	45,59	
							Persentase SPAB	1,15	
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Rata Rata respon time penanganan kebakaran	10,50	DPKP

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	76,14	1. Meningkatkan fasilitas olahraga yang sesuai standar, aman, dan inklusif, Meningkatkan event olahraga sebagai sarana promosi pariwisata dan ekonomi lokal. 2. Terpenuhiya SDM Kesehatan Unggul 3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana kefarmasian, alat kesehatan dan produk makanan minuman yang memenuhi standar kesehatan 4. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat 5. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat 6. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pangan Masyarakat 7. Peningkatan kualitas pangan segar asal tumbuhan 8. Peningkatan kualitas pangan asal hewan 9. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan 10. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat 11. Percepatan penuntasan stunting, dan kelebihan gizi melalui peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam, pengayaan zat gizi, dan jaminan	Program Pengembangan Daya Saing Kapasitas Keolahragaan (cross cutting)	Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR berstandar Nasional atau Internasional	100	Dinas Pemuda dan Olah Raga
			Prevalensi Stunting (Data BPB)	2,25					
			Prevalensi Stunting	14,97			Persentase Peningkatan Masyarakat yang menggunakan sarana prasarana Olahraga dikelola Dispora	6	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan	86	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan 12. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat 13. Peningkatan kesertaan ber-KB 14. Menurunnya angka kelahiran pada usia remaja	Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	89	
							Rasio Nakes dan Named terhadap populasi	23	
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan	45,0	
							Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian	62	
							Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan	65,0	
							Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi	71	
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Penderita Hipertensi	8,7	
							Prevalensi Diabetes Melitus	2,08	
							Insiden rate HIV	0,18	
							Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional)	100,00	
							Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,10	
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	74,11	
							Persentase kelurahan siaga aktif mandiri	17,65	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (cross cutting)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Ketersediaan energi	2400	
							Ketersediaan Protein	63	
						Program Pengawasan Keamanan Pangan (cross cutting)	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi (%)	96	
							Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	54,55	
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (cross cutting)	Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (%)	83	
							Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)	4,5	
						Program Penanganan Kerawanan Pangan (cross cutting)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	91	Dinas kesehatan
							Angka Kematian Bayi	6,8	
							Angka Kematian Balita	7,5	
							Prevalensi Penderita Hipertensi	8,7	
							Prevalensi Diabetes Melitus	2,08	
							Prevalensi ODGJ	0,14	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
							Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	92	
							Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90	
							Insiden rate HIV	0,18	
							Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100	
							Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,2	
							Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100	
							Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,67	
							Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar	84	
							Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	60	
							Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui kunjungan rumah	95,00	
							Predikat STBM	Madya	
							Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional)	100,00	
							Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,10	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (cross cutting)	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	74,11	
							Persentase kelurahan siaga aktif mandiri	17,65	
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (cross cutting)	Persentase Peserta KB Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)	20,07	DPPKB
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (cross cutting)	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif	70	
						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (cross cutting)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,7	DKPP
							Ketersediaan energi	2400	
							Ketersediaan Protein	63	
						Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks SPM (Pendidikan)	78,805	Dinas Pendidikan
							Jumlah Kumulatif beasiswa yang diberikan pada mahasiswa beprestasi tidak mamapu	115	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (cross Cutting)	Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	81,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	6,49	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO ₂ Eq)	35.147,05	1. Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang 2. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Kota Bogor 3. Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui optimalisasi program bank sampah, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R) di setiap kecamatan, serta penguatan peran masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. 4. Penyediaan fasilitas dan armada angkutan sampah yang layak dan memadai dengan penambahan unit truk sampah, peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga dengan pendekatan sanitary landfill, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah modern seperti RDF (Refuse-Derived Fuel) untuk mengurangi ketergantungan pada lahan pembuangan sampah. 5. Perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan akses	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	66.67	Dinas Lingkungan Hidup
						Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	66.67	
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (cross cutting)	Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan	45,00	Dinas Perhubungan
							Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik	89,00	
							Persentase penetapan kebijakan rencana induk perkeretaapian dan turunannya	50	
						Program Penataan Bangunan Gedung (cross cutting)	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	30	Dinas PUPR
							Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin	65	
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (cross Cutting)	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	70,09	Dinas Lingkungan Hidup
							Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	76,67	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					perubahan iklim dan risiko bencana dengan penerapan konsep kota hijau (green city), penataan kawasan sempadan sungai dan daerah rawan bencana seperti Bogor Selatan dan Bogor Barat, serta integrasi strategi mitigasi perubahan iklim dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor.		Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,02	
					6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup 7. Peningkatan responsivitas penanganan pengaduan Lingkungan Hidup 8. Peningkatan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup 9. Meningkatkan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 10. Peningkatan Pemahaman Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga/Kegiatan/Usaha Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 11. Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga yang melakukan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup 12. Peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup 13. Peningkatan kualitas	Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (cross cutting)	Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dibangun	126,2	Dinas Perumahan dan Permukiman
							Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik	125,2	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					pengelolaan Ruang terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung				
		Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks kualitas udara	56,63	1. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air di Kota Bogor dengan konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, Cisadane, dan sungai-sungai lainnya, penguatan sistem peringatan dini terhadap risiko banjir dan krisis air, serta peningkatan kolaborasi antar-institusi dalam pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan air di Kota Bogor.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	58.45	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Air	71,5		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100	
			Indeks kualitas Tutupan lahan	38,88		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	70,09	
							Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	76,67	
							Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,02	
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	44		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	17,3	
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Adiwiyata	35,70	
							Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan	19,02	
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	33,33	
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (cross cutting)	Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan	45,00	Dinas Perhubungan
							Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik	89,00	
						Program Pengelolaan Perkeretaapian (cross cutting)	Persentase penetapan kebijakan rencana induk perkeretaapian dan turunannya	50	
						Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (cross cutting)	Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dibangun	126,2	Dinas Perumahan dan Permukiman
							Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik	125,2	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (cross cutting)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	58,45	Dinas Lingkungan hidup
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (cross cutting)	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100	
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (cross Cutting)	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	70,09	
							Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	76,67	
							Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,02	
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (cross cutting)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	44	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat (cross cutting)	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	17,30	
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (cross cutting)	Persentase Sekolah Adiwiyata	35,70	
							Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan	19,02	
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup (cross cutting)	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	33,33	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (cross cutting)	Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	81,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	6,49	
						Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dibangun	126,2	Dinas Perumahan dan Permukiman
							Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik	125,2	
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	70,09	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						kerusakan lingkungan hidup (cross Cutting)	Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	76,67	
							Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi	0,02	
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (cross cutting)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	67.00	Dinas PUPR
						Program Penataan Bangunan Gedung (cross cutting)	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	30	
							Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin	65	
						Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya (cross cutting)	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRWK/RDTRK)	1	
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (cross cutting)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	67.00	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang
						Program Penataan Bangunan Gedung (cross cutting)	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	30	
							Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin	65	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya (cross cutting)	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRWK/RDTRK)	1	

Tabel 4.15
Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 3

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
3	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Terciptanya akselerasi penanggulangan kemiskinan & peningkatan kesejahteraan Sosial	Angka Kemiskinan	6	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi masyarakat pemerlu Kesejahteraan Sosial 2. Peningkatan pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat pemerlu kesejahteraan sosial 3. Optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat korban bencana 4. Peningkatan keterpaduan dan ketepatan sasaran intervensi program pengentasan kemiskinan 5. Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat 6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat melalui optimalisasi layanan di Puskesmas dan RSUD, penyediaan layanan kesehatan berbasis teknologi (telemedicine), serta peningkatan cakupan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan rentan. 7. Penguatan Perencanaan dan Perumusan Kebijakan yang Berbasis Data dan Evidence-Based Policy 8. Peningkatan Keterbukaan Kesempatan Kerja 9. Peningkatan kompetensi Para Pencari Kerja 10. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. (Presentase pelayanan PPKS yang dimaksud di luar korban bencana alam dan sosial, fakir miskin, PRSE, ODHA, NAPZA, dan anak terlantar)	100%	Dinas Sosial
							(jumlah penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan yg direhabilitasi/ jumlah total penyandang disabilitas dan korban tindak kekerasan) x 100%)	100%	
						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penanganan perlindungan sosial bagi Anak Terlantar	100,00%	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					11. Peningkatan Kualitas Kebijakan dan kualitas layanan penyelesaian kasus di Sektor Ketenagakerjaan				
							Persentase Penurunan PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	55,61%	
							Persentase data Kemiskinan yang tervalidasi	33,3	
							Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan	63,38	
						Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	
						Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase Dunia usaha yang memiliki izin penyelenggaraan UGB dan pengumpulan uang/barang	100%	
							Persentase PSKS kelembagaan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	61,79%	
							Persentase PSKS Perseorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	32,92%	
							Persentase Makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik	100%	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Hubungan Industrial (cross cutting)	Penetapan besaran UMK	1	Dinas Tenaga Kerja
							Persentase rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	Dinas Kesehatan
							Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi	100	
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (cross cutting)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	91	
							Angka Kematian Bayi	6,8	
							Angka Kematian Balita	7,5	
							Prevalensi Penderita Hipertensi	8,7	
							Prevalensi Diabetes Melitus	2,08	
							Prevalensi ODGJ	0,14	
							Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	92	
							Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90	
							Insiden rate HIV	0,18	
							Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100	
							Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,2	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
							Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100	
							Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,67	
							Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar	84	
							Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	60	
							Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui kunjungan rumah	95,00	
							Predikat STBM	Madya	
							Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional)	100,00	
							Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,10	
						Program Pengelolaan Pendidikan (cross cutting)	Indeks SPM (Pendidikan)	78,805	Dinas Pendidikan
							Jumlah Kumulatif beasiswa yang diberikan pada mahasiswa beprestasi tidak mamapu	115	
							Presentase Anak Putus Sekolah yang lulus Paket A, Paket B dan Paket C	N/A	
							Persentase siswa msikin yang mendapatkan BSM	N/A	
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi capaian kinerja pemberian hibah untuk lembaga keagamaan	90	Bagian Kesra Setda
							Persentase penduduk miskin yang bersekolah di MA, SMA/SMK dan	32	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
							Mahasiswa yang mendapat bantuan sosial siswa Miskin		
						Program Penanganan Kerawanan Pangan (cross cutting)	Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)	4.5	DKPP
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (cross cutting)	Nilai Aspek harmonisasi produk hukum daerah	22	Bagian Hukum dan HAM Setda
							Nilai Aspek kompetensi SDM perancang produk hukum daerah	24,6	
							Nilai Aspek deregulasi produk hukum daerah	27,3	
							Nilai Aspek penataan data base per-UU Daerah	20	
							Persentase terfasilitasinya layanan bantuan hukum litigasi	100	
							Persentase terfasilitasinya layanan bantuan hukum non litigasi	100	
						Program Penempatan Tenaga Kerja (cross cutting)	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	94.80	Dinas Tenaga Kerja
						Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (cross cutting)	Presentase Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat Kompetensi	100	
							Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up)	2,00	Dinas KUKM DAGIN

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Pengembangan UMKM (cross cutting)	Persentase produk UMKM Binaan yang meningkat omzet penjualannya	4,40	
							Persentase pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital	7,00	
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (cross cutting)	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha	16,00	
							Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan	4,40	
							Persentase rata rata peningkatan omzet usaha mikro per orang per tahun	4,40	
						Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (cross cutting)	Persentase Koperasi USP yang mematuhi ketentuan perijinan	N/A	
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (cross cutting)	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	53.33	
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (cross cutting)	Persentase Koperasi Aktif	9.36	
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (cross cutting)	Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Konsumsi) (%)	1	DKPP
							Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Hias) (%)	1	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (cross cutting)	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	4	
						Program Penyuluhan pertanian (cross cutting)	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	75,94	
							Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming (%)	9,54	
						Program Kawasan Permukiman (cross cutting)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah	40%	Dinas Perumahan dan Permukiman
							Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	18,41%	
							Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	11,39%	
						Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (cross cutting)	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah	40%	Dinas Perumahan dan Permukiman
							Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	18,41%	
							Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	11,39%	
						Program Pengelolaan dan Pengembangan	cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	81,00	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah		
						Sistem Air Limbah (cross Cutting)	Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	6,49	BPBD		
						Program Penanggulangan Bencana (cross cutting)	Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	100%			
							Persentase masyarakat tangguh bencana	45,59			
							Persentase SPAB	1,15			
		Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,99		1. Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan sebagai pusat ekonomi lokal berbasis wisata kuliner dengan melibatkan komunitas setempat serta mendukung produk khas daerah. 2. Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya tarik wisata berbasis budaya lokal, dengan menata infrastruktur, meningkatkan branding wisata, serta menjadikannya sebagai ruang kreatif bagi masyarakat untuk menampilkan seni dan	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran (cross cutting)	Persentase Kelurahan Tanggap Kebakaran	79,41	DPKP	
							Persentase SDM Aparatur Damkar dan Penyelamatan yang ditingkatkan Kompetensinya	40			
							Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	94.80		
			Laju PDRB sektor Jasa akomodasi dan Makan Minum (ADHB)	5,27		Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi	100	Dinas tenaga Kerja		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
			Laju PDRB Sektor Perdagangan	18,97	budaya. 3. Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam akses permodalan dan pemasaran melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di setiap kelurahan, regulasi yang mendorong ASN membeli produk UMKM, serta kemitraan dengan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar. 4. Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk mendorong pelaku usaha baru naik kelas dengan menyediakan pelatihan, mentoring bisnis, serta akses ke jaringan investor dan pasar global. 5. Penyediaan portal akses promosi dan pemasaran bagi UMKM dan industri kreatif dengan membangun platform digital yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen serta meningkatkan literasi digital bagi UMKM agar mampu bersaing di era e-commerce. 6. Revitalisasi GOR Pajajaran menjadi pusat olahraga dan gedung kreatif serta seni budaya dengan konsep multi-fungsi, termasuk ruang pameran seni, coworking space bagi pelaku industri kreatif, serta fasilitas olahraga yang lebih modern dan inklusif. 7. Peningkatan kualitas usaha dan pendapatan UMKM 8. Peningkatan pemberdayaan				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					usaha mikro dan usaha ultra mikro 9. Peningkatan pelayanan Izin Usaha simpan pinjam 10. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian 11. Peningkatan kualitas pengawasan dan pemeriksaan koperasi 12. Peningkatan penilaian kesehatan Koperasi 13. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi 14. Peningkatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan sektor UMKM 15. Peningkatan Pemasaran Produk Dalam negeri 16. Peningkatan nilai penjualan produk ke Luar negeri (Ekspor) 17. Peningkatan peningkatan sarana distribusi perdagangan 18. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian perizinan serta pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan 19. Peningkatan pengawasan terhadap standarisasi sarana perdagangan 20. Peningkatan perusahaan industri yang terdaftar dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) 21. Peningkatan pengembangan Industri Kecil Menengah 22. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					23. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan dan Non perizinan 24. Peningkatan realisasi Halal Food Center, peningkatan sertifikasi produk UMKM, penguatan literasi halal, dan pengembangan pariwisata syariah, dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Bogor sebagai destinasi halal unggulan.				
						Program Hubungan Industrial (cross cutting)	Penetapan besaran UMK	1	
							Persentase rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	
							Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi	100	
						Program Pengembangan UMKM (cross cutting)	Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up)	2,00	Dinas KUKM Dagin
							Persentase produk UMKM Binaan yang meningkat omzet penjualannya	4,40	
							Persentase pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital	7,00	
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (cross cutting)	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha	16,00	
							Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan	4,40	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					KOTA		Persentase rata rata peningkatan omzet usaha mikro per orang per tahun	4,40	
						Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (cross cutting)	Persentase Koperasi USP yang mematuhi ketentuan perijinan	N/A	
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (cross cutting)	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	53.33	
						Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (cross cutting)	Persentase Koperasi Aktif	9.36	
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (cross cutting)	Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Konsumsi) (%)	1	DKPP
							Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Hias) (%)	1	
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (cross cutting)	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	4	
						Program Penyuluhan pertanian (cross cutting)	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	75,94	
							Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming (%)	9,54	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (cross cutting)	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0,91	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	95	
						Program Pengembangan Kapasitas Dan Daya Saing Kepemudaan (cross cutting)	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	22	Dinas Pemuda dan Olahraga
							Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	4	
							Persentase pemuda yang mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan	2,18	
							Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional	35	
						Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan Jumlah Event Skala Internasional/ Nasional/ Provinsi/ regional yang terselenggara di Kota Bogor	10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							Persentase kerjasama dan kemitraan kepariwisataan	14,28	
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	9.404.626	
							Lama Tinggal Wisatawan	2	
							Tingkat Hunian Kamar Hotel	70.49	
							Persentase peningkatan jumlah Daya Tarik Wisata	2,94	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0,91	
							Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru	95	
						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAK Kekayaan Intelektual	N/A	N/A	
						Program Penelitian Dan Pengembangan (Cross cutting)	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKK dimensi Perencanaan, transparansi dan keterlibatan AK dalam perumusan Kebijakan $\geq 29,25$	57,1	Bapperida
							Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKK dimensi Implementasi dan evaluasi kemanfaatan Kebijakan $\geq 35,75$	57,1	
							Persentase dokumen rekomendasi kebijakan yang diusulkan menjadi kebijakan	100	Dinas KUKMdagin
							Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up)	2,00	
							Persentase produk UMKM Binaan yang meningkat omzet penjualannya	4,40	
							Persentase pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital	7,00	
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha	16,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Usaha Kecil Dan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan	4,40	
							Persentase rata rata peningkatan omzet usaha mikro per orang per tahun	4,40	
						Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi USP yang mematuhi ketentuan perijinan	N/A	
						Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	53.33	
						Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	12.26	
						Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Sehat	17.16	
						Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	9.36	
						Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase realisasi rencana kebijakan sektor perekonomian	74	Bagian Perekonomian Setda
							Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memperoleh KUR (Data SIKP)	5,1	
							Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi pengendalian Inflasi Daerah	79,3	
							Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kontribusi Deviden BUMD pada PAD	35672656599	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
\			Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan	18,74		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang difasilitasi pemasarannya dari data UMKM yang terverifikasi dalam aplikasi SOLUSI	19.50	Dinas KUKMDagin
						Program Pengembangan Ekspor	Nilai realisasi ekspor	154735167.19	
						Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)	14.28	
						Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin	50.00	
						Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang)	68.14	
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Industri Kecil Menengah yang teregistrasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	27.2	
						Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah yang produktif	24.7	
			Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)	34,76		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal para Pelaku Usaha	90	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi		2.019			
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Jumlah Kebijakan atau Regulasi Penanaman Modal yang Terimplementasi		100			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi	100	
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100	
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (cross cutting)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	67	
		Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	71,65	1. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan melalui optimalisasi program ketahanan pangan berbasis urban farming, penguatan distribusi pangan murah, serta pengembangan sistem data dan informasi ketahanan pangan yang terintegrasi dengan program kesejahteraan sosial. 2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pangan Masyarakat 3. Peningkatan kualitas pangan segar asal tumbuhan 4. Peningkatan kualitas pangan asal hewan 5. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan 6. Peningkatan Pemberdayaan pembudidaya ikan 7. Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,7	DKPP
							Ketersediaan energi	2400	
							Ketersediaan Protein	63	
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi (%)	96	
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	54,55	
							Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (%)	83	
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)	4.5	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					8. Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 9. Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 10. Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 11. Peningkatan Penyuluhan Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Konsumsi) (%)	1	
							Persentase peningkatan produksi perikanan (Ikan Hias) (%)	1	
						Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan	4	
						Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura (26 item)	61,8	
							persentase pemenuhan sarana peternakan (3 item)	51,28	
						Program Penyuluhan pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	75,94	
							Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming (%)	9,54	
						Program Pengelolaan Pendidikan (cross cutting)	Indeks SPM (Pendidikan)	78,81	Dinas Pendidikan
							Jumlah Kumulatif beasiswa yang diberikan pada mahasiswa beprestasi tidak mamapu	115	
							Presentase Anak Putus Sekolah yang lulus Paket A, Paket B dan Paket C	N/A	
							Persentase siswa msikin yang mendapatkan BSM	N/A	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (cross Cutting)	cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	81,00	Dinas Kesehatan
							Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	6,49	
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (cross cutting)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	91	
							Angka Kematian Bayi	6,8	
							Angka Kematian Balita	7,5	
							Prevalensi Penderita Hipertensi	8,7	
							Prevalensi Diabetes Melitus	2,08	
							Prevalensi ODGJ	0,14	
							Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP)	92	
							Angka Keberhasilan Pengobatan TB	90	
							Insiden rate HIV	0,18	
							Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	100	
							Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	87,2	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
							Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	100	
							Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	0,67	
							Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar	84	
							Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	60	
							Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui kunjungan rumah	95,00	
							Predikat STBM	Madya	
							Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional)	100	
							Capaian SPM RSUD Kota Bogor	93,10	
						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (cross cutting)	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif	70	DPPKB
						Program Stabilitas Harga Bahan Pokok Dan Barang Penting (cross cutting)	Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	<9,00	Dinas KUKMDagin
		Menguatnya Stabilitas Daerah	Tingkat Inflasi (%)	1,5-3,5	1. Optimalisasi Kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2. Peningkatan pengawasan terhadap stabilitas harga bahan pokok dan barang penting	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase realisasi rencana kebijakan sektor perekonomian	74	Bagian Perekonomian Setda
							Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Memperoleh KUR (Data SIKP)	5,1	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah	
			Kapasitas fiskal daerah	1,65	3. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi pengendalian Inflasi Daerah	79,3	Dinas KUKMdagin	
					4. Peningkatan kinerja BUMD dan kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan BUMD		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah Kontribusi Deviden BUMD pada PAD	35672656599		
					5. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Stabilitas Harga Bahan Pokok Dan Barang Penting	Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	<9,00		
					6. Peningkatan kompetensi anggota satpol pp dan Linmas	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Cross cutting)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,7	DKPP	
					7. Peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah		Ketersediaan energi	2400		
					8. Optimalisasi ketepatan sasaran intervensi program kesejahteraan rakyat di bidang pelayanan dasar dan pelayanan non dasar		Ketersediaan Protein	63		
					9. Peningkatan kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sosial	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (cross cutting)	Persentase tingkat keselamatan jalan	35	Dinas Perhubungan	
					10. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan		Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan	45		
					11. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik	89		
					12. Peningkatan peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Program pengelolaan pendapatan daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	1.224.732.427.374	Bapenda	
					13. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Target Penerimaan Retribusi Daerah	396.974.657.213		
					14. Peningkatan kualitas	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Paket Pekerjaan Strategis	87,25	Bagian Perekonomian Setda	
							Persentase Ketepatan Waktu pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan sesuai perencanaan	67,44		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Program Pemasaran Pariwisata (cross cutting)	Persentase peningkatan Jumlah Event Skala Internasional/ Nasional/ Provinsi/ regional yang terselenggara di Kota Bogor	10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							Persentase kerjasama dan kemitraan kepariwisataan	14,28	
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (cross cutting)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	9.404.626	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
							Lama Tinggal Wisatawan	2	
							Tingkat Hunian Kamar Hotel	70.49	
							Persentase peningkatan jumlah Daya Tarik Wisata	2,94	
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (cross cutting)	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	67	Dinas PUPR
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (cross cutting)	Persentase tingkat keselamatan jalan	35	Dinas Perhubungan
							Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan	45	
							Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik	89	
							Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi	94,5	
			Indeks Kerukunan	81,21		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman,keindahan)	100	Satpol PP

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
			Umat Beragama				Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	59,4	
							Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100	
						Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi capaian kinerja pemberian hibah untuk lembaga keagamaan	90	Bagian Kesra Setda
							Persentase penduduk miskin yang bersekolah di MA, SMA/SMK dan Mahasiswa yang mendapat bantuan sosial siswa Miskin	90	
						Program Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Sara yang Tertangani	100	BAKESBANGPOL
						Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk	14 : 10	
						Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kelurahan Bersih narkoba (bersinar)	44,12	
						Peningkatan Peran dan Partai Politik dan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	N/A	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Patisipasi Perempuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bogor	N/A	
							Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada	N/A	
						Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang ada pada strata Dewasa	9,43	
						Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik	100%	DINAS SOSIAL

Tabel 4.14
Keselarasan Program Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan 4

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
4	Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)	0,58	1. Peningkatan produktivitas di berbagai sektor perekonomian melalui investasi di bidang teknologi, inovasi, dan infrastruktur dengan mendorong penerapan teknologi dalam sektor industri, pertanian, dan jasa, serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital dan smart economy. 2. Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi jaringan produksi dan distribusi dengan memperbaiki konektivitas antarwilayah, optimalisasi logistic hub, dan modernisasi sistem distribusi barang untuk mendukung daya saing ekonomi lokal dan global. 3. Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau dengan membangun kawasan berbasis TOD yang terintegrasi dengan pusat bisnis dan permukiman, serta mendorong pemanfaatan kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya. 4. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat keselamatan jalan	35,00	Dinas Perhubungan
							Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan	45,00	
							Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik	89,00	
							Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi	94,50	
						Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase penetapan kebijakan rencana induk perkeretaapian dan turunannya	50	
						Program Penyelenggaraan Jalan (cross cutting)	Persentase jalan berkondisi mantap	90,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
					massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan dengan peningkatan layanan angkutan umum yang terjangkau, ramah lingkungan, dan terkoneksi dengan moda transportasi lainnya untuk mengurangi kemacetan dan emisi karbon. 5. Peningkatan pengelolaan Perlintasan kereta api dalam daerah kota				
		Meningkatnya kualitas jalan	Presentase Jalan dalam Kondisi Mantap	90,05	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan diantaranya dengan Pembangunan Fly Over Bondes, Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi, Pembangunan gedung pemerintahan terpadu 2. Peningkatan kualitas drainase, Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Drainase secara Teknis dan Fungsional. 3. Peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan berkondisi mantap	90.06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase yang berkondisi baik	70	
							persentase penurunan lokasi genangan	0,87	
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	N/A	
		Meningkatnya kualitas ruang kota	Presentase Jalan dalam Kondisi Mantap	53,47	1. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah 2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung 3. Peningkatan kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	67.00	Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang
						Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	30	
							Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin	65	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kerja Sasaran	Target 2026	Strategi	Program	Indikator Kerja Program	Target 2026	Perangkat Daerah
						Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRWK/RDTRK)	1	

4.3.2. Dukungan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah terhadap Prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional dalam Tahun 2026

Dalam rangka penyelarasan Pembangunan di Pembangunan Kota Bogor maka dilakukan persandingan yang menunjukkan dukungan program prioritas daerah pada RKPD 2026 terhadap prioritas Nasional dan Program Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026 serta Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2026, dengan prioritas Pembangunan Jawa Barat tahun 2026 yang disajikan pada tabel 4.16 berikut:



Tabel 4.16
Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Kota Bogor Terhadap Program Prioritas Nasional

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
PN.01	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia					
-	-	-	-			-
PN.02	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru					
1	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	1. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SPALD 2. Meningkatnya keberfungsian dan kualitas infastruktur SPALD	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Unit Pengolahan Setempat	DPUPR
2	Pengembangan SPAM terintegrasi Hulu ke Hilir	1. Meningkatnya Jumlah dan Kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir 2. Meningkatnya jumlah lembaga pengelola SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin dan berkala	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	DPUPR
3	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	1. Meningkatnya sampah yang dikelola 2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah	Program pengelolaan persampahan	Pengelolaan Sampah	-Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus -Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus - Pelaksanaan penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kab/kota	DLH

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
4	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Menurunnya sampah residu yang masuk di TPA/LUR	Program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan - Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	DPUPR
5	Pengembangan Pangan lokal dan Nabati	Meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	DKPP
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	DKPP

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
PN.03	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi					
6	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Meningkatnya kontribusi koperasi sektor produksi terhadap total kontribusi koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota" - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota" - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota" - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota"	DinKUKMDagin
PN.04	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas					
7	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Disdik
8	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya pemerataan kota dan pelayanan pendidikan pra sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Disdik

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
					PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
9	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Tercapainya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas	Program pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Disdik

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
					Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal /Kesetaraan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	
10	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Tercapainya penurunan kasus dan putus sekolah dan anak tidak sekolah	Program pengelolaan pendidikan	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan"	- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/kesetaraan	Disdik

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
11	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	Terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan data pelajaran	Program pengelolaan pendidikan	- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pengelolaan Pendidikan Sekolah PAUD - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan"	- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/kesetaraan - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/kesetaraan - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Fomral/Kesetaraan	Disdik

12	1. Pencegahan dan Penurunan Stunting 2. Penurunan Kematian Ibu dan Anak	1. Pencegahan dan Penurunan Stunting melalui pendekatan spesifik dan sensitif 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar dengan persalinan di fasyankes, memperkuat deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan emergensi, pelayanan darah, tata laksana balita sakit, serta imunisasi	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan -Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya -Pengelolaan Surveilans Kesehatan -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA -Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko	Dinkes

					Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan -Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular -Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat -Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah -Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional -Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat -Operasional Pelayanan Rumah Sakit -Operasional Pelayanan Puskesmas -Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya -Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota -Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) -Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah -Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DANPENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	DPPKB
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	DPPKB
13	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia yang mencari pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit, dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya -Pembangunan Puskesmas -Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya -Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan -Pengembangan Puskesmas -Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya -Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit -Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas -Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya -Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan -Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan -Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi -Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat	Dinkes

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
					Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit -Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
14	1. Penuntasan TBC 2. Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	1. Tercapainya melalui peningkatan upaya pencegahan TBC, intensifikasi penemuan kasus secara masif dan pengobatan TBC sampai tuntas 2. Meningkatnya pengendalian penyakit Kusta & Schistosomiasis.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis -Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV -Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis -Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) -Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Dinkes
15	Investasi pelayanan kesehatan primer (puskesmas, posyandu)	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinkes

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
16	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan RS di seluruh Indonesia dan berkembangnya pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses sulit masuk layanan kesehatan bergerak	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya -Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota -Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan -Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinkes
17	Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Meningkatnya Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan dengan mendorong peningkatan, Pemenuhan, dan pemerataan dari sisi produksi, kompetensi, jumlah, maupun jenis dari SDM keseharan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah	Program peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	- Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinkes
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	- Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes
18	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi	Meningkatnya peran BRIDA dalam Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Bapperida

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	- Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Bapperida
19	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Terbinanya olahragawan muda yang mampu bersaing di kancah global	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Dispora
PN.05	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri					
-	-	-	-			-
PN.06	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan					
20	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial, yang adaptif terhadap berbagai kondisi	Program Pemberdayaan Sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dinsos
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	- Penyediaan Sandang Bantu - Penyediaan Alat Bantu - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinsos
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan -Pemberian Layanan Kedaruratan -Penyediaan Sandang -Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti -Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial -Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA"	Dinsos
21	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro" - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro" - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro" - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro" - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	- Penjangkauan Anak-Anak Terlantar - Rujukan Anak-Anak Terlantar - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan	Dinsos

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
				Usaha Mikro dan Usaha Kecil" - Pemulihan Usaha Mikro - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil" - Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro" - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro" - Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan"		
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Dinsos
22	Fasilitasi Perumahan dengan PSU	Penyediaan Terintegrasi	Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Disperumkim

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	- Koordinasi untuk Menyepakati Penerimaan dan Jenis Pelayanan - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
23	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produlftif	Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro" - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro" - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro" - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan"	DinKUKMDagin
			Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi"	DinKUKMDagin
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan"	DinKUKMDagin
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota" - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	DinKUKMDagin

No	Prioritas Pembangunan dan Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	PIC
1	2	3	4	5	6	7
					pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan" - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota"	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota" - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota"	DinKUKMDagin
PN.07	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan					
24	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif	Program kepegawaian daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa	BKPSDM
PN.08	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur					
25	1. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa 2. Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Terwujudnya kawasan pemajuan kebudayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM kebudayaan	-Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	-Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	- Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya - Penetapan Cagar Budaya - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Disparbud

Sumber : Analisis Bapperida, 2025

KOTA BOGOR

Tabel 4.17
Tingkat Dukungan Prioritas Pembangunan Kota Bogor Terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan /Program Prioritas Provinsi Jawa Barat	Kegiatan Unggulan Provinsi Jawa Barat	Dukungan Program Kota Bogor	PIC
1	2	3	4	5
1	P1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul			
	Program peningkatan dan Pemerataan Akses dan kualitas layanan kesehatan dan layanan pengobatan tradisional	1. Peningkatan dan Pemerataan Layanan Kesehatan Primer dan Layanan Pengobatan Tradisional 2. "Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses"	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	Program penanganan stunting dan peningkatan gizi dan nutrisi bagi anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui	Penanganan Stunting dan Peningkatan Gizi dan Nutrisi bagi Anak, Balita, serta Ibu Hamil dan Menyusui	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKB
	Program peningkatan ketahanan sosial budaya dan toleransi beragama	Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya dan Toleransi Beragama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Bakesbangpol
	Program peningkatan ketahanan daerah, hukum, dan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan Ketahanan Daerah, Hukum, dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Setda (Hukum), Satpol PP

No	Prioritas Pembangunan /Program Prioritas Provinsi Jawa Barat	Kegiatan Unggulan Provinsi Jawa Barat	Dukungan Program Kota Bogor	PIC
1	2	3	4	5
	Program pengembangan pendidikan dasar dan menengah berkarakter berbasis kearifan lokal dan iptek serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi	Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal dan IPTEK serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Disdik, Setda (Kesra)
	program peningkatan inovasi	Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Bapperida
	Program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas keluarga, pengarusutamaan gender, pembangunan pemuda dan perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas)	Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Lokal dan Informal	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 4. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dispora, DPPP, Dinsos
2	P2 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif			
	Program pengembangan industri pengolahan terintegrasi berbasis potensi sumber daya lokal	Pengembangan Industri Pengolahan Terintegrasi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	DisKUKM Dagin
	program restrukturisasi dan pengembangan BUMD	Restrukturisasi dan Pengembangan BUMD	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Setda
	Program penguatan integrasi rantai pasok produksi melalui perdagangan dalam dan luar negeri	Penguatan Rantai Pasok Produksi melalui Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	DisKUKM Dagin
	program peningkatan dan pemerataan investasi	-	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPSTP
	Program pengembangan ekosistem hijau dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	-	-
	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	Pengendalian Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Setda
	Meningkatnya digitalisasi pada sektor-sektor ekonomi strategis	Pengembangan digitalisasi sektor Ekonomi Strategis	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Setda
	Program penciptaan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan pasar kerja dalam dan luar negeri	Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja serta Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Dalam dan Luar Negeri	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker

No	Prioritas Pembangunan /Program Prioritas Provinsi Jawa Barat	Kegiatan Unggulan Provinsi Jawa Barat	Dukungan Program Kota Bogor	PIC
1	2	3	4	5
	Program pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan daerah, ekonomi kreatif, dan pariwisata unggulan berbasis kearifan lingkungan	1. Pengembangan Kewirausahaan Daerah, Ekonomi Kreatif, dan Pariwisata Unggulan Berbasis Kearifan Lingkungan 2. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Disparbud
	Program peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan keahlian tenaga kerja dan calon tenaga kerja	-	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker
	Program peningkatan pendapatan petani dan nelayan	1. Pengembangan Ekosistem Pengelolaan Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan peningkatan kesejahteraan petani 2. KSPP Lumbung Pangan Lainnya	-	-
3	P3 Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin Dan Kaya			
	Program pembangunan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan serta peningkatan kualitas infrastruktur wilayah	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Perkotaan 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah 3. Penyediaan dan Pengawasan Infrastruktur Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
	Program pembangunan desa berbasis kearifan lokal dan lingkungan	1. Pembangunan Desa Berbasis Kearifan Lokal dan Lingkungan 2. Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa 3. Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) 3. Program Kawasan Permukiman	Disperumkim

No	Prioritas Pembangunan /Program Prioritas Provinsi Jawa Barat	Kegiatan Unggulan Provinsi Jawa Barat	Dukungan Program Kota Bogor	PIC
1	2	3	4	5
	Program peningkatan ketahanan air dan energi	1. Peningkatan Ketahanan Air dan Energi 2. Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	Program pengurangan resiko bencana	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1. Program Penanggulangan Bencana 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	BPBD, DLH, DPUPR
	Program peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim	1. Pengelolaan sampah mandiri dan terpadu 2. Pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	DLH
4	P4 Mewujudkan Birokrasi Yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan Sesuai Dengan Prinsip Good And Clean Governance			
	Program pengembangan riset, teknologi dan inovasi daerah	Pengembangan Riset, Teknologi dan Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Bapperida
	Program peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan	Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Diskominfo
	Program transformasi Birokrasi berbasis digital dan penguatan good governance, serta kerjasama daerah dan internasional.	Transformasi Birokrasi berbasis digital dan Penguatan Good Governance, serta Kerjasama Daerah dan Internasional	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo

Sumber : Analisis Bapperida, 2025

Tabel 4.18
Tingkat Dukungan Program Kegiatan terhadap Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program	Kegiatan Prioritas Walikota Bogor	PIC
1	2	3	4	5
1	(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)	DPUPR
2	(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	DLH
3	(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program pengelolaan persampahan	Penyediaan fasilitas & armada angkutan sampah yang layak & memadai	DPUPR
4	(P4) Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik	DISHUB
			Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda	DISHUB
			Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	DISHUB
5	(P4) Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Kebon Pedes	DPUPR
			Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi	DPUPR
			Pembangunan lanjutan R3, R2, Inner Ringroad	DPUPR
6	(P4) Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan ekspos perubahan iklim dan resiko bencana	DPUPR

No	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program	Kegiatan Prioritas Walikota Bogor	PIC
1	2	3	4	5
7	(P4) Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan gedung pemerintahan terpadu	DPUPR
8	(P4) Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Program pemasaran pariwisata	Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya lokal	Disparbud
9	(P1) Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pengelolaan pendidikan	Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru	Disdik
			Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu	Disdik, Kesra
			Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal	Disdik
			Meningkatkan gaji dan fasilitas guru honorer	Disdik
			- Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu	Disdik
			- Memfasilitasi akses beasiswa LPDP dan dari berbagai lembaga	Disdik
			- Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil - Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan.	Disdik
10	(P1) Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur	DPPKB
11	(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan.	DKPP

No	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program	Kegiatan Prioritas Walikota Bogor	PIC
1	2	3	4	5
11	(P1) Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Program pengelolaan pendidikan	Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Disdik
12	(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pemeriksaan kesehatan gratis	Dinkes
			penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas	Dinkes
			- Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan sub spesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya. - Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat - Membuat system pelayanan rujukan yang terpusat dan terintegrasi ke seluruh Rumah sakit di dalam dan diluar Kota Bogor - Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin - Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling - Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas & lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling.	Dinkes
13	(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas	Dispora
14	(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	- Pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat di 4 kecamatan - Revitalisasi Gor Pajajaran Menjadi Pusat Olahraga dan Gedung kreatif dan seni terpadu	Dispora, Disparbud
15	(P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	1. Program Pemberdayaan sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial	Memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin	Dinsos
16	(P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor	Disnaker

No	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program	Kegiatan Prioritas Walikota Bogor	PIC
1	2	3	4	5
17	(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program Pengembangan Perumahan	pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu	Disperumkim
18	(P2) Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Program Kawasan Permukiman	Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta	Disperumkim
19	(P3) Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Program pengembangan UMKM	- Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif - Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional - Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan - Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)	DinKUKM Dagin
20	(P1) Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	- Mengembangkan command center - Pengembangan CCTV di lokasi strategis - Pemasangan Wifi gratis di seluruh Fasilitas publik	Diskominfo
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online berkolaborasi dengan aparaturnya penegak hukum dan wilayah	Diskominfo, Satpol PP
			Promosi Penggunaan Transportasi Umum: Melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum dengan memperkenalkan program-program insentif seperti tarif terjangkau atau diskon untuk pelajar dan pekerja	Diskominfo, DISHUB
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Memberikan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Yang Berhadapan dengan Hukum	Setda
			Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur	Setda

No	Prioritas Pembangunan Kota Bogor	Program	Kegiatan Prioritas Walikota Bogor	PIC
1	2	3	4	5
		Program Penanggulangan Bencana	Bogor Quick Respon dalam penanganan Bencana	BPBD
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan sarana prasarana pelayanan publik	Kecamatan & Kelurahan
		Program Pencatatan Sipil	Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan	Disdukcapil
		Program Promosi Penanaman Modal	Pelayanan jemput bola perizinan	DPMPSTSP

Sumber : Analisis Bapperida, 2025

4.3.3. Dukungan Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan arah kebijakan pengarusutamaan (Mainstreaming) Pembangunan Nasional Tahun 2026

Program dan kegiatan tahun 2026 diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan disesuaikan dengan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2024. Dari hasil analisis arah program dan kegiatan Kota Bogor disesuaikan 10 (sepuluh) tujuan pembangunan berkelanjutan dari 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana tertuang dalam tabel 4.19 berikut ini.

Tabel 4.19
Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Terhadap Pelaksanaan Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 1: TANPA KEMISKINAN	
- Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. - Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. - Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial - Program Pemberdayaan Sosial - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Program Pengendalian Penduduk - Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pencatatan Sipil
Tujuan 2: TANPA KELAPARAN	
- Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. - Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2026 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. - Target 2.3 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2026 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi - kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil - dan menyusui, serta manula	- Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tujuan 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA	
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Program Rehabilitasi Sosial

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
- Target 3.3. pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. - Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. - Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. - Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. - Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. - Target 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. - Target 3.b.1(a) Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. - Target 3.c.1* Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - Program Pencatatan Sipil
Tujuan 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS	
- Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. - Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. - Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. - Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global - Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Tujuan 5: KESETARAAN GENDER	
- Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. - Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk	- Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pengarusutamaan Gender

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. - Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. - Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. - Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensikonferensi tersebut. - Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	Dan Pemberdayaan Perempuan
Tujuan 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	
- Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua - Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. - Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. - Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. - Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Tujuan 7: ENERGI BERSIH DAN TERJAGKAU	
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	-
Tujuan 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	
- Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. - Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya. - Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. - Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan	-

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
laki laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. - Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. - Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	
Tujuan 9: INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR	
- Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. - Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai masingmasing. - Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	-
Tujuan 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN	
- Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. - Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya - Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	-
Tujuan 11: KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Program Penanggulangan Bencana
Tujuan 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB	
- Target 12.4 ada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia lingkungan. - Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. - Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek	- Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) - Program Pengelolaan Persampahan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka. - Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. - Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia. - Target 14.6 Pada thn 2020, melarang bentukbentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	
Tujuan 16: PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	
- Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. - Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. - Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. - Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. - Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. - Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. - Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. - Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Perekonomian dan Pembangunan - Program Kepegawaian Daerah - Program Pencatatan Sipil
Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	
- Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. - Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. - Target 17.8 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	- Program Pengelolaan Keuangan Daerah - Program Perekonomian Dan Pembangunan - Program Kepegawaian Daerah - Program Pencatatan Sipil

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
- Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. - Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. - Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang	

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, Pemerintah Kota Bogor telah menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut telah diselaraskan dengan rancangan dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029 dan turut menjadi pedoman penyusunan prioritas pembangunan tahun 2026.

4.3.4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka rencana dan target kinerja untuk penerapan SPM pada 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar dapat dijelaskan pada tabel 4.17 berikut ini:

Tabel 4.20
Rencana Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kota Bogor Tahun 2026

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pendidikan dasar	Jumlah warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
		Rata-rata kemampuan ;iterasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebeluymnya	Setiap tahun				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi	Setiap tahun	
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan nilai Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun				

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (Sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru dipenuhi)	Setiap tahun	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					tata cara pemenuhan			SPM Bidang kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara Usia produktif yang mendapatkan yang mendapatakan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara Usia lanjut yang mendapatkan yang mendapatakan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatakan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan pelayan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi penyerdiaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator
		bencana kabupaten/kota						

Urusan Wajib pelayanan dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Urusan Ketentraman dan ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	Pelayan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Capaian						
		Penerimaan Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4.3.5. Arah Kebijakan Pendekatan Spasial

Pendekatan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2026. Penerapan pendekatan ruang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan antara RTRW dan Rancangan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025-2029.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor dituangkan dalam Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bogor adalah mewujudkan ruang Daerah Kota sebagai kota jasa dan permukiman dengan tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai kota pusaka yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan penataan ruang Daerah Kota meliputi:

- a. pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi;
- b. mengembangkan 4 (empat) Wilayah Pelayanan selain Pusat Kota, sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota;
- c. mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan;
- d. pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu;
- e. pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
- f. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor;
- g. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum;
- h. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- i. pelestarian kawasan cagar budaya;
- j. peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota;
- k. pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- l. pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan;
- m. pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan;
- n. pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- o. pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi.

Strategi penataan ruang Daerah Kota terdiri dari:

- a. strategi pemantapan peran Daerah Kota sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi meliputi:
 - 1) meningkatkan peran Daerah Kota sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan regional, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan barang skala regional. pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya;
 - 2) menyediakan infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan sekitar;
 - 3) menetapkan dan memantapkan kawasan lindung; dan
 - 4) mengembangkan kegiatan budi daya secara terpadu serasi, dan selaras sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. strategi mempertahankan PPK pada WP Samida sebagai kawasan pusaka yang berwawasan lingkungan meliputi:

mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan sekitar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor; dan

merevitalisasi PPK dengan tetap memperhatikan fungsi, identitas dan karakter Daerah Kota sebagai Kota Pusaka;
- c. strategi pemantapan fungsi utama masing-masing Sub PPK yang terpadu meliputi:
 - 1) mewujudkan pusat pertumbuhan baru sub PPK Pasima melalui pengembangan kawasan campuran;
 - 2) mewujudkan Sub PPK Utara sebagai kawasan perkotaan baru melalui pengembangan koridor pusat yang terpadu;
 - 3) mewujudkan Sub PPK Purwa sebagai salah satu gerbang kota melalui pengembangan kawasan campuran; dan
 - 4) mewujudkan sub PPK Daksina sebagai pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan campuran;
- d. strategi pengembangan PL untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan melalui mengembangkan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya;
- e. strategi mengembangkan 4 (empat) WP sebagai upaya redistribusi fungsi dan kegiatan dari pusat kota meliputi:
 - 1) mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta kawasan wisata pada WP Pasima sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang serta keberadaan Hutan Penelitian Dramaga dan kawasan lindung lainnya;
 - 2) mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Utara;
 - 3) mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala regional serta perumahan dengan pengaturan intensitas sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Purwa; dan

- 4) mengembangkan kegiatan agribisnis, perumahan, serta kegiatan jasa sesuai dengan daya tampung dan daya dukung ruang pada WP Daksina;
- f. strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik PPK, Sub PPK maupun PL dalam Daerah Kota dan Wilayah Kabupaten Bogor meliputi:
 - 1) sinergitas sistem jaringan jalan antara Daerah Kota dengan Kabupaten Bogor;
 - 2) meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar PPK, Sub PPK, dan PL;
 - 3) mengembangkan jalan lingkar dan jalan tembus;
 - 4) meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya PPK, Sub PPK, dan PL;
 - 5) mengembangkan sistem transportasi massal berbasis rel dan berbasis jalan;
 - 6) mengembangkan sistem pengelolaan lalu lintas;
 - 7) mengembangkan sistem jaringan lintas barang dari dan keluar Daerah Kota;
 - 8) mengembangkan terminal penumpang dan angkutan barang;
 - 9) mengembangkan konsep TOD pada titik pertemuan antar moda; dan
 - 10) mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki dan sistem jaringan perkotaan lainnya;
- g. strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana umum lainnya meliputi:
 - 1) mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - 2) melengkapi perumahan eksisting dengan prasarana dan sarana pendukung sesuai standar minimal yang ditetapkan;
 - 3) mengembangkan jaringan energi listrik dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - 4) mengembangkan jaringan gas;
 - 5) mengembangkan jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang masih belum terjangkau;
 - 6) mengembangkan jaringan sumber daya air;
 - 7) mengembangkan sistem jaringan air minum;
 - 8) meningkatkan sistem pengelolaan air limbah;
 - 9) meningkatkan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 10) meningkatkan sistem jaringan persampahan Daerah Kota;
 - 11) meningkatkan dan mengembangkan sistem drainase; dan
 - 12) mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana;
- h. Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung meliputi:
 - 1) menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - 2) mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah;
 - 3) merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi; dan
 - 4) meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung;

- i. Strategi pelestarian kawasan cagar budaya meliputi:
 - 1) menetapkan kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya;
 - 2) meningkatkan nilai kawasan pusaka dan bangunan cagar budaya; dan
 - 3) mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
- j. strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah Daerah Kota meliputi:
 - 1) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
 - 2) mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
 - 3) meningkatkan ketersediaan RTH melalui bank tanah (landbanking); dan
 - 4) mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH;
- k. strategi pengaturan pengembangan kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
 - 1) mengarahkan kawasan terbangun dengan intensitas kepadatan rendah, sedang, tinggi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 2) mengendalikan pengembangan kawasan PPK;
 - 3) mengoptimalkan pengembangan Sub PPK; dan
 - 4) membatasi pengembangan kawasan industri;
- l. strategi pengembangan ruang Daerah Kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan meliputi:
 - 1) menetapkan delineasi pengembangan kawasan dan/atau fungsi khusus, antara lain kawasan TOD, kawasan wisata ilmu pengetahuan, dan kawasan khusus lainnya;
 - 2) mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal pada sebagian PPK dan Sub PPK, kawasan atau bangunan fungsi campuran, superblok dan kawasan TOD; dan
 - 3) mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak, efisien, dan berkelanjutan;
- m. strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan lingkungan adalah:
 - 1) mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan lingkungan; dan
 - 2) menata kawasan KSK dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan;
- n. strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan sosial budaya adalah:
 - 1) mempertahankan, melindungi, dan menata kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan sosial budaya;
 - 2) mempertahankan nilai sejarah kawasan;
 - 3) menata kawasan dalam rangka perlindungan peninggalan budaya; dan
 - 4) mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan wisata;
- o. strategi pengembangan KSK dari sudut kepentingan ekonomi adalah:

- 1) mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar KSK sudut kepentingan ekonomi;
- 2) menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong masuknya investasi;
- 3) mengembangkan kawasan tematik; dan
- 4) mengintegrasikan konsep guna campuran, superblok dan TOD dengan kegiatan ekonomi.

4.3.5.1. Kebijakan Rencana Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang melalui penetapan pusat kegiatan di wilayah Daerah Kota yang merupakan rencana pengembangan sistem hirarki PPK, Sub PPK, dan PL.

Rencana pengembangan PPK dan Sub PPK, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) PPK terletak di kawasan pemerintahan dan perdagangan dan jasa di sekitar Kebun Raya Bogor;
- 2) Sub PPK Pasima terletak di Jl. KH. Abdullah Bin Nuh (Bubulak-Sindangbarang);
- 3) Sub PPK Utara terletak di Jl. KH. Sholeh Iskandar (Yasmin-Pasar Kemang);
- 4) Sub PPK Purwa terletak Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor; dan;
- 5) Sub PPK Daksina terletak di Jalan Raya Tajur-rencana jalan R3 – rencana jalan lingkar dalam;

Rencana pengembangan PL ditetapkan sebagai berikut:

- 1) PL Samida 1 terletak di sekitar Jalan Merdeka, Kelurahan Kebon Kalapa;
- 2) PL Samida 2 terletak di Kelurahan Situgede;
- 3) PL Pasima 1 terletak di Kelurahan Balumbang Jaya;
- 4) PL Pasima 2 terletak di Kelurahan Gunungbatu;
- 5) PL Utara 1 terletak di Kelurahan Mekarwangi;
- 6) PL Utara 2 terletak di Kelurahan Sukaresmi;
- 7) PL Utara 3 terletak di Kelurahan Kedungwaringin;
- 8) PL Utara 4 terletak di Kelurahan Cilendek Barat;
- 9) PL Purwa 1 terletak di Kelurahan Kedunghalang;
- 10) PL Purwa 2 terletak di Kelurahan Tanah Baru dan Ciluar;
- 11) PL Purwa 3 terletak di Kelurahan Cimahpar;
- 12) PL Purwa 4 terletak di Kelurahan Tegal Gundil;
- 13) PL Daksina 1 terletak di Kelurahan Katulampa;
- 14) PL Daksina 2 terletak di Kelurahan Kertamaya;
- 15) PL Daksina 3 terletak di Kelurahan Bojongkerta; dan

16) PL Daksina 4 terletak di Kelurahan Mulyaharja;

Pengembangan PPK dan Sub PPK dilaksanakan dengan pola pembangunan kawasan terpadu yang dilengkapi RTH, serta diarahkan kepada pembangunan vertikal dengan konsep green building.

4.3.5.2. Kebijakan Rencana Pola Ruang

Kebijakan Rencana pola ruang wilayah mencakup Kawasan Peruntukan Lindung dan Kawasan Peruntukan Budi daya yang dituangkan dalam Peta Rencana Tata Ruang Wilayah dalam skala 1:5.000.

4.3.5.2.1. Kawasan Peruntukan lindung meliputi:

- a. Kawasan perlindungan setempat dengan luasan kurang lebih 411 Ha (empat ratus sebelas Hektare) terdiri dari:
 - 1) sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane; anak sungai dan sempadan irigasi dan saluran;
 - 2) kawasan sekitar danau atau waduk Situ Gede, Situ Leutik, Situ Anggalena, Danau Bogor Raya, Situ Panjang.
- b. Kawasan konservasi merupakan kawasan pelestarian alam dengan luasan kurang lebih 85 Ha (delapan puluh lima Hektare) meliputi kawasan perlindungan plasma nutfah Kebun Raya Bogor.
- c. RTH publik dengan luas lebih kurang 2.230 Ha (dua ribu dua ratus tiga puluh Hektare) atau lebih kurang 20,02% (dua puluh koma nol dua persen) dari luas kota meliputi:
 - 1) rimba kota yaitu Hutan Penelitian Dramaga di Kelurahan Situ Gede;
 - 2) taman kota dan taman lingkungan (skala WP, Kecamatan, Kelurahan dan RW) menyebar di seluruh kecamatan;
 - 3) Tempat Pemakaman Umum, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah di Kelurahan Empang (Tempat Pemakaman Umum Dreded) untuk WP Samida, Kelurahan Situ Gede (Tempat Pemakaman Umum Situ Gede) untuk WP Pasima, Kelurahan Kebon Pedes (Tempat Pemakaman Umum Blender) dan Kelurahan Kayumanis (Tempat Pemakaman Umum Kayumanis) untuk WP Utara, Kelurahan Cimahpar (Tempat Pemakaman Umum Cimahpar) untuk WP Purwa, Kelurahan Mulyaharja (Tempat Pemakaman Umum Mulyaharja), Kelurahan Genteng (Tempat Pemakaman Umum Gunung Gadung), Kelurahan Cipaku (Tempat Pemakaman Umum Cipaku) untuk WP Daksina;
 - 4) kawasan konservasi yakni Kebun Raya Bogor;
 - 5) kebun penelitian di Kelurahan Menteng, Pasirjaya dan Pasirkuda Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah dan Kelurahan Kedungwaringin Kecamatan Tanah Sareal;

- 6) sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane; anak sungai dan sempadan irigasi dan saluran;
 - 7) kawasan sekitar danau atau waduk Situ Gede, Situ Leutik, Situ Anggalena, Danau Bogor Raya; Situ Panjang;
 - 8) jalur hijau jalan tol;
 - 9) jalur hijau jalan;
 - 10) jalur hijau rel kereta api; dan
 - 11) jalur hijau dibawah tegangan tinggi.
- d. RTH privat dikembangkan melalui:
- 1) RTH pekarangan rumah; dan
 - 2) RTH pekarangan industri, perkantoran, perdagangan jasa, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pertahanan keamanan, kawasan transportasi dan tempat usaha lainnya.

4.3.5.2.2. Kawasan peruntukan budi daya ditetapkan sebagai berikut:

a. kawasan pertanian;

- 1) Kawasan tanaman pangan tersebar di Kelurahan Balumbangjaya, Bubulak, Margajaya, Pasirjaya, Sindangbarang, Situgede Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Cikaret, Pakuan, Rancamaya, Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur dengan luas lebih kurang 127 Ha (seratus dua puluh tujuh Hektare).
- 2) Kawasan peternakan meliputi Rumah Potong Hewan sebagai Rumah Potong Hewan regional di Bubulak dengan luas lebih kurang 3 Ha (tiga Hektare).

b. kawasan peruntukan industri;

Kawasan peruntukan industri dengan luas lebih kurang 139 Ha (seratus tiga puluh sembilan Hektare) meliputi:

- 1) kegiatan industri yang telah ada di Kelurahan Cibuluh, Ciluar, Ciparigi, Kedunghalang, Tanahbaru Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Sindangrasa, Sindangsari, Tajur Kecamatan Bogor Timur, Kelurahan Batutulis, Empang, Harjasari, Lawanggintung, Muarasari, Pakuan, Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan dan Kelurahan Kayumanis, Kebonpedes, Kedungbadak, Tanah Sereal Kecamatan Tanah Sereal; dan
- 2) sentra industri kecil dan menengah diarahkan menyebar di setiap WP.

c. kawasan pariwisata;

Kawasan pariwisata dengan sebaran luas lebih kurang 46 Ha (empat puluh enam Hektare) meliputi:

- 1) wisata ilmu pengetahuan dan teknologi di Pusat Kota atau WP Samida;
- 2) wisata budaya di Kecamatan Bogor Tengah/WP Samida, Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima dan Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa;

- 3) wisata kuliner dan belanja di PPK (kawasan Bogor lama), Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Timur/WP Daksina (kawasan Tajur);
- 4) wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran atau *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE) di Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina;
- 5) wisata agro dan rekreasi alam di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina; dan
- 6) wisata taman rekreasi di Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina.

d. kawasan permukiman;

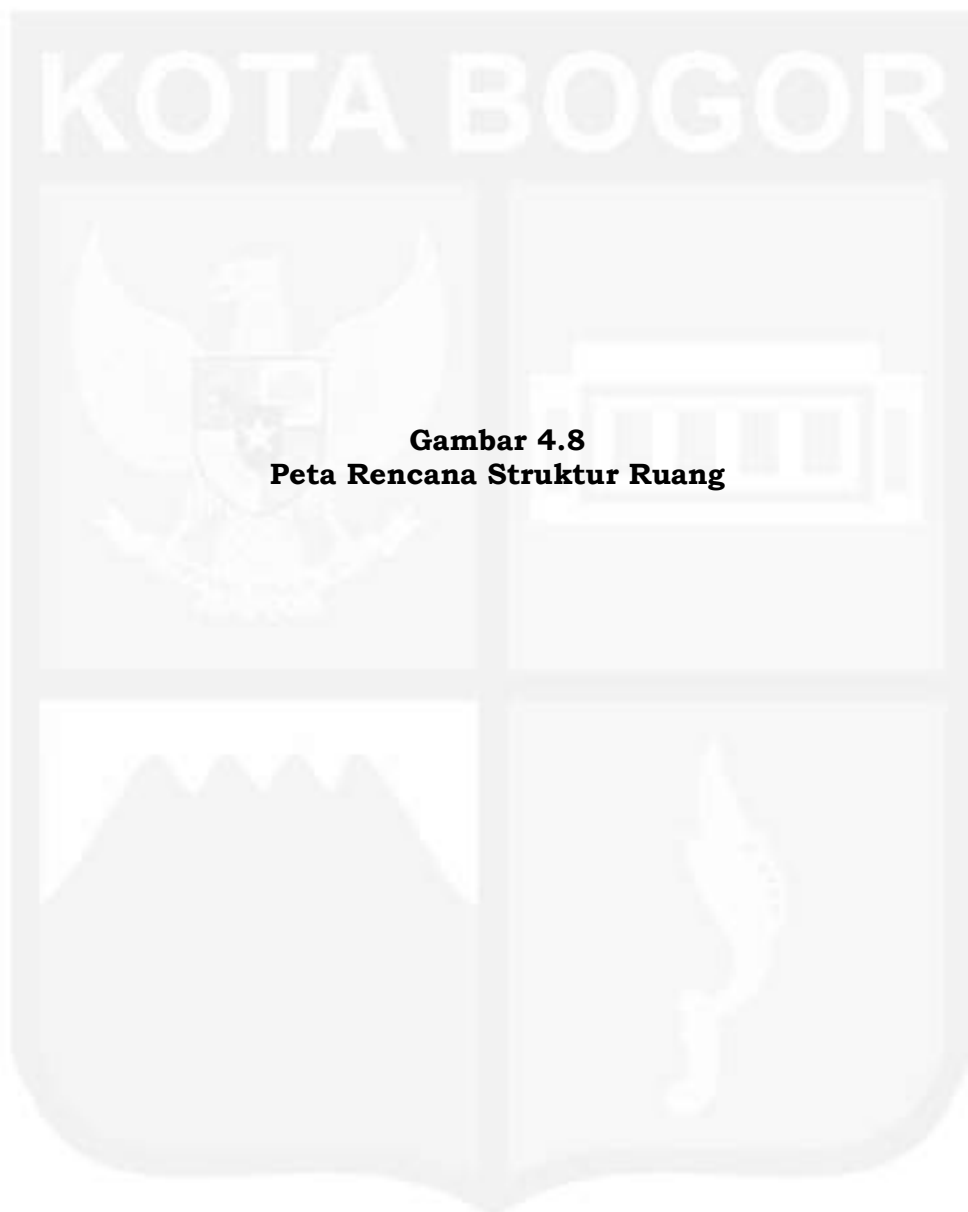
- 1) Rencana kawasan perumahan dengan sebaran luas lebih kurang 7.103 Ha (tujuh ribu seratus tiga Hektare) meliputi:
 - a) peruntukan kawasan perumahan tersebar di Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Tanah Sareal;
 - b) pengaturan kepadatan perumahan ditentukan berdasarkan karakteristik kawasan dan daya dukung lingkungan dan akan didetailkan pada rencana detail tata ruang;
 - c) perumahan kepadatan rendah diarahkan di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima yaitu di Kelurahan Balumbangjaya, Bubulak, Margajaya, Situgede Kecamatan Bogor Barat serta sebagian WP Daksina di Kelurahan Bojongkerta, Genteng, Harjasari, Kertamaya, Muarasari, Mulyaharja, Pamoyanan, Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan;
 - d) perumahan kepadatan sedang diarahkan di sebagian Kecamatan Bogor Tengah/WP Samida di Kelurahan Babakan, Cibogor, Ciwaringin, Pabaton, Paledang, Sempur, Tegalega, Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa dan Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan/WP Daksina; dan
 - e) perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kecamatan Bogor Tengah/WP Samida, Kecamatan Barat/WP Pasima, dan Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara.
- 2) Rencana peruntukan kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan sebagai berikut:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional ditetapkan di:
 - kawasan PPK dan masing-masing Sub PPK dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu;

- koridor Jalan Abdullah Bin Muhamad Nuh, Jalan Sholeh Iskandar, Jalan paralel Jalan Tol Lingkar Bogor, Jalan Adnawijaya, dan rencana jalan R3;
 - pasar induk di Kecamatan Tanah Sareal; dan
 - TOD Skala Kota di Kawasan Stasiun Bogor dan Kawasan Terminal Baranangsiang;
- b) kegiatan perdagangan dan jasa skala WP ditetapkan di:
- sub PPK dan dikembangkan secara terpadu;
 - jalan arteri sekunder dan kolektor; dan
 - sekitar kawasan TOD skala sub kota Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya;
- c) kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- 3) Kawasan perkantoran dengan sebaran luas lebih kurang 128 Ha (seratus dua puluh delapan Hektare) ditetapkan sebagai berikut:
- a) mempertahankan kawasan perkantoran pemerintahan eksisting yang terdiri dari:
- kantor Pemerintah Tingkat Nasional, Provinsi dan Kota menyebar di seluruh kecamatan;
 - kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi dan kota menyebar di seluruh kecamatan; dan
- b) kawasan perkantoran pemerintahan baru kota di WP Pasima, WP Utara, WP Daksina, dan WP Purwa.
- 4) Kawasan pendidikan dengan sebaran luas lebih kurang 102 Ha (seratus dua Hektare) meliputi:
- a) kawasan pendidikan dasar menyebar di seluruh kelurahan;
- b) kawasan pendidikan menengah menyebar di seluruh kecamatan;
- c) kawasan pendidikan tinggi di menyebar di seluruh kecamatan;
- d) penambahan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah ditetapkan di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Barat/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan/WP Daksina; dan
- e) pengembangan pendidikan tinggi di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Barat/WP Purwa, dan Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Selatan/WP Daksina.
- 5) Kawasan kesehatan dengan sebaran luas lebih kurang 34 Ha (tiga puluh empat Hektare) meliputi:
- a) rumah sakit yang menyebar di seluruh kecamatan;

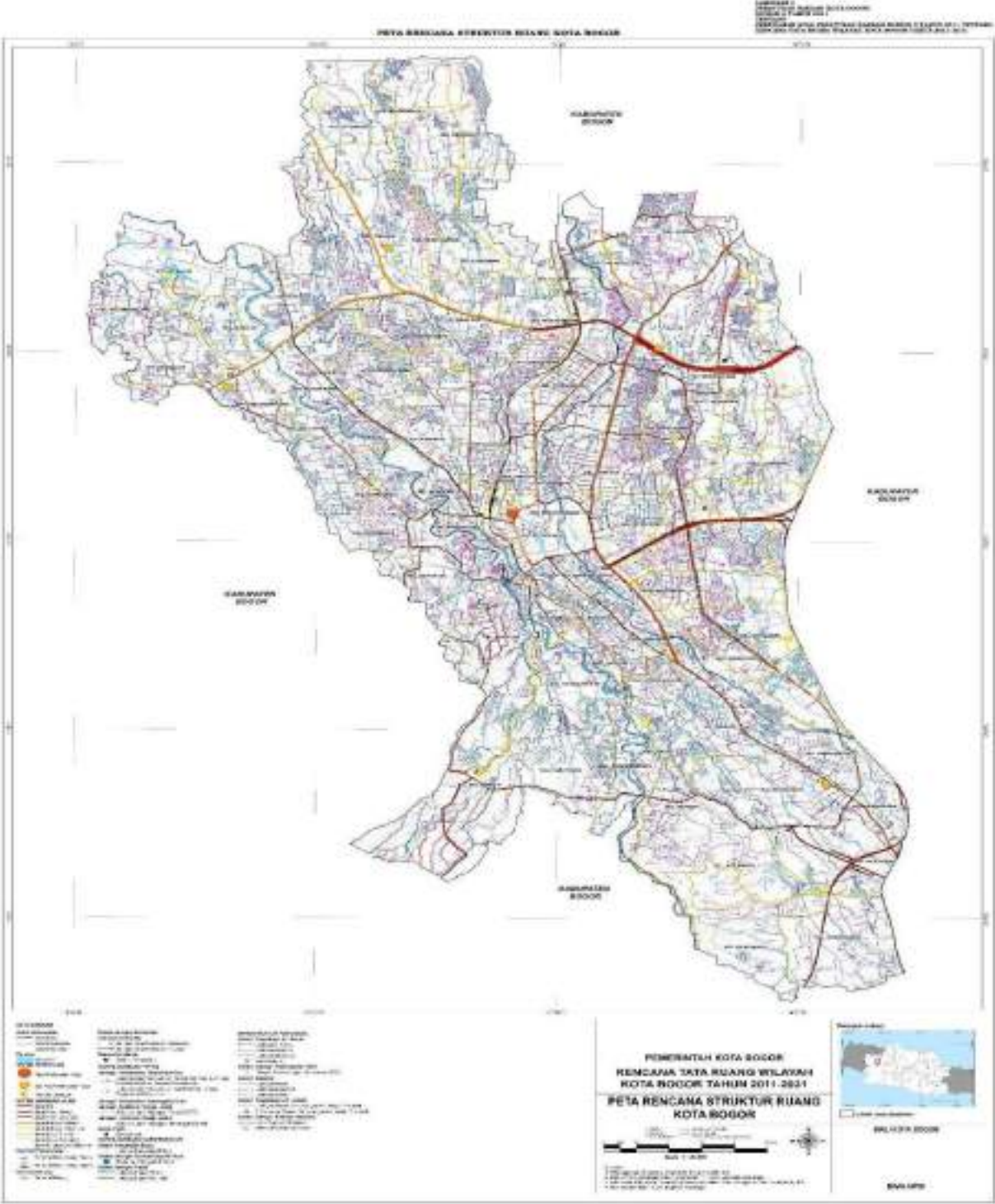
- b) pelayanan kesehatan dasar berupa puskesmas, puskesmas pembantu, klinik, dan sarana kesehatan lainnya yang menyebar di seluruh kecamatan; dan
 - c) penambahan puskesmas pembantu ditetapkan di Kecamatan Bogor Barat/WP Pasima, Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara.
- 6) Kawasan peribadatan dengan luasan kurang lebih 6 Ha (enam Hektare) menyebar di seluruh kecamatan.
- 7) Kawasan olahraga dengan sebaran luas lebih kurang 111 Ha (seratus sebelas Hektare), meliputi:
 - a) GOR Pajajaran;
 - b) sarana olah raga skala WP dan lingkungan di setiap WP; dan
 - c) kawasan olahraga skala kota atau skala nasional di Kecamatan Tanah Sareal/WP Utara, Kecamatan Bogor Utara/WP Purwa dan Kecamatan Bogor Selatan/WP Daksina.
- 8) Kawasan transportasi dengan luasan lebih kurang 1 Ha (satu Hektare) sebagai berikut:
 - a) stasiun kereta api di kawasan stasiun Bogor;
 - b) stasiun kereta api perkotaan di Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya; dan
 - c) kawasan terminal dan stasiun kereta api perkotaan Baranangsiang.
- 9) Kawasan infrastruktur perkotaan dengan luasan lebih kurang 25 Ha (dua puluh lima Hektare) sebagai berikut:
 - a) Gardu Induk Listrik di Kelurahan Tanahbaru, Kelurahan Sukaresmi, Kelurahan Sindangbarang dan Kelurahan Sempur;
 - b) Instalasi Pengolahan Air di Cipaku, Dekeng dan Rancamaya;
 - c) Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kelurahan Tegalgundil dan Kelurahan Kayumanis; dan
 - d) kolam retensi di Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Tanah Sareal, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan
- 10) Kawasan campuran dengan sebaran luas lebih kurang 295 Ha (dua ratus sembilan puluh lima Hektare) meliputi:
 - a) kawasan campuran di koridor Jalan KH Sholeh Iskandar, rencana jalan arteri Tol Lingkar Bogor, jalan lingkar dalam (inner ringroad);
 - b) kawasan TOD Skala Kota di Kawasan Stasiun Bogor dan Kawasan Terminal Baranangsiang; dan
 - c) TOD skala sub kota di Sukaresmi, Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, dan Kertamaya serta TOD skala lingkungan.

e. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan sebaran luas lebih kurang 113 Ha (seratus tiga belas Hektare), menyebar di Kelurahan Cilendek Barat, Gunungbatu, Loji, Menteng Kecamatan Bogor Barat, Kelurahan Lawanggintung, Pakuan Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Cibogor, Ciwaringin, Pabaton, Paledang, Sempur Kecamatan Bogor Tengah, Kelurahan Cibuluh, Ciparigi, Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara, Kelurahan Kedungbadak Kecamatan Tanah Sareal.

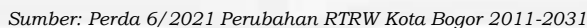


Gambar 4.8
Peta Rencana Struktur Ruang



Sumber: Perda 6/2021 Perubahan RTRW Kota Bogor 2011-2031

Gambar 4.9
Peta Rencana Pola Ruang



Tabel 4.21
Indikasi Program Pengembangan Wilayah Pelayanan

A.	PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KOTA	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
I.	WP Samida							
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Samida (WP A) dan proses legalisasi	WP Samida (WP A)	Perwal 5 2024					
2	Penyusunan Rencana Rinci/ Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Samida (WP A)	Pusat Kota Bogor/ PPK Kota Bogor	Belum					
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Kota/ Regional	TOD Stasiun Bogor,	Belum					
		TOD Baranagsiang	Belum					
4	Penataan kawasan TOD Kota Bogor	TOD Stasiun Bogor	Alun-alun 2021, Pedestrian seputar Alun-alun					
		TOD Baranagsiang	Belum					
5	Pengembangan RTH skala kota	PPK WP Samida (WP A)	Alun-alun 2021					
6	Pengembangan RTNH skala kota	PPK WP Samida (WP A)	Belum					
7	Peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur	Kel Panaragan, Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan Kel Sempur	Belum					
8	Penataan fasilitas minimum pusat kota yang telah ada	WP Samida (WP A)	Belum					
9	Penataan Pusat Lingkungan	Kelurahan Kebon Kalapa, Sukasari	Pasar Sukasari Kebon Kalapa Belum					
10	Penataan sektor informal (PKL)	WP Samida (WP A)	Belum tuntas					
II.	WP Pasima							
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Pasima (WP B) dan proses legalisasi	WP Pasima (WP B)	Perwal 5 2024					

A.	PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KOTA	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Pasima (WP B)	Sub PPK WP Pasima (WP B)	Belum					
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Pasima (WP B)	Sub Pusat WP Pasima (WP B)	Belum					
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota	Belum					
5	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Pasima (WP B) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Pasima (WP B) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang	Penataan Terminal Bubulak 2025					
6	Pembangunan RTH skala WP	Sub PPK Pasima (WP B): Terminal Bubulak, sekitar Sindangbarang	Belum					
7	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Pasima (WP B)	Belum					
8	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Balungbang Jaya, Gunungbatu	Pembangunan Kantor Kecamatan Bogor Barat, Fasilitas komersil oleh swasta					
III.	WP Utara							
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Utara (WP C) dan proses legalisasi	WP Utara (WP C)	Belum					
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Utara (WP C)	Yasmin – Pasar TU Kemang	Belum					
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Pasima (WP C)	Sub Pusat WP Utara (WP C)	Belum					
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota	Belum					

A.	PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KOTA	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
5	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Utara (WP C) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Utara (WP C) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK Utara 9WP C) : Yasmin – Pasar TU Kemang	Belum					
6	Pembangunan RTH skala WP	WP Utara (WP C)	Belum					
7	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Utara (WP C)	Belum					
8	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Mekarwangi, Sukadami, Kebonpedes, Cilendek Barat	Kelurahan Mekarwangi, Sukadami dikembangkan kawasan komersial oleh swasta/masyarakat. Pembangunan Kantor Kelurahan Kebon Pedes Tahun 2024					
IV.	WP Purwa							
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Purwa (WP D) dan proses legalisasi		Perwal 5 2024					
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Purwa (WP D)	Sub PPK D, Warung Jambu – Jalan Adnawijaya	Belum					
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Purwa (WP D)	Sub Pusat WP Purwa (WP D)	Belum					
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota	Belum					
5	Penyusunan RTBL / Panduan Rancang Kota (PRK) koridor Jalan Raya Bogor-Jakarta	Koridor Bogor-Jakarta	Belum					
6	Penataan kawasan Simpang Pomad-perbatasan kota	Simpang Pomad-Perbatasan kota	Pelebaran simpang Pomad					
7	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Purwa (WP D) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Purwa (WP D) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Sub PPK D, Warung Jambu – Jalan Adnawijaya	Revitalisasi Pasar Warung Jambu (2025) dan Plaza Jambu Dua					

A.	PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KOTA	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
8	Pembangunan RTH skala WP	WP Purwa (WP D)	Penataan Taman Kresna, Taman Corat-Coret					
9	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Purwa (WP D)	Belum					
10	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Kedunghalang, Ciluar, Cimahpar, Tegal Gundil	Kawasan komersil oleh non pemerintah					
V.	WP Daksina							
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP Daksina (WP E) dan proses legalisasi	WP Daksina (WP E)	Belum					
2	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Pusat WP Daksina (WP E)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – <i>Inner Ring Road</i>	Belum					
3	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Sub WP Daksina (WP E)	Sub Pusat WP Daksina (WP E)	Belum					
4	Penyusunan Rencana Rinci / Panduan Rancang Kota (PRK) Kawasan Transit Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota	Kawasan TOD Skala Sub Kota	Belum					
5	Penataan kawasan perbatasan Simpang Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Sukabumi	Simpang Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Sukabumi	Belum					
6	Penyusunan RTBL / Panduan Rancang Kota (PRK) Koridor <i>Inner Ring Road</i>	Koridor <i>Inner Ring Road</i>	Belum					
7	Pengembangan kawasan Sub PPK WP Daksina (WP E) dan melengkapi sarana prasarana minimum Sub PPK WP Daksina (WP E) (perencanaan, penyiapan lahan dan pembangunan)	Jalan Raya Tajur dan sekitar akses Tol Ciawi – Sukabumi – <i>Inner Ring Road</i>	Belum					
8	Pembangunan RTH skala WP	WP Daksina	Belum					
9	Pembangunan RTNH skala WP	Tersebar di WP Daksina (WP E)	Belum					
10	Pembangunan Pusat Lingkungan	Kelurahan Katulampa, Cipaku, Kertamaya, Mulyaharja	Belum					

A.	PUSAT KEGIATAN DI WILAYAH KOTA	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
11	Pembangunan Pusat Agro Eduwisata Organik	Kelurahan Mulyaharja	Sudah 2021					

JARINGAN TRANSPORTASI

B.1	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
I.	Studi dan Kajian							
1	Kajian pola distribusi dan pola perjalanan	Kota Bogor	Belum					
2	Penyusunan data base jaringan jalan	Kota Bogor	Belum					
3	Penyusunan Masterplan Transportasi	Kota Bogor	Sudah					
4	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian (RIP)	Kota Bogor	2024 dan 2025					
5	Sistem Informasi sarana dan prasarana angkutan umum	Kota Bogor	Belum					
II	Jaringan Jalan							
A.	Penetapan fungsi jalan	Kota Bogor	Sudah					
B	Peningkatan Jalan							
1	Jalan Arteri Primer	Jalan Pajajaran	Sudah					

B.1	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
		Jalan Raya Kedung Halang/ Jalan KS Tubun;	Sudah					
2	Jalan kolektor sekunder	Jalan Bukit Cimanggu Villa – Kel Mekarwangi	Sudah					
		Jalan Pangeran Shogiri	Sudah					
		Jalan Tumenggung Wiradiredja;	Sudah					
		Jalan Parung Banteng	Sudah					
		Jalan Kayumanis-Cilebut	Sudah					
		Jalan Cibeureum	Sudah					
		Jalan Kapten Yusuf	Sudah					
		Jalan Cipaku	Sudah					
		Jalan Warung Nangka	Sudah					
		Jalan Mandala Ciluar	Sudah					
3	Jalan Lokal	Tersebar di Kota Bogor	Proses					
4	Perbaikan geometrik simpang	Simpang Jalan Tentara Pelajar – Jalan Johar	Sudah					
		Simpang Jalan Tentara Pelajar – Jalan Manunggal	Sudah					
		Simpang Jalan R. Saleh Bustaman – Jalan Pahlawan	Belum					
		Simpang Jalan Pomad - Jalan KS. Tubun	Sudah					
		Simpang Jalan Raya Pemda – Jalan KS Tubun (Talang)	Sudah					

B.1	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
		Simpang Jalan Arteri Tol Lingkar Bogor - Jalan KS. Tubun	Sudah					
		Simpang Jalan Pajajaran – Jalan KS Tubun – Jalan Adnawijaya (Warung Jambu)	Sudah					
		Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Lodaya – Jalan Salak	Sudah					
		Simpang Jalan Raya Pajajaran – Jalan Pangrango	Sudah					
		Simpang Tol Lingkar Bogor – Jalan Pangeran Sogiri	Sudah					
		Simpang Ahmad Syam – Cimahpar	Belum					
		Simpang Jalan Ahmad Syam – Jalan Tol Jagorawi (Kampung Sawah)	Belum					
5	Pembangunan persimpangan tidak sebidang	Persimpangan Jalan MA Salmun	Belum					
		Persimpangan Jalan Kebon Pedes	Belum					
		Persimpangan Jalan Kapten Muslihat	Belum					
		Pembangunan akses tidak sebidang antara Terminal Barangsiang dan Jalan Tol Jagorawi	Belum					
		Jalan arteri, kolektor dan lokal lainnya						
6	Peningkatan Jembatan	Jembatan Satu Duit di Jalan Ahmad Yani	Belum					

B.1	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan KH Sholeh Iskandar	Belum					
		Jembatan sungai Ciliwung di Jalan Otto Iskandardinata	Sudah					
		Jembatan sungai Ciliwung Jalan Jalak Harupat	Belum					
		Jembatan jalan MA Salmun	Belum					
		Jembatan Jalan Veteran	Belum					
		Jembatan Batu Tulis - Pamoyanan	Sudah					
		Jembatan ruas jalan lainnya	Sudah (Pancasan)					
C	Pembangunan jalan							
1	Pembangunan akses konektivitas ke jalan tol	Akses konektivitas dari jalan Parungbanteng (R3) ke Jalan Tol Jagorawi (KM 42,5)	Sudah oleh Summarecon					
		Akses konektivitas ke Jalan Tol Lingkar Bogor (BoRR)	Sudah, PT OBC					
		Akses konektivitas dari jalan R3 (Kolonel Ahmad Syam) ke Jalan Jagorawi (Baranangsiang)	Belum					
		Akses konektivitas dari rencana jalan Bogor Inner Ring Road ke Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi)	Belum					
2	Pembangunan jalan non tol							

B.1	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
a.	Pembangunan jalan arteri primer	Jalan arteri paralel dengan jalan tol Bogor Ring Road / Frontage R2	Belum					
b.	Pembangunan jalan kolektor primer	Jalan Lingkar Dalam (Bogor Inner Ring Road)	Belum					
c.	Pembangunan jalan arteri sekunder	Jalan R3 segmen Parung Banteng – Wangun/ Tajur	Proses					
		Pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP Utara dan WP Purwa	Belum					
		Rencana ruas jalan Stasiun Sukaresmi - Jalan KH Sholeh Iskandar	Sudah					
d.	Pembangunan jalan kolektor sekunder	Pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP Daksina;	Proses (Jl. Parung Banteng menuju Pusat Pemerintahan/Bogor Raya)					
		Jalan tembus Ahmad Sobana – Ahmad Yani	Belum					
		Rencana ruas jalan: Pertigaan Salabenda- kel Kayumanis - Kel Mekarwangi – Jalan Cilebut (Cilebut Barat, Kab Bogor)	Belum					
		Rencana ruas jalan: Jalan KH Sholeh Iskandar – Bukit Cimanggu Villa – Jalan Cilebut Raya	Belum					

B.1	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
		Rencana ruas jalan: Stasiun Sukaresmi - Jalan Raya Pemda (Kedung Halang)	Belum					
		Rencana ruas jalan: Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) - Perum Pondok Aren - Jalan P ASoghi	Belum					
		Rencana ruas jalan: Jalan Adnawijaya - Jalan P Asogiri - Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar);	Belum					
		Rencana ruas jalan: Jalan Ahmad Sobana - Jalan P Shogiri - samping jalan Toll Jagorawi	Belum					
		Rencana ruas jalan: Jalan R3 - Kampung Cokondang - samping jalan Toll Jagorawi - Jalan Parung Banteng	Sudah : Pajajaran Regency - Jl Kantor Pemerintahan Baru					
		Rencana ruas jalan tembus Menteng Asri - Jl. Tentara Pelajar	Belum					
		Rencana ruas jalan frontage Bogor Inner Ring Road ke Lingkar Luar Bogor (kelurahan mulyaharja)	Belum					
		Rencana ruas jalan alternatif Situ Gede	Belum					

B.1	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
		Rencana ruas jalan dibawah jalur listrik tegangan tinggi	Belum					
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersebar di Kota Bogor						
4	Optimalisasi fungsi bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan (ruwasja)	Semua WP	Belum					
5	Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam dan di luar badan jalan)	Semua WP	Proses					
II	Terminal							
1	Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A	Terminal Baranangsiang	Belum					
2	Revitalisasi terminal penumpang Merdeka sebagai terminal penumpang Tipe C	Terminal Merdeka	Sudah					
3	Pembangunan terminal di Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, Kertamaya yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan	Tanah Baru	Belum					
		Bubulak	Belum					
		Mulyaharja	Belum					
		Kertamaya	Belum					
4	Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan	Kelurahan Sukaresmi	Belum					

B.1	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
5	Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD	Kawasan TOD	Proses : Terminal Bubulak, Stasiun Bogor					
6	Penyediaan terminal di kawasan perbatasan perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Wilayah Perbatasan	Belum					
7	Peningkatan sarana pendukung terminal	Seluruh Terminal	Proses : Terminal Bubulak					
8	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Tanah Baru	Belum					
III	Parkir							
1	Pembangunan gedung parkir dan atau pelataran parkir	Pusat-pusat kegiatan						
		PPK	Parkir Stasiun Bogor					
		Sub PPK	Belum					
		Kawasan pengembangan TOD	Parkir Pool bis wisata Baranangsiang, Parkir Botani Square					
		Terminal Penumpang	Parkir Pool bis wisata Baranangsiang, Parkir Botani Square					
		Stasiun KA	Parkir Stasiun Bogor					
		Kawasan Istana Bogor/Kebun Raya Bogor	Belum					
		Kawasan pasar Bogor	Belum					
		Kawasan perbatasan/pintu masuk kota	Belum					
2		Kawasan pengembangan TOD	Parkir Stasiun Bogor					

B.1	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
	Pembangunan prasarana "park and ride"	Kawasan Suryakencana	Belum					
		Kawasan perbatasan/pintu masuk kota	Belum					
3	Pembatasan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan	Seluruh jalan	Sudah					
4	Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara vertikal maupun horizontal	Pusat-pusat kegiatan dan fasilitas umum lainnya	Belum					
		Pool bis wisata Baranangsiang	Belum					
5	Penetapan ketentuan penyediaan parkir serta rasio ruas parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan kegiatan	Kota Bogor	Sudah					
IV	Angkutan Umum Massal							
1	Pengembangan angkutan umum massal dalam kota	Koridor angkutan umum massal	Proses 4 Koridor BRT					
2	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor	Koridor angkutan umum massal	Sudah, Cidangiang/Bubulak - Sentul City					
3	Pengembangan angkutan umum massal yang terintegrasi dengan DKI Jakarta	Bogor – Jabodetabek dan Bandara Soekarno Hatta	Bandara Soekarno Hatta, Transjabodetabek/Transjakarta Blok M, Rawamangun, Senen					
4	Program pengaturan kembali (re-routing) angkutan umum	Route angkutan perkotaan	Belum					
5	Peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan	Kota Bogor	Badan Hukum Angkutan Kota (17 BH)					
6	Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan	Kota Bogor	Proses					
7	Penggunaan angkutan umum berbahan bakar gas	Kota Bogor	50 angkot					
8	Penggunaan angkutan umum tenaga listrik	Kota Bogor	Belum					

B.1	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
V	Jaringan Lintas							
1	Penetapan rute jaringan lintas	Kota Bogor	Belum					
2	Peningkatan kualitas jaringan lintas	Kota Bogor	Belum					
3	Pembatasan beban sumbu maksimal	Kota Bogor	Sudah					
VI	Pelayanan Angkutan Wisata dalam Kota							
1	Penetapan rute angkutan wisata	Kota Bogor	Belum					
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan wisata dalam kota sebagai bagian pelayanan penunjang promosi pariwisata yang menghubungkan lokasi wisata dan kawasan pusaka	Kota Bogor	Bus Uncal 3 unit					
3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada lokasi transit angkutan wisata	Kota Bogor	Belum					
VII	Pelayanan Angkutan Sekolah Dalam Kota							
1	Penetapan rute angkutan sekolah	Kota Bogor	Belum					
2	Pengembangan dan penyediaan pelayanan angkutan sekolah sebagai bagian penerapan rute aman selamat sekolah dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa dari/ke sekolah	Kota Bogor	Sudah, namun tidak berjalan					
3	Penataan koridor/rute pelayanan secara efektif yang mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berdampak kemacetan	Kota Bogor	Belum					
VIII	Jaringan Kereta Api							
1	Peningkatan jalur kereta api commuter line Bogor - Jakarta	Jalur KA Bogor – Jakarta	Sudah					
2	Peningkatan jalur kereta api Bogor Sukabumi	Jalan KA Bogor – Sukabumi	Sudah					

B.1	SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
3	Pembangunan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan angkutan umum massal berbasis rel yang terintegrasi dengan angkutan umum massal berbasis rel Cawang - Bogor	Sepanjang jalur kereta ringan Kota Bogor	Belum (LRT)					
4	Pembangunan jalur angkutan umum massal berbasis rel dalam kota	Kota Bogor (Trase berdasarkan hasil kajian)	Proses Pencarian Investor (Tramway)					
5	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala kota/regional	TOD Stasiun Bogor,	Sudah					
		TOD Baranagsiang	Belum					
6	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala sub kota	Tanah Baru	Belum					
		Sukaesmi	Belum					
		Bubulak	Belum					
		Kertamaya	Belum					
		Mulyaharja	Belum					
7	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala lingkungan	Kota Bogor	Belum					
8	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya	Paledang	Sudah					
9	Pembangunan Stasiun Kereta Api penunjang jalur kereta api Bogor Sukabumi	Berdasarkan hasil kajian lebih lanjut	Belum					

B.2	SISTEM JARINGAN ENERGI	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
I	Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan							
1	Pengembangan sistem jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan jaringan dan gardu listrik	Seluruh kota	Sudah					
2	Peningkatan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah kota		Sudah					
a	Peningkatan kapasitas listrik di daerah yang sudah terlayani	Seluruh kota	Sudah					
b	Peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani.	Seluruh kota	Sudah					
3	Peningkatan instalasi jaringan listrik	Seluruh kota	Sudah					
4	Pengembangan sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik	Seluruh kota	Sudah					
5	Pengembangan sistem jaringan/transmisi tenaga listrik bawah tanah	Kawasan pembangunan baru yang tersebar di seluruh kota	Sudah					
6	Peningkatan jumlah cadangan penyediaan energi listrik	Seluruh kota						
7	Pengembangan energi alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, biogas, maupun sumber energi terbarukan lainnya untuk mengantisipasi kendala pasokan energi listrik	Seluruh kota	Belum					
II	Pengembangan Sistem Jaringan Infrastruktur Gas							
1	Peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga maupun sambungan untuk kawasan fungsional kota lainnya	Seluruh kota	Sebagian					

B.2	SISTEM JARINGAN ENERGI	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
2	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk kendaraan bermotor	Seluruh kota	1 SPBG Merdeka					
3	Pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji	Seluruh kota	Sudah					
4	Pengembangan sistem keamanan jaringan gas	Seluruh kota	Sudah					
B.3	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI							
1	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sistem kabel dan sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Sudah oleh swasta					
2	Pengembangan dan perluasan jaringan internet	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Sudah oleh swasta					
3	Pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Proses					
4	Penetapan dan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama oleh para operator layanan telekomunikasi untuk sistem nirkabel	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Proses					
6	Pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Proses					
7	Membangun tower bersama	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Proses oleh swasta					
8	WIFI Publik	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Belum					
9	Pengembangan micro cell	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Sudah oleh swasta					
10	Pengembangan jaringan internet pemerintah daerah	Seluruh bagian wilayah Kota Bogor	Proses					

JARINGAN SUMBER DAYA ALAM

B.4	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air Lintas Provinsi	Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane	Sudah, TKPSDA BBWS Cilcis					
2	Kerjasama pengelolaan sumberdaya air lintas kabupaten/kota	Sungai Cipakancilan	Belum					
		Sungai Cibalok	Belum					
		Sungai Ciangke	Belum					
		Sungai Ciomas	Belum					
		Sungai Cigede	Belum					
		Sungai Cisindangbarang	Belum					
		Sungai Ciapus	Belum					
		Sungai Cibalok	Belum					
3	Peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah kota	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	Sudah, Satgas Ciliwung Bersih					
4	Pemeliharaan jaringan irigasi	WP Pasima, WP Purwa, WP Daksina	Sudah					
5	Normalisasi sungai	Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane	Proses					
6	Pembangunan sumur resapan di perumahan	Sesuai hasil kajian	Proses, oleh pengembang					
7	Pembangunan kolam retensi pada lokasi yang memiliki potensi genangan	Sesuai hasil kajian	Proses, Sudah Kolam Retensi Ciliuar					

8	Perlindungan/pelestarian sumber air baku (sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air)	Kota Bogor	Sudah, penanaman pohon, perlindungan mata air					
9	Peningkatan kualitas air	Kota Bogor	Proses					
10	Pencegahan pencemaran air	Kota Bogor	Proses					

INFRASTRUKTUR KOTA

B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
I.	Sistem Jaringan Air Minum							
	Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Perpipaan							
1	Pengembangan SPAM Zona 1 : a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)	Zona 1	Mata Air Tangkil Cikereteg Rancamaya Proses Proses 9 lokasi (Tajur, Babadak, Muarasari, Mutiara Bogor Raya)					
2	Pengembangan SPAM Zona 2 a. Pembangunan Intake	Zona 2	Mata Air Bantarkambang					

B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
	b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)		Mata Air Bantarkambang, Tangkil Belum Proses Belum					
3	Pengembangan SPAM Zona 3 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)	Zona 3	S. Cisadane Cipaku Jabaru Proses Belum					
4	Pengembangan SPAM Zona 4 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan	Zona 4	S. Cisadane Dekeng Cipaku, Pajajaran, Merdeka Proses					

B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
	e. Program penurunan kehilangan air Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)		Belum					
5	Pengembangan SPAM Zona 5 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air - Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)	Zona 5	S. Palasari Palasari, Cipinanggading, Mata Air Palasari Pamoyanan Proses Belum					
6	Pengembangan SPAM Zona 6 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air - Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)	Zona 6	Mata air Kota Batu Mata air Kota Batu Kota Batu Proses Belum					

B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
7	Pengembangan SPAM Zona 7 a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)	Zona 7	S. Ciliwung Katulampa Katulampa Proses Belum					
8	Pengembangan SPAM Zona baru a. Pembangunan Intake b. pembangunan IPA c. pembangunan reservoir d. pengembangan jaringan perpipaan e. Program penurunan kehilangan air • Pembangunan <i>District Metering Area</i> (DMA)	Kota Bogor	Belum Belum Belum Belum Belum					
	Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Bukan Perpipaan							

B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pemanfaatan mata air dengan debit kecil, sumur dalam dan sumur dangkal kolektif pada daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan PDAM Tirta Pakuan	Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Barat	SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (Bosel 17 titik, Botim 9, Boteng 8, Bout 3, Bobar 11, Tansar 4)					
2	Perluasan pelayanan sistem jaringan bukan perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum	Kota Bogor						
3	Pengembangan fasilitas penampungan air skala lingkungan	Kota Bogor	Belum					
4	Membangun SPAM bukan jaringan pipa di daerah yang memiliki potensi air tanah dan tidak terlayani jaringan perpipaan	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak mendapatkan layanan jaringan perpipaan. Prioritas Daerah Pelayanan bukan jaringan pipa	Sudah, Skala Lingkungan					
5	Konservasi dan pengembangan area sumber air baku secara berkelanjutan	Kota Bogor	Sudah					
6	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air	Kota Bogor, terutama di daerah yang tidak/belum mendapatkan Layanan PDAM	Sudah, KPM Air Minum					
II.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)							
1	Optimalisasi dan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik komunal beserta jaringannya pada kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan	Di kawasan permukiman kepadatan tinggi dan kawasan perumahan	Proses					
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Kota dan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Kota	Kelurahan Kayumanis	Belum					

B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
3	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan/ WP Daksina	Belum					
4	Optimalisasi dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Permukiman menjadi Skala Kota dan IPLT	Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara	Belum, IPLT menjadi skala kota					
5	Pengembangan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)	Kota Bogor	Proses					
6	Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)	Seluruh Kota Bogor	Proses					
7	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran	Seluruh Kota Bogor	Proses					
8	Pembuatan Rencana Induk Air Limbah Domestik yang dilengkapi dengan rencana detil (DED)	Seluruh kota Bogor	Sudah					
9	Penyusunan regulasi terkait air limbah domestik	Seluruh Kota Bogor	Sudah					
III	Persampahan							
1	Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPA	TPA Galuga	Proses					
2	Pemanfaatan TPA Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu	TPA Regional Nambo	Belum					
3	Peningkatan kualitas pengelolaan serta sarana dan prasarana pendukung pemanfaatan TPA Regional Nambo	Kota Bogor	Belum					

B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
4	Pembangunan dan optimalisasi SPA pada kawasan sarana prasarana umum terpadu Ciluar	Ciluar	Belum					
5	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (<i>Reuse, Reduce, Recycle</i>) melalui pembangunan TPS 3R	Kota Bogor	Proses					
6	Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan metode bank sampah	Kota Bogor	Proses					
7	Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan	Diutamakan disetiap kawasan perumahan baru	Belum					
8	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan persampahan kota	Kota Bogor	Sebagian					
9	Pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga) dan terintegrasi dengan sistem pengangkutannya	Masing-masing kelurahan	Sebagian					
10	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Kota Bogor	Belum					
IV	Pengembangan Sistem Jaringan Drainase							

B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penanganan drainase primer	S. Cisindangbarang, S. Carampulang, S.Ciomas dan anak sungainya, S. Cidepit, S.Cipinanggading, S.Cibeureum, S.Cinangka, S.Cisadane Hulu, Jl.Cipaku, S.Ciawi, S.Cipaku, S.Ciliwung, S.Ciseuseupan, S.Ciluar, S.Cibeuleut, S.Cimahpar, S. Cikerti, S.Cibuluh, S.Ciparigi, S.Ciliwung, Jl. Pajajaran, Jl. Otista, S.Cipakancilan, S.Cibuluh, Jl.Raya Baru, Kali Kayang, S.Cigede kulon, S.Cimanggis.	Proses					
2	Penanganan drainase sekunder	Anak sungai cisindangbarang, Jalan Jakarta - Bogor, Jalan lingkar luar, Jl.raya Bogor Jakarta, S.Cikaret, Jl.Dr.Semeru, Cikubang, Jl.Cibeureum, Rancamaya, Jl. Durian raya, Jl.Rd.Hanafiah, Jl.Rd.Konyong, Jl.Tanah Baru, Jl.Pangeran Sugiri, Jl. Sudirman, Jl.Sawojajar, Jl.Surya Somantri, Jl.Pengadilan, Cibuluh, Jl.A.Adnawijaya, Jl.Martadinata, Jl. Kedung Badak, Jl.Parung, Jl.Kemang, Mekarsari.	Proses					
3	Penanganan drainase tersier	Kel. Balumbang, Semplak, Situ Gede, Kel.Loji, Jl.Gunung Batu,	Proses					

B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
		Jel.Menteng, Cilendek, Pabuaran, Ranggamekar, Rancamaya, Cipaku, Bojongkerta, Katulampa, Desa Cibuluh, Tanah Baru, Bantarsari, Jl. roda, Tegal gundil, baranangsiang, sukaresmi, Kedung Badak, Parung, Kel.Kencana, drainase lokal.						
4	Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan	Kawasan sempadan sungai	Belum					
5	Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase	Kota Bogor	Belum					
6	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase	Kota Bogor	Belum					
7	Normalisasi sungai dan saluran	Kota Bogor	Proses					
8	Revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya	Kawasan Sempadan Sungai	Belum					
9	Mengamankan embung – embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor	Belum					
10	Pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir	Kecamatan Bogor Utara; dan Kecamatan Tanah Sareal	Belum					
11	Pembangunan sumur resapan, kolam retensi dan/atau detensi dengan konsep <i>zero run off</i> , <i>eco drainage</i> , dan <i>Low impact development</i>	Kota Bogor	Proses,Kolam retensi Cibuluh					
V	Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana							

B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
1	Identifikasi lokasi rawan bencana, potensi ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor	Sudah					
2	Pendataan dan pemetaan ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor	Sudah					
3	Penyusunan rencana induk proteksi kebakaran	Kota Bogor	Belum reviu					
4	Penetapan dan peningkatan standar fasilitas minimum kelaikan bangunan dan kelengkapan peralatan	Kota Bogor	Belum					
5	Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi	Kota Bogor	Belum					
6	Penyediaan prasarana sarana penunjang proses evakuasi bencana	Kota Bogor	Belum					
7	Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor	Proses					
8	Penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana secara rinci	Kota Bogor	Belum					
9	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparaturnya penanggulangan bencana	Kota Bogor	Proses					
10	Penanganan kawasan rawan bencana banjir	Kawasan Pacilong Kelurahan Kebon Pedes, Kampung Situ Asem Kelurahan Mekarwangi, Kampung Kramat Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Cibadak, Kelurahan Cibuluh	Belum					

B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
11	Penanganan kawasan rawan bencana longsor	Di sepanjang sungai Cisadane, sungai Ciomas, saluran Cisadane Empang, saluran Cidepit, saluran Cibalok, sepanjang sungai Ciliwung, dan lokasi-lokasi yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) terutama di Kecamatan Bogor Selatan	Belum					
12	Penanganan kawasan rawan bencana kebakaran	Perumahan tidak teratur berkepadatan tinggi di Kecamatan Bogor Tengah.	Belum					
13	Sosialisasi program mitigasi bencana	Kota Bogor	Proses					
14	Peningkatan kesiagaan terhadap bencana	Kota Bogor	Proses					
VI	Pedestrian/ Jalur pejalan kaki							
1	Kajian pengembangan prasarana pejalan kaki	Kota Bogor	Sudah, ITDP					
2	Kajian pengembangan jalur khusus sepeda	Kota Bogor	Sudah, ITDP					
3	Pembuatan DED prasarana pejalan kaki	Tersebar di Kota Bogor	Proses					
4	Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada	Menyebar di Kota Bogor						
5	Pembangunan sarana dan prasarana kendaraan tidak bermotor	Jalan Mayor Oking	Belum					
		Jalan MA Salmun	Belum					
		Jalan Merdeka	Belum					
		Jalan RE Martadinata	Belum					
		Jalan Paedang	Belum					

B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
		Jalan Kapten Muslihat	Sudah					
		Jalan KS Tubun	Belum					
		Jalan KH Sholeh Iskandar	Belum					
		Jalan KH Abdullah Bin Nuh	Belum					
		Jalan Brigjen Saptaji	Belum					
		Jalan Dr. Sumeru	Belum					
		Jalan Mawar	Belum					
		Jalan Semplak	Belum					
		Jalan Ir. H. Djuanda	Sudah					
		Jalan Jenderal Sudirman	Sudah					
		Jalan Jenderal Ahmad Yani	Belum					
		Jalan Dadali	Belum					
		Jalan Jalak Harupat	Sudah					
		Jalan Pemuda	Belum					
		Jalan Suryakencana	Sudah					
		Jalan Siliwangi	Belum					
		Jalan Pajajaran	Sudah					
		Jalan Otto Iskandardinata	Sudah					
		Jalan Adnawijaya	Belum					
		Jalan Ahmad Sobana	Belum					
		Jalan Ahmad Syam	Belum					

B.5	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
		Jalan-jalan lainnya	Belum					
		Stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, lokasi menuju angkutan umum	Belum					
		Lokasi menuju dan dari halte angkutan umum	Belum					
6	Pembangunan perlintasan tidak sebidang untuk pejalan kaki		Stasiun Bogor -Paledang, Jl. Pajajaran di Wr Jambu dan Jl. Pajajaran di Mesjid Raya					
	Jembatan penyeberangan orang	Jalan arteri dan kolektor	Stasiun Bogor -Paledang, Jl. Pajajaran di Wr Jambu dan Jl. Pajajaran di Mesjid Raya					
	Underpass penyeberangan orang	Sekitar Kebun Raya Bogor, TOD	Belum nambah					
	Fasilitas integrasi yang menghubungkan TOD	Jl. Suryakacancana – TOD Baranangsiang	Belum					
		Kawasan TOD	Belum					
VII	Jaringan Prasarana Kota Terpadu							
1	Menyusun rencana pengembangan jaringan prasarana kota terpadu	Kota Bogor	Sudah					
2	Mengembangkan jaringan prasarana bawah tanah terpadu	Kota Bogor	Belum					

KAWASAN LINDUNG

A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
I	Kawasan Perlindungan Setempat							
1	Penataan kawasan sempadan sungai	Menyebar di kota Bogor	Belum					
2	Penataan kawasan sempadan danau/situ	Menyebar di kota Bogor	Sudah					
3	Penataan sempadan kawasan sekitar mata air	Menyebar di kota Bogor	Belum					
4	Pembebasan lahan di sempadan sungai, danau dan mata air	Menyebar di kota Bogor	Belum					
5	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada disempadan sungai, danau/situ dan mata air	Menyebar di kota Bogor	Belum					
6	Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang mengalami penurunan fungsi lindung	Menyebar di kota Bogor	Belum					
7	Perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ	Menyebar di kota Bogor						
8	Naturalisasi sempadan sungai dan situ	Menyebar di kota Bogor	Sudah					
9	Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Pasima	Kelurahan Balumbangjaya,	Proses					
		Kelurahan Situgede,	Proses					
		Kelurahan Margajaya	Proses					
10	Membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP Daksina	Kelurahan Mulyaharja,	Belum					
		Kelurahan Pamoyanan,	Belum					
		Kelurahan Bojong Kerta,	Belum					
		Kelurahan Harjasari	Belum					

A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
		Kelurahan Rancamaya,	Belum					
		Kelurahan Kertamaya,	Belum					
		Kelurahan Genteng	Belum					
11	Pembangunan Taman-taman resapan dengan konsep water harvesting untuk konservasi air dan mengoptimalkan konsep zero run off	Tersebar di Kota Bogor	Belum					
12	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan perlindungan setempat	Kota Bogor	Belum					
II	Kawasan konservasi							
1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi	Kebun Raya Bogor	Sudah					
2	Penataan kawasan di sekitar Kebun Raya Bogor	Kawasan Sekitar Kebun Raya	Sudah					
III	Ruang Terbuka Hijau							
1	Pendataan RTH Publik (profil RTH, pemanfaatan ruang, perubahan fungsi, sistem informasi)	Kota Bogor	Sudah					
3	Penyusunan Masterplan RTH Kota	Kota Bogor	Sudah					
	Penyusunan dokumen pendukung pengadaan lahan dan pembangunan RTH	Setiap WP	Sudah					
6	Pengadaan tanah untuk RTH melalui program <i>land banking</i>	Setiap WP	Proses					

A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
7	Peningkatan kualitas RTH	Kota Bogor	Sudah					
8	Perencanaan dan pembangunan Alun-alun Kota	Taman Topi dan sekitarnya	Sudah (Alun-alun Kota Bogor, 2021)					
9	Perencanaan dan pembangunan hutan kota, taman Kehati (keanekaragaman hayati)	WP Pasima (WP B)	Belum					
		WP Utara (WP C),	Belum					
		WP Purba (WP D)	Belum					
		WP Daksina (WP E)	Belum					
10	Perencanaan dan pembangunan taman kota	Di pusat kota dan di setiap Sub PPK	Sudah					
11	Perencanaan dan pembangunan taman WP dan lingkungan	Menyebar di seluruh Kota Bogor	Manunggal, Cipaku					
		Permukiman padat penduduk (kawasan kumuh)						
12	Perencanaan dan pembangunan taman tematik	Menyebar di seluruh Kota Bogor	Sudah periode 2014-2021					
13	Pembangunan sempadan jalan / Jalur hijau jalan	Menyebar di seluruh Kota Bogor	Belum					
14	Revitalisasi sempadan jalan, sempadan rel kereta api, sempadan SUTT yang mengalami menurun fungsi	Kota Bogor	Belum					
15	Membangun dan memanfaatkan RTH di daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi	Daerah sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan danau dan/atau situ, sempadan mata air, sempadan rel, dan di bawah tegangan tinggi	Belum					
17	Pendataan TPU	Kota Bogor	Sudah					
18	Penyusunan Perencanaan TPU	Kota Bogor	Belum					

A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
19	Penataan dan pengembangan TPU pemerintah	Kelurahan Empang (TPU Dreded) untuk WP Samida	Sudah					
		Kelurahan Situ Gede (TPU Situ Gede) untuk WP Pasima	Sudah					
		Kelurahan Kebon Pedes (TPU Blender) dan Kelurahan Kayumanis (TPU Kayumanis) untuk WP Utara	Sudah habis					
		Kelurahan Cimahpar (TPU Cimahpar) untuk WP Purwa	Sudah					
		Kelurahan Mulyaharja (TPU Mulyaharja), Kelurahan Genteng (TPU Gunung Gadung), Kelurahan Cipaku (TPU Cipaku), dan Kelurahan Katulampa (TPU Katulampa) untuk WP Daksina	Sudah					
20	Pendataan kondisi pohon pelindung dan pemeliharaan pohon pelindung di RTH publik wilayah Kota Bogor	Jalur protokol tersebar di Kota Bogor, jalur hijau kawasan perumahan yang terdapat pohon pelindung berusia tua/rawan tumbang	Sudah					

KAWASAN BUDIDAYA

B	Kawasan Peruntukan Budidaya	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
I	Kawasan pertanian							
1	Pengembangan sistem pertanian tanaman pangan perkotaan	Kota Bogor	Sudah					
2	Pendataan kawasan pertanian, LP2B	Kota Bogor	Sudah					
3	Kegiatan dukungan keberlanjutan kawasan pertanian dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);	Kota Bogor	Sudah					
4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pertanian	Kota Bogor	Belum					
5	Sosialisasi sistem pertanian perkotaan, meliputi pemanfaatan lahan pekarangan, hidroponik	Kota Bogor	Proses					
6	Optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai RPH regional	WP Pasima (WP B)	Proses					
7	Berkerjasama dengan pengelola lahan pertanian dalam bentuk kebun penelitian dan percobaan dalam menjaga dan memelihara kebun penelitian sebagai bagian dari RTH	Kota Bogor	Belum					
8	Pengembangan kegiatan agrowisata	Kota Bogor	Sudah, Mulyaharja					
II	Industri							
1	Pendataan kawasan peruntukan Industri Tahunan (profil industri eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor	Sudah					

B	Kawasan Peruntukan Budidaya	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kegiatan industri dan limbah yang dihasilkan	Kota Bogor	Proses					
3	Monitoring dan evaluasi kegiatan industri kecil dan menengah di kawasan perumahan	Kota Bogor	Belum					
4	Pengembangan promosi hasil industri kecil dan menengah	Kota Bogor	Proses					
5	Pengembangan sentra pemasaran hasil industri kecil dan menengah	Kota Bogor	Belum					
6	Fasilitasi pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Kota Bogor	Belum					
III	Kawasan Pariwisata							
1	Penyusunan RIPDA Kota Bogor	Kota Bogor	Sudah					
2	Pengembangan kluster-kluster wisata Kota Bogor	Kota Bogor	Sudah					
3	Sosialisasi kawasan dan obyek wisata Kota Bogor	Kota Bogor	Proses					
4	Pengembangan wisata ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan wisata budaya	Kota Bogor	Proses					
5	Pengembangan wisata agro, pariwisata MICE dan rekreasi alam	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E)	WP Daksina (Mulyaharja) WP Pasima (Situ Gede), MICE semua WP					
6	Pembangunan gedung kesenian	WP Pasima (WP B)	Belum					

B	Kawasan Peruntukan Budidaya	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
7	Pengembangan wisata perkemahan	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Daksina (WP E)	Belum					
8	Penataan wisata kuliner dan belanja	Di PPK (kawasan Bogor lama), WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)	Sudah					
9	Penataan wisata sejarah	Kawasan Pusaka	Sudah					
10	Pembangunan kampung Sunda	WP Purwa (WP D)	Belum					
IV	Perumahan							
1	Pendataan perumahan Kota Bogor dan Kecamatan (profil perumahan dan prasarana sarana utilitas perumahan eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor, setiap Kecamatan	Sudah					
2	Penyusunan Review Rencana Induk Perumahan Permukiman	Kota Bogor	Sudah RP3KP					
3	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan	Kota Bogor	Sudah RP2KPKPK					
4	Penataan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang perumahan	Kota Bogor	Proses					
5	Revitalisasi kawasan permukiman kumuh melalui perbaikan kampung dan pembangunan rumah susun	Berdasarkan pemutakhiran data kawasan permukiman kumuh Kota Bogor	Panaragan, Pasirjaya					

B	Kawasan Peruntukan Budidaya	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
6	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	Kota Bogor	Sudah					
7	Pembangunan rumah susun umum	Kawasan yang terakses dengan angkutan umum	Rusun Cibuluh					
		Tersebar di Kota Bogor						
8	Pembangunan prasarana dan sarana utilitas perumahan permukiman	Tersebar di Kota Bogor	Proses					
V	Perdagangan Jasa							
1	Pendataan Kawasan Perdagangan Jasa Tahunan (profil perdagangan jasa eksisting, sedang dibangun, ijin yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor	Belum					
2	Penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan	Pasar Bogor dsk	Belum					
		Pasar Kebon Kembang dsk	Sudah					
		Pasar Sukasari dsk	Sudah					
		Pertokoan di kawasan jalan Merdeka – Jembatan Merah	Belum					
3	Revitalisasi Plaza Bogor	Plaza Bogor	Belum					
4	Revitalisasi Pasar Sukasari	Pasar Sukasari	Sudah					
5	Revitalisasi Pasar Bogor	Pasar Bogor	Belum					
6	Relokasi Pasar Bogor dan Plaza Bogor	Pasar Bogor dan Plaza Bogor	Sudah					
7	Revitalisasi Pasar Jambu Dua	WP Purwa	Sudah					
8	Pengembangan Pasar Teknik Umum menjadi Pasar Induk	WP Utara (WP C)	Sudah					

B	Kawasan Peruntukan Budidaya	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
9	Revitalisasi pasar rakyat	Tersebar di kota Bogor	Belum					
10	Pengembangan pasar rakyat	WP Pasima (WP B)	Belum					
		WP Utara (WP C)	Belum					
		WP Purwa (WP D)	Belum					
		WP Daksina (WP E)	Belum					
11	Penataan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan / pusat WP	WP Pasima (WP B)	Belum					
		WP Utara (WP C)	Belum					
		WP Purwa (WP D)	Belum					
		WP Daksina (WP E)	Belum					
12	Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota/ regional berupa kawasan terpadu serta pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas skala kota dan WP	WP Purwa di sepanjang jalan arteri/frontage Jalan Tol Lingkar Luar Bogor dan pusat WP	Belum					
13	Penataan kawasan perdagangan dan jasa di koridor <i>Inner Ring Road</i>	koridor <i>Inner Ring Road</i>	Belum					
VI	Kawasan Perkantoran							
1	Pemeliharaan dan revitalisasi kawasan perkantoran pemerintahan eksisting		Proses					
a	Kantor Pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kota	Kota Bogor	Proses					
b	Kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi dan kota	Kota Bogor	Proses					

B	Kawasan Peruntukan Budidaya	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
2	Penataan kawasan perkantoran	PPK	Proses					
3	Penambahan kawasan perkantoran pemerintahan baru skala kota	WP Utara (WP C), WP Purwa (WP D), WP Pasima (WP B) dan WP Daksina (WP E)	Proses di WP Purwa (Katulampa)					
4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang pemerintahan	Kota Bogor	Belum					
5	Rehabilitasi/ peremajaan bangunan pemerintah	Kota Bogor	Proses					
6	Pengembangan fasilitas sosial	Sub PPK/ Pusat WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina	Sentra Cipta Mandiri					
7	Pengembangan untuk panti jompo, panti asuhan, dan rumah singgah	Tersebar di Kota Bogor	Proses, oleh non pemerintah					
VII	Kawasan pendidikan							
1	Pendataan Fasilitas Pendidikan Tahunan (profil fasilitas pendidikan)	Kota Bogor	Sudah					
2	Penyusunan Rencana Penambahan Fasilitas Pendidikan dan Rencana Alokasi Lokasi di Kota Bogor	Kota Bogor	Sudah					
3	Revitalisasi prasarana dan sarana fasilitas pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK	Setiap WP	Proses					
4	Penambahan TK negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)	Belum					
5	Penambahan SD negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)	WP Utara (Sekolah Terpadu Kencana)					
6	Penambahan SMP negeri	WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)	WP Utara SMP 21 dan WP Purwa (SMP 22 dan 23)					

B	Kawasan Peruntukan Budidaya	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
7	Penambahan SMA/ SMK negeri	WP Pasima (WP B), WP Utara (WP C) , WP Purwa (WP D), dan WP Daksina (WP E)	Belum					
8	Pengembangan pendidikan tinggi	WP Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina diutamakan pada jalan-jalan arteri dan kolektor	Proses oleh swasta					
7	Monitoring dan evaluasi lokasi dan kinerja pendidikan tinggi	Kota Bogor	Belum					
VIII	Kawasan kesehatan							
1	Pendataan Fasilitas Kesehatan	Kota Bogor	Sudah					
2	Revitalisasi pelayanan fasilitas kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhirarki di setiap unit pengembangan	Kota Bogor	Sudah					
3	Pembangunan RSUD	Kota Bogor	Sudah, dan terus berlanjut					
4	Penambahan Puskesmas dan atau Puskesmas Pembantu	WP Pasima, WP Utara, WP Purwa, WP Daksina	Proses					
5	Monitoring dan evaluasi lokasi dan kinerja fasilitas kesehatan	Kota Bogor	Sudah					
IX	Kawasan peribadatan							
1	Pendataan Fasilitas Peribadatan Tahunan (profil fasilitas peribadatan)	Kota Bogor	Belum					
2	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang fasilitas peribadatan	Kota Bogor	Belum					

B	Kawasan Peruntukan Budidaya	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
3	Revitalisasi fasilitas peribadatan	Kota Bogor	Mesjid Agung					
4	Pembangunan fasilitas peribadatan	Kota Bogor	Proses (swadaya masyarakat)					
X	Kawasan Olahraga							
1	Pendataan Fasilitas Olahraga dan Rekreasi Tahunan	Kota Bogor	Belum					
2	Penataan dan revitalisasi GOR Pajajaran	GOR Pajajaran	Proses					
3	Penataan fasilitas olahraga yang ada	Tersebar di kota Bogor						
4	Pembangunan fasilitas olahraga	Di setiap kecamatan	GOM Bogor Utara, GOM Bogor Selatan, Taman Manunggal, Taman Cipaku					
4	FS penambahan prasarana dan sarana olahraga terpadu skala kota atau skala regional	Kota Bogor	Sudah					
5	Pembangunan fasilitas olahraga terpadu skala kota atau skala nasional	WP Utara, WP Daksina	Belum					
6	Pengembangan dan penyediaan prasarana dan sarana olah raga skala WP dan lingkungan	Di setiap kecamatan	GOM Bogor Utara, GOM Bogor Selatan, Taman Manunggal, Taman Cipaku					
XI	Kawasan transportasi							
1	Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang Tipe A	Terminal Baranangsiang	Belum					

B	Kawasan Peruntukan Budidaya	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
2	Pembangunan terminal di Tanah Baru, Bubulak, Mulyaharja, Kertamaya yang terintegrasi dengan Stasiun kereta ringan	Tanah Baru	Belum					
		Bubulak	Belum					
		Mulyaharja	Belum					
		Kertamaya	Belum					
3	Pembangunan terminal di Kelurahan Sukaesmi yang terintegrasi dengan Stasiun kereta api dan stasiun kereta ringan	Kelurahan Sukaesmi	Belum					
4	Pembangunan fasilitas integrasi antar moda di Kawasan TOD	Kawasan TOD	Belum					
5	Penyediaan terminal di kawasan perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Wilayah Perbatasan	Belum					
6	Peningkatan sarana pendukung terminal	Seluruh Terminal	Proses, Term Bubulak 2025					
7	Pembangunan terminal barang	Kelurahan Tanah Baru	Belum					
8	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor	Stasiun Bogor	Sudah					
9	Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang dan sekitarnya	Paledang	Sudah					
10	Pembangunan Stasiun Kereta Api penunjang jalur kereta api Bogor Sukabumi	Berdasarkan hasil kajian lebih lanjut	Belum					
11	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala kota/regional	Stasiun Bogor	Sudah					
		Terminal Baranangsiang	Belum					

B	Kawasan Peruntukan Budidaya	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
12	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala sub kota	Sukaresmi	Belum					
		Tanah Baru	Belum					
		Bubulak	Belum					
		Mulyaharja	Belum					
		Kertamaya	Belum					
13	Pengembangan simpul/stasiun angkutan umum massal skala lingkungan	Menyebar di Kota Bogor (sesuai hasil kajian lebih lanjut)	Belum					
XII	Kawasan Infrastruktur Perkotaan							
1	Pengembangan Gardu Induk Listrik	Kota Bogor	Belum					
2	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum	Kota Bogor	Sudah (Katulampa)					
3	Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Kota Bogor	Belum					
4	Pengembangan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Terpadu	Kota Bogor	Belum					
5	Pengembangan kolam retensi	Kota Bogor	Kolam retensi cibuluh					
6	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan infrastruktur	Kota Bogor	Belum					
XIII	Kawasan Campuran							
1	Penataan kawasan campuran	Kota Bogor	Belum					

B	Kawasan Peruntukan Budidaya	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
2	Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan campuran	Kota Bogor	Belum					
XIV	Kawasan Pertahanan Keamanan							
1	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang militer	Kota Bogor	Belum					

KAWASAN STRATEGIS

A.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
I.	Kawasan Pasar Kebon Kembang dan sekitarnya							
1	Penataan kawasan	Kawasan Pasar Kebon Kembang, kawasan perdagangan di Jalan MA Salmun, Jalan Mayor Oking, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kapten Muslihat, dan Jalan Merdeka	Proses, Kawasan Jl. Nyi Raja Permas, Jalan MA Salmun, Jl. Merdeka, Jl. Kapten Muslihat					
2	Penataan sektor informal	Di sekitar Kawasan Pasar Kebon Kembang dan Kawasan Stasiun Kereta api Bogor	Proses					
II.	Kawasan Perdagangan Lama di Pasar Bogor, Pecinan di Suryakencana dan Kampung Arab di Empang							
1	Penataan kawasan	Jalan Suryakencana, Kawasan Pecinan dan Kampung Arab (Empang)	Proses, Jl. Suryakencana					

A.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
3	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan	Jalan Suryakencana, Kawasan Pecinan dan Kampung Arab (Empang)	Belum					
III.	Kawasan TOD dan Kawasan Sub PPK							
1	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan sub PPK	Pusat WP Pasima, Utara, Purwa dan Daksina	Belum					
2	Pembangunan infrastruktur penunjang pusat	Pusat WP Pasima	Belum					
		Pusat WP Utara	Belum					
		Pusat WP Purwa	Belum					
		Pusat WP Daksina	Belum					
3	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan TOD	TOD skala kota	Belum					
		TOD skalal sub kota	Belum					
4	Penataan kawasan TOD	Kawasan TOD	Belum					
B.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya							
I.	Kawasan Pusaka Bogor							
1	Penataan KSK Kawasan Pusaka Bogor	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana	Proses, Kawasan Batutulis, Istana, dan Kebun Raya, Karsten Plan, Suryakencana					

A.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
2	Penataan jalur pedestrian, sektor informal (PKL) dan <i>street furniture</i>	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana	Proses, Kawasan Batutulis, Istana, dan Kebun Raya, Karsten Plan, Suryakencana					
3	Penyusunan panduan rancang kota (UDGL)	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana	Belum					
4	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang kawasan pusaka	Kawasan Batutulis, Empang, Istana dan Kebun Raya Bogor, Karsten Plan, Pengembangan Barat, Permukiman Eropa, dan Suryakencana	Belum					
5	Identifikasi dan pemetaan bangunan dan kawasan cagar budaya	Menyebar di kota Bogor	Proses					
6	Penyusunan kajian pemanfaatan ruang dan kegiatan serta bentuk insentif-disinsentif terhadap bangunan dan kawasan cagar budaya	Kota Bogor	Proses					
7	Sosialisasi lokasi dan aturan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya	Kota Bogor	Belum					

A.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
8	Restorasi dan meremajakan bangunan dan kawasan cagar budaya yang telah berubah bentuk aslinya dan mengalami alih fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan	Kota Bogor	Belum					
9	Pemanfaatan bangunan cagar budaya	Kota Bogor	Sudah					
10	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kota Bogor	Belum					
C.	Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup							
I.	Kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor							
1	Pengembangan paket wisata terpadu	Kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor	Sudah					
2	Penataan kawasan hijau Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor beserta zona penyangganya	Kawasan Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor	Sudah					
II.	Kawasan Situgede dan Hutan Penelitian Dramaga							
1.	Penataan koridor jalan terminal Bubulak – Hutan Penelitian Dramaga - Situgede	koridor jalan terminal Bubulak – Hutan Penelitian Dramaga - Situgede	Proses					

A.	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Lokasi	Realisasi	2026	2027	2028	2029	2030
2.	Penataan kawasan ekowisata Situgede	Kawasan danau Situgede	Sudah (2021)					
3.	Pengemangan Hutan Penelitian Dramaga	Hutan Penelitian Dramaga – Kel Situgede	Sudah					
III.	Sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane							
1.	Identifikasi Pemetaan Kondisi Eksisting Sempadan Sungai Ciliwung-Cisadane (pemanfaatan, potensi pengembangan, permasalahan)	Sempdan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane	Belum					
2.	Penyusunan rencana rinci tata ruang penanganan kawasan sempadan sungai	Sempdan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane	Belum					
3.	Penataan kawasan sempadan sungai	Spot kawasan sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane terpilih	Belum					
4.	Pengadaan tanah publik (sempadan sungai) untuk penataan kawasan	Sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane	Belum					
5.	Perencanaan dan pembangunan taman dan jalan sepanjang sempadan	Spot kawasan sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane terpilih	Belum					

4.4. Inovasi Daerah

Program pembangunan kota Bogor dilaksanakan merujuk pada dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan menengah skala provinsi maupun nasional agar sinergitas pembangunan dapat selaras sesuai dengan arah kebijakan yang telah disusun. Keberhasilan program pembangunan kota Bogor yang tercermin dalam kerangka program prioritas pemerintah kota Bogor tidak bisa terlepas dari dukungan inovasi dalam upaya percepatan prioritas pembangunan daerah, Inovasi yang dibangun di lingkungan kota Bogor harus mencakup:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan,
- b. Urusan Pemerintahan Koperasi dan UMKM
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- d. Urusan Pemerintahan Bidang lingkungan hidup
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dan
- f. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

4.5. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Merujuk kepada aturan tersebut, Pemerintah Kota Bogor merancang kebutuhan kerjasama didasari bahwa tren kolaborasi menjadi salah satu kunci keberhasilan membangun daerah, keterbatasan Sumber Daya Manusia dan anggaran. Di Kota Bogor terdapat sejumlah aset daerah yang berpotensi dapat memberi pelayanan bahkan pendapatan daerah, pemetaan kerjasama dilakukan secara berkala setiap tahun (Y-1), telah terinventarisir potensi kerjasama daerah untuk dilaksanakan di tahun 2026. Kerjasama tersebut mencakup:

- a. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berupa penataan daerah perbatasan;
- b. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, berupa: pengadaan sarana dan prasarana persampahan;
- c. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, berupa penataan ruang publik.

4.6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Dalam rangka percepatan untuk mewujudkan visi dan misi Walikota, program dan kegiatan tidak mampu ditopang dengan APBD dan APBN karena keterbatasan anggaran dapat menggunakan alternatif pendanaan lainnya. Pendanaan kreatif merupakan salah satu pilihan untuk mengisi

hambatan keterbatasan anggaran. TJSLP merupakan salah satu bentuk pendanaan kreatif yang merupakan sebuah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah kota Bogor secara aktif membentuk tim fasilitasi TJSLP untuk memetakan program unggulan yang dapat didanai oleh TJSLP, mengkordinasikan dengan perusahaan swasta, BUMN dan BUMD di kota Bogor maupun luar kota Bogor kemudian melaporkannya kepada penanggung jawab untuk dapat diimplementasikan. Untuk tahun 2026, telah dilakukan pemetaan program dan kegiatan untuk 5 bidang yang dapat ditopang melalui TJSLP adalah:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, berupa percepatan pengentasan *Open Defecation Free* (ODF), *stunting* dan AIDS Tuberculosis, Malaria (ATM)
- b. Urusan Pemerintahan Koperasi dan UMKM: berupa pusat kuliner
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain:
 - 1) Penataan ruang publik;
 - 2) Penyediaan *landmark* kota.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang lingkungan hidup berupa Pengadaan sarana dan prasarana persampahan;
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, berupa penyediaan sarana dan prasarana sosial.

BAB 5

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Sebagai dokumen yang menjadi pedoman pembangunan daerah, RKPD ini memuat berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan Kota Bogor. Penyusunan RKPD Tahun 2026 telah mengacu pada nomenklatur Program/Kegiatan/Sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang memuat hasil verifikasi, validasi, dan pemutakhiran klasifikasi serta kodefikasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Seluruh program dan kegiatan disusun secara terstruktur dengan dukungan regulasi dan pendanaan yang jelas. Strategi kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dirancang secara matang dan dituangkan ke dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting agar pembangunan yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan serta harapan warga Kota Bogor. Dengan demikian, RKPD ini tidak hanya menjadi acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang disusun dalam Bab V berasal dari hasil kajian terhadap kondisi aktual, permasalahan, dan isu strategis yang dihadapi, sehingga mampu merumuskan prioritas pembangunan tahun 2026. Pada tahun ini, telah dirancang **151** program prioritas yang dirinci dalam RKPD Tahun 2026. Dokumen ini menetapkan target kinerja yang harus dicapai oleh setiap Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2026 melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Seluruh rencana tersebut merupakan hasil pembahasan yang komprehensif dan telah diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan Kota Bogor yang dirumuskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Tahun 2026. Musrenbangda berfungsi sebagai wadah strategis yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, seperti akademisi, pelaku usaha, komunitas, pemerintah, serta masyarakat umum.

Untuk menjamin kesinambungan kebijakan, Bab V dalam RKPD ini tidak hanya memuat daftar program dan kegiatan prioritas, tetapi juga memproyeksikan

kebutuhan pendanaan yang diperlukan pada tahun 2026. Fokus prioritas program dan kegiatan tersebut mencakup:

- a. Pelaksanaan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bogor dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial dan umum yang memadai, serta penguatan sistem jaminan sosial.
- c. Pemenuhan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- d. Penanganan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) serta hasil pokok-pokok pikiran DPRD.

Prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 menjadi dasar utama dalam penyusunan Rancangan Awal Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026. Dokumen ini menjadi panduan bagi seluruh sektor dan Perangkat Daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara tepat dan efisien.

Rincian dari program dan kegiatan yang direncanakan tersaji pada Tabel 5.1, yang memuat informasi detail tentang program prioritas, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta estimasi kebutuhan anggarannya. Dengan adanya tabel ini, Perangkat Daerah memiliki pedoman yang sistematis untuk melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja sepanjang tahun 2026, serta mampu melakukan penyesuaian apabila dibutuhkan.

Lebih dari sekadar dokumen perencanaan, RKPD ini juga berperan sebagai alat koordinasi lintas Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan responsif terhadap perubahan serta tantangan yang mungkin timbul di sepanjang tahun. Melalui pendekatan yang fleksibel dan adaptif, Pemerintah Kota Bogor dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kemajuan daerah secara menyeluruh.

Tabel 5.1
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA (RENJA PD) BOGOR TAHUN 2026

NO	BIDANG URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
1	INSPEKTORAT DAERAH	3	10	29
2	KECAMATAN	4	11	32
3	KEPEGAWAIAN	2	10	27
4	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	10	21
5	KEUANGAN	4	12	60
6	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	2	4
7	PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN	2	5	9
8	PERENCANAAN	3	13	40
9	SEKRETARIAT DAERAH	3	18	57
10	SEKRETARIAT DPRD	2	16	63

NO	BIDANG URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	13	30
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	9	22
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6	13	22
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	2	3	4
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	13	36
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	23	81
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	18	59
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	9	31
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6	6	11
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	16	34
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	12	26
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	5	11
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	18	55
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2	7	23
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	17	29
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	12	23
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2	10	54
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	14	48
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6	6	10
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	17	42
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4	8	21
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	6
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	3
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	1	1	1
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4	7	11
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	17	44
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	14	41
38	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	5
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	14	33
	TOTAL	151	413	1158

LAMPIRAN TABEL 5.1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
						DINAS PENDIDIKAN					601.884.435.233,00							575.032.360.560,00								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					601.884.435.233,00							575.032.360.560,00								
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					601.884.435.233,00							575.032.360.560,00								
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun / dikembangkan Nilai Hasil Survei kepuasan Masyarakat Kepatuhan Pengeloaan Keuangan Nilai Sakip Perangkat Daerah	-			1 Inovasi/tahun 87,76 Nilai 100 persen 81,2 Nilai	451.594.146.727,00					-	437.562.000.000,00								
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, Evaluasi kinerja, dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	-			94 Persen	32.274.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN	-	60.000.000,00							
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	60.000.000,00		DINAS PENDIDIKAN	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	32.274.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dsarah	-			2 Dokumen	441.489.658.203,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN	-	425.092.000.000,00							
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			425.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4166 0	441.413.351.803,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSI L GURU PNSD	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		425.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			92.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	76.306.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		92.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			94 persen	4.988.497.954,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan	-	5.520.000.000,00							
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	111.123.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan		145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN						
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	196.473.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	162.222.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	437.966.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan		475.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	114.039.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.414.881.854,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	1.551.790.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan		2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 persen	1.303.726.600,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan	-	2.260.000.000,00	
	1	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	616.154.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan		1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	109.119.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan		485.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	578.453.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan		455.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 persen	2.904.694.548,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	3.580.000.000,00	
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	595.828.332,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantjarjati	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.308.866.216,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		2.830.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah lingkup perangkat daerah ber kondisi baik	-			89 persen	875.295.422,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan	-	1.050.000.000,00					
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	180.519.844,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan		215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	194.425.578,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan		185.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	500.350.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Pendidikan		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Kumulatif beasiswa yang diberikan pada mahasiswa beprestasi tidak mampu Presentase Anak Putus Sekolah yang lulus Paket A, Paket B dan Paket C Indeks SPM (Pendidikan) Persentase siswa miskin yang mendapatkan BSM	-			115 orang 65 persen 80 Indeks 8.2 persen	150.290.288.506,00						-	137.470.360.560,00					
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas Iklim Kebhinekaan Iklim Keamanan Sekolah Literasi Meningkatkan APS 7-12 Numerasi	-			63.86 Skor 74.24 Skor 77.74 Skor 70.71 Skor 99.30 Persen 62.19 Skor	83.741.530.532,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN	-	94.935.000.000,00					
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	1.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	300.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	1.200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				2 Paket	3.052.998.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				22 Unit	3.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	475.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		485.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				60 Orang	28.664.243.736,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150	400.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
																Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				282 Satuan Pendidikan	94.878.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				530 Orang	9.666.128.096,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		18.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	254.760.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																	
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				14 Ruang	17.839.418.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		30.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																	
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				282 Satuan Pendidikan	281.603.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																	
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				33 Ruang	13.955.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		28.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				15000 Peserta Didik	3.557.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas Iklim Kebhinekaan Iklim Keamanan Sekolah Literasi Meningkatkan APS 13 - 15 Numerasi	-			68.82 Skor 73.25 Skor 74.95 Skor 83.51 Skor 91.77 Persen 66.59 Skor	50.739.145.558,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	DINAS PENDIDIKAN	-	25.848.360.560,00		
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)															
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1.000.000.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	DINAS PENDIDIKAN		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	276.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	DINAS PENDIDIKAN		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah															
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				26 Ruang	4.567.560.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	DINAS PENDIDIKAN		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah															
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	DINAS PENDIDIKAN		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	4.108.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				25652 Peserta Didik	14.904.485.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	DINAS PENDIDIKAN		7.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				228 Peserta Didik	688.792.090,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				179 Orang	7.372.143.632,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		1.698.341.960,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				648 Orang	1.028.325.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				126 Satuan Pendidikan	165.497.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		182.047.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17					
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				180 Orang	7.214.576.336,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN	15.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN					
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	120.236.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				126 Satuan Pendidikan	198.156.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		217.971.600,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	7.743.645.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	DINAS PENDIDIKAN		0,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	351.127.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	DINAS PENDIDIKAN		0,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APS 5-6 Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 Proporsi Jumlah Stuan PAUD Terakreditasi B	-			81.03 persen 68.21 persen 72.57 persen	9.440.872.316,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN	-	9.995.000.000,00					
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	755.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		0,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				10000 Peserta Didik	150.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		160.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1462 Orang	5.829.382.864,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		5.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500 Orang	766.642.024,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		870.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				380 Satuan Pendidikan	89.258.436,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				320 Orang	487.968.308,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		820.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	335.196.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				40 Komunitas	52.261.424,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				400 Orang	100.782.236,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	475.775.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				3000 Satuan Pendidikan	48.605.624,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
	1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	350.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DINAS PENDIDIKAN		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah 7 - 18	-			36.99	6.368.740.100,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	6.692.000.000,00	
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1383 Peserta Didik	2.986.394.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		2.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				250 Orang	1.892.891.404,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				200 Orang	137.010.812,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				48 Satuan Pendidikan	500.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		620.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				90 Orang	90.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		92.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	77.252.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				40 Komunitas	53.521.424,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				300 Orang	86.672.236,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		270.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				7100 Peserta Didik	43.205.624,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	201.792.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	300.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN				
						DINAS KESEHATAN						258.367.566.843,00							262.155.741.321,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						258.367.566.843,00							262.155.741.321,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						258.367.566.843,00							262.155.741.321,00					
3	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	134.359.952.183,00					-		138.362.976.321,00					
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan kinerja yang telah diformalkan Persentase laporan kinerja yang telah diformalkan	-			100 Persen 100 Persen	153.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	-	360.000.000,00					
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daserah				8 Dokumen	86.020.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		230.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	67.580.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		130.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	-			100 Persen 94,5 Persen	128.923.619.925,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	-	128.665.000.000,00					
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1431 Orang/bulan	127.433.017.325,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		127.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				16 Dokumen	1.377.034.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		1.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	113.568.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 Persen	1.745.212.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	-	4.713.384.999,00					
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.039.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		390.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	74.999.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		573.384.999,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	39.614.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.025.279.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	580.280.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMd	-			100 Persen	276.900.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	-	740.000.000,00						
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		360.000.000,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 unit	150.950.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	125.950.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				158 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		380.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	2.150.579.537,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	-	2.374.591.322,00					
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	736.549.689,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		850.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	1.414.029.848,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		1.524.591.322,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik	-			100 Persen	1.110.039.121,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	-	1.510.000.000,00					
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	348.545.361,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		410.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				500	244.343.510,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	517.150.250,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang diintervensi kesehatan melalui kunjungan rumah Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase Balita Berstatus Gizi Normal	-			0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100,0 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95 Persen 8,7 Persen 100 persen 87,2 Persen	105.745.467.520,00						-	104.054.765.000,00	
							kunjungan rumah Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase Balita Berstatus Gizi Normal													
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang dipenuhi kebutuhan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP) Jumlah puskesmas yang melakukan intervensi kesehatan melalui kunjungan rumah Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Persentase kelurahan memiliki fasilitas kesehatan	-			23 Unit 25 Puskesmas 25 Puskesmas 60,5 Persen 73,5 Persen	17.194.781.205,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor	-	23.042.710.000,00	
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	740.766.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor		8.519.544.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	776.002.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor		873.166.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	230.106.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor		680.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				5025 Unit	1.081.710.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor		1.850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				17 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor		380.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				10 Paket	14.363.495.905,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor		10.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				4100 Keluarga	2.700.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor		540.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-			100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	87.055.407.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	79.300.455.000,00		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil															
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16098 Orang	400.000.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin															
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15992 Orang	98.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15351 Orang	17.932.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		21.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				62254 Orang	7.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				149437 Orang	15.100.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				714465 Orang	143.966.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				126529 Orang	6.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				76015 Orang	22.374.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18174 Orang	12.264.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		19.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1578 Orang	27.155.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		32.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				34505 Orang	22.067.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				24267 Orang	28.819.950,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	11.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		205.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1.586.399.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		5.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		170.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	69.465.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	29.975.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		74.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	2.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	21.194.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				42287 Orang	11.596.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	9.799.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				6 Dokumen	84.040.110.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		70.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				2 Dokumen	170.769.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
							Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				8 Unit	1.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		2.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				101 Unit	10.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		390.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	114.966.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	31.650.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		360.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6390 Orang	27.100.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				555 Orang	18.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1939 Orang	5.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	16.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		30.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik														
							Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		80.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	24.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		35.925.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah fasyankes terintegrasi dengan satu sehat	-			47 Unit	1.476.378.665,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Dinas Kesehatan	-	1.700.000.000,00					
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	1.476.378.665,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Dinas Kesehatan		1.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan SPM RS Persentase rekomendasi perizinan fasyankes	-			80,00 Persen 100 Persen	18.900.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Faskes di Kota Bogor	-	11.600.000,00					
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				25 Unit	13.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Faskes di Kota Bogor		7.500.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				2 Dokumen	5.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Faskes di Kota Bogor		4.100.000,00	DINAS KESEHATAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Nakes dan Named terhadap populasi Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan yang sesuai dengan Kualifikasi yang dibutuhkan Persentase pemenuhan SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	-			23 Rasio 86 Persen 89 Persen	1.127.497.040,00						-		1.270.000.000,00	
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan memiliki SIP	-			90,5 Persen	3.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Tenaga Kesehatan di Kota Bogor	-	230.000.000,00		
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				6 Dokumen	3.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Tenaga Kesehatan di Kota Bogor		230.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan	-			86 Persen	944.697.040,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor	-	360.000.000,00		
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan															
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				29 Dokumen	16.161.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar															
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				7800 Orang	852.335.840,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor		150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	76.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	UPTD lingkup Dinas Kesehatan Kota Bogor		110.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi	-			60 Persen	179.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan	-	680.000.000,00				
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				295 Orang	179.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan		680.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
6	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produsen Makanan Minuman yang memenuhi standar kesehatan Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan kefarmasian Persentase Produsen PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu yang memenuhi standar kesehatan Persentase TPM memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi	-			45,0 Persen 62 Persen 65,0 Persen 71 Persen	176.965.500,00						-	691.000.000,00				
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah (sarana) apotek, toko obat, dan UMOT yang memenuhi syarat	-			62 Sarana	4.443.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	75.000.000,00				
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				62 Dokumen	4.443.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah perusahaan rumah tangga yang memiliki sertifikat produksi PKRT dan alat kesehatan kelas 1 tertentu	-			6 Sarana	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bogor	-	8.000.000,00	
	1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga														
							Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				12 Dokumen	5.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bogor		8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan yang bersertifikat	-			235 Sarana	30.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	360.000.000,00	
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				235 Dokumen	30.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		360.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah TPM yang memiliki sertifikat Laik Higiene sanitasi bagi Jasa Boga, restoran dan DAM	-			90 Sarana	85.596.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	92.000.000,00	
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	85.596.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		92.000.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah pedagang makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diberikan stiker/lebelisasi	-			520 Sarana	46.926.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	90.000.000,00	
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	46.926.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		90.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pangan olahan industri rumah tangga yang memenuhi ketentuan dan memenuhi syarat	-			95 Persen	5.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	66.000.000,00	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				40 Unit	5.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		66.000.000,00	DINAS KESEHATAN
7	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif mandiri Persentase Rumah Tangga ber PHBS	-			17,65 Persen 74,11 Persen	16.957.684.600,00						-	17.777.000.000,00	
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase institusi pemerintah yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	-			38,46 Persen	54.979.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	52.000.000,00	
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	54.979.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		52.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang memiliki capaian persentase rumah tangga ber PHBS ≥ target PHBS tingkat kota	-			88,24 Persen	49.964.200,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	125.000.000,00					
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				3 Dokumen	49.964.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		125.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Integrasi Layanan Primer (ILP) Persentase Posyandu Aktif	-			25 Puskesmas 100 Persen	16.852.741.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	17.600.000.000,00					
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	16.852.741.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		17.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN				
						PUSKESMAS BOGOR SELATAN						3.306.635.210,00									0,00			
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.306.635.210,00									0,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.306.635.210,00									0,00			
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	3.306.635.210,00						-	0,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	3.306.635.210,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00					
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.306.635.210,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	PUSKESMAS BOGOR SELATAN
						PUSKESMAS CIPAKU						4.258.683.000,00						0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.258.683.000,00						0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.258.683.000,00						0,00		
9	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	3.843.687.000,00						-	0,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	3.843.687.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.843.687.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	PUSKESMAS CIPAKU
10	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGI Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui	-			0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100 persen	414.996.000,00						-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Kunjungan rumah Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional														
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-			100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	414.996.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Cipaku	-	0,00		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	414.996.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Cipaku		0,00		PUSKESMAS CIPAKU
						PUSKESMAS BONDONGAN						2.702.000.000,00							0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.702.000.000,00							0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.702.000.000,00							0,00		
11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	2.702.000.000,00						-	0,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	2.702.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.702.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	PUSKESMAS BONDONGAN				
							PUSKESMAS LAWANG GINTUNG					2.221.771.200,00							0,00					
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.221.771.200,00							0,00					
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.221.771.200,00							0,00					
12	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-		100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	2.071.771.200,00						-	0,00					
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-		100 Persen	2.071.771.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Lawang Gintung	-	0,00					
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.071.771.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Lawang Gintung		0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG				
13	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGI Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang diintervensi kesehatan melalui	-		0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100%	150.000.000,00						-	0,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Kunjungan rumah Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional																	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-			100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Lawang Gintung	-	0,00					
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Lawang Gintung		0,00	PUSKESMAS LAWANG GINTUNG				
						PUSKESMAS BOGOR TIMUR														0,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															0,00			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																0,00		
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	4.173.474.095,00						-	0,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	4.173.474.095,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Bogor Timur	-	0,00					
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.173.474.095,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Bogor Timur		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui kunjungan rumah Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	-		0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7Persen Madya Predikat 100 persen	414.996.000,00						-	0,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-		100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	414.996.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Bogor Timur	-	0,00	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
																Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	414.996.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Bogor Timur		0,00	PUSKESMAS BOGOR TIMUR			
						PUSKESMAS PULO ARMYN						3.041.346.650,00							0,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.041.346.650,00							0,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.041.346.650,00							0,00				
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	3.041.346.650,00						-	0,00				
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	3.041.346.650,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Pulo Arymn	-	0,00				
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.041.346.650,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Pulo Arymn		0,00	PUSKESMAS PULO ARMYN			
						PUSKESMAS BOGOR TENGAH						2.795.668.606,00							0,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.795.668.606,00							0,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.795.668.606,00							0,00				
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	2.230.727.626,00						-	0,00				
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	2.230.727.626,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Bogor Tengah	-	0,00				
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.230.727.626,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Bogor Tengah		0,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang diintervensi kesehatan melalui kunjungan rumah Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana	-			0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100 persen	564.940.980,00					-	0,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-			100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	564.940.980,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Bogor Tengah	-	0,00	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	564.940.980,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Bogor Tengah		0,00	PUSKESMAS BOGOR TENGAH				
												1.975.765.600,00							0,00					
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.975.765.600,00						0,00					
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.975.765.600,00						0,00					
19	1	02	01				PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-		100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	1.826.000.000,00					-	0,00						
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-		100 Persen	1.826.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00					
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.826.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	PUSKESMAS SEMPUR				
20	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGI Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui	-		0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100 persen	149.765.600,00						-	0,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Kunjungan rumah Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional														
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-			100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	149.765.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Sempur	-	0,00		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	149.765.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Sempur		0,00		PUSKESMAS SEMPUR
						PUSKESMAS GANG AUT													0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													0,00		
21	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	1.085.500.000,00						-	0,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	1.085.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Gang Aut	-	0,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.085.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Gang Aut		0,00	PUSKESMAS GANG AUT
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang diintervensi kesehatan melalui kunjungan rumah	-			0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100 persen	150.000.000,00					-	0,00		
							Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional													
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-			100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	150.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Gang Aut	-	0,00	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Gang Aut		0,00	PUSKESMAS GANG AUT				
							PUSKESMAS BELONG					1.045.195.000,00							0,00					
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.045.195.000,00						0,00					
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.045.195.000,00						0,00					
23	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-		100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	895.200.000,00						-	0,00					
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-		100 Persen	895.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00					
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	895.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	PUSKESMAS BELONG				
24	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGI Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang diintervensi kesehatan melalui	-		0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100 persen	149.995.000,00						-	0,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Kunjungan rumah Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional																		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-			100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	149.995.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Belong	-		0,00					
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	149.995.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Belong		0,00		PUSKESMAS BELONG				
						PUSKESMAS MERDEKA						2.302.988.048,00								0,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.302.988.048,00								0,00					
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.302.988.048,00								0,00					
25	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	2.153.000.000,00							-	0,00					
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	2.153.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00						
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.153.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	PUSKESMAS MERDEKA	
26	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang diintervensi kesehatan melalui kunjungan rumah	-			0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100 persen	149.988.048,00					-		0,00		
							Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional														
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-			100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	149.988.048,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Merdeka	-		0,00	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	149.988.048,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Merdeka		0,00	PUSKESMAS MERDEKA
						PUSKESMAS SEMPLAK						3.297.337.682,00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.297.337.682,00							0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.297.337.682,00							0,00	
27	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	3.297.337.682,00						-	0,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	3.297.337.682,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.297.337.682,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	PUSKESMAS SEMPLAK
						PUSKESMAS PANCASAN						2.625.732.024,00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.625.732.024,00							0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.625.732.024,00							0,00	
28	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	2.625.732.024,00						-	0,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	2.625.732.024,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.625.732.024,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	PUSKESMAS PANCASAN				
	1											3.653.465.912,00							0,00					
	1											3.653.465.912,00							0,00					
	1	02										3.653.465.912,00							0,00					
29	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-		100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	3.238.469.912,00						-	0,00					
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-		100 Persen	3.238.469.912,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00					
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.238.469.912,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA				
30	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGI Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang di	-			0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100 persen	414.996.000,00					-	0,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							intervensi kesenitatan melalui kunjungan rumah Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana														
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-			100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	414.996.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Pasir Mulya	-	0,00		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	414.996.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Pasir Mulya		0,00	PUSKESMAS PASIR MULYA	
						PUSKESMAS GANG KELOR						3.025.678.538,00							0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.025.678.538,00							0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.025.678.538,00							0,00		
31	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	3.025.678.538,00						-	0,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	3.025.678.538,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.025.678.538,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	PUSKESMAS GANG KELOR
						PUSKESMAS SINDANG BARANG						3.499.518.068,00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.499.518.068,00							0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.499.518.068,00							0,00	
32	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	3.499.518.068,00					Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Sindang Barang	-	0,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	3.499.518.068,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Sindang Barang	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	3.499.518.068,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Sindang Barang		0,00	PUSKESMAS SINDANG BARANG
						PUSKESMAS BOGOR UTARA						4.727.728.734,00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.727.728.734,00							0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.727.728.734,00							0,00	
33	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	4.312.732.734,00					Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Bogor Utara	-	0,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	4.312.732.734,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Bogor Utara	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	4.312.732.734,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Bogor Utara		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
34	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang diintervensi kesehatan melalui kunjungan rumah	-			0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100 persen	414.996.000,00					-	0,00		
							Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional													
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-			100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	414.996.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Bogor Utara	-	0,00	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	414.996.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Bogor Utara		0,00	PUSKESMAS BOGOR UTARA
	1						PUSKESMAS TEGAL GUNDIL					2.642.223.252,00							0,00	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.642.223.252,00							0,00	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2.642.223.252,00							0,00	
35	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-		100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	2.492.227.990,00						-	0,00	
	1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-		100 Persen	2.492.227.990,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Tegal Gundil	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.492.227.990,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Tegal Gundil		0,00	PUSKESMAS TEGAL GUNDIL
36	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang diintervensi kesehatan melalui	-		0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100 persen	149.995.262,00						-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Kunjungan rumah Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional																		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-			100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	149.995.262,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Tegal Gunduli	-	0,00						
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	149.995.262,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Tegal Gunduli		0,00		PUSKESMAS TEGAL GUNDIL				
						PUSKESMAS WARUNG JAMBU						2.813.130.000,00								0,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.813.130.000,00								0,00					
37	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	2.813.130.000,00						-	0,00						
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	2.813.130.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Warung Jambu	-	0,00						
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.813.130.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Warung Jambu		0,00	PUSKESMAS WARUNG JAMBU
						PUSKESMAS TANAH SAREAL						3.490.316.000,00						0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.490.316.000,00						0,00		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.490.316.000,00						0,00		
38	1	02	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	3.075.320.000,00					-	0,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	3.075.320.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.075.320.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL
39	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGI Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang di intervensi kesehatan melalui	-			0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100 persen	414.996.000,00					-	0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Kunjungan rumah Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional														
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-			100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	414.996.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Sareal	-	0,00		
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	414.996.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Tanah Sareal		0,00	PUSKESMAS TANAH SAREAL	
						PUSKESMAS PONDOK RUMPUT						1.432.875.352,00									
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.432.875.352,00									
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.432.875.352,00									
40	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	1.282.875.500,00						-	0,00		
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	1.282.875.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Pondok Rumput	-	0,00		
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.282.875.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Pondok Rumput		0,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT
41	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang diintervensi kesehatan melalui kunjungan rumah	-			0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100 persen	149.999.852,00					-	0,00		
							Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana													
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase masyarakat tidak mampu yang memiliki jaminan kesehatan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-			100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 86 Persen 100 Persen 100 Persen 13 Persen 4,6 Persen ≤ 25,7 Persen	149.999.852,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Pondok Rumput	-	0,00	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	149.999.852,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Pondok Rumput		0,00	PUSKESMAS PONDOK RUMPUT			
						PUSKESMAS KEDUNG BADAK						3.100.000.000,00							0,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.100.000.000,00							0,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.100.000.000,00							0,00				
42	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	3.100.000.000,00						-	0,00				
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	3.100.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Kedung Badak	-	0,00				
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.100.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Kedung Badak		0,00	PUSKESMAS KEDUNG BADAK			
						PUSKESMAS KAYU MANIS						3.527.607.530,00							0,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.527.607.530,00							0,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.527.607.530,00							0,00				
43	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	3.527.607.530,00						-	0,00				
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	3.527.607.530,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Kayu Manis	-	0,00				
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.527.607.530,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Kayu Manis		0,00	PUSKESMAS KAYU MANIS			
						PUSKESMAS MEKARWANGI						3.602.000.000,00							0,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.602.000.000,00							0,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.602.000.000,00							0,00				
44	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	3.602.000.000,00						-	0,00				
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	3.602.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Mekarwangi	-	0,00				
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	3.602.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Mekarwangi		0,00	PUSKESMAS MEKARWANGI			
						PUSKESMAS MULYAHARJA						2.601.999.996,90							0,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.601.999.996,90							0,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.601.999.996,90							0,00				
45	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	2.452.000.000,00						-	0,00				
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	2.452.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di wilayah kerja Puskesmas Mulyaharja	-	0,00				
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	149.999.996,90	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor di Wilayah Kerja Puskesmas Mulyaharja		0,00	PUSKESMAS MULYAHARJA
						UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH						1.683.262.434,00							0,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.683.262.434,00							0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.683.262.434,00							0,00	
47	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 2 Inovasi/tahun 93,45 Nilai 95,45 Nilai	1.683.262.434,00						-	0,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase UPTD yang menerapkan BLUD	-			100 Persen	1.683.262.434,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	0,00	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.683.262.434,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		0,00	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						307.900.000.000,00							300.680.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						307.900.000.000,00							300.680.000.000,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						307.900.000.000,00							300.680.000.000,00	
48	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor	-			0,14 Persen 0,18 Angka 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100 persen	307.900.000.000,00					-	300.680.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Persentase keluarga yang terintervensi kesehatan melalui kunjungan rumah Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Angka Kematian Balita													
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	15.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	180.000.000,00	
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit														
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	0,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		180.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	15.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan nasional Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Balita berat badan sangat kurang dan Berat badan Kurang (Underweight) Persentase Balita gizi buruk dan gizi kurang (Wasting) Persentase Balita Sangat Pendek dan Pendek (Stunting) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan	-			100 Persen 100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 1.122.772 Orang 100 Persen 4,11 Persen 2,29 Persen 9,5 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 60 Persen 100 Persen 100 Persen	292.900.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	300.500.000.000,00	
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2 Dokumen	292.900.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		300.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
						UPTD Public Safety Center Gerakan Emergensi Terpadu 119						1.060.000.096,00							0,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.060.000.096,00								0,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.060.000.096,00								0,00	
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi ODGJ Insiden rate HIV Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk Persentase fasyankes terintegrasi SIKN (Sistem Informasi Kesehatan Nasional) Persentase penanganan kesehatan pada KLB/Bencana Jumlah kematian ibu Prevalensi Diabetes Melitus Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang memenuhi standar Persentase Balita Berstatus Gizi Normal Angka Keberhasilan Pengobatan TB Persentase FKTP Pemerintah dengan ketersediaan obat esensial dan bahan habis pakai (BHP) Capaian SPM RSUD Kota Bogor Persentase keluarga yang diintervensi kesehatan melalui kunjungan rumah Prevalensi Penderita Hipertensi Predikat STBM Angka Kematian Balita Prevalensi Diabetes Melitus Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional	-			0,14 Persen 0,18 Angka 0,637 Rasio 0,67 Rasio 100,00 Persen 100 Persen 17 Angka 2,08 Persen 60 Persen 6,8 Angka 7,5 Angka 84 Persen 87,2 Persen 90 Persen 92 Persen 93,10 Persen 95,00 Persen 8,7 Persen Madya Predikat 100 persen	1.060.000.096,00						-	0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	-			100 Persen 100 Persen 68 Kelurahan 101 Unit 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 80,00 Persen 60 Persen 100 Persen 100 Persen	1.060.000.096,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	0,00			
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1.060.000.096,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		0,00	UPTD PUBLIC SAFETY CENTER GERAKAN EMERGENSI TERPADU 119		
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						198.587.794.171,00								203.651.697.463,00		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						198.587.794.171,00								203.651.697.463,00		
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						198.587.794.171,00								203.651.697.463,00		
50	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengeloaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 % 1 Inovasi/tahun 86,1 Nilai 86,25 Nilai	33.190.130.842,00						-	39.951.697.463,00			
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	-			100 % 100 %	19.236.628.211,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR	-	20.000.000.000,00			
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				115 Orang/bulan	19.236.628.211,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	85.374.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR	-	150.000.000,00				
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	85.374.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	2.883.852.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR	-	2.700.000.000,00				
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	63.313.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.777.943.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	134.751.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	39.838.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	113.871.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1	754.134.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	-			94 %	557.180.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR	-	651.697.463,00						
	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar																			
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				10 Unit	557.180.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		651.697.463,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	5.262.123.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR	-	5.800.000.000,00						
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	747.710.456,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4.514.413.308,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	-			94 %	5.164.972.267,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR	-	10.650.000.000,00		
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	318.479.767,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				85 Unit	3.755.215.172,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	858.281.118,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	232.996.210,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas PUPR		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
51	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase rawan banjir yang ditangani Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%) Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	-			20,24 % 56,13 % 89,97 %	21.914.352.346,00						-	22.600.000.000,00					
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan SDA yang disusun Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani Panjang Sungai yang berkondisi baik	-			20 Dokumen 2 LOKASI 103 KM	12.969.779.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	13.600.000.000,00					
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				17,5 KM	1.365.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		1.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing																		
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				6,29 KM	9.135.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		9.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				20 Dokumen	1.269.779.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
							Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				5,38 KM	1.200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Irigasi yang berkondisi baik	-			54,00 KM	8.944.573.146,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor	-	9.000.000.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																	
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				54 KM	8.944.573.146,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
52	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman Cakupan layanan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	-			74,33 % 99,04 %	1.094.060.300,00					-	1.150.000.000,00					
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman	-			74,33 %	1.094.060.300,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	1.150.000.000,00				
	1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																	
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				50 Orang	34.050.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				1 Unit	216.710.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	843.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
53	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	-			6,49 % 81,00 %	10.015.302.113,00					-	10.500.000.000,00					
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman Persentase rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	-			6,49 % 81,00 %	10.015.302.113,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	10.500.000.000,00				
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				25 M³/Hari	874.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi				2 Unit	775.192.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				1105 Rumah Tangga	1.600.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		1.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1.126.248.913,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				86 Orang	57.258.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat														
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.				365 Rumah Tangga	5.582.203.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		5.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
54	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase penurunan lokasi genangan Persentase drainase yang berkondisi baik	-			0,87 % 70 %	12.058.886.485,00						-	13.200.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang drainase pada jalan arteri/kolektor/lokal	-			15,184 KM	12.058.886.485,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor	-	13.200.000.000,00	
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				15 Sistem Drainase Perkotaan	6.147.190.885,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		6.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				15 Sistem Drainase Perkotaan	4.000.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				20 Dokumen	1.031.695.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan														
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				10 Sistem Drainase Perkotaan	880.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
55	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN Gedung	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin	-			30 % 65 %	9.349.720.420,00						-	4.300.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai PBG Presentase permohonan sertifikat laik fungsi yang telah terbit	-			96 % 72 %	9.349.720.420,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor	-	4.300.000.000,00	
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	188.665.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	8.205.055.220,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
							Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				35 Orang	200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	756.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
56	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan berkondisi mantap	-			90,05 %	109.707.231.065,00						-	110.450.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang terpelihara Persentase jembatan yang ditingkatkan Persentase jembatan yang terbangun Persentase jembatan yang terpelihara Persentase panjang jalan yang ditingkatkan Persentase panjang jalan yang terbangun Persentase trotoar yang dibangun Persentase trotoar yang ditingkatkan	-			73,80 % 33,33 % 33,33 % 99,30 % 58,79 % 35,3 % 20,00 % 20,00 %	109.707.231.065,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor	-	110.450.000.000,00	
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				20 Dokumen	15.679.359.734,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		56.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				169 KM	24.200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		24.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan														
							Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				0.35 KM	33.901.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				131,69 KM	1.245.189.331,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Panjang Jembatan yang Direhabilitasi				1 Meter	943.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan														
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				118,78 KM	30.957.682.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Kota Bogor		13.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				139 Jembatan	1.625.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan														
							Panjang jembatan yang dibangun				1 Meter	1.155.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Kota Bogor		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase penyedia jasa konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	-			61 %	208.110.600,00						-	300.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi	-			12,20 %	208.110.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor	-	300.000.000,00	
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	208.110.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
58	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	-			67 %	1.050.000.000,00					-		1.200.000.000,00					
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Penataan Ruang	-			57,14 %	350.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor	-	400.000.000,00					
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-			42,86 %	200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor	-	150.000.000,00					
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan uang Daerah	-			40,00 %	500.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor	-	650.000.000,00	
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR														
							Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Kota Bogor		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						241.946.692.473,00							177.386.551.350,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						217.436.094.407,00							168.458.622.730,00	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						217.436.094.407,00							168.458.622.730,00	
59	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 % 1 Inovasi/tahun 86.90 Nilai 92.00 Nilai	41.013.990.097,00						-	16.778.622.730,00	
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai regulasi	-			100 %	20.698.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor	-	21.835.588,00	
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3.956.400,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		5.236.088,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	16.742.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	Kota Bogor		16.599.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	-			100 %	15.255.100.002,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor	-	16.756.787.142,00				
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				98 Orang/bulan	15.133.064.102,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		16.610.574.652,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	667.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		1.454.838,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	121.368.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		144.757.652,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	227.883.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor	-	0,00				
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	227.883.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	506.018.778,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor	-	0,00				
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.500.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.000.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	49.609.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	46.340.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	292.567.478,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan BMD sesuai RKBMD	-			100 %	282.431.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor	-	0,00	
	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	99.223.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	183.208.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	20.410.793.921,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor	-	0,00	
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.249.833.185,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19.160.960.736,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah yang berkondisi Baik	-			100 %	4.311.063.396,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor	-	0,00	
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				167 Unit	3.783.785.016,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	146.148.380,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	381.130.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
60	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang di fasilitasi untuk menghuni rumah layak huni Persentase tingkat hunian rusunawa	-			100 persen 100 Persen 95.37 persen	9.006.179.390,00						-	0,00					
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penyediaan data rumah korban bencana yang akan direhabilitasi atau direlokasi	-			100 %	603.156.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor	-	0,00					
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
							Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	84.999.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
							Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	87.657.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
							Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	86.499.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	84.999.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	87.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	84.999.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	87.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Presentase Peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			100 %	18.649.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor	-	0,00	
	1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				80 Orang	18.649.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diintervensi oleh Pemerintah	-			100 %	437.632.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor	-	0,00	
	1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
							Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				5 Unit Rumah	437.632.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Tingkat hunian rusun yang terisi	-			95.37 %	7.927.857.190,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Kota Bogor	-	0,00	
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	66.951.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	99.999.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	1	04	02	2.05	0008	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota																	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
							Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				2 Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	7.760.906.290,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-			100 %	18.883.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor	-	0,00					
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				10 Laporan	18.883.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
61	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara Persentase Rumah Tidak Layak Huni di dalam kawasan kumuh kewenangan kota yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah	-			11.39 % 18.41 % 27 %	18.664.457.000,00						-	0,00					
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja/ Forum PKP	-			100 %	64.957.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor	-	0,00					
	1	04	03	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum				1 Laporan	64.957.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	-			20 Ha	49.999.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor	-	0,00					
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				57 Kelompok Masyarakat	49.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	-			83.74 Ha	18.549.499.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor	-	0,00					
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				430 Unit Rumah	5.320.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				3 Dokumen	706.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
	1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
							Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				83,74 Ha	12.522.899.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				
62	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh Kewenangan Kota yang mendapat bantuan perbaikan rumah dalam upaya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	-			28 %	20.503.732.166,00						-	52.460.000.000,00					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Diinterfensi oleh Pemerintah	-			1526 Unit Rumah	20.503.732.166,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor	-	52.460.000.000,00				
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																	
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				1520 Unit Rumah	19.903.732.166,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kota Bogor		52.460.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																	
							Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh				6 Unit	600.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
63	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara Persentase panjang drainase perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara Persentase Luas Makam Siap Pakai yang di kelola Pemerintah	-			20 % 20 persen 40 persen	128.247.735.754,00						-	99.220.000.000,00				
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diintervensi Presentase PSU Perumahan yang diserahkan terimakan ke Pemerintah Daerah	-			420 Lokasi 13.38 %	128.247.735.754,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	Kota Bogor	-	99.220.000.000,00				
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	94.999.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				7 Laporan	54.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU																	
							Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU				45 Kelompok	20.649.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	04	05	2.01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																	
							Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				420 Lokasi	125.599.055.602,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	Kota Bogor		99.220.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																	
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				8 Lokasi	2.478.030.852,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24.510.598.066,00						8.927.928.620,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					24.510.598.066,00									
64	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dibangun	-			125.20 Ha 126.20 Ha	24.510.598.066,00						-	8.927.928.620,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan RTHP dan Taman Kehati lainnya Luas RTH Publik dan taman kehati lainnya yang berkondisi baik Luas RTH Publik dan taman kehati lainnya yang terbangun Persentase sarana prasarana penunjang pengelolaan RTHP dan taman kehati lainnya berkondisi baik	-			60 Orang 50.96 Ha 1 Ha 100 %	24.510.598.066,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	Kota Bogor	-	8.927.928.620,00	
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				3 Dokumen	281.450.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				50,57 Ha	4.193.257.964,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
							Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				108 Orang	125.034.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				342 Unit	3.029.993.202,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	Kota Bogor		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya														
							Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit	16.880.862.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya	Kota Bogor		8.927.928.620,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						10.112.633.810,00							11.934.358.576,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.112.633.810,00							11.934.358.576,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.112.633.810,00							11.934.358.576,00	
65	1	05	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN JUMLAH Inovasi/tahun YANG DIBANGUN/DIKEMBANGKAN NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH NILAI HASIL SURVEY KEPUASAN	-			95 Persentase 1 Inovasi/tahun 83,3 Nilai 85,8 Nilai	7.655.018.884,00						-	9.248.555.748,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			12 Laporan	4.000.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	11.300.000,00					
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	2.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	2.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		5.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	-			22 Orang/Bulan	3.831.336.990,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	5.428.470.748,00					
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	3.736.896.990,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		5.331.470.748,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	94.440.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		97.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	-			12 Laporan	939.150,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	8.000.000,00					
	1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	939.150,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persentase	137.150.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00					
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	137.150.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	554.869.800,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	637.000.000,00					
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.602.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.418.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		71.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	38.700.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	198.859.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	15.594.500,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	249.694.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		275.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMd	-			100%	118.069.517,00			-	-	-	-	148.700.000,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	20.702.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				68 Unit	97.367.517,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		17.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		1.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	-			12 laporan	2.140.393.656,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	2.270.085.000,00	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	161.771.176,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		170.085.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.978.622.480,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		2.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 Laporan	868.259.771,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	545.000.000,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38.330.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	649.931.102,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					90 Unit	179.998.669,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		320.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		185.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
66	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana Persentase SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	-			100 Persentase 1,15 Persentase 45,59 Persentase	2.457.614.926,00						-	2.685.802.828,00						
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang telah mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	-			100 Persentase	85.055.000,00			-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-	-	104.920.000,00						
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																			
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun					900 Orang	85.055.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		104.920.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-			100 Persen	1.155.986.401,00			-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-	-	1.338.063.178,00						
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																			
						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya					369 Unit	498.414.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		419.030.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																			
						Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan daruratbencana (per jenisancaman) Kabupaten/Kota					800 orang	17.039.701,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		18.919.578,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																			
						Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana					27 Kawasan	42.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		50.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																			
						Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana					55 Orang	142.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		349.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				5 Kawasan	455.627.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		500.188.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan yang diterima dan yang bisa ditangani serta pemberian bantuan logistik kepada korban bencana	-			100 Persen	746.009.925,00			-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-	-	1.005.819.650,00				
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				2 Dokumen	2.247.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		2.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				360 Orang	55.320.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		304.553.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				3100 Orang	686.665.525,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		697.115.850,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1.777.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		1.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan	-			100 Persen	470.563.600,00			-	-	-	-	237.000.000,00				
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																	
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				0 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	-	-	-	-	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi				70 Orang	133.840.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	122.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		22.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota																	
							Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				12 Laporan	164.911.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																	
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	49.811.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						47.153.334.334,00						49.347.500.000,00					
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						47.153.334.334,00						49.347.500.000,00					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						47.153.334.334,00						49.347.500.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
67	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 persen 1 Inovasi/tahun 88.25 nilai 93 nilai	44.792.542.650,00						-	46.865.500.000,00				
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	-			100 %	20.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	-	20.500.000,00				
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		8.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	12.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	-			100 % 100 %	37.640.749.129,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	-	38.500.000.000,00				
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				185 Orang/bulan	37.640.749.129,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		38.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	452.067.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	-	550.000.000,00				
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	452.067.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	603.227.606,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	-	940.000.000,00				
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	128.944.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	117.503.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	66.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	164.870.006,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	44.310.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	81.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 %	321.914.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	-	0,00	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	321.914.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	4.356.373.075,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	-	5.225.000.000,00	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	219.875.155,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		225.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	4.136.497.920,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		5.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	-			100 %	1.398.210.740,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	-	1.630.000.000,00					
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				65 Unit	1.298.453.556,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				86 Unit	57.853.584,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	41.903.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Karyawan dan Karyawati Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
68	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman,keindahan) Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	-			100 % 100 persen 59,40 %	2.360.791.684,00						-	2.482.000.000,00					
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	-			100 %	1.805.283.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	2.002.000.000,00					
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																	85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	83.029.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	28.680.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				168 Orang	80.095.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																	
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1 laporan	128.745.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		135.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																	
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1.373.420.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	37.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		37.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
						[Meningkatnya kompetensi anggota satpol pp dan Linmas]	Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	100.00	0	59.40	59.40	2.360.791.684,00						2.482.000.000,00					
	1	05	02	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja																	
						Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				185 Orang	74.313.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
						[Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat]	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman,keindahan)	100.00	100.00	100.00	100.00	2.360.791.684,00						2.482.000.000,00					
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase tindaklanjut penegakan perda dan perkada			100%	540.399.984,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		460.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah																	
						Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan				1 laporan	74.475.784,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	442.604.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	19.320.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	3.999.700,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Bogor yang dibentuk				100%	15.108.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Bogor		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	15.108.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Bogor		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
						DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN														0,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						25.541.691.533,00							0,00					
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
69	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 1 Inovasi/tahun 82.4 Persen 86.25 Persen	22.909.492.733,00						-	0,00					
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu				100 persen 100 persen	8.000.000,00			Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyaluran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	4.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA				100 persen 100 persen	12.420.092.840,00							0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	12.355.892.840,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	64.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	244.147.300,00			-	-	-	-	0,00	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	244.147.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100 persen	824.748.686,00				Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	48.161.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	50.766.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan													
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	228.940.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	496.881.186,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD				100 persen	6.717.117.000,00				Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	1.977.987.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	174.650.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4.498.440.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 persen	1.162.492.867,00							0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	113.777.612,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.048.715.255,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik				100 persen	1.532.894.040,00							0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	197.138.826,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	918.091.252,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	167.663.962,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	250.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
70	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kelurahan tanggap kebakaran Persentase SDM aparatur damkar dan penyelamatan yang ditingkatkan kompetensinya Rata Rata respontime penanganan kebakaran	-			79 Persentase 40 Persentase 10,5 menit	2.632.198.800,00					-	0,00		
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Jumlah SDM Aparatur Damkar dan Penyelamatan yang ditingkatkan Kompetensi nya				1 Kerjasama 25 buah 10 orang	2.102.535.200,00				Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				10 Orang	100.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				203 Unit	2.002.535.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kebakaran kepada Masyarakat Jumlah Kelurahan Tanggap Kebakaran				120 Relawan 10 Kegiatan 10 Kelurahan	462.023.600,00				Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat							Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				85 Orang	239.969.400,00									
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran															
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				20 Desa/Kelurahan	123.080.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana															
							Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	98.973.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Sarpras Pencarian dan Pertolongan pada Kondisi Membahayakan Sesuai Standar Jumlah SDM Aparatur Pencarian dan Pertolongan yang ditingkatkan kompetensinya			25 buah 5 orang	67.640.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi													
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			25 Unit	67.640.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
						DINAS SOSIAL					19.006.833.341,00							6.096.696.646,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					19.006.833.341,00							6.096.696.646,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
71	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Hasil Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-		85,6 Nilai 100 persen 89,72 Nilai 1 Inovasi /tahun	12.810.747.193,00						-	0,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu			Nilai A A Nilai A Nilai	33.163.300,00							0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	27.016.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	DINAS SOSIAL
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15 Laporan	2.584.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			28 Laporan	3.561.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu			100% 100%	9.686.207.400,00							0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			44 Orang/bulan	9.631.652.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	54.554.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						965.074.600,00							0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 PERSEN	547.615.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)			0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	428.360.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	29.100.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	487.676.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						436.047.000,00							0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	30.443.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	405.603.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.070.336.648,00							0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka				12 Laporan	226.495.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	74.494.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	769.346.648,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						619.918.245,00							0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	313.283.879,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	65.026.366,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	241.608.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	DINAS SOSIAL
72	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS kelembagaan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase PSKS Perseorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	-			61,79% 32,92%	547.615.200,00					-		399.385.800,00	
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 PERSEN	547.615.200,00			Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		399.385.800,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota													
	1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Sertifikat Orang	107.381.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		61.549.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan kapasitasnya				80 Orang	83.068.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyalara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya Pelayanan Sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		63.611.460,00	DINAS SOSIAL	
73	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PSKS kelembagaan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Persentase PSKS Perseorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial				100 persen 100 persen	2.866.814.600,00					-		3.893.773.770,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase Penurunan Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar, Lansia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.				100%	2.568.398.100,00							3.588.773.770,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang														
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	61.900.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				655 Orang	1.674.983.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.664.660.020,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	45.525.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					46.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	190.720.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					195.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				144 Orang	187.269.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					188.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				216 Orang	204.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		226.113.750,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0011															
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				504 Orang	204.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		204.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						298.416.500,00							5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang														
							Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				400 Orang	83.490.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					85.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	64.976.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					65.000.000,00	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	41.190.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	108.760.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					110.000.000,00	DINAS SOSIAL
74	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penanganan perlindungan sosial bagi Anak Terlantar ersentase Penurunan PPKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial Persentase data Kemiskinan yang tervalidasi Ket : BPJS/PBI Tervalidasi Persentase integrasi data kemiskinan dengan program intervensi pengentasan kemiskinan	-			100% 55,61% 33,3% 63,38%	1.651.540.848,00					-		616.395.836,00	
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						212.848.948,00							144.200.076,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	71.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					56.320.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar														
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	66.999.348,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		48.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														
							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				90 Orang	74.849.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		39.480.076,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						1.438.691.900,00							472.195.760,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				6000 Orang	467.083.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					445.248.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	328.792.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		26.947.360,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				29700 Orang	642.816.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						DINAS SOSIAL
75	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	-			100%	1.086.491.500,00					-		1.132.778.690,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
														Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi>100) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Lingkup Perangkat Daerah Nilai SAKIP aspek evaluasi internal di lingkup perangkat daerah Nilai SAKIP aspek pelaporan kinerja di lingkup perangkat daerah Nilai Sakip Aspek pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah di lingkup perangkat daerah Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja	-			1 inovasi 89,50 Poin 23,20 poin 12,80 poin 25,70 poin 27,80 poin	10.593.166,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	-	16.000.000,00						
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	16.000.000,00		DINAS TENAGA KERJA
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	10.593.166,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		16.000.000,00						
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepatuhan Pengelolaan Anggaran Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itdda di Lingkup Perangkat Daerah Transparansi pengelolaan keuangan daerah	-			100 % 100 % 100 % 100 %	8.264.961.732,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	-	9.545.000.000,00						
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	9.500.000.000,00		DINAS TENAGA KERJA
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	8.185.401.732,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		9.500.000.000,00						
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	45.000.000,00		DINAS TENAGA KERJA
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	79.560.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		45.000.000,00						
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	-			100 % 3.88 Nilai 3.85 Nilai 3.87 Nilai 3.96 Nilai	2.722.903.539,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	-	778.000.000,00						
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	162.697.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		337.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.468.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		24.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	74.655.397,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.467.082.242,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		375.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	-			100 % 3.88 Nilai 3.85 Nilai 3.87 Nilai 3.96 Nilai	648.539.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	-	860.000.000,00					
	2	07	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	397.179.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		700.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				19 Unit	80.757.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	170.602.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
																Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	-			100 % 3.88 Nilai 3.85 Nilai 3.87 Nilai 3.96 Nilai	759.014.422,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	-	970.000.000,00				
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								1 Laporan	159.763.390,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								1 Laporan	599.251.032,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	-			100 % 3.88 Nilai 3.85 Nilai 3.87 Nilai 3.96 Nilai	1.630.105.930,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	-	5.530.000.000,00				
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								5 Unit	179.221.577,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								199 Unit	149.929.989,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								2 Unit	1.300.954.364,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	-	5.200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi	-			100 Persentase	5.653.314.600,00							-		11.555.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Uji Kompetensi	-			100 %	5.563.314.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	11.485.000.000,00					
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				452 Orang	2.727.934.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		7.622.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi																		
							Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				330 Orang	2.235.380.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		2.062.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	03	2.01	0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas																		
							Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas				1 Lembaga	600.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		1.800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-			100 %	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	35.000.000,00					
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				32 Lembaga	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-			100 %	40.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	35.000.000,00					
	2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				41 Perusahaan	40.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	-			94,80 %	3.206.355.724,00						-	3.849.240.088,00	
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yg berhasil ditempatkan dan berwirausaha	-			2650 orang	3.078.689.700,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Kota Bogor	-	3.608.345.908,00	
	2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														
							Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				100 Orang	52.186.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat Kota Bogor		92.110.176,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja														
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				100 Orang	46.072.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		56.895.840,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				2600 Orang	2.386.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		45.516.672,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				30 Orang	14.566.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		23.212.800,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				1888 Orang	2.963.479.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		3.390.610.420,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan Kerja yang Diinformasikan Dipasar Kerja	-			1800 Lowongan	76.878.024,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	165.894.180,00					
	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
							Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	39.570.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				3500 Orang	2.069.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		57.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA				
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				250 Orang	35.237.624,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		48.294.180,00	DINAS TENAGA KERJA			
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi CPMI/PMI	-			100 %	50.788.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	75.000.000,00				
	2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
							Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				136 Orang	50.788.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA			
4	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase rekomendasi LKS Tripartit yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan Penetapan besaran UMK Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi	-			100 % 5.130.000 100%	1.876.426.800,00						-	2.224.846.800,00				
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	-			73.94 %	204.150.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	152.846.800,00				
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				30 Perusahaan	154.150.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA			
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				2 Perusahaan	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		22.846.800,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang Terfasilitasi	-			100 %	1.672.276.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	2.072.000.000,00		
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan				15 Perkara	75.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		72.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja															
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				7923 Orang	1.597.276.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		2.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
												14.916.847.318,00							16.308.584.253,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.916.847.318,00							16.308.584.253,00		
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						14.916.847.318,00							16.308.584.253,00		
1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangkan Nilai Sakip Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 Persen 1 inovasi/tahun 89,87 Nilai 97 Nilai	11.051.522.294,00						-	12.063.558.703,00		
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan penyusunan dokumen, perencanaan, penganggaran, Evaluasi Kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	-			100 Persen	5.522.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A	-	25.665.200,00		
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.522.250,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		25.665.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	-			100 Persen	7.953.933.802,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A	-	8.064.057.479,00				
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	7.888.170.802,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		7.997.716.679,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	65.763.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		66.340.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 Persen	1.180.065.196,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A	-	1.841.998.186,00				
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.011.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		25.012.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	156.611.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		451.251.680,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	65.884.596,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		72.474.926,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	590.825.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		906.095.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.947.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		32.252.880,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	319.785.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		354.911.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 Persen	446.302.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A	-	528.237.710,00					
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	446.302.300,00	Kota Bogor, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		528.237.710,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persen	854.585.908,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A	-	950.919.190,00					
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	158.068.196,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		157.376.758,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	696.517.712,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		793.542.432,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah lingkup perangkat daerah ber kondisi baik	-			100 Persen	611.112.838,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A	-	652.680.938,00					
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	296.619.354,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		326.373.359,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit	69.743.484,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		82.144.979,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	244.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan DP3A		244.162.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender	-			100 Persentase	828.517.628,00						-	1.016.816.955,00					
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	-			55 Sub Kegiatan	145.299.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	35 Lembaga	-	177.408.000,00					
	2	08	02	2.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																	177.408.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							Jumlah OPDKab/kota yang mendapatkan pendampingan				35 Lembaga	145.299.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	35 Lembaga		177.408.000,00					
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Bimtek dan Pelatihan bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi Jumlah Perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	-			200 orang 50 Orang	350.606.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat	-	406.822.000,00					
	2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota																	81.822.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				50 orang	68.708.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat		81.822.000,00					
	2	08	02	2.02	0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota																	325.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
							jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				200 Orang	281.897.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat		325.000.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pendampingan	-			470 orang	332.611.628,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Lembaga	-	432.586.955,00	
	2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				1 Lembaga	332.611.628,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Lembaga		432.586.955,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100000 penduduk perempuan)	-			11,48 Persen	118.082.600,00						-	625.454.682,00	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			Persen	0,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	75.350.000,00	
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				2 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		75.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terlayani	-			2.0 Persen	105.208.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perempuan di Kota Bogor	-	386.471.482,00	
	2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				62 orang	105.208.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perempuan di Kota Bogor		386.471.482,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan Perlindungan perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	-			76.00 Persen	12.874.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perempuan di Kota Bogor	-	163.633.200,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	08	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				120 orang	12.874.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perempuan di Kota Bogor		163.633.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase layanan konseling /konsultasi yang terlayani PUSPAGA	-			100 Persen	623.974.122,00						-	735.035.139,00	
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100 Persen	623.974.122,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Keluarga di Kota Bogor	-	735.035.139,00	
	2	08	04	2.03	0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota														
							Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota				150 Orang	623.974.122,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Keluarga di Kota Bogor		735.035.139,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak	-			100 Persen	111.691.000,00						-	292.820.000,00	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	-			100 Persen	111.691.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	292.820.000,00	
	2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	111.691.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		292.820.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor pada Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) KLA Skor pada Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) KLA Skor pada Klaster2 (Perlindungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) KLA Skor pada klaster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) KLA	-			102 Nilai 104 Nilai 135 Nilai 142 Nilai	1.985.207.574,00						-	1.228.686.050,00		
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota	-			100 Persen	1.985.207.574,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Seluruh Anak di Kota Bogor	-	1.228.686.050,00		
	2	08	06	2.02	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				13 Dokumen	725.720.000,00		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Seluruh Anak di Kota Bogor		786.568.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota															
							Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				38 Lembaga	93.866.974,00		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Seluruh Anak di Kota Bogor		98.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota															
							jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan				36 Lembaga	1.165.620.600,00		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Seluruh Anak di Kota Bogor		343.317.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Skor pada Klaster V (Perlindungan Khusus Anak)	-			102 Skor	197.852.100,00						-	346.212.724,00		
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kta tingkat Kab/Kota	-			25 Persen	67.252.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Seluruh Anak di Kota Bogor	-	75.721.242,00		
	2	08	07	2.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kta kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				1 Kegiatan	67.252.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Seluruh Anak di Kota Bogor		75.721.242,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang terlayani	-			100 Persen	130.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Seluruh Anak di Kota Bogor	-	270.491.482,00							
	2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				60 Orang	130.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Ciwaringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Seluruh Anak di Kota Bogor		270.491.482,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
						DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN																	28.911.920.279,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	22.021.420.279,00			
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	22.021.420.279,00			
1	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Hasil Survey Kepuasan Jumlah Inovasi Yang Dibangun/Dikembangkan	-			A Nilai 100% 89,23 Nilai 1 Inovasi/tahun	20.357.280.696,00						-	20.891.420.279,00							
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	-			100 %	4.559.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor	-	5.100.000,00							
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.519.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor									
	2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	3.039.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor		3.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN Persentase penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai peraturan	-			100 % 100 %	14.007.638.429,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN DKPP Kota Bogor	-	14.013.320.279,00				
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	13.933.320.279,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN DKPP Kota Bogor		13.933.320.279,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	74.318.150,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN DKPP Kota Bogor		80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	384.351.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor	-	393.000.000,00				
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	23.110.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.162.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor		26.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	22.836.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor		23.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.090.100,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor		26.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	11.902.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor		12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	275.249.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor		280.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMMD	-			100 %	580.475.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor	-	585.000.000,00		
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				46 Unit	580.475.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor		585.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	1.633.726.883,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Non ASN DKPP Kota Bogor	-	2.235.000.000,00				
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	378.673.635,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Non ASN DKPP Kota Bogor		385.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.255.053.248,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Non ASN DKPP Kota Bogor		1.850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	-			100 %	3.746.529.784,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor	-	3.660.000.000,00				
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				57 Unit	329.697.484,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor		330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				91 Unit	68.090.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor		70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	3.348.742.300,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	DKPP Kota Bogor		3.260.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Ketersediaan protein Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	-			2400 kkal/kap/perhari 63 gram/kap/perhari 85,7 poin	577.962.600,00						-	745.000.000,00				
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	-			256.111.486 kg	47.629.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	60.000.000,00				
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																	
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	9.159.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																	
							Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	3.469.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																	
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	35.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	-			13,70 %	299.999.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	400.000.000,00				
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				17,695 Ton	299.999.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi Energi Konsumsi Protein	-			2150 kkal/kap/hari 57 gram/kap/hari	230.333.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	285.000.000,00				
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																	
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	30.333.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
3	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourished (PoU)	-			4,68 %	302.080.000,00					-	325.000.000,00						
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-			1 peta	21.750.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	25.000.000,00					
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	21.750.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah wilayah rawan pangan yang di intervensi	-			50 %	280.330.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	300.000.000,00					
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	230.330.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
4	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	-			96%	49.999.900,00					-	60.000.000,00						
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	-			11 produk	49.999.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	60.000.000,00					
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	49.999.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.849.489.864,00							6.890.500.000,00					
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.120.869.756,00							1.267.500.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi ikan konsumsi	-			1 %	820.369.800,00						-	812.500.000,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan dan penguatan kelembagaan kelompok	-			30 %	200.890.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat Kota Bogor	-	182.500.000,00	
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	200.890.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat Kota Bogor		182.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-			-	619.479.800,00			-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-	-	630.000.000,00	
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				13 Unit	593.900.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-		600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	25.579.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Hasil Perikanan	-			4%	300.499.956,00						-	455.000.000,00	
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Presentase Usaha Pengolahan Ikan (UPI) yang menerapkan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) dan Good Manufacturing Practices (GMP)	-			4 %	300.499.956,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	455.000.000,00	
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				2 Unit Usaha	300.499.956,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		455.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						4.728.620.108,00							5.623.000.000,00	
7	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase pemenuhan sarana tanaman pangan dan hortikultura (26 item) persentase pemenuhan sarana peternakan (3 item)	-			61,8% 51,8%	2.803.206.000,00						-	2.890.000.000,00	
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase kelompok yang menggunakan sarana pertanian dengan baik	-			61 %	843.206.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	920.000.000,00	
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	343.206.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		410.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		510.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang dikelola Jumlah jenis Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang dikelola	-			3 jenis 12 jenis	1.959.999.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor	-	1.970.000.000,00	
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	576.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		580.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
							Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1.383.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Kota Bogor		1.390.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
8	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pengelolaan kawasan LP2B (%) Persentase peningkatan jumlah pemotongan hewan yang dilayani RPH (%) Persentase peningkatan retribusi RPH (%)	-			61,02% 20,04% 20,04%	1.395.537.908,00						-	1.415.000.000,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	0,00			-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-	-	15.000.000,00	
	3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
							Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	1.395.537.908,00			-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-	-	1.400.000.000,00	
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1.395.537.908,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-		1.400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
9	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%) Persentase produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan (%)	-			54,55% 83%	529.876.200,00					-		1.215.000.000,00	
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	319.876.200,00			-	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-	-	1.000.000.000,00	
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	319.876.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	210.000.000,00			-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-	-	215.000.000,00	
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	210.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-		215.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
10	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%) Persentase peningkatan jumlah kelompok urban farming (%)	-			75,94% 9,54%	0,00					-		103.000.000,00	
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	0,00			-	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-	-	103.000.000,00	
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-		8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				3 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-		95.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP						140.145.546.493,00							131.668.000.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.226.606.538,00							9.275.000.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						9.226.606.538,00							9.275.000.000,00	
1	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase terpenuhinya jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah	-			66,67 %	9.226.606.538,00					-		9.275.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	-			98,62 %	9.226.606.538,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	9.275.000.000,00	
	1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				550,05 Ton/hari	1.375.314.907,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		1.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
							Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				15 Unit	200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
							Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				9 Unit	7.651.291.631,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		7.250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1	03	04	2.01	0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R														
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				547.18 Ton/hari	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		325.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						130.918.939.955,00							122.393.000.000,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						130.918.939.955,00							122.393.000.000,00	
2	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan Nilai Hasil Survey Kepuasan Nilai Sakip Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	-			1 Inovasi/tahun 3.62 Nilai 89.58 Nilai 95 %	108.982.581.239,00						-	107.300.000.000,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	119.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	135.000.000,00	
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	119.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
																Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			1 Laporan 238 Orang/Bulan	31.885.400.373,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	33.865.000.000,00				
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				238 Orang/bulan	31.775.480.373,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		33.750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				1 Laporan	109.920.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	1.315.845.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	1.875.000.000,00				
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	448.539.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		1.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	89.980.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	360.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		365.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	113.182.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	304.144.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor						
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			5 Unit	673.883.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	275.000.000,00				
	2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																275.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					5 Unit	673.883.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		275.000.000,00				
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-			12 Laporan 12 Laporan	47.812.487.030,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	44.515.000.000,00				
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																365.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	399.261.854,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		365.000.000,00				
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																44.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	47.413.225.176,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		44.150.000.000,00				
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-			141 Unit 10 Unit	27.175.965.036,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	26.635.000.000,00				
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																26.250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					141 Unit	26.818.929.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		26.250.000.000,00				
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	207.035.336,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
3	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah	-			100 %	420.000.000,00						-	430.000.000,00				
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	-			1 Dokumen	420.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat Kota Bogor	-	430.000.000,00				
	2	11	02	2.01	0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota																	
							Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali				1 Dokumen	420.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	Masyarakat Kota Bogor		430.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
4	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	-			0.02 % 70.09 % 76.67 %	1.439.999.616,00						-	1.390.000.000,00				
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor Jumlah Titik Pengujian Kualitas Air, Sungai dan Situ Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	-			2 Dokumen 10 Lokasi 39 titik 10 titik	1.189.999.900,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	1.280.000.000,00				
	2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																	
							Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	149.999.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
							Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				0 Lokasi	900.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	-	-	Masyarakat Kota Bogor		950.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun			1 Dokumen	140.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	-		1 Kegiatan	249.999.716,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	110.000.000,00	
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	-		1 Kegiatan	249.999.716,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	-		44 %	168.988.000,00						-	168.000.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan Persentase Jumlah Rincian Teknis B3 yang dikeluarkan	-		23 Laporan 82 %	168.988.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	168.000.000,00	
	2	11	05	2.01	0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	-		0 Usaha	168.988.000,00	-	PAJAK AIR TANAH	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		168.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		58.45 %	303.000.000,00						-	350.000.000,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	-		8 Dokumen	303.000.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	350.000.000,00	
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				8 Dokumen	103.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		165.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				40 Badan Usaha	200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		185.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
7	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	-			17.30 %	800.000.000,00						-	1.595.000.000,00				
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan Hidup Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	-			60 Lembaga 30 Lembaga/Komunitas 300 Orang 0 Pelaku Kegiatan Usah	800.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	1.595.000.000,00				
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				300 Orang	300.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		825.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																	
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				30 Lembaga	500.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		770.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
8	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan Persentase Sekolah Adiwiyata	-			19.02 % 35.70 %	550.000.000,00						-	525.000.000,00				
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-			5 Entitas	550.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	525.000.000,00				
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				5 Entitas	550.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		525.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	-			100 %	50.000.000,00						-	35.000.000,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	-			7 Pengaduan	50.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	35.000.000,00	
	2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				7 Pengaduan	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkelola di TPS-3R dan Bank Sampah	-			67.13 %	18.204.371.100,00						-	10.600.000.000,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	-			5015,1 Ton 9 Unit 128 Unit	18.204.371.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	10.600.000.000,00	
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				9 Unit	14.402.788.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		6.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah														
							Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				128 Unit	2.849.114.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah														
							Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				5015.1 Ton	952.468.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		1.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						18.430.103.745,00						32.866.089.108,00		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						18.430.103.745,00						32.866.089.108,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					18.430.103.745,00							32.866.089.108,00		
1	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (Tingkat Kematangan Inovasi > 70) Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			100 % 1 Inovasi/tahun 90.55 Nilai 95.16 Nilai	14.967.454.503,00						-	27.172.140.508,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah Persentase realisasi fisik kegiatan di Lingkup Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai peraturan	-			A Nilai 97.50 % 100 % 100 %	115.626.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	117.955.700,00	
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	4.069.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		4.139.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	111.557.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		113.816.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	-			100 %	10.770.646.309,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	13.058.892.800,00	
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	10.714.371.009,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		13.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	56.275.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		58.892.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	82.750.000,00				
	2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				250 Orang	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		82.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat daerah	-			100 %	719.033.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	1.405.537.500,00				
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.388.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		370.537.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	19.999.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	67.163.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	193.858.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		360.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	420.622.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		590.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMDB	-			100 %	1.292.769.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	8.365.703.980,00	
	2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		620.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	911.627.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		1.503.834.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				271 Unit	381.142.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		6.241.869.980,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	1.522.604.848,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	2.387.110.528,00				
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	261.786.520,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		420.253.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.260.818.328,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		1.966.857.128,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah lingkup perangkat daerah ber kondisi baik	-			100 %	546.774.046,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	1.754.190.000,00				
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	177.402.925,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				205 Unit	133.330.121,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		904.190.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	236.041.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	-			20 % 80.10 %	2.687.355.200,00						-	3.912.174.000,00				
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan SOP.	-			100 %	259.008.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	559.964.000,00				
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				2 Dokumen	90.708.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		326.470.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	168.300.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		233.494.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
																Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan pelayanan administrasi kependudukan	-			100 %	2.428.346.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	3.352.210.000,00				
	2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				1 Laporan	2.309.366.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		3.352.210.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				2 Laporan	118.980.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang Melaporkan	-			97 % 63 % 63,10 persen 65,50 %	174.341.600,00						-	339.000.000,00				
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan sesuai dengan SOP.	-			100 %	88.741.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	162.000.000,00				
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				565 Dokumen	50.056.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		137.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	38.685.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-			100 %	85.600.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	177.000.000,00					
	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil																		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				1 Laporan	15.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		42.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	50.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
4	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	-			50 %	600.952.442,00						-	1.442.774.600,00					
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data administrasi kependudukan yang disediakan, disajikan diolah dan dimutakhirkan secara berkala dalam sistem informasi administrasi Kependudukan	-			4 Laporan Data	533.402.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	1.372.774.600,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	-			100 Persentase	7.104.805.841,00			-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00				
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	7.092.805.841,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	12.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 Persentase	926.804.601,00			-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00				
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	59.633.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	47.966.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	66.202.801,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	441.690.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	50.532.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	260.780.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 Persentase	155.728.700,00			-	-	-	-	0,00				
	2	14	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	2	14	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10.134.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	2	14	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	145.594.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 Persentase	422.476.276,00			-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00						
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	76.662.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	345.813.776,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkategori baik	-			100 Persentase	571.049.988,00			-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00						
	2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	39.676.805,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	240.224.183,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	30.070.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	261.079.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	-			58,85 Nilai	821.417.150,00					-		900.000.000,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
																Nasional	Daerah						
1	2	14	02	2.01		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-			5 Dokumen	251.701.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	0,00				
	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																	
							Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	02	2.01	0030	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																	
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				5 Organisasi Laporan	20.150.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	02	2.01	0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	49.760.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	02	2.01	0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah																	
							Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah				20 Perangkat Daerah	181.791.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemetaan pengendalian kependudukan	-			3 Dokumen	569.715.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor	-	900.000.000,00				
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																	
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	53.660.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga															
							Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga				1 Dokumen	168.375.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain															
							Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				36 Unit	306.908.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	02	2.02	0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)															
							Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	40.772.250,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Bogor		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
3	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB Metode Kontasepsi jangka Panjang (MKJP) pada Pasangan Usia Subur (PUS)	-			20,07 Persentase	1.525.043.048,00						-	760.000.000,00		
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Orang yang terpapar Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	-			505 Orang	86.063.389,00			-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00		
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK															
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana															
							Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				5 Unit	12.571.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana															
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	26.489.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	29.602.589,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal															
							Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				3 Dokumen	17.400.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja															
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				2 Organisasi	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah kelurahan yang mempunyai IMP mandiri	-			68 Organisasi	47.504.900,00			-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00		
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB															
							Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				68 Organisasi	47.504.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	-			80 Persentase	593.899.600,00			-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	760.000.000,00		
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya															
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	58.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2267 Orang	348.901.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB															
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				0 Dokumen	36.868.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				150 Orang	53.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	96.130.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah kampung KB aktif	-			68 Kampung KB	797.575.159,00			-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00	
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas														
							Jumlah DASHAT di Kampung KB				9 Unit	362.906.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				68 Kampung	349.113.659,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	85.555.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL PIK-R dan UPPKA yang aktif	-			70 Persentase	1.757.080.977,00						-	0,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok kegiatan (poktan) aktif	-			630 Poktan	1.353.297.012,00			-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00	
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				50 Orang	763.587.212,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
							Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				396 Kelompok	489.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)														
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				5 Kelompok	100.109.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-			30 Kelompok	403.783.965,00			-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	0,00	
	2	14	04	2.02	0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi	Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga				1 Laporan	403.783.965,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						DINAS PERHUBUNGAN						166.888.843.508,00							57.130.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						166.888.843.508,00							57.130.000.000,00	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						166.888.843.508,00							57.130.000.000,00	
1	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah inovasi yang dibangun/ dikembangkan1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-			100 Persen 1 Inovasi/tahun 87,50 Nilai 92,86 Nilai	88.920.878.992,00						-	43.185.000.000,00	
						[Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan]	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangk an Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Survey Kepuasan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	1 100 87.39 90.80	0 100 85.50 90.86	0 100 86.50 91.86	1 100 83.39 86.80	88.920.878.992,00							43.185.000.000,00	
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja Dinas Perhubungan Persentase Realisasi Anggaran kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase Realisasi Fisik kegiatan di lingkup Dinas Perhubungan				85 Persen 90 Persen 100 Persen 90 Persen	36.984.000,00				Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	20.194.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	16.790.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu				100 Persen 100 Persen	35.628.894.345,00				Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		43.035.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				216 Orang/bulan	35.507.089.945,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		42.900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				31 Laporan	121.804.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai perangkat daerah				95 Persen	698.922.300,00				Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	698.922.300,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah				100 Persen	848.876.441,00				PenguatanPendidikan, Kebudayaan,Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	24.608.098,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	97.500.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	31.778.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	272.860.955,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	41.886.888,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	280.241.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD				100 Persen	1.615.523.600,00				Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.499.309.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	116.214.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	46.405.849.447,00				Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	37.003.094.967,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	9.402.754.480,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik				100 Persen	3.685.828.859,00				Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	3.232.001.580,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				138 Unit	274.293.279,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	179.534.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penanganan titik lokasi rawan kemacetan Persentase tingkat keselamatan jalan Persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik Persentase angkutan umum yang laik jalan dan beroperasi	-			45 Persen 45 Persen 89 Persen 94,50 Persen	77.967.964.516,00						-	13.945.000.000,00				
						-																	
	2	15	02		2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-			100 Persen	185.555.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kota Bogor	-	0,00				
	2	15	02		2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																
							Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	185.555.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kota Bogor			Dinas Perhubungan Kota Bogor			
	2	15	02		2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang ber kondisi baik	-			93 Persen	17.439.678.557,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat	-	13.860.000.000,00	Masyarakat			
	2	15	02		2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																
							Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				9 Unit	274.156.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	02		2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				6078 Unit	12.879.719.957,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat		12.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan															
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				124 Unit	1.400.907.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana			210.000.000,00		
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan															
							Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				124 Unit	1.400.907.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat			DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C dan pangkalan yang dikelola	-			2 Lokasi	6.570.565.810,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat	-	0,00		
	2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)															
							Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)				1 Unit	6.531.585.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	38.980.610,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat			DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase ketersediaan lokasi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir	-			87 Persen	99.724.176,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	99.724.176,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji	-			92,50 Persen	633.437.044,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji	-	0,00	
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				2 Unit	154.340.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5000 Dokumen	129.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji		0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				15 Unit	293.364.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji		0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	56.233.044,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Pemilik Kendaraan Wajib Uji		0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					-			94 Persen	2.212.316.181,00			Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat	-	85.000.000,00		
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	77.959.482,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	02	2.06	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan																	
							Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan				180 Unit	15.739.245,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)																	
							Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)				3 Unit	155.159.130,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				24 Laporan	9.990.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																	
							Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				18 Dokumen	1.680.493.424,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN			
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				7 Laporan	272.974.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat		0,00	DINAS PERHUBUNGAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	-			100 Persen	95.900.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kota Bogor	-	0,00					
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
							Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				30 Laporan	31.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kota Bogor		0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
							Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				132 Laporan	64.900.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kota Bogor			DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum yang dibutuhkan	-			2821 Unit	50.429.486.348,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Pengguna Layanan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN				
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				6 Laporan	103.284.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Pengguna Layanan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	15	02		2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
							Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1305 Unit	50.326.202.348,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Masyarakat Pengguna Layanan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02		2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek Utama dan Feeder di Kota	-		29 Trayek	200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kota Bogor	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02		2.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota													
							Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	200.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kota Bogor	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02		2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang disusun	-		0 Persen	101.301.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kota Bogor	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02		2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	101.301.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	Dinas Perhubungan Kota Bogor	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					44.260.368.750,00							65.743.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						44.260.368.750,00							65.743.000.000,00				
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						43.486.376.550,00							59.126.000.000,00				
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi yang Dibangun/Dikembangkan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Sakip Perangkat Daerah	-			100 % 1 Inovasi/tahun 87,50 Nilai 90 Nilai	16.946.435.666,00						-	23.490.000.000,00				
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			13 Dokumen	5.435.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor	-	65.000.000,00				
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	5.435.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor		65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	12.894.946.752,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor	-	16.910.000.000,00				
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	12.828.570.552,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor		16.830.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				78 Laporan	66.376.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	883.463.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor	-	1.425.000.000,00					
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.110.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor		25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	329.802.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	14.449.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	533.102.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor		1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			2 Dokumen	182.488.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor	-	1.800.000.000,00		
	2	16	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				44 Unit	182.488.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor		1.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Dokumen	2.629.559.736,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor	-	2.710.000.000,00		
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor		10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.620.559.736,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor		2.700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Dokumen	350.541.878,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor	-	580.000.000,00	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	247.962.852,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor		485.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				144 Unit	102.579.026,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	ASN Diskominfo Kota Bogor		95.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Persentase terselenggaranya Penyebarluasan Informasi	-			70,05 Persentase 90 Persentase	4.231.621.590,00						-	5.602.000.000,00	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kemitraan Media Cetak, Online, Radio dan TV Persentase komunitas masyarakat/ mitra strategis pemerintah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota Persentase PD yang aktif menyebarluaskan informasi melalui media internal, media sosial dan website Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh PD Persentase PPID PD yang aktif	-			940 Tayang 94 % 89 % 65 % 90 %	4.231.621.590,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor	-	5.602.000.000,00	
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik														
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				35 Permohonan	95.295.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		169.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	292.505.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		490.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																			
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				51 Media	3.220.587.990,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		3.983.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																			
							Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				1 Dokumen	440.808.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		560.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten																			
							Jumlah Konten Informasi Publik				4 Konten	182.425.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada penilaian SPBE Nilai aspek Penerapan Manajemen SPBE Nilai aspek Perencanaan Strategis SPBE Nilai aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	-			3,77 Indeks 3,90 Indeks 4,02 Indeks 4,12 Indeks	22.308.319.294,00						-	30.034.000.000,00						
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Domain	-			100 %	1.039.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah Kota Bogor	-	15.000.000,00						
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1.039.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah Kota Bogor		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Evaluasi Kota Cerdas Penyelenggaraan Evaluasi SPBE Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan Layanan Pusat	-			3,57 Indeks 2 Dokumen 5 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Level 3 Level 3 Level	22.307.279.794,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor	-	30.019.000.000,00		
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional															
							Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				5 Aplikasi	983.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE															
							Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	983.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		160.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
																Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				35 Perangkat Daerah	4.140.965.840,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		7.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																	
							Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				3 Layanan	48.622.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																	
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				1 Dokumen	983.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																	
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				2 Aplikasi	361.514.850,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		1.144.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																	
							Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	14.995.843.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		9.957.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	24.500.650,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		114.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0036	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE																84.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				1 Laporan	65.013.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		84.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet																9.165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				35 Perangkat Daerah	2.563.007.604,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		9.165.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																815.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				1 Dokumen	983.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		815.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				2 Dokumen	99.868.650,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
	2	16	03	2.02	0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				1 Dokumen	4.008.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						279.955.000,00							1.276.000.000,00	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	-			2,75 Indeks	279.955.000,00						-	1.276.000.000,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Domain Kelembagaan Domain Kualitas Data Domain Prinsip Satu Data Indonesia Domain Proses Bisnis Statistik Domain Statistik Nasional	-			2,91 Indeks 2,66 indeks 2,75 Indeks 3,00 Indeks 2,34 Indeks	279.955.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah Kota Bogor	-	1.276.000.000,00	
	2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional														
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik				5 %	27.883.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah Kota Bogor		55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				20 %	66.051.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah Kota Bogor		85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.				60 %	58.575.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah Kota Bogor		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				100 Orang	57.650.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah Kota Bogor		736.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
							Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah				1 Laporan	69.794.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah Kota Bogor		200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						494.037.200,00							5.341.000.000,00	
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan keamanan informasi	-			85,71 %	494.037.200,00						-	5.341.000.000,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengamanan Informasi	-			30 Perangkat Daerah	494.037.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah Kota Bogor	-	5.341.000.000,00	
	2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	354.037.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah Kota Bogor		4.001.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				35 Perangkat Daerah	88.692.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah Kota Bogor		1.240.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen	51.308.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah Kota Bogor		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN						28.397.146.307,00						25.769.244.772,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.235.164.800,00						5.356.420.000,00		
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						8.235.164.800,00						5.356.420.000,00		
1	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	-			12.26 Persen	0,00					-		500.000.000,00	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi	-			2.11 Persen	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Koperasi	-	500.000.000,00	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				10 Unit Usaha	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Koperasi		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	-			17.16 Persen	0,00					-		450.000.000,00	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Dinilai Sehatannya	-			1.56 Persen	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Badan Usaha Koperasi	-	450.000.000,00	
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Badan Usaha Koperasi		450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan SDM Koperasi yang berkualitas yang mampu mengaplikasikan hasil pelatihan di koperasi asal	-			53.33 Persen	256.812.000,00					-	600.000.000,00		
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurus dan pengawas koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	-			7.80 Persen	256.812.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Badan Usaha Koperasi	-	600.000.000,00	
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				160 Orang	256.812.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Badan Usaha Koperasi		600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	-			9.36 Persen	550.724.000,00					-	1.650.000.000,00		
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi koperasi yang di berdayakan dan di lindungi	-			1.06 Persen	550.724.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Badan Usaha Koperasi	-	1.650.000.000,00	
	2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi														
							Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan				34 Kelompok Masyarakat	81.776.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Badan Usaha Koperasi		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				5 Unit Usaha	468.948.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Badan Usaha Koperasi		1.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
5	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapat pembinaan sesuai kelompok usaha Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi kemitraan dan penguatan kelembagaan	-			16.00 Persen 4.40 Persen	6.640.190.800,00						-	1.656.420.000,00		
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang mendapat kesempatan bermitra dengan pengusaha besar Jumlah usaha mikro yang mendapat pemberdayaan	-			200 Usaha Mikro 725 Usaha Mikro	6.640.190.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	1.656.420.000,00		
	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro															
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				200 Unit Usaha	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro															
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				200 Unit Usaha	314.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		256.420.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro															
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				175 Orang	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				3727 Unit Usaha	164.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				150 Orang	6.161.790.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
6	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan Jumlah wirausaha baru (UMKM start up) Persentase produk UMKM Binaan yang meningkat omzet penjualannya Persentase pelaku UMKM yang memasarkan produknya secara digital	-			2.00 Persen 4.40 Persen 7.00 Persen	787.438.000,00						-	500.000.000,00	
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah wirausaha pemuda yang terverifikasi di Aplikasi SOLUSI	-			350 Wirausaha	787.438.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	500.000.000,00	
	2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
							Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				605 Unit Usaha	787.438.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						20.161.981.507,00							20.412.824.772,00	
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						1.117.419.940,00							2.628.190.530,00	
7	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin	-			50 persen	36.260.000,00						-	50.000.000,00	
	3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	36.260.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Perdagangan	-	50.000.000,00	
	3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1 Laporan	36.260.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Perdagangan		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
8	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pemenuhan Sarana Distribusi Perdagangan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)	-			14.28 Persen	0,00						-	544.880.000,00				
	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Presentase Pelaku Usaha Sektor Perdagangan Yang Memahami Regulasi Yang Berlaku	-			4 Persen	0,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-	544.880.000,00				
	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				5 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		544.880.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
9	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	-			<9.00 Persen	88.580.440,00						-	125.000.000,00				
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Operasi Pasar yang terlaporkan Persentase Pelaksanaan Pemantauan yang terlaporkan	-			100 Persen 100 Persen	88.580.440,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat	-	125.000.000,00				
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	88.580.440,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat		125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
10	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai realisasi ekspor	-			154735167,19 USD	307.788.400,00						-	616.725.530,00				
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Kecil Menengah yang melakukan Ekspor	-			12.90 Persen	307.788.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	616.725.530,00				
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	193.598.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		152.687.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				2 Pelaku Usaha	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		168.290.430,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				135 Pelaku Usaha	114.190.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		295.747.400,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
11	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase sarana perdagangan yang dilakukan standarisasi ukuran (tera dan tera ulang)	-			68.14 Persen	66.554.000,00					-	313.710.000,00					
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Jumlah UTTP yang sudah bertanda Tera/Tera Ulang	-			52.83 Persen	66.554.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pengguna Alat UTTP	-	313.710.000,00				
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																	
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				10682 Unit	66.554.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pengguna Alat UTTP		68.760.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																	
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				250 Orang	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pengguna Alat UTTP		244.950.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
12	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase UMKM yang difasilitasi pemasarannya dari data UMKM yang terverifikasi dalam aplikasi SOLUSI	-			19.50 Persen	618.237.100,00					-	977.875.000,00					
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM Kota Bogor yang produknnya terfasilitasi promosi (Pameran, kemitraan) Persentase UMKM yang produknnya terdaftar dalam E-Commerce/TPMSE	-			4.86 Persen 12.60 Persen	618.237.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	977.875.000,00				
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				220 UMKM	577.437.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		825.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
	3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				570 UMKM	40.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		152.875.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						19.044.561.567,00						17.784.634.242,00					
13	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Hasil Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			83,30 Nilai 100 Persen 89,25 Nilai 1 Inovasi/tahun	18.413.006.267,00					-	16.864.634.242,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	13.018.117.059,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Aparatur Sipil Negara	-	13.301.545.106,00	
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	12.953.917.059,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Aparatur Sipil Negara		13.254.385.106,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	64.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara		47.160.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.340.461.870,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara	-	1.371.376.818,00	
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.816.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara		24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	148.211.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara		96.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	78.929.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara		53.930.100,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	132.840.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara		31.320.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	154.351.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara		118.310.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	46.950.018,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara		47.816.418,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.753.363.452,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Aparatur Sipil Negara		1.000.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	103.997.100,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	150.000.000,00		
	3	31	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	103.997.100,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.194.692.436,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara	-	1.295.408.316,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	370.290.764,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara		370.290.764,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	824.401.672,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara		925.117.552,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	755.737.802,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara	-	746.304.002,00	
	3	31	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							0				41 0	422.126.302,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara		422.126.302,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				174 Unit	143.024.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara		153.457.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	190.587.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Sipil Negara		170.720.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
14	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah yang produktif	-			24.70 Persen	559.381.300,00					-		780.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Industri yang memiliki sertifikasi kompetensi	-			0.17 Persen	559.381.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	780.000.000,00	
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				2 Dokumen	173.260.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				4 Dokumen	284.478.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				7 Dokumen	101.643.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
15	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	-			13.6%	20.000.000,00						-	40.000.000,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Industri	-	40.000.000,00	
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
							-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				30 Dokumen	10.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Industri		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				15 Dokumen	10.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Industri		20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Industri Kecil Menengah yang teregistrasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-			27.20 Persen	52.174.000,00						-	100.000.000,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang teregistrasi dalam SIINas	-			233 IKM	52.174.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	100.000.000,00	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	52.174.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.122.709.989,00							18.975.035.162,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						17.122.709.989,00							18.975.035.162,00	
139	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
						[Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah sesuai target]	Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembang an	1.00	0	1.00	1inovasi/tahun	13.695.895.452,00							15.825.035.162,00	
							Nilai Hasil Survey Kepuasan	100.00	100.00	100.00	100.00									
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah	92.25	86.25	88.25	88.25									
							Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95.5	89.5	91.5	91.5									
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu				100 Persen	43.427.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Karyawan DPMTSP dan OPD terkait		36.959.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	43.427.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Karyawan DPMTSP dan OPD terkait		36.959.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN				100 Persen	10.885.531.481,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	ASN DPMTSP Kota Bogor		12.511.132.609,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	10.835.049.481,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	ASN DPMTSP Kota Bogor		12.460.345.409,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	50.482.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	ASN DPMPPTSP Kota Bogor		50.787.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 Persen	472.936.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Karyawan/ti DPMPPTSP	-	392.394.410,00					
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	68.671.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Karyawan/ti DPMPPTSP		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	78.370.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		Karyawan/ti DPMPPTSP		97.892.630,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	26.785.300,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Karyawan/ti DPMPPTSP		18.199.280,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				146 Laporan	299.109.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Karyawan/ti DPMPPTSP		176.302.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
						-																		
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional dan Sarana Prasarana Perangkat Daerah	-			100 Persen	809.434.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan/ti DPMPPTSP	-	1.200.000.000,00					
	2	18	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	397.179.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Karyawan/ti DPMPPTSP		600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
						[Tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah sesuai target]	Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangk an	1.00	0	1.00	1.00	13.695.895.452,00							15.825.035.162,00					
							Nilai Hasil Survey Kepuasan	100.00	100.00	100.00	100.00													
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah	92.25	86.25	88.25	88.25													
							Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95.5	89.5	91.5	91.5													
									NA															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					15 Unit	412.255.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Karyawan/ti DPMPTSP								
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	983.000.725,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Non ASN di DPMPTSP		1.150.898.747,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12.028.029,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Non ASN di DPMPTSP		10.896.631,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	970.972.696,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Non ASN di DPMPTSP		1.140.002.116,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	-			100 Persen	501.565.646,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Karyawan/ti DPMPTSP	-	533.650.296,00						
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	269.200.338,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					28 Unit	249.453.706,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Karyawan/ti DPMPTSP								
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	55.251.958,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					37 Unit	54.309.340,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Karyawan/ti DPMPTSP								
	2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	197.802.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Karyawan/ti DPMPTSP		209198000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
140	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Kebijakan atau Regulasi Penanaman Modal yang Terimplementasi	-			100 Persen	712.038.800,00						-	400.000.000,00						
						-																			
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Forum Investasi Daerah	-			1 Dokumen	375.319.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Investor	-	200.000.000,00						
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	99.968.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Investor		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				3 Dokumen	275.351.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Investor		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah potensi dan peluang investasi yang terealisasi	-			100 Persen	336.719.200,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Investor	-	200.000.000,00	
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	136.759.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Investor			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				3 Dokumen	199.959.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Investor		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
141	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	-			2.019 Triliun	431.957.980,00					-		250.000.000,00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi dan peluang investasi yang telah dipromosikan				100 Persen	431.957.980,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha, Masyarakat dan Investor		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	431.957.980,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha, Masyarakat dan Investor		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
142	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	-			100 Persen	2.000.645.357,00					-		2.000.000.000,00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penerima layanan perizinan dan non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	-			100 Persen	2.000.645.357,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Penerima Layanan di MPP Kota Bogor	-	2.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				7100 Pelaku Usaha	2.000.645.357,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Penerima Layanan di MPP Kota Bogor	-	2.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
143	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal para Pelaku Usaha	-			82 Persen	98.000.000,00						-	100.000.000,00				
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal para Pelaku Usaha				90 Persen	98.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha di Kota Bogor		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					98.000.000,00		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha di Kota Bogor	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																	
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				25 Kegiatan Usaha	0,00		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku Usaha di Kota Bogor	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
144	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi				100%	184.172.400,00											
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang sudah terintegrasi Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang sudah terintegrasi	-			6 Dokumen 6 Dokumen	184.172.400,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Pengguna Layanan	-	400.000.000,00				
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				6 Dokumen	184.172.400,00		Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Masyarakat Pengguna Layanan	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
						DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA							218.845.536.191,00						119.413.413.979,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							218.845.536.191,00						119.413.413.979,00				
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							218.845.536.191,00						119.413.413.979,00				
1	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Hasil Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			86,30 Nilai 95 persen 82,78 Nilai 1 inovasi/tahun	15.824.121.398,00						-	15.304.163.179,00				
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pelaporan pada Perangkat daerah	-			100 persen	190.417.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Pegawai Di Dinas Pemuda dan Olahraga	-	190.000.000,00				
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5.055.000,00		-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Pegawai Di Dinas Pemuda dan Olahraga		10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2	19	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	112.422.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Pegawai Di Dinas Pemuda dan Olahraga		100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen Berita Acara	72.940.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Pegawai Di Dinas Pemuda dan Olahraga		80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.199.109.562,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	9.199.109.562,00						
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100% Orang/bulan	9.060.749.562,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		9.060.749.562,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	138.360.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		138.360.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.143.584.992,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	1.361.759.934,00						
	2	19	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	96.955.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		47.288.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	101.466.334,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		343.697.134,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	88.658.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		32.171.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		77.336.400,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	151.942.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-								
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		61.546.900,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	28.904.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-								
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		799.720.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	675.657.658,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-								
	2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.086.978.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	1.036.953.300,00						
	2	19	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	397.179.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-								
	2	19	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		132.248.700,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	122.131.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-								
	2	19	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		904.704.600,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	567.668.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-								
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.827.801.746,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	2.554.908.457,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	1.693.308.576,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		1.539.842.728,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2	19	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	92.538.490,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		86.204.113,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	1.041.954.680,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		928.861.616,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		-	1.376.230.098,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	961.431.926,00			
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	181.620.098,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		181.711.926,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	464.870.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		260.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2	19	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	729.740.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		519.720.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
2	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	persentase pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif Persentase pemuda yang medapatkan sosialisasi dan pelatihan pengenalan kewirausahaan Persentase Pemuda Pelopor Yang berhasil mendapatkan penghargaan tingkat provinsi dan nasional	-		22% 4% 2% 35%	2.035.920.799,00						-	0,00			
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan	-		100 persen	1.355.765.100,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	0,00			
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota															
						Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	284.322.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
	2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				600 Orang	412.642.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
							Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				965 Orang	606.347.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																			
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				30 Orang	52.453.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	680.155.699,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	0,00						
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																			
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				7320 Orang	680.155.699,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
3	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pemeliharaan sarana prasarana OR berstandar Nasional atau Internasional Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan Persentase Peningkatan Masyarakat yang menggunakan sarana prasarana Olahraga dikelola Dispora	-			100 Persen 45 Persen 55 Persen 6 Persen	199.995.493.994,00					-		104.109.250.800,00						
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	507.794.938,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	500.000.000,00						
	2	19	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota																			
							Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota				5 Unit	261.994.938,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				2 Dokumen	245.800.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		300.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	undefined	-			undefined undefined	1.678.978.592,00			-	-	-	-	3.080.609.800,00						
	2	19	03	2.02	0006	Kelutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																			
							Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				350 Orang	1.678.978.592,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.080.609.800,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Atlet Berprestasi dari Keseluruhan Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan Persentase Perolehan Medali dengan Jumlah Atlet yang Berpartisipasi dalam Kejuaraan	-			50 Persentase 45 Persentase	143.731.778.162,00			-	-	-	-	62.604.749.000,00						
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah																			
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				300 Orang	147.645.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		159.749.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga				130 Orang	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		42.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
							Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				450 Orang	143.584.133.162,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.445.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	54.076.942.302,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	37.923.892.000,00					
	2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				2 Laporan	1.137.241.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		1.137.242.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				2 Dokumen	536.649.647,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		536.650.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
							Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Unit	52.153.051.255,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-	-		36.000.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Laporan Lembaga	249.999.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		250.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
4	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina	-			100 Persen	990.000.000,00					-	0,00						
	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	990.000.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	0,00					
	2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
							Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	990.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA				
						DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN						12.098.932.740,00								12.602.548.200,00				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.098.932.740,00								12.602.548.200,00				
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						825.343.500,00								1.464.442.300,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1) Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM 2) Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM 3) Tingkat kunjungan masyarakat perhari (UPLM 4) Perpustakaan yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan (SNP) (UPLM 5) Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi Perpustakaan (UPLM 6) Anggota Perpustakaan (UPLM 7)	-			0,6067 Nilai 0,1717 Nilai 1 Nilai 0.8497 Nilai 1 Nilai 1 Nilai 1 Nilai	691.162.700,00						-	1.023.342.300,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang aktif	-			24 Perpustakaan	691.162.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bogor	-	1.023.342.300,00	
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				158 Perpustakaan	265.775.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bogor		425.223.500,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				14 Perpustakaan	49.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bogor		62.350.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat														
							Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				20000 Eksemplar	50.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bogor		163.211.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				25 Eksemplar	325.387.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bogor		372.557.800,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase naskah kuno yang diinventarisasi	-			100 Persen	134.180.800,00						-	441.100.000,00	
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah Kota Bogor	-			NA Eksemplar	134.180.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bogor	-	441.100.000,00	
	2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
							Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				0 Orang	82.653.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bogor		378.750.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
							Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				1 Eksemplar	51.527.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Masyarakat Kota Bogor		62.350.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						11.273.589.240,00							11.138.105.900,00	
3	2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Jumlah Inovasi yang Dibangun/Dikembangkan Nilai Sakip Perangkat Daerah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-			100 Persen 1 Inovasi/tahun 84.4 Nilai 86.26 Nilai	10.854.878.242,00						-	11.133.605.900,00	
	2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	-			100 Persen	20.863.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor	-	25.122.420,00	
	2	24	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	20.863.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		25.122.420,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	-			100 Persen	7.899.575.750,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor	-	8.054.387.480,00				
	2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	7.836.727.150,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		7.988.600.980,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN			
	2	24	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	62.848.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		65.786.500,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN			
	2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan Operasional perangkat Daerah	-			100 Persen	349.283.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor	-	453.195.150,00				
	2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.991.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		25.980.700,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN			
	2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.842.900,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		35.980.500,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN			
	2	24	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	55.026.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		61.250.500,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN			
	2	24	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.715.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		38.700.200,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN			
	2	24	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.303.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		38.982.500,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN			
	2	24	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	191.403.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		252.300.750,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 Persen	290.878.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor	-	370.858.700,00	
	2	24	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	7.511.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		48.600.500,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				31 Unit	283.367.100,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		322.258.200,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang operasional	-			100 Persen	1.335.798.392,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor	-	1.415.985.450,00	
	2	24	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	508.661.108,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		556.200.250,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	827.137.284,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		859.785.200,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD Dinas Arsip dan Perpustakaan ber kondisi baik	-			83 Persen	958.479.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor	-	814.056.700,00	
	2	24	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	105.423.118,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		125.800.750,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	72.490.230,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		90.252.200,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	72.476.568,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		76.780.250,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	708.089.084,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		521.223.500,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
4	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang hasil audit kearsipan bernilai minimal Baik	-			80 Persen	418.710.998,00					-	4.500.000,00		
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang dilakukan audit yang bernilai baik	-			38 PD	297.531.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor	-	0,00	
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				0 Berkas	89.010.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				0 Berkas	155.949.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	52.571.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang dibuatkan sarana temu baliknya	-			11566 Arsip	117.579.998,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor	-	0,00	
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				0 Arsip	117.579.998,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Masyarakat Kota Bogor		0,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang dilakukan pengawasan kearsipan	-			36 PD	3.600.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	4.500.000,00	
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	3.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		4.500.000,00	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
						DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						25.046.925.138,00							28.131.320.707,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						22.974.619.483,00							17.131.320.707,00	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						22.974.619.483,00							17.131.320.707,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2	22	01			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Hasil Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan	-			87.8 Nilai 95 % 93.4 Nilai 1 inovasi/tahun	21.422.738.070,00						-	13.783.893.707,00	
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu Persentase penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 % 100 %	1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor	-	1.500.000,00	
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	500.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor		500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor		1.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	-			100 % 97.49 %	8.785.895.636,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor	-	9.432.786.967,00	
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	8.720.528.236,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor		9.362.786.967,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	65.367.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Disparbud Kota Bogor		70.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 %	870.078.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor	-	855.247.800,00	
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	165.494.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.985.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor		25.497.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	20.016.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	662.582.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor		479.750.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 %	319.591.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor	-	663.568.600,00	
	2	22	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	319.591.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor		663.568.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	943.889.316,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor	-	1.518.219.573,00	
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	266.049.668,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor		310.699.613,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	677.839.648,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor		1.207.519.960,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik	-			100 %	10.501.783.318,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor	-	1.312.570.767,00	
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	217.274.509,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor		296.004.102,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	146.575.809,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor		380.652.665,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	10.137.933.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Disparbud Kota Bogor		635.914.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
2	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah event seni budaya di Kota Bogor	-			58 event	964.432.380,00						-	2.709.427.000,00						
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan yang dilaksanakan	-			1 kegiatan	146.425.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Pelaku Seni dan Masyarakat Kota Bogor	-	168.423.000,00						
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																			
							Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				9 Objek	146.425.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Pelaku Seni dan Masyarakat Kota Bogor		168.423.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang dilaksanakan	-			1 kegiatan	818.006.480,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor	-	2.541.004.000,00						
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																			
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				0 Objek	818.006.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor		2.541.004.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
3	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase lembaga seni tradisional yang dibina	-			60 %	71.875.533,00						-	100.000.000,00						
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga seni tradisional yang dibina	-			10 lembaga	71.875.533,00			-	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Para pelaku seni budaya yang tergabung dalam sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor	-	100.000.000,00						
	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				15 Sertifikat	71.875.533,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Para pelaku seni budaya yang tergabung dalam sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
							Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Para pelaku seni budaya yang tergabung dalam sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
4	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pelaku pelestari sejarah yang ditingkatkan kompetensinya	-			15.8 %	28.460.000,00						-	40.000.000,00					
	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah	-			1 kegiatan	28.460.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Pelestari peninggalan sejarah Kota Bogor	-	40.000.000,00					
	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				35 Orang	28.460.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Pelestari peninggalan sejarah Kota Bogor		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
5	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase status ODCB menjadi CB	-			7.6%	487.113.500,00						-	498.000.000,00					
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	-			3 cagar budaya	102.713.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor	-	102.000.000,00					
	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																		
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				3 Objek	102.713.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor		102.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	-			32 Objek	384.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor	-	396.000.000,00		
	2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				32 Objek	384.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor		396.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
6	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	jumlah kunjungan ke museum	-			240187 orang	0,00						-	0,00		
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	jumlah kunjungan ke museum	-			240187 orang	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor dan Luar Kota Bogor	-	0,00		
	2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor dan Luar Kota Bogor		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.072.305.655,00							11.000.000.000,00		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						2.072.305.655,00								11.000.000.000,00	
7	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah Daya Tarik Wisata Lama Tinggal Wisatawan Tingkat Hunian Kamar Hotel Jumlah kunjungan wisatawan	-			2.94 % 2 hari 70.49 % 9404626 orang	474.999.900,00						-	0,00		
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang terfasilitasi	-			1 destinasi	474.999.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku usaha pariwisata Kota Bogor	-	0,00		
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	474.999.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku usaha pariwisata Kota Bogor		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan Jumlah Event Skala Internasional/ Nasional/ Provinsi/ regional yang terselenggara di Kota Bogor Persentase kerjasama dan kemitraan kepariwisataan	-			10 % 14.28 %	961.283.255,00						-	11.000.000.000,00		
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi kepariwisataan	-			3 promosi	961.283.255,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	wisatawan nusantara dan mancanegara	-	11.000.000.000,00		
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri															
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	249.999.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	wisatawan nusantara dan mancanegara		550.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota															
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				6 Kegiatan	541.283.829,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	wisatawan nusantara dan mancanegara		4.350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri															
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	169.999.726,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	wisatawan nusantara dan mancanegara		6.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
9	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI	-			10.2 %	50.000.000,00						-	0,00		
	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	-			1 kegiatan	50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku ekonomi kreatif Kota Bogor	-	0,00		
	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual															
							Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				50 Produk	50.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku ekonomi kreatif Kota Bogor		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
10	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi Jumlah pelaku ekonomi kreatif baru	-			0.91 % 95 pelaku	586.022.500,00						-	0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya	-			95 pelaku 130 orang	475.922.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Bogor	-	0,00				
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				2 Laporan	114.359.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Bogor		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																	
							Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				50 Orang	111.562.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Bogor		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																	
							Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				40 Orang	99.999.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Bogor		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				40 Orang	150.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Bogor		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	-			2 kegiatan	110.099.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku ekonomi kreatif Kota Bogor	-	0,00					
	3	26	05	2.02	0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha																		
							Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha				1 Laporan	71.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku ekonomi kreatif Kota Bogor		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
	3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif																		
							Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				13 Orang	38.899.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Pelaku ekonomi kreatif Kota Bogor		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
						BAGIAN PEMERINTAHAN																	2.020.000.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	475.000.000,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	125.000.000,00	
1	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah yang Difasilitasi Sesuai SOP	-			100 Persentase	417.086.100,00						-	125.000.000,00					
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Aduan Masyarakat Mengenai Permasalahan Pertanahan	-			100 Persentase	417.086.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor	-	125.000.000,00					
	2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	417.086.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Bogor		125.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN				
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	350.000.000,00	
2	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rata-rata Nilai Skor PRODESKEL	-			0,74 Skor	170.305.700,00						-	350.000.000,00					
							Rata-rata Nilai Skor EPDESKEKEL				371 Skor													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemutakhiran Data Profil Kelurahan Persentase Pendayagunaan Data Administrasi Kelurahan	-			100 Persentase 100 Persentase	170.305.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Wilayah Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan Kota Bogor	-	350.000.000,00						
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																			
							Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				68 Dokumen	51.206.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Wilayah Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan Kota Bogor		125.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN					
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	119.099.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Wilayah Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga Kemasyarakatan Kota Bogor		225.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN					
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						1.639.492.000,00						1.545.000.000,00							
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						1.639.492.000,00							1.545.000.000,00						
3	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Capaian SPM (Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal) Persentase kerjasama yang diimplementasikan	-			96,03% 96% 92,5%	1.639.492.000,00						-	1.545.000.000,00						
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Rekomendasi / Laporan bahan kebijakan Pelaksanaan Otonomi daerah yang ditindaklanjuti Persentase Tata Kelola Pengadministrasian Pemerintahan dan Kewilayahan sesuai Dengan Ketentuan	-			100 Persentase 100 Persentase	1.135.369.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah Kota Bogor	-	845.000.000,00						
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	276.419.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah Kota Bogor		225.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN					
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	255.597.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah Kota Bogor		0,00	BAGIAN PEMERINTAHAN				
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	603.352.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah Kota Bogor		620.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN				
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama dalam negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Persentase kerjasama luar negeri yang diimplementasikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama	-			94,6 Persentase 100 Persentase	504.123.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Pemerintah Daerah Kota Bogor, pemerintah daerah lain, pemerintah pusat dan instansi vertikal lain, serta pihak ketiga lainnya	-	700.000.000,00					
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				90 Dokumen	294.774.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Pemerintah Daerah Kota Bogor, pemerintah daerah lain, pemerintah pusat dan instansi vertikal lain, serta pihak ketiga lainnya		400.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN				
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	152.820.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Pemerintah Daerah Kota Bogor, pemerintah daerah lain, pemerintah pusat dan instansi vertikal lain, serta pihak ketiga lainnya		200.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN				
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	56.529.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Pemerintah Daerah Kota Bogor, pemerintah daerah lain, pemerintah pusat dan instansi vertikal lain, serta pihak ketiga lainnya		100.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN				
						BAGIAN UMUM						96.684.981.556,00						95.648.093.515,00						
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						96.684.981.556,00						95.648.093.515,00						
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						96.684.981.556,00						95.648.093.515,00						
4	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai kematangan organisasi lebih dari 50 poin Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM diatas sama dengan 3.5 Rata Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			57,14 % 81% 12.65% 86,9 Nilai 100% 93,5 Nilai	96.684.981.556,00						-	95.648.093.515,00					
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan Sesuai Standar Akuntansi	-			100 Persentase	49.808.027.080,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Aparatur dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor	-	51.069.047.375,00					
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				185 Orang/bulan	49.644.434.080,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Aparatur dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		50.901.598.794,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	163.593.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Aparatur dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		167.448.581,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persentase	549.730.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor	-	600.000.000,00	
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				7 Paket	549.730.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		600.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persentase	5.102.220.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Aparatur dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah Kota Bogor	-	5.247.827.000,00	
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	179.916.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Aparatur dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah Kota Bogor		195.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	489.952.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Aparatur dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah Kota Bogor		500.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	2.158.582.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Aparatur dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah Kota Bogor		2.250.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	308.696.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Aparatur dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah Kota Bogor		300.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	1.965.074.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Aparatur dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah Kota Bogor		2.002.827.000,00	BAGIAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	-			100 Persentase	9.187.218.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor	-	11.540.698.645,00	
	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	2.757.615.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		3.080.770.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				13 Unit	2.759.181.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		3.574.611.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	549.587.100,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		933.481.645,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				125 Unit	3.120.835.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		3.951.836.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persentase	9.497.113.403,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Pegawai dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor	-	9.309.175.513,00	
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	80.303.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Pegawai dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		90.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	2.519.411.947,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Pegawai dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		2.519.411.947,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	987.356.820,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Pegawai dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		987.382.730,00	BAGIAN UMUM
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	5.910.040.836,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Pegawai dan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		5.712.380.836,00	BAGIAN UMUM

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Lingkup Sekretariat Daerah Berkondisi Baik	-		100 Persentase	12.194.756.369,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor	-	7.046.684.999,00		
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya			22 0	1.173.257.519,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		0,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			40 Unit	1.214.893.414,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		1.421.684.999,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara			415 Unit	199.746.718,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		200.000.000,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			1620 Unit	1.270.372.686,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		1.350.000.000,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10 Unit	7.887.214.332,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		3.600.000.000,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6 Unit	449.271.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor		475.000.000,00	BAGIAN UMUM	
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		100 Persentase	4.449.596.604,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Terjaminnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah	-	4.634.659.983,00		
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
															Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	1.248.654.644,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Terjaminnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah		1.311.867.784,00	BAGIAN UMUM						
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														660.079.100,00	BAGIAN UMUM					
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	600.729.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Terjaminnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah									
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																				
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	100.199.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Terjaminnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah		100.199.200,00	BAGIAN UMUM						
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																				
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2.500.013.560,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Terjaminnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah		2.562.513.899,00	BAGIAN UMUM						
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-			100 Persentase	5.896.318.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Tersedianya layanan kerumahtanggaan yang mendukung kelancaran operasional dilingkup Sekretariat Daerah	-	6.200.000.000,00							
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																				
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				15 Paket	2.642.632.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Tersedianya layanan kerumahtanggaan yang mendukung kelancaran operasional dilingkup Sekretariat Daerah		2.800.000.000,00	BAGIAN UMUM						
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																				
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				13 Paket	2.162.163.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Tersedianya layanan kerumahtanggaan yang mendukung kelancaran operasional dilingkup Sekretariat Daerah		2.100.000.000,00	BAGIAN UMUM						
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	1.091.522.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Tersedianya layanan kerumahtanggaan yang mendukung kelancaran operasional dilingkup Sekretariat Daerah		1.300.000.000,00	BAGIAN UMUM
					BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						2.062.466.400,00							1.527.548.440,00	
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.062.466.400,00							1.527.548.440,00	
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH						2.062.466.400,00							1.527.548.440,00	
5	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai kematangan organisasi lebih dari 50 poin Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM diatas sama dengan 3.5 Rata Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			57,14 % 81% 12.65% 86,9 Nilai 100% 93,5 Nilai	2.062.466.400,00					-	1.527.548.440,00		
	4	01	01	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	-			100 Persentase	2.062.466.400,00			-	-	-	-	1.527.548.440,00	
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	872.900.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	796.514.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		876.169.800,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	393.052.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		651.378.640,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
					BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA						2.894.083.600,00							3.924.306.800,00	
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.894.083.600,00							3.924.306.800,00	
	4	01			SEKRETARIAT DAERAH						2.894.083.600,00							3.924.306.800,00	
6	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Terfasilitasinya Layanan Bantuan Hukum Non Ligitasi Nilai Aspek Penataan Data Base Perundang-undang Daerah Nilai Aspek Harmonisasi Produk Hukum Daerah Nilai Aspek Kompetensi SDM Perancang Produk Hukum Daerah Nilai Aspek Deregulasi Produk Hukum Daerah	-			100 persentase 20 poin 22 poin 24,6 poin 27,3 poin	2.894.083.600,00						-	3.924.306.800,00	
	4	01	02	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi layanan bantuan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Persentase fasilitasi penyelesaian masalah hukum melalui bale badami Persentase Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai permohonan, dan pendokumentasian serta pengelolaan informasi hukum	-			100 persen 20 persen 100 Persentase	2.894.083.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	aparatur dan masyarakat	-	3.924.306.800,00	
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				500 Dokumen	624.299.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	aparatur dan masyarakat		1.424.306.800,00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				47 Kasus	1.869.785.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	aparatur dan masyarakat		2.000.000.000,00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan														
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				110 Dokumen	399.998.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	aparatur dan masyarakat		500.000.000,00	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
						BAGIAN ORGANISASI						802.711.600,00						664.373.490,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						802.711.600,00						664.373.490,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						802.711.600,00						664.373.490,00		
7	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai kematangan organisasi lebih dari 50 poin Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM diatas sama dengan 3.5 Rata Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah aspek Pelaporan Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Hasil Survey Kepuasan	-			57,14 % 81% 12.65% 86,9 Nilai 100% 93,5 Nilai	802.711.600,00					-		664.373.490,00	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Nilai Komposit Kelembagaan Dimensi Struktur Persentase LKIP PD yang memenuhi 7 informasi sesuai Permenpan 53 tahun 2014 Persentase Peningkatan Nilai SKM Perangkat Daerah Persentase perangkat daerah yang memiliki Dokumen Anjab dan ABK sesuai ketentuan	-			44 Nilai 31,42 Persentase 1 Persentase 100 Persentase	802.711.600,00			-	-	-	-	664.373.490,00	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				8 Dokumen	334.236.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		221.457.830,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				6 Laporan	234.237.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		221.457.830,00	BAGIAN ORGANISASI
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen	234.237.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		221.457.830,00	BAGIAN ORGANISASI
						BAGIAN PEREKONOMIAN						572.133.000,00						0,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						572.133.000,00						0,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						572.133.000,00						0,00		
8	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah Kontribusi Deviden BUMD pada PAD Persentase Capaian Kinerja Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah	-			35.672.656.599 Rupiah 79,3%	572.133.000,00					-		0,00	
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Kebijakan dan Rekomendasi Pengelolaan BUMD Jumlah Kebijakan dan rekomendasi pengendalian inflasi daerah Jumlah kebijakan pembinaan UMKM yang diimplementasikan	-			6 Dokumen 4 Dokumen 6 Dokumen	572.133.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Kota Bogor	-	0,00	
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				20 Dokumen	347.947.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Kota Bogor		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN				
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	129.691.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Kota Bogor		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN				
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				6 Dokumen	94.495.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Kota Bogor		0,00	BAGIAN PEREKONOMIAN				
						BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT													39.082.392.700,00					
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													39.082.392.700,00					
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH													39.082.392.700,00					
9	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penduduk Miskin yang Bersekolah di MA, SMA/SMK dan Mahasiswa Berprestasi yang Mendapat Bantuan Sosial Siswa Miskin berupa BSM Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pemberian Hibah Untuk Lembaga Keagamaan	-			32 Persentase 90 Persentase	44.707.774.406,00					-	39.082.392.700,00						
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kebijakan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual yang di implementasikan Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Diimplementasikan	-			3 Dokumen 3 Dokumen	44.707.774.406,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat	-	39.082.392.700,00					
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen	27.106.473.431,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat		19.316.225.770,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan	Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	417.335.645,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat		449.941.160,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan	Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	17.183.965.330,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat		19.316.225.770,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
						BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN													320.000.000,00				
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														320.000.000,00			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH															320.000.000,00		
10	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang Dibangun/ Dikembangkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			1 Inovasi 83 Nilai	139.058.950,00					-	0,00					
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang Disusun Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun	-			100 Persentase 100 Persentase	139.058.950,00			-	-	-	-	0,00				
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	63.071.350,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	75.987.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
11	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sesuai Perencanaan Persentase Realisasi Pelaksanaan Program Strategis Pembangunan Daerah	-			67,44 Persentase 92 Persentase	267.429.300,00					-	320.000.000,00					
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase PD Yang Menyampaikan Laporan Realisasi Keuangan dan Progres Fisik Secara Tepat Waktu	-			100 Persentase	267.429.300,00			-	-	-	-	320.000.000,00				
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	80.650.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		110.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	186.779.300,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		210.000.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
						BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA														1.600.000.000,00			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															1.600.000.000,00		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH																1.600.000.000,00	
12	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan JF PPBJ Tingkat Pemanfaatan Sistem Informasi PBJ Tingkat Kematangan UKPBJ	-			10,77 Persentase 28,5 Nilai 40 Nilai	983.019.589,00					-	1.600.000.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Kepuasan Penerima Layanan UKPBJ	-			3,31 Nilai	983.019.589,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Pelaku Pengadaan	-	1.600.000.000,00		
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				12 Dokumen	536.628.480,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Pelaku Pengadaan		900.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				12 Dokumen	252.889.298,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Pelaku Pengadaan		350.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				200 Orang	193.501.811,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Pelaku Pengadaan		350.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
						SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH															
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						158.095.365.958,00							173.188.453.705,00		
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						158.095.365.958,00							173.188.453.705,00		
175	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
						[Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan]	Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangk an Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Survey Kepuasan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	1 100.00 87.20 88.79	1 100.00 83,39 86.80	1 100.00 86.70 88.75	1 inovasi/tahun 100.00 86.80 88.75	102.626.896.916,00							105.982.218.291,00		
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu				100 Persen	70.471.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		619.494.139,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	44.497.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		594.468.619,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	13.647.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		13.993.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	12.327.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan,Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Sekretariat DPRD		11.032.320,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	-			100 Persen 100 Persen	12.346.982.550,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD	-	12.981.458.942,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	12.084.371.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		12.719.931.078,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				16 Dokumen	40.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		41.600.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	39.630.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		41.215.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	8.090.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		8.840.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	18.270.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		20.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	151.744.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		143.866.944,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	4.875.250,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		5.205.720,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bogor yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku				100 Persen	597.658.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		621.564.320,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	6.084.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		6.327.360,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				38 Orang	591.574.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		615.236.960,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 Persen	12.477.219.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD	-	12.891.888.464,00					
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	229.718.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		238.906.720,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	721.511.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		1.063.449.920,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	142.905.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		186.068.168,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	309.948.300,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		322.347.792,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	298.195.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		311.928.240,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	279.234.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		290.404.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	936.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		624.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9.499.581.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		9.791.696.304,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	48.325.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		50.814.920,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	11.800.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		12.272.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD				100 Persen	1.803.646.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan,Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Sekretariat DPRD		822.497.312,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	616.154.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan,Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Sekretariat DPRD			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	254.515.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan,Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Gove rnance	Sekretariat DPRD			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	932.977.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		822.497.312,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	10.202.580.111,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		10.577.078.484,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura				12 Laporan	7.739.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		8.023.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.604.716.760,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		2.708.913.064,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	413.984.247,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		270.991.204,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7.176.139.604,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		7.589.150.616,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik				100 Persen	4.585.282.255,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		4.290.279.432,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				50 Unit	1.691.143.589,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		1.297.226.614,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	1.093.566.066,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		1.018.943.954,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.800.572.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Sekretariat DPRD		798.942.560,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
						-														
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit		0 Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Sekretariat DPRD		1.175.166.304,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
						[Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan]	Jumlah Inovasi/tahun yang dibangun/dikembangk an Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai Survey Kepuasan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	1 100.00 87.20 88.79	1 100.00 83,39 86.80	1 100.00 86.70 88.75	1 100.00 86.80 88.75	102.626.896.916,00							105.982.218.291,00	
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Kesejahteraan Anggota DPRD				100 Persen	55.461.972.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DPRD Kota Bogor		57.993.076.926,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				50 Orang/Bulan	54.490.917.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD Kota Bogor		57.019.376.926,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	796.055.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DPRD Kota Bogor		791.700.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	175.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DPRD Kota Bogor		182.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi DPRD	-			100 Persen	5.081.083.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD Kota Bogor	-	5.184.880.272,00	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	1.281.200.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD Kota Bogor		1.332.448.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	3.372.623.300,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD Kota Bogor		3.408.081.456,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				12 Paket	427.260.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD Kota Bogor		444.350.816,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
176	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rencana Kerja DPRD yang di fasilitasi sesuai fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	-			100 Persen	55.468.469.042,00						-	67.206.235.414,00	
						-														
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Dokumen Raperda dan Peraturan DPRD Yang Disetujui	-			100 Persen	7.694.982.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat	-	12.414.982.736,00	
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				13 Dokumen	205.689.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		462.850.336,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				13 Dokumen	5.943.992.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		6.643.076.960,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen		0 Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		1.562.056.080,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	1.545.299.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		1.624.359.360,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				1500 Orang		0 Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		2.122.640.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan	-			100 Persen	1.057.438.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat	-	1.532.603.280,00	
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	491.219.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		510.867.760,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	491.219.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		510.867.760,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester														
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		510.867.760,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yg ditindaklanjuti	-			100 Persen	5.506.452.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat	-	5.323.784.960,00	
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	491.219.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		510.867.760,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 Dokumen	4.436.720.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		4.211.263.680,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan														
							Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	578.513.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		601.653.520,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang tercapai	-			100 Persen	7.249.466.842,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD	-	9.019.719.494,00	
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD														
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				12 Dokumen	2.228.867.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD		3.384.542.408,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				20 Orang	45.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD		46.800.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	576.266.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD		599.317.056,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	500.189.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD		31.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Dokumen	3.869.142.842,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD		4.125.662.430,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah Daerah				100 Persen	4.094.556.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD		4.258.338.240,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	40.556.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		42.178.240,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				150 Dokumen	4.054.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		4.216.160.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelanggaran kode etik yang ditindaklanjuti				100 Persen	1.567.874.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD	-	1.588.889.120,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	144.554.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD		150.336.160,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	1.423.320.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DPRD		1.438.552.960,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD yang terpenuhi	-			100 Persen	28.297.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat	-	33.067.917.584,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	23.433.564.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		25.154.424.880,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
							Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				3 Laporan	30.000.000,00												
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	4.834.136.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		DPRD, Pemerintah Kota Bogor, Stakeholders dan Masyarakat		7.882.292.704,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH														23.838.911.298,00				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														23.838.911.298,00				
	5	01				PERENCANAAN														23.838.911.298,00				
1	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Hasil Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			90,5 Nilai 100% 92,5 Nilai 1 inovasi/tahun	18.304.587.346,00						-	20.398.811.298,00					
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase Realisasi anggaran kegiatan dilingkup perangkat daerah Persentase Realisasi fisik kegiatan dilingkup perangkat daerah	-			100 Persen 95 Persen 100 Persen	27.994.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor	-	27.995.000,00					
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	17.824.400,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		17.825.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25 Laporan	10.170.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		10.170.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	-			100 Persen 98 Persen	14.469.709.604,00			-	-	Bapperida Kota Bogor	-	16.829.606.000,00	
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	14.377.603.604,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Bapperida Kota Bogor		16.737.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	92.106.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida Kota Bogor		92.106.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	82.540.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor	-	150.000.000,00	
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				90 Orang	82.540.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Oprasional Perangkat Daerah	-			100 Persen	1.376.322.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor	-	1.460.632.123,00	
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.035.300,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	99.365.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	28.680.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		29.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	42.083.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		37.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	12.137.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		23.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.184.020.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		1.256.132.123,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	-			100 Persen	442.452.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor	-	240.680.000,00	
	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	181.237.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	261.215.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		240.680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	1.012.953.663,00			-	-	Bapperida Kota Bogor	-	1.248.455.177,00	
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	160.385.952,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida Kota Bogor		170.153.456,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	852.567.711,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida Kota Bogor		1.078.301.721,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	-			100 Persen	892.614.779,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor	-	441.442.998,00	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
																Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				32 Unit	280.770.395,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		298.442.998,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				195 Unit	150.198.384,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		143.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	461.646.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
2	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Perencanaan Kinerja minimal 25.50	-			94,29 Persen	2.044.257.350,00					-		1.755.000.000,00						
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) secara tepat waktu dan sesuai regulasi	-			100 Persen	1.004.194.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida	-	1.180.000.000,00						
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	139.840.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida								
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																			
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	299.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida		210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	379.466.200,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida		360.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	184.888.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida		450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan Informasi	-			647 Data	708.103.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor	-	320.000.000,00						
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	595.416.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				250 Orang	112.687.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		210.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah indikator sasaran perencanaan pembangunan daerah yang tercapai Jumlah program pembangunan daerah dalam RPJMD yang didanai dari TJLSP/CSR	-			25 Indikator 36 Program	331.960.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor	-	255.000.000,00	
	5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah														
							Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				1 Kerja Sama	154.473.750,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	177.486.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		155.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
3	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia Rata-Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah Aspek Perencanaan Kinerja lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan Rata-Rata Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan SDA serta bidang Infrastruktur dan kewilayahan	-			27,00 point 26,35 point 27,50 point 27,30 point	2.208.670.776,00						-	1.685.100.000,00	
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point	-			92 Persen 92 Persen	537.259.776,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor	-	370.100.000,00	
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	293.076.576,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		283.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	112.595.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
							-				-	1.155.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	72.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		69.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	56.875.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		6.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1.155.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point.	-			100 Persen	229.799.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor	-	705.000.000,00	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	74.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		585.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	44.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					1 Laporan	105.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Bapperida Kota Bogor		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja minimal 24 point. Persentase Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendapatkan nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja minimal 24 point.	-				100 Point 100 Point	1.441.611.200,00			-	-	Bapperida Kota Bogor	-	610.000.000,00			
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					2 Dokumen	999.771.500,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida Kota Bogor		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					2 Laporan	36.840.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida Kota Bogor		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					1 Laporan	5.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida Kota Bogor		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1 Dokumen	399.999.700,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Bapperida Kota Bogor		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.563.474.544,00							0,00				
4	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase dokumen rekomendasi kebijakan yang diusulkan menjadi kebijakan Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKK dimensi Implementasi dan evaluasi kemanfaatan Kebijakan > 35,75	-			100 Persen 57,1 Persen	730.415.000,00					-		0,00				
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang diusulkan menjadi kebijakan	-			100 Persen	278.435.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor	-	0,00				
	5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi					1 Laporan	227.535.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan					1 Laporan	50.900.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang diusulkan menjadi kebijakan	-			100 Persen	203.979.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor	-	0,00	
	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	203.979.600,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diusulkan menjadi kebijakan	-			100 Persen	247.999.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor	-	0,00	
	5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	247.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Inovasi dengan tingkat Kematangan > 100 pada tahun ke n	-			22 Persen	833.059.544,00						-	0,00	
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-			-	94.460.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor	-	0,00	
	5	05	03	2.01	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan														
							Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				1 Pelatihan	94.460.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Jumlah perangkat daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun ke n	-			5 Perangkat Daerah	738.599.544,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor	-	0,00	
	5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual														
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)				1 Laporan	49.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.														
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.				1 Laporan	84.999.900,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politit, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
																Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				3 Laporan	499.999.844,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
	5	05	03	2.02	0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi																			
							Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				1 Laporan	103.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Pabaton	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Bogor		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH					
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						71.131.389.417,29							97.233.950.386,00						
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						71.131.389.417,29							97.233.950.386,00						
	5	02				KEUANGAN						71.131.389.417,29							97.233.950.386,00						
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Hasil Suvey Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			89,44 Nilai 96,9 Persen 3,906 Nilai 2 Inovasi/tahun	19.159.735.153,29						-	25.289.319.285,00						
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan di Lingkup BKAD Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di Lingkup BKAD Persentase Standarisasi Mutu BKAD	-			87,90 Poin 95 % 100 % 100 %	3.894.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor	-	4.295.610,00						
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		4.295.610,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3.894.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		4.295.610,00						
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kepatuhan laporan barang pengguna Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	-			100 % 100 % 95 %	13.271.690.868,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor	-	18.855.465.565,00						
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		18.783.312.765,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	13.201.010.868,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		18.783.312.765,00						
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		72.152.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	70.680.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		72.152.800,00						
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			99,4 Poin 100 %	2.488.276.759,29			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor	-	2.909.148.785,00						
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.773.330,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		39.091.650,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	84.333.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		319.831.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	142.521.129,29	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		347.937.335,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	83.565.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		120.842.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	7.056.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		13.946.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	566.568.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		566.572.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.012.336.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		1.015.792.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	575.123.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		485.135.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kepatuhan penggunaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 % 100 %	630.429.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor	-	2.093.551.800,00	
	5	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		699.988.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		397.179.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				43 Unit	24.263.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34 Unit	606.166.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		996.384.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	925.844.900,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor	-	882.648.236,00	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	223.225.436,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		186.075.572,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	702.619.464,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		696.572.664,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik Persentase Kepatuhan Penghapusan BMD	-			100 % 100 %	1.839.598.926,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor	-	544.209.289,00	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	217.176.389,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		288.033.752,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	256.175.537,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		256.175.537,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.366.247.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	BKAD Kota Bogor		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Persentase kepatuhan pengalokasian anggaran mandatory sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Persentase transparansi perencanaan Penganggaran Persentase transparansi pelaksanaan APBD Persentase penyerapan realisasi anggaran dalam APBD	-			100% 100% 100% 100% 90,5%	42.189.058.664,00						-	60.733.717.561,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase kesesuaian program KUA PPAS dan APBD Persentase kesesuaian program RKPD dan KUA PPAS Persentase pengalokasian kepatuhan anggaran belanja bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketermtuan peraturan perundang-undangan Persentase transparansi ringkasan kebijakan umum anggaran, ringkasan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran, ringkasan dokumen RAPBD, perda APBD, Perkada tentang penjabaran APBD, ringkasan dokumen Rancangan Perubahan APBD, perkada perubahan APBD, dan perkada tentang penjabaran perubahan APBD	-			100 % 100 % 100 % 100 %	851.780.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor	-	938.210.000,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	168.335.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		198.974.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	10.315.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		8.738.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	54.820.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		140.952.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	53.210.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		63.901.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				3 Dokumen	167.218.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		199.312.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				9 Dokumen	172.881.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		218.413.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	88.370.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	SKPD se Kota Bogor		0,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				205 Orang	136.628.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		107.920.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penandatanganan Laporan Realisasi semester pertama APBD dan prognosis pemerintah daerah oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli Persentase penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara tepat waktu Persentase transparansi informasi anggaran Pemerintah Kota Bogor, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor dan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-			100 % 100 % 100 %	364.870.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor	-	372.757.800,00	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	199.635.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		202.500.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				7 Laporan	151.689.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		148.505.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	13.546.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		21.752.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi anggaran kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap APBD Persentase terlaksananya monitoring dan evaluasi investasi daerah	-		50 % 100 %	40.765.507.464,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor	-	59.197.749.761,00		
	5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				6 Laporan	350.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		350.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	7.056.224.422,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		7.047.349.761,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1.711.375.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		1.800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	31.647.508.042,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		50.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-		-	206.900.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor	-	225.000.000,00		
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	206.900.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		225.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Kepatuhan Pensertipikatan Tanah Persentase Capaian Kelengkapan Atribut Peralatan dan Mesin BMD	-		100 % 98,01 %	9.782.595.600,00						-	11.210.913.540,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Aset melalui Pengasuransian atas bangunan dan kendaraan Persentase Pengamanan Aset melalui Pensertipikatan Tanah Persentase tersusunnya laporan BMD semester dan tahunan tepat waktu Persentase tersusunnya RKBMD tepat waktu	-			100 % 39 % 100 % 100 %	9.782.595.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor	-	11.210.913.540,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga														
							Jumlah Standar Harga yang Disusun				9 Dokumen	579.233.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		626.970.938,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	691.689.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		544.345.024,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	7.601.932.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		9.194.979.584,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				8 Laporan	216.499.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		263.537.274,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	357.957.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		388.560.040,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				52 Orang	335.284.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	SKPD se Kota Bogor		192.520.680,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						BADAN PENDAPATAN DAERAH														
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
	5	02				KEUANGAN														
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Inovasi yang Dibangun/Dikembangkan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Bapenda Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai SAKIP Bapenda	-			1 Inovasi/tahun 94,25 Nilai 95 % 83,30 Nilai	52.991.132.256,00						-	54.398.893.312,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Indikator Sasaran Renja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Yang Tepat Waktu	-			100 % 100 %	3.006.826,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Bapenda Kota Bogor	-	11.464.852,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	208.150,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Bapenda Kota Bogor		884.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	2.720.776,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Bapenda Kota Bogor		8.740.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	77.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Bapenda Kota Bogor		1.839.552,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan Secara Tepat Waktu Persentase Realisasi Anggaran Terhadap DPA	-			100 % 100 %	43.024.895.423,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	-	40.516.782.000,00					
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/bulan	42.983.006.023,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan		40.484.108.640,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	468.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan		1.945.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	41.420.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan		30.727.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	2.464.765.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	ASN Bapenda Kota Bogor	-	4.485.362.155,00					
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	39.404.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	ASN Bapenda Kota Bogor		56.298.330,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	328.741.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	ASN Bapenda Kota Bogor		556.098.090,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	58.589.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	ASN Bapenda Kota Bogor		280.152.735,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	115.647.300,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	ASN Bapenda Kota Bogor		165.250.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	908.655.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	ASN Bapenda Kota Bogor		1.282.688.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1.013.728.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	ASN Bapenda Kota Bogor		2.144.874.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	-			100 %	1.816.898.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	ASN Bapenda Kota Bogor	-	3.590.327.700,00	
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	714.295.300,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	ASN Bapenda Kota Bogor		2.339.551.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				72 Unit	141.613.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	ASN Bapenda Kota Bogor		225.841.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				113 Unit	960.989.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	ASN Bapenda Kota Bogor		1.024.935.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	4.259.533.811,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Bapenda Kota Bogor	-	3.498.541.654,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.365.873.906,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Bapenda Kota Bogor		407.484.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.527.158.769,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DANA ALOKASI UMUM (DAU), PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Bapenda Kota Bogor		1.679.881.370,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.366.501.136,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Bapenda Kota Bogor		1.411.176.084,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	-			100 %	1.422.031.996,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Inventaris Bapenda Kota Bogor	-	2.296.414.951,00	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	384.029.951,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Inventaris Bapenda Kota Bogor		435.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				194 Unit	418.885.051,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Inventaris Bapenda Kota Bogor		733.589.173,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	226.655.344,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Inventaris Bapenda Kota Bogor		585.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	392.461.650,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Inventaris Bapenda Kota Bogor		542.825.778,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Target Penerimaan Pajak Daerah Target Penerimaan Retribusi Daerah	-			1.224.732.427.374,00 Rupiah 396.974.657.213,00 Rupiah	2.930.580.552,00						-	8.265.406.776,40	
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Nilai Pajak Daerah Persentase Capaian Nilai Retribusi Daerah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	-			100 % 100 % 1.224.732.427.374,00 Rupiah 396.974.657.213,00 Rupiah	2.930.580.552,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor	-	8.265.406.776,40	
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	87.031.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor		265.864.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	511.555.070,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor		1.850.998.270,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				14 Unit	908.013.582,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB), PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor		3.482.195.976,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	39.280.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor		76.633.260,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	468.735.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor		941.172.160,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				5 Obyek Pajak	241.916.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor		327.812.180,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	40.419.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor		115.812.180,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1 Layanan	58.945.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor		85.079.460,40	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	377.250.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor		547.481.090,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	189.821.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor		535.504.900,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	7.613.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance	Wajib Pajak Daerah Kota Bogor		36.852.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						50.550.662.255,00							27.412.853.840,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						50.550.662.255,00							27.412.853.840,00	
	5	03				KEPEGAWAIAN						47.825.733.255,00							23.282.520.440,00	
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Perangkat Daerah Jumlah Inovasi yang dibangun/ dikembangkan	-			A (89,50) Poin 95% 3,77 Nilai 1 inovasi/tahun	45.654.513.870,00						-	21.075.470.475,00	
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a) Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja di lingkup perangkat daerah b) Nilai Sakip Aspek pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah c) Nilai SAKIP aspek pelaporan kinerja di lingkup perangkat daerah d) Nilai SAKIP aspek evaluasi internal di lingkup perangkat daerah Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi>100) Kepatuhan Pengelolaan Anggaran Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itdda di Lingkup Perangkat Daerah Transparansi pengelolaan keuangan daerah	-			25,5 poin 26,6 Poin 12,9 Poin 23 Poin 1 Inovasi 95 % 100 % 94 %	94.976.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor	-	113.413.700,00	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2.977.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6 Laporan	91.999.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		109.413.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a) Nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja di lingkup perangkat daerah b) Nilai Sakip Aspek pengukuran kinerja di lingkup perangkat daerah c) Nilai SAKIP aspek pelaporan kinerja di lingkup perangkat daerah d) Nilai SAKIP aspek evaluasi internal di lingkup perangkat daerah Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi>100) Kepatuhan Pengelolaan Anggaran Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itdda di Lingkup Perangkat Daerah Transparansi pengelolaan keuangan daerah	-			25,5 Poin 26,6 Poin 12,9 Poin 23 Poin 1 Inovasi 95 % 100 % 94 %	42.508.109.460,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor	-	17.578.619.574,00	
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				95 Orang/bulan	42.436.709.460,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		17.502.299.574,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	71.400.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		76.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM	-			3,8 Poin 3,7 Poin 3,7 Poin 3,8 Poin	1.220.204.790,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor	-	1.581.174.874,00	
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	107.437.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		367.319.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	101.350.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		81.341.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	62.581.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		73.469.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	948.836.290,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		1.059.045.674,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	-			3,8 Poin 3,7 Poin 3,7 Poin 3,8 Poin	425.754.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor	-	498.772.500,00					
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	106.545.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	392.226.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							-				-	360.631.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemerintah Kota Bogor		392.226.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	-			3,8 Poin 3,7 Poin 3,7 Poin 3,8 Poin	748.325.338,00			-	-	ASN Pemerintah Kota Bogor	-	764.066.450,00					
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	333.331.066,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							0				0 0	373.046.546,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Pemerintah Kota Bogor		333.331.066,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	430.735.384,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	375.278.792,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		430.735.384,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif dan standar layanan Rata-rata nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana Rata-rata nilai SKM aspek penanganan pengaduan Rata-rata nilai SKM spek pemenuhan kualitas SDM	-			3,8 Poin 3,7 Poin 3,7 Poin 3,8 Poin	657.142.782,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor	-	539.423.377,00					
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	173.396.354,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	240.201.359,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		173.396.354,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	161.225.423,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				167 Unit	161.225.423,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		161.225.423,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	255.716.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		204.801.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indek Sistem Merit Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan. Indeks Sistem Merit Aspek Promosi Mutasi, Manajemn Kinerja, Disiplin dan Penghargaan Indeks Sistem Merit Aspek Pengembangan Kompetensi Kepegawaian	-			114 nilai 165 nilai 44 nilai	2.171.219.385,00						-	2.207.049.965,00			
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Formasi ASN yang diterima berdasarkan penerimaan Pemerintah Daerah Kota Bogor Persentase CASN yang terseleksi sesuai dengan formasi Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat waktu	-			274 Formasi 95 % 95 %	1.141.013.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Kota Bogor	-	1.150.627.380,00			
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	500.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Kota Bogor		498.876.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi																
							Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				319 Dokumen	29.500.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Kota Bogor		53.740.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	216.807.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Kota Bogor		299.716.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	264.469.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Kota Bogor		266.863.380,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				12 Dokumen	130.235.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Kota Bogor		31.432.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumah PNS yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat tepat waktu Jumlah Pengisian JPT Pratama yang kosong berdasarkan Manajemen Talenta Persentase pegawai yang sudah ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya Persentase PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian penyesuaian Ijazah	-			850 SK 5 Jabatan 80 % 90 %	262.385.785,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor	-	233.857.785,00		
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN													134.541.785,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	183.665.785,00		Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor			
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													99.316.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6 Dokumen	78.720.000,00		Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor			
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapat fasilitasi Pendidikan lanjutan yang memenuhi persyaratan Persentase ASN yang sudah mengikuti Assesment	-			90 % 50 %	612.760.400,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor	-	617.254.800,00	
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center													350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	345.781.200,00		Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor			
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN															
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				65 Orang	266.979.200,00		Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		267.254.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan setiap tahun Persentase ASN yang berkinerja sesuai ekspektasi Persentase ASN yang mendapatkan Hukuman Disiplin	-			254 Orang 95 % 0,1 %	155.060.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor	-	205.310.000,00	
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				5 Laporan	50.000.000,00		Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		78.276.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai															
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				254 Orang	41.520.000,00		Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		49.326.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1607 Orang	63.540.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		77.708.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.724.929.000,00								4.130.333.400,00	
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Sistem Merit Aspek Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Diklat	-			38 Poin	2.724.929.000,00						-	4.130.333.400,00	
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya	-			76,60 %	1.238.608.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor	-	1.482.138.800,00	
	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	11.466.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		30.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				200 Orang	1.227.142.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		1.451.538.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Per Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya	-			1,30 %	1.486.320.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor	-	2.648.194.600,00	
	5	04	02	2.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
							Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		16.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1.486.320.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	ASN Pemerintah Kota Bogor		2.631.994.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						INSPEKTORAT					28.002.630.638,00								0,00	
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					28.002.630.638,00								0,00	
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH					28.002.630.638,00								0,00	
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Jumlah Inovasi yang dibangun atau dikembangkan	-			90.85 Nilai 100 % 89.5 nilai 1 inovasi/tahun	26.903.179.538,00						-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Daerah	-			100 Persen	304.790.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor	-	0,00		
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	104.931.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	199.859.050,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Secara Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi	-			100 Persen	22.245.651.616,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor	-	0,00		
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	22.190.769.616,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	54.882.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	795.864.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor	-	0,00		
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	795.864.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 Persen	1.002.556.734,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor	-	0,00		
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	71.666.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT	
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	51.438.134,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40.135.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	741.599.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	97.718.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Sesuai RKBMD	-			100 Persen	710.034.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor	-	0,00	
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	37.828.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	335.248.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	336.958.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	624.996.871,00			-	-	-	-	0,00	
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	178.521.551,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	446.475.320,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Inspektorat Daerah Berkondisi Baik	-			100 Persen	1.219.284.567,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor	-	0,00	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	249.373.365,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				86 Unit	141.742.828,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	828.168.374,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Inspektorat Daerah Kota Bogor		0,00	INSPEKTORAT
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Persentase nilai evaluasi kinerja internal SAKIP tingkat PD minimal “20”	-			100 Persen 100 Persentase 74,29 Persentase	714.145.200,00						-	0,00	
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi AKIP Persentase Capaian Target Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-			35 Perangkat Daerah 100 %	659.017.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah	-	0,00	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				9 Laporan	124.170.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja														
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	14.528.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	157.643.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal															
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	240.303.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP															
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	122.372.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pengawasan/Pengaduan yang Ditindaklanjuti dengan PDTT	-			100 Persen	55.127.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	0,00		
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian															
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	33.520.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu															
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				2 Laporan	21.607.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT	
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Komponen Struktur dan Proses SPIP Hasil Penjaminan Kualitas oleh APIP Persentase Capaian MCP KPK Pada Komponen Pengawasan APIP Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan pembangunan ZI dengan nilai >75	-			1,119 Nilai 91 Persentase 45,71 persen	385.305.900,00						-	0,00		
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan SPIP, Manajemen Risiko, Monitoring Capaian MCP dan Reformasi Birokrasi Rata-rata Nilai ZI Perangkat Daerah	-			35 Perangkat Daerah 70,46 Nilai	385.305.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah	-	0,00		
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	172.320.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT				
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				6 perangkat daerah	0,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT				
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	92.458.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT				
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1 perangkat daerah	120.527.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		0,00	INSPEKTORAT				
						KECAMATAN BOGOR UTARA																	3.774.745.600,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	3.774.745.600,00	
	7	01				KECAMATAN																	3.774.745.600,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 10)	-			87,59 nilai 95,2 persen 99,27 nilai 1 inovasi/tahun	23.731.765.058,00					-		3.567.245.600,00					
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah	-			100 % 100 % 95.40 % 95,8 %	26.602.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	0,00					
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.603.900,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA				
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	15.998.900,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	-			100 % 95 %	16.073.762.037,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	80.000.000,00					
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	15.987.277.737,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.834.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	79.649.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		80.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	2.702.781.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	2.011.405.600,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.445.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		11.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.029.835.300,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		1.319.201.900,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20.560.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		21.561.100,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	381.360.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		382.360.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20.719.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		20.471.600,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5.668.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		6.811.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	203.193.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	2.133.036.668,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	0,00		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	316.815.216,00		Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.816.221.452,00		Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah berkondisi baik	-			100 %	2.795.581.653,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	1.475.840.000,00		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	176.594.868,00		Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	88.794.785,00		Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		75.840.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	2.530.192.000,00		Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		1.400.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan	-			23 %	261.401.118,00						-	62.500.000,00		
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait persentase jumlah pengajuan layanan yang terlayani	-			1 Laporan 100 %	137.060.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	0,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	137.060.100,00		Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	-			100 %	124.341.018,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	62.500.000,00		
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	119.999.818,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		60.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA	
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	4.341.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		2.500.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 %	519.459.577,00						-	0,00		
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			23 %	519.459.577,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	0,00		
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	344.528.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	65.531.380,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	99.999.397,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA	
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	9.400.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan	-			95 %	103.107.600,00					-	145.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti di tingkat Kecamatan	-			95 %	103.107.600,00			-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	145.000.000,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	103.107.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		145.000.000,00	KECAMATAN BOGOR UTARA
						KELURAHAN TEGAL GUNDIL						1.042.453.100,00							37.975.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.042.453.100,00							37.975.000,00	
	7	01				KECAMATAN						1.042.453.100,00							37.975.000,00	
5	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Hasil SURVEY KEPUASAN Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			87.59 Nilai 95.2 % 99.27 Nilai 1 inovasi/tahun	124.228.100,00					-		30.100.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	124.228.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	30.100.000,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.273.100,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		1.600.000,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.133.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		17.000.000,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.156.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		5.000.000,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	94.080.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6.585.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		6.500.000,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia,disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musyawarah musrenbang kelurahan	-			23 %	918.225.000,00						-	7.875.000,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	918.225.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	7.875.000,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	8.325.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		7.875.000,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	319.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	590.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN TEGAL GUNDIL				
						KELURAHAN BANTARJATI																	113.649.600,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																	113.649.600,00	
	7	01				KECAMATAN																	113.649.600,00	
7	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Hasil SURVEY KEPUASAN Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			87,59 nilai 95,2 persen 99,27 nilai 1 inovasi/tahun	108.031.800,00					-	105.649.600,00						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	108.031.800,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	105.649.600,00					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		4.000.000,00	KELURAHAN BANTARJATI	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.168.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		11.212.000,00	KELURAHAN BANTARJATI	
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	6.254.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		6.500.000,00	KELURAHAN BANTARJATI	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	87.771.900,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		80.000.000,00	KELURAHAN BANTARJATI	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.837.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		3.937.600,00	KELURAHAN BANTARJATI	
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia,disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musyawarah musrenbang kelurahan	-			23 %	774.798.360,00						-	8.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	774.798.360,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	8.000.000,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	7.250.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		8.000.000,00	KELURAHAN BANTARJATI	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	318.748.160,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarjati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN BANTARJATI	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	448.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Bantarljati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN BANTARJATI	
						KELURAHAN CIBULUH						758.270.097,00							437.031.897,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						758.270.097,00							437.031.897,00		
	7	01				KECAMATAN						758.270.097,00							437.031.897,00		
9	7	7	01	01		PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH Kepatuhan Pengeloaan Keuangan Nilai Hasil SURVEY KEPUASAN Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				87,59 nilai 95,2 persen 99,27 nilai 1 inovasi/tahun	122.395.700,00					-		98.757.500,00		
	7		01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	122.395.700,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	98.757.500,00		
	7		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.153.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		3.081.300,00	KELURAHAN CIBULUH
	7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.248.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		8.248.400,00	KELURAHAN CIBULUH
	7		01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.651.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		2.849.000,00	KELURAHAN CIBULUH
	7		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	105.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		79.770.000,00	KELURAHAN CIBULUH
	7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.742.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		4.808.800,00	KELURAHAN CIBULUH
10	7	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia,disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musyawarah musrenbang kelurahan	-			23 %	635.874.397,00					-		338.274.397,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
																Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	635.874.397,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	338.274.397,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	7.750.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		7.750.400,00	KELURAHAN CIBULUH				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					3 Unit	330.523.997,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		330.523.997,00	KELURAHAN CIBULUH				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3 Pokmas / Ormas	297.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cibuluh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN CIBULUH				
						KELURAHAN KEDUNG HALANG														786.539.400,00			786.239.400,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN														786.539.400,00			786.239.400,00	
	7	01				KECAMATAN														786.539.400,00			786.239.400,00	
11	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengeloaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			87,59 nilai 95,2 persen 99,27 nilai 1 inovasi/tahun	110.639.600,00					-		110.639.600,00					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	110.639.600,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	110.639.600,00					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1.456.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		1.456.000,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.840.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		7.840.000,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.572.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		2.572.000,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	95.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		95.250.000,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.521.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		3.521.600,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG				
12	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia,disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musyawarah musrenbang kelurahan	-			23 %	675.899.800,00						-	675.599.800,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	675.899.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	675.599.800,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	7.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		7.200.000,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	229.499.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		229.499.800,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	439.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Kedung Halang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		438.900.000,00	KELURAHAN KEDUNG HALANG
						KELURAHAN CIPARIGI						779.396.600,00							854.048.900,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						779.396.600,00							854.048.900,00	
	7	01				KECAMATAN						779.396.600,00							854.048.900,00	
13	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengeloan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				87,59 nilai 95,2 persen 99,27 nilai 1 inovasi/tahun	112.347.500,00					-		41.498.900,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	112.347.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	41.498.900,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.502.100,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		3.503.700,00	KELURAHAN CIPARIGI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.249.900,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		18.255.200,00	KELURAHAN CIPARIGI
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.494.300,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		6.500.000,00	KELURAHAN CIPARIGI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.040.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		8.040.000,00	KELURAHAN CIPARIGI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.061.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		5.200.000,00	KELURAHAN CIPARIGI
14	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia,disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musyawarah musrenbang kelurahan	-			23 %	667.049.100,00					-		812.550.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
																Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	667.049.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	812.550.000,00								
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																6.750.000,00	KELURAHAN CIPARIGI				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	6.750.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait										
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					3 Unit	229.499.100,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		375.000.000,00	KELURAHAN CIPARIGI							
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																					
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3 Pokmas / Ormas	430.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciparigi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		430.800.000,00	KELURAHAN CIPARIGI							
						KELURAHAN CILUAR																		876.400.000,00			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																			876.400.000,00		
	7	01				KECAMATAN																				876.400.000,00	
15	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				87,59 nilai 95,2 persen 99,27 nilai 1 inovasi/tahun	145.064.500,00					-			147.400.000,00							
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	145.064.500,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	147.400.000,00								
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																					
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	3.060.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		3.200.000,00	KELURAHAN CILUAR							
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.912.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		18.000.000,00	KELURAHAN CILUAR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.100.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		1.200.000,00	KELURAHAN CILUAR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	118.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		120.000.000,00	KELURAHAN CILUAR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.792.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		5.000.000,00	KELURAHAN CILUAR
16	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia,disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musyawarah musrenbang kelurahan	-			23 %	502.700.000,00						-	729.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	502.700.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	729.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		9.000.000,00	KELURAHAN CILUAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	200.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		350.000.000,00	KELURAHAN CILUAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	293.700.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Ciluar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		370.000.000,00	KELURAHAN CILUAR				
						KELURAHAN TANAH BARU						804.585.699,00						877.122.800,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						804.585.699,00							877.122.800,00				
	7	01				KECAMATAN						804.585.699,00							877.122.800,00				
17	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan			87,59 nilai 95,2 persen 99,27 nilai 1 inovasi/tahun	117.660.900,00						-	130.362.400,00					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-		100 %	117.660.900,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	130.362.400,00					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.301.500,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		2.000.000,00	KELURAHAN TANAH BARU			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.155.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		15.000.000,00	KELURAHAN TANAH BARU			
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	842.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		12.000.000,00	KELURAHAN TANAH BARU			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	96.790.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		96.790.000,00	KELURAHAN TANAH BARU			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.572.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		4.572.400,00	KELURAHAN TANAH BARU			
18	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia,disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musyawarah musrenbang kelurahan	-		23 %	686.924.799,00						-	746.760.400,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
																Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	686.924.799,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	746.760.400,00				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	7.425.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		7.425.000,00	KELURAHAN TANAH BARU			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	229.499.799,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		260.535.400,00	KELURAHAN TANAH BARU			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3 Pokmas / Ormas	450.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		478.800.000,00	KELURAHAN TANAH BARU			
						KELURAHAN CIMAHPAR																823.680.400,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																823.680.400,00	
	7	01				KECAMATAN																823.680.400,00	
19	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengeloaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				87,59 nilai 95,2 persen 99,27 nilai 1 inovasi/tahun	120.842.100,00					-		121.980.400,00				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	120.842.100,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	121.980.400,00				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1.040.600,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		1.300.000,00	KELURAHAN CIMAHPAR			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.129.400,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		11.080.400,00	KELURAHAN CIMAHPAR				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.978.900,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		5.000.000,00	KELURAHAN CIMAHPAR				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	101.100.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		101.100.000,00	KELURAHAN CIMAHPAR				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.593.200,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		3.500.000,00	KELURAHAN CIMAHPAR				
20	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia,disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musyawarah musrenbang kelurahan	-			23 %	651.499.800,00						-	701.700.000,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 %	651.499.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	701.700.000,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6.300.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		6.500.000,00	KELURAHAN CIMAHPAR				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	199.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		250.000.000,00	KELURAHAN CIMAHPAR				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	445.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Cimahpar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		445.200.000,00	KELURAHAN CIMAHPAR
					KECAMATAN BOGOR SELATAN						45.162.525.295,00							46.385.400.674,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						44.022.482.593,00							45.143.596.074,00	
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						44.022.482.593,00							45.143.596.074,00	
1	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengeloaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	44.022.482.593,00					-		45.143.596.074,00	
	2	13	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah	-			100 % 100 % 95,5 % 95,81 %	33.087.320,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan Bogor Selatan	-	40.429.000,00	
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	31.087.520,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan Bogor Selatan		34.663.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan Bogor Selatan		5.766.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	-		125 Orang	28.769.979.480,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan Bogor Selatan	-	28.295.929.590,00	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/bulan	28.698.738.480,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan Bogor Selatan		28.243.179.590,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	71.241.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan Bogor Selatan		52.750.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-		100 %	783.575.330,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan	-	1.243.138.100,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.284.330,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan		30.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	63.849.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan		315.464.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	26.342.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan		67.502.700,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	392.610.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan		392.360.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	40.387.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan		75.338.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	13.080.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan		13.946.400,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	218.023.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan		348.527.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 %	8.405.807.995,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aoartur Kecamatan Bogor Selatan	-	9.682.179.000,00	
	2	13	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	397.789.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aoartur Kecamatan Bogor Selatan		407.179.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	363.034.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aoartur Kecamatan Bogor Selatan		75.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	305.830.100,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aoartur Kecamatan Bogor Selatan		300.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	1.299.244.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aoartur Kecamatan Bogor Selatan		900.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.039.910.295,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aoartur Kecamatan Bogor Selatan		8.000.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	2.723.178.944,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan Bogor Selatan	-	3.021.920.384,00	
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	443.473.856,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan Bogor Selatan		378.133.856,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.279.705.088,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan Bogor Selatan		2.643.786.528,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	-			100 %	3.306.853.524,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan Bogor Selatan	-	2.860.000.000,00	
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	224.751.324,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan Bogor Selatan		250.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	120.042.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan Bogor Selatan		110.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	2.962.060.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kecamatan Bogor Selatan		2.500.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.140.042.702,00							1.241.804.600,00	
	7	01				KECAMATAN						1.140.042.702,00							1.241.804.600,00	
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan	-			23 %	257.729.700,00						-	261.804.600,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkaltansi Vertikal Terkait	-			1 Laporan	138.994.600,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan	-	138.503.600,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	138.994.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan		138.503.600,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Jenis Pelayanan yang dilaksanakan Masyarakat di Kecamatan	-			100 %	118.735.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan	-	123.301.000,00	
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	118.735.100,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan		123.301.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN	
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 Persen	704.610.002,00					-		830.000.000,00		
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			100 %	704.610.002,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan	-	830.000.000,00		
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	495.453.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan		500.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN	
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	49.839.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan		185.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	139.318.002,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan		120.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN	
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	20.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kecamatan Bogor Selatan		25.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN	
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	-			95 %	177.703.000,00					-		150.000.000,00		
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	-			95 %	177.703.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di 16 Kelurahan Kecamatan Bogor Selatan	-	150.000.000,00		
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	177.703.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di 16 Kelurahan Kecamatan Bogor Selatan		150.000.000,00	KECAMATAN BOGOR SELATAN	
						KELURAHAN BATUTULIS						755.000.000,00								830.500.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						82.000.000,00								93.500.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						82.000.000,00								93.500.000,00	
5	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	82.000.000,00					-		93.500.000,00		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 Persen	82.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Batutulis	-	93.500.000,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Batutulis		1.000.000,00	KELURAHAN BATUTULIS	
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Batutulis		15.000.000,00	KELURAHAN BATUTULIS	
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Batutulis		5.000.000,00	KELURAHAN BATUTULIS	
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Batutulis		70.000.000,00	KELURAHAN BATUTULIS	
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Batutulis		2.500.000,00	KELURAHAN BATUTULIS	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN														737.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN														737.000.000,00	
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 Persen	673.000.000,00					-	737.000.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 % 100 %	673.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Batutulis	-	737.000.000,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Batutulis		12.000.000,00	KELURAHAN BATUTULIS	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	403.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat di Kelurahan Batutulis		450.000.000,00	KELURAHAN BATUTULIS	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	264.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Batu Tulis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Batutulis		275.000.000,00	KELURAHAN BATUTULIS	
						KELURAHAN BOJONGKERTA														704.500.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														92.500.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														92.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
7	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	82.000.000,00						-		92.500.000,00				
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	82.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Bojongkerta	-	92.500.000,00					
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00		Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Bojongkerta		0,00	KELURAHAN BOJONGKERTA			
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00		Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Bojongkerta		15.000.000,00	KELURAHAN BOJONGKERTA			
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00		Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Bojongkerta		5.000.000,00	KELURAHAN BOJONGKERTA			
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00		Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Bojongkerta		70.000.000,00	KELURAHAN BOJONGKERTA			
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00		Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Bojongkerta		2.500.000,00	KELURAHAN BOJONGKERTA			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						566.400.000,00							612.000.000,00					
	7	01				KECAMATAN						566.400.000,00							612.000.000,00					
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 Persen	566.400.000,00						-		612.000.000,00				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 % 100 %	566.400.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Bojongkerta	-	612.000.000,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00		Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Bojongkerta		12.000.000,00	KELURAHAN BOJONGKERTA			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	378.000.000,00		Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat di Kelurahan Bojongkerta		400.000.000,00	KELURAHAN BOJONGKERTA			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	182.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bojongkerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Bojongkerta		200.000.000,00	KELURAHAN BOJONGKERTA
						KELURAHAN BONDONGAN						937.800.000,00							930.500.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						86.310.700,00							93.500.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						86.310.700,00							93.500.000,00	
9	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	86.310.700,00					-		93.500.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	86.310.700,00			-	-	Aparatur di Kelurahan Bondongan	-	93.500.000,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur di Kelurahan Bondongan		1.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.017.700,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Bondongan		15.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Bondongan		5.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.275.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Bondongan		70.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.018.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Bondongan		2.500.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						851.489.300,00							837.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						851.489.300,00							837.000.000,00	
10	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 %	851.489.300,00					-		837.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 % 100 %	851.489.300,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kelurahan Bondongan	-	837.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kelurahan Bondongan		12.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	348.689.300,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Kelurahan Bondongan		350.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	496.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Bondongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kelurahan Bondongan		475.000.000,00	KELURAHAN BONDONGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					KELURAHAN CIKARET						777.400.000,00							820.876.000,00					
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						82.000.000,00							83.876.000,00					
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						82.000.000,00							83.876.000,00					
11	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengeloan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	82.000.000,00						-	83.876.000,00					
	2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	82.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Cikaret	-	83.876.000,00					
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															1.376.000,00	KELURAHAN CIKARET	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.376.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Cikaret							
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															15.000.000,00	KELURAHAN CIKARET	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Cikaret							
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															5.000.000,00	KELURAHAN CIKARET	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.624.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Cikaret							
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															60.000.000,00	KELURAHAN CIKARET	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Cikaret							
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															2.500.000,00	KELURAHAN CIKARET	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Cikaret							
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						695.400.000,00							737.000.000,00					
	7	01			KECAMATAN						695.400.000,00							737.000.000,00					
12	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan yang aktif Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			100 Persen 23 %	695.400.000,00						-	737.000.000,00					
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 %	695.400.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Cikaret	-	737.000.000,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															12.000.000,00	KELURAHAN CIKARET	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Cikaret							
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															350.000.000,00	KELURAHAN CIKARET	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	303.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat di Kelurahan Cikaret							
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	386.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cikaret	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Cikaret		375.000.000,00	KELURAHAN CIKARET			
					KELURAHAN CIPAKU						749.000.000,00								805.500.000,00			
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						82.028.200,00								93.500.000,00			
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						82.028.200,00								93.500.000,00			
13	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-		85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	82.028.200,00						-	93.500.000,00				
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-		100 %	82.028.200,00			-	-	Aparatur di Kelurahan Cipaku	-	93.500.000,00				
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	576.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur di Kelurahan Cipaku		1.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU			
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.451.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Cipaku		15.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU			
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Cipaku		5.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU			
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Cipaku		70.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU			
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Cipaku		2.500.000,00	KELURAHAN CIPAKU			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						666.971.800,00								712.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN						666.971.800,00								712.000.000,00		
14	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-		23 Persen	666.971.800,00						-	712.000.000,00				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		100 % 100 %	666.971.800,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Cipaku	-	712.000.000,00				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Cipaku		12.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	252.971.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat di Kelurahan Cipaku		300.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	408.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Cipaku	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Cipaku		400.000.000,00	KELURAHAN CIPAKU			
					KELURAHAN EMPANG						886.600.000,00							1.376.500.000,00				
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						82.567.800,00							99.500.000,00				
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						82.567.800,00							99.500.000,00				
15	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-		85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	82.567.800,00						-	99.500.000,00				
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-		100 %	82.567.800,00			-	-	Aparatur di Kelurahan Empang	-	99.500.000,00				
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															2.000.000,00	KELURAHAN EMPANG
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.200.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur di Kelurahan Empang		2.000.000,00	KELURAHAN EMPANG			
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															15.000.000,00	KELURAHAN EMPANG
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.900.800,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Empang		15.000.000,00	KELURAHAN EMPANG			
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															5.000.000,00	KELURAHAN EMPANG
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.799.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Empang		5.000.000,00	KELURAHAN EMPANG			
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															75.000.000,00	KELURAHAN EMPANG
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.495.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Empang		75.000.000,00	KELURAHAN EMPANG			
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															2.500.000,00	KELURAHAN EMPANG
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.172.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Empang		2.500.000,00	KELURAHAN EMPANG			
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						804.032.200,00							1.277.000.000,00				
	7	01			KECAMATAN						804.032.200,00							1.277.000.000,00				
16	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-		23 Persen	804.032.200,00						-	1.277.000.000,00				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		100 % 100 %	804.032.200,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Empang	-	1.277.000.000,00				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															12.000.000,00	KELURAHAN EMPANG
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Empang		12.000.000,00	KELURAHAN EMPANG			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															650.000.000,00	KELURAHAN EMPANG
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	152.432.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat di Kelurahan Empang		650.000.000,00	KELURAHAN EMPANG			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	645.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Empang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Empang		615.000.000,00	KELURAHAN EMPANG	
						KELURAHAN GENTENG						572.600.000,00							656.500.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						82.979.400,00							94.500.000,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						82.979.400,00							94.500.000,00		
17	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	82.979.400,00						-	94.500.000,00		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	82.979.400,00			-	-	Aparatur di Kelurahan Genteng	-	94.500.000,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.200.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur di Kelurahan Genteng		2.000.000,00	KELURAHAN GENTENG	
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Genteng		15.000.000,00	KELURAHAN GENTENG	
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.862.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Genteng		5.000.000,00	KELURAHAN GENTENG	
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.610.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Genteng		70.000.000,00	KELURAHAN GENTENG	
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.306.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur di Kelurahan Genteng		2.500.000,00	KELURAHAN GENTENG	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						489.620.600,00							562.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN						489.620.600,00							562.000.000,00		
18	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23%	489.620.600,00						-	562.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 % 100 %	489.620.600,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Genteng	-	562.000.000,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Genteng		12.000.000,00	KELURAHAN GENTENG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	252.020.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat di Kelurahan Genteng		300.000.000,00	KELURAHAN GENTENG	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	231.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Genteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Genteng		250.000.000,00	KELURAHAN GENTENG	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					KELURAHAN HARJASARI						642.200.000,00							705.555.000,00				
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						82.000.000,00							93.555.000,00				
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						82.000.000,00							93.555.000,00				
19	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	82.000.000,00						-	93.555.000,00				
	2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	82.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Harjasari	-	93.555.000,00				
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															1.055.000,00	KELURAHAN HARJASARI
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.055.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Harjasari		1.055.000,00				
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															15.000.000,00	KELURAHAN HARJASARI
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Harjasari		15.000.000,00				
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															5.000.000,00	KELURAHAN HARJASARI
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.945.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Harjasari		5.000.000,00				
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															70.000.000,00	KELURAHAN HARJASARI
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Harjasari		70.000.000,00				
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															2.500.000,00	KELURAHAN HARJASARI
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Harjasari		2.500.000,00				
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						560.200.000,00							612.000.000,00				
	7	01			KECAMATAN						560.200.000,00							612.000.000,00				
20	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 Porsen	560.200.000,00						-	612.000.000,00				
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 % 100 %	560.200.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Harjasari	-	612.000.000,00				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															12.000.000,00	KELURAHAN HARJASARI
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Harjasari		12.000.000,00				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															300.000.000,00	KELURAHAN HARJASARI
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	253.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat di Kelurahan Harjasari		300.000.000,00				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional					Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	301.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Harjasari		300.000.000,00	KELURAHAN HARJASARI		
						KELURAHAN KERTAMAYA					722.200.000,00							784.500.000,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					82.000.000,00							92.500.000,00			
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					82.000.000,00							92.500.000,00			
21	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-		85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	82.000.000,00					-		92.500.000,00			
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-		100 %	82.000.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Kertamaya	-	92.500.000,00			
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Kertamaya		15.000.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA		
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Harjasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Kertamaya		5.000.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA		
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Kertamaya		70.000.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA		
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Kertamaya		2.500.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					640.200.000,00							692.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN					640.200.000,00							692.000.000,00			
22	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-		23%	640.200.000,00					-		692.000.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-		100 % 100 %	640.200.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat diKelurahan Kertamaya	-	692.000.000,00			
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat diKelurahan Kertamaya		12.000.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	453.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat diKelurahan Kertamaya		480.000.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	181.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Kertamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat diKelurahan Kertamaya		200.000.000,00	KELURAHAN KERTAMAYA		
						KELURAHAN LAWANG GINTUNG					619.000.000,00							660.500.000,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					85.888.700,00							95.500.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						85.888.700,00							95.500.000,00					
23	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	85.888.700,00					-	95.500.000,00						
	2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	85.888.700,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Lawanggingtung	-	95.500.000,00					
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.210.900,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggingtung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Lawanggingtung		3.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG				
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.158.500,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggingtung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Lawanggingtung		15.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG				
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.010.700,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggingtung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Lawanggingtung		5.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG				
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	67.385.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggingtung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Lawanggingtung		70.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG				
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.123.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggingtung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Lawanggingtung		2.500.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG				
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						533.111.300,00							565.000.000,00					
	7	01			KECAMATAN						533.111.300,00							565.000.000,00					
24	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23%	533.111.300,00					-	565.000.000,00						
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 % 100 %	533.111.300,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Lawanggingtung	-	565.000.000,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	5.326.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggingtung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Lawanggingtung		12.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	299.784.700,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggingtung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat di Kelurahan Lawanggingtung		303.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	228.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Lawanggingtung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Lawanggingtung		250.000.000,00	KELURAHAN LAWANG GINTUNG				
					KELURAHAN MUARASARI						709.400.000,00							784.500.000,00					
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						82.000.000,00							92.500.000,00					
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						82.000.000,00							92.500.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
25	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	82.000.000,00						-	92.500.000,00					
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	82.000.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Muarasari	-	92.500.000,00					
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Muarasari		15.000.000,00	KELURAHAN MUARASARI				
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Muarasari		5.000.000,00	KELURAHAN MUARASARI				
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Muarasari		70.000.000,00	KELURAHAN MUARASARI				
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Muarasari		2.500.000,00	KELURAHAN MUARASARI				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						627.400.000,00							692.000.000,00					
	7	01				KECAMATAN						627.400.000,00							692.000.000,00					
26	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23%	627.400.000,00						-	692.000.000,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 % 100 %	627.400.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Muarasari	-	692.000.000,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Muarasari		12.000.000,00	KELURAHAN MUARASARI				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	403.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat di Kelurahan Muarasari		450.000.000,00	KELURAHAN MUARASARI				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	218.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Muarasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Muarasari		230.000.000,00	KELURAHAN MUARASARI				
						KELURAHAN MULYAHARJA						804.400.000,00							836.500.000,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						83.000.000,00							94.500.000,00					
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						83.000.000,00							94.500.000,00					
27	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	83.000.000,00						-	94.500.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	83.000.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Mulyaharja	-	94.500.000,00					
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Mulyaharja		2.000.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA				
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Mulyaharja		15.000.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA				
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Mulyaharja		5.000.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA				
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Mulyaharja		70.000.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA				
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Mulyaharja		2.500.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						721.400.000,00							742.000.000,00					
	7	01				KECAMATAN						721.400.000,00							742.000.000,00					
28	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 Persen	721.400.000,00						-	742.000.000,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 % 100 %	721.400.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat diKelurahan Mulyaharja	-	742.000.000,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat diKelurahan Mulyaharja		12.000.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	353.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat diKelurahan Mulyaharja		380.000.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	362.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Mulyaharja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat diKelurahan Mulyaharja		350.000.000,00	KELURAHAN MULYAHARJA				
						KELURAHAN PAKUAN						555.375.000,00							656.500.000,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						81.975.000,00							94.500.000,00					
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						81.975.000,00							94.500.000,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	81.975.000,00						-	94.500.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	81.975.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Pakuan	-	94.500.000,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.200.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Pakuan		2.000.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Pakuan		15.000.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.799.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Pakuan		5.000.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	64.975.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Pakuan		70.000.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Pakuan		2.500.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						473.400.000,00							562.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						473.400.000,00							562.000.000,00	
30	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 Persen	473.400.000,00						-	562.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 %	473.400.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat diKelurahan Pakuan	-	562.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat diKelurahan Pakuan		12.000.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	303.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat diKelurahan Pakuan		350.000.000,00	KELURAHAN PAKUAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	164.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pakuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat diKelurahan Pakuan		200.000.000,00	KELURAHAN PAKUAN
						KELURAHAN PAMOYANAN						581.800.000,00							654.500.000,00	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						84.557.100,00							92.500.000,00	
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						84.557.100,00							92.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	84.557.100,00						-	92.500.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	84.557.100,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Pamoyanan	-	92.500.000,00	
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.179.900,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Pamoyanan		15.000.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.964.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Pamoyanan		5.000.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Pamoyanan		70.000.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.413.200,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Pamoyanan		2.500.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						497.242.900,00							562.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						497.242.900,00							562.000.000,00	
32	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 Persen	497.242.900,00						-	562.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 % undefined 100 %	497.242.900,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Pamoyanan	-	562.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	5.326.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Pamoyanan		12.000.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	151.116.300,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	Masyarakat di Kelurahan Pamoyanan		200.000.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	340.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Pamoyanan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Pamoyanan		350.000.000,00	KELURAHAN PAMOYANAN
						KELURAHAN RANCAMAYA						736.600.000,00							805.609.600,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						82.000.000,00							93.609.600,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						82.000.000,00							93.609.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	82.000.000,00						-	93.609.600,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	82.000.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Rancamaya	-	93.609.600,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.109.600,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Rancamaya		1.109.600,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Rancamaya		15.000.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.890.400,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Rancamaya		5.000.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Rancamaya		70.000.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Rancamaya		2.500.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						654.600.000,00							712.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN						654.600.000,00							712.000.000,00	
34	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 Persen	654.600.000,00						-	712.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 % 100 %	654.600.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Rancamaya	-	712.000.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Rancamaya		12.000.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	453.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat di Kelurahan Rancamaya		475.000.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	195.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Rancamaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di Kelurahan Rancamaya		225.000.000,00	KELURAHAN RANCAMAYA
						KELURAHAN RANGGAMEKAR						666.200.000,00							711.500.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						83.341.000,00							94.500.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						83.341.000,00							94.500.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
35	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				85,95 nilai 95,1 persen 91,5 nilai 1 inovasi/tahun	83.341.000,00						-	94.500.000,00		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	83.341.000,00			-	-	Aparatur diKelurahan Ranggamekar	-	94.500.000,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.213.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur diKelurahan Ranggamekar		2.000.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR	
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.335.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Ranggamekar		15.000.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR	
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.787.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Ranggamekar		5.000.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR	
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Ranggamekar		70.000.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR	
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.006.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur diKelurahan Ranggamekar		2.500.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						582.859.000,00							617.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN						582.859.000,00							617.000.000,00		
36	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 Persen	582.859.000,00						-	617.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 % 100 %	582.859.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat diKelurahan Ranggamekar	-	617.000.000,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat diKelurahan Ranggamekar		12.000.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	251.659.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat diKelurahan Ranggamekar		275.000.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	325.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Selatan, Ranggamekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat diKelurahan Ranggamekar		330.000.000,00	KELURAHAN RANGGAMEKAR	
						KECAMATAN BOGOR TIMUR						22.932.652.628,00							0,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN															
	7	01				KECAMATAN						22.932.652.628,00								0,00	
249	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				88,9 Nilai 95,1 % 91,9 Nilai 1 inovasi/tahun	22.251.514.379,00						-	0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran kegiatan lingkup Perangkat Daerah Persentase Realisasi Fisik Kegiatan Lingkup Perangkat Daerah	-			100 Persentase 100 Persentase 95,45 Persentase 95,81 Persentase	209.718.250,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	11.138.950,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	198.579.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan				95 Persentase 100 Persentase	13.400.147.365,00								
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	13.286.297.465,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	13.720.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	100.129.100,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 Persentase	3.279.366.724,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.402.900,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.268.287.424,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	18.454.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	477.431.300,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40.996.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR	
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	11.534.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	456.260.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persentase	1.563.159.798,00							0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	285.476.470,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.277.683.328,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah ber kondisi baik				100 Persentase	3.799.122.242,00							0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	294.570.242,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR	
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	44.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR	
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	3.460.302.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR	
250	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang KecamatanPersentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan	-			23 Persentase	207.360.014,00						-	0,00		
						-															
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Jumlah Pengajuan layanan yang terlayani	-			100 Persentase	46.509.200,00			-	-	-	-	0,00		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	46.509.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	-			100 Persentase	160.850.814,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
																Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																				
						umlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					1 Dokumen	149.622.014,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR						
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
						umlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	11.228.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR						
251	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	400.204.035,00					-		0,00							
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	ersentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100 Persentase	400.204.035,00			-	-	-	-	0,00							
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan					1 Lembaga Kemasyarakatan	148.802.087,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR						
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya					1 Lembaga Kemasyarakatan	51.391.744,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR						
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					12 Laporan	143.521.341,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR						
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																			0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					12 Laporan	56.488.863,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR						
252	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan				95%	73.574.200,00							0							
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	-			95 Persentase	73.574.200,00			-	-	-	-	0,00							
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					12 Laporan	73.574.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR TIMUR						
						KELURAHAN BARANANGSIANG						1.217.465.000,00							0,00							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.217.465.000,00							0,00							
	7	01				KECAMATAN																				
253	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				88,9 Nilai 95,1 % 91,9 Nilai 1 inovasi/tahun	117.670.400,00					-		0,00							
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah				100 Persentase	117.670.400,00														
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	4.692.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.973.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KELURAHAN BARANANGSIANG				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.183.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN BARANANGSIANG				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	103.290.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN BARANANGSIANG				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.531.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN BARANANGSIANG				
254	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	1.099.794.600,00							0,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 Persentase 100 Persentase	1.099.794.600,00			-	-	-	-	0,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	7.671.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN BARANANGSIANG				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	625.473.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		0,00	KELURAHAN BARANANGSIANG				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	466.650.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Baranangsiang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN BARANANGSIANG				
						KELURAHAN SUKASARI						906.555.000,00							0,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						906.555.000,00							0,00					
	7	01				KECAMATAN																		
255	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				88,9 Nilai 95,1 % 91,9 Nilai 1 inovasi/tahun	101.091.000,00					-		0,00					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah				100 Persentase	101.091.000,00												
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.008.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.321.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KELURAHAN SUKASARI				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.262.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKASARI				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	81.620.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKASARI				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.878.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKASARI
256	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	805.464.000,00							0	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 Persentase 100 Persentase	805.464.000,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3.864.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKASARI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	570.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKASARI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	231.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sukasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKASARI
							KELURAHAN KATULAMPA					1.661.699.299,00							0,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN					1.661.699.299,00							0,00	
	7	0					KECAMATAN													
# # #	7	0	0	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan			88,9 Nilai 95,1 % 91,9 Nilai 1 inovasi/tahun	119.097.400,00						-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah				100 Persentase	119.097.400,00								
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.251.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.504.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KELURAHAN KATULAMPA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.817.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KATULAMPA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	103.835.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KATULAMPA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.688.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KATULAMPA
258	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	1.542.601.899,00								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 Persentase 100 Persentase	1.542.601.899,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	11.744.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KATULAMPA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	788.379.799,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		0,00	KELURAHAN KATULAMPA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	742.477.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Katulampa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KATULAMPA
						KELURAHAN TAJUR						481.707.300,00							0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						481.707.300,00							0,00	
	7	01				KECAMATAN														
259	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				88,9 Nilai 95,1 % 91,9 Nilai 1 inovasi/tahun	102.187.100,00					-	0,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	ersentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah				100 Persentase	102.187.100,00								
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.328.700,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.714.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KELURAHAN TAJUR
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.592.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TAJUR
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	92.010.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TAJUR
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	541.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TAJUR
260	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	379.520.200,00								
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 Persentase 100 Persentase	379.520.200,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	8.560.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TAJUR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	207.759.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		0,00	KELURAHAN TAJUR					
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	163.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TAJUR					
							KELURAHAN SINDANGGRASA					937.979.300,00							0,00						
	7						UNSUR KEWILAYAHAN					937.979.300,00							0,00						
	7	01					KECAMATAN												0,00						
261	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan			88,9 Nilai 95,1 % 91,9 Nilai 1 inovasi/tahun	114.779.300,00						-	0,00						
	7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah			100 Persentase	114.779.300,00													
	7	01	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.399.500,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)											
	7	01	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.609.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KELURAHAN SINDANGGRASA					
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.262.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SINDANGGRASA					
	7	01	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	87.110.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SINDANGGRASA					
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.398.400,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SINDANGGRASA					
262	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan			23%	823.200.000,00													
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		100 Persentase 100 Persentase	823.200.000,00			-	-	-	-	0,00						
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	8.157.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SINDANGGRASA					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	486.243.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		0,00	KELURAHAN SINDANGGRASA					
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	328.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangrasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SINDANGGRASA					
							KELURAHAN SINDANGSARI					758.050.100,00							0,00						
	7						UNSUR KEWILAYAHAN					758.050.100,00							0,00						
	7	01					KECAMATAN												0,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
263	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				88,9 Nilai 95,1 % 91,9 Nilai 1 inovasi/tahun	101.331.100,00						-	0,00				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 Persentase	101.331.100,00											
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	827.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					5.089.600,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KELURAHAN SINDANGSARI			
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.483.900,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SINDANGSARI			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	92.850.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SINDANGSARI			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.079.800,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SINDANGSARI			
264	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	656.719.000,00											
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 Persentase 100 Persentase	656.719.000,00			-	-	-	-	0,00				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga K emasyarakat an	10.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							umlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	43.769.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							umlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	202.950.000,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Sindangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									
						KECAMATAN BOGOR BARAT							40.680.659.845,62						86.904.400,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							40.680.659.845,62						86.904.400,00				
	7	01				KECAMATAN																	
265	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	39.813.877.839,62						-	35.000.000,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah	-			100 % 100 % 95,40 % 95,80 %	13.449.400,00			-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2.961.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	paratur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait			95 % 100	29.473.100.019,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				132 Orang/bulan		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan									
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	69.966.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100 Persentase									
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.806.300,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							umlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	101.864.200,00								
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							umlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	30.150.600,00								
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	331.025.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.588.706,62	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT				
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	26.160.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		35.000.000,00	KECAMATAN BOGOR BARAT				
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	309.720.030,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait							
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 %	5.166.245.800,00			-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	0,00					
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.127.939.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT				
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Mebel yang Disediakan				1 unit	768.201.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT				
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	798.253.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT				
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2.471.852.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	2.925.946.779,00			-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	0,00					
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	428.875.731,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT				
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.497.071.048,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah ber kondisi baik	-			100 %	1.389.820.605,00			-	-	Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT				
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	177.504.521,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)			Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait			KECAMATAN BOGOR BARAT				
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				120 Unit	184.830.084,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait			KECAMATAN BOGOR BARAT				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	1.027.486.000,00		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait			KECAMATAN BOGOR BARAT			
266	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan	-			23 %	146.433.202,00					-		51.904.400,00				
						-																	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-			1 Laporan	58.151.100,00			-	-	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat	-		51.904.400,00	KECAMATAN BOGOR BARAT		
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 Laporan	58.151.100,00		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat			51.904.400,00	KECAMATAN BOGOR BARAT		
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase jenis Pelayanan yang dilaksanakan Masyarakat di Kecamatan (7 pelayanan)				100%	88.282.102,00							0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT			
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			1 Dokumen	79.429.702,00		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	8.852.400,00		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT			
267	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23%	566.822.404,00					-		0,00				
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			100 %	566.822.404,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat	-	0,00				
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	403.509.109,00		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT		
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							umlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			1 Lembaga Kemasyarakatan	100.180.900,00		Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat			KECAMATAN BOGOR BARAT			
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	49.479.995,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT					
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																			
							Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	13.652.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT					
268	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat kecamatan	-			95 Persentase	153.526.400,00						-	0,00						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	-			95 Persentase	153.526.400,00			-	-	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat	-	0,00						
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	153.526.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	masyarakat di Kecamatan Bogor Barat		0,00	KECAMATAN BOGOR BARAT					
						KELURAHAN BALUMBANG JAYA																			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																		200.000.000,00	
	7	01				KECAMATAN																			
269	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengeloan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	77.996.300,00					Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	-	0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100%	77.996.300,00							0,00						
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.497.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA					
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.347.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA					
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.675.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA					
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	55.890.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA					
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.586.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA					
270	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	585.174.799,00							200.000.000,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 %	585.174.799,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahaan	-	200.000.000,00						
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	2.772.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	281.202.499,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		200.000.000,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	301.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Balumbang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00	KELURAHAN BALUMBANG JAYA				
						KELURAHAN BUBULAK																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						779.359.498,00							200.000.000,00					
	7	01				KECAMATAN																		
271	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	92.411.500,00						-	0,00					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100%	92.411.500,00					Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN BUBULAK				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.298.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN BUBULAK				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.915.100,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN BUBULAK				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.376.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN BUBULAK				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														0,00	KELURAHAN BUBULAK			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	68.940.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN BUBULAK				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.881.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN BUBULAK				
272	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	686.947.998,00							200.000.000,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 %	686.947.998,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan	-	200.000.000,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	8.747.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00	KELURAHAN BUBULAK				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	353.000.598,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		200.000.000,00	KELURAHAN BUBULAK				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	325.200.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Bubulak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00	KELURAHAN BUBULAK				
KELURAHAN CILENDEK BARAT																							
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.042.870.534,38							663.773.300,00					
	7	01				KECAMATAN																	
273	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan			89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	81.754.200,00						-	20.870.900,00					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah			100%	81.754.200,00							20.870.900,00					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait			KELURAHAN CILENDEK BARAT			
							umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.353.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		3.366.600,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.769.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		12.769.400,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT			
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.734.900,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		4.734.900,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	59.385.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.511.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT			
274	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan			23%	961.116.334,38							642.902.400,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-		100 %	961.116.334,38			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	642.902.400,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	3.150.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		3.150.000,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					5 Unit	468.366.334,38	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		200.000.000,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3 Pokmas / Ormas	489.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		439.752.400,00	KELURAHAN CILENDEK BARAT			
						KELURAHAN CILENDEK TIMUR																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						773.933.500,00								200.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN																	
275	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	93.465.500,00					-		0,00				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100%	93.465.500,00					Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	4.489.900,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	18.071.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR			
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	7.016.100,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR			
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	62.085.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1.802.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR			
276	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	680.468.000,00							200.000.000,00				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 %	680.468.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahaan	-	200.000.000,00				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					6 Lembaga Kemasyarakatan	3.550.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahaan		0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	304.918.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		200.000.000,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	372.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Cilendek Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00	KELURAHAN CILENDEK TIMUR	
						KELURAHAN CURUG															
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					754.178.900,00								200.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN															
277	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	65.439.700,00						-	0,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100%	65.439.700,00							0,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.103.500,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CURUG	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.608.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CURUG	
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.558.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CURUG	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	50.130.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CURUG	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.039.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CURUG	
278	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	688.739.200,00							200.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 %	688.739.200,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan	-	200.000.000,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	7.177.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan		0,00	KELURAHAN CURUG	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	325.162.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan		200.000.000,00	KELURAHAN CURUG	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
																	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	356.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan	0,00		KELURAHAN CURUG
7						KELURAHAN CURUG MEKAR					628.217.000,00							200.000.000,00	
7	01					KECAMATAN													
279	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan			89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	92.024.600,00						-	0,00	
7	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah					92.024.600,00							0,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
						umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.823.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	0,00		KELURAHAN CURUG MEKAR
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.737.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	0,00		KELURAHAN CURUG MEKAR
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.544.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	0,00		KELURAHAN CURUG MEKAR
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	63.060.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	0,00		KELURAHAN CURUG MEKAR
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.858.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait	0,00		KELURAHAN CURUG MEKAR
280	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan			23%	536.192.400,00							200.000.000,00	
7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-		100 %	536.192.400,00				Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan	-	200.000.000,00	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	2.777.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan	0,00		KELURAHAN CURUG MEKAR
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	183.015.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan	200.000.000,00		KELURAHAN CURUG MEKAR
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	350.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Curug Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan	0,00		KELURAHAN CURUG MEKAR
						KELURAHAN GUNUNG BATU													
7						UNSUR KEWILAYAHAN					846.774.399,00							200.000.000,00	
7	01					KECAMATAN													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
281	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	86.783.700,00						-	0,00					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100%	86.783.700,00							0,00					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.186.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN GUNUNG BATU				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.730.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN GUNUNG BATU				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.530.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN GUNUNG BATU				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.060.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN GUNUNG BATU				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.275.900,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN GUNUNG BATU				
282	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	759.990.699,00							200.000.000,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 %	759.990.699,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan	-	200.000.000,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	3.150.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan		0,00	KELURAHAN GUNUNG BATU				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	348.840.699,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan		200.000.000,00	KELURAHAN GUNUNG BATU				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	408.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Gunung Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan		0,00	KELURAHAN GUNUNG BATU				
						KELURAHAN LOJI																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7	01				KECAMATAN																	200.000.000,00	
283	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	84.638.500,00						-	0,00					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100%	84.638.500,00							0,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	2.957.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Kota Bogor		0,00	KELURAHAN LOJI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	8.824.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Kota Bogor		0,00	KELURAHAN LOJI
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	3.474.900,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Kota Bogor		0,00	KELURAHAN LOJI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	67.455.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Kota Bogor		0,00	KELURAHAN LOJI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					1 Paket	1.927.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Kota Bogor		0,00	KELURAHAN LOJI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
284	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	621.066.500,00							200.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 %	621.066.500,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan	-	200.000.000,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3.485.500,00		Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00	KELURAHAN LOJI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	287.581.000,00		Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		200.000.000,00	KELURAHAN LOJI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	330.000.000,00		Kota Bogor, Bogor Barat, Loji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00	KELURAHAN LOJI
						KELURAHAN MARGAJAYA															
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						688.903.898,00							200.000.000,00		
	7	01				KECAMATAN															
285	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	93.058.600,00						-	0,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100%	93.058.600,00							0,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.633.000,00		Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan		0,00	KELURAHAN MARGAJAYA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.251.900,00		Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan		0,00	KELURAHAN MARGAJAYA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.257.300,00		Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan		0,00	KELURAHAN MARGAJAYA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	72.330.000,00		Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan		0,00	KELURAHAN MARGAJAYA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.586.400,00		Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan		0,00	KELURAHAN MARGAJAYA
286	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	595.845.298,00							200.000.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 %	595.845.298,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan	-	200.000.000,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	3.380.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00	KELURAHAN MARGAJAYA				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	408.865.298,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		200.000.000,00	KELURAHAN MARGAJAYA				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							0				3 0	183.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Margajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00	KELURAHAN MARGAJAYA				
						KELURAHAN MENTENG																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.080.161.990,00							203.618.215,00					
	7	01				KECAMATAN																		
287	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	116.653.000,00						-	3.618.215,00					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100%	116.653.000,00							3.618.215,00					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.785.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan		3.618.215,00	KELURAHAN MENTENG				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.518.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan		0,00	KELURAHAN MENTENG				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.840.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan		0,00	KELURAHAN MENTENG				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	89.520.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan		0,00	KELURAHAN MENTENG				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.988.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan		0,00	KELURAHAN MENTENG				
288	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	963.508.990,00							200.000.000,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 %	963.508.990,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	200.000.000,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6.368.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	KELURAHAN MENTENG				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	465.140.590,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		200.000.000,00	KELURAHAN MENTENG				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	492.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Menteng	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	KELURAHAN MENTENG				
						KELURAHAN PASIR JAYA																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						765.807.900,00							200.000.000,00					
	7	01				KECAMATAN																		
289	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengeloan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	88.602.100,00						-		0,00				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100%	88.602.100,00										0,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.821.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR JAYA				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.731.900,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR JAYA				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.794.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR JAYA				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	74.940.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR JAYA			
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																0,00	KELURAHAN PASIR JAYA
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.314.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR JAYA			
290	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	677.205.800,00							200.000.000,00				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang aktif Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam Musrenbang Kelurahan	-			100 % 23 %	677.205.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan	-	200.000.000,00				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																0,00	KELURAHAN PASIR JAYA
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3.549.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan		0,00	KELURAHAN PASIR JAYA			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	267.171.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan		200.000.000,00	KELURAHAN PASIR JAYA			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	406.485.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kelurahan		0,00	KELURAHAN PASIR JAYA				
					KELURAHAN PASIR KUDA																		
	7				UNSUR KEWILAYAHAN															200.000.000,00			
	7	01			KECAMATAN																		
291	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	85.459.500,00						-	0,00					
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100%	85.459.500,00							0,00					
	7	01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.879.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR KUDA				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.072.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR KUDA				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.657.100,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR KUDA				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	71.250.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR KUDA				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR KUDA				
292	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	570.662.099,00							200.000.000,00					
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 %	570.662.099,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahaan	-	200.000.000,00					
	7	01	03	2.02	0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6.543.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahaan		0,00	KELURAHAN PASIR KUDA				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	206.518.699,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahaan		200.000.000,00	KELURAHAN PASIR KUDA				
	7	01	03	2.02	0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	357.600.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Kuda	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00	KELURAHAN PASIR KUDA			
					KELURAHAN PASIR MULYA																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					377.902.220,00							140.842.110,00				
	7	01				KECAMATAN																
293	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan			89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	79.856.000,00					-		0,00				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah			100%	79.856.000,00								0,00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.653.300,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR MULYA		
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.236.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR MULYA		
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.158.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR MULYA		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	61.590.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR MULYA		
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.218.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN PASIR MULYA		
294	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan			23%	298.046.220,00							140.842.110,00				
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-		100 %	298.046.220,00				Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan	-	140.842.110,00				
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	2.404.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00	KELURAHAN PASIR MULYA		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	140.841.820,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		140.842.110,00	KELURAHAN PASIR MULYA		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	154.800.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Pasir Mulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00	KELURAHAN PASIR MULYA		
					KELURAHAN SEMPLAK																	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					570.220.348,00							200.000.000,00				
	7	01				KECAMATAN																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
295	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	80.737.100,00						-		0,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100%	80.737.100,00							0,00			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							umlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	837.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00		KELURAHAN SEMPLAK	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.295.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00		KELURAHAN SEMPLAK	
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.741.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00		KELURAHAN SEMPLAK	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	65.460.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00		KELURAHAN SEMPLAK	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.402.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00		KELURAHAN SEMPLAK	
296	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	489.483.248,00							200.000.000,00			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan				100 %	489.483.248,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan	-	200.000.000,00			
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	3.400.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00		KELURAHAN SEMPLAK	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	222.082.448,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		200.000.000,00		KELURAHAN SEMPLAK	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	264.000.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Semplak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	masyarakat kelurahan		0,00		KELURAHAN SEMPLAK	
						KELURAHAN SINDANG BARANG																
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						875.792.707,00							200.000.000,00			
	7	01				KECAMATAN																
297	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	109.452.400,00						-		0,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100%	109.452.400,00							0,00			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	7.966.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN SINDANG BARANG				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Paket	9.918.600,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN SINDANG BARANG				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					1 Paket	4.737.200,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN SINDANG BARANG				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	81.210.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN SINDANG BARANG				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					1 Paket	5.620.400,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	Aparatur Kelurahan dan Instansi Vertikal Terkait		0,00	KELURAHAN SINDANG BARANG				
298	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan				23%	766.340.307,00							200.000.000,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan	-			100 %	766.340.307,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di kelurahan	-	200.000.000,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6.176.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di kelurahan		0,00	KELURAHAN SINDANG BARANG				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	425.664.307,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di kelurahan		200.000.000,00	KELURAHAN SINDANG BARANG				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	334.500.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Sindang Barang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat di kelurahan		0,00	KELURAHAN SINDANG BARANG				
	7					KELURAHAN SITU GEDE																		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
	7	01				KECAMATAN																	200.000.000,00	
299	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				89,35Nilai 95,1 % 95,35 Nilai 1 inovasi/tahun	94.706.500,00						-	0,00					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah				100%	94.706.500,00								0,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	2.608.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SITU GEDE
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	14.656.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SITU GEDE
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	2.122.700,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SITU GEDE
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	72.975.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SITU GEDE
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
300	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23%	386.046.200,00						-	200.000.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					2 Unit	152.999.800,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	KELURAHAN SITU GEDE	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3 Pokmas / Ormas	230.400.000,00	Kota Bogor, Bogor Barat, Situ Gede	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	Kelompok Masyarakat	0,00	KELURAHAN SITU GEDE	
						KECAMATAN BOGOR TENGAH						29.788.921.021,00							33.951.008.624,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						29.788.921.021,00							33.951.008.624,00	
	7	01				KECAMATAN						29.788.921.021,00							33.951.008.624,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	-			83,40 Nilai 95,1 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	29.108.746.726,00						-	33.195.758.440,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah	-			100 persen 100 persen 95,5 persen 95,81 persen	30.842.200,00			-	-	Kecamatan Bogor Tengah	-	31.944.660,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15.826.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Bogor Tengah		16.363.380,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	15.016.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kecamatan Bogor Tengah		15.581.280,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	-			100 persen 95 persen	21.244.590.351,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah	-	23.299.498.230,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				93 Orang/bulan	21.171.925.751,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		23.232.360.830,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.260.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		6.458.100,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	66.404.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		60.679.300,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 persen	1.797.311.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah	-	3.066.807.843,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.397.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		37.725.600,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	807.565.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		1.976.102.920,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	153.603.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		168.965.808,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	512.046.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		563.251.700,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.147.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		8.517.410,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	8.340.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		10.227.360,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	275.210.950,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		302.017.045,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 persen	622.840.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah	-	649.681.864,00	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	397.179.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		436.896.900,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	225.661.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		212.784.964,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	2.220.338.130,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah	-	2.540.374.401,00	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	222.086.722,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		244.295.394,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.998.251.408,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		2.296.079.007,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah ber kondisi baik	-			100 persen	3.192.823.895,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah	-	3.607.451.442,00	
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	143.464.734,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		159.292.011,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	49.359.522,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		54.295.331,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	2.999.999.639,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		3.393.864.100,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan	-			23 persen	158.207.800,00						-	172.728.580,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-			1 Laporan	58.847.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah	-	64.731.700,00	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	58.847.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		64.731.700,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase jenis Pelayanan yang dilaksanakan Masyarakat di Kecamatan	-			100 persen	99.360.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah	-	107.996.880,00	
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	99.360.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		94.996.880,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		13.000.000,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 persen	369.999.295,00						-	415.357.684,00	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			1 Lembaga Kemasyarakatan	369.999.295,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah	-	415.357.684,00	
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	299.999.495,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		329.999.664,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		33.630.960,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		40.727.280,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	9.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Bogor Tengah		10.999.780,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	-			95 persen	151.967.200,00						-	167.163.920,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	-			95 persen	151.967.200,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Kecamatan Bogor Tengah	-	167.163.920,00	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	151.967.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Kecamatan Bogor Tengah		167.163.920,00	KECAMATAN BOGOR TENGAH
						KELURAHAN BABAKAN													759.919.860,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													85.646.550,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													85.646.550,00	
5	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				83,40 Nilai 95,1 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	85.489.400,00						-	85.646.550,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 persen	85.489.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kelurahan Babakan	-	85.646.550,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							0				1 0	1.999.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kelurahan Babakan		2.000.000,00	KELURAHAN BABAKAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.999.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kelurahan Babakan		8.000.000,00	KELURAHAN BABAKAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kelurahan Babakan		3.146.550,00	KELURAHAN BABAKAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.990.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kelurahan Babakan		70.000.000,00	KELURAHAN BABAKAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kelurahan Babakan		2.500.000,00	KELURAHAN BABAKAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						365.582.599,00							674.273.310,00	
	7	01				KECAMATAN						365.582.599,00							674.273.310,00	
6	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 persen	365.582.599,00						-	674.273.310,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 persen	365.582.599,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Kelurahan Babakan	-	674.273.310,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Kelurahan Babakan		4.500.000,00	KELURAHAN BABAKAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
															Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	132.682.599,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Kelurahan Babakan		432.698.010,00	KELURAHAN BABAKAN	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	228.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-	Kelurahan Babakan		237.075.300,00	KELURAHAN BABAKAN	
						KELURAHAN CIBOGOR													423.690.000,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														81.500.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														81.500.000,00	
7	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				83,40 Nilai 95,1 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	81.499.300,00					-		81.500.000,00		
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 persen	81.499.300,00			-	-	Kelurahan Cibogor	-	81.500.000,00		
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.999.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Cibogor		2.000.000,00	KELURAHAN CIBOGOR	
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Cibogor		8.000.000,00	KELURAHAN CIBOGOR	
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Cibogor		3.000.000,00	KELURAHAN CIBOGOR	
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	66.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Cibogor		66.000.000,00	KELURAHAN CIBOGOR	
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Kelurahan Cibogor		2.500.000,00	KELURAHAN CIBOGOR	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN													342.190.000,00		
	7	01				KECAMATAN													342.190.000,00		
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 persen	334.100.000,00					-		342.190.000,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 persen	334.100.000,00			-	-	-	-	342.190.000,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	KELURAHAN CIBOGOR	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	143.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		143.000.000,00	KELURAHAN CIBOGOR	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	187.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		195.690.000,00	KELURAHAN CIBOGOR	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					KELURAHAN CIWARINGIN						580.714.500,00							592.916.650,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						85.486.500,00							85.500.000,00	
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						85.486.500,00							85.500.000,00	
9	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				83,40 Nilai 95,1 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	85.486.500,00					-		85.500.000,00	
	2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 persen	85.486.500,00			-	-	-	-	85.500.000,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.999.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.997.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.990.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.499.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						495.228.000,00							507.416.650,00	
	7	01			KECAMATAN						495.228.000,00							507.416.650,00	
10	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 persen	495.228.000,00						-	507.416.650,00	
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 persen	495.228.000,00			-	-	-	-	507.416.650,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.500.000,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	190.328.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		190.328.000,00	KELURAHAN CIWARINGIN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	300.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		312.588.650,00	KELURAHAN CIWARINGIN
					KELURAHAN GUDANG						669.543.900,00							662.385.041,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						94.993.200,00							84.415.000,00	
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						94.993.200,00							84.415.000,00	
11	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				83,40 Nilai 95,1 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	94.993.200,00						-	84.415.000,00	
	2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 persen	94.993.200,00			-	-	-	-	84.415.000,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.995.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN GUDANG
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.999.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	KELURAHAN GUDANG
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	2.999.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN GUDANG
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	79.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		68.915.000,00	KELURAHAN GUDANG
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	2.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN GUDANG
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					574.550.700,00							577.970.041,00	
	7	01				KECAMATAN					574.550.700,00							577.970.041,00	
12	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 persen	574.550.700,00						-	577.970.041,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		100 persen	574.550.700,00			-	-	-	-	577.970.041,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	KELURAHAN GUDANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	230.750.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		230.760.041,00	KELURAHAN GUDANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	338.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		342.210.000,00	KELURAHAN GUDANG
						KELURAHAN KEBON KALAPA					637.521.397,00							644.436.348,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
13	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				83,40 Nilai 95,1 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	85.486.700,00						-	83.398.860,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-		100 persen	85.486.700,00			-	-	-	-	83.398.860,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.998.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.999.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.898.860,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.998.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.990.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					552.034.697,00							561.037.488,00	
	7	01				KECAMATAN					552.034.697,00							561.037.488,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 persen	552.034.697,00					-	-	561.037.488,00	
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 persen	552.034.697,00			-	-	-	-	561.037.488,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	4.499.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.500.000,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	259.134.897,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		263.167.488,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	288.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		293.370.000,00	KELURAHAN KEBON KALAPA
						KELURAHAN PALEDANG					648.473.999,00							650.636.795,00	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					94.999.300,00								95.000.000,00	
	2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					94.999.300,00								95.000.000,00	
15	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				83,40 Nilai 95,1 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	94.999.300,00					-		95.000.000,00	
	2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 persen	94.999.300,00			-	-	-	-	95.000.000,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN PALEDANG
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.999.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	KELURAHAN PALEDANG
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN PALEDANG
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	79.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		79.500.000,00	KELURAHAN PALEDANG
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN PALEDANG
	7				UNSUR KEWILAYAHAN					553.474.699,00								555.636.795,00	
	7	01			KECAMATAN					553.474.699,00								555.636.795,00	
16	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 persen	553.474.699,00					-		555.636.795,00	
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 persen	553.474.699,00			-	-	-	-	555.636.795,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.500.000,00	KELURAHAN PALEDANG
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	174.874.699,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		174.874.755,00	KELURAHAN PALEDANG
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
															Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	373.600.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		376.262.040,00	KELURAHAN PALEDANG
						KELURAHAN TEGALLEGA					602.045.200,00							607.521.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					94.995.200,00							95.000.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					94.995.200,00							95.000.000,00	
17	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				83,40 Nilai 95,1 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	94.995.200,00					-	95.000.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 persen	94.995.200,00			-	-	-	95.000.000,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1.997.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.000.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	7.999.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8.000.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	2.999.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3.000.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	79.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	79.500.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	2.499.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.500.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					507.050.000,00							512.521.000,00	
	7	01				KECAMATAN					507.050.000,00							512.521.000,00	
18	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 persen	507.050.000,00					-	512.521.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 persen	507.050.000,00			-	-	-	512.521.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5.000.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					0 Unit	181.250.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	181.250.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3 Pokmas / Ormas	320.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	326.271.000,00	KELURAHAN TEGALLEGA
						KELURAHAN SEMPUR					409.973.300,00							417.291.680,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					85.492.100,00							85.500.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					85.492.100,00							85.500.000,00	
19	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				83,40 Nilai 95,1 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	85.492.100,00					-	85.500.000,00	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 persen	85.492.100,00			-	-	-	85.500.000,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2.000.000,00	KELURAHAN SEMPUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	8.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	KELURAHAN SEMPUR				
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	2.997.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN SEMPUR				
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	69.995.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	KELURAHAN SEMPUR				
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	2.499.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN SEMPUR				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						324.481.200,00							331.791.680,00					
	7	01				KECAMATAN						324.481.200,00							331.791.680,00					
20	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 persen	324.481.200,00						-	331.791.680,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 persen	324.481.200,00						-	331.791.680,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.500.000,00	KELURAHAN SEMPUR				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	107.181.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		107.181.680,00	KELURAHAN SEMPUR				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					3 Pokmas / Ormas	212.799.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		220.110.000,00	KELURAHAN SEMPUR				
						KELURAHAN BABAKAN PASAR						540.808.500,00							545.393.850,00					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						85.490.000,00							85.535.000,00					
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						85.490.000,00							85.535.000,00					
21	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				83,40 Nilai 95,1 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	85.490.000,00						-	85.535.000,00					
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 persen	85.490.000,00						-	85.535.000,00					
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.035.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR				
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	8.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR				
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	3.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR				
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	69.990.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR				
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	2.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						455.318.500,00							459.858.850,00					
	7	01				KECAMATAN						455.318.500,00							459.858.850,00					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 persen	455.318.500,00						-	459.858.850,00	
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 persen	455.318.500,00			-	-	-	-	459.858.850,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	186.418.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		186.418.850,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	264.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		269.940.000,00	KELURAHAN BABAKAN PASAR
						KELURAHAN PANARAGAN					506.390.000,00							513.350.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					85.490.000,00							85.500.000,00	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					85.490.000,00							85.500.000,00	
23	2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				83,40 Nilai 95,1 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	85.490.000,00					-		85.500.000,00	
	2	13	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 persen	85.490.000,00			-	-	-	-	85.500.000,00	
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.000.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.990.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		70.000.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					420.900.000,00							427.850.000,00	
	7	01				KECAMATAN					420.900.000,00							427.850.000,00	
24	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 persen	420.900.000,00					-		427.850.000,00	
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 persen	420.900.000,00			-	-	-	-	427.850.000,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		4.500.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	194.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		194.000.000,00	KELURAHAN PANARAGAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
															Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	222.400.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		229.350.000,00	KELURAHAN PANARAGAN					
						KELURAHAN PABATON						313.913.599,00							334.740.950,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						81.498.800,00							92.525.950,00						
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						81.498.800,00							92.525.950,00						
25	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengeloan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				83,40 Nilai 95,1 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	81.498.800,00					-		92.525.950,00						
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 persen	81.498.800,00			-	-	-	-	92.525.950,00						
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.087.910,00	KELURAHAN PABATON					
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		8.000.000,00	KELURAHAN PABATON					
	2	13	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.999.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.000.000,00	KELURAHAN PABATON					
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	66.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		76.769.000,00	KELURAHAN PABATON					
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.669.040,00	KELURAHAN PABATON					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						232.414.799,00							242.215.000,00						
	7	01				KECAMATAN						232.414.799,00							242.215.000,00						
26	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 persen	232.414.799,00					-		242.215.000,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 persen	232.414.799,00			-	-	-	-	242.215.000,00						
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.500.000,00	KELURAHAN PABATON					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	100.114.799,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.115.000,00	KELURAHAN PABATON					
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	128.800.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		138.600.000,00	KELURAHAN PABATON					
						KECAMATAN TANAH SAREAL						27.962.847.932,00							0,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						27.962.847.932,00							0,00						
	7	01				KECAMATAN						27.962.847.932,00							0,00						
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengeloan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				86,16 Nilai 95,2 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	27.003.892.212,00					-		0,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah	-			100 presentanse 100 presentanse 95,5 presentanse 95,81 presentanse	13.684.100,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6.498.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	7.185.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	-			100 presentanse 100 presentanse	20.970.346.662,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/bulan	20.886.137.262,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	7.664.900,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	76.544.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 presentanse	1.264.093.084,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	28.991.300,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	124.401.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	74.216.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	233.608.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	37.409.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	765.466.684,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 presentanse	2.223.256.000,00			-	-	-	-	0,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	1.235.519.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	221.588.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	553.332.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	212.816.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.774.380.180,00			-	-	-	-	0,00				
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	297.603.100,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.476.777.080,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah ber kondisi bai	-			100 presentanse	758.132.186,00			-	-	-	-	0,00				
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	184.385.996,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	133.077.190,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	440.669.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kecamatan	-			23 presentanse	284.582.000,00						-	0,00				
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Jumlah Pengajuan layanan yang terlayani	-			100 presentanse	157.674.000,00			-	-	-	-	0,00				
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	157.674.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	126.908.000,00			-	-	-	-	0,00				
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	108.358.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	18.550.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
															Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IK 1 : Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 presentanse	501.733.120,00						-	0,00				
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			1 Laporan	501.733.120,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Tanah Sareal	-	0,00				
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				1 Lembaga Kemasyarakatan	280.920.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Tanah Sareal		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga Kemasyarakatan	199.439.120,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Tanah Sareal		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	15.374.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Tanah Sareal		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	6.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Tanah Sareal		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan di tingkat Kecamatan	-			95 presentanse	172.640.600,00						-	0,00				
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti di tingkat Kecamatan	-			95 presentanse	172.640.600,00			-	-	-	-	0,00				
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	172.640.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KECAMATAN TANAH SAREAL			
						KELURAHAN TANAH SAREAL											487.178.680,00					0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN											487.178.680,00					0,00	
	7	01				KECAMATAN											487.178.680,00					0,00	
5	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengeloan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				86,16 Nilai 95,2 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	89.884.400,00						-	0,00				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 presentanse	89.884.400,00			-	-	-	-	0,00				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.147.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL			
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
																Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.914.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL		
	7		01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	11.234.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL		
	7		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.045.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL		
	7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.543.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL		
6	7		01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-		23 presentanse	397.294.280,00					-		0,00			
	7		01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan pembangunan di Kelurahan	-		100 presentanse 100 presentanse	397.294.280,00			-	-	-	-	0,00			
	7		01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL		
	7		01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	155.294.280,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL		
	7		01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	232.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN TANAH SAREAL		
							KELURAHAN KEBON PEDES														0,00	
	7						UNSUR KEWILAYAHAN														0,00	
	7		01				KECAMATAN														0,00	
7	7		01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan			86,16 Nilai 95,2 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	113.026.000,00					-		0,00			
	7		01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-		100 presentanse	113.026.000,00			-	-	-	-	0,00			
	7		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.222.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEBON PEDES		
	7		01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.075.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEBON PEDES		
	7		01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.030.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEBON PEDES		
	7		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	88.830.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEBON PEDES		
	7		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.868.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEBON PEDES		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IK 1 : Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 presentanse	1.202.373.600,00					-		0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 presentanse	1.202.373.600,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	11.009.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEBON PEDES
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	770.434.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEBON PEDES
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	420.930.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kebon Pedes	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEBON PEDES
						KELURAHAN KEDUNG BADAK						1.001.955.800,00							0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1.001.955.800,00							0,00	
	7	01				KECAMATAN						1.001.955.800,00							0,00	
9	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				86,16 Nilai 95,2 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	109.916.000,00					-		0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah undefined	-			100 presentanse undefined	109.916.000,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.623.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	31.352.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.013.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	74.005.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	921.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
10	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IK 1 : Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 Persentanse	892.039.800,00					-		0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 presentanse	892.039.800,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
														Nasional					Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	304.889.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	577.150.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Badak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG BADAK	
						KELURAHAN KEDUNG JAYA					538.116.700,00							0,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					538.116.700,00							0,00		
	7	01				KECAMATAN					538.116.700,00							0,00		
11	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengeloan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan			86,16 Nilai 95,2 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	88.741.000,00					-		0,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-		100 presentanse	88.741.000,00			-	-	-	-	0,00		
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.223.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.387.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA	
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.459.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	58.405.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.265.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA	
12	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IK 1 : Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-		23 presentanse	449.375.700,00					-		0,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		100 presentanse	449.375.700,00			-	-	-	-	0,00		
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	9.953.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	169.472.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Jaya	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA	
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	269.950.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG JAYA	
						KELURAHAN KEDUNG WARINGIN					1.045.979.700,00							0,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.045.979.700,00							0,00		
	7	01				KECAMATAN					1.045.979.700,00							0,00		
13	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengeloan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan			86,16 Nilai 95,2 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	99.586.700,00					-		0,00		
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah undefined	-		100 presentanse undefined	99.586.700,00			-	-	-	-	0,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.406.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Waringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.594.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Waringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.880.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Waringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	67.815.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Waringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.890.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Waringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN				
14	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IK 1 : Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 presentanse	946.393.000,00					-	0,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 presentanse	946.393.000,00			-	-	-	-	0,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Waringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	477.443.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Waringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	458.950.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kedung Waringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KEDUNG WARINGIN				
	7					KELURAHAN SUKADAMAI						873.885.000,00								0,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						873.885.000,00								0,00				
	7	01				KECAMATAN						873.885.000,00								0,00				
15	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				86,16 Nilai 95,2 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	100.019.500,00					-	0,00						
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah undefined	-			100 presentanse undefined	100.019.500,00			-	-	-	-	0,00					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.454.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKADAMAI				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.350.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKADAMAI				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							0				0 0	3.328.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKADAMAI				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	72.490.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKADAMAI				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.396.400,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKADAMAI
16	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IK 1 : Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 presentanse	773.865.500,00					-		0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 presentanse	773.865.500,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKADAMAI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	396.685.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	KELURAHAN SUKADAMAI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	367.180.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukadamai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKADAMAI
						KELURAHAN SUKARESMI						927.471.292,00							0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						927.471.292,00							0,00	
	7	01				KECAMATAN						927.471.292,00							0,00	
17	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				86,16 Nilai 95,2 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	79.960.800,00					-		0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah undefined	-			100 presentanse undefined	79.960.800,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.245.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukaresmi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKARESMI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.737.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukaresmi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKARESMI
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1.981.300,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukaresmi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKARESMI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	59.710.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukaresmi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKARESMI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4.287.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukaresmi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKARESMI
18	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IK 1 : Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 presentanse	847.510.492,00					-		0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 presentanse	847.510.492,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukaresmi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKARESMI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
														Nasional	Daerah								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	586.935.492,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukaresmi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	KELURAHAN SUKARESMI				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	250.575.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Sukaresmi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN SUKARESMI				
						KELURAHAN CIBADAK					1.181.269.000,00							0,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.181.269.000,00							0,00					
	7	01				KECAMATAN					1.181.269.000,00							0,00					
19	7	01	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan			86,16 Nilai 95,2 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	109.831.500,00					-		0,00					
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-		100 presentanse	109.831.500,00			-	-	-	-	0,00					
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.535.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Cibadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CIBADAK				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.730.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CIBADAK				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4.337.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Cibadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CIBADAK				
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.370.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Cibadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CIBADAK				
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	7.857.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Cibadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CIBADAK				
20	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IK 1 : Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-		23 presentanse	1.071.437.500,00					-		0,00					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		100 presentanse	1.071.437.500,00			-	-	-	-	0,00					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				4 Lembaga Kemasyarakatan	9.997.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Cibadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CIBADAK				
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	600.259.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Cibadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	KELURAHAN CIBADAK				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	461.180.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Cibadak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN CIBADAK				
						KELURAHAN MEKARWANGI					838.251.614,00							0,00					
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					838.251.614,00							0,00					
	7	01				KECAMATAN					838.251.614,00							0,00					
21	7	01	01			PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan			86,16 Nilai 95,2 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	106.183.000,00					-		0,00					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 presentanse	106.183.000,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	3.316.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	14.953.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Mekar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	3.885.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Mekar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	82.800.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Mekar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1.227.900,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Mekar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	KELURAHAN MEKARWANGI
22	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IK 1 : Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya	-			23 presentanse	732.068.614,00					-	-	0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 presentanse	732.068.614,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Mekar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					1 Unit	254.068.614,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Mekar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	0,00	KELURAHAN MEKARWANGI
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					1 Pokmas / Ormas	468.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Mekar Wangi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	KELURAHAN MEKARWANGI
						KELURAHAN KENCANA						893.865.000,00							0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						893.865.000,00							0,00	
	7	01				KECAMATAN						893.865.000,00							0,00	
23	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				86,16 Nilai 95,2 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	109.145.800,00						-	0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 presentanse	109.145.800,00			-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	6.047.100,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	KELURAHAN KENCANA
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	19.519.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	KELURAHAN KENCANA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	4.103.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	KELURAHAN KENCANA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	71.400.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	KELURAHAN KENCANA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	8.076.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	KELURAHAN KENCANA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IK 1 : Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 presentanse	784.719.200,00					-		0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 presentanse	784.719.200,00		-	-	-	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KENCANA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	253.619.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	KELURAHAN KENCANA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	521.100.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KENCANA
						KELURAHAN KAYUMANIS						694.829.000,00							0,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						694.829.000,00							0,00	
	7	01				KECAMATAN						694.829.000,00							0,00	
25	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengeloaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				86,16 Nilai 95,2 % 95,25 Nilai 1 inovasi/tahun	103.600.000,00					-		0,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah undefined	-			100 presentanse undefined	103.600.000,00		-	-	-	-	-	0,00	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.236.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.607.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.800.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	72.896.500,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.059.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KAYUMANIS
26	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IK 1 : Persentase usulan perempuan, anak, lansia, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diakomodir menjadi usulan prioritas dalam musrenbang Kelurahan	-			23 presentanse	591.229.000,00					-		0,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-			100 presentanse	591.229.000,00		-	-	-	-	-	0,00	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KAYUMANIS
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENIA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	228.429.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	KELURAHAN KAYUMANIS				
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	0,00	KELURAHAN KAYUMANIS
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	352.800.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		0,00	KELURAHAN KAYUMANIS				
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						40.570.334.376,00							20.605.039.446,00					
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						40.570.334.376,00								20.605.039.446,00				
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						40.570.334.376,00								20.605.039.446,00				
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Nilai Survey Kepuasan Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan				84,5 Nilai 100 % 86,99 Nilai 1 inovasi/tahun	9.826.126.303,00						-	9.804.021.246,00					
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	31.200.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	31.200.000,00					
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	31.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	31.200.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		31.200.000,00					
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	-			100 Persen 95,02 Persen	6.182.385.650,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-	-	6.182.385.650,00					
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	6.182.385.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	6.182.385.650,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	-		6.182.385.650,00					
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 Persen	2.805.139.652,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	2.805.222.752,00					
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	481.681.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		481.764.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	482.484.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		482.484.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	20.016.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		20.016.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	308.025.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		308.025.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.512.933.052,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		1.512.933.052,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	326.548.911,00			-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-	-	304.110.784,00	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	57.774.375,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	-		57.774.920,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	268.774.536,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		246.335.864,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	-			100 Persen	480.852.090,00			-	-	-	-	481.102.060,00	
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				11 Unit	179.750.030,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	32.719.560,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		32.719.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	268.382.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		268.382.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rasio masyarakat yang memperoleh pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan per 10.000 penduduk	-			14,00 : 10,000 Rasio	1.676.556.400,00						-	1.900.477.400,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kebijakan yang dirumuskan dalam Bidang Ideologi Pancasila	-			52,54 Kebijakan	1.676.556.400,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor	-	1.900.477.400,00	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				136 Orang	1.212.350.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		1.412.351.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka				56 Orang	448.252.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		470.222.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	15.953.600,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	Masyarakat Kota Bogor		17.903.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
															Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pastsipasi Perempuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Bogor Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	-			37 Persen 64,3 Persen 84,77 Persen	6.343.442.800,00						-		6.500.000.000,00	
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kebijakan yang dirumuskan dalam Bidang pendidikan politik	-			3 Kebijakan	6.343.442.800,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	6.500.000.000,00		
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				3800 Orang	6.343.442.800,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		6.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang ada pada strata Dewasa	-			20/212 (9,43 %)	935.000.000,00						-		950.000.000,00	
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan yang dirumuskan dalam Bidang pemberdayaan dan pengawasan	-			3 Kebijakan	935.000.000,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	950.000.000,00		
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300 Orang	935.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		950.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelurahan Bersih narkoba (bersinar)	-			30/68 (44,12)	377.029.000,00						-		382.500.800,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan yang dirumuskan dalam Bidang ketahanan ekonomisosial dan budaya	-			3 Kebijakan	377.029.000,00			-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	382.500.800,00		
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				150 Orang	377.029.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		382.500.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sara yang Tertangani	-			100 Persen	21.412.179.873,00					-		1.068.040.000,00	
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kebijakan yang dirumuskan dalam Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konplik sosial	-			1 Kebijakan	21.412.179.873,00			-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	1.068.040.000,00	
	8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
							Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	9.620.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	417.240.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai Dengan Prinsip Good and Clean Governance Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		431.040.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	20.985.319.873,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		630.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H												3.360.117.574.870,19							2.822.011.636.666,40	

5.2. REKAPITULASI RKPD DAN RENJA TAHUN 2026 PER SATUAN PERANGKAT KERJA DAERAH, PER URUSAN PEMERINTAHAN DAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Adapun rekapitulasi besaran pagu indikatif setiap Perangkat Daerah sebagai bentuk target kinerja Perangkat Daerah di Tahun 2026 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2026 yang dapat digambarkan pada tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026

NO	KODE SKPD	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF	NILAI ENTRY	DEVIASI	%
1	1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	602.033.805.712	601.884.435.233	149.370.479	100,0
2	5.02.0.00.0.00.26.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	71.131.621.350	71.131.389.417	231.933	100,0
3	1.03.0.00.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	199.952.093.171	198.587.794.171	1.364.299.000	99,3
4	1.02.0.00.0.00.02.0000	DINAS KESEHATAN	642.524.740.755	642.524.465.871	274.884	100,0
5	1.04.2.11.0.00.05.0000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	241.946.692.729	241.946.692.473	256	100,0
6	1.05.0.00.0.00.07.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47.153.334.534	47.153.334.334	200	100,0
7	1.05.0.00.0.00.06.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.112.633.810	10.112.633.810	-	100,0
8	1.06.0.00.0.00.09.0000	DINAS SOSIAL	19.006.833.384	19.006.833.341	43	100,0
9	2.07.0.00.0.00.10.0000	DINAS TENAGA KERJA	24.774.214.913	24.772.214.913	2.000.000	100,0
10	2.09.3.27.3.25.12.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	27.136.813.299	27.136.813.060	239	100,0
11	2.11.1.03.0.00.13.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	140.147.696.549	140.145.546.493	2.150.056	100,0
12	2.12.0.00.0.00.14.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.430.103.872	18.430.103.745	127	100,0
13	2.08.2.13.0.00.11.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.916.847.621	14.916.847.318	303	100,0
14	2.14.0.00.0.00.15.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.354.995.381	13.354.995.381	-	100,0
15	2.15.0.00.0.00.16.0000	DINAS PERHUBUNGAN	166.889.469.002	166.888.843.508	625.494	100,0
16	2.16.2.20.2.21.17.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	44.260.369.727	44.260.368.750	977	100,0
17	2.18.0.00.0.00.19.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.131.717.191	17.122.709.989	9.007.202	99,9
18	2.19.0.00.0.00.20.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	218.845.536.191	218.845.536.191	-	100,0
19	3.26.2.22.0.00.22.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	25.046.993.329	25.046.925.138	68.191	100,0

NO	KODE SKPD	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF	NILAI ENTRY	DEVIASI	%
20	2.24.2.23.0.00.21.0000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	12.098.933.027	12.098.932.740	287	100,0
21	4.01.2.10.2.13.23.0000	SEKRETARIAT DAERAH	151.562.718.130	151.340.542.201	222.175.929	99,9
22	4.02.0.00.0.00.24.0000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	158.106.180.925	158.095.365.958	10.814.967	100,0
23	5.01.5.05.0.00.25.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	24.842.615.199	24.120.990.016	721.625.183	97,1
24	5.03.5.04.0.00.28.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	50.591.467.532	50.550.662.255	40.805.277	99,9
25	5.02.0.00.0.00.27.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	55.921.712.808	55.921.712.808	-	100,0
26	6.01.0.00.0.00.29.0000	INSPEKTORAT	28.002.770.936	28.002.630.638	140.298	100,0
27	7.01.2.13.0.00.31.0000	KECAMATAN BOGOR UTARA	31.164.615.407	31.089.914.809	74.700.598	99,8
28	7.01.2.13.0.00.32.0000	KECAMATAN BOGOR SELATAN	56.996.763.975	56.526.500.295	470.263.680	99,2
29	7.01.2.13.0.00.33.0000	KECAMATAN BOGOR TIMUR	28.896.108.774	28.896.108.627	147	100,0
30	7.01.2.13.0.00.34.0000	KECAMATAN BOGOR BARAT	52.370.533.138	52.370.533.138	-	100,0
31	7.01.2.13.0.00.35.0000	KECAMATAN BOGOR TENGAH	35.867.829.625	35.564.976.715	302.852.910	99,2
32	7.01.2.13.0.00.36.0000	KECAMATAN TANAH SAREAL	41.853.789.835	37.761.049.318	4.092.740.517	90,2
33	8.01.0.00.0.00.30.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40.570.334.376	40.570.334.376	-	100,0
34	1.05.0.00.0.00.08.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	25.541.691.533	25.541.691.533	-	100,0
35	2.17.3.30.3.31.18.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	28.397.146.632	28.397.146.307	325	100,0
	TOTAL		3.367.581.724.372	3.360.117.574.870	7.464.149.502	99,8

Sumber : SIPD-RI, 2026

Selanjutnya proporsi anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 tersebut untuk setiap Urusan Pemerintahan yang selanjutnya diterjemahkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di setiap perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Proporsi Pagu RKPD Per Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERSENTASE PER URUSAN (%)
1	UNSUR KEWILAYAHAN	195.899.031.909	5,83
2	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	40.570.334.376	1,21
3	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	308.848.516.359	9,19

NO	URUSAN	JUMLAH PAGU	PERSENTASE PER URUSAN (%)
4	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	28.002.630.638	0,83
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	201.724.754.496	6,00
6	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28.083.777.026	0,84
7	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.771.473.889.238	52,72
8	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	785.514.640.828	23,38
	TOTAL	3.360.117.574.870	100,00

Sumber : SIPD-RI, 2026

Berdasarkan data alokasi anggaran per urusan dalam RKPD Tahun 2026, diketahui bahwa urusan pemerintahan yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar adalah **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**. Urusan ini memperoleh anggaran sebesar **Rp 1.771.473.889.238** atau setara dengan **52,72% dari total alokasi anggaran sebesar Rp 3.360.117.574.870**. Persentase yang signifikan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor memberikan prioritas utama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang menjadi hak fundamental warga.

Urusan dengan alokasi terbesar kedua adalah **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**, dengan alokasi sebesar **Rp 785.514.640.828** atau **23,38% dari total anggaran**. Alokasi ini penting untuk memastikan terselenggaranya berbagai fungsi pemerintahan yang menunjang pelayanan publik secara menyeluruh.

Selanjutnya, **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan** menempati posisi ketiga dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 308.848.516.359** atau **9,19% dari total anggaran**. Alokasi pada urusan ini diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program-program prioritas, termasuk aspek administratif dan teknis yang menopang kinerja perangkat daerah.

Urusan lainnya seperti **Unsur Kewilayahan** (5,83%), **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan** (6%), **Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan** (0,83%), **Urusan Pemerintahan Pilihan** (0,84%), dan **Unsur Pemerintahan Umum** (1,21%) mendapatkan alokasi yang lebih kecil namun tetap diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang holistik.

Distribusi anggaran ini mencerminkan kebijakan yang terfokus pada pelayanan dasar masyarakat, dengan tetap memberikan ruang yang memadai bagi kegiatan pendukung, pengawasan, serta urusan wajib dan pilihan lainnya. Diharapkan dengan alokasi ini, program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 dapat

berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.

Tabel 5.4
Bidang Urusan dan Program Tahun 2026

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.903.179.538
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	714.145.200
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	385.305.900
	TOTAL	28.002.630.638
KECAMATAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	832.519.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.690.702.460
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.060.096.615
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.315.713.834
	TOTAL	195.899.031.909
KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.171.219.385
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	45.654.513.870
	TOTAL	47.825.733.255
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	935.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	377.029.000
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.676.556.400
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	21.412.179.873
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	6.343.442.800
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.826.126.303
	TOTAL	40.570.334.376
KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.782.595.600
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	42.189.058.664
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.930.580.552
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.150.867.409
	TOTAL	127.053.102.225
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.724.929.000
	TOTAL	2.724.929.000
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	730.415.000
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	833.059.544
	TOTAL	1.563.474.544
PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.208.670.776
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.304.587.346
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.044.257.350
	TOTAL	22.557.515.472
SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	49.241.350.006
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.689.218.506
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.822.581.889
	TOTAL	150.753.150.401
SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	55.468.469.042
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	102.626.896.916
	TOTAL	158.095.365.958
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	174.341.600
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.687.355.200

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	600.952.442
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.967.454.503
	TOTAL	18.430.103.745
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	418.710.998
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.854.878.242
	TOTAL	11.273.589.240
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	487.113.500
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	28.460.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	964.432.380
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	71.875.533
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.422.738.070
	TOTAL	22.974.619.483
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	820.369.800
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	300.499.956
	TOTAL	1.120.869.756
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	199.995.493.994
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.035.920.799
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	990.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.824.121.398
	TOTAL	218.845.536.191
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	16.957.684.600
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	418.545.132.355
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.127.497.040
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	205.717.186.376
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	176.965.500
	TOTAL	642.524.465.871
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.457.614.926
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.632.198.800
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.360.791.684
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.357.054.267
	TOTAL	82.807.659.677
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	22.308.319.294
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.231.621.590
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.946.435.666
	TOTAL	43.486.376.550
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	550.724.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.640.190.800
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	256.812.000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	787.438.000
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
	TOTAL	8.235.164.800
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	303.000.000
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	24.510.598.066

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	18.204.371.100
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	168.988.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.439.999.616
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	550.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	800.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.982.581.239
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	420.000.000
	TOTAL	155.429.538.021
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	302.080.000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	49.999.900
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	577.962.600
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.357.280.696
	TOTAL	21.287.323.196
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	961.283.255
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	50.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	586.022.500
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	474.999.900
	TOTAL	2.072.305.655
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.349.720.420
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.015.302.113
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	12.058.886.485
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.094.060.300
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	21.914.352.346
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	208.110.600
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	9.226.606.538
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.190.130.842
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	109.707.231.065
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.050.000.000
	TOTAL	207.814.400.709
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	170.305.700
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.310.050.993
	TOTAL	46.480.356.693
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.985.207.574
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	828.517.628
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	111.691.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	623.974.122
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.051.522.294
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	197.852.100
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	118.082.600
	TOTAL	14.916.847.318
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.000.645.357
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	184.172.400
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	712.038.800
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	98.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.695.895.452
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	431.957.980
	TOTAL	17.122.709.989
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	150.290.288.506
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	451.594.146.727
	TOTAL	601.884.435.233
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.757.080.977

BIDANG URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.525.043.048
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	821.417.150
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.251.454.206
	TOTAL	13.354.995.381
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	307.788.400
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	618.237.100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	36.260.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	88.580.440
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	66.554.000
	TOTAL	1.117.419.940
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.920.878.992
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	77.967.964.516
	TOTAL	166.888.843.508
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	52.174.000
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	20.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.413.006.267
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	559.381.300
	TOTAL	19.044.561.567
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	134.180.800
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	691.162.700
	TOTAL	825.343.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	494.037.200
	TOTAL	494.037.200
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	417.086.100
	TOTAL	417.086.100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	529.876.200
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.395.537.908
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.803.206.000
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	TOTAL	4.728.620.108
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	18.664.457.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	9.006.179.390
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	128.247.735.754
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.013.990.097
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	20.503.732.166
	TOTAL	217.436.094.407
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	547.615.200
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.086.491.500
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	43.624.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.810.747.193
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.651.540.848
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.866.814.600
	TOTAL	19.006.833.341
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	279.955.000
	TOTAL	279.955.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.876.426.800
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.653.314.600
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.206.355.724
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.036.117.789
	TOTAL	24.772.214.913
	KESELURUHAN	3.360.117.574.870

Sumber : SIPD-RI, 2026

Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, alokasi belanja daerah telah didistribusikan kepada berbagai bidang urusan pemerintahan dengan fokus utama pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Urusan pemerintahan yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar adalah **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan** dengan total anggaran sebesar **Rp 642.524.465.871**. Alokasi ini mencakup program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat, pemberdayaan kesehatan, penguatan kapasitas SDM kesehatan, serta penyediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Bogor dalam memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang optimal dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selanjutnya, **Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan** menjadi urusan dengan alokasi terbesar kedua, yaitu sebesar **Rp 601.884.435.233**. Alokasi ini difokuskan pada pengelolaan pendidikan serta penyediaan layanan pendukung pendidikan lainnya. Besarnya porsi anggaran pada sektor ini menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tetap menjadi prioritas strategis dalam pembangunan Kota Bogor.

Urusan berikutnya yang juga memperoleh alokasi signifikan adalah **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman** dengan total anggaran sebesar **Rp.217.436.094.407**. Dana ini dialokasikan untuk pengembangan kawasan permukiman, pembangunan perumahan, peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), serta penataan kawasan kumuh. Alokasi ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Bogor dalam menyediakan hunian yang layak dan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat.

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan turut menjadi perhatian penting dengan alokasi sebesar **Rp.166.888.843.508**. Anggaran ini digunakan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta penguatan layanan transportasi publik yang memadai dan terintegrasi.

Selain itu, **Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup** menerima alokasi sebesar **Rp.155.429.538.021**. Anggaran ini dialokasikan untuk pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati, serta edukasi lingkungan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Bogor dalam membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Beberapa bidang urusan pemerintahan lainnya yang juga mendapatkan alokasi anggaran signifikan antara lain:

- **Kecamatan:** Rp.195.899.031.909
- **Sekretariat Daerah:** Rp.150.753.150.401
- **Sekretariat DPRD:** Rp.158.095.365.958

- **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:**
Rp.207.814.400.709
- **Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum:** Rp.82.807.659.877

Distribusi anggaran yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 menunjukkan pola kebijakan yang pro pelayanan dasar, dengan memberikan prioritas pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perumahan, transportasi, dan lingkungan hidup. Meskipun demikian, sektor-sektor lain yang mendukung tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketertiban umum, serta peningkatan kesejahteraan sosial juga tetap mendapat perhatian yang proporsional.

Dengan perencanaan alokasi anggaran yang terarah ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor secara berkelanjutan.

Tabel 5.5
Proporsi Anggaran Bidang Urusan Tahun 2026

BIDANG URUSAN	ANGGARAN	PERSENTASE
INSPEKTORAT DAERAH	28.002.630.638	0,83
KECAMATAN	195.899.031.909	5,83
KEPEGAWAIAN	47.825.733.255	1,42
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	40.570.334.376	1,21
KEUANGAN	127.053.102.225	3,78
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.724.929.000	0,08
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.563.474.544	0,05
PERENCANAAN	22.557.515.472	0,67
SEKRETARIAT DAERAH	150.753.150.401	4,49
SEKRETARIAT DPRD	158.095.365.958	4,71
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18.430.103.745	0,55
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	11.273.589.240	0,34
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	22.974.619.483	0,68
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.120.869.756	0,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	218.845.536.191	6,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	642.524.465.871	19,12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	82.807.659.677	2,46
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	43.486.376.550	1,29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.235.164.800	0,25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	155.429.538.021	4,63
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	21.287.323.196	0,63
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.072.305.655	0,06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	207.814.400.709	6,18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	46.480.356.693	1,38

BIDANG URUSAN	ANGGARAN	PERSENTASE
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.916.847.318	0,44
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17.122.709.989	0,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	601.884.435.233	17,91
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	13.354.995.381	0,40
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.117.419.940	0,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	166.888.843.508	4,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	19.044.561.567	0,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	825.343.500	0,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	494.037.200	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	417.086.100	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.728.620.108	0,14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	217.436.094.407	6,47
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	19.006.833.341	0,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	279.955.000	0,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	24.772.214.913	0,74
TOTAL	3.360.117.574.870	100,00

Terdapat program-program yang tidak dianggarkan, namun melekat pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut yaitu Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Penggunaan Arsip, Program Perlindungan dan Penyehatan Arsip, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, Program Pengembangan, dan Bahasa dan Sastra.

Tabel 5.6
Pagu RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Nasional	Program	Anggaran
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	550.724.000
	TOTAL	550.724.000
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.015.302.113
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.094.060.300

Prioritas Nasional	Program	Anggaran
Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	18.204.371.100
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	9.226.606.538
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	577.962.600
	TOTAL	39.118.302.651
Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	18.664.457.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	547.615.200
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.640.190.800
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	9.006.179.390
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	787.438.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	618.237.100
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.651.540.848
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.866.814.600
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	88.580.440
	TOTAL	40.871.053.378
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.757.080.977
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.525.043.048
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	418.545.132.355
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	730.415.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	150.290.288.506
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	199.995.493.994
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.127.497.040
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	833.059.544
	TOTAL	774.804.010.464
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.171.219.385
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	487.113.500
	TOTAL	2.658.332.885
	TOTAL KESELURUHAN	858.002.423.378

Dalam rangka memastikan sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional dengan kebijakan daerah, Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan alokasi anggaran yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Alokasi anggaran RKPD Kota Bogor Tahun 2026 terhadap prioritas pembangunan nasional terdiri dari lima kelompok prioritas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran sebesar Rp.550.724.000 untuk mendukung program pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Program ini bertujuan untuk mendorong penguatan kewirausahaan dan pengembangan sektor koperasi sebagai motor penggerak perekonomian lokal, serta meningkatkan peran aktif koperasi dalam penguatan ekonomi masyarakat.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan dan Ketahanan Nasional Sebesar Rp.39.118.302.651 dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan, pengelolaan air limbah, penyediaan air minum, serta pengelolaan persampahan, termasuk sistem pengelolaan persampahan regional. Alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur dasar yang berkelanjutan dan mendorong ketahanan pangan masyarakat.
3. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan, dan Pengentasan Kemiskinan Alokasi anggaran untuk prioritas ini mencapai Rp.40.871.053.378. Anggaran ini difokuskan pada pengembangan kawasan permukiman, pemberdayaan UMKM, pemberdayaan sosial, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan perlindungan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor memberikan perhatian serius pada upaya penguatan ekonomi masyarakat dari lapisan terbawah, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan sosial.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Prioritas ini mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp.774.804.010.464. Fokus utama alokasi ini meliputi penguatan sektor pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan kapasitas olahraga, serta dukungan pada kegiatan penelitian dan pengembangan daerah. Besarnya alokasi pada prioritas ini mencerminkan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus strategis Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan daya saing daerah dalam jangka panjang.
5. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi Sebesar Rp.2.658.332.885 dialokasikan untuk mendukung reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas kepegawaian daerah, serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Meskipun alokasinya relatif kecil, sektor ini tetap memiliki peran

penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas.

Distribusi anggaran RKPD Kota Bogor Tahun 2026 menunjukkan bahwa prioritas terbesar difokuskan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, sebagai fondasi utama untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor juga memberikan perhatian signifikan pada pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, ketahanan lingkungan, dan reformasi tata kelola pemerintahan.

Total alokasi anggaran yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dalam RKPD Tahun 2026 adalah sebesar Rp.858.002.423.378. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Bogor dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang terintegrasi dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Tabel 5.7
Pagu RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Provinsi	Program	Anggaran
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.653.314.600
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	6.640.190.800
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	50.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	712.038.800
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	964.432.380
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	71.875.533
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	586.022.500
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	474.999.900
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.822.581.889
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	88.580.440
	Total	17.064.036.842
Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	18.664.457.000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.457.614.926
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.015.302.113
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	12.058.886.485
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.094.060.300
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	24.510.598.066
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	18.204.371.100
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	9.006.179.390
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	9.226.606.538
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	128.247.735.754
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.050.000.000

Prioritas Provinsi	Program	Anggaran
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	20.503.732.166
	Total	255.039.543.838
Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	730.415.000
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	22.308.319.294
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.231.621.590
	Total	27.270.355.884
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	832.519.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.757.080.977
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.985.207.574
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	418.545.132.355
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	49.241.350.006
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.035.920.799
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	623.974.202
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.651.540.848
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	118.082.800
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	833.059.544
	Total	477.623.868.105
	Total Keseluruhan	776.997.804.669

Sumber : SIPD-RI, 2026

Dalam upaya mendukung pencapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Pemerintah Kota Bogor telah menyelaraskan alokasi anggaran RKPD dengan fokus pembangunan yang menjadi prioritas provinsi. Berikut adalah analisis distribusi anggaran berdasarkan kelompok prioritas Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam tabel.

- Menopang Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi
Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran sebesar Rp.17.064.036.842 untuk mendukung prioritas peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah. Program-program yang mendapatkan alokasi anggaran pada prioritas ini meliputi penguatan ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, penguatan tenaga kerja mandiri, pemberdayaan koperasi dan UMKM, penguatan keamanan pangan, penguatan perikanan budidaya, dan penguatan pertanian. Alokasi ini mencerminkan perhatian serius Pemerintah Kota Bogor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor tenaga kerja, UMKM, ketahanan pangan, serta sektor pertanian dan perikanan.
- Meningkatkan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan
Alokasi anggaran terbesar dalam mendukung prioritas provinsi berada pada kelompok ini dengan total Rp.255.039.543.838. Program-program yang menjadi prioritas meliputi pengelolaan sistem drainase, pengelolaan sistem air limbah,

pengelolaan persampahan, pengelolaan air minum, penguatan infrastruktur jalan dan jembatan, pengelolaan sistem transportasi publik, pengelolaan persampahan regional, pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengendalian limbah B3, serta penguatan pengelolaan ruang terbuka hijau. Prioritas ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor memberikan perhatian besar pada pembangunan dan penguatan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta penyediaan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

3. **Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan**
Pada prioritas ini, Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan anggaran sebesar Rp.21.362.765.000. Program-program yang didukung antara lain penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan perlindungan sosial. Alokasi ini menunjukkan komitmen dalam percepatan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
4. **Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Sebesar Rp.477.623.868.105 dialokasikan untuk mendukung prioritas pembangunan sumber daya manusia. Program yang menjadi fokus pada prioritas ini meliputi penguatan pendidikan, penguatan kesehatan, peningkatan layanan dasar kesehatan masyarakat, penguatan sistem pelayanan gizi, peningkatan ketahanan keluarga, penguatan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penguatan pendidikan keagamaan, peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, serta penguatan pendidikan keterampilan. Fokus besar pada sektor pendidikan dan kesehatan menjadi cerminan dari prioritas pembangunan SDM yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas generasi masa depan.

Pemerintah Kota Bogor memberikan prioritas anggaran terbesar pada penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan, yang sejalan dengan fokus utama pembangunan Provinsi Jawa Barat. Distribusi anggaran ini juga memperhatikan pentingnya mendorong produktivitas ekonomi, pemberdayaan UMKM, serta percepatan pengurangan kemiskinan. Seluruh alokasi anggaran yang disusun menunjukkan sinergi yang kuat antara program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi, baik dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi, maupun pelestarian lingkungan.

Total keseluruhan pagu yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan provinsi pada RKPD Kota Bogor Tahun 2026 mencapai Rp.776.997.804.669.

Prioritas Pembangunan Kota Bogor Tahun 2026 terdiri dari Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana, Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi, Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan,

Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani beserta program dan anggaran seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 5.8
Pagu RKPD Terhadap Prioritas Pembangunan Kota Bogor

Prioritas Kota Bogor	Program	Anggaran
Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	961.283.520
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	9.349.720.420
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	109.707.231.065
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	77.967.964.516
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.050.000.000
	TOTAL	199.036.199.521
Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	5.653.314.600
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	547.615.200
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	787.438.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.866.814.600
	TOTAL	9.855.182.400
Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	18.664.457.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.015.302.113
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	18.204.371.100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	199.995.493.994
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.035.920.799
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	9.006.179.390
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	9.226.606.538
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	20.503.732.166
	TOTAL	287.652.063.100
Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.757.080.977
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.690.702.460
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	418.545.132.355
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	49.241.350.006
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	302.080.000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.457.614.926
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	174.341.600
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	22.308.319.294
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.231.621.590
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	150.290.288.506
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	712.038.800
	TOTAL	697.710.570.514
	TOTAL KESELURUHAN	1.194.254.015.535

Sumber : SIPD-RI, 2026

Pemerintah Kota Bogor telah menyusun alokasi anggaran RKPD Tahun 2026 dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan strategis Kota Bogor. Berikut adalah analisis distribusi anggaran berdasarkan prioritas kota:

1. Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Aksesibilitas untuk Mendukung Kota yang Tertib, Teratur, dan Terhubung
Alokasi anggaran untuk prioritas ini mencapai Rp.199.036.199.521. Program-program yang didukung dalam prioritas ini meliputi pengembangan sektor pariwisata, penataan kawasan citytour, penyelenggaraan jalan, pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), serta penyelenggaraan penataan ruang. Fokus utama diarahkan pada peningkatan infrastruktur transportasi, perbaikan akses jalan, dan penataan ruang kota guna mendukung terciptanya Kota Bogor yang tertib, nyaman, dan terhubung dengan baik.
2. Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Alokasi anggaran untuk prioritas ini sebesar Rp.9.855.182.400. Program yang mendapat dukungan di antaranya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, pemberdayaan sosial dan pengembangan UMKM, serta rehabilitasi sosial. Anggaran ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, membuka peluang kerja, serta memperkuat peran UMKM dalam perekonomian kota.
3. Penguatan Kualitas Infrastruktur Permukiman dan Lingkungan yang Aman dan Berkelanjutan
Prioritas ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.287.652.063.100. Program-program yang didukung meliputi peningkatan kawasan permukiman, pengelolaan air limbah dan persampahan, penguatan sistem persampahan regional, penguatan kapasitas mitigasi kebencanaan, serta penguatan sistem pengelolaan ruang publik yang berkelanjutan. Fokus anggaran pada prioritas ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan, serta peningkatan infrastruktur permukiman yang layak.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Akses Pelayanan Publik.
Alokasi anggaran untuk prioritas ini menjadi yang terbesar, yaitu Rp.697.710.570.514. Program-program prioritas meliputi peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, penguatan keamanan pangan, penanggulangan bencana, penguatan sistem administrasi kependudukan, pengelolaan aplikasi informatika dan pelayanan publik, serta peningkatan pelayanan perumahan dan investasi. Besar alokasi anggaran ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat akses pelayanan kesehatan serta pelayanan administrasi yang efektif.

Pemerintah Kota Bogor memberikan perhatian terbesar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan pelayanan publik, dan akses pelayanan kesehatan dengan alokasi anggaran yang signifikan. Infrastruktur kota, transportasi, penataan ruang, serta pengelolaan lingkungan tetap menjadi bagian penting dalam distribusi anggaran. RKPD Tahun 2026 menunjukkan komitmen serius Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan kota yang tertib, nyaman, terhubung, dan berkelanjutan, dengan pelayanan publik yang semakin baik dan responsif. Total keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2026 adalah sebesar Rp.1.194.254.015.535.

Dari Tabel 5.8 di atas yang sebagaimana dirangkum pada Tabel 5.9 di bawah ini, Pemerintah Kota Bogor **memfokuskan anggaran terbesar pada sektor pendidikan, pelayanan publik, dan penguatan kualitas SDM**. Dukungan terhadap transportasi berkelanjutan dan lingkungan yang sehat juga menjadi prioritas penting, sementara kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi tetap diperhatikan meski alokasinya relatif kecil.

Tabel 5.9
Proporsi Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan	Anggaran	Persentase
Pengembangan transportasi berkelanjutan dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	199.036.199.521	16,66
Penguatan kesejahteraan sosial dan daya saing ekonomi	9.855.182.400	0,85
Penguatan kualitas kesehatan, hunian, kebersihan, kebencanaan dan lingkungan yang berkelanjutan	287.652.063.100	24,08
Penguatan pendidikan, kebudayaan, Keluarga, pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	697.710.570.514	58,42
TOTAL	1.194.254.015.535	100,00

Sumber : SIPD-RI, 2026 (diolah)

5.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIUSULKAN PENGANGGARAN DARI SUMBER ANGGARAN APBD PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Bogor telah menyusun dan mengajukan usulan bantuan keuangan (Bankeu) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Usulan ini merupakan hasil identifikasi kebutuhan prioritas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dasar, memperkuat infrastruktur, serta mendorong pengembangan sektor strategis di Kota Bogor. Usulan bantuan keuangan Kota Bogor ini menunjukkan fokus pada peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan sektor olahraga, pengelolaan lingkungan, serta penyediaan infrastruktur dasar yang merata di seluruh wilayah kota. Seluruh usulan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan,

meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing Kota Bogor di tingkat provinsi maupun nasional.

Total usulan bantuan keuangan yang diajukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mencapai **Rp.597.952.482.416**. Usulan ini terdiri atas 18 kegiatan prioritas yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah Kota Bogor. Berikut daftar usulan yang diajukan Kota Bogor yang disajikan dalam table 5.10 sebagai berikut:

Tabel 5.10
Rencana Usulan Pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2026

Prioritas	Usulan (Judul Kegiatan)	Lokus	Perangkat Daerah Tujuan	Jenis Bankeu	Pagu (Rp)
1	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Kota Bogor	Dinas Kesehatan	Topdown	34.311.211.200
2	Penyediaan Ambulance Gawat Darurat untuk IGD Puskesmas Rawat Inap/menuju Rawat Inap	Kota Bogor	Dinas Kesehatan	Bottom up	1.300.000.000
3	Alat Kesehatan RSUD Kota Bogor	RSUD Kota Bogor	Dinas Kesehatan	Bottom up	50.000.000.000
4	Dana Operasional Posyandu Kelurahan dan TP Posyandu Kab/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan	Kota Bogor	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jawa Barat	Topdown	1.823.250.000
5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	6 Kecamatan di Kota Bogor	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bottom up	7.900.000.000
6	Penyelenggaraan PORPROV XV tahun 2026	Kota Bogor	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Bottom up	53.000.000.000
7	Pengadaan Peralatan Pertandingan PORPROV XV tahun 2026	Kota Bogor	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Bottom up	30.000.000.000
8	Rehabilitasi Stadion Pajajaran Kota Bogor (Tahap 2)	Jl. Pemuda No. 2 Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal Kota Bogor	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Bottom up	31.500.000.000
9	Insenerator / Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	TPS 3R Cipaku, Kelurahan Cipaku, TPS 3R Genteng Kelurahan Genteng, TPS 3R Bojongkerta Kelurahan Bojongkerta, TPS 3R Rnacmaya Kelurahan rancamaya, TPS 3R Mulyaharja Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, TPS 3R Bumi Kencana Permai	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Bottom up	12.000.000.000

Prioritas	Usulan (Judul Kegiatan)	Lokus	Perangkat Daerah Tujuan	Jenis Bankeu	Pagu (Rp)
		Kelurahan Kencana, TPS 3R Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Tanah Sareal dan TPS 3R Mutiara Bogor Raya Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur			
10	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jl, Pahlawan , Bondongan	Dinas Tenaga Kerja	Bottom up	8.993.075.367
11	Pembangunan Reservoir beserta jaringan pipa pendukung dan pengembangan jaringan	Kec Bogor Utara, Kec. Tanah Sareal	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Bottom up	40.000.000.000
12	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Penyeberangan pada kawasan simpang paledang dan Pemasangan pagar trotoar	Jalan Kapten Muslihat, Jalan paledang dan Jalan Mayor Oking	Dinas Perhubungan	Bottom up	1.699.500.000
13	Pembuatan dan Pengadaan Prasarana Olah Raga Panjat Tebing standar IFSC (Speed Wall 12x15 IFSC Lisensi, Lead Wall 12x15, Boulder Wall 20x4,5 dan Peralatan)	Jl. Pemuda No. 2 Kel. Tanah Sareal Kec. Tanah Sareal Kota Bogor	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Bottom up	10.321.393.000
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kecamatan Bogor Barat	Jl. K.H. Abdullah Bin Nuh, Kel. Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat Kota Bogor	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Bottom up	25.548.865.000
15	Pembangunan Wisma Atlet	Kelurahan Kayumanis, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Bottom up	139.596.761.049
16	Pembangunan Lapangan Tembak	Kelurahan Kayumanis, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Bottom up	66.558.426.800
17	Pembangunan Jalan Akses IPAL dan GOR Kayu Manis	Kelurahan Kayumanis, Kec. Tanah Sareal Kota Bogor	Dinas PUPR	Bottom up	58.200.000.000
18	Pembangunan Jalan Akses Kantor Pemerintahan	Kelurahan Katulampa, Kec. Bogor Timur Kota Bogor	Dinas PUPR	Bottom up	25.200.000.000
TOTAL					597.952.482.416

Sumber : Bapperida, 2025

Sebagai bentuk komitmen politik dan tanggung jawab kepada masyarakat, Walikota Bogor telah merumuskan sejumlah janji politik yang dituangkan dalam program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Janji politik

ini menjadi pedoman dalam mendorong pembangunan di berbagai sektor prioritas yang langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Bogor.

Total anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi janji politik Walikota Kota Bogor tahun 2026 mencapai Rp.518.811.148.584. Alokasi anggaran ini tersebar dalam berbagai kegiatan prioritas yang melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis.

Fokus Janji Politik Walikota Tahun 2026:

- 1. Penguatan Sektor Pendidikan:
 - Pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
 - Dukungan infrastruktur dan sarana pendidikan di berbagai kecamatan.
- 2. Peningkatan Infrastruktur Dasar:
 - Pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat.
 - Peningkatan fasilitas pelayanan publik seperti pasar rakyat, taman, dan sarana olahraga.
- 3. Penguatan Sektor Kesehatan:
 - Pembangunan dan pengadaan alat kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - Peningkatan fasilitas di Puskesmas dan RSUD.
- 4. Pengelolaan Lingkungan dan Persampahan :
 - Pengadaan fasilitas pengelolaan sampah dan perbaikan sistem drainase guna menciptakan lingkungan yang sehat dan tertata.
- 5. Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan:
 - Program-program yang menysasar langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang merata.

Pemerintah Kota Bogor melalui janji politik Walikota berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan akses infrastruktur, dan menciptakan lingkungan kota yang bersih dan tertata. Janji politik ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan Kota Bogor yang semakin cerdas, sehat, Sejahtera dan lancar.

Adapun anggaran masing-masing kegiatan unggulan seperti pada table di bawah ini.

Tabel 5.11
Pagu RKPD Kegiatan Janji Politik Walikota

MISI 1 BOGOR CERDAS

No	JANJI POLITIK	PERANGKA T DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
1	Menambah unit sekolah	Dinas Pendidikan	Pembangunan unit sekolah baru dan	FS Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP	1.000.000.000	Pembangunan Unit Sekolah Baru

No	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
	dan ruang kelas baru		ruang kelas baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru 8 SDN (SDN Cemplang, SDN Cilendek 1, SDN Katulampa 5, SDN Pengadilan 5, SDN Batutulis 3, SDN Rancamaya 3, SDN Rancamaya 2, SDN Merdeka)	16.717.108.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru
				Pembangunan 11 Unit Ruang Kelas Baru SMPN : - SMPN 11 2 UNIT - SMPN 12 4 UNIT - SMPN 13 5 UNIT	6.700.000.000	Pembangunan Ruang Kelas Baru
2	Subsidi biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor	Beasiswa Miskin	Beasiswa Miskin SMA, MA, SMK	4.879.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
		Dinas Pendidikan		Beasiswa Miskin SD	243.500.000	Penyediaan Biaya Personil Sekolah Dasar
		Dinas Pendidikan		Beasiswa Miskin SMP	1.490.250.000	Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama
		Dinas Pendidikan		Beasiswa PKBM	1.698.000.000	Penyediaan Biaya Personil Kesetaraan
		Dinas Pendidikan		Bantuan pendidikan siswa SMP Swasta	6.000.000.000	Penyediaan Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama
3	Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor	Insentif guru ngaji dan honorarium guru	Pemberian Insentif Kepada Guru Ngaji 3.200 x 12 bulan x 200.000	7.680.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4	Meningkatkan gaji dan fasilitas guru honorer	Dinas Pendidikan		Honorarium Guru SKB Negeri Kota Bogor	606.340.000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
				Honorarium Guru SD Negeri Kota Bogor	9.200.318.296	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

No	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
				Honorarium Guru SD Negeri Kota Bogor	28.643.661.336	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar
				Honorarium Guru SMP Negeri Kota Bogor	7.189.259.336	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengha Pertama
				Honorarium Guru SMP Negeri Kota Bogor	7.362.143.632	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar
5	Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu	Dinas Pendidikan	Beasiswa mahasiswa berprestasi	Belanja Beasiswa Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Miskin IPB (17 mahasiswa), UI (4 mahasiswa), UNJ (23 mahasiswa), IBI Kesatuan (8 mahasiswa), UIKA (8 mahasiswa), Pakuan (10 mahasiswa)	1.381.208.000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
6	Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bogor	Tebus ijazah	Tebus Ijazah SMK, SMA, MA	3.082.643.500	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
		Dinas Pendidikan		Total Tebus Ijazah SMP :	2.058.635.500	Penyediaan Biaya Personil Menengah Pertama
				- SMP Swasta (26 sekolah, 393 siswa)		
				- MTs Swasta (26 sekolah, 380 siswa)		
7	Mengembangkan command center	Diskominfo	Pembangunan command center	Pembangunan Integrated Command and Control Center - Bangunan Integrated Command and Control Center Fase 1 dan Jasa Pengawasan - Pembangunan Sistem dan Perangkat Integrated	14.969.926.600	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah

No	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
				Command Control Center Fase 2.A		
				Pembangunan Aplikasi Dashboard Command Center Fase 1 (Prioritas 4) (Pelayanan Publik)		Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
8	Pengembangan CCTV di Lokasi Strategis	Diskominfo	Pembangunan CCTV	Pengadaan CCTV Kota Bogor – Janji Politik (10 titik)	514.995.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
9	Pemasangan Wifi gratis di seluruh Fasilitas Publik	Diskominfo	Pembangunan Wifi Gratis	Pengadaan Wifi untuk Ruang Publik (managed service) – Janji Politik 65 titik	1.005.342.000	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
				Pemeliharaan Wifi Publik Eksiting	185.494.600	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
10	Pembangunan gedung pemerintahan terpadu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan gedung dan infrastruktur penunjang Kantor Pemerintahan Baru	Pematangan Lahan Zona Selatan (Lapangan dan Masjid) Terdiri dari: - Cut & Fill - Pekerjaan Saluran Sungai	2.905.055.220	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota
11	Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman online berkolaborasi dengan aparaturnya penegak	Diskominfo	Sosialisasi pencegahan bahaya judi online	Publikasi Judi Online di Media Cetak dan online lokal dan nasional	149.695.032	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Pembuatan Konten Publikasi bahaya judol dan pinjol	89.922.600	Pengelolaan Media Komunikasi Publik

No	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
	hukum dan wilayah	SATPOLPP		Penyuluhan Bahaya Judi Online dan Pinjaman online Tingkat Kecamatan (300 Orang)	174.780.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
12	Memberikan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Yang Berhadapan dengan Hukum	Bagian Hukum	Bantuan hukum gratis ke masyarakat	Bantuan hukum gratis ke masyarakat miskin 32 kasus litigasi dan 15 non litigasi	354.800.000	Fasilitasi Bantuan Hukum
13	Pelayanan Jemput Bola Administrasi Kependudukan	Disdukcapil	Penyediaan sarana prasarana dan pelayanan jemput bola	Pembelian Kendaraan Roda 4 Mobil Pelayanan	909.597.400	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan
				1. Layanan Jempol Bahagia	130.680.000	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
				2. Layanan Goes To School	13.500.000	
				3. Layanan Sore Malam	12.240.000	Peningkatan dalam Pelayanan Catatan Sipil
				4. Layanan SOS	11.880.000	
				1. Layanan PALU SAKTI	9.720.000	
				3. Layanan LAPAK CAPIL Dan layanan even2 lainnya	15.120.000	
14	Pelayanan Jemput Bola Perizinan	DPMPSTP	Pelayanan perizinan mendekat ke masyarakat	SMART Merapat	121.064.980	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
15	Penguatan sarana prasarana pelayanan publik (Kantor kecamatan dan kelurahan)	Kecamatan Bogor Selatan	Pembangunan dan Rehabilitasi Kantor Kecamatan dan Kelurahan	Pengadaan lahan kantor Kelurahan Pakuan	6.094.883.710	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Selatan		Rehab gedung kantor Kecamatan Bogor Selatan	283.500.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Selatan		Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Cipaku	940.925.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Selatan		Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Mulyaharja	940.925.000	

No	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
		Kecamatan Bogor Selatan		Pemeliharaan 15 gedung kantor Kelurahan se Kecamatan Bogor Selatan	791.220.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Barat		Pembangunan Kantor Kelurahan Situgede	1.169.850.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Barat		Pembangunan Kantor Kelurahan Loji	1.002.318.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Barat		Pemeliharaan Rutin Kantor dan Gedung Kelurahan dan Kecamatan se Kecamatan Bogor Barat	916.703.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Barat		Sewa Gedung Kantor Kelurahan Situgede	84.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Barat		Sewa Gedung Kantor Kelurahan Loji	61.284.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Barat		Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Cilendek Timur, Cilendek Barat & Menteng	159.844.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Barat		Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Curug, Curug Mekar & Semplak	159.844.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Barat		Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Sindang Barang, Balumbang Jaya & Marga Jaya	159.844.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Barat		Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Pasir Kuda, Gunungbatu & Kecamatan	322.180.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Tanah Sareal		Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tanah Sareal	195.800.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

No	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
		Kecamatan Bogor Tengah		Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Bogor Tengah	617.482.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Tengah		Rehabilitasi Gedung Kantor Ciwaringin	186.610.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Tengah		Rehabilitasi Gedung Kantor Paledang	122.820.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Utara		Rehabilitasi Gedung Kantor Cibuluh	643.438.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Utara		Rehabilitasi Gedung Kantor Ciluar	643.496.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Utara		Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Bogor Utara	1.378.478.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Timur		Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Bogor Timur	2.940.382.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Timur		Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Baranangsiang		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Timur		Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Katulampa		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Timur		Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Sindangrasa		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Timur		Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Sindangsari		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Timur		Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Sukasari		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Kecamatan Bogor Timur				

No	JANJI POLITIK	PERANGKA T DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
		Kecamatan Bogor Timur		Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Tajur		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	TOTAL				147.290.540.542	

MISI 2 BOGOR SEHAT

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
A	Pelayanan Kesehatan Prima					
1	Pemeriksaan kesehatan gratis	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan kesehatan gratis satu kali per tahun untuk setiap orang, dilaksanakan berdasarkan klaster siklus hidup.	Pelaksanaan Pamong Walagri	13.187.400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				Pelaksanaan Pamong Walagri (Mamin)	9.675.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Pengembangan Aplikasi Pamong Walagri	48.768.800	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
				Penyediaan dan distribusi Bahan Medis Habis Pakai penunjang pelayanan kesehatan dasar dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) ke Puskesmas	14.330.515.305	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
2	Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan sub spesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya.	Dinas Kesehatan	Pengadaan Peralatan Kesehatan Posyandu (SPM Kesehatan)	Peralatan Posyandu	776.400.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Kecamatan	Pembangunan Posyandu	Pembangunan dan Perbaikan Posyandu	6.483.092.340	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		Dinas Kesehatan	Pembangunan Puskesmas	DED Pustu Situ Gede	577.992.000	Pembangunan Puskesmas
			Pembangunan Puskesmas	DED Pembangunan Pustu Cibuluh	155.454.000	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Rehabilitasi Puskesmas	Pemeliharaan Pustu Katulampa	224.154.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
			Peningkatan Puskesmas	Revitalisasi Puskesmas Pondok Rumput	764.591.000	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3	Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas	Dinas Kesehatan	Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas di Kota Bogor	Pelayanan Kesehatan Ibu Anak, Lansia, dan Disabilitas	400.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				Pelayanan Kesehatan Ibu Anak, Lansia, dan Disabilitas	98.400.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				Pelayanan Kesehatan Ibu Anak, Lansia, dan Disabilitas	17.932.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				Pelayanan Kesehatan Ibu Anak, Lansia, dan Disabilitas	7.200.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				Pelayanan Kesehatan Ibu Anak, Lansia, dan Disabilitas	15.100.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				Pelayanan Kesehatan Ibu Anak, Lansia, dan Disabilitas	6.300.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
		Dinas Kesehatan	Penyediaan layanan rawat inap IGD di 6 Puskesmas	Operasional IGD Puskesmas : - BMHP - Honor SDM	2.490.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
4	Bogor Quick Response dalam penanganan pasien darurat dan bencana alam	Diskominfo	Kegawatdaruratan umum (NTPD)	Sewa Infrastruktur layanan pengaduan masyarakat kegawatdaruratan NTPD 112	199.793.700	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
		Dinas Kesehatan	Pelayanan Kegawat daruratan kesehatan	Operasional Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (Pelayanan Kesehatan Oleh UPTD PSC)	1.060.000.096	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Penyediaan dan distribusi obat kegawat daruratan	117.923.800	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
5	Membuat system pelayanan rujukan yang terpusat dan terintegrasi ke seluruh Rumah sakit di dalam dan di luar Kota Bogor	Dinas Kesehatan	Sistem Pelayanan Rujukan yang dilaksanakan UPTD PSC	Pengadaan Ambulance Motor	304.090.500	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
6	Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin	Dinas Kesehatan	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Peserta JKN segmen PBPB dan BP kelas 3 yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	73.764.600.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3	9.261.168.000	
7	Menyediakan layanan armada ambulans gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling	Dinas Kesehatan	Operasional Ambulan 24 jam di 6 IGD Puskesmas dan dokter keliling untuk melayani kelompok rentan	Operasional Puskesmas 24 Jam	2.060.484.000	Operasional Pelayanan Puskesmas
8	Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (8 Disabilitas & lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling.	Dinas Sosial	Alat bantu kesehatan untuk kelompok disabilitas dan kelompok rentan	Penyediaan Alat Bantu	1.633.763.500	Alat bantu kesehatan untuk kelompok disabilitas dan kelompok rentan
		Dinas Kesehatan	Sarana Prasarana Layanan Dokter Keliling Khusus Kelompok Rentan dan Disabilitas	Pengadaan Ambulance Motor	sama dengan di atas	
9	Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur	Dalduk KB	Dapur Sehat	Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting di Kampung KB Catatan: kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat cara pengolahan makanan bergizi sesuai dengan aturan yang ada dan memberikan	359.036.100	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
10				makanan kepada keluarga beresiko stunting sehingga bisa diimplementasikan dalam sehari-hari		
		Dinas Kesehatan	Pelayanan Gizi Bagi 5 Kelompok Sasaran : - Ibu (Hamil, Menyusui, Nifas) - Baduta 0 - 23 Bulan - Balita 24 - 59 Bulan - Remaja Putri - Calon Pengantin	Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian PMT, Pemberian Tablet Tambah Darah	1.584.975.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Urban Farming Untuk mendukung penanganan Stunting	Pengadaan bibit tanaman pangan dan palawija, benih sayuran dan bibit aneka buah-buahan serta tanaman biofarmaka	557.693.000	Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Penerbitan Kartu Identitas Anak untuk akses BPJS	Belanja bahan pendaftaran penduduk	2.299.846.400	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan .	Dinas Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Pangan	Stikerisasi makanan jajanan dan Sentra makanan jajanan	49.966.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
		DKPP	Ketersediaan pangan	Pengadaan beras cadangan pangan (17.925 kg)	299.347.500	Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Pemanfaatan Pangan	Sosialisasi Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) go to school	193.720.000	Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
				Uji sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	13.710.000	Penyediaan Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
				Rapid Test kit	32.136.000	
				Uji hewan dan pangan asal hewan	210.000.000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
			Keterjangkauan Pangan	penyaluran bantuan pangan untuk daerah rawan pangan (585 paket)	227.916.000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Gerakan Pangan Murah	2.700.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
			Peningkatan Gizi	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) (2000 paket)	193.237.200	Sub kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
B	Pelayanan Kebersihan					
1	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce,	Dinas Lingkungan Hidup	Operasional TPS 3R	Pemeliharaan Gedung TPS 3R Griya Katulampa dan TPS 3R Ciparigi)	98.700.000	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
			Penilaian Kinerja Masyarakat/	1. Penyelenggaraan Program	539.050.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
	Reuse, Recycle)		Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	BOGORKU BERSIH 2. Pendukung Program Sekolah Adiwiyata (Hidrponik dan Dropbox tempat sampah terpilah)		Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
				Sosialisasi dan Pelatihan Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah	500.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
2	Penyediaan fasilitas dan armada angkutan sampah yang layak dan memadai	Dinas Lingkungan Hidup	Armada angkutan sampah (truk, mobil pick up, mosam)	Dump Truck 2 unit	1.488.900.000	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS
				Compactor 1 unit	1.616.387.300	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS
				Pick Up Ram	557.180.000	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS
				Arm Roll 2 unit	1.470.138.600	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SP A/TPS-3R/TPS
3	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan SPAM	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	600.000.000	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
				Penyusunan Jakstrada Air Minum, Penyusunan database air minum	100.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
				Rehabilitasi SPAM Jaringan Perpipaan Non PDAM, monev SPAM Jaringan Perpipaan Non PDAM,	167.894.300	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
				Pembinaan dan Pemberdayaan KPP non PDAM (Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaat), Perjalanan Dinas Dalam Kota (Paket Meeting), Honor Narasumber, Transport Narasumber, Transport peserta	34.050.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
			Pengembangan SPALD	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	566.192.200	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
				Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) Komunal, Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) Individu	800.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
				Pembinaan dan Pemberdayaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), KPP (Kelompok Pemeliharaan dan Pemanfaat), Perjalanan Dinas Dalam Kota (Paket Meeting), Honor Narasumber, Transport Narasumber, Transport peserta,	57.258.000	
		Dinas Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan ODF	Penguatan kelembagaan dalam pencapaian 5 pilar STBM	170.769.600	Penyelenggara an Kabupaten/Ko ta Sehat
			Pemeriksaan Kualitas Air Minum	Pengawasan eksternal kualitas air minum PDAM	69.465.600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
4	Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan akses perubahan iklim dan resiko bencana	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyusunan Perkada RDTR	Penyusunan Perkada RDTR Kota Bogor: - Pembahasan Lintas Sektor - Persetujuan Substansi ke Menteri ATR/BPN - Penetapan Perkada - Integrasi RDTR ke OSS	350.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota
C	Ketahanan Keluarga					
1	Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor	Rumah Tidak Layak huni di Kawasan Kumuh Kewenangan Kota RTLH reguler dan RTLH Bedah Rumah	Penyediaan tempat tinggal bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui bantuan sosial kepada individu	5.320.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			Rumah Tidak Layak huni di Kawasan Kumuh di luar Kewenangan Kota. RTLH reguler dan RTLH Bedah Rumah	Rumah Tidak Layak huni di Kawasan Kumuh di luar Kewenangan Kota. RTLH reguler dan RTLH Bedah Rumah	39.743.837.732	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha
			Subsidi Rusunawa	Menyediakan hunian bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (maksimal pendapatan umk) dengan tarif harga yang murah	7.954.000.000	
2	Memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin	Disnaker	Memberikan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada kelompok masyarakat/pekerja rentan (P3KE)	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Tenaga Kerja Penghasilan Rendah	1.597.276.800	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
3	Memberi makan siang	Dinas Kesehatan	Penyediaan dan fasilitasi	Makanan Tambahan	1.586.399.500	Pengelolaan Pelayanan

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
	dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil		makanan bergizi			Kesehatan Gizi Masyarakat
				Memberikan Pelatihan Hygiene Sanitasi Pangan pada pengelola dan penjamah Makanan dan Melakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Kualitas sampel makanan di dapur MBG, Jasa Boga, Restoran	85.596.000	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan Sertifikat Laik hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makana/restoran dan depot air minum (DAM)
4	Pembangunan Gedung Olahraga Masyarakat di 4 kecamatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Pembangunan GOM di Kecamatan (1 kecamatan = 1 GOM)	Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga Kecamatan Bogor Barat (Tahap 1)	8.884.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan
5	Revitalisasi Gor Pajajaran Menjadi Pusat Olahraga dan Gedung kreatif dan seni terpadu	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Revitalisasi GOR Pajajaran memperhatikan untuk olah raga dan tempat seni kreatif terpadu	Rehabilitasi Stadion Pajajaran	90.506.681.000	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan
	TOTAL				284.956.609.073	

MISI 3 BOGOR SEJAHTERA

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
1	Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & Profesional	DPMPTSP	Pengembangan Iklim Investasi	Forum Investasi Daerah	99.968.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
				Link and Match kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerjad terkait investasi	176.138.400	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Dinas Tenaga Kerja	Penyiapan calon tenaga kerja berkomptensi	Pelatihan Berbasis Kompetensi	46.072.000	Pelayanan antar kerja
				Pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi masyarakat kota bogor (Pelatihan Las, Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Digital Marketing, Pelatihan Terapis, Pelatihan Hidroponik, Pelatihan Barista, Pelatihan Service HP, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Mencukur, Pelatihan Montir, Pelatihan Tata Rias Wajah, Pelatihan Barbershop, Pelatihan Otomotif Motor, Pelatihan Bahasa Jepang, Pelatihan Service AC, dan Pelatihan Perhotelan)	2.727.934.600	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
			Informasi kesempatan kerja	Penyuluhan dan Terwujudnya BKK yang terampil memahami ketenagakerjaan (Memfasilitasi para pencari kerja untuk memasuki dunia kerja)	52.186.000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
				Pendataan Pencari Kerja ULD yang Terfasilitasi Dalam Lowongan Kerja (Memfasilitasi para difabel dalam informasi pasar kerja)	14.566.000	Pendataan Pencari Kerja ULD yang Terfasilitasi Dalam Lowongan Kerja (Memfasilitasi para difabel dalam informasi pasar kerja)
				Pelaksanaan Padat Karya (Pemberian kerja sementara di 68 kelurahan yang berasal dari kemiskinan ekstreme dan pemberdayaan ekonomi lokal)	2.800.241.300	Perluasan Kesempatan Kerja
				Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi (Pemeliharaan Aplikasi web Bogor kerja)	39.570.800	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
				Pelaksanaan Bursa Kerja Expo (Memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan pada bursa kerja)	35.237.624	Job Fair/Bursa Kerja
				Sosialisasi TPPO (Menedukasi Masyarakat agar tidak bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal)	50.788.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
				Bimbingan Teknis Metodologi LPK	50.000.000	Pembinaan Kerja Swasta Lembaga Pelatihan
		DinKUKMDa gin	Wirausaha Baru	Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan usaha mikro	787.438.000	Produksi dan pengolahan, pemasaran sumber daya manusia serta desain dan teknologi
			Memperkuat dan meningkatkan manajerial UMKM	Sosialisasi Aplikasi Solusi, Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SOLUSI yang terdiri dari pengembangan fitur e commerce dan updating data UMKM	164.000.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
				Pelatihan Kewirausahaan dan Kompetensi Usaha Mikro	6.161.790.800	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
		Disparbud	Meningkatkan Kompetensi Pelaku Pariwisata dan Ekraf	Pelatihan Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif	38.899.900	Sertifikasi Kompetensi Berbasis Ekraf
				Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	150.000.000	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
			Hak Cipta	Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	50.000.000	Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
2	Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor	Dinas Tenaga Kerja	Bekerjasama dengan pengusaha dan Lembaga Sertifikasi untuk melatih tenaga kerja baru (memperluas kerjasama sertifikasi)	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi sebanyak 13 Paket Pelatihan bagi pencari kerja. Program yang akan diadakan antara lain Desainer Grafis Muda, Digital Marketing, Content Creator, Pengolahan Makanan Komersial, Barista, Housekeeping, Junior Beautician, Pembudidayaan Sayur Hidroponik, dan Teknisi AC Residensial	2.235.380.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
			Pengadaan Sarana Prasarana Pelatihan BLK	Pengadaan Peralatan Pelatihan Kejuruan Pariwisata skema Tata Boga (Peralatan F&B Product, Peralatan F&B Service, dan Peralatan Barista) dan Kejuruan Refrigerasi (Peralatan Teknisi AC Residensial)	600.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
			BLK memfokuskan kualifikasi khusus seperti BAHASA	Belanja Pemeliharaan gedung dan bangun dan kantor (Rehabilitasi Gedung Balai Latihan Kerja termasuk Revitalisasi Ruang Kelas dan Workshop Pelatihan Kerja yang ada di BLK: Workshop TIK (Lab Komputer), Workshop Tata Boga (Kitchen), Workshop Perhotelan, Workshop Menjahit dengan Mesin, Workshop Tata Kecantikan, dan Workshop Refrigerasi (Teknisi AC))	1.301.116.864	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3	Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan	DinKUKMDa gin	Pengembangan sentra kuliner 1 (satu) lokasi setiap kelurahan	Kajian Lokasi dan model sentra kuliner setiap kelurahan	66.600.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro/ Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
4	Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya lokal	DISPARBUD	Pengembangan Atraksi	- Pengadaan sarana prasarana di Kampung Wisata - Pendampingan Daya Tarik Wisata - Kampanye Sadar Wisata	474.999.900	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota
			Peningkatan Kelembagaan	Pelatihan Sadar Wisata (POKIR)	99.999.800	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
			Pembuatan Paket Wisata	Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	111.562.900	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
5	Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM)	DinKUKMDa gin	Permodalan UMKM melalui penguatan koperasi/lembaga keuangan mikro	Pembinaan dan pendampingan Koperasi Merah Putih dan Koperasi yang sudah ada	81.776.000	Pembinaan dan Pendampingan bagi keluarga dan kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi dalam pengembangan ekonomi
			Pemasaran dalam bentuk Online	Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan Fasilitator E-commerce untuk UMKM di Kota Bogor dan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Solusi	40.800.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
			Pemasaran dalam bentuk offline	Pameran Skala Lokal, Nasional dan Internasional	239.379.200	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
		DISPARBUD	Pelatihan Pemanfaatan Smartphone untuk Foto Produk dan Pemasaran	Pelatihan Penggunaan E Commerce dan Digital Marketing	71.200.000	Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha
6	Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif	DinKUKMDa gin	Sarana Promosi	Pemeliharaan Peta Digital Kepariwisata (PERKAWIS) Kota Bogor	43.067.300	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
				Pengembangan Layanan Kepariwisata (LAKSA)	48.246.000	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
				Temu Bisnis	46.240.000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
				Pameran Trade Expo Indonesia (TEI)	94.704.200	Pameran Dagang Nasional

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
				Pelatihan Ekspor di Pusat Sumber Daya Manusia Ekspor dan Sumber Jasa Perdagangan (PPEJP)	40.000.000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
				Sosialisasi Ekspor	39.040.000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
				West Java Expo (WJX)	94.704.200	Pameran Dagang Nasional
7	Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas	DPMPTSP	Pembentukan inkubator bisnis	Pelaku usaha mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas tentang strategi peningkatan usaha sebanyak 20 pelaku usaha melalui inkubator bisnis melibatkan jaringan UMKM dan Universitas	99.213.200	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
		Dinas Pemuda dan Olah Raga	Mengembangkan inkubator bisnis pemuda	Bogor Youth Camp	180.155.699	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
			Penjaringan pengusaha muda untuk menjadi start up bisnis	Sosialisasi dan Pengenalan Wira Usaha Muda Pemula	412.642.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota

No.	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
		DinKUKMDa gin	Peningkatan Kualitas Produk, kontinuitas produksi, jaringan pemasaran - Pra Inkubasi - Inkubasi - Pasca Inkubasi	Pelaksanaan Kurasi Calon Peserta, Pendampingan dan Monitoring terhadap 30 IKM	273.208.000	Kordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan Sumberdaya Industri
	TOTAL				19.852.290.687	

MISI 4 BOGOR LANCAR

No	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
1	Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik	Dinas Perhubungan	Penyediaan angkutan umum massal	Penyediaan Subsidi Angkutan Umum Massal dengan Skema Buy The Service (BISKITA)	46.421.255.748	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Pendampingan Manajemen Pengelola Angkutan Umum Massal	2.208.823.200	
				Sewa TOB	1.454.761.000	
			Penyediaan angkutan umum berbasis listrik	Penyusunan Kajian Angkutan umum Listrik	97.636.200	
2	Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda	Dinas Perhubungan	Integrasi antar moda angkutan umum	Menyusun Kajian Integrasi Antar Moda (Bis dengan angkutan Umum/Stasiun KA dengan angkutan Umum)	97.636.200	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3	Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas	Dinas Perhubungan	Pembangunan Shelter/Bus Stop/Terminal	Pembangunan Bus Stop 4 unit	22.386.000,00	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
				Pembangunan Shelter 1 unit	109.666.800,00	
				Pekerjaan JPO Paledang	916.355.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
				Revitalisasi Terminal Bubulak Tahap 2 (Pembangunan Gedung Kantor Terminal Bubulak)	6.423.025.200	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
4	Promosi Penggunaan Transportasi Umum: Melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum dengan memperkenalkan program-program insentif seperti tarif terjangkau atau diskon untuk pelajar dan pekerja	Dinas Perhubungan	Penggunaan Transportasi Umum	Sosialisasi terkait Penggunaan Transportasi Umum	200.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

No	JANJI POLITIK	PERANGKAT DAERAH	SUBSTANSI	AKTIVITAS	PAGU	SUB KEGIATAN
5	Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Kebon Pedes	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			diajukan ke Provinsi Jabar	
6	Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		DED	200.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
7	Pembangunan lanjutan R3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED/Pembebasan Lahan/Pembangunan Jalan	Jalan lanjutan R3 (Segmen Parung Banteng - Katulampa)	3.000.000.000	Pembangunan Jalan
				Saluran R3		
				Pembebasan Lahan setelah bendung katulampa (DPPT, Appraisal, Pembebasan Lahan (m2))	2.492.215.734	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
	Pembangunan lanjutan R2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED/Pembebasan Lahan/Pembangunan Jalan	DED Jalan R2	200.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
				Jalan R2 sta 0-500 sisi utara	3.000.000.000	Pembangunan Jalan
	TOTAL				66.711.708.282	

Sumber : SIPD-RI, 2026 (diolah)

Tabel 5.12
Rencana Pendanaan Pelaksanaan SPM Tahun 2026

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	PAGU
1	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.000.000.000
2	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	300.000.000
3	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.200.000.000
4	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengadaan Mebel Sekolah	3.052.998.900
5	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.000.000.000
6	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	475.000.000
7	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	28.664.243.736
8	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	400.000.000

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	PAGU
			Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
9	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	94.878.600
10	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	9.666.128.096
11	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	254.760.000
12	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	17.839.418.000
13	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	281.603.200
14	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	13.955.000.000
15	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.560.000.000
16	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.000.000.200
17	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	276.200.000
18	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.567.560.000
19	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.000.000.000
20	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengadaan Mebel Sekolah	2.000.000.000
21	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	8.357.558.000
22	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	688.792.090
23	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.372.143.632
24	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.028.325.000
25	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	165.497.200
26	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.214.576.336
27	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	120.236.000
28	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	198.156.000
29	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	15.743.646.000
30	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	351.127.700
31	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	850.000.000
32	Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	150.000.000

NO	NAMA LAYANAN SPM		NAMA OPD	SUB KEGIATAN	PAGU
33	Pendidikan Usia Dini	Anak	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5.829.382.864
34	Pendidikan Usia Dini	Anak	DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	766.642.024
35	Pendidikan Usia Dini	Anak	DINAS PENDIDIKAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	89.258.436
36	Pendidikan Usia Dini	Anak	DINAS PENDIDIKAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	487.968.308
37	Pendidikan Usia Dini	Anak	DINAS PENDIDIKAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	335.196.000
38	Pendidikan Usia Dini	Anak	DINAS PENDIDIKAN	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52.261.424
39	Pendidikan Usia Dini	Anak	DINAS PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.782.236
40	Pendidikan Usia Dini	Anak	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	475.775.400
41	Pendidikan Usia Dini	Anak	DINAS PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	48.605.624
42	Pendidikan Usia Dini	Anak	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	350.000.000
43	Pendidikan Kesetaraan		DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2.661.394.000
44	Pendidikan Kesetaraan		DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.892.891.404
45	Pendidikan Kesetaraan		DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	137.010.812
46	Pendidikan Kesetaraan		DINAS PENDIDIKAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	500.000.000
47	Pendidikan Kesetaraan		DINAS PENDIDIKAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	77.252.000
48	Pendidikan Kesetaraan		DINAS PENDIDIKAN	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	53.521.424
49	Pendidikan Kesetaraan		DINAS PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	86.672.236
50	Pendidikan Kesetaraan		DINAS PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	43.205.624
51	Pendidikan Kesetaraan		DINAS PENDIDIKAN	Pengadaan Mebel Sekolah	201.792.600
52	Pendidikan Kesetaraan		DINAS PENDIDIKAN	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	300.000.000
53	Pelayanan Kesehatan Hamil	Ibu	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	400.000.100

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	PAGU
54	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98.400.000
55	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	17.932.000
56	Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.200.000
57	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.100.000
58	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	143.966.600
59	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.300.000
60	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	22.374.800
61	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	12.264.800
62	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	27.155.100
63	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.067.000
64	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	28.819.950
65	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Minum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	34.050.000
66	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Minum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	216.710.300
67	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Minum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	843.300.000
68	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	874.400.000
69	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	775.192.200

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	PAGU
70	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.600.000.000
71	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.126.248.913
72	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	57.258.000
73	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	84.999.700
74	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	87.657.600
75	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	86.499.900
76	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	84.999.700
77	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	87.000.000
78	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	84.999.700
79	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	87.000.000
80	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	19.999.800
81	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	437.632.000

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	PAGU
82	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	128.745.000
83	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	37.000.000
84	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	100.000.000
85	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	239.969.400
86	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	123.080.400
87	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	98.973.800
88	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	67.640.000
89	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Penyediaan Sandang	61.900.000
90	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Penyediaan Alat Bantu	1.674.983.500
91	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	45.525.000
92	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	190.720.000
93	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	187.269.600
94	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Pemberian Layanan Kedaruratan	204.000.000
95	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	204.000.000

NO	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	PAGU
96	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Penyediaan Sandang	83.490.000
97	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	41.190.000
98	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Penyediaan Makanan	597.053.000
99	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Penyediaan Sandang	82.042.000
100	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	18.993.000
101	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Pelayanan Dukungan Psikososial	21.000.000
102	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10.729.500
		TOTAL		160.925.293.469

Berdasarkan hasil analisis terhadap Tabel Rencana Pendanaan Pelaksanaan SPM Tahun 2026, diketahui bahwa penyusunan program dan kegiatan sudah diarahkan untuk memenuhi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya pada urusan wajib layanan dasar bidang Pendidikan Dasar. Dalam upaya pencapaian SPM, Dinas Pendidikan telah merencanakan berbagai sub kegiatan yang secara langsung mendukung terpenuhinya indikator SPM. Beberapa kegiatan strategis tersebut antara lain:

- Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sebagai pondasi penguatan tata kelola yang baik.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar, menandakan komitmen pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar sesuai standar.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, yang penting dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif dan efisien.
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang menjadi bagian dari pemenuhan kualitas tenaga pengajar sesuai dengan indikator SPM.
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kebutuhan, untuk menjamin rasio guru dan murid sesuai standar layanan minimal.

1. Prioritas Infrastruktur:

Pagu terbesar difokuskan pada pembangunan ruang kelas baru, yang menunjukkan bahwa sarana fisik masih menjadi kebutuhan mendesak dalam pemenuhan layanan dasar pendidikan.

2. Komitmen Peningkatan Kualitas SDM:

Meskipun alokasi terbesar pada infrastruktur, sub kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidik tetap mendapatkan perhatian yang layak dalam perencanaan anggaran.

3. Pendekatan Holistik:

Program yang direncanakan sudah mencerminkan pendekatan holistik yang tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan tetapi juga pada tata kelola, SDM, dan kelembagaan, sesuai prinsip pemenuhan SPM yang menyeluruh.

Diperlukan monitoring yang ketat untuk memastikan seluruh sub kegiatan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran agar target SPM dapat tercapai. Pemerataan pembangunan ruang kelas perlu dikaji lebih lanjut agar tidak hanya fokus pada satu wilayah tertentu, tetapi juga merata sesuai kebutuhan real di lapangan.

Secara umum, rencana pendanaan dalam tabel ini sudah menggambarkan upaya terpadu Pemerintah Kota dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal di bidang Pendidikan Dasar. Penekanan pada pembangunan infrastruktur dan penguatan SDM menjadi sinyal positif bahwa pemerintah tidak hanya mengejar capaian kuantitatif, tetapi juga berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.

Tabel 5.13
Rencana Pendanaan Tematik Stunting Tahun 2026

NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	BAPPERIDA	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	595.416.000
2	BAPPERIDA	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	177.486.600
3	BAPPERIDA	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.155.800
4	KECAMATAN BOGOR BARAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.720.030
5	KECAMATAN BOGOR TENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.210.950
6	KECAMATAN BOGOR TIMUR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	456.260.000
7	KECAMATAN BOGOR UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.193.200
8	KECAMATAN TANAH SAREAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	710.848.200

NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN
9	KECAMATAN TANAH SAREAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	157.674.000
10	KECAMATAN BOGOR BARAT	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	58.151.100
11	KECAMATAN BOGOR SELATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	138.994.600
12	KECAMATAN BOGOR TENGAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	58.847.000
13	KECAMATAN BOGOR TIMUR	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	46.509.200
14	KECAMATAN BOGOR UTARA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	137.060.100
15	BAPPERIDA	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1.155.800
16	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	84.040.110.600
17	BAGIAN HUKUM	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	624.299.800
18	KECAMATAN TANAH SAREAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.379.815.500
19	KECAMATAN BOGOR BARAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5.356.185.000
20	KECAMATAN BOGOR SELATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.932.000.000
21	KECAMATAN BOGOR TENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.866.399.800
22	KECAMATAN BOGOR TIMUR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.237.106.600
23	KECAMATAN BOGOR UTARA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.599.901.200
24	KECAMATAN TANAH SAREAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	199.439.120
25	KECAMATAN BOGOR BARAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	99.543.000
26	KECAMATAN BOGOR SELATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	49.839.000
27	KECAMATAN BOGOR TENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000
28	KECAMATAN BOGOR TIMUR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	66.526.964
29	KECAMATAN BOGOR UTARA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	69.999.380
30	KECAMATAN BOGOR UTARA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan, Penganggaran, dan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.603.900

NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		DAERAH KABUPATEN/KOTA	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
31	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	69.465.600
32	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	29.975.500
33	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	999.999.500
34	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	21.194.200
35	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16.852.741.100
36	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	852.335.840
37	DKUKMDAGIN	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	314.400.000
38	DPPKB	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	851.846.041
39	DPPKB	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	100.109.800
40	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	5.829.382.864
41	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	89.258.436
42	DISKOMINFO	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	99.300.000
43	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	54.979.300
44	DKUKMDAGIN	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	314.400.000
45	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	642.818.600
46	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	999.999.500

NO	NAMA SKPD	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ANGGARAN
47	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	143.966.600
48	DPPKB	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	99.820.000
49	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	400.000.100
50	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7.200.000
51	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	49.964.200
52	PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	843.300.000
53	PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.126.248.913
54	PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.600.000.000
		TOTAL			143.282.158.538

Penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bogor. Upaya penurunan prevalensi stunting di Kota Bogor memerlukan langkah terstruktur dan sistematis yang melibatkan berbagai sektor serta lintas perangkat daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap tabel data program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang disusun untuk Tahun 2026 telah mengakomodasi kebutuhan intervensi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara umum, rencana program yang tercantum dalam tabel menunjukkan keterlibatan aktif Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA) dan beberapa kecamatan di Kota Bogor dalam mendukung penanganan stunting. BAPPERIDA menjadi salah satu leading sector yang memegang peran penting dalam menyediakan data, melakukan pengendalian, serta melakukan evaluasi pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan upaya percepatan penurunan stunting.

Beberapa program yang diusulkan dan dianggarkan, antara lain:

1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang bertujuan memperkuat sistem data, informasi, dan pelaporan pembangunan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Program ini mencakup kegiatan:
 - o Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

- o Monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan bidang pemerintahan.
 - o Koordinasi perencanaan lintas sektor dalam penanganan stunting.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor Tengah. Program ini melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan administrasi umum, termasuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi sebagai upaya penguatan kolaborasi antar stakeholder dalam percepatan penanganan stunting di tingkat wilayah.
- Distribusi Anggaran:
Total alokasi anggaran pada kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting menunjukkan adanya proporsi yang signifikan untuk kegiatan analisis data dan monitoring evaluasi. Hal ini mencerminkan pentingnya basis data yang akurat dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Bogor.
 - Peran Strategis BAPPERIDA:
BAPPERIDA menjadi motor penggerak dalam penguatan perencanaan dan pengendalian pembangunan, dengan alokasi anggaran yang besar untuk kegiatan yang mendukung analisis dan pengawasan capaian pembangunan.
 - Keterlibatan Kecamatan:
Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat lokal berperan dalam memastikan kelancaran koordinasi dan pelaksanaan kegiatan stunting di wilayah masing-masing. Program yang dirancang oleh kecamatan difokuskan pada peningkatan efektivitas koordinasi serta penguatan peran wilayah dalam pelaksanaan intervensi stunting.
 - Pendekatan Multi Sektor:
Data yang dianalisis menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bogor sudah bersifat lintas sektor dan terintegrasi, yang merupakan kunci dalam percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.
1. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor:
Diperlukan sinergi yang lebih erat antar perangkat daerah, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif stunting.
 2. Optimalisasi Basis Data:
Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan integrasi data stunting antar sektor agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Kegiatan analisis data harus dilaksanakan secara berkala dengan standar metodologi yang terukur.
 3. Peningkatan Kapasitas Wilayah:

Kecamatan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan perlu mendapatkan dukungan yang optimal, baik dari sisi pendanaan, sumber daya manusia, maupun penguatan kelembagaan, agar pelaksanaan intervensi di wilayah berjalan efektif.

4. Fokus pada Intervensi Spesifik dan Sensitif: Dalam penyusunan kegiatan berikutnya, Pemerintah Kota Bogor disarankan untuk mengintegrasikan kegiatan intervensi spesifik (seperti pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan layanan kesehatan ibu dan anak) dan intervensi sensitif (seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan peningkatan pendidikan) secara proporsional.

Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Tahun 2026 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor telah berkomitmen penuh dalam mempercepat penanganan stunting melalui pendekatan yang terukur, kolaboratif, dan berbasis data. Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas data, serta dukungan optimal di tingkat kecamatan, diharapkan prevalensi stunting di Kota Bogor dapat terus ditekan hingga mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional.

Tabel 5.14
Rencana Pendanaan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2026

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN
1	DINAS SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	187.454.472
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.551.790.400
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	105.782.848
4	DINAS SOSIAL	Pelayanan Dukungan Psikososial	Mengurangi Beban Pengeluaran	46.010.000
5	DINAS SOSIAL	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Mengurangi Beban Pengeluaran	787.444.000
6	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Mengurangi Beban Pengeluaran	300.000.000
7	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.000.000.000
8	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Mengurangi Beban Pengeluaran	25.583.063.900
9	DINAS SOSIAL	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Mengurangi Beban Pengeluaran	755.000.000
10	DINAS SOSIAL	Pemberian Layanan Kedaruratan	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.476.200.000
11	DINAS SOSIAL	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.475.775.600
12	DINAS SOSIAL	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Mengurangi Beban Pengeluaran	89.258.436
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	260.375.800
14	DINAS SOSIAL	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	500.000.000
15	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.163.792.090
16	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	194.245.578
17	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mengurangi Beban Pengeluaran	3.300.000.000
18	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mengurangi Beban Pengeluaran	500.350.000
19	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	351.127.700

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRAGEGI	ANGGARAN
20	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Mengurangi Beban Pengeluaran	616.154.000
21	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	109.119.600
22	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Mengurangi Beban Pengeluaran	7.363.191.500
23	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	578.453.000
24	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	137.010.812
25	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Mengurangi Beban Pengeluaran	766.642.024
26	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mengurangi Beban Pengeluaran	400.000.000
27	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.028.325.000
28	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Mengurangi Beban Pengeluaran	487.968.308
29	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	90.000.000
30	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	9.666.128.096
31	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Mengurangi Beban Pengeluaran	7.214.576.336
32	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mengurangi Beban Pengeluaran	437.966.000
33	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	114.039.100
34	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	2.986.394.000
35	DINAS SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	150.000.000
36	DINAS SOSIAL	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Mengurangi Beban Pengeluaran	3.557.500.000
37	DINAS SOSIAL	Penyediaan Alat Bantu	Mengurangi Beban Pengeluaran	14.904.485.500
38	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	441.413.351.803
39	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	595.828.332
40	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	2.302.866.216
41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	180.519.844
42	DINAS SOSIAL	Penyediaan Makanan	Mengurangi Beban Pengeluaran	111.123.800
43	DINAS SOSIAL	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Mengurangi Beban Pengeluaran	
44	DINAS SOSIAL	Penyediaan Sandang	Mengurangi Beban Pengeluaran	
45	DINAS SOSIAL	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Mengurangi Beban Pengeluaran	5.829.382.864
46	DINAS PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.892.891.404
47	DINAS SOSIAL	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Mengurangi Beban Pengeluaran	28.664.243.736
48	DINAS SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan Pendapatan	7.372.143.632
49	DINAS TENAGA KERJA	Job Fair/Bursa Kerja	Meningkatkan Pendapatan	196.475.500
50	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatkan Pendapatan	162.222.900
51	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Pendapatan	522.964.824
52	DINAS TENAGA KERJA	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Meningkatkan Pendapatan	48.605.624
53	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	2.414.881.854
54	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	32.274.000
55	DINAS TENAGA KERJA	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Meningkatkan Pendapatan	18.872.560.000
56	DINAS TENAGA KERJA	Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Pendapatan	1.000.000.000
57	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Meningkatkan Pendapatan	16.852.741.100

NO	NAMA OPD	SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN
58	DINAS TENAGA KERJA	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	54.979.300
59	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	49.964.200
60	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1.052.086.162
61	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	3.839.664.739
62	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	292.900.000.000
63	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	10.000.000
64	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	114.966.300
65	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	740.766.000
66	DINAS PERHUBUNGAN	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	
67	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	1.081.710.500
68	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	14.526.345.905
69	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	84.040.110.600
70	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	16.200.000
71	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	200.000
72	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	11.300.000
73	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	7.200.000
	TOTAL			1.017.146.195.239

Kemiskinan ekstrem merupakan isu strategis yang menjadi perhatian nasional, termasuk di Kota Bogor. Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan intervensi yang terarah, terukur, dan melibatkan lintas sektor. Berdasarkan hasil analisis terhadap data rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem, telah tergambar bahwa Pemerintah Kota Bogor melalui beberapa perangkat daerah telah menyusun strategi dan alokasi anggaran yang fokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.

Strategi yang diambil dalam upaya pencapaian target 6% Tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Bogor untuk Tahun 2026 berfokus pada mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Strategi ini diwujudkan melalui beberapa sub kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun kegiatan yang direncanakan antara lain:

1. **Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**
Dinas Sosial memfasilitasi bantuan sosial untuk meningkatkan daya dukung keluarga miskin ekstrem dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
 2. **Fasilitasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) berkontribusi melalui fasilitasi administrasi kependudukan, seperti pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, guna memastikan bahwa masyarakat miskin ekstrem memperoleh akses terhadap layanan dasar dan program perlindungan sosial.
 3. **Pelayanan Dukungan Psikososial** Pelayanan ini bertujuan memberikan pendampingan psikologis bagi keluarga miskin ekstrem agar mampu menghadapi tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi.
 4. **Pemantauan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak dan Lansia Terlantar.** Kegiatan ini difokuskan untuk memastikan bahwa kelompok rentan, seperti anak dan lansia terlantar, mendapatkan perhatian dan layanan sosial yang layak.
- Alokasi anggaran terbesar dalam program ini difokuskan pada fasilitasi pendaftaran penduduk dengan total anggaran sebesar Rp 2.402.355.200, yang menandakan pentingnya administrasi kependudukan sebagai pintu masuk utama masyarakat miskin ekstrem untuk mendapatkan hak dan layanan sosial. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga juga memperoleh alokasi yang signifikan, yaitu Rp 642.818.600, sedangkan kegiatan lain seperti pelayanan psikososial dan pemantauan kelompok rentan mendapatkan alokasi yang lebih kecil.
 - **Dominasi Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran**
Seluruh sub kegiatan yang direncanakan berfokus pada strategi pengurangan beban pengeluaran, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor berupaya secara langsung membantu masyarakat miskin ekstrem dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
 - **Keterlibatan Lintas Sektor** Penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Bogor telah melibatkan setidaknya dua perangkat daerah utama yaitu Dinas Sosial dan Disdukcapil. Sinergi antar OPD ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Bogor.
 - **Penguatan Integrasi Program** diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antar perangkat daerah dan dengan stakeholder non-pemerintah untuk memastikan efektivitas program penanganan kemiskinan ekstrem.
 - **Peningkatan Akses Administrasi Kependudukan**
Kegiatan fasilitasi administrasi kependudukan perlu diperluas cakupannya agar masyarakat miskin ekstrem tidak menghadapi hambatan birokrasi dalam mengakses layanan dasar.

- Pendekatan multidimensional. Selain strategi pengurangan beban pengeluaran, Pemerintah Kota Bogor disarankan untuk mulai mengembangkan strategi peningkatan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat agar penanganan kemiskinan ekstrem menjadi lebih berkelanjutan.
- Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan Perlu dioptimalkan layanan untuk anak, lansia, dan penyandang disabilitas agar kelompok rentan mendapatkan perlindungan sosial yang maksimal.

Berdasarkan hasil analisis, rencana program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Tahun 2026 menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Fokus pada pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial, fasilitasi administrasi kependudukan, serta layanan dukungan sosial bagi kelompok rentan merupakan langkah yang tepat. Dengan dukungan koordinasi lintas sektor dan penguatan integrasi program, diharapkan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Bogor dapat tercapai sesuai target nasional.

Tabel 5.15
Rencana Pendanaan Pencapaian IPM 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	187.454.472
2	DINAS PENDIDIKAN	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.551.790.400
3	DINAS PENDIDIKAN	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	105.782.848
4	DINAS PENDIDIKAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.010.000
5	DINAS PENDIDIKAN	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	787.444.000
6	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	300.000.000
7	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.000.000.000
8	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	25.583.063.900
9	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	755.000.000
10	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.476.200.000
11	DINAS PENDIDIKAN	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.475.775.600
12	DINAS PENDIDIKAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	89.258.436
13	DINAS PENDIDIKAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	260.375.800
14	DINAS PENDIDIKAN	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	500.000.000
15	DINAS PENDIDIKAN	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.163.792.090
16	DINAS PENDIDIKAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.245.578

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
17	DINAS PENDIDIKAN	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.300.000.000
18	DINAS PENDIDIKAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.350.000
19	DINAS PENDIDIKAN	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	351.127.700
20	DINAS PENDIDIKAN	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	616.154.000
21	DINAS PENDIDIKAN	Pengadaan Mebel	109.119.600
22	DINAS PENDIDIKAN	Pengadaan Mebel Sekolah	7.363.191.500
23	DINAS PENDIDIKAN	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	578.453.000
24	DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	137.010.812
25	DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	766.642.024
26	DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	400.000.000
27	DINAS PENDIDIKAN	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.028.325.000
28	DINAS PENDIDIKAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	487.968.308
29	DINAS PENDIDIKAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	90.000.000
30	DINAS PENDIDIKAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	9.666.128.096
31	DINAS PENDIDIKAN	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.214.576.336
32	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	437.966.000
33	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	114.039.100
34	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2.986.394.000
35	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	150.000.000
36	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.557.500.000
37	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	14.904.485.500
38	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	441.413.351.803
39	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	595.828.332
40	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.302.866.216
41	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.519.844
42	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	111.123.800

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
43	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
44	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
45	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5.829.382.864
46	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.892.891.404
47	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.664.243.736
48	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.372.143.632
49	DINAS PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	196.475.500
50	DINAS PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	162.222.900
51	DINAS PENDIDIKAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.964.824
52	DINAS PENDIDIKAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.605.624
53	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.414.881.854
54	DINAS PENDIDIKAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	32.274.000
55	DINAS KESEHATAN	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	18.872.560.000
56	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.000.000.000
57	DINAS KESEHATAN	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	16.852.741.100
58	DINAS KESEHATAN	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	54.979.300
59	DINAS KESEHATAN	Operasional Pelayanan Puskesmas	49.964.200
60	DINAS KESEHATAN	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.052.086.162
61	DINAS KESEHATAN	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	3.839.664.739
62	DINAS KESEHATAN	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	292.900.000.000
63	DINAS KESEHATAN	Pembangunan Puskesmas	10.000.000
64	DINAS KESEHATAN	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	114.966.300
65	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	740.766.000
66	DINAS KESEHATAN	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
67	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.081.710.500
68	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Layanan Imunisasi	14.526.345.905
69	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	84.040.110.600

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
70	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	16.200.000
71	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	200.000
72	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11.300.000
73	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	7.200.000
74	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17.932.000
75	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	2.700.000
76	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	999.999.500
77	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.800.000
78	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	98.400.000
79	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	400.000.100
80	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.799.600
81	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	50.000.000
82	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	69.465.600
83	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.400.000
84	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	27.155.100
85	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	18.300.000
86	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	11.596.400
87	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	28.819.950
88	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27.100.000
89	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22.067.000
90	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.300.000
91	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.100.000
92	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	143.966.600
93	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12.264.800
94	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22.374.800
95	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2.800.000
96	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.975.500
97	DINAS KESEHATAN	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.476.378.665
98	DINAS KESEHATAN	Pengembangan Rumah Sakit	21.194.200

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
99	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	776.002.200
100	DINAS KESEHATAN	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
101	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.500.000
102	DINAS KESEHATAN	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	31.650.000
103	DINAS KESEHATAN	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.800.000
104	DINAS KESEHATAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	170.769.600
105	DINAS KESEHATAN	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.400.000
106	DINAS KESEHATAN	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	230.106.600
107	DINAS KESEHATAN	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	76.200.000
108	DINAS KESEHATAN	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.600.000
109	DINAS KESEHATAN	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	852.335.840
110	DINAS KESEHATAN	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	179.200.000
111	DINAS KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	16.161.200
112	DINAS KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	5.000.000
113	DINAS KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	46.926.000
114	DINAS KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	85.596.000
115	DINAS KESEHATAN	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4.443.500
116	DKPP	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	5.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
117	DKPP	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
118	DKPP	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	50.000.000
119	DKPP	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	230.330.000
120	DKPP	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	21.750.000
121	DKPP	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	49.999.900
122	DKPP	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	9.159.900
123	DKPP	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	200.000.000
124	DKPP	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	299.999.900
125	DKPP	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	3.469.200
126	DISNAKER	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	30.333.600
127	DISNAKER	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	35.000.000
128	DISNAKER	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	40.000.000
129	DISNAKER	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	50.000.000
130	DISNAKER	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	600.000.000
131	DISPARBUD	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	2.671.520.000
132	DISPARBUD	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3.256.520.000
133	DISPARBUD	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	85.600.000
134	DISPARBUD	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	207.179.900
135	DISPARBUD	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	150.000.000
136	DISPARBUD	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	44.449.900
137	DLH	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	100.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
138	DLH	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	111.563.000
139	DLH	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.849.114.300
140	DLH	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.025.636.061
141	DLH	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	4.000.000.000
142	DLH	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	200.000.000
143	DLH	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
144	PUPR	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.281.102.907
145	PUPR	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	10.823.034.187
146	PUPR	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.126.248.913
147	PUPR	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	775.192.200
148	PUPR	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	937.398.800
149	PUPR	Penyediaan Unit pengolahan setempat	38.489.400
150	PUPR	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.600.000.000
151	PUPR	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.546.003.000
152	PUPR	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	216.710.300
	TOTAL		1.062.759.077.362

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang menggambarkan capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pemerintah Kota Bogor menargetkan pencapaian IPM sebesar 81,22 pada tahun 2026 sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana program dan kegiatan yang mendukung peningkatan IPM pada tahun perencanaan, teridentifikasi bahwa Pemerintah Kota Bogor, khususnya melalui Dinas Pendidikan, telah menyusun serangkaian program yang strategis dan terfokus untuk mendukung pencapaian target tersebut. Alokasi anggaran telah direncanakan secara proporsional untuk memperkuat upaya peningkatan kualitas pendidikan, yang merupakan salah satu komponen kunci dalam perhitungan IPM.

Strategi Peningkatan IPM

Adapun kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian target IPM Kota Bogor Tahun 2026, antara lain:

1. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Magang bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pendidik guna mendukung penyelenggaraan pendidikan berkualitas.
 2. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Mendorong modernisasi tata kelola pendidikan melalui digitalisasi sistem, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan.
 3. Fasilitasi Komunitas Belajar bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Menyediakan ruang kolaborasi dan pengembangan diri bagi tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan mutu proses pembelajaran.
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan program pendidikan.
 5. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Memastikan keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan dasar sebagai dasar peningkatan indikator pendidikan dalam IPM.
- Alokasi Anggaran Prioritas Pemerintah Kota Bogor memberikan porsi anggaran terbesar pada kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE dengan alokasi sebesar Rp 1,57 miliar, yang menandakan fokus pemerintah pada modernisasi sistem pelayanan pendidikan berbasis teknologi. Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar juga memperoleh alokasi anggaran yang signifikan sebesar Rp 787 juta sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar.
 - Komitmen Peningkatan Kualitas SDM Seluruh kegiatan yang dirancang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan, menjadi prioritas Pemerintah Kota Bogor dalam mendorong percepatan peningkatan IPM.
 - Penguatan Sistem Berbasis Teknologi Digitalisasi tata kelola pendidikan diharapkan mampu mempercepat akses, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung sistem pengambilan keputusan berbasis data dalam sektor pendidikan.
 - Perluasan Akses Pendidikan Berkualitas Pemerintah Kota Bogor perlu memastikan bahwa seluruh masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas.
 - Penguatan Kapasitas Pendidik Program pelatihan dan komunitas belajar perlu dilaksanakan secara merata dan berkelanjutan agar seluruh pendidik memiliki akses yang setara dalam meningkatkan kompetensinya.
 - Optimalisasi Implementasi SPBE Pelaksanaan SPBE perlu dikawal secara intensif agar seluruh layanan pendidikan terintegrasi dan dapat memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

- Monitoring dan evaluasi berkelanjutan diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkala untuk memastikan bahwa program yang direncanakan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan dimensi pendidikan yang berpengaruh pada capaian IPM.

Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Tahun 2026 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia sebesar 81,22. Melalui penguatan kapasitas pendidik, modernisasi sistem pelayanan pendidikan, serta peningkatan akses pendidikan dasar yang berkualitas, diharapkan target IPM Kota Bogor Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 5.16
RENCANA PENDANAAN PENCAPAIAN INDEKS GINI RASIO

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	3.557.500.000
2	DINAS PENDIDIKAN	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	14.904.485.500
3	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	84.040.110.600
4	DKPP	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	50.000.000
5	DKPP	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.330.000
6	DKPP	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	21.750.000
7	DKPP	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	49.999.900
8	DKPP	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	9.159.900
9	DKPP	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	200.000.000
10	DKPP	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	299.999.900
11	DKPP	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	3.469.200
12	DKPP	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	30.333.600
13	DKPP	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	35.000.000
14	DISNAKER	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	40.000.000
15	DISNAKER	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000
16	DISNAKER	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	600.000.000
17	DISNAKER	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	2.671.520.000
18	DISNAKER	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.256.520.000
19	DISNAKER	Job Fair/Bursa Kerja	40.537.624
20	DISNAKER	Pelayanan antar Kerja	47.458.624

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
21	DISNAKER	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	48.169.600
22	DISNAKER	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	39.570.800
23	DISNAKER	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	54.108.624
24	DISNAKER	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	76.983.436
25	DISNAKER	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	24.341.812
26	DISNAKER	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	38.266.812
27	DISNAKER	Perluasan Kesempatan Kerja	3.825.246.900
28	PUPR	Pembangunan Jalan	33.901.300.000
29	PUPR	Pembangunan Jembatan	1.155.400.000
30	PUPR	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.245.189.331
31	PUPR	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.200.000.000
32	PUPR	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.625.000.000
33	PUPR	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.679.359.734
34	PUPR	Rehabilitasi Jembatan	943.300.000
35	PUPR	Rekonstruksi Jalan	30.957.682.000
36	PUPR	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8.944.573.146
37	DINAS SOSIAL	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	31.064.400
38	DINAS SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	359.684.800
39	DINAS SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	85.045.600
40	DINAS SOSIAL	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	70.953.600
41	DINAS SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	336.270.000
42	DINAS SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	642.818.600
43	DINAS SOSIAL	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	74.849.600
44	DINAS SOSIAL	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	467.083.700
45	DINAS SOSIAL	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	72.000.000
46	DINAS SOSIAL	Rujukan Anak-Anak Terlantar	67.999.680
47	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	86.715.000
48	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	190.720.000
49	DINAS SOSIAL	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	108.760.000
50	DINAS SOSIAL	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	187.269.600
51	DINAS SOSIAL	Pemberian Layanan Kedaruratan	204.000.000
52	DINAS SOSIAL	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	204.000.000
53	DINAS SOSIAL	Penyediaan Alat Bantu	1.674.983.500
54	DINAS SOSIAL	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	64.976.500
55	DINAS SOSIAL	Penyediaan Sandang	145.390.000

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
56	DINAS PERHUBUNGAN	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	103.284.000
57	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.326.202.370
58	DINAS PERHUBUNGAN	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000
59	DKUKMDAGIN	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	314.400.000
60	DKUKMDAGIN	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
61	DKUKMDAGIN	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	6.161.790.800
62	DKUKMDAGIN	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	164.000.000
63	DKUKMDAGIN	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	787.438.000
	TOTAL		286.028.366.793

Indeks Gini Rasio merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Penurunan Gini Rasio menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan target penurunan Gini Rasio menjadi sebesar 0,45 pada tahun 2026 sebagai komitmen dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana program dan kegiatan yang didanai untuk mendukung pencapaian target tersebut, teridentifikasi bahwa program yang dirancang telah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui penguatan akses pendidikan, perluasan jaminan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan. Adapun program dan sub kegiatan yang dianalisis tersebar pada beberapa perangkat daerah strategis, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Strategi Penurunan Gini Rasio

Beberapa kegiatan prioritas yang dirancang dalam rangka mendukung pencapaian target Gini Rasio Tahun 2026 meliputi:

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok keluarga miskin, guna menekan beban pengeluaran dan mendorong kesetaraan kesempatan dalam memperoleh pendidikan.
2. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) Kegiatan ini berfokus pada perluasan akses jaminan kesehatan, khususnya bagi

masyarakat miskin dan rentan, sehingga mengurangi beban biaya kesehatan dan memperbaiki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan (DKPP) Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pangan yang merata serta terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 4. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (DKPP) Program ini dirancang untuk menjamin ketersediaan pangan dalam menghadapi kondisi darurat dan menjaga stabilitas harga pangan yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
- Distribusi Anggaran Prioritas Alokasi anggaran terbesar diberikan pada kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan total anggaran sebesar Rp 84,04 miliar, yang menandakan fokus pemerintah dalam penguatan layanan kesehatan sebagai upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mendapatkan alokasi yang cukup besar dengan total anggaran sekitar Rp 11,94 miliar untuk mendukung peningkatan akses pendidikan yang lebih merata.

Sementara itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) turut mendapatkan porsi anggaran yang memadai untuk menjamin distribusi dan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

- Komitmen Pengurangan Ketimpangan Seluruh kegiatan yang dirancang berfokus pada pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan akses pelayanan dasar, dan penguatan daya beli, yang secara langsung berkontribusi dalam menekan tingkat ketimpangan sosial dan ekonomi di Kota Bogor.
- Pendekatan Terpadu dan Lintas Sektor Upaya penurunan Gini Rasio di Kota Bogor telah dirancang dengan pendekatan kolaboratif antar perangkat daerah yang saling terintegrasi, sehingga diharapkan memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.
- Perluasan Jangkauan Penerima Manfaat Pemerintah Kota Bogor perlu memastikan bahwa program yang dirancang dapat menjangkau kelompok miskin, rentan, dan masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar.
- Penguatan Implementasi Program diperlukan penguatan dalam pelaksanaan program agar tepat sasaran dan berdampak nyata dalam pengurangan ketimpangan sosial.

- Peningkatan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Diperlukan sinergi yang optimal antar perangkat daerah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara terintegrasi dan saling mendukung.
- Monitoring dan Evaluasi Berkala dibutuhkan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur untuk memastikan program yang dijalankan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target Gini Rasio sebesar 0,45 pada tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD Tahun 2026 telah menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam mendukung percepatan penurunan Gini Rasio. Melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan, diharapkan ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Bogor dapat ditekan secara efektif sehingga target Gini Rasio sebesar 0,45 pada Tahun 2026 dapat tercapai dengan optimal dan berkelanjutan.

Tabel 5.17
RENCANA PENGANGGARAN PENCAPAIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	DPMPSTP	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.000.645.357
2	DPMPSTP	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	184.172.400
3	DPMPSTP	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	175.541.000
4	DPMPSTP	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	199.778.600
5	DPMPSTP	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	199.959.400
6	DPMPSTP	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	136.759.800
7	DPMPSTP	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	98.000.000
8	DPMPSTP	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	38.301.300
9	DISNAKER	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	40.000.000
10	DISNAKER	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000
11	DISNAKER	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	600.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
12	DISNAKER	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	2.671.520.000
13	DISNAKER	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.256.520.000
14	DISNAKER	Job Fair/Bursa Kerja	40.537.624
15	DISNAKER	Pelayanan antar Kerja	47.458.624
16	DISNAKER	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	48.169.600
17	DISNAKER	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	39.570.800
18	DISNAKER	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	54.108.624
19	DISNAKER	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	76.983.436
20	DISNAKER	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	24.341.812
21	DISNAKER	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	38.266.812
22	DISNAKER	Perluasan Kesempatan Kerja	3.825.246.900
23	DISPARBUD	Dukungan Fasilitas Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	85.600.000
24	DISPARBUD	Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	207.179.900
25	DISPARBUD	Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	150.000.000
26	DISPARBUD	Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	44.449.900
27	DISPARBUD	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	100.000.000
28	DISPARBUD	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	111.563.000
29	DISPORA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	53.553.200
30	DISPORA	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	700.000.000
31	DISPORA	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	404.814.000
32	DISPORA	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	1.003.882.200

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
33	DISPORA	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	344.886.162
	TOTAL		17.051.810.451

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja sektor ketenagakerjaan dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bogor menargetkan **penurunan TPT menjadi 7,99% pada tahun 2026** sebagai bagian dari komitmen dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan serapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap rencana program dan kegiatan yang telah dirancang, **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)** menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan sentral dalam mendukung pencapaian target penurunan TPT di Kota Bogor. DPMPSTP menyusun sejumlah sub kegiatan strategis yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan investasi, memperluas peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru yang diharapkan mampu menekan angka pengangguran terbuka.

Beberapa sub kegiatan yang dirancang dalam rangka mendukung pencapaian target TPT Tahun 2026 antara lain meliputi **penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS)**, pengolahan dan pemanfaatan data penanaman modal, fasilitasi kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, penetapan kebijakan pemberian insentif investasi, serta penyusunan peta potensi investasi di wilayah Kota Bogor. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem investasi yang ramah, terbuka, dan kompetitif, sehingga mampu meningkatkan minat investasi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja baru.

Berdasarkan alokasi anggaran yang dianalisis, kegiatan **penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS** memperoleh alokasi anggaran terbesar, yaitu sebesar **Rp 2,00 miliar**. Alokasi ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam mempermudah akses perizinan usaha dan mempercepat proses administrasi, yang diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan usaha dan membuka lapangan kerja. Kegiatan lainnya, seperti fasilitasi kemitraan, penguatan kebijakan investasi, dan pengembangan data potensi investasi, mendapatkan alokasi anggaran yang seimbang untuk memperkuat basis pertumbuhan investasi dan peluang kerja.

Seluruh sub kegiatan yang dirancang oleh DPMPSTP berorientasi pada penciptaan iklim usaha yang kondusif, memperluas peluang kerja, serta meningkatkan daya saing daerah. Hal ini selaras dengan strategi Pemerintah Kota Bogor dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, yang menjadi pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan.

Agar pencapaian target penurunan TPT sebesar 7,99% dapat terealisasi secara optimal, diperlukan beberapa langkah penguatan. Pertama, Pemerintah Kota Bogor perlu memastikan kemudahan akses perizinan usaha bagi seluruh pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kedua, promosi potensi investasi daerah harus dioptimalkan melalui media digital maupun forum investasi, agar menarik lebih banyak investor potensial. Ketiga, penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan perlu terus didorong untuk memastikan kesiapan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar. Keempat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program harus dilakukan secara berkala guna memastikan efektivitas program dalam menekan angka pengangguran terbuka.

Dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran dan dukungan lintas sektor yang solid, diharapkan target **penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,99% pada tahun 2026** dapat tercapai dengan optimal. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus menciptakan peluang kerja yang berkualitas dan memperluas akses kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 5.18
RENCANA ANGGARAN PENCAPAIAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	DPMPSTP	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.000.645.357
2	DPMPSTP	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	184.172.400
3	DPMPSTP	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	175.541.000
4	DPMPSTP	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	199.778.600
5	DPMPSTP	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	199.959.400

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
6	DPMPTSP	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	136.759.800
7	DPMPTSP	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	98.000.000
8	DPMPTSP	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	38.301.300
9	DKPP	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	50.000.000
10	DKPP	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	230.330.000
11	DKPP	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	21.750.000
12	DKPP	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	49.999.900
13	DKPP	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	200.890.000
14	DKPP	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.579.800
15	DKPP	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	593.900.000
16	DKPP	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	319.876.200
17	DKPP	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	210.000.000
18	DKPP	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	300.499.956
19	DKPP	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	9.159.900
20	DKPP	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	200.000.000
21	DKPP	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	299.999.900
22	DKPP	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	3.469.200

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
23	DKPP	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	30.333.600
24	DKPP	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	35.000.000
25	DKPP	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	1.395.537.908
26	DKPP	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.383.999.800
27	DKPP	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	500.000.000
28	DKPP	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	343.206.200
29	DKPP	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	576.000.000
30	DISNAKER	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	50.000.000
31	DISNAKER	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.597.276.800
32	DISNAKER	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	175.000.000
33	DISNAKER	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
34	DISNAKER	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	40.000.000
35	DISNAKER	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50.000.000
36	DISNAKER	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	600.000.000
37	DISNAKER	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	2.671.520.000
38	DISNAKER	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	3.256.520.000
39	DISNAKER	Job Fair/Bursa Kerja	40.537.624
40	DISNAKER	Pelayanan antar Kerja	47.458.624
41	DISNAKER	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	48.169.600
42	DISNAKER	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	39.570.800
43	DISNAKER	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	54.108.624

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
44	DISNAKER	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	76.983.436
45	DISNAKER	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	24.341.812
46	DISNAKER	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	38.266.812
47	DISNAKER	Perluasan Kesempatan Kerja	3.825.246.900
48	DISPARBUD	Pelindungan Cagar Budaya	384.400.000
49	DISPARBUD	Penetapan Cagar Budaya	102.713.500
50	DISPARBUD	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	541.284.094
51	DISPARBUD	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	169.999.726
52	DISPARBUD	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	249.999.700
53	DISPARBUD	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	28.460.000
54	DISPARBUD	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	50.000.000
55	DISPARBUD	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	146.425.900
56	DISPARBUD	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	818.006.480
57	DISPARBUD	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	71.875.533
58	DISPARBUD	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	85.600.000
59	DISPARBUD	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	207.179.900
60	DISPARBUD	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	150.000.000
61	DISPARBUD	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	44.449.900
62	DISPARBUD	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	100.000.000
63	DISPARBUD	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	111.563.000

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
64	DISPARBUD	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	474.999.900
65	PUPR	Pembangunan Jalan	33.901.300.000
66	PUPR	Pembangunan Jembatan	1.155.400.000
67	PUPR	Pemeliharaan Berkala Jalan	1.245.189.331
68	PUPR	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.200.000.000
69	PUPR	Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.625.000.000
70	PUPR	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.679.359.734
71	PUPR	Rehabilitasi Jembatan	943.300.000
72	PUPR	Rekonstruksi Jalan	30.957.682.000
73	PUPR	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8.944.573.146
74	DINAS PERHUBUNGAN	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	103.284.000
75	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.326.202.370
76	DKUKMDAGIN	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	81.776.000
77	DKUKMDAGIN	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	468.948.000
79	DKUKMDAGIN	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	314.400.000
80	DKUKMDAGIN	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
81	DKUKMDAGIN	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	6.161.790.800
82	DKUKMDAGIN	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	164.000.000
83	DKUKMDAGIN	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	256.812.000

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
84	DKUKMDAGIN	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	52.174.000
85	DKUKMDAGIN	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	114.190.000
87	DKUKMDAGIN	Pameran Dagang Nasional	193.598.400
88	DKUKMDAGIN	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	787.438.000
89	DKUKMDAGIN	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	10.000.000
90	DKUKMDAGIN	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000
91	DKUKMDAGIN	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	577.437.100
92	DKUKMDAGIN	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40.800.000
93	DKUKMDAGIN	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	284.478.000
94	DKUKMDAGIN	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	101.643.300
95	DKUKMDAGIN	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	173.260.000
96	DKUKMDAGIN	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	36.260.000
97	DKUKMDAGIN	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	88.580.440
98	DKUKMDAGIN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	66.554.000
	TOTAL		195.325.079.507

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator penting dalam mengukur dinamika pembangunan ekonomi di suatu daerah. LPE menjadi tolok ukur

keberhasilan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan investasi, serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat secara luas. Pemerintah Kota Bogor menargetkan **pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86% pada tahun 2026** sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap tabel rencana program dan kegiatan yang mendukung peningkatan LPE, **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)** berperan strategis dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. DPMPTSP menyusun sejumlah sub kegiatan yang difokuskan pada penciptaan kemudahan berusaha, peningkatan investasi, dan penguatan kemitraan antar pelaku ekonomi di Kota Bogor.

Beberapa kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian target LPE tahun 2026 antara lain meliputi: **penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS)**, pengolahan dan pemanfaatan data investasi daerah, fasilitasi kemitraan pemerintah dengan pelaku usaha, penetapan kebijakan insentif investasi, serta penyusunan peta potensi investasi Kota Bogor. Kegiatan-kegiatan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif guna meningkatkan daya saing daerah serta memperluas peluang usaha bagi masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa **kegiatan penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui OSS memperoleh alokasi anggaran terbesar sebesar Rp 2,00 miliar**. Hal ini menunjukkan fokus Pemerintah Kota Bogor dalam mempercepat pelayanan perizinan dan memberikan kemudahan berusaha bagi para investor dan pelaku usaha. Kegiatan lainnya seperti fasilitasi kemitraan dan penetapan kebijakan insentif investasi, serta penguatan data investasi mendapatkan alokasi anggaran yang proporsional sebagai bentuk dukungan terintegrasi dalam menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Seluruh sub kegiatan yang dirancang oleh DPMPTSP berkontribusi langsung terhadap penciptaan peluang investasi baru, kemudahan perizinan, dan peningkatan daya saing daerah yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi Pemerintah Kota Bogor dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menuju target LPE sebesar 5,86% pada tahun 2026.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu menjadi perhatian. Pertama, Pemerintah Kota Bogor perlu terus mengoptimalkan pelayanan perizinan usaha yang mudah, cepat, dan transparan bagi seluruh pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah. Kedua, promosi investasi harus ditingkatkan melalui berbagai media dan forum bisnis baik skala

regional maupun nasional guna menarik investor potensial. Ketiga, penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan harus dikembangkan untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pasar. Keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program secara berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh program memberikan dampak nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Dengan strategi dan program yang tepat sasaran serta dukungan lintas sektor yang solid, diharapkan **target Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,86% pada tahun 2026 dapat tercapai secara optimal**. Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 5.19
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM PRIORITAS RKPD TAHUN 2026

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
Visi: Bogor Beres, Bogor Maju				
Misi 1: Bogor Cerdas	Terwujudnya sumberdaya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi (<i>Smart People</i>)	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	150.290.288.506
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	49.241.350.006
			Program Pembinaan Perpustakaan	691.162.700
		Meningkatnya pemajuan Kebudayaan Bangsa	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	134.180.800
			Program Pengembangan Kebudayaan	964.432.380
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	71.875.533
			Program Pembinaan Sejarah	28.460.000
			Program pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	487.113.500
			Program Pengelolaan Permuseuman	623.974.122
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	623.974.122
			Program Pemenuhan Hak Anak	1.985.207.574
			Program Perlindungan Khusus Anak	197.852.100
			Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	828.517.628
			Program Pengelola Sistem Data Gender dan Anak	111.691.000
			Program Perlindungan Perempuan	118.082.600
			Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.757.080.977
			Program Pengendalian Penduduk	821.417.150
			Program Pendaftaran Penduduk	2.687.355.200
			Program Pencatatan Sipil	174.341.600
			program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	600.952.442
	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif (<i>Smart Government</i>)	Terciptanya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Dan Informatika	22.308.319.294
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi	494.037.200
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	279.955.000
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4.231.621.590
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Program Penelitian dan pengembangan	730.415.000
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	49.241.350.006
		Terwujudnya ASN yang memiliki integritas tinggi,	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Assistensi	385.305.900

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
		berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif	Program Kepegawaian Daerah	2.171.219.385
			Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	2.724.929.000
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Riset dan Inovasi Daerah	833.059.544
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.751.933.157.812
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	55.468.469.042
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	832.519.000
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.315.713.834
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	47.690.702.460
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	170.305.700
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta menguatnya sistem pengendalian internal pemerintah	Program Peyelenggaraan Pengawasan	714.145.200
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	42.189.058.664
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.782.595.600
			Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.044.257.350
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.208.670.776
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.751.933.157.812
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	49.241.350.006
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.822.581.889
			Program Pengelolaan Arsip	418.710.998
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	385.305.900
			Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Cross cutting)	2.044.257.350
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah (cross cutting)	42.189.058.664
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (cross cutting)	9.782.595.600
		TOTAL		4.068.006.135.516
Misi 2: Bogor Sehat	Terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, nyaman, efisien dan layak huni (<i>Smart Living</i>)	Meningkatnya kualitas hunian masyarakat		
			Program Kawasan Permukiman	18.664.457.000
			Program Pengembangan Perumahan	9.006.179.390
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	20.503.732.166
		Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	1.094.060.300
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.015.302.113
		Menurunnya risiko bencana di seluruh wilayah	Program Pengelolaan Sumberdaya Air	21.914.352.346
			Program Penanggulangan Bencana	2.457.614.926
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	2.632.198.800
	Terwujudnya layanan kesehatan masyarakat yang berkualitas (<i>smart health</i>)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pengembangan Daya Saing Kapasitas Keolahragaan	199.995.493.994
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.127.497.040
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	176.965.500
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	418.545.132.355

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
Terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan (smart environment)			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	16.957.684.600
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	577.962.600
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	49.999.900
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	529.876.200
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	302.080.000
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (cross cutting)	418.545.132.355
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (cross cutting)	16.957.684.600
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (cross cutting)	1.525.043.048
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (cross cutting)	1.757.080.977
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (cross cutting)	577.962.600
			Program Pengelolaan Pendidikan	150.290.288.506
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (cross Cutting)	10.015.302.113
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca dari Sektor Limbah	Program Pengelolaan Persampahan	18.204.371.100
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	9.226.606.538
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (cross cutting)	77.967.964.516
			Program Pengelolaan Perkeretaapian (cross cutting)	
			Program Penataan Bangunan Gedung (cross cutting)	9.349.720.420
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (cross Cutting)	1.439.999.616
			Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (cross cutting)	24.510.598.066
		Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	303.000.000
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	50.000.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.439.999.616
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	168.988.000
			Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat	800.000.000
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	550.000.000
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	420.000.000
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (cross cutting)	77.967.964.516
			Program Pengelolaan Perkeretaapian (cross cutting)	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (cross cutting)	24.510.598.066
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin	303.000.000

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
			Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (cross cutting)	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (cross cutting)	50.000.000
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (cross Cutting)	1.439.999.616
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (cross cutting)	168.988.000
			Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat (cross cutting)	800.000.000
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (cross cutting)	550.000.000
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup (cross cutting)	420.000.000
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (cross cutting)	10.015.302.113
			Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati	24.510.598.066
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (cross Cutting)	1.439.999.616
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (cross cutting)	1.050.000.000
			Program Penataan Bangunan Gedung (cross cutting)	9.349.720.420
	TOTAL			1.621.226.501.714
Misi 3: Bogor Sejahtera	Terwujudnya ekosistem perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah (<i>Smart Economy</i>)	Meningkatnya penanggulangan kemiskinan & kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	2.866.814.600
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.651.540.848
			Program Penanganan Bencana	1.086.491.500
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.651.540.848
			Program Pemberdayaan Sosial	547.615.200
			Program Hubungan Industrial (cross cutting)	1.876.426.800
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (cross cutting)	418.545.132.355
			Program Pengelolaan Pendidikan (cross cutting)	150.290.288.506
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	49.241.350.006
			Program Penanganan Kerawanan Pangan (cross cutting)	302.080.000
			Program Penempatan Tenaga Kerja (cross cutting)	3.206.355.724
			Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja (cross cutting)	5.653.314.600
			Program Pengembangan UMKM (cross cutting)	787.438.000
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (cross cutting)	6.640.190.800
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (cross cutting)	
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (cross cutting)	256.812.000
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (cross cutting)	550.724.000
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (cross cutting)	820.369.800
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (cross cutting)	300.499.956
			Program Kawasan Permukiman (cross cutting)	18.664.457.000

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
		Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif & Berkelanjutan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (cross cutting)	20.503.732.166
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (cross Cutting)	10.015.302.113
			Program Penanggulangan Bencana (cross cutting)	2.457.614.926
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran (cros cutting)	2.632.198.800
			Program Penempatan Tenaga Kerja	3.206.355.724
			Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.653.314.600
			Program Hubungan Industrial	1.876.426.800
			Program Pengembangan UMKM (cross cutting)	787.438.000
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (cross cutting)	6.640.190.800
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (cross cutting)	256.812.000
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (cross cutting)	550.724.000
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (cross cutting)	820.369.800
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (cross cutting)	300.499.956
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (cross cutting)	586.022.500
			Program Pengembangan Kapasitas Dan Daya Saing Kepemudaan (cross cutting)	2.035.920.799
		Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	577.962.600
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	49.999.900
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	529.876.200
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	302.080.000
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	820.369.800
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	300.499.956
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.803.206.000
			Program Pengelolaan Pendidikan (cross cutting)	150.290.288.506
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (cross Cutting)	10.015.302.113
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (cross cutting)	418.545.132.355
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) (cross cutting)	1.757.080.977
			Program Stabilitas Harga Bahan Pokok Dan Barang Penting (cross cutting)	88.580.440
		Menguatnya Stabilitas Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.822.581.889
			Program Stabilitas Harga Bahan Pokok Dan Barang Penting	88.580.440
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Cross cutting)	577.962.600
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (cross cutting)	77.967.964.516
			Program pengelolaan pendapatan daerah	2.930.580.552
			Program Pemasaran Pariwisata (cross cutting)	961.283.255

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (cross cutting)	474.999.900
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (cross cutting)	1.050.000.000
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (cross cutting)	77.967.964.516
	TOTAL			644.603.391.787
Misi 4: Bogor Lancar	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkualitas yang mampu menunjang daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	77.967.964.516
			Program Penyelenggaraan Jalan (cross cutting)	109.707.231.065
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	12.058.886.485
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	208.110.600
		Meningkatnya kualitas ruang kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.050.000.000
			Program Penataan Bangunan Gedung	9.349.720.420
	TOTAL			210.341.913.086

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Bogor, yaitu "*Bogor Beres, Bogor Maju*", telah dirumuskan empat misi strategis yang menjadi arah kebijakan pembangunan daerah. Setiap misi disusun dengan sasaran pembangunan yang terukur dan program-program prioritas yang didukung oleh alokasi anggaran yang memadai.

Misi pertama, yaitu *Bogor Cerdas*, berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan akses dan mutu pendidikan yang merata, serta pengembangan layanan publik berbasis teknologi. Sasaran dari misi ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, penguatan literasi digital masyarakat, dan pengembangan sistem informasi layanan publik. Program yang diakomodir antara lain Program Peningkatan Mutu Pendidikan, Program Pengembangan Inovasi Daerah, serta Program Transformasi Digital Pelayanan Publik. Total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Misi Bogor Cerdas mencapai sebesar **Rp152.849.672.446**.

Misi kedua, yaitu *Bogor Sehat*, diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup. Sasaran dari misi ini mencakup peningkatan layanan kesehatan dasar, penguatan sistem ketahanan kesehatan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Program-program yang dijalankan antara lain Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Program Penanganan Sampah dan Limbah, serta Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular. Total alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Misi Bogor Sehat adalah sebesar **Rp.183.922.265.874**.

Misi ketiga, yaitu *Bogor Sejahtera*, difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan sosial. Sasaran dari misi ini antara lain peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi kreatif, serta penguatan jaminan sosial masyarakat. Beberapa program prioritas meliputi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan total anggaran sebesar **Rp.194.620.881.624**.

Misi keempat, yaitu *Bogor Lancar*, bertujuan untuk menciptakan konektivitas dan mobilitas kota yang efisien serta ruang kota yang tertata dan nyaman. Sasaran dari misi ini terbagi menjadi dua, yakni meningkatnya konektivitas transportasi dan meningkatnya kualitas ruang kota. Untuk sasaran konektivitas transportasi, program-program yang diakomodir mencakup Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp77.967.964.516, Program Penyelenggaraan Jalan (cross-cutting) sebesar Rp109.707.231.065, dan Program Pengelolaan serta Pengembangan Sistem Drainase sebesar Rp12.058.886.485. Sementara itu, untuk sasaran meningkatnya kualitas ruang kota, program yang diakomodir meliputi Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar Rp208.110.600, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp1.050.000.000, serta Program Penataan Bangunan Gedung sebesar Rp9.349.720.420. Total alokasi anggaran yang ditujukan untuk mendukung Misi Bogor Lancar mencapai **Rp.210.341.913.086**.

Dengan strategi dan perencanaan yang terarah tersebut, Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk secara konsisten mendorong terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

5.4. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA BOGOR

Pokok Pikiran DPRD Kota Bogor menghasilkan sebanyak 870 usulan pokok pikiran yang diperoleh melalui hasil Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pokok-pokok Pikiran DPRD disampaikan mengacu pada Kamus Usulan yang sudah disesuaikan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, seperti pada table berikut ini:

Tabel 5.20
REKAP PERMASALAHAN USULAN POKIR TAHUN 2026 KOTA BOGOR

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
Kebudayaan				
	Hibah Pokdarwis (Permohonan Hibah untuk Pokdarwis)	2	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	Pelatihan Kesenian dan Kebudayaan (Fasilitasi pelatihan)	7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian)	9	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	Hibah Badan/Lembaga Seni (Permohonan Hibah untuk Badan/ lembaga seni)		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	Fasilitasi penyelenggaran Kesenian dan Kebudayaan (Hibah Event)		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Kecamatan				
	Pembangunan Posyandu	1	KECAMATAN BOGOR TENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Pembangunan Posyandu	2	KECAMATAN BOGOR TIMUR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (Pembangunan/pembuatan MCK umum)	2	KECAMATAN BOGOR SELATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (Pembangunan/pembuatan MCK umum) Kec. Bogor Timur	2	KECAMATAN BOGOR TIMUR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (Pembangunan/pembuatan MCK umum) Kec. Tanah Sareal	2	KECAMATAN TANAH SAREAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Pembangunan Posyandu	3	KECAMATAN BOGOR UTARA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (Pembangunan/pembuatan MCK umum) Kec. Bogor Barat	3	KECAMATAN BOGOR BARAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Perbaikan Posyandu	4	KECAMATAN BOGOR SELATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
	Pembangunan Posyandu	5	KECAMATAN BOGOR SELATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Perbaikan Posyandu	6	KECAMATAN TANAH SAREAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Pembangunan Posyandu	7	KECAMATAN BOGOR BARAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Perbaikan Posyandu	7	KECAMATAN BOGOR BARAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Perbaikan Posyandu	7	KECAMATAN BOGOR TENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Pembangunan Posyandu	8	KECAMATAN TANAH SAREAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Perbaikan Posyandu	15	KECAMATAN BOGOR UTARA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Perbaikan Posyandu	16	KECAMATAN BOGOR TIMUR	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (Pembangunan/pembuatan MCK umum) Kec. Bogor Utara		KECAMATAN BOGOR UTARA	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (Pembangunan/pembuatan MCK umum) Kec. Bogor Tengah		KECAMATAN BOGOR TENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kelautan dan Perikanan				
	Pelatihan Budidaya Ikan (Bimbingan teknis/pelatihan budidaya ikan)	1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	Pelatihan Pengolahan Produk Hasil Perikanan (Bimbingan teknis/pelatihan pengolahan produk hasil perikanan)	1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	Sarana Budidaya ikan (Bantuan sarana budidaya ikan)	2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
	Fasilitasi Sarana Pengolahan Perikanan (Bantuan sarana pengolahan perikanan)		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Kepemudaan dan Olahraga				
	Pelatihan Wirausaha Pemuda (pelatihan softskill kewirausahaan)	5	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Penyediaan Alat Olahraga (pengadaan peralatan tenis meja (Pengadaan bolavoli, bola basket,bola tenis meja,bola sepak bola,bola futsal,bola sepak takraw,shuttle cock, pengadaan net bulu tangkis,pengadaan raket badminton/raket tenis meja)	9	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana	12	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
	Prasarana Olah Raga (Pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga, seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket.)			KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Kesehatan				
	Penanganan Stunting (Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal)	2	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
	Sosialisasi ODF (BABS) (Sosialisasi kepada masyarakat terkait ODF)	6	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Penyediaan Alat Kesehatan Posyandu dan Posbindu (Kit Kader)	10	DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Pembangunan Puskesmas Pembantu		DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	Penanganan Stunting (Pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal)		DINAS KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
	Penyediaan Prasarana Penanggulangan Bencana dan fasilitas penunjang (rambu kebencanaan, alat peringatan dini banjir, ringboy/pelampung, alat komunikasi, chainsaw, tandu lipat, dan prasarana lain untuk penanggulangan bencana)	2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Pengembangan wawasan politik (Pendidikan Politik masyarakat)	5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Pelatihan Tanggap Kebakaran (Pelatihan Pencegahan Kebakaran, Sosialisasi Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar),Pelatihan Penyelamatan (SAR))	7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung)	8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
	Pengembangan wawasan politik (Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)	10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	Sosialisasi, Pelatihan, dan Peningkatan Kapasitas Kebencanaan Kelurahan Tangguh Bencana (sosialisasi dan pelatihan Kelurahan Tangguh Bencana diberikan kepada masyarakat/ wilayah yang belum terbentuk forum pengurangan risiko bencana tingkat kelurahan, apabila sudah terbentuk dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas kebencanaan)		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
				PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Komunikasi dan Informatika				
	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	Pelatihan Perkoperasian	7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	Fasilitasi Pendirian Badan Hukum Koperasi (Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi)		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI
Lingkungan Hidup				
	Pembangunan dan atau Rehabilitasi TPS dan TPS 3R (Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara 3R (TPS 3R) dan TPS)	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Sosialisasi dan Bimtek pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Pelatihan Bank Sampah, Pengolahan sampah organik dan non organik (3R, maggot), sosialisasi pemilahan sampah, ekonomi sirkuler)	15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	43	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	Pembinaan Program Kampung Iklim (Pembinaan dan Pelatihan terkait program kampung iklim (Proklam)		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	Pengadaan Truk Sampah (Dump truck dan armroll)		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Pariwisata				
	Fasilitasi sertifikasi Kompetensi ekonomi kreatif dan industri Pariwisata	1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Pemeliharaan Jembatan Dalam jalan Kota	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Pembangunan Septic Tank Individu (Pembangunan Tangki Septik Individu yang memenuhi persyaratan Kemen PU (Konvensional/ Fabrikasi)	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
	Pembangunan Jembatan dalam Jalan Kota	4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Pemeliharaan Drainase Kota (Saluran drainase yang membutuhkan upaya normalisasi)	13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	Pemeliharaan Jalan Kota	45	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
	Pembangunan TPT Sungai	62	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	Pembangunan Septic Tank Komunal		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Pembinaan RW Ramah Anak (Pelatihan Konvensi Hak Anak, Sosialisasi Tentang RW Ramah Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Wilayah RW dalam rangka pembentukan RW ramah anak)	4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
	Penguatan PATBM	10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Pendidikan				
	Sarana Pendidikan Paud Swasta (Utilitas Sarana Paud (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)	1	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pembangunan ruang kelas baru SD Swasta/Negeri	2	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pembangunan ruang kelas baru SMP Swasta/Negeri	2	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Permohonan sarana dan prasarana PAUD Swasta	2	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi ruang kelas Paud Swasta/Negeri	2	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Sarana Pendidikan SMP Swasta/Negeri (Utilitas Sarana SMP (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	6	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pelunasan Ijasah SD, SMP, MTs swasta bagi masyarakat miskin	6	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Sarana Pendidikan SD Negeri (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	7	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Bantuan Beasiswa Miskin SD, SMP, MTs Negeri	7	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Bantuan Beasiswa Miskin SD, SMP, MTs swasta	9	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	14	DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi ruang kelas SD Swasta		DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi ruang kelas SMP Swasta/Negeri		DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi Bangunan Non Formal/Kesetaraan Swasta/Negeri		DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Rehabilitasi ruang kelas SD Negeri		DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
	Permohonan sarana dan prasarana PAUD Swasta/Negeri		DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Sarana Pendidikan Paud Swasta/Negeri Utilitas Sarana Paud (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya)		DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	Pelunasan Ijasah SD, SMP, MTs Negeri		DINAS PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Penelitian dan Pengembangan				
	Riset kebijakan dan permasalahan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) bagi Peserta KB (Pelatihan keterampilan usaha, menjahit, kuliner, handicraft, dll)	1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Perhubungan				
	Penyediaan Perlengkapan Jalan	2	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan (Rehabilitasi dan Pemeliharaan JPO Non Permukiman, Rehabilitasi Shelter)	2	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Rehabilitasi dan revitalisasi APJ/PJU Eksisting (Non LED) di jalan lingkungan/gang)	6	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	143	DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
	Pembangunan Prasarana Jalan (Pengadaan dan Pemasangan Rambu Bus Stop, Pembangunan Shelter, JPO)		DINAS PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Perpustakaan				
	Kotak Literasi cerdas (Pengadaan Buku Bacaan)	1	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
	Pengadaan buku bacaan (Buku bacaan dapat berikut sarana prasarana (rak buku))	1	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pertanian				
	Pelatihan Budidaya Ternak (Bimbingan teknis/pelatihan budidaya ternak)	1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Pelatihan Kelembagaan Pertanian (Pelatihan manajemen/ pengelolaan administrasi kelompok tani)	2	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
	Sarana Bibit Ternak (Bantuan bibit ternak)	4	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
	Sarana Pendukung Pertanian (Bantuan sarana pertanian)		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
	Pelatihan Budidaya Tanaman (Bimbingan teknis/pelatihan budidaya Pertanian)		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Pembangunan Taman Permukiman (Taman di kawasan perumahan/permukiman)	5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Pembangunan TPT, Drainase dan prasarana penunjang TPU	7	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Pembangunan Jembatan Permukiman	17	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) lainnya	20	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Pembangunan TPT Permukiman	113	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Pembangunan Drainase Lingkungan	235	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Perbaikan rumah tidak layak huni)	308	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Pembangunan Jalan Lingkungan	467	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bencana		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
	Rehabilitasi RTLH korban bencana		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Sekretariat Daerah				
	Bantuan Siswa Miskin SMA, MA, SMK Swasta (Pemberian Bantuan BSM bagi pelajar SMA, MA, SMK Swasta)	3	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Prasarana Keagamaan (Permohonan belanja hibah keagamaan (sarpras,dll))	4	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Sarpras/RKB Yayasan Pendidikan (Permohonan Belanja Hibah Yayasan Pendidikan (Sarpras/RKB))	9	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Rehabilitasi Tempat Ibadah (Permohonan belanja hibah keagamaan, untuk bangunan prasarana ibadah (masjid, Mushola, ponpes. majelis Talim, dll) (Pembangunan, renovasi))	17	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Pelunasan Ijasah SMA, MA, SMK Swasta (Pemberian Bansos Bantuan Biaya Pelunasan Pendidikan (pelunasan ijasah) bagi pelajar SMA, MA, SMK Swasta)	17	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Pemberian Hibah BOS bagi MI dan MTs)		SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Sosial				
	Pelatihan Narahubung (Pelatihan Bahasa Isyarat)	1	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	Pelatihan usaha Ekonomi bagi PPKS	7	DINAS SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, kruk, tongkat tuna netra, alat bantu lain.)	8	DINAS SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Urusan	Uraian Permasalahan	Jumlah usulan Pokir	OPD Tujuan	Program
Tenaga Kerja				
	Penyelenggaraan Ketrampilan Kerja berbasis kompetensi (Pelatihan tata boga, kecantikan, make up artist, fashion, desain grafis, barista, perhotelan)	2	DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	Padat Karya	2	DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	26	DINAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Sumber : SIPD-RI, 2026 (diolah)

Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan bagian integral dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan dari penyerapan aspirasi masyarakat, reses, serta forum-forum dialog yang dilakukan oleh anggota DPRD. Hasil identifikasi Pokir ini menjadi salah satu sumber penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 untuk memastikan perencanaan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil telaahan dan verifikasi, usulan yang berasal dari Pokir DPRD Kota Bogor Tahun 2026 sebagian besar difokuskan pada sektor-sektor berikut:

- 1. Prasarana Keagamaan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah**
 - o Usulan terkait pembangunan, perbaikan, dan rehabilitasi masjid, mushola, dan tempat ibadah lainnya untuk meningkatkan kenyamanan sarana peribadatan bagi masyarakat.
- 2. Penguatan Sarana Pendidikan**
 - o Usulan terkait pembangunan dan pengadaan sarana pendidikan, seperti ruang kelas baru (RKB) dan fasilitas pendukung yayasan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di lingkungan masyarakat.
- 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan**
 - o Beberapa usulan diarahkan pada perbaikan fasilitas umum seperti jalan lingkungan dan drainase yang mendukung kenyamanan serta keselamatan warga.
- 4. Penunjang Kegiatan Sosial dan Keagamaan**
 - o Termasuk permohonan bantuan hibah yang difokuskan pada lembaga keagamaan dan lembaga sosial masyarakat.

Usulan Pokir yang diajukan oleh anggota DPRD berasal dari berbagai fraksi dan telah didistribusikan ke perangkat daerah teknis terkait, antara lain Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas PUPR, serta beberapa OPD lainnya sesuai dengan substansi usulan.

Hasil identifikasi Pokir DPRD Kota Bogor Tahun 2026 menunjukkan adanya perhatian besar terhadap kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, dan perbaikan lingkungan. Seluruh usulan ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan program dan kegiatan RKPD Tahun 2026 sebagai bentuk kolaborasi Pemerintah Kota dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, aspiratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.



Tabel 5.21
Hasil Identifikasi Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bogor

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
1	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Kp sawah bera Rw 04 Rt 01 Kel. Pamoyanan Kec.Bogor selatan, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
2	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl Siliwangi Rw 01 Rt 02 Kelurahan Batutulis Kecamatan Bogor selatan, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
3	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Gg karwayan Rw 03 Rt 01 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor , Kota Bogor	1	paket	DISHUB
4	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Gg Mutiara Rw 03 Rt 05 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
5	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Warung Limus Rw 09 Rt 01 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
6	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Warung Limus Rw 09 Rt 02 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
7	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Warung Limus rw 09 Rt 03 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
8	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Lolongok Timur Rw 05 Rt 03 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor , Kota Bogor	1	paket	DISHUB

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
9	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Lolongok Timur Rw 05 Rt 01 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kota bogor , Kota Bogor	1	paket	DISHUB
10	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Kp tugu margasari Rw 07 Rt 02 Kelurahan Kertamaya Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
11	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Kp pabuaran terminal Rw 05 Rt 01 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kota Bogor	1	unit	DLH
12	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Sarana Budidaya ikan (Bantuan sarana budidaya ikan)	Ampera Rw 04 Rt 03 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Bogor Selatan, Kota Bogor	3	Paket	DKPP
13	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan JPO RT.03 RW.05 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	paket	DISPERUMKIM
14	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT RT.01 RW.05 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	paket	DISPERUMKIM
15	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.02 RW.01 Kel. Batutulis	Batutulis	1	paket	DISPERUMKIM
16	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.04 RW.08 Kel. Batutulis	Batutulis	1	paket	DISPERUMKIM
17	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.04 RW.03 Kel. Empang	Empang	1	paket	DISPERUMKIM
18	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.04 RW.01 Kel. Empang	Empang	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
19	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT RT.03 RW.04 Kel. Empang	Empang	1	paket	DISPERUMKIM
20	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.01 RW.04 Kel. Empang	Empang	1	paket	DISPERUMKIM
21	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Saluran Lingkungan pada Lokasi Kumuh RT.02, RW.05 Kelurahan Pamoyanan	Pamoyanan	1	paket	DISPERUMKIM
22	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Lapangan Taman Bermain RT 03 RW 05 Empang	Empang	1	paket	DISPERUMKIM
23	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 01, RW. 05 Kelurahan Pamoyanan	Kp pabuaran Rw 05 Rt 01 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
24	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 02, RW.07 Kelurahan Mulyaharja	Kp cibeureum sunting Rw 07 Rt 02 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
25	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 01, RW. 05 Kelurahan Pamoyanan	Kp pabuaran Rw 05 Rt 01 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan bogor selatan, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
26	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RW. 05 Kelurahan Pamoyanan	kp sawah bera Rw 05 Rt 01 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
27	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.04 RW.03 Kel. Empang	Empang	1	paket	DISPERUMKIM
28	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT RT.03 RW.04 Kel. Empang	Empang	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
29	Abdul Kadir Hasbi Alatas	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.01 RW.04 Kel. Empang	Empang	1	paket	DISPERUMKIM
30	Abdul Rosyid	PKS	Pembuatan Tempat Wudhu, toilet, dan kamar mandi baru di lokasi yang membuat jamaah lebih nyaman dalam menggunakannya, Pemindahan tempat wudhu yang lama ke lokasi baru karena alasan kenyamanan dan keindahan, serta bangunan yang harus diganti baru karena bangunan mengalami kerusakan.	Villa Bogor Indah Blok EE-4 No.1	1	paket	BAG KESRA
31	Abdul Rosyid	PKS	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Kelurahan se Bogor Utara : Tegalgundil, Bantarjati, Cimahpar, Tanahbaru, Ciparigi, Ciluar, Kedunghalang, Ciluar., Kota Bogor	500	orang	DKUKMDAGIN
32	Abdul Rosyid	PKS	Perbaikan Jalan RT.05 RW.10 Kel. Tegalgundil	Tegalgundil	1	paket	DISPERUMKIM
33	Abdul Rosyid	PKS	Pembangunan TPT RT.01 RW.16 Kel. Cimahpar	Cimahpar	1	paket	DISPERUMKIM
34	Abdul Rosyid	PKS	Perbaikan Drainase RT.04 RW.01 Kel. Ciparigi	Ciparigi	1	paket	DISPERUMKIM
35	Abdul Rosyid	PKS	Perbaikan Jalan RT.04 RW.06 Kel. Ciparigi	Ciparigi	1	paket	DISPERUMKIM
36	Abdul Rosyid	PKS	Perbaikan Drainase RT.02 RW.13 Kel. Bantarjati	Bantarjati	1	paket	DISPERUMKIM
37	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Cemplang Timur RT 02 RW 09 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
38	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	GG Plamboyan RT 01 RW 06 Kelurahan Semplak Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
39	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	JALAN RAYA SEMPLAK PILAR RT 04 RW 03 KELURAHAN SEMPLAK KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
40	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Jalan RT.01-04 RW.02 Kel. Cilendek Barat	Cilendek Barat	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
41	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Drainase RT.01 RW.13 Kel. Cilendek Barat	Cilendek Barat	1	paket	DISPERUMKIM
42	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Jalan RW.10 Kel. Gunung Batu	Gunung Batu	1	paket	DISPERUMKIM
43	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Drainase RT.01-03 RW.03 Kel. Pasir Jaya	Pasir Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
44	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Drainase RT.03 RW.02 Kel. Semplak	Semplak	1	paket	DISPERUMKIM
45	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Jalan RT.01 RW.12 Kel. Loji	Loji	1	paket	DISPERUMKIM
46	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Jalan RT.01,04,05 RW.13 Kel. Cilendek Barat	Cilendek Barat	1	paket	DISPERUMKIM
47	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Drainase RT.04 RW.03 Kel. Bubulak	Bubulak	1	paket	DISPERUMKIM
48	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Drainase RW.06 Kel. Situ Gede	Situ Gede	1	paket	DISPERUMKIM
49	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Drainase RT.03 RW.01 Kel. Cilendek Barat	Cilendek Barat	1	paket	DISPERUMKIM
50	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Jalan RT.05 RW.04 Kel. Bubulak	Bubulak	1	paket	DISPERUMKIM
51	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Jalan RT.01,02,04 RW.03 Kel. Semplak	Semplak	1	paket	DISPERUMKIM
52	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Pembangunan Taman Bermain Anak RT 01 RW 13 Cilendek Barat	Cilendek Barat	1	paket	DISPERUMKIM
53	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Pemeliharaan Tugu Pilar Jl. Raya Semplak	Semplak	1	paket	DISPERUMKIM
54	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 01,02,03,04, RW. 02 Kelurahan Bubulak	Kp Pilar II RT 01,02,03,04 RW 02 Kelurahan Bubulak Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
55	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 01, RW.11 Kelurahan Cilendek Barat	Cemplang Baru RT 01 RW 011 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
56	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 05, RW. 11 Kelurahan Menteng	Jl Pemutihan RT 05 RW 011 Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
57	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Pembangunan TPT Sungai	jl siti hasanah RT 02 RW 07 Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	PUPR
58	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Pembangunan TPT Sungai	cemplang utara RT 05 RW 013 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat (rumah Bapak uci dan Andi Ansori), Kota Bogor	1	paket	PUPR
59	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Pembangunan TPT Sungai	Kp Bayawak RT 03 RW 012 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	PUPR
60	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Pembangunan TPT Sungai	Sindang Barang Loji RT01 Rw 013 Kelurahan Loji, Kota Bogor	1	paket	PUPR
61	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Pembangunan TPT Sungai	Sindang Barang Loji RT 02 RW 013 Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	PUPR
62	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	Cilendek Barat RT 04 RW 017 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	PUPR
63	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	gg SMK PGRI 1 Cemplang Utara RT 01 RW 013 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	20	orang	DISNAKER
64	Achmad Rifki Alaydrus, SH	PAN	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	GG PLAMBOYAN RT 03 RW 06 KELURAHAN SEMPLAK KECAMATAN BOGOR BARAT, Kota Bogor	100	orang	DKUKMDAGIN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
65	Ahmad Aswandi, S.H	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.01 RW.02 Kel. Mekarwangi	Mekarwangi	1	paket	DISPERUMKIM
66	Ahmad Aswandi, S.H	Aswaja	Perbaikan Drainase RW.06 Kel. Sukadamai	Sukadamai	1	paket	DISPERUMKIM
67	Ahmad Aswandi, S.H	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.01 RW.04 Kel. Cibadak	Cibadak	1	paket	DISPERUMKIM
68	Ahmad Aswandi, S.H	Aswaja	Bangunan masjid perlu dilanjutkan untuk diperbaiki segera agar dapat menampung jamaah.	Seremped RW 013	1	unit	BAG KESRA
69	Ahmad Aswandi, S.H	Aswaja	bangunan gedung masih kurang dari kata layak pakai	Jl. Raya Cilebut Kedung Halang Wesel Jembatan 2 RT 02 RW 03	1	unit	BAG KESRA
70	Ahmad Aswandi, S.H	Aswaja	Bangunan Masjid perlu perbaikan dan perawatan serta sarana dan prasarana perlu ditambah dan ditingkatkan	Kp. Pabuaran RT 01 RW 02	1	unit	BAG KESRA
71	Ahmad Aswandi, S.H	Aswaja	Bangunan Musholla Perlu perluasan dan perbaikan	Kp. Pabuaran RT 03 RW 02	1	unit	BAG KESRA
72	Ahmad Aswandi, S.H	Aswaja	kualitas bangunan gedung buruk dan perlu diperbaiki	Jl. Kalimurni RT 01 RW 01 No. 81	1	unit	BAG KESRA
73	Ahmad Aswandi, S.H	Aswaja	Bangunan yayasan perlu perbaikan, Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana	Jl. Kalimurni RT 03 RW 01	1	unit	BAG KESRA
74	Ahmad Aswandi, S.H	Aswaja	Pembangunan Gedung belum rampung sehingga perlu peningkatan dan keberlanjutan.	Jl. KH. Abdurrahman Al Ma'muri Kencana RT 001 RW 002	1	unit	BAG KESRA
75	Ahmad Aswandi, S.H	Aswaja	Pembangunan TPT Sungai	Sukadamai RT.02 RW.06 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	PUPR
76	Ahmad Aswandi, S.H	Aswaja	Pembangunan TPT Sungai	Jl. Kp. Seremped RT.01 RW.13 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor , Kota Bogor	1	paket	PUPR
77	Ahmad Aswandi, S.H	Aswaja	Pengembangan wawasan politik (Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)	Jl. Kesehatan RT.02 RW.02 Kelurahan Tanah	100	orang	KESBANGPOL

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, Kota Bogor			
78	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Pembangunan TPT RT.04 RW.08 Kel. Cimahpar	Cimahpar	1	paket	DISPERUMKIM
79	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Pembuatan Pemagaran Batas Makam TPU Cimahpar	Cimahpar	1	paket	DISPERUMKIM
80	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Pembuatan Tembok Penahan Tanah akses TPU Cimahpar	Cimahpar	1	paket	DISPERUMKIM
81	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainya))	SD Cibuluh 1 RT.2/4 Cibuluh, Kota Bogor	1	paket	DISDIK
82	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainya))	SDN CIBULUH 2 RT.6/9 Kel. Cibuluh, Kota Bogor	1	paket	DISDIK
83	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainya))	SDN CIBULUH 6 RT.6/9 Kel. Cibuluh , Kota Bogor	1	paket	DISDIK
84	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainya))	SDN CILUAR 1 RT. 1/4 Kel.Ciluar, Kota Bogor	1	paket	DISDIK
85	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainya))	SDN CILUAR 2 RT.4/1 Kel. Ciluar , Kota Bogor	1	paket	DISDIK
86	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainya))	SDN SINDANGSARI RT.2/7 Tanah Baru, Kota Bogor	1	paket	DISDIK
87	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainya))	SDN KEDUNG HALANG 3 RT.1/6 Kedung Halang , Kota Bogor	1	paket	DISDIK
88	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainya))	SDN Bantarjati 6 RT.2/10 Bantarjati, Kota Bogor	1	paket	DISDIK

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
89	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	SDN Ceger 1 RT.5/4 Tegal Gundil , Kota Bogor	1	paket	DISDIK
90	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	SDN Cibuluh 3 RT6/2 Ciparigi , Kota Bogor	1	paket	DISDIK
91	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	SDN Kedung halang 1 RT.4/1 Kedung Halang, Kota Bogor	1	paket	DISDIK
92	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	SDN Kedung halang 2 RT1/6 Kedung halang, Kota Bogor	1	paket	DISDIK
93	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	SDN Selaawi RT.6/4 Tanah Baru, Kota Bogor	1	paket	DISDIK
94	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Sarana Pendidikan SD Swasta (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	SDN Kawung Luwuk RT.4/6 Tegal Gundil, Kota Bogor	1	paket	DISDIK
95	H. Akhmad Saeful Bakhri, S.H	Aswaja	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (Pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga, seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket.)	RW.12 Cimahpar, Kota Bogor	1	paket	DISPORA
96	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT : 03 RW : 09 Kelurahan : Loji, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
97	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl Poras RT : 05 RW : 08 Kelurahan : Sindangbarang , Kota Bogor	1	paket	DISHUB
98	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan RW.08 Kel. Sindangbarang	Sindangbarang	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
99	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan RT.01-03 RW.03 Kel. Loji	Loji	1	paket	DISPERUMKIM
100	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Perbaikan Drainase RT.01,05 RW.05 Kel. Menteng	Menteng	1	paket	DISPERUMKIM
101	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan RT.01 RW.02 Kel. Loji	Loji	1	paket	DISPERUMKIM
102	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan RW.12 Kel. Curug	Curug	1	paket	DISPERUMKIM
103	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Perbaikan Drainase RT.04 RW.08 Kel. Loji	Loji	1	paket	DISPERUMKIM
104	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan RT.02 RW.07 Kel. Loji	Loji	1	paket	DISPERUMKIM
105	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan RT.01 RW.02 Kel. Loji	Loji	1	paket	DISPERUMKIM
106	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan RT.02 RW.07 Kel. Loji	Loji	1	paket	DISPERUMKIM
107	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Perbaikan Posyandu	Bogor Raya Permai Blok FJ RT : 01 RW : 14, Kota Bogor	1	Unit gedung	BOBAR
108	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Perbaikan Posyandu	Jalan Raya Semplak Gg SDN Neglasari RT : 03 RW : 08 Kelurahan : Semplak, Kota Bogor	1	Unit gedung	BOBAR

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
109	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Pembangunan TPT Sungai	Jl. Ledeng Selakopi RT : 001 RW. : 004 Kelurahan : Pasir Mulya, Kota Bogor	1	paket	PUPR
110	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Jalan Sirnagalih IV RT : 01 dan 02 RW : 07 Kelurahan : Loji, Kota Bogor	10	unit	DISKOMINFO
111	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (Pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga, seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket.)	Bogor Raya Permai Blok FJ, RT 1 / 14 , Kel. Curug, Kota Bogor	300	m2	DISPORA
112	ANGGA ALAN SURAWIJAYA, S.Pi., M.Si	PKS	Pelatihan Perkoperasian	Koperasi Sejahtera Bersama RT : 02 RW : 09 Kelurahan : Loji, Kota Bogor	1	Pelatihan	DKUKMDAGIN
113	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Demokrat Solidaritas Indonesia	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	JALAN ACHMAD YANI II GANG BINAAN RT 005 RW 004 KELURAHAN TANAH SAREAL KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	1	paket	DISHUB
114	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pembangunan TPT RT.05 RW.13 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
115	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pengembangan wawasan politik (Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)	JALAN ARTZIMAR II GANG MESJID NO 29 RT 003 RW 002 KELURAHAN TEGAL GUNDIL KECAMATAN BOGOR UTARA , Kota Bogor	600	PESERTA	KESBANGPOL
116	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pengembangan wawasan politik (Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)	JALAN SINDANG BARANG PENGKOLAN JALAN SIAGA NO 61 KELURAHAN LOJI KECAMATAN BOGOR BARAT , Kota Bogor	600	PESERTA	KESBANGPOL
117	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pengembangan wawasan politik (Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)	JALAN TELEPON NO 2 RT 003 RW 001 KELURAHAN PABATON	600	PESERTA	KESBANGPOL

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				KECAMATAN BOGOR TENGAH , Kota Bogor			
118	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pengembangan wawasan politik (Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)	JALAN PONDOK RUMPUT NO 40 RT 004 RW 011 KELURAHAN KEBON PEDES KECAMATAN TANAH SAREAL , Kota Bogor	600	PESERTA	KESBANGPOL
119	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pengembangan wawasan politik (Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)	JALAN PAHLAWAN NO 144 RT 001 RW 008 KELURAHAN EMPANG KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	600	PESERTA	KESBANGPOL
120	Anita Primasari Mongan, SE, M.Si	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pengembangan wawasan politik (Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)	JALAN RIAU BLOK BABAKAN PENDE 3 NO 13 RT 001 RW 003 KELURAHAN BARANANGSIANG KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	600	PESERTA	KESBANGPOL
121	Asep Nadzraullah, A.Md	Golkar	Perbaikan Drainase RT.01-04 RW.03 Kel. Cilendek Timur	Cilendek Timur	1	paket	DISPERUMKIM
122	Asep Nadzraullah, A.Md	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01-04 RW.02 Kel. Cilendek Timur	Cilendek Timur	1	paket	DISPERUMKIM
123	Asep Nadzraullah, A.Md	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01-04 RW.03 Kel. Cilendek Timur	Cilendek Timur	1	paket	DISPERUMKIM
124	Asep Nadzraullah, A.Md	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01-03 RW.04 Kel. Cilendek Timur	Cilendek Timur	1	paket	DISPERUMKIM
125	Asep Nadzraullah, A.Md	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01-04 RW.05 Kel. Cilendek Timur	Cilendek Timur	1	paket	DISPERUMKIM
126	Asep Nadzraullah, A.Md	Golkar	Perbaikan Jalan RT.03-05 RW.01 Kel. Cilendek Timur	Cilendek Timur	1	paket	DISPERUMKIM
127	Asep Nadzraullah, A.Md	Golkar	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 02-04 RW. 06 Cilendek Timur	Cilendek Timur RT. 002-004 RW. 006, Kelurahan Cilendek Timur Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
128	Asep Nadzraullah, A.Md	Golkar	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 05-06 RW. 06 Cilendek Timur	Cilendek Timur RT. 005-006 RW. 006, Kelurahan Cilendek Timur Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
129	Asep Nadzraullah, A.Md	Golkar	Pelatihan usaha Ekonomi bagi PPKS	Jl. Darul Qur'an RT. 01 RW. 10 Kelurahan Loji, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	272	Orang	DINSOS
130	Asep Nadzraullah, A.Md	Golkar	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (Pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga, seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket.)	Cilendek Timur RT. 001 RW. 010, Kelurahan Cilendek Timur Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	324	m3	DISPORA
131	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	jl H abdul halim no 32 rt 02 rw 04 kel cibadak kec tanah sareal 16166, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
132	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	jl tentara pelajar Gg pahlawan rw 02 rt 03 kel kedungjaya, kec tanah sareal, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
133	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	cimanggu bharata gg kemboja rt 04 rw 04 kel kedung jaya kec tanah sareal kota bogor 16162, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
134	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	cimanggu Gg mantri guru rt 01 rw 01 kel kedung jaya kec.tanah sareal 16124 kota bogor , Kota Bogor	1	paket	DISHUB
135	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	jl taman cimanggu poncol no 20 rt 02 rw 05 kel kedung waringin kec tanah sareal 16164 jawa barat indonesia, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
136	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	jl cimanggu bharata Gg madrasah rt 03 rw 03 kel kedung jaya kec tanah sareal kota bogor, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
137	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl jembatan 11 no 44 rt 02 rw 03 kel sukaresmi kec tanah sareal kota bogor 16165, Kota Bogor	1	paket	DISHUB

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
138	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	jl cimanggu gg mesjid rt 02 rw 06 kel kedung jaya kec tanah sareal kota bogor 16164, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
139	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.1 RW.4 Kel. Kedung Badak	Kedung Badak	1	paket	DISPERUMKIM
140	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.1 RW.4 Kel. Kedung Badak	Kedung Badak	1	paket	DISPERUMKIM
141	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.01 RW.05 Kel. Sukaresmi	Sukaresmi	1	paket	DISPERUMKIM
142	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RW.5 Kel. Sukaresmi	Sukaresmi	1	paket	DISPERUMKIM
143	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.3 RW.5 Kel. Sukaresmi	Sukaresmi	1	paket	DISPERUMKIM
144	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT RT.02 RW.13 Kel. Kedung Badak	Kedung Badak	1	paket	DISPERUMKIM
145	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.3 RW.2 Kel. Kedung Jaya	Kedung Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
146	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.04 RW.04 Kel. Kedung Jaya	Kedung Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
147	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.01 RW.01 Kel. Kedung Jaya	Kedung Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
148	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.01 RW.01 Kel. Kedung Jaya	Kedung Jaya	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
149	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.02 RW.10 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM
150	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT RT.01 RW.12 Kel. Bubulak	Bubulak	1	paket	DISPERUMKIM
151	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.02 RW.05 Kel. Kedung Waringin	Kedung Waringin	1	paket	DISPERUMKIM
152	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT RT.02 RW.04 Kel. Cibadak	Cibadak	1	paket	DISPERUMKIM
153	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.05 RW.02 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
154	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RW.04 Kel. Kedung Jaya	Kedung Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
155	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.02 RW.02 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
156	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.02 RW.13 Kel. Kedung Waringin	Kedung Waringin	1	paket	DISPERUMKIM
157	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.01 RW.13 Kel. Kedung Waringin	Kedung Waringin	1	paket	DISPERUMKIM
158	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RW.07 Kel. Sukadamai	Sukadamai	1	paket	DISPERUMKIM
159	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.01 RW.07 Kel. Sukadamai	Sukadamai	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
160	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.02 RW.08 Kel. Sukadamai	Sukadamai	1	paket	DISPERUMKIM
161	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.02 RW.09 Kel. Sukadamai	Sukadamai	1	paket	DISPERUMKIM
162	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 05, RW. 01 Kelurahan Kedung Badak	jl kolonel martadisastra no 23 rt 05 rw 01 kel kedung badak kec tanah sareal kota bogor 16164, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
163	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 03, RW. 05 Kelurahan Kedung Jaya	jl cimanggu wates rt 03 rw 05 kel kedung jaya kec tanah sareal kota bogor, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
164	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 03, RW. 01 Kelurahan Kedung Jaya	Gg mantri guru rt 03 rw 01 kel kedung jaya kec tanah sareal,kota bogor 16124, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
165	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RW.07 Kel. Sukadamai	Sukadamai	1	paket	DISPERUMKIM
166	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Permukiman	sukaesmi rt 01 rw 05, kel sukaesmi ,kec,tanah sareal, Kota Bogor	1	paket	PUPR
167	H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I	Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan Perkoperasian	jl cimanggu gg madrasah rt 003 rw 003 kel kedung jaya kec tanah sareal kota bogor, Kota Bogor	100	orang	DKUKMDAGIN
168	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Perbaikan Drainase RT.04 RW.05 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
169	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Perbaikan Drainase RT.01 RW.02 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
170	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01 RW.13 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
171	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Perbaikan Drainase RT.03 RW.11 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
172	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Perbaikan Drainase RT.02 RW.10 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
173	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01 RW.03 Kel. Cibadak	Cibadak	1	paket	DISPERUMKIM
174	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Pembangunan TPT RT.03 RW.06 Kel. Mekarwangi	Mekarwangi	1	paket	DISPERUMKIM
175	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Perbaikan Drainase RT.04 RW.04 Kel. Kayumanis	Kayumanis	1	paket	DISPERUMKIM
176	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Perbaikan Drainase RW.03 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
177	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Perbaikan Jalan RW.2 Kel. Kedung Jaya	Kedung Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
178	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Perbaikan Jalan RT.06 RW.04 Kel. Kayumanis	Kayumanis	1	paket	DISPERUMKIM
179	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Perbaikan Jalan RT.04 RW.05 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
180	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Perbaikan Jalan Lingkungan pada Lokasi Kumuh RT.05, RW.03 Kelurahan Kedung Badak		1	paket	DISPERUMKIM
181	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Perbaikan Posyandu	Gg. Sepat Pondok Rumpit RW. 13 RT. 05 Kelurahan Kebon Pedes, Kota Bogor	36	m2	TANAH SAREAL
182	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Pembangunan TPT Sungai	Kebon Anggrek Lebak RW. 02 RT. 04 Kelurahan Kebon Pedes, Kota Bogor	1	paket	PUPR
183	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	KP.SALABENDA RT.02/04 KEL.KAYUMANIS, Kota Bogor	1	paket	PUPR
184	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	KP.PABUARAN RT.05,02/03 CIBADAK TANAH SAREAL (depan rumah H.Sarbini), Kota Bogor	1	paket	PUPR

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
185	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian)	Kebon anggrek lebak rt. 05 sampai rt. 01 kelurahan kebon pedes, Kota Bogor	1	set	DISPARBUD
186	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Padat Karya	RW. 02 Kebon Pedes, Kota Bogor	40	orang	DISNAKER
187	H. Murtadlo, S.PD.I, M.Si	Golkar	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Jl. Manunggal Jaya RT 01 sampai RT 05 RW. 02 Kelurahan Kebon Pedes, Kota Bogor	30	unit	DISKOMINFO
188	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Posyandu	JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN RT 01 RW 04 KELURAHAN KEBON KALAPA KECAMATAN BOGOR TENGAH , Kota Bogor	64	M2	BOTENG
189	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	GANG SWADAYA 1 RT 01 RW 10 KELURAHAN KEBON KALAPA KECAMATAN BOGOR TENGAH , Kota Bogor	1	paket	DISHUB
190	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Jalan RT.04 RW.09 Kel. Sindangrasa	Sindangrasa	1	paket	DISPERUMKIM
191	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Drainase RT.02 RW.09 Kel. Sindangrasa	Sindangrasa	1	paket	DISPERUMKIM
192	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pembangunan TPT RT.01 RW.12 Kel. Sindangrasa	Sindangrasa	1	paket	DISPERUMKIM
193	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Drainase RT.01 RW.09 Kel. Sindangrasa	Sindangrasa	1	paket	DISPERUMKIM
194	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Drainase RT.06 RW.08 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
195	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pembangunan TPT RT.04 RW.07 Kel. Sindangrasa	Sindangrasa	1	paket	DISPERUMKIM
196	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Jalan RT.01 RW.01 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM
197	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Drainase RT.01 RW.01 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM
198	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Jalan RW.06 Kel. Kebon Kalapa	KEBON KALAPA	1	paket	DISPERUMKIM
199	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Drainase RT.01 RW.05 Kel. Kebon Kalapa	KEBON KALAPA	1	paket	DISPERUMKIM
200	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pembangunan TPT RT.01 RW.11 Kel. Gudang	Gudang	1	paket	DISPERUMKIM
201	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 03, RW. 08 Kelurahan Sindangrasa	KAMPUNG MUARA RT 03 RW 08 KELURAHAN SINDANGRASA KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
202	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 05, RW. 07 Kelurahan Sindangrasa	KAMPUNG MUARA RT 05 RW 07 KELURAHAN SINDANGRASA KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
203	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 04, RW. 07 Kelurahan Sindangrasa	KAMPUNG MUARA RT 04 RW 07 KELURAHAN SINDANGRASA KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
204	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 06, RW. 07 Kelurahan Sindangrasa	KAMPUNG MUARA RT 06 RW 07 KELURAHAN SINDANGRASA KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
205	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Jalan RW.06 Kel. Kebon Kalapa	KEBON KALAPA	1	paket	DISPERUMKIM
206	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung)	JALAN BABADAK RT 03 RW 04 KELURAHAN SINDANGGRASA KECAMATAN BOGOR TIMUR, Kota Bogor	5	UNIT	DAMKAR
207	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung)	PERUMAHAN MUTIARA BOGOR RAYA (MBR) RT 01 RW 17 KELURAHAN KATULAMPA KECAMATAN BOGOR TIMUR, Kota Bogor	5	UNIT	DAMKAR
208	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pelatihan Tanggap Kebakaran (Pelatihan Pencegahan Kebakaran, Sosialisasi Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), Pelatihan Penyelamatan (SAR))	LAPANGAN SUKASARI RT 07 RW 01 KELURAHAN SUKASARI KECAMATAN BOGOR TIMUR, Kota Bogor	65	PESERTA	DAMKAR
209	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung)	KATULAMPA BULEUD RT 03 RW 08 KELURAHAN KATULAMPA KECAMATAN BOGOR TIMUR, Kota Bogor	5	UNIT	DAMKAR
210	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung)	JALAN SUKAMULYA RT 04 RW 05 KELURAHAN SUKASARI KECAMATAN BOGOR TIMUR, Kota Bogor	5	UNIT	DAMKAR
211	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	PERUMAHAN UNITEX RT 01 SAMPAL DENGAN RT 04 RW 06 KELURAHAN SINDANGGRASA KECAMATAN BOGOR TIMUR, Kota Bogor	10	UNIT	DLH
212	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	PKBM JAMIATUL BAROKAH RT 03 RW 01 KELURAHAN SUKASARI KECAMATAN BOGOR TIMUR, Kota Bogor	20	PESERTA	DISNAKER

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
213	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	GANG SWADAYA RT 01 RW 10 KELURAHAN KEBON KALAPA KECAMATAN BOGOR TENGAH , Kota Bogor	20	PESERTA	DISNAKER
214	H. Subhan, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	GANG SWADAYA 1 RT 01 RW 10 KELURAHAN KEBON KALAPA KECAMATAN BOGOR TENGAH , Kota Bogor	6	TITIK	DISKOMINFO
215	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RW.16 Kel. Bantarjati	Bantarjati	1	paket	DISPERUMKIM
216	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.01 RW.08 Kel. Ciparigi	Ciparigi	1	paket	DISPERUMKIM
217	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.01 RW.03 Kel. Ciparigi	Ciparigi	1	paket	DISPERUMKIM
218	H. Syarif Hidayat Sastra, SE	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.01 RW.03 Kel. Ciparigi	Ciparigi	1	paket	DISPERUMKIM
219	Atty Somaddikarya	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.04 RW.08 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	paket	DISPERUMKIM
220	Atty Somaddikarya	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.02,03 RW.09 Kel. Sindangrasa	Sindangrasa	1	paket	DISPERUMKIM
221	Atty Somaddikarya	PDI Perjuangan	Pelatihan usaha Ekonomi bagi PPKS	Gang Kosasih RT 05/10, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan , Kota Bogor	100	orang	DINSOS
222	Banu Lesmana Bagaskara, S.M	PDI Perjuangan	Perbaikan Drainase RT.01 RW.05 Kel. Mekarwangi	Mekarwangi	1	paket	DISPERUMKIM
223	Banu Lesmana Bagaskara, S.M	PDI Perjuangan	Perbaikan Drainase RT.02 RW.05 Kel. Mekarwangi	Mekarwangi	1	paket	DISPERUMKIM
224	Banu Lesmana Bagaskara, S.M	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.03 RW.05 Kel. Mekarwangi	Mekarwangi	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
225	Banu Lesmana Bagaskara, S.M	PDI Perjuangan	Pelatihan Budidaya Ikan (Bimbingan teknis/pelatihan budidaya ikan)	JL. PABUARAN CIMANGGIS RT. 002/RW.002 KEL. MEKARWANGI KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	Kegiatan	DKPP
226	Banu Lesmana Bagaskara, S.M	PDI Perjuangan	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	JL. PABUARAN CIMANGGIS RT. 002/RW. 002 KEL. MEKARWANGI KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	PAKET	DKUKMDAGIN
227	DEDI MULYONO, S.P., M.Si.	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl.Pabuaran pasir RT 02 RW 10 Mulyaharja (jalan utama penghubung pamoyanan ke Mulyaharja), Kota Bogor	1	paket	DISHUB
228	DEDI MULYONO, S.P., M.Si.	PKS	Perbaikan Jalan RT.04 RW.01 Kel. Genteng	RT.04 RW.01 Kel. Genteng	1	paket	DISPERUMKIM
229	DEDI MULYONO, S.P., M.Si.	PKS	Pelunasan Ijasah SD, SMP, MTs swasta bagi masyarakat miskin	kp Nagrog RT 02/012 Pamoyanan, Bogor Selatan, Kota Bogor	1	orang	DISDIK
230	DEDI MULYONO, S.P., M.Si.	PKS	Pengembangan wawasan politik (Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)	cipaku Bogor selatan, Kota Bogor	100	orang	KESBANGPOL
231	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Sindangrasa RT.05 Rw.05, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
232	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Pabaton Rt.01 Rw.03, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
233	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Kebon Kalapa Rt.03 Rw.05, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
234	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Sindangsari Rt.01 Rw.07, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
235	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Perbaikan Drainase RT.03 RW.09 Kel. Sindangrasa	Sindangrasa	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
236	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Perbaikan Jalan RT.03 RW.04 Kel. Sukasari	Sukasari	1	paket	DISPERUMKIM
237	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Perbaikan Jalan RT.02 RW.07 Kel. Sindangsari	Sindangsari	1	paket	DISPERUMKIM
238	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01 RW.10 Kel. Babakan Pasar	Babakan Pasar	1	paket	DISPERUMKIM
239	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Perbaikan Jalan RT.04 RW.06 Kel. Sukasari	Sukasari	1	paket	DISPERUMKIM
240	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Perbaikan JPO RT.03 RW.03 Kel. Sempur	Sempur	1	paket	DISPERUMKIM
241	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01 RW.03 Kel. Panaragan	Panaragan	1	paket	DISPERUMKIM
242	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Perbaikan Jalan Lingkungan pada Lokasi Kumuh RT.04, RW.03 Kelurahan Sempur	Sempur	1	paket	DISPERUMKIM
243	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Pelatihan usaha Ekonomi bagi PPKS	Pabaton Rt.01 Rw.04, Kota Bogor	100	Orang	DINAS SOSIAL
244	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Pelatihan Perkoperasian	Jl.raya Pajajaran Rt.03 Rw.04, Kota Bogor	1	kegiatan	DKUKMDAGIN
245	DESY YANTHI UTAMI	Golkar	Pembinaan RW Ramah Anak (Pelatihan Konvensi Hak Anak, Sosialisasi Tentang RW Ramah Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Wilayah RW dalam rangka pembentukan RW ramah anak)	Sindang rasa Rt.05 Rw.05, Kota Bogor	170	orang	DPPPA
246	Devie Prihartini Sultani, SE	Nasdem	Pembangunan TPT Sungai	Jl. Sawah Baru Rt. 01/Rw. 12 Kel. Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor			PUPR
247	Devie Prihartini Sultani, SE	Nasdem	Pelatihan Kesenian dan Kebudayaan (Fasilitasi pelatihan)	Jalan Pandu Raya No. 45, Tegal Gundil, RT.01/RW.16, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16121, Kota Bogor	100	Orang	DISPARBUD

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
248	Devie Prihartini Sultani, SE	Nasdem	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jl. Paledang No.43, Rt.001 Rw.002, Kel. Paledang, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1	Buah	DLH
249	Devie Prihartini Sultani, SE	Nasdem	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	Jl. DR. Sumeru No.33 Rt. 004 Rw. 008. Kel. Kebon Kalapa, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	20	Orang	DISNAKER
250	Devie Prihartini Sultani, SE	Nasdem	Sarana Pendidikan SD Negeri (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	Jl. Flamboyan No.31, RT.01/RW.01, Curug, Kec. Bogor Barat., Kota Bogor, Jawa Barat 16113, Kota Bogor	1	PAKET	DISDIK
251	Devie Prihartini Sultani, SE	Nasdem	Sarana Pendidikan SD Negeri (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	Jl. Komp. Kehutanan, RT.05/RW.06, Pasirmulya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16116, Kota Bogor	1	PAKET	DISDIK
252	Devie Prihartini Sultani, SE	Nasdem	Sarana Pendidikan SD Negeri (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	Jl. Swadaya Babakan Lb., RT.04/RW.06, Balungbangjaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16116, Kota Bogor	1	PAKET	DISDIK
253	Devie Prihartini Sultani, SE	Nasdem	Sarana Pendidikan SD Negeri (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	Jl. Manunggal No.20, RT.03/RW.01, Menteng, Kec. Bogor Barat., Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Kota Bogor	1	PAKET	DISDIK
254	Devie Prihartini Sultani, SE	Nasdem	Pembangunan ruang kelas baru SD Swasta/Negeri	Jl. Swadaya Babakan Lb., RT.04/RW.06, Balungbangjaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16116, Kota Bogor	1	PAKET	DISDIK
255	Devie Prihartini Sultani, SE	Nasdem	Pelatihan usaha Ekonomi bagi PPKS	Jl. Merdeka No.142 Rt.003 Rw.005, Kel. Ciwringin, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	100	Orang	DINAS SOSIAL
256	Devie Prihartini Sultani, SE	Nasdem	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Jl. Dadali II No.3, Rt.001 Rw.005, Kel. Tanah Sareal. Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	100	Orang	DKUKMDAGIN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
257	Devie Prihartini Sultani, SE	Nasdem	Pembinaan RW Ramah Anak (Pelatihan Konvensi Hak Anak, Sosialisasi Tentang RW Ramah Anak dan Pemenuhan Hak Anak di Wilayah RW dalam rangka pembentukan RW ramah anak)	Jl. Ciwaringin No.99 Rt. 001 Rw. 009, Kel. Ciwaringin, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	170	Orang	DPPPA
258	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Posyandu	Kp. Gudang Posyandu Seruni RW 07 Kel. Gudang, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1	paket	BOTENG
259	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Ciwaringin Tanah Sewa RT 03/ RW 02 Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
260	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT 1,2,3,4 RW 10 Kel. Ciwaringin, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
261	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT 03/ RW 01 Kel. Tegallega, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
262	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan RT.01-04 RW.10 Kel. Ciwaringin	Ciwaringin	1	paket	DISPERUMKIM
263	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan RT.01-03 RW.10 Kel. Gudang	Gudang	1	paket	DISPERUMKIM
264	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pembangunan TPT RT.03 RW.10 Kel. Ciwaringin	Ciwaringin	1	paket	DISPERUMKIM
265	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Drainase RT.6 RW.9 Kel. Tegallega	Tegallega	1	paket	DISPERUMKIM
266	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pembangunan TPT RT.05 RW.06 Kel. Kebon Kalapa	KEBON KALAPA	1	paket	DISPERUMKIM
267	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pembangunan TPT RT.02 RW.10 Kel. Ciwaringin	Ciwaringin	1	paket	DISPERUMKIM
268	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Drainase RT.01 RW.15 Kel. Cibadak	Cibadak	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
269	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Drainase RW.01 Kel. Tegallega	Tegallega	1	paket	DISPERUMKIM
270	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan RT.01 RW.15 Kel. Cibadak	Cibadak	1	paket	DISPERUMKIM
271	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Drainase RW.15 Kel. Cibadak	Cibadak	1	paket	DISPERUMKIM
272	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Drainase RT.03 RW.09 Kel. Tegallega	Tegallega	1	paket	DISPERUMKIM
273	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pembangunan TPT RT.02 RW.01 Kel. Cibogor	Cibogor	1	paket	DISPERUMKIM
274	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Drainase RT.03 RW.02 Kel. Ciwaringin	Ciwaringin	1	paket	DISPERUMKIM
275	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pembangunan Taman Keluarga Bogor Raya Permai Blok FC	Curug	1	paket	DISPERUMKIM
276	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pembangunan TPT RT.05 RW.06 Kel. Kebon Kalapa	KEBON KALAPA	1	paket	DISPERUMKIM
277	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	RT 01/ RW 03 Kel. Sindangrasa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor	1	unit	DLH
278	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jl. Ciwaringin RT 1,2,3,4 RW 10 Kel. Ciwaringin, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	2	unit	DLH
279	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)		1	Paket	DLH

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
280	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Sarana Pendidikan SD Negeri (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	seluruh SDN di kecamatan Bogor Tengah , Kota Bogor	15	paket (sesuai proposal)	DISDIK
281	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Sarana Pendidikan SMP Swasta/Negeri (Utilitas Sarana SMP (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	100	paket (5 laptop/komputer/s ekolah)	DISDIK
282	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Jl. Ciwaringin RT 01,02,03,04 RW 10 Kel. Ciwaringin, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	10	titik	DISKOMINFO
283	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Curug RT 05/ RW 11 Kel. Curug, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	12	unit cctv (total Rp. 21 jt)	DISKOMINFO
284	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Ciwaringin RW 12 Kel. Ciwaringn, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	4	unit (perkiraan total Rp. 7.000.000,-)	DISKOMINFO
285	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Ciwaringin Tanah Sewa RT 01-06 / RW 01 Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	30	unit (perkiraan total Rp. 60.000.000)	DISKOMINFO
286	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Mekarwangi RW 13 Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	20	unit (perkiraan Rp. 35.000.000,-)	DISKOMINFO
287	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	RW 10 Kel. Ciwaringin RT 1,2,3,4 Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	10	unit (Total Rp. 10.000.000)	DISKOMINFO
288	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Penyediaan Alat Olahraga (pengadaan peralatan tenis meja (Pengadaan bolavoli, bola basket, bola tenis meja, bola sepak bola, bola futsal, bola sepak takraw, shuttle cock, pengadaan net bulu tangkis, pengadaan raket badminton/raket tenis meja)	Jl. K.H Abdullah Bin Nuh Ruko No. 2 RT 01/ RW 02 SEKRETARIAT SIONA Kel. Sindangbarang, Kota Bogor	1	set	DISPORA

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
289	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Penyediaan Alat Olahraga (pengadaan peralatan tenis meja (Pengadaan bolavoli, bola basket, bola tenis meja, bola sepak bola, bola futsal, bola sepak takraw, shuttlecock, pengadaan net bulu tangkis, pengadaan raket badminton/raket tenis meja)	Jl. Ciwaringin II No. 3RT 02/ RW 04 Kel. Ciwaringin Bogor Tengah, Kota Bogor	3	paket	DISPORA
290	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	RT 1 RW 1 Kel. Panaragan RW 1,2,3,4,5,6,7 KEC. BOGOR TENGAH, Kota Bogor	500	orang	DKUKMDAGIN
291	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Kel. Paledang RW 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DKUKMDAGIN
292	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Kel. Kebon Kelapa RW 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DKUKMDAGIN
293	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Kel. Gudang RW 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DKUKMDAGIN
294	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Kel. Ciwaringin RW 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 KEC. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DKUKMDAGIN
295	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Kel. Cibogor Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DKUKMDAGIN
296	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Kel. Babakan di RW 1,2,3,4,5,6,7 Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DKUKMDAGIN
297	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Kel. Babakan Pasar Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DKUKMDAGIN
298	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Wilayah Kel. Tegallega RW 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	500	orang	DKUKMDAGIN
299	Dr. ADITYAWARMAN ADIL, S.Si., M.Si	PKS	Pelatihan Perkoperasian	Wilayah Kec. Bogor Tengah - Kelurahan babakan - Kelurahan babakan pasar - Kelurahan Gudang - Kelurahan Paledang - Kelurahan	500	orang	DKUKMDAGIN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				Panaragan - Kelurahan Ciwaringin - Kelurahan Cibogor - Kebon Kelapa, Kota Bogor			
300	Drh. H. Tri Kisowo Jumino, M.M	Aswaja	Pembangunan TPT RT.02 RW.09 Kel. Curug	Curug	1	paket	DISPERUMKIM
301	Drh. H. Tri Kisowo Jumino, M.M	Aswaja	Pembangunan TPT RT.02 RW.14 Kel. Gunung Batu	Gunung Batu	1	paket	DISPERUMKIM
302	Drh. H. Tri Kisowo Jumino, M.M	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.03 RW.14 Kel. Gunung Batu	Gunung Batu	1	paket	DISPERUMKIM
303	Drh. H. Tri Kisowo Jumino, M.M	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.02 RW.12 Kel. Bubulak	Bubulak	1	paket	DISPERUMKIM
304	Drh. H. Tri Kisowo Jumino, M.M	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.01 RW.04 Kel. Cilendek Timur	Cilendek Timur	1	paket	DISPERUMKIM
305	Drh. H. Tri Kisowo Jumino, M.M	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.03 RW.14 Kel. Gunung Batu	Gunung Batu	1	paket	DISPERUMKIM
306	Drh. H. Tri Kisowo Jumino, M.M	Aswaja	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (Pembangunan/pembuatan MCK umum) Kec. Bogor Barat	KP. SEMPLAK RT. 05/04 KEL. BUBULAK, Kota Bogor	55	M3	BOGOR BARAT
307	Drh. H. Tri Kisowo Jumino, M.M	Aswaja	Pembangunan TPT Sungai	KP. BABAKAN RT. 01/09 KEL. BUBULAK, Kota Bogor	1	paket	PUPR
308	Drh. H. Tri Kisowo Jumino, M.M	Aswaja	Sarana Budidaya ikan (Bantuan sarana budidaya ikan)	KP. SEMPLAK RT. 03/04 KEL. BUBULAK, Kota Bogor	10	Paket	DKPP
309	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl. Nusa Indah, Rt. 03 / Rw. 09, Kelurahan Kebon Pedes, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
310	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	VILLA MUTIARA RT. 09. RW. 12 . KEL. MEKARWANGI, KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
311	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	JL. MELON IV, RT.2,4, RW. 11 KEL. KENCANA, KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	paket	DISHUB

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
312	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	VILLA MUTIARA RT. 03 , RW. 12, KEL. MEKARWANGI, KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
313	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	KD. HALANG SENTRAL RT. 01/ RW. 04, KEL. SUKARESMI, KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
314	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT. 04 RW. 03, KEL. TANAH SAREAL, KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
315	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT. 03 RW. 03, KEL. TANAH SAREAL, KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
316	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Perbaikan Drainase RT.02 RW.02 Kel. Sukaresmi	Sukaresmi	1	paket	DISPERUMKIM
317	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Perbaikan Jalan RT.06 RW.10 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
318	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Perbaikan Jalan RT.08 RW.12 Kel. Mekarwangi	Mekarwangi	1	paket	DISPERUMKIM
319	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Perbaikan Jalan RW.12 Kel. Mekarwangi	Mekarwangi	1	paket	DISPERUMKIM
320	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Perbaikan Drainase RT.01 RW.05 Kel. Kedung Jaya	Kedung Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
321	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Perbaikan Jalan RT.03 RW.12 Kel. Mekarwangi	Mekarwangi	1	paket	DISPERUMKIM
322	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Perbaikan Drainase RT.01 RW.07 Kel. Sukaresmi	Sukaresmi	1	paket	DISPERUMKIM
323	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Perbaikan Jalan RT.01 RW.07 Kel. Sukaresmi	Sukaresmi	1	paket	DISPERUMKIM
324	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Pembangunan TPT RT.02 RW.07 Kel. Sukaresmi	Sukaresmi	1	paket	DISPERUMKIM
325	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Pembangunan TPT RT.04 RW.07 Kel. Sukaresmi	Sukaresmi	1	paket	DISPERUMKIM
326	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Perbaikan Jalan RT.02 RW.11 Kel. Kencana	Kencana	1	paket	DISPERUMKIM
327	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Perbaikan Saluran Lingkungan pada Lokasi Kumuh RT.03, RW.03 Kelurahan Sukaresmi		1	paket	DISPERUMKIM
328	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Pembangunan Taman Bermain Anak Villa Mutiara Bogor	Ciparigi	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
329	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 01 , RW. 11 Kelurahan Kebon Pedes	GG. CUPANG, RT. 01 RW. 11, KELURAHAN KEBON PEDES, KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
330	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Perbaikan Jalan RT.06 RW.10 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
331	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Perbaikan Jalan RT.02 RW.11 Kel. Kencana	Kencana	1	paket	DISPERUMKIM
332	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Pembangunan Posyandu	GG. SEREN, RT. 04. RW. 12, KEL. KEBON PEDES, KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor	70	M2	TANAH SAREAL
333	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Pembangunan TPT Sungai	KD. HALANG SENTRAL RT. 01/ RW. 04, KEL. SUKARESMI, KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	paket	PUPR
334	Drs. Safrudin, M.Si	PAN	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	RT.05. RW. 04. KEL. CIBADAK. KEC. TANAH SAREAL, Kota Bogor	20	orang	DISNAKER
335	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Perbaikan Posyandu	Panaragan Bakbis Rt 03 Rw 05 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	40	M2	BOTENG
336	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Pembangunan Posyandu	Gg.Kepatihan RT 04 RW 01 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	20	M3	BOTENG
337	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Kebon Jae RT 01,02,04 RW 03 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
338	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Kp.Tunggilis RT 03 RW 13 Kelurahan Kedung Halang Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
339	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Perbaikan Drainase RT.04 RW.17 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
340	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Pembangunan TPT RT.04 RW.17 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM
341	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Perbaikan Drainase RT.03 RW.17 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM
342	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Perbaikan Drainase RT.1,02 RW.17 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM
343	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Perbaikan Jalan RT.6 RW.17 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM
344	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Perbaikan Drainase RT.06 RW.17 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM
345	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Perbaikan Drainase RW.02 Kel. Kebon Kalapa	KEBON KALAPA	1	paket	DISPERUMKIM
346	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Perbaikan Jalan RT.04,05 RW.01 Kel. Kebon Kalapa	KEBON KALAPA	1	paket	DISPERUMKIM
347	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Pembangunan TPT RT.03 RW.05 Kel. Kebon Kalapa	KEBON KALAPA	1	paket	DISPERUMKIM
348	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 05, RW. 03 Kelurahan Sukasari	Jalan Sukamulya Blok Gemlong RT 05 RW 03 Kelurahan Sukasari Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
349	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Perbaikan Jalan RT.6 RW.17 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM
350	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Perbaikan Jalan RT.04,05 RW.01 Kel. Kebon Kalapa	KEBON KALAPA	1	paket	DISPERUMKIM
351	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Pembangunan TPT RT.03 RW.05 Kel. Kebon Kalapa	KEBON KALAPA	1	paket	DISPERUMKIM
352	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Pembangunan Posyandu	Mutiara Bogor Raya Rt 02 Rw 17 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor	40	M2	BOGOR TIMUR
353	Eka Wardhana, S.IP	Golkar	Penyediaan Alat Olahraga (pengadaan peralatan tenis meja (Pengadaan bolavoli, bola basket, bola tenis meja, bola sepak bola, bola futsal, bola sepak takraw, shuttle cock, pengadaan net bulu	Mutiara Bogor Raya Blok G 10 No.18 RT.01 RW.17, Kota Bogor	30	Paket	DISPORA

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
			tangkis, pengadaan raket badminton/raket tenis meja)				
354	Ence Setiawan	PDI Perjuangan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Rehabilitasi dan revitalisasi APJ/PJU Eksisting (Non LED) di jalan lingkungan/gang)	KP. BATUHULUNG RT 01, 02, 03 RW 01 KEL. BALUMBANGJAYA KEC. BOGOR BARAT, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
355	Ence Setiawan	PDI Perjuangan	Perbaikan Drainase RT.01,02 RW.09 Kel. Situ Gede	Situ Gede	1	paket	DISPERUMKIM
356	Ence Setiawan	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT RT.01 RW.01 Kel. Balumbang Jaya	Balumbang Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
357	Ence Setiawan	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT RT.01 RW.01 Kel. Balumbang Jaya	Balumbang Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
358	Ence Setiawan	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai	JL. BABAKAN LEBAK NO. 46 RT 01 RW 05 KEL. BALUMBANGJAYA KEC. BOGOR BARAT, Kota Bogor	1	paket	PUPR
359	Ence Setiawan	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai	JL. BABAKN LIO NO. 36 RT 05 RW 011 KEL. BALUMBANGJAYA KEC. BOGOR BARAT, Kota Bogor	1	paket	PUPR
360	Ence Setiawan	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai	JL. BATUHULUNG RT 01 RW 01 KEL. BALUMBANGJAYA, Kota Bogor	1	paket	PUPR
361	Ence Setiawan	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai	CILUBANG LEBAK RT 01 RW 01 KEL. SETU GEDE KEC. BOGOR BARAT, Kota Bogor	1	paket	PUPR
362	Ence Setiawan	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai	RT 01 RW 03 KEL. BALUMBANGJAYA KEC. BOGOR BARAT, Kota Bogor	1	paket	PUPR
363	Ence Setiawan	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai	CILUBANG NAGRAK RT 03 RW 04 KEL. SETU GEDE KEC. BOGOR BARAT, Kota Bogor	1	paket	PUPR

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
364	Ence Setiawan	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai	KP. BATUHULUNG RT 02 RW 01 KEL. BALUMBANGJAYA KEC. BOGOR BARAT, Kota Bogor	1	paket	PUPR
365	ENDAH PURWANTI, S.Pi	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl. Kaumsari dekat Olympic RT01 RW05 Cibuluh, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
366	ENDAH PURWANTI, S.Pi	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl. Pangeran Ashogiri masuk lewat gang depan eks Kebun Kurma RT01 RW05 Tanah Baru, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
367	ENDAH PURWANTI, S.Pi	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Masuk Gg Kondang lewat depan PGRI7 terus ke belakang RT02 RW08 Cibuluh, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
368	ENDAH PURWANTI, S.Pi	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Masuk Gg Kondang Belakang PGRI7, perlu PJU di RT03 RW08 Cibuluh, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
369	ENDAH PURWANTI, S.Pi	PKS	Perbaikan Jalan RT.02 RW.08 Kel. Cibuluh	Cibuluh	1	paket	DISPERUMKIM
370	ENDAH PURWANTI, S.Pi	PKS	Kurang banyaknya menampung jamaah sehingga perlu dilakukan pengerjaan lantai 2	Kp. Ciheuleut RT 02 RW 06	1	paket	BAG. KESRA
371	ENDAH PURWANTI, S.Pi	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Perum Taman Kenari RT01 RW10 Kelurahan Ciluar, Kota Bogor	1	paket pengerjaan	DLH
372	ENDAH PURWANTI, S.Pi	PKS	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	Berlokasi di Kantor Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	20	Kegiatan	DISNAKER
373	ENDAH PURWANTI, S.Pi	PKS	Pelatihan usaha Ekonomi bagi PPKS	Berlokasi di Kecamatan Bogor Utara, Jl. Gagalar No.2 Kel. Tegal Gundil, Kota Bogor	150	orang	DINAS SOSIAL
374	ENDAH PURWANTI, S.Pi	PKS	Pembinaan RW Ramah Anak (Pelatihan Konvensi Hak Anak, Sosialisasi Tentang RW Ramah Anak dan Pemenuhan Hak	Berlokasi di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor	200	Orang	DPPPA

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
			Anak di Wilayah RW dalam rangka pembentukan RW ramah anak)				
375	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	Lembursawah RT 01/02 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
376	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	Lembursawah RT 02 RW02 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
377	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	Lembursawah RT 03 RW 02 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
378	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	Lembursawah RT 04 RW 02 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
379	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	Lembursawah RT 05 RW 02 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
380	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	Cibeureum RT 01 RW 11 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
381	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	Cibeureum RT 02 RW 11 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
382	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	Cibeureum RT 03 RW 11 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
383	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	Cibeureum RT 04 RW 11 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
384	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	Jalan R. Kosasih RT 02 RW 08 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
385	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlntasi FO jaringan Kota)	Jalan R. Kosasih RT 03 RW 08 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
386	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlntasi FO jaringan Kota)	Jalan R. Kosasih RT 04 RW 08 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
387	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlntasi FO jaringan Kota)	KP. Bojong Pesantren RT 01 RW 03 Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
388	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlntasi FO jaringan Kota)	KP. Bojong Pesantren RT 02 RW 03 Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
389	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlntasi FO jaringan Kota)	KP. Bojong Pesantren RT 03 RW 03 Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
390	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlntasi FO jaringan Kota)	Rancamaya RT 01 RW 04 Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
391	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlntasi FO jaringan Kota)	Rancamaya RT 02 RW 04 Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
392	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlntasi FO jaringan Kota)	Rancamaya RT 03 RW 04 Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
393	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlntasi FO jaringan Kota)	Jl Layungsari RT 02 RW 18 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
394	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlntasi FO jaringan Kota)	Jl Layungsari RT 03 RW 18 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
395	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlntasi FO jaringan Kota)	Jl Layungsari RT 04 RW 18 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
396	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Lembursawah RT 01 02 03 04 05 RW 02 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	5	Titik	DISKOMINFO
397	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	Jl Pamoyanan RT 01 RW 10 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
398	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	Jl Pamoyanan RT 02 RW 10 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
399	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Wifi Publik (berada di taman kecamatan yg terlintasi FO jaringan Kota)	Jl Pamoyanan RT 03 RW 10 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	Titik	DISKOMINFO
400	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Cibeureum RT 01 02 03 04 RW 11 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	4	Titik	DISKOMINFO
401	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Jalan R. Kosasih RT 02 03 04 RW 08 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	3	Titik	DISKOMINFO
402	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Jl Layungsari RT 02 03 04 RW 18 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	3	Titik	DISKOMINFO
403	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Rancamaya RT 01 02 03 RW 04 Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	3	Titik	DISKOMINFO
404	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	KP. Bojong Pesantren RT 01 02 03 RW 03 Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	3	Titik	DISKOMINFO

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
405	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Jl Pamoyanan RT 01 02 03 RW 10 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	3	Titik	DISKOMINFO
406	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Jl. Layungsari III, RT.06/RW.14, Empang, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16131, Kota Bogor	120	Orang/Kegiatan	DKUKMDAGIN
407	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Pelatihan Perkoperasian	Jl. Dadali II No. 3, RT.001/RW.005, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161, Kota Bogor	120	Orang	DKUKMDAGIN
408	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Penguatan PATBM	Jl. Ciwaringin No.99, RT.01/RW.09, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Kota Bogor	120	Orang/kegiatan	DPPPA
409	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Penguatan PATBM	Jl. Ciwaringin No.99, RT.01/RW.09, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16124, Kota Bogor	255	Orang	DPPPA
410	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Penguatan PATBM	Jl. Ciwaringin No. 99, RT.001/RW.009, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat 16124, Kota Bogor	255	Orang	DPPPA
411	Fajar Muhammad Nur	Nasdem	Penguatan PATBM	Jl. Ciwaringin No.99, RT.01/RW.09, Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor	255	Orang	DPPPA
412	H. Azis Muslim, S.Pd.I, MM	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl. Artzimar III RT 05 RW 03 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
413	H. Azis Muslim, S.Pd.I, MM	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT 4 RW 3 Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara , Kota Bogor	1	paket	DISHUB

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
414	H. Azis Muslim, S.Pd.I, MM	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.03 RW.01 Kel. Tanah Baru	Tanah Baru	1	paket	DISPERUMKIM
415	H. Azis Muslim, S.Pd.I, MM	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RW.08 Kel. Ciluar	Ciluar	1	paket	DISPERUMKIM
416	H. Azis Muslim, S.Pd.I, MM	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan JPO RT.04 RW.03 Kel. Ciparigi	Ciparigi	1	paket	DISPERUMKIM
417	H. Azis Muslim, S.Pd.I, MM	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Sungai	Bumi Ciluar Indah RT 01 RW 08 Keluran Ciluar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	PUPR
418	H. Azis Muslim, S.Pd.I, MM	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	RT 5 RW 03 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	1	unit	DLH
419	H. Azis Muslim, S.Pd.I, MM	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	RT 4 RW 9 Kel. Ciparigi Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	1	unit	DLH
420	H. Azis Muslim, S.Pd.I, MM	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Olahraga (pengadaan peralatan tenis meja (Pengadaan bolavoli, bola basket, bola tenis meja, bola sepak bola, bola futsal, bola sepak takraw, shuttle cock, pengadaan net bulu tangkis, pengadaan raket badminton/raket tenis meja)	Bumi Ciluar Indah RT 2 RW 8 Kel. Ciluar Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	1	Buah	DISPORA
421	H. Azis Muslim, S.Pd.I, MM	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Olahraga (pengadaan peralatan tenis meja (Pengadaan bolavoli, bola basket, bola tenis meja, bola sepak bola, bola futsal, bola sepak takraw, shuttle cock, pengadaan net bulu tangkis, pengadaan raket badminton/raket tenis meja)	Perum Pondok Aren Jl. Halmahera no 194 RT 06 RW 07 Kel. Ciluar Kec. Bogor Utara, Kota Bogor	1	Buah	DISPORA

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
422	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	MUARASARI RT 1 SD 5 RW 5 KEL. MUARASARI KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
423	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Rehabilitasi dan revitalisasi APJ/PJU Eksisting (Non LED) di jalan lingkungan/gang)	WARUNG BANDREK RT 1 SD 3 RW 3 KEL. BONDONGAN KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
424	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RANCAMAYA RT 2 RW 5 KELURAHAN RANCAMAYA KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
425	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	PAMOYANAN RT 01 DAN 04 RW 09 KEL. PAMOYANAN KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
426	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	JEROKUTA KAUM RT 02 RW 14 KEL. BONDONGAN , Kota Bogor	1	paket	DISHUB
427	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT RT.02 RW.05 Kel. Rancamaya	Rancamaya	1	paket	DISPERUMKIM
428	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Perbaikan Drainase RT.02 RW.05 Kel. Rancamaya	Rancamaya	1	paket	DISPERUMKIM
429	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Perbaikan Drainase RT.01-04 RW.09 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	paket	DISPERUMKIM
430	H. DADANG ISKANDAR	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.05 RW.12 Kel. Mulyaharja	Mulyaharja	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
	DANUBRATA, S.E., M.M.						
431	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Perbaikan Drainase RT.06 RW.04 Kel. Tanah Sareal	Tanah Sareal	1	paket	DISPERUMKIM
432	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Perbaikan Drainase RT.02,03 RW.02 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM
433	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.03 RW.02 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM
434	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Perbaikan Drainase RT.05 RW.08 Kel. Cikaret	Cikaret	1	paket	DISPERUMKIM
435	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.05 RW.08 Kel. Cikaret	Cikaret	1	paket	DISPERUMKIM
436	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan Lingkungan pada Lokasi Kumuh RT.01, RW.04 Kelurahan Muarasari		1	paket	DISPERUMKIM
437	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Perbaikan Saluran Lingkungan pada Lokasi Kumuh RT.01, RW.04 Kelurahan Muarasari		1	paket	DISPERUMKIM
438	H. DADANG ISKANDAR DANUBRATA, S.E., M.M.	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai	MUARASARI RT 5 RW 4 KEL. MUARASARI KEC. BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	PUPR

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
439	H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Aswaja	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	lolongok rt3 rw 5 kelurahan empang kecamatan bogor selatan, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
440	H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Aswaja	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kp Ranga Mekar rt 1 , 2 rw 12 kelurahan Ranga Mekar Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
441	H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.03 RW.03 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM
442	H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.01 RW.12 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM
443	H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.01 RW.12 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM
444	H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.04 RW.03 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM
445	H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.04 RW.03 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM
446	H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Aswaja	Perbaikan Drainase RW.03 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	paket	DISPERUMKIM
447	H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.02 RW.08 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	paket	DISPERUMKIM
448	H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Aswaja	Pembangunan TPT RT.03 RW.06 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM
449	H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.02 RW.04 Kel. Rancamaya	Rancamaya	1	paket	DISPERUMKIM
450	H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.03 RW.03 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM
451	H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.01 RW.12 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
452	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Gg Rambutan, Belimbing, Jambu Biji, Kedung halang tengah, Kelurahan Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
453	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jalan Johar 1 dan Johar 2, RT05 RW 04, Kel.Kedung Waringin, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
454	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jalan Johar RT02 RW04, Kel.Kedung Waringin, Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
455	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Kampung Srempet, RT03 RW04, Kelurahan Cibadak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
456	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Kukupu, Gang Mushola, RT02 RW05, Kelurahan Cibadak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
457	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Perbaikan Drainase RT.01 RW.06 Kel. Sukadamai	Sukadamai	1	paket	DISPERUMKIM
458	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Pembangunan TPT RT.02 RW.01 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
459	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Perbaikan Jalan RT.01 RW.04 Kel. Kedung Waringin	Kedung Waringin	1	paket	DISPERUMKIM
460	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Perbaikan Drainase RT.02 RW.04 Kel. Kedung Waringin	Kedung Waringin	1	paket	DISPERUMKIM
461	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Perbaikan Jalan RT.04 RW.11 Kel. Cibadak	Cibadak	1	paket	DISPERUMKIM
462	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Perbaikan Jalan RT.01 RW.02 Kel. Cibadak	Cibadak	1	paket	DISPERUMKIM
463	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Perbaikan Drainase RT.03 RW.11 Kel. Kayumanis	Kayumanis	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
464	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Perbaikan Jalan RT.03 RW.15 Kel. Cibadak	Cibadak	1	paket	DISPERUMKIM
465	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Perbaikan Jalan RT.03 RW.11 Kel. Kayumanis	Kayumanis	1	paket	DISPERUMKIM
466	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 03, RW. 06 Cibadak	Kampung Kukupu, RT03 RW06, Kelurahan Cibadak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
467	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Perbaikan Jalan Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 04, RW. 06 Kelurahan Cibadak	Kampung Kukupu Rt04 Rw06, Kelurahan Cibadak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
468	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Pembangunan TPT RT.02 RW.01 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
469	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Perbaikan Jalan RT.03 RW.11 Kel. Kayumanis	Kayumanis	1	paket	DISPERUMKIM
470	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Minimnya sarana prasarana untuk kegiatan Majelis Taklim seperti pengajian anak, Remaja dan Ibu-ibu.	JL. KH. Soleh Iskandar Kp. Salabenda RT 02 RW 04	1	paket	BAG. KESRA
471	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian)	Kampung Prapatan RW02 (RT01,02,03), Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor	1	paket	DISPARBUD
472	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Kampung Prapatan RW02 (RT01,02,03), Kelurahan Cibadak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor	1	unit	DLH
473	H. KARNAIN ASYHAR, S.P., M.Si.	PKS	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Prapatan RT01, 02, 03 RW02 Kelurahan Cibadak, Kec.Tanah Sareal, Kota Bogor	15	Paket	DISKOMINFO
474	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Cemplang Baru RT 06 RW 10 Kelurahan Cilendek Barat Kec.	1	paket	DISHUB

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
				Bogor Barat, Kota Bogor, Kota Bogor			
475	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl. Anggrek Bulan II dan III RT 07 RW 02 Kel. Curug mekar Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
476	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Perbaikan Jalan RT.01 RW.06 Kel. Cilendek Barat	Cilendek Barat	1	paket	DISPERUMKIM
477	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Pembangunan Taman Rimba Mulya 1	Pasir Kuda	1	paket	DISPERUMKIM
478	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Perbaikan Posyandu	Cemplang baru RT 02 RW 11 Kelurahan Cilendek Barat Kec. Bogor Baat, Kota Bogor 16112, Kota Bogor	1	unit	BOGOR BARAT
479	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Pelatihan Tanggap Kebakaran (Pelatihan Pencegahan Kebakaran, Sosialisasi Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar),Pelatihan Penyelamatan (SAR))	Jl.Brigen Saptadji Cilendek Barat RW 02, 03, 05 kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Kota Bogor	65	Peserta	DAMKAR
480	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian)	Cemplang Baru RT 02 RW 11 Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor 16112 (Mushola Baitul Muttaqin), Kota Bogor	1	Set	DISPARBUD
481	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian)	Pancasan Baru Rt 01 Rw 12 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor 16119, Kota Bogor	1	Set	DISPARBUD
482	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jl. Brigjen H. Saptadji Hadiprawira No. 70 Kel. Cilendek Barat Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	unit	DLH
483	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak,	Gang Mesjid, Cilendek Timur, Bogor Barat, RT.01/RW.10, Cilendek Tim., Kec. Bogor Bar., Kota	1	unit	DLH

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
			Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Bogor, Jawa Barat 16112, Kota Bogor			
484	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jl. Re. Abdullah No.2, RT.01/RW.07, Pasirmulya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16118, Kota Bogor	1	unit	DLH
485	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Gang Mesjid, Cilendek Timur, Bogor Barat, RT.01/RW.10, Cilendek Tim., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Kota Bogor	1	unit	DLH
486	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jl. Re. Abdullah No.2, RT.01/RW.07, Pasirmulya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16118, Kota Bogor	1	unit	DLH
487	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Gang Mesjid, Cilendek Timur, Bogor Barat, RT.01/RW.10, Cilendek Tim., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112., Kota Bogor	1	unit	DLH
488	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jl. Re. Abdullah No.2, RT.01/RW.07, Pasirmulya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16118., Kota Bogor	1	unit	DLH
489	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Gang Mesjid, Cilendek Timur, Bogor Barat, RT.01/RW.10., Cilendek Tim., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Kota Bogor	1	unit	DLH
490	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak,	Jl. Purbsari I No.238, RT.05/RW.03, Gunungbatu, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16118, Kota Bogor	1	unit	DLH

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
			Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)				
491	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jl. Re. Abdullah No.2, RT.01/RW.07, Pasirmulya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16118., Kota Bogor	1	unit	DLH
492	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Gang Mesjid, Cilendek Timur, Bogor Barat, RT.01/RW.10, . Cilendek Tim., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112,, Kota Bogor	1	unit	DLH
493	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jl. Re. Abdullah No.2, RT.01/RW.07, Pasirmulya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16118., , Kota Bogor	1	unit	DLH
494	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Gang Mesjid, Cilendek Timur, Bogor Barat, RT.01/RW.10, Cilendek Tim., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112 , Kota Bogor	1	unit	DLH
495	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jl. Re. Abdullah No.2, RT.01/RW.07, Pasirmulya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16118., , Kota Bogor	1	unit	DLH
496	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jl. Taman Cibalagung No.1, RT.04/RW.04, Pasir Jaya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Kota Bogor	1	unit	DLH
497	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak,	Jl. Re. Abdullah No.2, RT.01/RW.07, Pasirmulya, Kec. Bogor Bar.,	1	Unit	DLH

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
			Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Kota Bogor, Jawa Barat 16118, Kota Bogor			
498	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Gang Mesjid, Cilendek Timur, Bogor Barat, RT.01/RW.10, Cilendek Tim., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Kota Bogor	1	Unit	DLH
499	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jl. Medika No 1 Bma Cilendek Bogor, RT.01/RW.20, Menteng, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16111, Kota Bogor	1	Unit	DLH
500	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Gang Mesjid, Cilendek Timur, Bogor Barat, RT.01/RW.10, Cilendek Tim., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112., Kota Bogor	1	Unit	DLH
501	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Gang Mesjid, Cilendek Timur, Bogor Barat, RT.01/RW.10, Cilendek Tim., Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Kota Bogor	1	unit	DLH
502	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Gang Mesjid Cilendek Timur RT.01 RW.10 Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat 16112, Kota Bogor	1	unit	DLH
503	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Gang Mesjid Cilendek Timur RT.01 RW.10 Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Jawa Barat 16112., Kota Bogor	1	unit	DLH
504	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak,	Jl. Taman Cibalagung No.1, RT.04/RW.04, Pasir Jaya Kec. Bogor Barat	1	unit	DLH

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
			Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Kota Bogor			
505	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Padat Karya	Kantor kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, Kota Bogor	100	peserta	DISNAKER
506	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	Jl. Brigdjen H. Saptadji Hadiprawira No. 70 Bogor Barat, Kota Bogor	60	peserta	DISNAKER
507	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Jl. Mekar Saluyu 1 RT 06 RW 17 Kel. Cilendek Barat, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	20	titik	DISKOMINFO
508	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Pengembangan wawasan politik (Pendidikan Politik masyarakat)	Jl. Darul Quran No.31, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Kota Bogor	300	peserta	KESBANGPOL
509	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, kruk, tongkat tuna netra, alat bantu lain.)	Jl. Manunggal II, RT 002 RW 015 No. 15 Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Kota Bogor	1	unit	DINAS SOSIAL
510	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Alat Olahraga (pengadaan peralatan tenis meja (Pengadaan bolavoli, bola basket, bola tenis meja, bola sepak bola, bola futsal, bola sepak takraw, shuttle cock, pengadaan net bulu tangkis, pengadaan raket badminton/raket tenis meja)	Cemplang baru RT 02 RW 11 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor 16112, Kota Bogor	1	Set	DISPORA
511	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Penyediaan Alat Olahraga (pengadaan peralatan tenis meja (Pengadaan bolavoli, bola basket, bola tenis meja, bola sepak bola, bola futsal, bola sepak takraw, shuttle cock, pengadaan net bulu tangkis, pengadaan raket badminton/raket tenis meja)	Jl. Brigjen. Saptadji Hadiprawira Gg. Nasedin RT 01 RW 02 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor 16112, Kota Bogor	1	Set	DISPORA
512	H. M. DODY HIKMAWAN, S.E.	PKS	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	kawasan Wisata situ Gede, Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	100	peserta	DKUKMDAGIN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
513	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Rehabilitasi dan revitalisasi APJ/PJU Eksisting (Non LED) di jalan lingkungan/gang)	Kampung Palasari Rt. 03/Rw. 05, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur , Kota Bogor	1	paket	DISHUB
514	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT RT.05 RW.08 Kel. Baranangsiang	Baranangsiang	1	paket	DISPERUMKIM
515	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RW.08 Kel. Baranangsiang	Baranangsiang	1	paket	DISPERUMKIM
516	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RW.04 Kel. Baranangsiang	Baranangsiang	1	paket	DISPERUMKIM
517	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.07 RW.04 Kel. Baranangsiang	Baranangsiang	1	paket	DISPERUMKIM
518	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.02 RW.03 Kel. Baranangsiang	Baranangsiang	1	paket	DISPERUMKIM
519	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RW.12 Kel. Baranangsiang	Baranangsiang	1	paket	DISPERUMKIM
520	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.03 RW.14 Kel. Baranangsiang	Baranangsiang	1	paket	DISPERUMKIM
521	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.01 RW.05 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM
522	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.03 RW.08 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
523	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.03 RW.09 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM
524	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 05, RW. 05 Kelurahan Baranangsiang	Jl. Manggis Rt. 05/Rw. 05, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur , Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
525	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung)	Ciburial Indah Rt. 04/Rw. 04, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur , Kota Bogor	5	Unit	DAMKAR
526	PEPEN FIRDAUS, S.Sos.	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Baranangsiang Rt. 03/Rw. 04, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur Kota bogor , Kota Bogor	1	Unit	DLH
527	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl Sawah baru Rt 01 & 02 Rw 12 kelurahan Balumbang jaya Kecamatan Bogor barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
528	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl Cilubang Rt 03 & 04 Rw 04 kelurahan balumbang jaya kecamatan bogorb barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
529	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl Cilubang Rt 03 Rw 03 kelurahan Balumbang jaya kecamatan Bogor barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
530	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.01 RW.08 Kel. Pasir Kuda	Pasir Kuda	1	paket	DISPERUMKIM
531	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.04 RW.08 Kel. Pasir Kuda	Pasir Kuda	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
532	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.02 RW.04 Kel. Menteng	Menteng	1	paket	DISPERUMKIM
533	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT RT.01 RW.14 Kel. Menteng	Menteng	1	paket	DISPERUMKIM
534	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT RT.05 RW.01 Kel. Cilendek Timur	Cilendek Timur	1	paket	DISPERUMKIM
535	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.02,03 RW.01 Kel. Cilendek Timur	Cilendek Timur	1	paket	DISPERUMKIM
536	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.01,02 RW.14 Kel. Gunung Batu	Gunung Batu	1	paket	DISPERUMKIM
537	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.02 RW.04 Kel. Gunung Batu	Gunung Batu	1	paket	DISPERUMKIM
538	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RW.11 Kel. Balumbang Jaya	Balumbang Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
539	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.04 RW.06 Kel. Balumbang Jaya	Balumbang Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
540	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.03 RW.07 Kel. Cilendek Timur	Cilendek Timur	1	paket	DISPERUMKIM
541	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RW.06 Kel. Balumbang Jaya	Balumbang Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
542	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 01 RW. 07 Cilendek Timur	Jl Kutilang 1 RT 01 RW 07 Kel Cilendek Timur Kec Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
543	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT RT.05 RW.01 Kel. Cilendek Timur	Cilendek Timur	1	paket	DISPERUMKIM
544	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (Pembangunan/pembuatan MCK umum) Kec. Bogor Barat	Dramaga Kaum, RT 02/RW 05, Kel. Margajaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	144	M2	BOGOR BARAT
545	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	Gg. Muha, RT 01 & 02/RW 14, Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	20	Orang	DISNAKER
546	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga (Pembangunan atau perbaikan sarana prasarana olah raga, seperti: lapangan bulutangkis, lapangan basket.)	Taman Cibalagung, RT 03/RW 05, Kel. Pasirjaya, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	432	M3	DISPORA
547	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Kp. Tarikolot, RT 01 & 02/RW 14, Kel. Gunung Batu, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	100	Orang	DKUKMDAGIN
548	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Jl. Cilendek Timur, RT 03 & 04/RW 01, Kel. Cilendek Timur, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	100	Orang	DKUKMDAGIN
549	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Kp Tarikolot Rt 01 Rw 05 kelurahan Gunungbatu kecamatan Bogor tengah, Kota Bogor	100	Orang	DKUKMDAGIN
550	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Kp Pabuaran Rt 01 Rw 07 kelurahan Cilendek timur kecamatan Bogor barat, Kota Bogor	100	Orang	DKUKMDAGIN
551	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Kp. Pertanian, RT 04/RW 15, Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	100	Orang	DKUKMDAGIN
552	Nasya Kharisa Lestari	Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Jl Cilubang Rt 02 Rw 04 kelurahan balumbang jaya kecamatan Bogor barat, Kota Bogor	100	Orang	DKUKMDAGIN

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
553	Mulyani, S.Hum	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Gang 25, RT 05 RW 02 Kelurahan Pasirkuda, Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
554	Mulyani, S.Hum	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Pengadaan PJU Tiang Tinggi di Villa Pasir Mas Blok E dan F RT 07 RW 02, Kel. Pasirkuda, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
555	Mulyani, S.Hum	PKS	Perbaikan Jalan RT.06 RW.03 Kel. Pasir Kuda	Pasir Kuda	1	paket	DISPERUMKIM
556	Mulyani, S.Hum	PKS	Perbaikan JPO RT.04 RW.11 Kel. Pasir Kuda	Pasir Kuda	1	paket	DISPERUMKIM
557	Mulyani, S.Hum	PKS	Perbaikan Jalan RT.02,03,04 RW.05 Kel. Pasir Kuda	Pasir Kuda	1	paket	DISPERUMKIM
558	Mulyani, S.Hum	PKS	Perbaikan Jalan RW.10 Kel. Pasir Kuda	Pasir Kuda	1	paket	DISPERUMKIM
559	Mulyani, S.Hum	PKS	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 02, RW. 02 Kelurahan Situ Gede	Cilubang Tonggoh RT 02 RW 02 Ke. Situgede, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
560	Mulyani, S.Hum	PKS	Perbaikan Jalan RT.06 RW.03 Kel. Pasir Kuda	Pasir Kuda	1	paket	DISPERUMKIM
561	Mulyani, S.Hum	PKS	Perbaikan Posyandu	RT 05 RW 11 Kelurahan Pasirkuda, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	bangunan	BOGOR BARAT
562	Mulyani, S.Hum	PKS	Pelatihan Tanggap Kebakaran (Pelatihan Pencegahan Kebakaran, Sosialisasi Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar),Pelatihan Penyelamatan (SAR))	Kelurahan Cilendek Timur, Bogor Barat, Kota Bogor	65	paket/orang	DAMKAR
563	Mulyani, S.Hum	PKS	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian)	MT Riyadhul Jannah RT 02 RW 10 Kel. Pasirkuda, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISPARBUD
564	Mulyani, S.Hum	PKS	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian)	Jl. Pendekar No 103 RT 04 RW 05 Kel. Cilendek Timur, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISPARBUD
565	Mulyani, S.Hum	PKS	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian)	Cilubang lebak RT 03 RW 01 Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISPARBUD

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
566	Mulyani, S.Hum	PKS	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian)	Cilubang tonggoh RT 03 RW 02 Kel. Situgede, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISPARBUD
567	Mulyani, S.Hum	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Cibalagung RT 06 RW 03 Kel. Pasirkuda, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	unit	DLH
568	Mulyani, S.Hum	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	RT 02 RW 10 Kel. Pasirkuda, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	unit	DLH
569	Mulyani, S.Hum	PKS	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, kruk, tongkat tuna netra, alat bantu lain.)	RT 04 RW 07 Kel. Pasir Kuda, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	5	unit	DINAS SOSIAL
570	Mulyani, S.Hum	PKS	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, kruk, tongkat tuna netra, alat bantu lain.)	Cibalagung RT 06 RW 03 Kel. Pasirkuda, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	10	unit	DINAS SOSIAL
571	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT 001 RW 002 Kp. Belentuk, Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
572	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT 002 RW 002 Kp. Belentuk, Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
573	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT 002 RW 010 Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
574	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT 004 RW 008 Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
575	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT 003 RW 001 Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DISHUB

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
576	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Perbaikan Jalan RT.03 RW.11 Kel. Ciparigi	Ciparigi	1	paket	DISPERUMKIM
577	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Perbaikan Jalan RT.08 RW.13 Kel. Ciparigi	Ciparigi	1	paket	DISPERUMKIM
578	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Perbaikan Jalan RT.01 RW.02 Kel. Cimahpar	Cimahpar	1	paket	DISPERUMKIM
579	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Perbaikan Drainase RT.02 RW.02 Kel. Cimahpar	Cimahpar	1	paket	DISPERUMKIM
580	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Perbaikan Drainase RW.09 Kel. Cimahpar	Cimahpar	1	paket	DISPERUMKIM
581	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Perbaikan Jalan RT.05 RW.11 Kel. Ciparigi	Ciparigi	1	paket	DISPERUMKIM
582	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Perbaikan Jalan RT.05 RW.10 Kel. Tanah Baru	Tanah Baru	1	paket	DISPERUMKIM
583	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Perbaikan Jalan RT.05 RW.09 Kel. Sindangrasa	Sindangrasa	1	paket	DISPERUMKIM
584	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Perbaikan Drainase RT.01 RW.10 Kel. Cimahpar	Cimahpar	1	paket	DISPERUMKIM
585	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Perbaikan Jalan RT.05 RW.11 Kel. Ciparigi	Ciparigi	1	paket	DISPERUMKIM
586	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Perbaikan Jalan RT.05 RW.10 Kel. Tanah Baru	Tanah Baru	1	paket	DISPERUMKIM
587	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Perbaikan Jalan RT.05 RW.09 Kel. Sindangrasa	Sindangrasa	1	paket	DISPERUMKIM
588	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	RT 01-10 RW 009 Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kota Bogor	20	BUAH	DLH

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
589	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	RT 01-10 RW 010 Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kota Bogor	20	BUAH	DLH
590	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Sarana Bibit Ternak (Bantuan bibit ternak)	RT 005 RW 007 Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	DKPP
591	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membuat, menjahit, las dll)	Jl. Raya Pajajaran No.225, RT.02/RW.11, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153 (Arch Hotel), Kota Bogor	20	orang	DISNAKER
592	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membuat, menjahit, las dll)	Jl. Raya Pajajaran No.225, RT.02/RW.11, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153 (Arch Hotel), Kota Bogor	20	ORANG	DISNAKER
593	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membuat, menjahit, las dll)	Jl. Raya Pajajaran No.225, RT.02/RW.11, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153 (Arch Hotel), Kota Bogor	20	orang	DISNAKER
594	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membuat, menjahit, las dll)	Jl. Raya Pajajaran No.225, RT.02/RW.11, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153, Kota Bogor	20	orang	DISNAKER
595	Mochamad Benninu Argoebie, SH	Nasdem	Pengembangan wawasan politik (Pendidikan Politik masyarakat)	Jl. Raya Pajajaran No.225, RT.02/RW.11, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153 (Arch Hotel), Kota Bogor	100	orang	KESBANGPOL
596	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	PABUARAN PASIR RT 02 RW 02 KEL MULYAHARJA KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
597	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	JL RANCAMAYA RT 1,2,3 RW 04 KEL RANCAMATA KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
598	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	JL GENTENG RT 01 RW 04 KEL GENTENG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
599	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	CIBEREUM SUNTING RT 02 RW 07 KEL MULYAHARJA KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
600	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	JL BATUTULIS RT 05 RW 06 KEL BATUTULIS KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
601	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	JL PAMOYANANSARI RT 01 RW 01 KEL RANGGAMEKAR KEC BPGPR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
602	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	JL BOJONG PASANTREN RT 03 RW 03 KEL BOJONGKERTA KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
603	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	JL PAMOYANAN SARI RT 03,04 RW 03 KEL PAMOYANAN KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
604	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	JL PAMOYANAN RT 02 RW 07 KEL PAMOYANAN KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
605	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.3 RW.8 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM
606	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.1 RW.2 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM
607	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01 RW.16 Kel. Bondongan	Bondongan	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
608	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01 RW.01 Kel. Rancamaya	Rancamaya	1	paket	DISPERUMKIM
609	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01-06 RW.15 Kel. Empang	Empang	1	paket	DISPERUMKIM
610	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.03 RW.04 Kel. Rancamaya	Rancamaya	1	paket	DISPERUMKIM
611	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RW.10 Kel. Cikaret	Cikaret	1	paket	DISPERUMKIM
612	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Drainase RT.01 RW.01 Kel. Rancamaya	Rancamaya	1	paket	DISPERUMKIM
613	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Drainase RT.06 RW.15 Kel. Empang	Empang	1	paket	DISPERUMKIM
614	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Drainase RT.01,03,04 RW.16 Kel. Bondongan	Bondongan	1	paket	DISPERUMKIM
615	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Drainase RT.03 RW.01 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	paket	DISPERUMKIM
616	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01 RW.01 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	paket	DISPERUMKIM
617	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.02 RW.04 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	paket	DISPERUMKIM
618	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Drainase RT.04 RW.06 Kel. Muarasari	Muarasari	1	paket	DISPERUMKIM
619	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 03, RW. 02 Kelurahan Situ Gede	JL SITU GEDE RT 03 RW 02 KEL SITU GEDE KEC BOGOR BARAT, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
620	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 06, RW. 14 Kelurahan Empang	JL LAYUNGSARI RT 06 RW 14 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
621	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.3 RW.8 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
622	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01 RW.16 Kel. Bondongan	Bondongan	1	paket	DISPERUMKIM
623	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.03 RW.04 Kel. Rancamaya	Rancamaya	1	paket	DISPERUMKIM
624	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RW.10 Kel. Cikaret	Cikaret	1	paket	DISPERUMKIM
625	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01 RW.01 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	paket	DISPERUMKIM
626	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Pembangunan Posyandu	JL AFALAH RT 04 RW 16 KEL BONDONGAN KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	UNIT	BOSEL
627	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Pelatihan usaha Ekonomi bagi PPKS	JL LAYUNG SARI III NO 40 RT 06 RW 14 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	150	Orang	DINAS SOSIAL
628	M. Rusli Prihatevy, SE	Golkar	Pelatihan Narahubung (Pelatihan Bahasa Isyarat)	JL LAYUNG SARI III RT 06 RW 14 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	150	Orang	DINAS SOSIAL
629	Karina Soerbakti	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT. 04 RW. 02 KEL. BABAKAN PASAR, KEC. BOGOR TENGAH, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
630	Karina Soerbakti	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT.02 RW. 02, KEL. BABAKAN PASAR, KEC. BOGOR TENGAH, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
631	Karina Soerbakti	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	KP. MUARA RT. 03 RW. 04, KEL. SINDANG RASA, KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
632	Karina Soerbakti	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RW. 04, KEL. CIBOGOR. KEC. BOGOR TENGAH, Kota Bogor	1	paket	DISHUB

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
633	Karina Soerbakti	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RW. 11, KEL. CIWARINGIN. KEC. BOGOR TENGAH, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
634	Karina Soerbakti	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	RT.01 RW. 01, KEL. CIBOGOR. KEC. BOGOR TENGAH, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
635	Karina Soerbakti	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	KP. PALASARI RT.03 RW. 05, KEL. SINDANGSARI. KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
636	Karina Soerbakti	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	PAJAJARAN INDAH RT. 04. RW. 13, KEL. BARANANGSIANG, KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
637	Karina Soerbakti	PAN	Pembangunan TPT RT.01 RW.01 Kel. Panaragan	Panaragan	1	paket	DISPERUMKIM
638	Karina Soerbakti	PAN	Pembangunan TPT RT.03 RW.04 Kel. Paledang	Paledang	1	paket	DISPERUMKIM
639	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Jalan RW.04 Kel. Sindangrasa	Sindangrasa	1	paket	DISPERUMKIM
640	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Jalan RT.01 RW.03 Kel. Babakan Pasar	Babakan Pasar	1	paket	DISPERUMKIM
641	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Drainase RT.03 RW.08 Kel. Babakan Pasar	Babakan Pasar	1	paket	DISPERUMKIM
642	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Drainase RT.04 RW.02 Kel. Babakan Pasar	Babakan Pasar	1	paket	DISPERUMKIM
643	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Jalan RT.03 RW.05 Kel. Sukasari	Sukasari	1	paket	DISPERUMKIM
644	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Drainase RT.03 RW.03 Kel. Babakan Pasar	Babakan Pasar	1	paket	DISPERUMKIM
645	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Jalan RT.04 RW.04 Kel. Paledang	Paledang	1	paket	DISPERUMKIM
646	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Drainase RT.01 RW.05 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM
647	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Drainase RT.04 RW.11 Kel. Ciwaringin	Ciwaringin	1	paket	DISPERUMKIM
648	Karina Soerbakti	PAN	Pembangunan TPT RT.04 RW.11 Kel. Ciwaringin	Ciwaringin	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
649	Karina Soerbakti	PAN	Pembangunan TPT RT.03 RW.05 Kel. Sindangsari	Sindangsari	1	paket	DISPERUMKIM
650	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Drainase RT.04 RW.02 Kel. Tajur	Tajur	1	paket	DISPERUMKIM
651	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Jalan RT.02 RW.02 Kel. Tajur	Tajur	1	paket	DISPERUMKIM
652	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Jalan RT.04 RW.13 Kel. Baranangsiang	Baranangsiang	1	paket	DISPERUMKIM
653	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Jalan RT.03 RW.03 Kel. Kebon Pedes	Kebon Pedes	1	paket	DISPERUMKIM
654	Karina Soerbakti	PAN	Pembangunan TPT RT.01 RW.01 Kel. Panaragan	Panaragan	1	paket	DISPERUMKIM
655	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Jalan RT.01 RW.03 Kel. Babakan Pasar	Babakan Pasar	1	paket	DISPERUMKIM
656	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Drainase RT.03 RW.03 Kel. Babakan Pasar	Babakan Pasar	1	paket	DISPERUMKIM
657	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Jalan RT.04 RW.04 Kel. Paledang	Paledang	1	paket	DISPERUMKIM
658	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Drainase RT.04 RW.02 Kel. Tajur	Tajur	1	paket	DISPERUMKIM
659	Karina Soerbakti	PAN	Perbaikan Jalan RT.02 RW.02 Kel. Tajur	Tajur	1	paket	DISPERUMKIM
660	Karina Soerbakti	PAN	Pembangunan Posyandu	KP. TANGKIL RT. 01 RW. 05, KEL. KATULAMPA, KEC. BOGOR TIMUR, Kota Bogor	30	M	BOGOR TIMUR
661	Juhana, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RW.03 Kel. Bantarjati	Bantarjati	1	paket	DISPERUMKIM
662	Juhana, SE	Golkar	Perbaikan Drainase RW.11 Kel. Bantarjati	Bantarjati	1	paket	DISPERUMKIM
663	Juhana, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01,03 RW.01 Kel. Tanah Baru	Tanah Baru	1	paket	DISPERUMKIM
664	Juhana, SE	Golkar	Perbaikan Drainase RT.03 RW.03 Kel. Bantarjati	Bantarjati	1	paket	DISPERUMKIM
665	Juhana, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.02 RW.04 Kel. Bantarjati	Bantarjati	1	paket	DISPERUMKIM
666	Juhana, SE	Golkar	Perbaikan Drainase RT.04 RW.03 Kel. Bantarjati	Bantarjati	1	paket	DISPERUMKIM
667	Juhana, SE	Golkar	Perbaikan Jalan RT.02 RW.04 Kel. Bantarjati	Bantarjati	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
668	Juhana, SE	Golkar	Pelatihan Tanggap Kebakaran (Pelatihan Pencegahan Kebakaran, Sosialisasi Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), Pelatihan Penyelamatan (SAR))	Jl. Gagalur I No. 2 RT 003 RW 002, Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kota Bogor	65	Orang	DAMKAR
669	Juhana, SE	Golkar	Pembangunan TPT Sungai	Kp. Neglasari RT 004 RW 001, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kota Bogor	1	paket	PUPR
670	Juhana, SE	Golkar	Pelatihan usaha Ekonomi bagi PPKS	Jl. Gagalur I No. 2 RT 003 RW 002, Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Kota Bogor	150	Orang	DINAS SOSIAL
671	Jatirin	Aswaja	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	KAMPUNG CEGER RT 003 RW 005 KEL. TEGAL GUNDIL, KEC. BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
672	Jatirin	Aswaja	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	KAMPUNG KEBON AWI RT 03 RW 06 KEL. TEGAL GUNDIL, KEC. BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
673	Jatirin	Aswaja	Perbaikan Drainase RW.02 Kel. Tegalgundil	Tegalgundil	1	paket	DISPERUMKIM
674	Jatirin	Aswaja	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung)	WARUNG JAMBU ATAS Gg. JONGJONG RT03 RW 06 KEL. BANTARJATI, KEC. BOGOR UTARA, Kota Bogor	2	unit	DAMKAR
675	Jatirin	Aswaja	Pembangunan TPT Sungai	JL. BATARA KAMPUNG BUBULAK RT 03 RW 03 KEL. CILUAR, KE .BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	paket	PUPR
676	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Gg. Musholla & Gg. Anggrek RT 04 RW 04 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
677	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl. Lonceng Indah RT 01 RW 04 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat , Kota Bogor	1	paket	DISHUB

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
678	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Gg. Pala II RT 01 s/d RT 03 RW 01 Kel. Loji Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
679	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Gg. Mesjid & Gg. Kosasih RT 01 s/d 06 RW 01 Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
680	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl. Rimba Bojong Menteng GG. Boment 4 RT 05 RW 06 Kel. Pasir Kuda Kec. Bogot Barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
681	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl. Sindangbarang Loji RT 03 RW 05 Kel. Loji Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
682	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.04 RW.04 Kel. Margajaya	Margajaya	1	paket	DISPERUMKIM
683	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RW.01 Kel. Loji	Loji	1	paket	DISPERUMKIM
684	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Perbaikan Drainase RT.01 RW.01 Kel. Gunung Batu	Gunung Batu	1	paket	DISPERUMKIM
685	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.01,02 RW.02 Kel. Gunung Batu	Gunung Batu	1	paket	DISPERUMKIM
686	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.05 RW.02 Kel. Cilendek Timur	Cilendek Timur	1	paket	DISPERUMKIM
687	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Perbaikan Drainase RT.05 RW.02 Kel. Gunung Batu	Gunung Batu	1	paket	DISPERUMKIM
688	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT RT.04 RW.01 Kel. Gunung Batu	Gunung Batu	1	paket	DISPERUMKIM
689	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT RT.05 RW.10 Kel. Gunung Batu	Gunung Batu	1	paket	DISPERUMKIM
690	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Perbaikan Drainase RT.05 RW.17 Kel. Cilendek Barat	Cilendek Barat	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
691	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.01,02 RW.05 Kel. Balumbang Jaya	Balumbang Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
692	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Perbaikan Drainase RT.01 RW.14 Kel. Pasir Jaya	Pasir Jaya	1	paket	DISPERUMKIM
693	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.03 RW.02 Kel. Pasir Mulya	Pasir Mulya	1	paket	DISPERUMKIM
694	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.03 RW.07 Kel. Sindangbarang	Sindangbarang	1	paket	DISPERUMKIM
695	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RW.01 Kel. Loji	Loji	1	paket	DISPERUMKIM
696	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Perbaikan Jalan RT.03 RW.07 Kel. Sindangbarang	Sindangbarang	1	paket	DISPERUMKIM
697	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Pembangunan Posyandu	Jl. Sindangbarang Pengkolan RT 03 RW 04 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	30	M2	BOGOR BARAT
698	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai	Jl. Rimba Bojong Menteng GG. Boment 4 RT 05 RW 06 Kel. Pasir Kuda Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	PUPR
699	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai	Jl. Raya Dramaga Gg. H. Burhan RT 01 RW 03 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	PUPR
700	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai	Kampung Pertanian RT 04 RW 15 Kel. Menteng Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	PUPR
701	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT Sungai	Jl. Raya Ciherang RT 01 RW 04 Kel. Margajaya Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	PUPR
702	Iwan Iswanto, ST	PDI Perjuangan	Pembangunan TPT, Drainase dan prasarana penunjang TPU	TPU Sindang Barang Bendungan RT 04 RW 02 Kel. Sindangbarang Kec. Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	PUPR

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
703	Ir. H. MUAZ HD. M.M	PKS	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Rehabilitasi dan revitalisasi APJ/PJU Eksisting (Non LED) di jalan lingkungan/gang)	RT 1-5 RW 13 KELURAHAN KEDUNG WARINGIN KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
704	Ir. H. MUAZ HD. M.M	PKS	Perbaikan Jalan RW.06 Kel. Kedung Waringin	Kedung Waringin	1	paket	DISPERUMKIM
705	Ir. H. MUAZ HD. M.M	PKS	Perbaikan Jalan RT.01,02 RW.13 Kel. Kedung Waringin	Kedung Waringin	1	paket	DISPERUMKIM
706	Ir. H. MUAZ HD. M.M	PKS	Perbaikan Drainase RT.01 RW.01 Kel. Kedung Badak	Kedung Badak	1	paket	DISPERUMKIM
707	Ir. H. MUAZ HD. M.M	PKS	Perbaikan Jalan RT.03 RW.10 Kel. Kedung Badak	Kedung Badak	1	paket	DISPERUMKIM
708	Ir. H. MUAZ HD. M.M	PKS	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 02, RW. 09 Kelurahan Kedung Badak	RT 2 RW 9 KELURAHAN KEDUNG BADAQ, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
709	Ir. H. MUAZ HD. M.M	PKS	Karpet dan Sound system sudah tidak layak	Kampung Bulakamah RT 03 RW 06	1	paket	BAG. KESRA
710	Ir. H. MUAZ HD. M.M	PKS	Pelatihan Perkoperasian	JL KESEHATAN NO 6 PABOTAN TANAH SAREAL RT 4 RW 1 KEL TANAH SAREAL KEC TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	PAKET	DKUKMDAGIN
711	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	KP.SITUPETE RT 003 RW 001 KELURAHAN SUKADAMAI KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
712	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.01 RW.03 Kel. Mekarwangi	Mekarwangi	1	paket	DISPERUMKIM
713	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.01 RW.08 Kel. Mekarwangi	Mekarwangi	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
714	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.03 RW.06 Kel. Mekarwangi	Mekarwangi	1	paket	DISPERUMKIM
715	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.03 RW.08 Kel. Sukadamai	Sukadamai	1	paket	DISPERUMKIM
716	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.01 RW.10 Kel. Sukadamai	Sukadamai	1	paket	DISPERUMKIM
717	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.06 RW.04 Kel. Kencana	Kencana	1	paket	DISPERUMKIM
718	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.07 RW.06 Kel. Sukaresmi	Sukaresmi	1	paket	DISPERUMKIM
719	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.04 RW.07 Kel. Sukaresmi	Sukaresmi	1	paket	DISPERUMKIM
720	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.04 RW.07 Kel. Kayumanis	Kayumanis	1	paket	DISPERUMKIM
721	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.03 RW.02 Kel. Sukadamai	Sukadamai	1	paket	DISPERUMKIM
722	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.03 RW.06 Kel. Kedung Badak	Kedung Badak	1	paket	DISPERUMKIM
723	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.01 RW.13 Kel. Cibadak	Cibadak	1	paket	DISPERUMKIM
724	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.04 RW.10 Kel. Cibadak	Cibadak	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
725	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.03 RW.11 Kel. Cibadak	Cibadak	1	paket	DISPERUMKIM
726	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan Lingkungan pada Lokasi Kumuh RT.03, RW.09 Kelurahan Sukadamai		1	paket	DISPERUMKIM
727	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Saluran Lingkungan pada Lokasi Kumuh RT.01, RW.03 Kelurahan Sukaresmi		1	paket	DISPERUMKIM
728	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.06 RW.04 Kel. Kencana	Kencana	1	paket	DISPERUMKIM
729	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.07 RW.06 Kel. Sukaresmi	Sukaresmi	1	paket	DISPERUMKIM
730	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.04 RW.07 Kel. Kayumanis	Kayumanis	1	paket	DISPERUMKIM
731	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Pembangunan TPT Sungai	KP.KUKUPU RT 002 RW 007 KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	paket	PUPR
732	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Pembangunan TPT Sungai	KP.KUKUPU RT 001 RW 006 KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	paket	PUPR
733	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Pembangunan TPT Sungai	KP.KAYUMANIS RT 001 RW 001 KELURAHAN CIBADAK KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	1	paket	PUPR
734	Hj. Lusiana Nurissiyadah, SE, MM	Aswaja	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, kruk, tongkat tuna netra, alat bantu lain.)	KP.CIMANGGIS RT 003 RW 001 KELURAHAN MEKARWANGI KECAMATAN TANAH SAREAL, Kota Bogor	2	UNIT	DINAS SOSIAL

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
735	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Kp. Cikaret Kebon Kalapa RT. 004 RW. 010 Kelurahan Cikaret Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
736	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Kp. Batakal RT. 001 dan 002 RW. 010 Kelurahan Batutulis Kecamatan Bogor Selatan , Kota Bogor	1	paket	DISHUB
737	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl. Siliwangi RT. 002 RW. 001 Kelurahan Batutulis Kecamatan Bogor Selatan , Kota Bogor	1	paket	DISHUB
738	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Kp. Pabuaran RT. 010 RW. 005 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
739	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Perbaikan Jalan RT.01,02 RW.05 Kel. Bojongkerta	Bojongkerta	1	paket	DISPERUMKIM
740	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Perbaikan Jalan RT.01-04 RW.04 Kel. Empang	Empang	1	paket	DISPERUMKIM
741	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Perbaikan Drainase RT.04 RW.05 Kel. Mulyaharja	Mulyaharja	1	paket	DISPERUMKIM
742	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Perbaikan Jalan RT.04 RW.10 Kel. Cikaret	Cikaret	1	paket	DISPERUMKIM
743	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Perbaikan Jalan RT.02-04 RW.02 Kel. Muarasari	Muarasari	1	paket	DISPERUMKIM
744	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Perbaikan Jalan RT.02 RW.05 Kel. Batutulis	Batutulis	1	paket	DISPERUMKIM
745	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Perbaikan Jalan RT.03 RW.04 Kel. Lawanggintung	Lawanggintung	1	paket	DISPERUMKIM
746	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Perbaikan Drainase RT.03 RW.04 Kel. Lawanggintung	Lawanggintung	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
747	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Perbaikan Jalan RT.05 RW.05 Kel. Bondongan	Bondongan	1	paket	DISPERUMKIM
748	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Perbaikan Drainase RT.03 RW.11 Kel. Harjasari	Harjasari	1	paket	DISPERUMKIM
749	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Perbaikan Jalan RT.01-05 RW.07 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	paket	DISPERUMKIM
750	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Perbaikan Saluran Lingkungan Pada Lokasi Kumuh RT. 02, RT. 03 RW. 06 Kelurahan LawangGintung	Jln. Sekip RT. 002 dan 003 RW. 006 Kelurahan Lawanggintung Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	paket	DISPERUMKIM
751	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Pembangunan Drainase Kota (Saluran drainase baru)	Jalan Raya Cibeureum RT 006 RW. 005 Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor	1	paket	PUPR
752	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	Jl.Layungsari III No. 41. Bogor, Jawa Barat , Kota Bogor	20	Orang	DISNAKER
753	Hj. Hakanna, S.I.Kom, M.A.P	PAN	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	Jl.Layungsari III No. 41. Bogor, Jawa Barat , Kota Bogor	20	orang	DISNAKER
754	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl. Manunggal II RT 02 RW 15, Menteng, Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
755	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Jl. Sindang Barang Pilar 1, Jl. H. Naman, RT 01 RW 07 Sindang Barang, Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
756	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01 RW.08 Kel. Pasir Mulya	Pasir Mulya	1	paket	DISPERUMKIM
757	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Perbaikan Drainase RW.15 Kel. Menteng	Menteng	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
758	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Perbaikan Jalan RT.05 RW.15 Kel. Menteng	Menteng	1	paket	DISPERUMKIM
759	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Perbaikan Jalan RT.02 RW.07 Kel. Sindangbarang	Sindangbarang	1	paket	DISPERUMKIM
760	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Perbaikan JPO RT.01 RW.13 Kel. Loji	Loji	1	paket	DISPERUMKIM
761	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Perbaikan Jalan Lingkungan pada Lokasi Kumuh RT.01, RW.06 Kelurahan Gunung Batu		1	paket	DISPERUMKIM
762	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Perbaikan Jalan RT.01 RW.08 Kel. Pasir Mulya	Pasir Mulya	1	paket	DISPERUMKIM
763	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Perbaikan Jalan RT.02 RW.07 Kel. Sindangbarang	Sindangbarang	1	paket	DISPERUMKIM
764	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (Pembangunan/pembuatan MCK umum)	Jl. Raya Semplak, Gg. Neglasari RT 03 RW 08, Semplak, Bogor Barat, Kota Bogor	8	m2	BOGOR BARAT
765	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Pembangunan TPT Sungai	Jl. Raya Dramaga RT 01 RW 06 Margajaya, Bogor Barat, Kota Bogor	1	paket	PUPR
766	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Gg. Masjid RT 04 RW 04 Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	5	titik	DLH
767	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Pelatihan Pengolahan Produk Hasil Perikanan (Bimbingan teknis/pelatihan pengolahan produk hasil perikanan)	jalan Pemuda RT 01 RW 06, Margajaya, BOgor Barat, Kota Bogor	100	orang	DKPP
768	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Hibah CCTV (Berupa hibah barang yg di serahkan ke amsyarakat dengan syarat memiliki jaringan interbet sendiri)	Jl. Sirnasari RT 02 RW 09, Sindangbarang, Bogor Barat, Kota Bogor	10	unit	DISKOMINFO
769	Heri Cahyono, S.Hut, MM	Golkar	Pengembangan wawasan politik (Penyelenggaraan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan)	Jl. Sirnasari III RT 02 RW 09 Sindang barang, Bogor Barat, Kota Bogor	400	orang	KESBANGPOL

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
770	Hj. ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	jl. Cilibende RT 5 RW 6, Kelurahan Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
771	Hj. ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	jl. Panaragan Aspol RT 4 RW 4, Kelurahan Panaragan, Bogor Tengah, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
772	Hj. ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	jl. Muara Babakan RT 4 RW 10, Kelurahan Sindangrasa, Bogor Timur, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
773	Hj. ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan RT.02-03 RW.02 Kel. Babakan	Babakan	1	paket	DISPERUMKIM
774	Hj. ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan RT.01-09 RW.04 Kel. Katulampa	Katulampa	1	paket	DISPERUMKIM
775	Hj. ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Drainase RT.04 RW.04 Kel. Panaragan	Panaragan	1	paket	DISPERUMKIM
776	Hj. ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si	PKS	Pembangunan TPT RT.04 RW.10 Kel. Sindangrasa	Sindangrasa	1	paket	DISPERUMKIM
777	Hj. ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan Lingkungan pada Lokasi Kumuh RT.03, RW.07 Kelurahan Katulampa		1	paket	DISPERUMKIM
778	Hj. ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Jalan RT.02-03 RW.02 Kel. Babakan	Babakan	1	paket	DISPERUMKIM
779	Hj. ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si	PKS	Perbaikan Posyandu	Perumahan Griya Katulampa RT 3 RW 10, Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor	1	Bangunan	BOGOR TIMUR
780	Hj. ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si	PKS	Pelatihan Tanggap Kebakaran (Pelatihan Pencegahan Kebakaran, Sosialisasi Pembinaan	Jalan Pajajaran No.16, RT 003 RW 004, Baranangsiang, Bogor Timur , Kota Bogor	65	Peserta	DAMKAR

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
			dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar),Pelatihan Penyelamatan (SAR))				
781	Hj. ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jalan Pajajaran No.16, RT 003 RW 004, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor	2	Unit	DLH
782	Hj. ANNA MARIAM FADHILAH, S.Si., M.Si	PKS	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Jalan Pajajaran No.16, RT 003 RW 004, Baranangsiang, Bogor Timur, Kota Bogor	200	Peserta	DKUKMDAGIN
783	Rezky Kartika	Demokrat Solidaritas Indonesia	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	JALAN BOJONGKALER RT 03 RW 04 KELURAHAN BOJONGKERTA KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1	paket	DISHUB
784	Rezky Kartika	Demokrat Solidaritas Indonesia	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	PEMAKAMAN KAMPUNG MARGASARI RW 06 KELURAHAN KERTAMAYA KECAMATAN BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1	paket	DISHUB
785	Rezky Kartika	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan JPO RT.03 RW.05 Kel. Bondongan	Bondongan	1	paket	DISPERUMKIM
786	Rezky Kartika	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Drainase RT.02 RW.04 Kel. Genteng	Genteng	1	paket	DISPERUMKIM
787	Rezky Kartika	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Jalan RT.04 RW.03 Kel. Harjasari	Harjasari	1	paket	DISPERUMKIM
788	Rezky Kartika	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Jalan RT.04 RW.03 Kel. Harjasari	Harjasari	1	paket	DISPERUMKIM
789	Rezky Kartika	Demokrat Solidaritas Indonesia	Mandi, cuci. Kakus untuk umum/komunal (Pembangunan/pembuatan MCK umum)	KAMPUNG NANGGERANG RT 03 RW 06 KELURAHAN RANGGAMEKAR KECAMATAN BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	UNIT	BOSEL

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
790	Rezky Kartika	Demokrat Solidaritas Indonesia	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, kruk, tongkat tuna netra, alat bantu lain.)	JALAN MERDEKA NO 142 RT 03 RW 05 KELURAHAN CIWARINGIN KECAMATAN BOGOR TENGAH (KANTOR DINAS SOSIAL) , Kota Bogor	112	UNIT	DINAS SOSIAL
791	Rozi Putra, S.Si, M.Si	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Gang Haji Chiong Rt 03 Rw 10 Kedung Badak Tanah Sereal, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
792	Rozi Putra, S.Si, M.Si	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Kedung Halang Poncol Rt 03 Rw 06 Sukaresmi Tanah Sereal, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
793	Rozi Putra, S.Si, M.Si	PKS	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Gang Sahabat Kp Kukupu Rt 03 Rw 05 Cibadak Tanah Sereal, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
794	Rozi Putra, S.Si, M.Si	PKS	Perbaikan Jalan Lingkungan pada Lokasi Kumuh RT.04, RW.02 Kelurahan Sukaresmi		1	paket	DISPERUMKIM
795	Rozi Putra, S.Si, M.Si	PKS	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jl H Entong Usan Gang Family Rt 04 Rw 01 Cibadak Tanah Sereal, Kota Bogor	1	unit	DLH
796	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	KP. HEGARSARI RT 03 RW 01 KEL. MUARASARI, BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
797	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	WARUNG LIMUS RT 04 RW 09 KEL. MULYAHARJA, BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
798	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Rehabilitasi dan revitalisasi APJ/PJU Eksisting (Non LED) di jalan lingkungan/gang)	JL PAHLAWAN RT 03 RW 11 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISHUB
799	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.01,04 RW.05 Kel. Muarasari	Muarasari	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
800	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.01 RW.03 Kel. Cipaku	Cipaku	1	paket	DISPERUMKIM
801	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.05 RW.01 Kel. Mulyaharja	Mulyaharja	1	paket	DISPERUMKIM
802	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.02-05 RW.08 Kel. Empang	Empang	1	paket	DISPERUMKIM
803	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.04,05 RW.08 Kel. Cimahpar	Cimahpar	1	paket	DISPERUMKIM
804	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.01,02 RW.11 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	paket	DISPERUMKIM
805	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan JPO RT.02 RW.06 Kel. Cikaret	Cikaret	1	paket	DISPERUMKIM
806	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RT.01 RW.20 Kel. Bondongan	Bondongan	1	paket	DISPERUMKIM
807	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.01,02,04 RW.06 Kel. Cikaret	Cikaret	1	paket	DISPERUMKIM
808	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RW.09 Kel. Mulyaharja	Mulyaharja	1	paket	DISPERUMKIM
809	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Drainase RW.09 Kel. Mulyaharja	Mulyaharja	1	paket	DISPERUMKIM
810	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.03 RW.05 Kel. Kedung Halang	Kedung Halang	1	paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
811	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan Lingkungan pada Lokasi Kumuh RT.02,03, RW.04 Kelurahan Muarasari	Muarasari	1	paket	DISPERUMKIM
812	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Perbaikan Jalan RT.04,05 RW.08 Kel. Cimahpar	Cimahpar	1	paket	DISPERUMKIM
813	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan Posyandu	JL PAHLAWAN RW 11 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	Unit Bangunan	BOSEL
814	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan Tanggap Kebakaran (Pelatihan Pencegahan Kebakaran, Sosialisasi Pembinaan dan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar),Pelatihan Penyelamatan (SAR))	SIRNASARI RT 01 RW 4 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	500	ORANG	DAMKAR
815	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Pemadam Kebakaran (penyediaan APAR, pompa kebakaran portable, pompa apung)	JL PAHLAWAN RW 11 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	5	Unit	DAMKAR
816	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Pembangunan TPT Sungai	BAKOM SARI RT 01 RW 09 KEL. HARJASARI, BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	Paket	PUPR
817	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Kesenian (Bantuan Alat Kesenian)	Jl. SIRNASARI RW 04 KEL. EMPANG, BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	Paket	DISPARBUD
818	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	JL PAHLAWAN RT 01 RW 11 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	2	Unit	DLH
819	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan seperti : Gerobak, Drop Box, Tempat Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Tong Sampah, dan lain-lain)	Jl. PAHLAWAN II RT 01 RW 08 KEL. EMPANG, BOGOR SELATAN, Kota Bogor	3	Unit	DLH

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
820	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan Budidaya Ternak (Bimbingan teknis/pelatihan budidaya ternak)	JI SIRNASARI RT 01 RW 04 KEL. EMPANG, BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	Paket	DKPP
821	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Penyelenggaraan Ketrampilan Kerja berbasis kompetensi (Pelatihan tata boga, kecantikan, make up artist, fashion, desain grafis, barista, perhotelan)	JL PAHLAWAN RW 11 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	20	orang	DISNAKER
822	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membuat, menjahit, las dll)	SIRNASARI RW 4 EMPANG BOGOR SELATAN, Kota Bogor	20	orang	DISNAKER
823	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membuat, menjahit, las dll)	JL PAHLAWAN RW 11 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	60	orang	DISNAKER
824	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Sarana Pendidikan SD Negeri (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	JI. PABUARAN TENGAH NO.2 RT 01 RW 10 KEL. MULYAHARJA, BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISDIK
825	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Pelunasan Ijasah SD, SMP, MTs swasta bagi masyarakat miskin	WARUNG BANDREK RT 03 RW 13 BONDONGAN, Kota Bogor	1	ORANG	DISDIK
826	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Sarana Pendidikan SD Negeri (Utilitas Sarana SD (Mebel, Komputer, dan alat pembelajaran lainnya))	JI. LAWANG GINTUNG NO. 28 RT 04 RW 03 KEL. LAWANGGINTUNG, BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	paket	DISDIK
827	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Pelunasan Ijasah SD, SMP, MTs swasta bagi masyarakat miskin	KP. PATAS RT 02 RW 08 KEL. RANGGAMEKAR, BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1	Peserta Didik	DISDIK
828	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Beasiswa Miskin SD, SMP, MTs swasta	JI. WARUNG BANDREK RT 03 RW 13 KEL. BONDONGAN, BOGOR , Kota Bogor	1	Peserta Didik	DISDIK
829	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Beasiswa Miskin SD, SMP, MTs swasta	KP.WARUNG LIMUS RT 03 RW 09 KEL. MULYAHARJA, BOGOR SELATAN , Kota Bogor	1	Peserta Didik	DISDIK

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
830	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Pelunasan Ijasah SD, SMP, MTs swasta bagi masyarakat miskin	KP.WARUNG LIMUS RT 03 RW 09 KEL. MULYAHARJA, BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	Peserta Didik	DISDIK
831	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Bantuan Beasiswa Miskin SD, SMP, MTs swasta	WR.LIMUS RT 04 RW 09 KEL. MULYAHARJA, BOGOR SELATAN, Kota Bogor	1	Peserta Didik	DISDIK
832	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Prasarana Penanggulangan Bencana dan fasilitas penunjang (chainsaw)	JI. SIRNASARI RW 04 KEL. EMPANG, BOGOR SELATAN, Kota Bogor	16	Unit	BPBD
833	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, kruk, tongkat tuna netra, alat bantu lain.)	JL PAHLAWAN RW 11 KEL. EMPANG, BOGOR SELATAN, Kota Bogor	50	Unit	DINAS SOSIAL
834	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Bantu Disabilitas (Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, kruk, tongkat tuna netra, alat bantu lain.)	JI SIRNASARI RW 04 KEL. EMPANG, BOGOR SELATAN, Kota Bogor	50	Unit	DINAS SOSIAL
835	Said Muhamad Mohan	Gerakan Indonesia Raya	Penyediaan Alat Olahraga (pengadaan peralatan tenis meja (Pengadaan bolavoli, bola basket, bola tenis meja, bola sepak bola, bola futsal, bola sepak takraw, shuttle cock, pengadaan net bulu tangkis, pengadaan raket badminton/raket tenis meja)	JL PAHLAWAN RT 01 RW 11 KEL EMPANG KEC BOGOR SELATAN, Kota Bogor	20	Set	DISPORA
836	Sugeng Teguh Santosa, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Jalan RT.01-05 RW.09 Kel. Paledang	Paledang	1	Paket	DISPERUMKIM
837	Sugeng Teguh Santosa, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Perbaikan Jalan Lingkungan pada Lokasi Kumuh RT.05, RW.04 Kelurahan Paledang	Paledang	1	Paket	DISPERUMKIM
838	Sugeng Teguh Santosa, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membuat, menjahit, las dll)	KAMPUNG TANGKIL RT 01 RW 05 KELURAHAN KATULAMPA KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	20	PESERTA	DISNAKER
839	Sugeng Teguh Santosa, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up	JALAN DUMELING VILLA DUTA RT 03 RW 14 KELURAHAN	20	PESERTA	DISNAKER

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
			artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	BARANANGSIANG KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor			
840	Sugeng Teguh Santosa, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	JALAN KEBON MANGGIS PASIR JAYA RT 05 RW 04 KELURAHAN PALEDANG KECAMATAN BOGOR TENGAH , Kota Bogor	20	PESERTA	DISNAKER
841	Sugeng Teguh Santosa, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	JALAN LEBAK SARI RT 01.02.03.04.05 RW 09 KELURAHAN PALEDANG KECAMATAN BOGOR TENGAH , Kota Bogor	20	PESERTA	DISNAKER
842	Sugeng Teguh Santosa, SH, MH	Demokrat Solidaritas Indonesia	Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) bagi Peserta KB (Pelatihan keterampilan usaha, menjahit, kuliner, handycraft, dll)	KAMPUNG CIKONDANG RT 03 RW 14 KELURAHAN BARANANGSIANG KECAMATAN BOGOR TIMUR , Kota Bogor	72	PESERTA	DALDUK KB
843	Tri Riyanto Andhika Putra	Nasdem	Perbaikan Jalan RT.02 RW.06 Kel. Ciwaringin	Ciwaringin	1	Paket	DISPERUMKIM
844	Tri Riyanto Andhika Putra	Nasdem	Pembangunan TPT RT.03 RW.07 Kel. Ciwaringin	Ciwaringin	1	Paket	DISPERUMKIM
845	Tri Riyanto Andhika Putra	Nasdem	Pembangunan TPT RT.03 RW.07 Kel. Ciwaringin	Ciwaringin	1	Paket	DISPERUMKIM
846	Tri Riyanto Andhika Putra	Nasdem	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	Jl. Raya R3 Parung Banteng RT.03/RW.01, Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat 16144, Kota Bogor	20	Orang	DISNAKER
847	Tri Riyanto Andhika Putra	Nasdem	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	Gg. Balai Desa, RT.01/RW.05, Kel. Tajur, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat 16141, Kota Bogor	20	Orang	DISNAKER
848	Tri Riyanto Andhika Putra	Nasdem	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	Gg. Mesjid I No.9, RT.04/RW.02, Kel. Sukasari, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat 16142, Kota Bogor	20	Orang	DISNAKER

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
849	Tri Riyanto Andhika Putra	Nasdem	Penyelenggaraan Ketrampilan Kerja berbasis kompetensi (Pelatihan tata boga, kecantikan, make up artist, fashion, desain grafis, barista, perhotelan)	Jl. DR. Sumeru No.33, RT.01/RW.02, Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16125, Kota Bogor	20	Orang	DISNAKER
850	Tri Riyanto Andhika Putra	Nasdem	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	Jalan dr Sumeru No.33 RT 01/02 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor	20	Orang	DISNAKER
851	Tri Riyanto Andhika Putra	Nasdem	Pelatihan Keterampilan berbasis masyarakat (Pelatihan tata boga, kecantikan kulit, make up artist, desain grafis, barista, hidroponik, membatik, menjahit, las dll)	Jalan dr Sumera No.33, RT01/02 Kelurahan Mentang, Kec Bogor Barat, Kota Bogor	16	Orang	DISNAKER
852	Tri Riyanto Andhika Putra	Nasdem	Pelatihan UMKM (Kreativitas pembuatan kerajinan produk unggulan Kota Bogor)	Jl Dadali II No.2, RT 03 / RW 06, Tanah Sereal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161, Kota Bogor	200	Orang	DKUKMDAGIN
853	Wishnu Ardiansyah, S.Hut	Aswaja	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	Bojongkerta Rt03/Rw02 kelurahan bojongkerta, kecamatan bogor selatan, Kota Bogor	1	Paket	DISHUB
854	Wishnu Ardiansyah, S.Hut	Aswaja	Pembangunan TPT RT.01 RW.08 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	Paket	DISPERUMKIM
855	Wishnu Ardiansyah, S.Hut	Aswaja	Perbaikan Jalan RW.07 Kel. Ranggamekar	Ranggamekar	1	Paket	DISPERUMKIM
856	Wishnu Ardiansyah, S.Hut	Aswaja	Perbaikan Jalan RW.10 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	Paket	DISPERUMKIM
857	Wishnu Ardiansyah, S.Hut	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.01 RW.11 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	Paket	DISPERUMKIM
858	Wishnu Ardiansyah, S.Hut	Aswaja	Perbaikan Drainase RT.04 RW.07 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	Paket	DISPERUMKIM
859	Wishnu Ardiansyah, S.Hut	Aswaja	Perbaikan JPO RT.03 RW.09 Kel. Pamoyanan	Pamoyanan	1	Paket	DISPERUMKIM
860	Wishnu Ardiansyah, S.Hut	Aswaja	Perbaikan Jalan RT.03 RW.03 Kel. Harjasari	Harjasari	1	Paket	DISPERUMKIM

NO	PENGUSUL	FRAKSI	USULAN	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
861	Zakiyatul Fikriyah Al Aslamiyah, S.PD, M.Si	PAN	Penyediaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU)	JALAN KEDUNG HALANG RT 05 RW 08, Kota Bogor	1	Paket	DISHUB
862	Zakiyatul Fikriyah Al Aslamiyah, S.PD, M.Si	PAN	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan (PJU) (Rehabilitasi dan revitalisasi APJ/PJU Eksisting (Non LED) di jalan lingkungan/gang)	JALAN KEDUNG HALANG RT 01 SAMPAI 06 RW 08 BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	Paket	DISHUB
863	Zakiyatul Fikriyah Al Aslamiyah, S.PD, M.Si	PAN	Perbaikan Jalan RT.01,02 RW.08 Kel. Kedung Halang	Kedung Halang	1	Paket	DISPERUMKIM
864	Zakiyatul Fikriyah Al Aslamiyah, S.PD, M.Si	PAN	Perbaikan Jalan RT.06 RW.01 Kel. Kedung Halang	Kedung Halang	1	Paket	DISPERUMKIM
865	Zakiyatul Fikriyah Al Aslamiyah, S.PD, M.Si	PAN	Perbaikan Jalan RT.01-04 RW.05 Kel. Kedung Halang	Kedung Halang	1	Paket	DISPERUMKIM
866	Zakiyatul Fikriyah Al Aslamiyah, S.PD, M.Si	PAN	Perbaikan Jalan RT.01,02 RW.08 Kel. Kedung Halang	Kedung Halang	1	Paket	DISPERUMKIM
867	Zakiyatul Fikriyah Al Aslamiyah, S.PD, M.Si	PAN	Perbaikan Jalan RT.06 RW.01 Kel. Kedung Halang	Kedung Halang	1	Paket	DISPERUMKIM
868	Zakiyatul Fikriyah Al Aslamiyah, S.PD, M.Si	PAN	Pembangunan TPT Sungai	JALAN PEMBANGUNAN RT 03 RW 03, KEDUNG HALANG, KOTA BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	Paket	PUPR
869	Zakiyatul Fikriyah Al Aslamiyah, S.PD, M.Si	PAN	Pembangunan TPT Sungai	JALAN PEMBANGUNAN RT 03 RW 05 BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	Paket	PUPR
870	Zakiyatul Fikriyah Al Aslamiyah, S.PD, M.Si	PAN	Pembangunan dan atau Rehabilitasi TPS dan TPS 3R (Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara 3R (TPS 3R) dan TPS)	JALAN BERINGIN GRAHA INDAH RT 01 RW 04 BOGOR UTARA, Kota Bogor	1	Unit	DLH

Sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)** di tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi wadah penting dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Bogor Tahun 2025 untuk perencanaan Tahun Anggaran 2026, sejumlah usulan prioritas masyarakat berhasil dihimpun dan diselaraskan dengan **arah kebijakan pembangunan Kota Bogor**, serta kemampuan anggaran yang tersedia, Usulan masyarakat yang telah diakomodir dalam RKPD Tahun 2026 mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam menyusun prioritas pembangunan. Diharapkan pelaksanaan kegiatan ini nantinya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan menjadi contoh praktik baik perencanaan partisipatif di tingkat kelurahan.

Tabel 5.22
Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD 2026 yang terverifikasi

NO	NAMA	ALAMAT	USULAN	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
1	Amung Makmur	Gg. Mesjid Kp. Anyar	Pelatihan Tanggap Kebakaran	1	Kegiatan	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
2	UJANG KOWI	Kp gandasari	Penyediaan Alat pemadam kebakaran	100	Unit	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
3	Ammar	di wilayah warga RT 04	membuat pelatihan tanggap kebakaran, agar faham dalam menangani kebakaran	100	Sertifikat	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
4	SAMAN	CLUSTER PINEWOOD	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan	10	Buah	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
5	Endang Sutisna	Kampung Wangun Tengah	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1	Lokasi	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
6	cecep hermawan	Jl. Raya Tajur Gg. Babadak No.11, RT.03/RW.04, Sindangrasa, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16145, Indonesia	permohonan hidran/ pompa portable untuk antisipasi bahaya kebakaran	5	Unit	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
7	Nurfianti	Pangkalan Raya	Hydrant Portable atau pompa kebakaran portable	1	Buah	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
8	Ating	CURUG	Pembangunan TPT RT.01 RW.07 Kel. Curug	1	PAKET	DISPERUMKIM
9	KETUA RW05	CIMAHPAR	Pembangunan TPT RT.04 RW.05 Kel. Cimahpar	2	PAKET	DISPERUMKIM
10	HERMAN	SINDANGBARANG	Perbaikan Drainase RT.06 RW.07 Kel. Sindangbarang	3	PAKET	DISPERUMKIM
11	KETUA RW 016	CILENDEK BARAT	Perbaikan Drainase RT.01 RW.16 Kel. Cilendek Barat	4	PAKET	DISPERUMKIM
12	Heni Benarti	MENTENG	Pembangunan TPT RT.02 RW.03 Kel. Menteng	5	PAKET	DISPERUMKIM
13	Chandra Hayat	MENTENG	Perbaikan Drainase RT.01 RW.14 Kel. Menteng	6	PAKET	DISPERUMKIM
14	M. Syarief Djalinus	CILENDEK TIMUR	Perbaikan Drainase RT.06 RW.11 Kel. Cilendek Timur	7	PAKET	DISPERUMKIM
15	Supriyanto	CURUG	Perbaikan Drainase RT.02 RW.04 Kel. Curug	8	PAKET	DISPERUMKIM
16	KETUA RW 7	Kedung Halang	Perbaikan Drainase RT.03 RW.07 Kel. Kedung Halang	9	PAKET	DISPERUMKIM
17	Ketua RW 06	CILUAR	Pembangunan TPT RT.02 RW.06 Kel. Ciluar	10	PAKET	DISPERUMKIM

NO	NAMA	ALAMAT	USULAN	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
18	Aris sukrilah	CURUG	Pembangunan TPT RT.03 RW.05 Kel. Curug	11	PAKET	DISPERUMKIM
19	Ketua RW.10	CIPARIGI	Perbaikan Drainase RT.03 RW.10 Kel. Ciparigi	12	PAKET	DISPERUMKIM
20	RT 04 RW 07	BANTARJATI	Pembangunan TPT RT.04 RW.07 Kel. Bantarjati	13	PAKET	DISPERUMKIM
21	Rt.03 RW 11 Kelurahan Tanah Baru	Tanah Baru	Perbaikan Drainase RT.03 RW.11 Kel. Tanah Baru	14	PAKET	DISPERUMKIM
22	KETUA RW 01	CILENDEK BARAT	Perbaikan Drainase RT.02 RW.01 Kel. Cilendek Barat	15	PAKET	DISPERUMKIM
23	KETUA RW 018	CILENDEK BARAT	Perbaikan Drainase RT.01 RW.18 Kel. Cilendek Barat	16	PAKET	DISPERUMKIM
24	RW.03	CILENDEK BARAT	Pembangunan TPT RT.03 RW.03 Kel. Cilendek Barat	17	PAKET	DISPERUMKIM
25	RT 04 RW 12	BANTARJATI	Perbaikan Drainase RT.04 RW.12 Kel. Bantarjati	18	PAKET	DISPERUMKIM
26	Hendra Kurniawan	Tegal Gundil	Perbaikan Drainase RT.01 RW.17 Kel. Tegal Gundil	19	PAKET	DISPERUMKIM
27	RW 01	Balumbang Jaya	Perbaikan Drainase RT.02.03 RW.01 Kel. Balumbang Jaya	20	PAKET	DISPERUMKIM
28	Ketua RW.6	Tegal Gundil	Perbaikan Drainase RT.03 RW.06 Kel. Tegal Gundil	21	PAKET	DISPERUMKIM
29	rw.04	CIPARIGI	Perbaikan Drainase RT.03 RW.04 Kel. Ciparigi	22	PAKET	DISPERUMKIM
30	A. Nasrul (Ketua R w 11)	CIPARIGI	Perbaikan Drainase RT.03 RW.11 Kel. Ciparigi	23	PAKET	DISPERUMKIM
31	Mustofa	SINDANGBARANG	Perbaikan Drainase RT.03 RW.08 Kel. Sindangbarang	24	PAKET	DISPERUMKIM
32	IMRON	Tanah Baru	Perbaikan Drainase RT.04 RW.09 Kel. Tanah Baru	25	PAKET	DISPERUMKIM
33	Randi	MENTENG	Perbaikan Drainase RT.02 RW.20 Kel. Menteng	26	PAKET	DISPERUMKIM
34	RW 05	Tanah Baru	Pembangunan TPT RT.01 RW.05 Kel. Tanah Baru	27	PAKET	DISPERUMKIM
35	Sujeni	Curug Mekar	Perbaikan Drainase RW.06 Kel. Curug Mekar	28	PAKET	DISPERUMKIM
36	M. Syarifudin	CILENDEK TIMUR	Pembangunan TPT RT.01 RW.06 Kel. Cilendek Timur	29	PAKET	DISPERUMKIM
37	MULYADI	BUBULAK	Perbaikan Drainase RT.02 RW.01 Kel. Bubulak	30	PAKET	DISPERUMKIM
38	Iwan Mastiawan	Pasir Mulya	Perbaikan Drainase RT.02 RW.07 Kel. Pasir Mulya	31	PAKET	DISPERUMKIM
39	Ketua RW.008	Pasir Jaya	Pembangunan TPT RT.02 RW.08 Kel. Pasir Jaya	32	PAKET	DISPERUMKIM
40	KETUA RW.09	Kedung Halang	Pembangunan TPT RT.04 RW.09 Kel. Kedung Halang	33	PAKET	DISPERUMKIM
41	Ayi Makmun	SUKASARI	Pembangunan TPT RT.02 RW.02 Kel. Sukasari	34	PAKET	DISPERUMKIM
42	SRI LESTIOWATI	CURUG	Perbaikan Drainase RT.02 RW.11 Kel. Curug	35	PAKET	DISPERUMKIM
43	asep saefuddin	SINDANGRASA	Perbaikan Drainase RT.03 RW.02 Kel. Sindangrasa	36	PAKET	DISPERUMKIM
44	Tonny Mujiyanto	SINDANGSARI	Perbaikan Drainase RT.01 RW.07 Kel. Sindangsari	37	PAKET	DISPERUMKIM
45	Endang Sutisna	SINDANGSARI	Perbaikan Drainase RT.04 RW.02 Kel. Sindangsari	38	PAKET	DISPERUMKIM
46	ADIH	Situ Gede	Pembangunan TPT RT.02 RW.07 Kel. Situ Gede	39	PAKET	DISPERUMKIM
47	Diki Hermawan	KATULAMPA	Perbaikan Drainase RT.02 RW.04 Kel. Katulampa	40	PAKET	DISPERUMKIM
48	Dwi Tony Sutiyono	BARANANGSIANG	Perbaikan Drainase RT.04 RW.06 Kel. Baranangsiang	41	PAKET	DISPERUMKIM
49	AGUS SOFYAN	BUBULAK	Perbaikan Drainase RW.03 Kel. Bubulak	42	PAKET	DISPERUMKIM
50	Hasanudin	SINDANGRASA	Perbaikan Drainase RT.05 RW.05 Kel. Sindangrasa	43	PAKET	DISPERUMKIM
51	rosanti	GUNUNG BATU	Perbaikan Drainase RT.03 RW.03 Kel. Gunung Batu	44	PAKET	DISPERUMKIM
52	Kurnaen	CILENDEK TIMUR	Pembangunan TPT RT.01 RW.07 Kel. Cilendek Timur	45	PAKET	DISPERUMKIM
53	Undang Umar	SINDANGRASA	Pembangunan TPT RT.04 RW.10 Kel. Sindangrasa	46	PAKET	DISPERUMKIM
54	Ermeilius Rahman	Curug Mekar	Pembangunan TPT RW.08 Kel. Curug Mekar	47	PAKET	DISPERUMKIM
55	GUMILAR NUGRAHA	BUBULAK	Perbaikan Drainase RT.04 RW.04 Kel. Bubulak	48	PAKET	DISPERUMKIM

NO	NAMA	ALAMAT	USULAN	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
56	Imam Muhammadi P.B.S.T	Curug Mekar	Perbaikan Drainase RW.10 Kel. Curug Mekar	49	PAKET	DISPERUMKIM
57	o abdurrohim	SINDANGBARANG	Perbaikan Drainase RT.04 RW.03 Kel. Sindangbarang	50	PAKET	DISPERUMKIM
58	Muhamad Sukmaya	CILENDEK TIMUR	Perbaikan Drainase RT.01 RW.01 Kel. Cilendek Timur	51	PAKET	DISPERUMKIM
59	Diding Rustandi	MENTENG	Perbaikan Drainase RW.12 Kel. Menteng	52	PAKET	DISPERUMKIM
60	DADANG RUKMANA	Pasir Kuda	Pembangunan TPT RT.05 RW.03 Kel. Pasir Kuda	53	PAKET	DISPERUMKIM
61	Suhendar	GUNUNG BATU	Perbaikan Drainase RT.01.02 RW.10 Kel. Gunung Batu	54	PAKET	DISPERUMKIM
62	ENTAH SUMARNA	CURUG	Pembangunan TPT RT.03 RW.02 Kel. Curug	55	PAKET	DISPERUMKIM
63	Toto Mardianto	Curug Mekar	Perbaikan Drainase RW.05 Kel. Curug Mekar	56	PAKET	DISPERUMKIM
64	ismail	KAYUMANIS	Pembangunan TPT RT.05 RW.05 Kel. Kayumanis	57	PAKET	DISPERUMKIM
65	Amid	Curug Mekar	Perbaikan Jalan RW.07 Kel. Curug Mekar	58	PAKET	DISPERUMKIM
66	Rw01 tanah sareal	TANAH SAREAL	Pembangunan TPT RT.03 RW.01 Kel. Tanah Sareal	59	PAKET	DISPERUMKIM
67	Jakaria	MENTENG	Pembangunan TPT RT.02 RW.08 Kel. Menteng	60	PAKET	DISPERUMKIM
68	JEFFI NOOR	KENCANA	Perbaikan Drainase RT.02 RW.14 Kel. Kencana	61	PAKET	DISPERUMKIM
69	RISDIYANTO	Situ Gede	Perbaikan Drainase RT.03 RW.01 Kel. Situ Gede	62	PAKET	DISPERUMKIM
70	RW 05	Balumbang Jaya	Perbaikan Drainase RT.04 RW.05 Kel. Balumbang Jaya	63	PAKET	DISPERUMKIM
71	KETUA RW 09	CILENDEK BARAT	Perbaikan Drainase RT.02 RW.09 Kel. Cilendek Barat	64	PAKET	DISPERUMKIM
72	Engkun	SUKARESMI	Perbaikan Drainase RT.04 RW.01 Kel. Sukaresmi	65	PAKET	DISPERUMKIM
73	Acap Suprihatin	SUKADAMAI	Pembangunan TPT RT.04 RW.01 Kel. Sukadamai	66	PAKET	DISPERUMKIM
74	Dita Mirwandi	Curug Mekar	Pembangunan TPT RW.09 Kel. Curug Mekar	67	PAKET	DISPERUMKIM
75	RW 10	Balumbang Jaya	Perbaikan Drainase RT.02 RW.10 Kel. Balumbang Jaya	68	PAKET	DISPERUMKIM
76	Edi	Babakan Pasar	Perbaikan JPO RT.01 RW.04 Kel. Babakan Pasar	69	PAKET	DISPERUMKIM
77	usman wahidin	Babakan Pasar	Perbaikan Drainase RT.02 RW.10 Kel. Babakan Pasar	70	PAKET	DISPERUMKIM
78	kusna kusuma	KAYUMANIS	Pembangunan TPT RT.05 RW.04 Kel. Kayumanis	71	PAKET	DISPERUMKIM
79	Maulany	Babakan Pasar	Pembangunan TPT RT.05 RW.02 Kel. Babakan Pasar	72	PAKET	DISPERUMKIM
80	Siti Dzahra	Babakan Pasar	Perbaikan Jalan RW.03 Kel. Babakan Pasar	73	PAKET	DISPERUMKIM
81	Luki irawan	Tegallega	Perbaikan Drainase RT.01 RW.02 Kel. Tegallega	74	PAKET	DISPERUMKIM
82	Rw 01 kelurahan Panaragan	PANARAGAN	Pembangunan TPT RT.05 RW.01 Kel. Panaragan	75	PAKET	DISPERUMKIM
83	Dodi Suardi	Babakan Pasar	Perbaikan Drainase RT.05 RW.09 Kel. Babakan Pasar	76	PAKET	DISPERUMKIM
84	M. MUKHLIS	Kedung Jaya	Perbaikan Drainase RT.03 RW.04 Kel. Kedung Jaya	77	PAKET	DISPERUMKIM
85	Aditya	SUKADAMAI	Pembangunan TPT RT.02 RW.03 Kel. Sukadamai	78	PAKET	DISPERUMKIM
86	TB. Adang Rachmat. JP	SEMPUR	Pembangunan TPT RT.02 RW.05 Kel. Sempur	79	PAKET	DISPERUMKIM
87	EPI RINALDI	Kedung Jaya	Perbaikan Drainase RT.04 RW.08 Kel. Kedung Jaya	80	PAKET	DISPERUMKIM
88	R. HERU PUTRO WIBOWO, SH	MEKARWANGI	Perbaikan Drainase RT.02 RW.10 Kel. Mekarwangi	81	PAKET	DISPERUMKIM
89	MAD SOLEH SP	MEKARWANGI	Perbaikan Drainase RT.02 RW.03 Kel. Mekarwangi	82	PAKET	DISPERUMKIM
90	amid	KAYUMANIS	Perbaikan Drainase RT.04 RW.07 Kel. Kayumanis	83	PAKET	DISPERUMKIM
91	Rudi Ruswandi	SEMPUR	Perbaikan JPO RT.03 RW.04 Kel. Sempur	84	PAKET	DISPERUMKIM
92	Nuraeni	CIWARINGIN	Perbaikan Drainase RT.02 RW.04 Kel. Ciwaringin	85	PAKET	DISPERUMKIM
93	rw 10	Kedung Badak	Pembangunan TPT RT.03 RW.10 Kel. Kedung Badak	86	PAKET	DISPERUMKIM

NO	NAMA	ALAMAT	USULAN	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
94	KETUA RW 01	BABAKAN	Perbaikan Jalan RT.02.03 RW.01 Kel. Babakan	87	PAKET	DISPERUMKIM
95	RW.012	Kedung Badak	Pembangunan TPT RT.04 RW.12 Kel. Kedung Badak	88	PAKET	DISPERUMKIM
96	Ketua RW	KEBON KALAPA	Perbaikan Drainase RT.03 RW.01 Kel. Kebon Kalapa	89	PAKET	DISPERUMKIM
97	Ketua RW	KEBON KALAPA	Pembangunan TPT RT.05 RW.09 Kel. Kebon Kalapa	90	PAKET	DISPERUMKIM
98	Usman	GENTENG	Pembangunan TPT RT.01 RW.02 Kel. Genteng	91	PAKET	DISPERUMKIM
99	Ketua RW	KEBON KALAPA	Perbaikan Drainase RT.04 RW.08 Kel. Kebon Kalapa	92	PAKET	DISPERUMKIM
100	Sukandi	CIPAKU	Perbaikan Drainase RT.02 RW.09 Kel. Cipaku	93	PAKET	DISPERUMKIM
101	LAODE MOHAMAD SAFRIEL	EMPANG	Perbaikan Drainase RW.03 Kel. Empang	94	PAKET	DISPERUMKIM
102	Ketua RW	KEBON KALAPA	Pembangunan TPT RT.01 RW.03 Kel. Kebon Kalapa	95	PAKET	DISPERUMKIM
103	Ketua RW	KEBON KALAPA	Perbaikan Drainase RT.04 RW.07 Kel. Kebon Kalapa	96	PAKET	DISPERUMKIM
104	Kosasih	CIPAKU	Pembangunan TPT RT.01 RW.02 Kel. Cipaku	97	PAKET	DISPERUMKIM
105	RW 11	CIPAKU	Perbaikan Jalan RT.01 RW.11 Kel. Cipaku	98	PAKET	DISPERUMKIM
106	ASEP SARIPUDIN	GENTENG	Perbaikan Drainase RT.02 RW.10 Kel. Genteng	99	PAKET	DISPERUMKIM
107	Billy S Syabana	CIPAKU	Perbaikan Drainase RT.01 RW.18 Kel. Cipaku	100	PAKET	DISPERUMKIM
108	DWI ANGGRAENI	EMPANG	Perbaikan Drainase RW.04 Kel. Empang	101	PAKET	DISPERUMKIM
109	Ahmad Sumpena	GUDANG	Pembangunan TPT RT.02 RW.12 Kel. Gudang	102	PAKET	DISPERUMKIM
110	Mamang Suminta	PAMOYANAN	Pembangunan TPT RT.01 RW.10 Kel. Pamoyanan	103	PAKET	DISPERUMKIM
111	ASEP SUHENDAR	MUARASARI	Pembangunan TPT RT.01-04 RW.08 Kel. Muarasari	104	PAKET	DISPERUMKIM
112	Ena Sutisna	BOJONGKERTA	Perbaikan Drainase RT.03 RW.04 Kel. Bojongkerta	105	PAKET	DISPERUMKIM
113	RW 09	RANCAMAYA	Perbaikan Drainase RW.09 Kel. Rancamaya	106	PAKET	DISPERUMKIM
114	Baehaki	RANCAMAYA	Perbaikan Drainase RW.10 Kel. Rancamaya	107	PAKET	DISPERUMKIM
115	RW 03	RANCAMAYA	Pembangunan TPT RW.03 Kel. Rancamaya	108	PAKET	DISPERUMKIM
116	HERI	BOJONGKERTA	Pembangunan TPT RT.07 RW.02 Kel. Bojongkerta	109	PAKET	DISPERUMKIM
117	Ruslan supriadi	Ranggamekar	Perbaikan Drainase RT.01 RW.09 Kel. Ranggamekar	110	PAKET	DISPERUMKIM
118	Aep Permana	KERTAMAYA	Pembangunan TPT RT.02 RW.01 Kel. Kertamaya	111	PAKET	DISPERUMKIM
119	DODI KUSNADI	GUDANG	Perbaikan Drainase RT.04 RW.08 Kel. Gudang	112	PAKET	DISPERUMKIM
120	KETUA RW 02	PALEDANG	Perbaikan Drainase RT.02 RW.02 Kel. Paledang	113	PAKET	DISPERUMKIM
121	Rustaman	KERTAMAYA	Pembangunan TPT RT.03 RW.07 Kel. Kertamaya	114	PAKET	DISPERUMKIM
122	RW 005	CIBOGOR	Pembangunan TPT RT.04 RW.05 Kel. Cibogor	115	PAKET	DISPERUMKIM
123	IMAN FIRMANSYAH	GENTENG	Pembangunan TPT RT.02 RW.08 Kel. Genteng	116	PAKET	DISPERUMKIM
124	RW 02	CIBOGOR	Pembangunan TPT RT.02 RW.02 Kel. Cibogor	117	PAKET	DISPERUMKIM
125	RW.01	CIBOGOR	Pembangunan TPT RT.01 RW.01 Kel. Cibogor	118	PAKET	DISPERUMKIM
126	Dudi iskandar	MULYAHARJA	Perbaikan Drainase RT.03 RW.06 Kel. Mulyaharja	119	PAKET	DISPERUMKIM
127	Gunawan, SE	Tegallega	Perbaikan Drainase RT.01 RW.04 Kel. Tegallega	120	PAKET	DISPERUMKIM
128	Asep Umar	BOJONGKERTA	Pembangunan TPT RT.03 RW.05 Kel. Bojongkerta	121	PAKET	DISPERUMKIM
129	Zaenal Abidin	KERTAMAYA	Pembangunan TPT RT.01 RW.05 Kel. Kertamaya	122	PAKET	DISPERUMKIM
130	Sana Sanjaya	Ranggamekar	Pembangunan TPT RT.02 RW.05 Kel. Ranggamekar	123	PAKET	DISPERUMKIM
131	Abdul Rosyid	BOJONGKERTA	Perbaikan Drainase RT.01 RW.03 Kel. Bojongkerta	124	PAKET	DISPERUMKIM
132	ADE KOSASIH	MULYAHARJA	Pembangunan TPT RT.03 RW.02 Kel. Mulyaharja	125	PAKET	DISPERUMKIM
133	AGUS SOLIHIN	KERTAMAYA	Perbaikan Drainase RT.01 RW.04 Kel. Kertamaya	126	PAKET	DISPERUMKIM

NO	NAMA	ALAMAT	USULAN	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
134	ADI KRISTIANTO	LAWANGGINTUNG	Perbaikan Drainase RT.06 RW.04 Kel. Lawanggintung	127	PAKET	DISPERUMKIM
135	SLAMET RIYANTO	BATUTULIS	Pembangunan TPT RT.04 RW.03 Kel. Batutulis	128	PAKET	DISPERUMKIM
136	aceng supendi	HARJASARI	Perbaikan Drainase RT.01 RW.06 Kel. Harjasari	129	PAKET	DISPERUMKIM
137	Nurdin	HARJASARI	Pembangunan TPT RT.02 RW.04 Kel. Harjasari	130	PAKET	DISPERUMKIM
138	CECEP BACHRI	HARJASARI	Perbaikan Drainase RT.01 RW.01 Kel. Harjasari	131	PAKET	DISPERUMKIM
139	Husen	Tasmania	agar menguasai bagaimana cara menjadi membudidayaan ikan dengan baik	22	paket	DKPP
140	Ramdoni	Ciwaringin	Pemasangan CCTV lingkungan	5	Unit	Dinas Komunikasi Dan Informatika
141	Ahmad Supena	Jl. Padasuka No. 5	Banyaknya pencurian di wilayah karena belum adanya sarana prasarana alat CCTV	50	Unit	Dinas Komunikasi Dan Informatika
142	RW Ujang	Tamansari Persada No.1	Sehingga perlu adanya Kamera yang baru, untuk memudahkan pemantauan keamanan Kantor	6	Unit	Dinas Komunikasi Dan Informatika
143	RW Ujang	Tamansari Persada No.1 Kel.Cibadak	Sehingga perlu adanya pemasangan WiFi Publik di Kantor Kelurahan Cibadak	1	Unit	Dinas Komunikasi Dan Informatika
144	KETUA LPM	JL. RAYA KEDUNGHALANG RT.03 RW.07 KANTOR KELURAHAN KEDUNGHALANG	PEMBANGUNAN CCTV LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN DAN DI JALAN DEPAN KANTOR KELURAHAN KEDUNGHALANG	5	Titik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
145	Dwi	Komplek VBI	Mengajukan CCTV dibRT 1 RW 12 VBI	15	Unit	Dinas Komunikasi Dan Informatika
146	Ketua RW 02	Jl Raya Dramaga	pengajuan kegiatan padat karya	50	Orang	Dinas Tenaga Kerja
147	Tato subiyakto	Cimanggu kecil	Pelatihan perbengkelan	50	Orang	Dinas Tenaga Kerja
148	Ahmad Supena	Kp. Padasuka RT.02/02 Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	Pelatihan keterampilan berbasis masyarakat	60	Orang	Dinas Tenaga Kerja
149	Muhammad Jauhari	Kelurahan Mulyaharja	Dapat Menambah Penghasilan	50	Orang	Dinas Tenaga Kerja
150	Mansyur	Warung Bandrek	dengan wilayah yang kurang bersih dapat memberikan rasa tidak nyaman	15	Orang	Dinas Tenaga Kerja
151	TITA TRESNAWATI	SINDANGRESMI	dengan wilayah yang kurang bersih dapat memberikan rasa tidak nyaman	15	Orang	Dinas Tenaga Kerja
152	Ahmad	RW.005	Kegiatan padat karya untuk mengurangi pengangguran di wilayah kelurahan	100	Orang	Dinas Tenaga Kerja
153	Herman	Gang Flamboyan 2, jl. Amaliyah, Jl. M. Ali	Perlu penerangan di gang dan jalan pemukiman warga untuk kenyamanan dan keamanan di malam hari	12	Titik	Dinas Perhubungan
154	MISIN SUSANTO	KP. JAWA	Penambahan Tiang dan Lampu PJU	30	Unit	Dinas Perhubungan
155	hidayat	gg.bambu kuning rt 001 rw 002	penambahan lampu pju	500	Titik	Dinas Perhubungan
156	RW 07	Bbaakan Lio	pemasangan LAMPU PJU	15	Unit	Dinas Perhubungan
157	RADEN SAEPAHROJI	Ciheuleut Pakuan	Ketika malam suasana di jalan lingkungan sangat gelap	10	Titik	Dinas Perhubungan
158	AHMAD WAHIDIN	kebon jukut	pemasangan Pju untuk penerangan wilayah.	45	Titik	Dinas Perhubungan
159	ROHADI RW.10	Cikaret Rt.02 Rw.10	pemasangan PJU baru	100	Unit/Paket	Dinas Perhubungan
160	ASEP HIDAYAT S	Jl. Layungsari III RT. 01 s.d RT. 02 RW. 16	Pengajuan pemasangan PJU	24	Titik	Dinas Perhubungan
161	IRMAN FIRMANSYAH	CIKARET no. 11	mohon untuk pemasangan PJU di semua jalan di wilayah RW. 09 yang belum ada lampu PJU	100	Titik	Dinas Perhubungan
162	KOMARUDIN	Jl Siliwangi BLK RT 02 RW 01	PJU Karna Kurangnya Penerangan	15	Unit	Dinas Perhubungan

NO	NAMA	ALAMAT	USULAN	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
163	HASAN BASRI	Kp Batakal	Penerangan Jalan Umum (PJU)	30	Unit	Dinas Perhubungan
164	Dayat	Jl. Raya Cipaku	Pembangunan trotoar di sepanjang jalan	320	M2	Dinas Perhubungan
165	Asep Sopyan	Jl. Raya Cipaku	Pembangunan trotoar atau pelengkap ajalan	20640	M2	Dinas Perhubungan
166	H. IWAN PERMANA	Jl. Pahlawan No.161, RT.01/RW.08, Bondongan, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16132, Indonesia	Penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	8	Titik	Dinas Perhubungan
167	Dede Dachlan zainal	Jln raya tajur	Perlunya pemasangan tiang PJU Jalan lingkungan	10	Buah	Dinas Perhubungan
168	DWI ANGGRAENI	JI Sirnasari Rw 04	Penerangan jalan dilingkungan	20	Titik	Dinas Perhubungan
169	RW 013	KEDUNG BADAK	PEMASANGAN LAMU PJU AGAR LEBIH TERANG SAAT MELINTAS	62	Titik	Dinas Perhubungan
170	RUDY	gg. Pahlawan	Jalan Gelap tidak terlihat	30	Buah	Dinas Perhubungan
171	saripudin	kp.sumurwangi	pemasangan lampu penerangan jalan gang	500	M2	Dinas Perhubungan
172	Iwan kurniawan	Kedung halang poncol	Pemasangan lampu PJU	50	Titik	Dinas Perhubungan
173	DIA MARDIA	JALAN CIMANGGU LAMPING	BUTUH PENERANGAN JALAN	200	Titik	Dinas Perhubungan
174	Yayan	jalan Pembangunan	Pengajuan Alat penerang jalan RT 1 dan RT 2 RW 5	20	Unit	Dinas Perhubungan
175	RW 06	Jl. Kp. Sawah Blk. Asem, RT.01/RW.06, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154, Indonesia	Pengadaan dan Pemasangan Alat Penerangan Jalan/PJU baru, sudah berkali2 di ajukan belum ada realisasinya	50	Unit	Dinas Perhubungan
176	Ahmad Sueb	Jl. Telepon No 2	Pelatihan dan Pembinaan UMKM Pelaku Usaha di Kelurahan Pabaton.	1	Kegiatan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
177	ASEP HIDAYAT S	Jl. Layungsari III RT. 03 RW. 16	Pelatihan dan keterampilan koperasi bagi pengurus dan anggota koperasi	25	Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
178	RW Ujang	Tamansari Persada RW 15	Perlu adanya pelatihan UMKM di 15 RW yang ada di Kelurahan Cibadak	100	Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
179	SUKARTONO	Taman Griya Kencana	Pelatihan untuk UMKM	50	Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
180	RW 01	Kp Kramat	ingin diadakannya pelatihan	50	Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian
181	HARIS ISKANDAR	Wangkal, kel. Curugmekar, kec. Bogor Barat	Pembangunan TPT Tepi Sungai	90	M3	PUPR
182	PAK AGUS RW DAN RT SETEMPAT	Kp Salabenda Got, kel. Curug, kec. Bogor Barat	Untuk Pembangunan TPT Aliran Sungai Yang Rawan Longsor	480	M3	PUPR
183	KETUA RW04	Kp Bojong, Cimahpar, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16155, Indonesiakel. Cimahparkec. Bogor Utara	Pembangunan Tpt Sungai	144	M3	PUPR
184	DEDI PADILAH	Babakan Ciluar, kel. Ciluar, kec. Bogor Utara	Perbaikan TPT Kali Salam	50	M3	PUPR
185	KETUA RW 04	Dramaga Loceng,Kel. Margajaya, kec. Bogor Barat	Agar Tanah Tidak Terkikis Semakin Meluas	500	M2	PUPR

NO	NAMA	ALAMAT	USULAN	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
186	HERY SUJATMOKO	Medika Iv, kel. Menteng, kec. Bogor Barat	Pengaspalan Jalan Yang Rusak	650	M2	PUPR
187	KETUA RW 05	Kaum Sari, kel. Cibuluh, kec. Bogor Utara	Menngkatkan TPT Aliran Sungai Ciparigi	5000	M3	PUPR
188	KETUA RW 06	Ciheuleut, kel. Cibuluh, kec. Bogor Utara	Menimbulkan Longsoran Pada Saat Hujan	45	M3	PUPR
189	M.BAERILLAH	Sindang Barang Loji, Kel. Loji, kec. Bogor Barat	Untuk Di Bangun Kembali Tembok Penahan Tanah	200	M3	PUPR
190	LUKI IRAWAN	Babakan Sirna, kel. Tegalega, kec. Bogor Tengah	Pembangunan Tpt Kali Ciparigi	375	M3	PUPR
191	KETUA RW.03	Bukit Tunggul, kel. Babakan, kec. Bogor Tengah	Perbaikan Jalan Bukit Tunggul	1200	M2	PUPR
192	BINTANG JHS	Sempur Kaler, kel. Sempur, kec. Bogor Tengah	Pengaspalan Jalan (Hotmix)	2764	M2	PUPR
193	M. AMIN	Bukit Cimanggu City, kel. Sukadamai, kec. Tanah Sareal	Pembangunan TPT Di RT 04 RW 12	54	M3	PUPR
194	ASRULI ROHMAN	Kp. Kencana, kel. Kencana, kec. Tanah Sareal	Pembangunan TPT Baru	225	m	PUPR
195	MAMURI S'E	Kp. Bulak, kel. Kencana, kec. Tanah Sareal	Pembangunan Tpt Sungai	100	m	PUPR
196	SJAMSUDIN	Katulampa Raya, kel. Katulampa, kec. Bogor Timur	Pemeliharaan Dan Perbaikan Jalan	800	M2	PUPR
197	USMAN	Benda Kaum	Perlunya pembangunan posyandu di wilayah tersebut	30	M2	KECAMATAN TANAH SAREAL
198	Beni	Kedung Halang Tengah	Renovasi bangunan Posyandu Tanjung 3	1	Unit	KECAMATAN TANAH SAREAL
199	Adeh Chetok	Kedung Halang Wesel RT 03 RW 03	Bangunan yang ada sudah tidak layak pakai	1	Unit	KECAMATAN TANAH SAREAL
200	Yeni Yulnaintin	Bukit Cimanggu City, Blok H	Dilakukannya pembangunan posyandu.	1	Unit	KECAMATAN TANAH SAREAL
201	Abad Ketua RW.06	Jl. Bubulak	Perbaikan Posyandu dengan penambahan ruang atas lantai 2	105	m	KECAMATAN TANAH SAREAL
202	Ketua RW.7	Jl. Palayu 6	Pembangunan Posyandu Siklus Hidup	1	Unit	KECAMATAN BOGOR UTARA
203	RW 11 PASIRJAYA	Gg. Teratai 3 No.3, RT.02/RW.11, Pasir Jaya, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16119, Indonesia	Pengadaan tandu dan kursi Roda untuk posyandu	Rp5	unit	Dinas Sosial
204	Kelurahan Kebon Pedes	Jl. Pondok Rumput	Pembannngunan / Revitalisasi Lapangan Pondok Rumput			Dinas Pemuda Dan Olah Raga
205	Subahagio	Komplek PDK	Pengajuan sarana dan prasarana Olahraga Tennis meja dan bulutangkis			Dinas Pemuda Dan Olah Raga
206	m.luthfi	Jl. Rulta	Perbaikan Posyandu di RW.07			KECAMATAN BOGOR SELATAN
207	M. Taufik Hidayat	Bakom Urug Bojongkerta	Pembangunan Gedung Posyandu			KECAMATAN BOGOR SELATAN
208	MUHIDIN	Kp Genteng	Perbaikan gedung posyandu			KECAMATAN BOGOR SELATAN
209	THOMAS RAHARJO	Jl. Raya Tajur	Perbaikan atau Renovasi Gedung Posyandu Cempaka			KECAMATAN BOGOR SELATAN
210	ATI SULASTRI	Kp Kebon Kalapa	Pembangunan Gedung Posyandu			KECAMATAN BOGOR SELATAN
211	NENAH SUKAENAH	Jl.Batutulis	keadaan bangunan Posyandu sudah banyak tembok retak-retak dan bocor dapat membahayakan			KECAMATAN BOGOR SELATAN
212	Taufik	Kp. cibeureum Sunting	pembangunan posyandu baru			KECAMATAN BOGOR SELATAN

NO	NAMA	ALAMAT	USULAN	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
213	Ade Suryana	Margabhakti	Belum tersedianya sarana/gedung Posyandu di RW.09			KECAMATAN BOGOR SELATAN
214	Cecep Munajat	Kp. Anyar	Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan pembangunan posyandu			KECAMATAN BOGOR SELATAN
215	Rw. 04 Panaragan Aspol	Jl. Panaragan Aspol Rw.04	Pelatihan Penanggulangan Risiko Kebencanaan	50	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
216	Rw. 07 Panaragan Pojok Kelurahan Panaragan	Jl. Panaragan Pojok	Pemasangan alat Early Warning System	2	Unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
217	Karang Taruna Lubuk Sipatahunan	Jl Sempur No 33	membutuhkan HT (4 buah), Jas Hujan (25 buah), Sepatu Booth (25 buah), Senter (10 buah), Senso (2 buah), Sarung Tangan (25 buah)	91	Buah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
218	Edwar Mulyadi	Kp. Sukawarna	Pengadaan alat telekomunikasi handy talkie	25	Buah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
219	Kelurahan Kebon Pedes	Jl. Pondok Rumput	Perlunya Sosialisasi dan Pelatihan	25	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
220	Kelurahan Kebon Pedes	Jl. Pondok Rumput	perlunya chainsaw 2 unit, pelampung 12 set dan alat komunikasi 6 unit	1	Paket	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
221	UJANG SUKARMA	GG BALE DESA	Pelatihan kesiapsiagaan bencana	32	orang/kegiatan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
222	ANWAR SUHENDAR	Kp. Salabenda Got Rt 03 Rw 08 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	agar Warga Rw 08 tau dalam soal kebencanaan	30	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
223	KETUA RW 12	CEMPLANG BARU	Renovasi Gedung Posyandu RW 12	28	M2	KECAMATAN BOGOR BARAT
224	Agus Ginanjar	kp. tarikolot	- Perbaikan atap - Perbaikan Talang air - Perbaikan Kramik lantai 2 - Perbaikan Kusen dan Jendela - Perbaikan Pintu - Pengecatan dinding - Perbaikan WC/Kamar mandi	16	M2	KECAMATAN BOGOR BARAT
225	EDI KUSNADI	SEMLAK	Perlunya perbaikan/renovasi posyandu	24	M2	KECAMATAN BOGOR BARAT
226	Iwan Setiawan	Posyandu Bougenville B Gang Kirei	Renovasi dan perbaikan Atap Posyandu juga pembangunjan kamar mandi	1	Bangunan Gedung	KECAMATAN BOGOR BARAT
227	KETUA RW 05	GG. Makam RW 05	PEKERJAAN HOTMIX	127,29	M2	KECAMATAN BOGOR BARAT
228	Ketua RW.003	Jl.Batutapak	Perbaikan Bangunan dan Atap	19	M2	KECAMATAN BOGOR BARAT
229	ANDRIANA	SINDANGBARANG PILAR I	PERBAIKAN POSYANDU ANYELIR B	21,1	M2	KECAMATAN BOGOR BARAT
230	margajaya_rw_07	pakuan regency cluster tajuragung	pembangunan gedung posyandu	80	M2	KECAMATAN BOGOR BARAT
231	IWAN EFFENDI	Jl Menteng	memanfaatkan secara maksimal gedung posyandu yang sudah dibangun (sudah ada)	90	M2	KECAMATAN BOGOR BARAT
232	RW 02	Batuhulung	perbaikan gedung posyandu	1	Bangunan Gedung	KECAMATAN BOGOR BARAT
233	KETUA RW 06	TAMAN PAGENTONGAN	PEMBANGUNAN POSYANDU	1	Bangunan Gedung	KECAMATAN BOGOR BARAT
234	YOYON SYAHRONI	SINDANGBARANG JEMBATAN	PEMBANGUNAN POSYANDU	11,56	M2	KECAMATAN BOGOR BARAT
235	Chandra Hayat	Gg. Muha	Pengadaan alat kesenian nuansa islami	1	Set	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
236	H. DIDIN SAEPULOH	Sindangrasa	Seperangkat Gamelan Pelog	1	Unit	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
237	RW 11	Kbn manggis	Dengan adanya alat kesenian, masyarakat terutama generasi muda mempunyai wadah untuk pengembangan bakat.	1	Set	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

NO	NAMA	ALAMAT	USULAN	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
238	SUPADMA B ENEB	Lemah Duhur	Bantuan Peralatan Gendang Rampak Pencak Silat	1	Paket	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
239	Sudrajat	Kedung halang sugih lamping	Penyediaan alat kesenian (hadroh)	4	Paket	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
240	Mad Sugiri	Kampung Wangun Bawah	Pengadaan alat kesenian	1	Paket	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
241	KETUA RW 01	Kp. Pangkalan	LINGKUP PENGAJIAN DAN KESENIAN	1	Paket	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

KOTA BOGOR



Tabel 5.23
KESELARASAN ASTACITA DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	14.904.485.500	DINAS PENDIDIKAN
2	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	187.454.472	DINAS PENDIDIKAN
3	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1.475.775.600	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Minimal (SPM) Bidang Pendidikan								
4	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	362,00 - Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	2.986.394.000	DINAS PENDIDIKAN
5	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	29.363.495.905	DINAS KESEHATAN

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGR AM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
6	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	84.040.110.600	DINAS KESEHATAN
7	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	345,00 - Kesehatan Untuk Semua	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	852.335.840	DINAS KESEHATAN
8	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	323,00 - Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	8.944.573.146	PUPR

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		UMUM DAN PENATAAN RUANG	sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	pencapaian swasembada pangan, energi, dan air								
9	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	323,00 - Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan yang dibangun	Liter/Detik	843.300.000	PUPR
10	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	355,00 - Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	350.000.000	PUPR
11	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	19.903.732.166	DISPERUMKIM

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
12	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	600.000.000	DISPERUMKIM
13	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	125.599.055.602	DISPERUMKIM
14	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	352,00 - Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	2.478.030.852	DISPERUMKIM
15	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	357,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	49.811.800	BPBD

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
16	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	128.745.000	SATPOL.PP
17	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	358,00 - Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	19.320.000	SATPOL.PP
18	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	357.164.800	DINAS SOSIAL

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
19	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	328.792.000	DINAS SOSIAL
20	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	342,00 - Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	642.816.200	DINAS SOSIAL
21	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	371,00 - Meningkatkan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	2.727.934.600	DISNAKER
22	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	371,00 - Meningkatkan kinerja pembangunan ketenagakerjaan	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Orang	1.597.276.800	DISNAKER

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGR AM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja				Kesejahteraan Pekerja	Kesejahteraan Pekerja			
23	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatkan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02 .2.01.0 011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	145.299.900	DPPPA
24	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatkan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02 .2.02.0 009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	281.897.500	DPPPA

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
25	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatkan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	Kegiatan	67.252.100	DPPPA
26	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	325,00 - Meningkatkan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	130.600.000	DPPPA
27	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	351,00 - Meningkatkan ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1	Dokumen	230.330.000	DKPP

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			ekonomi hijau, dan ekonomi biru					Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
28	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	351,00 - Meningkatkan ketahanan pangan	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	50.000.000	DKPP
29	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	361,00 - Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.007	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	900.000.000	DLH
30	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan	348,00 - Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.03.003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	2.309.366.400	DISDUKCAPIL

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGR AM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.									
31	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	348,00 - Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	50.600.000	DISDUKCAPIL
32	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	96.130.000	DALDUK KB

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGR AM	PROGRAM	KODE SUB KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
33	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03 .2.04.0 005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	362.906.100	DALDUK KB
34	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	334,00 - Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04 .2.01.0 028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan	Kelompok	100.109.800	DALDUK KB

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
35	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02 .2.02.0 002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	12.879.719.957	DISHUB
36	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	373,00 - Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02 .2.03.0 011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	38.980.610	DISHUB
37	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02 .2.01.0 017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	95.295.000	DISKOMINFO
38	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02 .2.01.0 019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi	Rekomendasi	292.505.300	DISKOMINFO

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGR AM	PROGRAM	KODE SUB KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			judi, dan penyeludupan.						prioritas Pemerintah Daerah			
39	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02 .2.01.0 021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	3.220.587.990	DISKOMINFO
40	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03 .2.02.0 025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemd yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	48.622.000	DISKOMINFO
41	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03 .2.02.0 034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	24.500.650	DISKOMINFO
42	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Memperkuat reformasi politik, hukum dan	333,00 - Terakselerasinya transformasi	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN	2.16.03 .2.02.0 036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang	Perangka t Daerah	2.563.007.604	DISKOMINFO

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintah digital di daerah		APLIKASI INFORMATIKA			memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas			
43	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	333,00 - Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen	99.868.650	DISKOMINFO
44	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	81.776.000	DKUKMDAGIN
45	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	314.400.000	DKUKMDAGIN

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.									
46	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	368,00 - Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	6.161.790.800	DKUKMDAGIN
47	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	412.642.000	DISPORA

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
48	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatkan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02.004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	680.155.699	DISPORA
49	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatkan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet yang Diseleksi	Orang	147.645.000	DISPORA
50	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	335,00 - Meningkatkan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan	Orang	143.584.133.162	DISPORA

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGR AM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					kabupaten/kota	Diberikan Pengembangan			
51	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	335,00 - Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	249.999.800	DISPORA
52	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%	66.051.800	DISKOMINFO
53	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	338,00 - Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat	%	58.575.600	DISKOMINFO

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)					diakses oleh pengguna data.			
54	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.201.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	88.692.100	DISKOMINFO
55	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	337,00 - Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.201.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggara	Dokumen	51.308.000	DISKOMINFO
56	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.201.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,	Objek	146.425.900	DISPARBUD

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGR AM	PROGRAM	KODE SUB KEGIAT AN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					Pemajuan Kebudayaan	Pengembangan, Pemanfaatan			
57	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	330,00 - Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05 .2.01.0 002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	102.713.500	DISPARBUD
58	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	340,00 - Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02 .2.01.0 013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	49.999.800	DIARPUS

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			penyanggah disabilitas.									
59	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	340,00 - Meningkatkan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	50.000.000	DIARPUS
60	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	340,00 - Meningkatkan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	82.653.200	DIARPUS
61	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	340,00 - Meningkatkan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan,	Eksemplar	51.527.600	DIARPUS

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGR AM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan			
62	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02 .2.01.0 003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	52.571.700	DIARPUS
63	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	343,00 - Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02 .2.03.0 001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	3.600.000	DIARPUS
64	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	344,00 - Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN	3.26.04 .2.02.0 022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri	Produk	50.000.000	DISPARBUD

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pertumbuhan Ekonomi Nasional		DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif			
65	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	353,00 - Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	343.206.200	DKPP
66	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	36.260.000	DKUKMDAGIN
67	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	193.598.400	DKUKMDAGIN

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
			tambah di dalam negeri.									
68	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	367,00 - Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	114.190.000	DKUKMDAGIN
69	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	173.260.000	DKUKMDAGIN
70	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	101.643.300	DKUKMDAGIN
71	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu	Dokumen	10.000.000	DKUKMDAGIN

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
								Kabupaten/Kota	Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u			
72	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	370,00 - Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi,	Dokumen	10.000.000	DKUKMDAGIN
73	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	374,00 - Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Orang	6.343.442.800	KESBANGPOL

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
								Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan			
74	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	374,00 - Meningkatkan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	935.000.000	KESBANGPOL
	TOTAL										483.115.446.805	

BAB 6

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan, setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu:

1. Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.

2. Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Daerah (IKD).

6.1. PROYEKSI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KOTA BOGOR TAHUN 2026

Indikator Makro pembangunan Kota Bogor menjadi salah satu tolok ukur kunci keberhasilan rencana pembangunan Kota Bogor. Berikut ini adalah capaian dan proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor Tahun 2020-2026 sebagaimana dijelaskan pada Tabel Berikut ini:

Tabel 6.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor 2020-2026

No.	Uraian Indikator Makro	Satuan	Capaian					Target 2026)*
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	-0,41	3,76	5,65	5,1	4,80	5,58
2	PDRB per Kapita (AdhB)	Juta Rupiah	44,1	45,92	49,76	53,24	53,24	56,54
3	Kontribusi PDRB Kota Bogor terhadap Provinsi Jawa Barat	%					34,7	2,16
4	Tingkat Kemiskinan (%)	%	6,68	7,24	7,1	6,67	6,53	5,95
5	Indeks Gini Rasio	Angka	0,412	0,441	0,43	0,464	0,46	0,45
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,11	76,59	77,17	77,85	79,03	81,22
7	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	NA	NA	NA	NA	NA	0,71
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	NA	58.6	64.29	58,4	59,34	58,09
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13	7,99

Sumber: *) BA Penyepakatan Target 2025 dengan Provinsi Jawa Barat
Hasil analisis Tim KEMD Bapperida, 2024

6.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bogor yang ditetapkan dalam RPD Kota Bogor tahun 2025-2026 untuk memberikan pemahaman yang sama pada seluruh pemangku kepentingan, maka setiap indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Bogor tahun 2025-2026, dapat dijelaskan pengukurannya sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Bogor

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun	
				2025	2026
1	Indeks Pendidikan	Angka	NA	73,28	73,35
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	NA	54,70 - 54,73	55,29 - 55,33
3	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan	Angka		58,87	58,92

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun	
				2025	2026
4	Harapan lama Sekolah	Tahun	13,45	13,53	13,54
5	Rerata Capaian Pembelajaran (Average Harmonized Test Scores)	Angka		74,28	74,35
6	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka		62,91	63,11
7	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%		7,85	8,63
8	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka		65,87	65,71
9	Indeks reformasi Birokrasi	Angka	90,36	90,38	90,4
10	Indeks SPBE	Angka	4,08	4,09	4,1
11	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka		70	70
12	Nilai hasil survey penilaian integritas	Angka		77,83	78,12
13	Indeks Berakhlak	Angka		74,6	76,1
14	Indeks Pelayanan Publik	Angka		4,65	4,66
15	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP
16	SAKIP Tingkat Kota	Predikat		BB (77,50)	BB (78,25)
17	Tingkat Maturitas SPIP	Predikat	Level 3	Level 3 (3,330)	Level 3 (3,335)
18	Predikat Kota Sehat	Predikat	-	Swastisaba Wistara	Swastisaba Wistara
19	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan	%		52,4	53,62
20	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	72,33	72,8	73,8
21	Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	6,07	6,27	6,49
22	Indeks Resiko Bencana	Angka		58,03	58,02
23	Indeks Kesehatan	Angka	NA	86,05	86,37
24	Umur Harapan Hidup	Tahun	75,8	75,93	76,14
25	Prevalensi Stunting (Data BPB)	Angka		2,3	2,25
26	Prevalensi Stunting	Angka		15,93	14,97
27	Penurunan Intensitas Emisi GRK	(Ton CO2Eq/Miliar)		0,38	0,71
28	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	59,34	57,84	58,09
29	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	(Ton CO2Eq)		21.798,45	35.147,05
30	Indeks kualitas udara	Angka	86,51	55,63	56,03
31	Indeks Kualitas Air	Angka	50,89	71,3	71,5
32	Indeks kualitas Tutupan lahan	Angka		38,81	38,88
33	Gini Rasio	Angka	0,47	0,46	0,45
34	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Angka	5,15	5,58	5,58
35	Indeks Ekonomi Hijau	Angka		66,6	66,65
36	Indeks akses keuangan daerah (IKAD)	Angka		6,76	6,8
37	Angka Kemiskinan	%	6,53	6,44	5,95
38	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,13	8,13	7,99
39	Laju PDRB sektor Jasa akomodasi dan Makan Minum (ADHB)	Angka		5,19	5,27
40	Laju PDRB Sektor Perdagangan	Angka		19,02	18,97
41	Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan	Angka	2,45	18,70	18,74

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun	
				2025	2026
42	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)	%		34,7	34,76
43	Indeks Ketahanan Pangan	Angka		69,14	71,65
44	Tingkat Inflasi	%	1,75	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
45	Kapasitas fiskal daerah	Angka		2	2
46	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka		80,9	81,21
47	IDSD (Pilar Infrastruktur)	Angka		4,73	4,75
48	Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)	Angka		0,59	0,58
49	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	90,05	90,04	90,05
50	Persentase ketercapaian rencana struktur ruang	%	51,47	52,47	53,47

6.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator kinerja kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicator* (KPI) atau dikenal juga sebagai **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan. Target capaian indikator kinerja kunci yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 6.3. berikut.

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Bogor

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
I	Aspek Geografi dan Demografi		
1	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/Kapita	
2	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	
3	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	71,65
4	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	58,09
6	Indeks Kualitas Air	Angka	71,5
7	Indeks Kualitas Udara	Angka	56,03
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	38,88
9	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6,49
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Kg/Orang	
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	
12	Indeks Risiko Bencana	Angka	58,02
13	Penurunan Emisi GRK	Ton CO2 eq per Miliar Rupiah	0,71
14	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,23

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
16	Rasio Penduduk	%	
17	Kepadatan Penduduk	Orang/Km2	
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,86
2	Tingkat Kemiskinan	%	6
3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita	Rp Juta	59,36
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,99
5	Indeks Gini	Angka	0,45
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	80,49
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,14
8	Indeks Keluarga Sehat	Angka	
9	Prevalensi Stunting	%	2,25
10	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,83
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,54
12	Angka Literasi	%	
13	Angka Numerasi	%	
14	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	81,21
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	55,29 - 55,33
18	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	71,59
19	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	
20	Indeks Pembangunan Gender	Angka	76,05
21	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,65
22	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	65,71
III	Aspek Daya Saing Daerah		
1	Angka Ketergantungan	%	42,6
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	18,67
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	10,21
4	Rasio Kewirausahaan	%	
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,2
6	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	
7	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	66,65
8	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	%	34,76
9	Ekspor Barang dan Jasa	Rp,	
10	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	6,75
11	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	53,62
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	
13	Tingkat Inflasi	%	1,5 - 3,5
IV	Aspek Pelayanan Umum		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	90,4
2	Indeks Reformasi Hukum	Angka	
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	4,2
4	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,66
5	Nilai SPI	Angka	78,12
6	Persentase Penegakan Perda	%	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
7	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	6,75
PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	56,44
2	Angka partisipasi sekolah	Persen	99,5
3	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	100
4	Angka Partisipasi Murni		
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persen	98,5
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persen	81,58
7	Angka Partisipasi Kasar		
a	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	112
b	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persen	128,5
c	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	Persen	100
d	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	Persen	94
12	Angka Putus Sekolah		
a	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	0,02
b	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	0,02
c	Angka kelulusan		
d	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100
e	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100
18	Angka Melanjutkan (AM):		
a	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	100
20	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	100
21	Fasilitas Pendidikan:		
22	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	99,3
23	Sekolah pendidikan SMP/MTs	Persen	99
24	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	46
25	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	34
26	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio	0,06
27	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP	Rasio	0,06
28	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	100
29	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,98
30	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (Tidak buta aksara)	Persen	98,4
31	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	93,4
32	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Angka	72,5
33	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Angka	103
34	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Angka	93,8
35	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Angka	85
KESEHATAN			
1	Rasio Kematian Ibu per 100,000 Kelahiran Hidup	Angka	85,46
2	Rasio Kematian Bayi per 1,000 kelahiran hidup	Angka	6,5
3	Rasio Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Angka	7,3

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	1,85
6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100
7	Persentase Nakes yang Mempunyai STR (Surat Tanda Registrasi)	Persen	100
8	Rasio Puskesmas Per 30.000 penduduk	Per 30.000 penduduk	0,68
9	Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100
10	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100
11	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	106,31
12	Non Polio AFP rate per 100,000 penduduk	non polio AFP rate	22
13	Cakupan pneumonia balita yang ditangani	Persen	100
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100
15	Prevalensi Hipertensi	%	9,8
16	Prevalensi Diabetes Militus	%	2,3
17	Persentase kesembuhan TB Paru	Persen	39,53
18	Angka Kesakitan akibat DBD (per 100,000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	98
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100
20	Angka bebas jentik nyamuk DBD	Persen	96,04
21	Persentase penemuan penderita diare pada balita	Persen	100
22	Persentase desa/kelurahan yang berpotensi mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100
23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	0,46
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	102,48
25	Persentase Puskesmas dengan penilaian kinerja Baik (> 80)	%	100
26	Persentase Layanan Sistem Rujukan Konseling dan Call Center 24 Jam*(Program Unggulan Walikota)	%	100
27	Persentase Masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional*(12 IKS)	%	105,08
28	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	100
29	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu Hamil sesuai standar *(SPM)*IKU	Persen	100
30	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan Ibu Bersalin sesuai standar*(SPM)*IKU	Persen	100
31	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar*(SPM)	Persen	100
32	Pelayanan kesehatan balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar *(SPM)	Persen	100
33	Persentase Komplikasi Kebidanan yang dideteksi dan ditangani	Persen	110,9
34	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	100
35	Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	100
36	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100
37	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100
38	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
39	Rasio daya tampung Rumah sakit terhadap jumlah penduduk	persen	0,34
40	Persentase Rumah sakit Rujukan tingkat Kabupaten / Kota yang terakreditasi	persen	100
41	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	persen	103,38
42	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan ibu bersalin	persen	103,2
43	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	persen	104,15
44	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	persen	100
45	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100
46	Persentase orang usia 15-59 mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100
47	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	persen	100
48	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100
49	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	100
50	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	persen	100
51	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	persen	100
52	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	persen	100
PEKERJAAN UMUM			
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	93,58
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0,22
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	Persen	90,05
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	Meter	157,65
5	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	7,59
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	69,33
7	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persen	23
8	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Lokasi	1424,93
9	persentase irigasi kota dalam kondisi baik	Persen	55,74
10	Rasio jaringan irigasi	Point	0,41
11	Persentase saluran/ sungai yang ber kondisi baik	Persen	88,63
12	persentase penduduk berakses air minum	Persen	83,47
13	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,perkotaan dan perdesaan	persen	83,47
14	persentase areal kawasan kumuh kewenangan kota	Persen	1,61
15	tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	34,12
16	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Persen	10,34
17	rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	1,58
PENATAAN RUANG			
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	persen	4,27
2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	0,01

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
3	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	persen	92,84
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	rasio rumah layak huni	persen	22,38
2	rasio pemukiman layak huni	persen	91,83
3	cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	95,2
4	persentase lingkungan pemukiman kumuh kewenangan kota	persen	1,63
5	persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (kewenangan kota, provinsi, pusat)	persen	2,85
6	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	persen	0,71
7	cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	persen	99,9
8	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota	Persen	100
9	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota	Persen	100
10	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani	Persen	54,67
11	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)	Persen	5,34
12	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	Persen	13,3
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	rasio (RT/linmas)	1049
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	100
3	Persentase Penegakan PERDA	persen	100
4	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	persen	60
5	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Kebakaran dan Bencana	persen	60
6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	≤15
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jiwa	45709,31
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jiwa	4440,38
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	14534,26
10	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	persen	100
11	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	persen	100
12	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100
13	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	persen	95
SOSIAL			
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	Persen	100
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	100
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	100
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	Persen	42
5	Persentase pusat kesejahteraan sosial (puskesmas) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	Persen	100
9	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	persen	100
10	Persentase korban bencana alam dan sosial yg kebutuhan dasarnya terpenuhi pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten / Kota	persen	100
TENAGA KERJA			
1	Tingkat Kesempatan kerja (%)	%	93,03
2	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pasar kerja	Orang	6582,16
3	Jumlah Pekerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan	Orang	325645,7
4	Penetapan besaran UMK	Rupiah	5349506,02
5	Persentase Kasus Ketenagakerjaan yang terfasilitasi	%	100
6	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja (%)	Juta/Pekerja/Tahun	77,96
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Tenaga kerja	120
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Tenaga kerja	50
9	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	87,38
10	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	19,57
11	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Angka	79,75
12	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan	Persen	76,1
13	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/ Kota	Persen	95,5
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2,2
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota Bogor	Persen	26
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	
4	Rasio KDRT	Persen	0,6
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	49,01
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu,	Persen	100
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	35
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum	persen	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100
12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100
13	rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	102,59
14	rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	96,3
15	rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	93,2
16	rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen	
17	Persentase ARG pada Belanja langsung APBD	poin	15,5
18	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten /kota	poin	0,03
19	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	poin	0,01
PANGAN			
1	Ketersediaan pangan utama	kg/kap/tahun	165
2	Ketersediaan energi perkapita	kkal/kap/hr	2504,53
3	Ketersediaan protein perkapita	gram/kap/hr	83
4	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	93,64
PERTANAHAN			
1	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	100
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin yang diterbitkan	persen	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	persen	91
LINGKUNGAN HIDUP			
1	Tersusunnya RPPLH kota	ada/tidak	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	ada/tidak	Ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kota	ada/tidak	Ada
4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Poin	52,45
5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Poin	87,5
6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	61,74
7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	pelatihan	ada
8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak	ada
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditindaklanjuti,	Persen	100
10	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	83,1
11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	8,13
12	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	91,47
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten / Kota	Poin	61,7
14	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten / Kota	Poin	82,56
15	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan , ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Persen	61,74

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	1 : 1
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	1 : 1
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	1 : 1
4	Ketersediaan database kependudukan skala Kota	ada/tidak	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/ belum	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	99
8	Kepemilikan KTP	Persen	100
9	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Persen	100
10	Cakupan pasangan non muslim berakte kawin	Persen	64,08
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	LPM	80
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelompok	80
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,9
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	1,76
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan melalui Kampung KB	Persen	54,78
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	54
5	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	17
6	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan	Jumlah	1
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah	2
8	Ratio Akseptor KB	Persen	68
9	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	70
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1,000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Persen	8,62
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,1
12	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	persen	12,5
13	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	20,58
14	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	68,8
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	97
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	75,44
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	72,06
18	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Jumlah	2
19	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	89,03
20	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan	Persen	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
	pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk		
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	persen	74,29
22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100
23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100
24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	persen	100
25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	1
26	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100
27	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	persen	61,12
28	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21
29	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	Persen	69,28
30	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	12,5
PERHUBUNGAN			
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	117513298,6
2	Rasio ijin trayek	rasio (/Jml Pddk)	43
3	Jumlah uji kir angkutan umum	kendaraan	5674
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	unit terminal bis	2
5	Persentase layanan angkutan darat	persen	1,1
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	100
7	Pemasangan rambu-rambu	persen	100
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	1,76
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	penumpang	37460953,69
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga /bandara/terminal	penumpang	7858568,95
11	Rasio konektivitas Kabupaten / Kota	rasio	0,86
12	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota	rasio	0,67
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	96
2	Hasil Penilaian SPBE	Indeks	4,1
3	Persentase data urusan pemerintah daerah Kota Bogor yang terintegrasi	persen	50
4	Persentase Keterbukaan Informasi publik	persen	100
5	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	persen	100
6	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	persen	100
7	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran publik, untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	persen	100
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
1	Persentase Koperasi Aktif	persen	27,05

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
2	Persentase Koperasi berkualitas	persen	12,38
3	Jumlah UMKM (wirausaha) baru	UMKM	579,61
4	Peningkatan omzet Usaha Mikro Per Tahun	Milyar Rupiah	176,71
5	Jumlah PKL yang direlokasi	PKL	720,61
6	Jumlah PKL yang naik status menjadi UMKM	PKL	215
7	Jumlah jenis produk ekonomi kreatif yang terserap pasar	Produk	210
8	Prosentase rekomendasi pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	%	82
9	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Angka	110
10	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Angka	440
PENANAMAN MODAL			
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	trilyun rupiah	2,23
2	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	0,75
3	Persentasi peningkatan investasi di Kabupaten / Kota	persen	20
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
1	Persentase Penurunan jumlah Pemuda Pengguna Narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras	Persen	5
2	Persentase Pemuda Pelopor yang aktif menggerakkan kegiatan kepemudaan	Persen	22
3	Wirausaha muda	orang	180
4	Persentase sarana prasarana Olahraga yang tersedia sesuai dengan standar nasional/lokal	Persen	65
5	Rasio ketersediaan SDM Tenaga keolahragaan	Rasio	0,0045 : 2,08
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	3,2
7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	33,45
8	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	155
STATISTIK			
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada
2	Data basis pembangunan daerah	ada/tidak	ada
3	Buku "Kota Bogor Dalam Angka"	ada/tidak	ada
4	Buku "PDRB"	ada/tidak	ada
5	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	persen	100
6	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	persen	100
PERSANDIAN			
1	Persentase Unit Kerja melaksanakan pola hubungan komunikasi sandi dengan email daerah	persen	100
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	persen	87,12
KEBUDAYAAN			
1	Presentase peningkatan jumlah generasi muda pelaku seni/budaya	Persen	97,8
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	cagar budaya non bangunan	38
3	jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggiri/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	buah	58
4	Persentase peningkatan jumlah cagar budaya, museum dan pelaku pelestarian budaya	Persen	1
PERPUSTAKAAN			

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	pemustakaan	125305,49
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks	85493,14
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	perpustakaan	0,63
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	pemustaka	125305,49
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	41686,84
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	38
KEARSIPAN			
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	OPD	82,43
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	100
PARIWISATA			
1	Kunjungan wisata	Orang	8985899,16
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	1-2 hari
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	430641250363
PERTANIAN			
1	Produktivitas padi per hektar	ton/ha	7,3
2	Cakupan bina kelompok petani	persen	93,8
3	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-3,25
4	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	13,15
PERDAGANGAN			
1	Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor	persen	12
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan (IUUP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko/ swalayan)	persen	84,94
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	persen	74
5	Persentase alat-alat ukur,takar, timbang dan perlengkapan nya (UTTP) Bertanda tera sah yang berlaku	persen	58,33
PERINDUSTRIAN			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	100
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	persen	29,08
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang yang ditetapkan dalam RPIP	persen	16
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	persen	20
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah ijin usaha kawasan industri (IUKI) dan ijin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten / Kota	persen	20
7	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	persen	75
KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Produksi Ikan Konsumsi	ton	2059,48
2	Jumlah Konsumsi Ikan	kg	33181123,81

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
3	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) wilayah kabupaten/kota (sumber data: One data KKP)	Ton	3874,88
FOKUS PENUNJANG URUSAN			
PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	persen	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	persen	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	80
8	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	-
9	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	-
10	Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	2
11	Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	-
12	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	persen	98
13	Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	persen	100
14	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	persen	80
Inspektorat Daerah (Perencanaan dan Keuangan)			
1	Maturitas SPIP	predikat	Level 3 (3,335)
2	Peningkatan kapabilitas APIP	predikat	Level 3
KEUANGAN			
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	predikat	WTP
2	Persentase SILPA	persen	2,2
3	Persentase SILPA terhadap APBD	persen	2,2
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	persen	0
5	Persentase belanja pendidikan (20%)	persen	≥20
6	Persentase belanja kesehatan (10%)	persen	≥10
7	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat waktu
8	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	persen	82,55
9	Opini Laporan keuangan	predikat	WTP
10	Devisiasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	persen	1,5
11	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD setahun sebelumnya	prersen	2,5
12	Devisiasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	persen	0,5
13	Manajemen Aset		
14	Adanya Daftar Aset Tetap	predikat	Ya
15	Penyusunan Manual daftar aset tetap	predikat	Ya
16	Adanya proses inventarisasi aset tahunan	predikat	Ya
17	Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	predikat	Ya

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT			
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	50
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	158
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	persen	45
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	35
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	150
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	5615
7	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	58
8	Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	25
9	Rasio pegawai fungsional bersertifikat kompetensi (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	persen	80
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	persen	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	100
3	Penerapan SIDA:		
4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah,	persen	100
5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah,	persen	99
PENGAWASAN			
1	Persentase pelanggaran pegawai	persen	0
2	Persentase tindak lanjut temuan internal	persen	90
3	Persentase tindak lanjut temuan eksternal	persen	91
4	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	persen	91,5
SEKRETARIAT DPRD			
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak	ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak	ada

BAB 7

PENUTUP

RKPD Kota Bogor Tahun 2026 merupakan implementasi tahun pertama dari penjabaran Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029. RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan daerah Tahun 2026 yang menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bogor, Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota, serta sebagai perwujudan dari komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk berkontribusi dalam menjaga konsistensi pencapaian Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2026, sinergi dengan pencapaian target Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029 serta mengacu pada isu strategis, permasalahan dan pendekatan kewilayahan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD 2026 dan untuk mewujudkan sinergitas kinerja Pembangunan Daerah Kota Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat oleh semua pihak yang terkait, maka ditetapkan pedoman pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor beserta pelaku pembangunan di Kota Bogor, berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 secara sinergis dan terintegrasi;
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran juga kontribusi dari dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi perlu terus dioptimalkan dan didorong untuk dapat berperan secara maksimal sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan daerah;
3. RKPD dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya ke dalam dokumen RAPBD Tahun 2026 hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Bogor;
4. Dalam rangka Sinkronisasi, Sinergitas, Harmonisasi dan Integrasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, yang pendanaannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Renja Perangkat Daerah sesuai

dengan juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi/Instansi lainnya;

7. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah, sehingga aspirasi dan kepentingan Masyarakat dapat terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Oleh karena itu, atas usulan masyarakat tersebut harus dilakukan pengawalan secara seksama, sehingga aspirasi dari masyarakat dapat diwujudkan dalam Pembangunan di Kota Bogor;
8. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 302 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Demikian dokumen RKPD ini disusun dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis.

WALI KOTA BOGOR,

TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Salinan sesuai dengan aslinya

